



**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2021**



BAPPPEDA SIJUNJUNG



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Muaro;

MEMUTUSAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan di daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan RKA-PD.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	: PENUTUP

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2021

Pasal 3

- RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 dijadikan sebagai:
- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD;
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS; dan
 - c. pedoman bagi stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

PD dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2021 mengacu kepada Dokumen RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan uraian tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 6 Juli 2020

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR.....²⁸

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM



KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

RKPD ini merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai bahan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah (Renja-PD), pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(RAPBD) Kabupaten Sijunjung.

Penyusunan RKPD Tahun 2021 telah melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD, telaahan terhadap rancangan awal Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Konsultasi Publik, penyusunan rancangan RKPD, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan Reviu RKPD, Fasilitasi oleh Gubernur serta penetapan RKPD.

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada Tim penyusun RKPD Tahun 2021 dan seluruh stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Muaro Sijunjung, 06 Juli 2020

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIJUNJUNG,

BENNY DWIFA YUSWIR, S.STP, M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19860113 200412 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.3.1. Keterkaitan RKPD Kabupaten Sijunjung dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP	I-7
1.3.2. Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD	I-18
1.4. Maksud dan Tujuan	I-27
1.4.1. Maksud	I-27
1.4.2. Tujuan	I-27
1.5. Sistematika Penyusunan	I-28
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-56
2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-84
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II-84
2.3.2. Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah	II-87
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-5
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan	III-14

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan RPJMD	III-13
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan RKPD	III-16
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV-6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
5.1. Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan	IV-6
4.2. Program dan Kegiatan Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dari Dampak <i>Corona Virus Disease 19 (Covid-19)</i>	
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama	VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah	V-2
BAB VII PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	I-2
Tabel 1.2	Kesesuaian Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Nasional, Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2021 dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	I-8
Tabel 1.3	Persandingan Arah Kebijakan RPJPD 2005 - 2025 dengan Sasaran dan Strategi RPJMD 2016 – 2021	I-19
Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung	II-2
Tabel 2.2	Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-3
Tabel 2.3	Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten	II-5
Tabel 2.4	Perkembangan Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-5
Tabel 2.5	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-6
Tabel 2.6	Kasus bencana Alam di kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020	II-10
Tabel 2.7	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-11
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015-2019 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Persen) Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Terhadap Tahun 2010	II-11
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	II-12
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	II-12
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-14
Tabel 2.12	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-15
Tabel 2.13	Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year on Year Kota Padang dan Kota Bukittinggi Bulan Desember 2019 (Persen)	II-15
Tabel 2.14	Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019	II-16
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-18
Tabel 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-18

Tabel 2.17	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan kerja dan di Sijunjung Tahun 2015-2019	II-19
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung (Orang) Tahun 2019	II-20
Tabel 2.19	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	II-21
Tabel 2.20	Perbandingan Komponen Indek Pembangunan Manusia Sijunjung, Provinsi dan Nasional Tahun 2019	II-25
Tabel 2.21	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2015-2019	II-26
Tabel 2.22	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pendidikan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-27
Tabel 2.23	Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019	II-28
Tabel 2.24	Rasio Fasilitas Kesehatan, Dokter dan Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019	II-29
Tabel 2.25	Perkembangan Indkator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019	II-30
Tabel 2.26	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019.	II-32
Tabel 2.27	Perkembangan Urusan Ketemtraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 – 2019	II-33
Tabel 2.28	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-34
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-35
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-35
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-35
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-36
Tabel 2.33	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-37
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-37
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-38
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-38
Tabel 2.37	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-39

Tabel 2.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019	II-40
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-41
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-42
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Lama Proses Perizinan dan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-42
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-43
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Urusan Urusan Statistik Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-44
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-45
Tabel 2.46	Perkembangan Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2015-2019	II-46
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-46
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-47
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-47
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pertanian di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-48
Tabel 2.51	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019	II-49
Tabel 2.52	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sijunjung, Tahun 20143-2019	II-49
Tabel 2.53	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan PUsuran Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019	II-50
Tabel 2.54	Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-51
Tabel 2.55	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-52
Tabel 2.56	Perkembangan Cakupan Layanan Energi Listrik dan Telekomunikasi di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019	II-53
Tabel 2.57	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-53
Tabel 2.58	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-53
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-57

Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-79
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-61
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-62
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sampai dengan RKPD Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-63
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-64
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-65
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-66
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-56
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-67
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-67
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-68
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-69
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-69
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-70
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-71
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-71

Tabel 2.76	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-72
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaaan dan Olahraga Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-72
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Urusan Statistik Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-73
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Urusan Persandian Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-74
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-74
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-75
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-75
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-76
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-77
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-77
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-78
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-79
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-79
Tabel 2.89	Capaian Kinerja Urusan Fungsi Perencanaan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 – 2021	II-80
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Urusan Fungsi Keuangan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-80
Tabel 2.91	Capaian Kinerja Urusan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-81
Tabel 2.92	Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-82
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya Sampai dengan RKPD Tahun 2020 terhadap Target Akhir RPJMD 2016 - 2021	II-83

Tabel 2.14	Rekapitulasi Status Capaian Indikator Kinerja Program sampai Tahun 2020	II-94
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen)	III-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)	III-3
Tabel 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)	III-5
Tabel 3.4	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021	III-6
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2020-2021	III-9
Tabel 3.6	Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung	III-12
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2019 dan Proyeksi Tahun 2021	III-15
Tabel 3.8	Realisasi Belanja 2018-2020 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021	III-16
Tabel 3.9	Realisasi Pembiayaan 2018-2020 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021	III-17
Tabel 3.10	Proyeksi Pendapatan di RPJMD dan Proyeksi Pendapatan di RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	III-17
Tabel 3.11	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020	III-18
Tabel 3.12	Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2019	III-19
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja di RPJMD dan Proyeksi Belanja di RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	III-20
Tabel 3.14	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018-2020	III-20
Tabel 3.15	Proyeksi Pembiayaan di RPJMD dan Proyeksi Pembiayaan di RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	III-22
Tabel 3.16	Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2020	III-22
Tabel 3.17	Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019	III-23
Tabel 3.18	Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca	III-23
Tabel 3.19	Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015–2019 (%)	III-24
Tabel 4.1	Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021	IV-4
Tabel 4.2	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-5
Tabel 4.3	Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera	IV-9
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung	IV-10
Tabel 4.5	Target Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sijunjung	IV-11
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Sumatera Barat	IV-14

Tabel 4.7	Hubungan antara Prioritas Pembangunan RJMD dan RKPD	IV-15
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung	V-16
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021	V-1
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	V-3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2021	VI-1
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2021	VI-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung Provinsi se Sumatera, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019 (Persen)	II-15
Grafik 2.2	Gini Ratio Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-17
Grafik 2.3	Perbandingan Indek Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi se Sumatera, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019	II-17
Grafik 2.4	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi se Sumatera, Nasional dan Kabb/Kota Tahun 2019 (Persen)	II-18
Grafik 2.5	Perkembangan Tingkat TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-19
Grafik 2.6	Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/kota Tahun 2019	II-20
Grafik 2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-22
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019	II-22
Grafik 2.9	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-23
Grafik 2.10	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-23
Grafik 2.11	Perkembangan Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019	II-24
Grafik 2.12	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sijunjung (metode baru) Tahun 2015-2019 (Rp. ribu)	II-24
Grafik 3.1	Proporsi Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019 (Persen)	III-19
Grafik 3.2	Proporsi Belanja Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019 (%)	III-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD	I-1
Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-8
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	II-1
Gambar 2.2 Pertemuan Tiga Sungai (Batang Ombilin, Sukam dan Batang Kuantan)	II-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Supaya pembangunan tersebut mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan daerah menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah suatu wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, perencanaan pembangunan nasional harus bisa menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro untuk menjadi dasar oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan daerah yang lebih spesifik.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan,

kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada subtransi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 disusun dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Dan memperhatikan Rancangan RKP, Rancangan RKPD Provinsi serta mempertikan isu-isu aktual yang berkembang di tingkat daerah dan nasional.

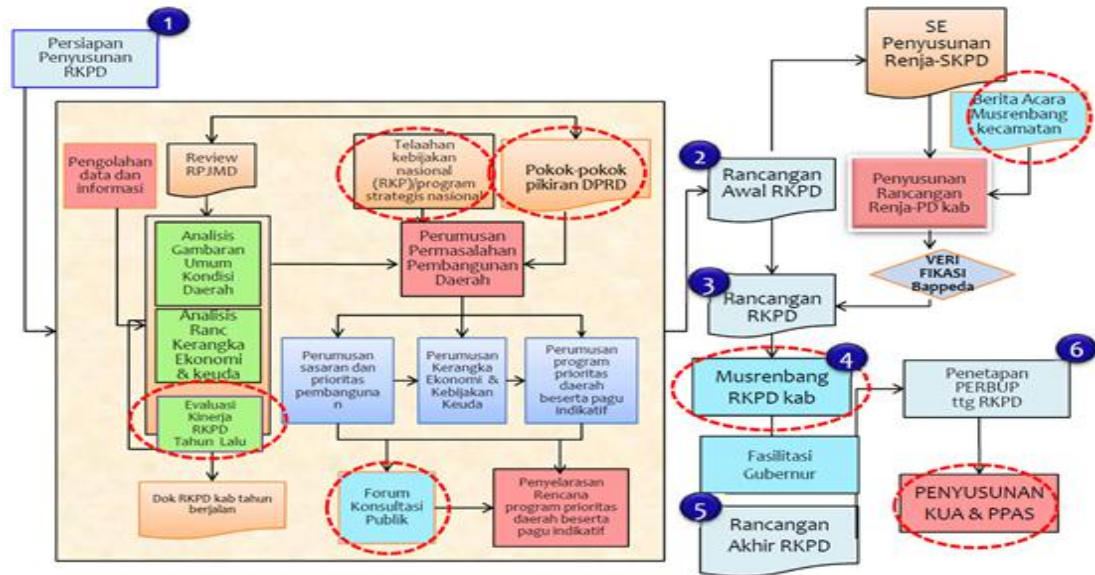
Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 ini, mengacu pada pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Masing-masing tahapan dapat dilihat pada dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	Tanggal
I.	Persiapan Penyusunan RKPD	
1.	Pembentukan SK Tim penyusun RKPD	10 s.d 31 Desember 2019
2.	Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan RKPD	11 s.d 13 Desember 2019
3.	Orientasi, penyusunan agenda Tim dan Penyiapan Data Informasi Perencanaan	10 s.d 31 Desember 2019
II.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD	
1.	Musrenbang RKP Nagari/Desa	1 s.d 30 Juni 2019
2.	Penyampaian Surat Edaran (SE) tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja PD	14 Januari 2020
3.	Sosialisasi Teknis Input DU RKP Nagari/Desa	22 s.d Januari 2020
4.	Input Daftar Usulan RKP Nagari/Desa ke https://plan.sijunjung.go.id	24 s.d 30 Januari 2020
5.	Input Rancangan Awal Renja PD ke https://plan.sijunjung.go.id	24 s.d 29 Januari 2020
6.	Input Pokok-Pokok Pikiran DPRD ke https://plan.sijunjung.go.id	24 dan 30 Januari 2020
7.	Perumusan Rancangan Awal RKPD meliputi:	1 Januari s.d 8 Februari 2020
9.	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	12 Februari 2020
10	Penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada Kepala Daerah	14 Februari 2020
III.	Penyusunan Rancangan RKPD	
1.	Musrenbang Kecamatan	19 s.d 28 Februari 2020

No	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	Tanggal
2.	Perbaikan dan input Rancangan Awal Renja-PD di https://plan.sijunjung.go.id	2 s.d 9 Maret 2020
3.	Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah	12 s.d 13 Maret 2020
4.	Verifikasi Rancangan Awal Renja-PD	19 s.d 23 Maret 2020
5.	Perbaikan dan input Rancangan Renja-PD di https://plan.sijunjung.go.id	19 s.d 26 Maret 2020
6.	Musrenbang online/tanpa tatap muka RKPD Kabupaten	31 Maret 2019
IV. Rancangan Akhir RKPD		
1.	Reviu Rancangan Akhir RKPD oleh APIP	15 April 2020
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk di Fasilitasi	29 Juni 2020
3.	Fasilitasi RKPD	2 Juli 2020
V Penetapan Perkada RKPD		
1.	Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur Sumatera Barat melalui Bappeda Provinsi Sumatera Barat	2 s.d 5 Juli 2020
2.	Penyampaian Perkada RKPD ke Bupati	6 Juli 2020
3.	Penetapan RKPD oleh Bupati	6 Juli 2020

Pada tahapan persiapan penyusunan RKPD tahun 2021 telah melalui tahapan-tahapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 seperti tahapan persiapan yaitu: analisis gambaran umum kondisi Daerah; analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; analisis kapasitas riil keuangan Daerah; penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan terhadap sasaran RPJMD; penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional; penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Tahapan ini dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD

Secara substansi isi dari RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun yang menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika RKPD ini mencakup Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan Penutup.

Pada bagian pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berisikan informasi umum tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RKPD.

Gambaran umum kondisi umum daerah menggambarkan kondisi umum daerah Kabupaten Sijunjung, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 sampai tahun erjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan RPJMD. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD meliputi:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan serta tahun perencanaan. Kerangka ekonomi daerah dilihat dari capaian indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara untuk melihat keuangan daerah dapat dilakukan dengan analisis sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan baik yang terkait dengan perekonomian maupun yang terkait dengan keuangan daerah.

Pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah termuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah provinsi dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Rencana kerja dan pendanaan dan perkiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dalam RPJMD 2016-2021 yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain antara lain melalui peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Untuk mengukur kinerja, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 perlu ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

Untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas, efektif dan efisien telah dilakukan beberapa inovasi dalam penyusunan RKPD tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrenbang telah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 114 Tahun 2016 Tentang pedoman Pembangunan Desa. Musrenbang di tingkat Kecamatan membahas Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (DU-RKP Nagari) yang telah di input kedalam <https://plan.sijunjung.go.id>. Salah satu syarat kecamatan dapat melakukan musrenbang jika semua nagari/desa di kecamatan tersebut telah melakukan input DU-RKP. Pembahasan DU RKP Nagari pada Musrebang kecamatan didampingi langsung oleh Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan didampingi langsung oleh tenaga pemdamping desa/nigari.
2. Pembahasan Renja Perangkat Daerah pada Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah dikelompokkan berdasarkan urusan, sehingga menghasilkan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah, program dan kegiatan yang memerlukan lintas perangkat daerah.
3. Untuk penentuan pagu indikatif program/kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan pembahasan realisasi capaian program dan kegiatan tahun 2019 sampai triwulan II tahun 2020, pembahasan terhadap target RPJMD yang akan dicapai oleh perangkat daerah pada tahun 2021 (akhir periode RPJMD 2016-2021).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa .
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
 17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 201-2030;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Muaro;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, selanjutnya disingkat dengan RKPD Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD

Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RPJP Daerah. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.3.1. Keterkaitan RKPD Kabupaten Sijunjung dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP

Keterkaitan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan RKP tahun 2021 adalah menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Selanjutnya, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2021 diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas provinsi dan nasional, dengan prioritas pembangunan dan program pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021. Prioritas provinsi dan nasional tahun 2021 tidak sama persis dari sisi nomenklatur dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2021, namun secara substansi selaras antara provinsi, nasional dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 1.2
Kesesuaian Prioritas Provinsi Sumatera Barat, Nasional, Program Prioriotas Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2021 dengan
Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

[illegible]

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
					6. Program Peningkatan Usaha Perdagangan Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna Industri Kecil dan Menengah 7. Program Peningkatan Promosi, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyediaan dan pengolahan air baku 4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar	1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 2. Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 3. Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum 4. Program Pengelolaan Limbah
		Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Perlindungan dan konservasi SDA 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut 4. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	-	-
		Pengembangan pariwisata, industry, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi	Pengembangan kewilayahan industri 1. Pengembangan industri kecil dan menengah 2. Peningkatan Kualitas Produk Industri 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 4. Peningkatan dan pengembangan daya koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM 6. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	1. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 5. Pariwisata

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
			7. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri		6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
		Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan kesempatan kerja dan diversifikasi usaha 3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan 4. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Prasarana Laboratorium 5. Perlindungan tenaga kerja dan system pengawasan tenaga kerja	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial 3. Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan& Menjamin Pemerataan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal.	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial 3. Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Potensi Lokal dan Sentra
		Peningkatan Produksi untuk Mendukung	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	Membangun ketahanan pangan	1. Program Peningkatan Pemasaran dan Agribisnis Perikanan 2. Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
		Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis			3. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian 4. Program Penjaminan Produk Hewan yang Asuh dan Berdaya Saing 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan 7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat	1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 14. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Pelayanan BLUD 17. Standarisasi pelayanan kesehatan	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Derajat	1. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 2. Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Program Upaya Kesehatan 5. Program Pencapaian Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular 8. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 9. Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian, Makanan dan Minuman 10. Program Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12. Program Penyehatan Lingkungan 13. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 14. Program Peningkatan Mutu Pelayanan

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
			18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 19. Peningkatan Perlindungan Perempuan 20. Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 22. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak		Kesehatan 15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD 16. Program Pengendalian Penduduk 17. Program Keluarga Berencana 18. Program Pembangunan Keluarga 19. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 20. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
		Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Pendidikan dan Kependidikan 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peningkatan kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Program Pendidikan Inklusif 7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 8. Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter 9. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10.
		Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Pembinaan anak terlantar 5. Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma 6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar 7. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat 8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Ekonomi yang berdaya saing tinggi	1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2. Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial 3. Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 6. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
			dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Pemberdayaan fakir miskin 10. Percepatan Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal 11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Suisila dan Penyakit Sosial Lainnya) 13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Divesifikasi Usaha 18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 20. Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Program Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABSSBK dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3. Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat 6. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya	1. Program Pelayanan Kehidupan Beragama 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3. Kelembagaan Nagari 4. Program Pengembangan Nilai Budaya

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
			8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya 9. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya 11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda 13. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah		
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi 3. Peningkatan sarana prasarana Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 4. Penyediaan dan pengolahan air baku persampahan regional 5. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 7. Pengelolaan dan pengembangan system air limbah 8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 9. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 10. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 12. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Program Preservasi Jalan dan Jembatan 3. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 5. Program Pemutakhiran Data Base Jalan 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7. Program Penguatan dan Normalisasi Sungai

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
		Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandian 3. Peningkatan penyediaan data statistic sectoral	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	1. Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik 2. Program pengembangan <i>e-goverment</i> pemerintah daerah 3. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu 5.
		Meningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Peningkatan kualitas pendidikan	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 6. Pendidikan Inklusif
		Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Keluarga Berencana 3. Program Pembangunan Keluarga 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 5. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 6.
6.	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggula ngan bencana alam	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan.	Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Program Lingkungan Sehat Perumahan 2. Program Penataan Kawasan Perdesaan 3. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong 4. Program Pengelolaan Limbah 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

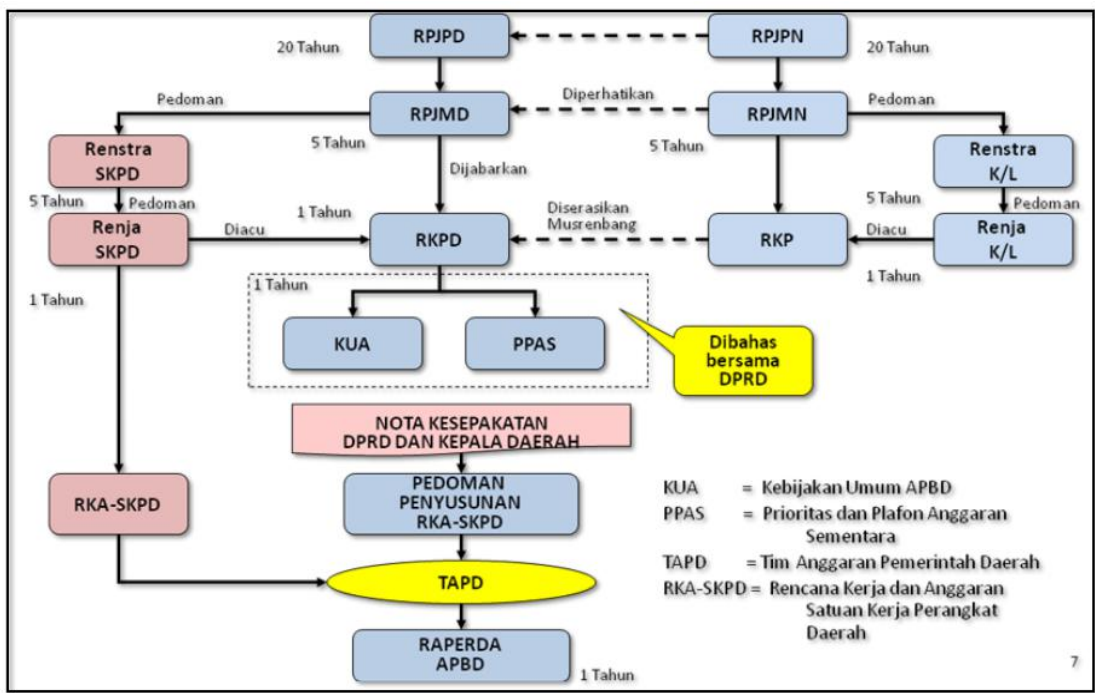
No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
			5. Pengembangan Kinerja Pengolahan Sumber daya Alam 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 7. Pemantapan Kawasan Hutan 8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan 12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 13. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 14. Pengendalian Kebakaran Hutan 15. Peningkatan mitigasi bencana. 16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi bencana 17. Pemetaan daerah rawan kebakaran 18. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya 20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 21. Pemulihan daerah pasca bencana		6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Prioritas Nasional Thn 2021	Prioritas Pemb. Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Program Pembangunan pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Thn 2021	Prioritas Pemba. Kab. Sijunjung Thn 2021	Program Pembangunan Pada RKPD Kab. Sijunjung Thn2021
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 5. Manajemen Perubahan 6. Peningkatan Kelembagaan Daerah Pemerintah daerah 7. Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah daerah 9. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandian 12. Peningkatan penyediaan data statistic sectoral 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keunagan Kabupaten/Kota 16. Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Kabupaten/Kota 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Pembangunan Materi Hukum dan HAM 19. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 20. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 21. Sarana dan Informasi Hukum 22. Peningkatan Penataan Perundang-undangan	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5. Program Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah 7. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 9. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Terhadap RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah. RPJMD sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, RPJMD pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis dan RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunannya, RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi dan hierarkis, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan antara RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2019-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, Perubahan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, RKP dan RKPD Provinsi, seperti terlihat pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan Gambar 1.2, bahwa hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, sebagai berikut: RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. Selanjutnya RKPD sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap PD. RKPD Kabupaten juga sebagai pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

Disamping itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Persandingan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 dengan Sasaran dan Strategi RPJMD 2016-2021

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pengembangan potensi lokal 2. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah 3. Meningkatkan usaha dan standardisasi perdagangan 4. Meningkatkan peran dan fungsi BUMD	1. Peningkatan promosi, pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal 2. Peningkatan kualitas, diversifikasi dan nilai tambah produk unggulan daerah 3. Pengembangan perdagangan daerah 4. Peningkatan pelayanan dan pengawasan kemetrolagian 5. Peningkatan peran dan fungsi BUMD untuk meningkatkan PAD	1. Peningkatan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam perluasan pasar dan daya saing daerah 2. Meningkatkan aktivitas masyarakat dalam mengembangkan usaha dengan menciptakan produk berorientasi pasar 3. Pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang berdaya saing tinggi dengan jangkauan pasar yang makin meluas 4. Melanjutkan sinergi positif dan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat 5. Memantapkan keberlanjutan pembangunan sumber-sumber pertumbuhan dan keterkaitan pembangunan antar wilayah ekonomi serta meminimalkan kesenjangan pembangunan
2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan	1. Penumbuhan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM	
3. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	1. Memberikan perlindungan, jaminan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi PMKS 2. Meningkatkan kesempatan kerja	1. Peningkatan usaha masyarakat miskin dan PMKS 2. Peningkatan pemenuhan hak dasar masyarakat miskin dan PMKS 3. Peningkatan	

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
	dan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja	keterampilan dan kompetensi tenaga kerja 4. Penempatan tenaga kerja 5. Pemantapan hubungan industrial	
4. Meningkatnya kunjungan wisata	1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana objek wisata 2. Mengembangkan SDM dan kelembagaan pariwisata 3. Meningkatkan promosi potensi wisata secara terintegrasi 4. Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam mendukung pariwisata	1. Peningkatan kualitas sarana prasarana objek wisata 2. Peningkatan manajemen pengelolaan wisata 3. Peningkatan promosi dan pengembangan wisata kampung adat, budaya, wisata sejarah serta potensi wisata alam dan wisata religius 4. Peningkatan ekonomi kreatif berbasis seni dan kuliner	
5. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatkan produksi pangan 2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan 2. Peningkatan produksi dan produktivitas pangan utama (padi, daging, ikan, telur) 3. Peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman 4. Peningkatan keamanan bahan pangan	
6. Tumbuhnya usaha pertanian dengan agribisnis terintegrasi	1. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan petani	1. Penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembi bitan, petani, teknologi, penyuluhan dan ketahanan pangan 2. Peningkatan kemitraan antara kelompok tani/ikan dengan perusahaan 3. Peningkatan kapasitas SDM pertanian	1. Penerapan teknologi telekomunikasi dan informasi dalam perluasan dan daya saing produk produk-produk usaha agribisnis dan agro industri rakyat 2. Mengembangkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian yang

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
			berdaya saing tinggi dengan jangkauan pasar yang semakin luas
7. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Meningkatkan pengolahan dan pemasaran komoditi pertanian dan perikanan	1. Peningkatan usaha penanganan panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	
8. Peningkatnya akses dan mutu pendidikan	1. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan PAUD dan lembaga non formal yang lebih terjangkau, merata dan berkualitas 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan SD 3. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan SD 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan SMP 5. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan SMP 6. Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan 7. Meningkatkan mutu layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus	1. Peningkatan mutu, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan PAUD 2. Peningkatan mutu dan kualitas layanan pendidikan non formal 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan SD 4. Peningkatan mutu dan daya saing serta penumbuhan keterampilan abad 21 berbasis 4C (<i>Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation</i>) di SD 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan SMP 6. Peningkatan mutu dan daya saing serta penumbuhan keterampilan abad 21 berbasis 4C (<i>Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, dan Creativity and Innovation</i>) di SMP 7. Peningkatan kompetensi guru melalui workshop, bimtek, pelatihan,	1. Peningkatan SDM, daya saing dan profesionalisme aparatur dalam pemerintahan 2. Mengintegrasikan kehidupan masyarakat dengan sistim pendidikan yang lebih moderen 3. Mengupayakan peningkatan mutu institusi pendidikan sebagai basis pengembangan IPTEK dan IMTAQ 4. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif produktif

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		dan kegiatan lomba-lomba kependidikan 8. Peningkatan mutu layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus	
9. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat	1. Mendorong minat baca masyarakat	1. Penguatan gerakan pemasyarakatan minat baca 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan	
10. Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan peran aktif pemuda di bidang kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan 2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	1. Peningkatan pendidikan dan keterampilan pemuda 2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan 3. Penguatan karakter dan jati diri pemuda	
11. Meningkatnya prestasi olah raga daerah	1. Meningkatkan kemampuan atlet untuk berprestasi	1. Peningkatan sarana dan prasarana olah raga 2. Peningkatan pembinaan dan pelatihan atlet 3. Penguatan kelembagaan organisasi keolahragaan	
12. Meningkatnya pendidikan karakter siswa	1. Meningkatkan satuan pendidikan yang mengembangkan pendidikan karakter 2. Meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang menerapkan budaya sekolah sehat	1. Peningkatan kuantitas satuan pendidikan yang menerapkan budaya karakter 2. Peningkatan kuantitas satuan pendidikan yang menerapkan budaya sekolah sehat	
13. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas dan terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat 2. Mengembangkan kawasan sehat melalui peningkatan peran serta masyarakat	1. Perbaikan tata kelola penyelenggaraan kesehatan 2. Peningkatan dan pemerataan aksesibilitas kesehatan masyarakat 3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan	1. Melanjutkan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, permukiman dan kesehatan 2. Pemeliharaan dan

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		berkualitas terutama bagi keluarga tidak mampu 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan dan pengembangan kawasan sehat	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan dan mutu/tipe rumah sakit 3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang maju dan berkualitas 4. Meningkatkan pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan yang makin membaik
14. Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	1. Meningkatkan kualitas keluarga 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Penurunan Angka Kelahiran Total / <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> 2. Peningkatan peserta KB aktif 3. Peningkatan tahapan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	
15. Meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender	1. Mempercepat Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Memperkuat peran organisasi perempuan dalam pembangunan	1. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) 2. Penguatan kelembagaan organisasi perempuan	
16. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	1. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan secara agresif dan selektif terhadap lokasi vital dan potensial	3. Pembangunan jalan dan jembatan 4. Rehabilitasi jalan dan jembatan 5. Peningkatan database jalan dan jembatan	Melanjutkan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, permukiman dan kesehatan
17. Meningkatnya kualitas irigasi	1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi	1. Pembangunan irigasi 2. Rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi 3. Normalisasi sungai	

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
18.Meningkatnya kawasan permukiman sehat dan menurunnya rumah tidak layak huni	1. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana kawasan permukiman 2. Mengurangi jumlah rumah tidak layak huni	1. Pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman 2. Fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat	
19.Meningkatnya kualitas pengelolaan air bersih, sanitasi dan limbah	1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan limbah rumah tangga	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan limbah rumah tangga	
20. Meningkatkan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah 2. Memperkuat prinsip tata kelola sektor publik dalam melaksanakan pekerjaan 3. Mengoptimalkan fungsi PPID kabupaten 4. Melaksanakan pelaporan kerja yang transparan dan akuntabel 5. Memperbaiki tata kelola manajemen kearsipan daerah	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis <i>accrual</i> 3. Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah 4. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah 5. Penetapan indikator kinerja daerah, perangkat daerah, dan aparatur 6. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 7. Penguatan gerakan sadar arsip	1. Memantapkan kemandirian dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik 2. Peningkatan profesionalisme lembaga adat dan nagari dalam pemerintahan 3. Pengembangan lokasi strategis disekitar ibu kota kabupaten dan nagari 4. Melanjutkan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan sarana transportasi, telekomunikasi, listrik, permukiman dan kesehatan
21.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan fungsi dan kompetensi aparatur pelayanan publik 2. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Penyederhanaan prosedur pelayanan publik 2. Peningkatan SDM pelayanan publik 3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik 4. Peningkatan pelayanan publik berbasis <i>e-government</i>	

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		5. Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik 6. Peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik 7. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang akurat dan terkini	
22. Meningkatnya pemanfaatan lahan	1. Memanfaatkan lahan tidak produktif menjadi lahan produktif untuk mendukung perekonomian masyarakat	1. Pemanfaatan lahan tidak produktif untuk usaha produktif seperti pertanian dan perikanan	1. Melanjutkan pemanfaatan dan mengelola sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
23. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	1. Memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistem-nya 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan 3. Mengelola limbah dan bahan beracun dan berbahaya (B3) 4. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu 5. Membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup 6. Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi lingkungan hidup	1. Pengendalian kerusakan ekosistem/ pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 3. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber air 4. Peningkatan pengawasan kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan 5. Pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan 6. Peningkatan pengawasan limbah, limbah B3 dan B3 7. Pengendalian dan penurunan beban pencemaran 8. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	2. Penerapan teknologi informasi dalam pemanfaatan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup 3. Memantapkan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		9. Penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah 10. Pengembangan upaya 3R (<i>reduce, reuse dan recycle</i>) sampah 11. Penyediaan data dan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH), profil pengelolaan tutupan vegetasi, dan profil keanekaragaman hayati	
24.Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Melakukan penguatan kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat 2. Memperkuat institusi keagamaan 3. Meningkatkan pemahaman ajaran agama sejak usia dini 4. Meningkatkan akses informasi keagamaan 5. Meningkatkan toleransi kehidupan beragama baik secara formal maupun non formal 6. Menekan terjadinya perbuatan maksiat	1. Optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta sinergitas pendistribusian antar lembaga pengelola zakat 2. Peningkatan manajemen lembaga pendidikan terutama pesantren dan lembaga non formal lainnya sebagai sentra pembangunan masyarakat yang religius 3. Pengembangan sekolah/ lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan program tahfidz qur'an 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat	1. Memantapkan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan 2. Mengembangkan budaya kreatif dan inovatif dalam mewujudkan masyarakat maju, unggul dan religius 3. Melanjutkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana peribadatan 4. Mengupayakan peningkatan mutu institusi pendidikan sebagai basis pengembangan IPTEK dan IMTAQ 5. Peningkatan profesionalisme lembaga adat dan nagari dalam pemerintahan

RPJMD Kab. Sijunjung 2016-2021			RPJP Kab. Sijunjung 2005-2025
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan
		5. Peningkatan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari syi'ar agama 6. Peningkatan pengelolaan dan pelayanan tempat ibadah 7. Peningkatan pelaksanaan kegiatan kerukunan beragama dan kerukunan umat antar agama 8. Peningkatan pengawasan terhadap perbuatan maksiat	
25. Menguatnya implementasi adat dan budaya dalam tata kehidupan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya 2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan kompetensi pemangku adat 2. Penguatan peran dan fungsi lembaga adat dan budaya	
26. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal	1. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian kekayaan warisan budaya 2. Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kearifan lokal	1. Pelestarian dan penggalian potensi warisan budaya 2. Peningkatan pemahaman dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal	

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran program prioritas tahun kelima RPJMD Tahun 2016-2021.
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan ABPD Tahun 2021.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan provinsi, nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; secara eksplisit mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

berisi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKU dan IKK pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

berisi penegasan bahwa RKPD adalah pedoman bagi OPD dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

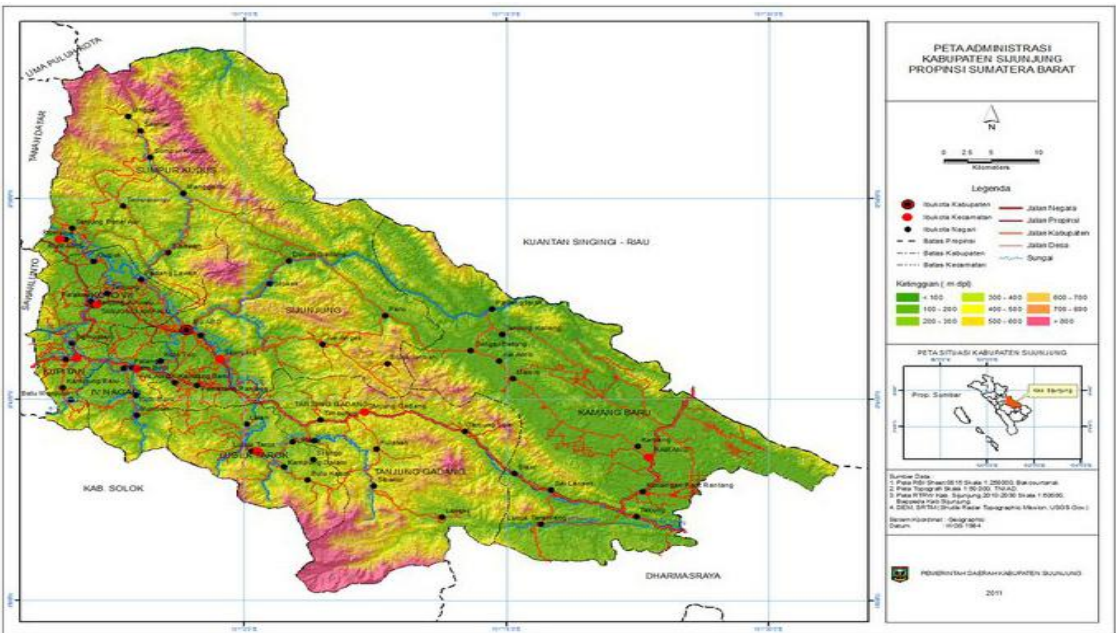
2.1. Kondisi Umum

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Letak Geografi dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Sijunjung terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota berada di Muaro Sijunjung. Muaro Sijunjung termasuk ke dalam Kecamatan Sijunjung. Sebagian besar penduduknya bersuku Minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya, serta norma yang khas. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.130,80 km² yang terbentang pada posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0°18' 43" Lintang Selatan sampai dengan 1° 41'46" Lintang Selatan dan dari 100° 37'40" Bujur Timur sampai dengan 101° 30'52" Bujur Timur.

Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, dengan morfologi daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan. Sementara itu, secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 61 (enam puluh satu) nagari, 1 (satu) desa dan 1 (satu) nagari persiapan. Batas administrasi Kabupaten Sijunjung sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Sijunjung berikut:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung memiliki 3 (tiga) kecamatan yang paling luas. Kecamatan Kamang Baru adalah kecamatan terluas dengan luas wilayah 837,8 km², Kecamatan Sijunjung dengan luas wilayah 748 km² dan

Kecamatan Sumpur Kudus dengan luas wilayah 575,40 km². Sedangkan jumlah Nagari yang paling banyak, juga terdapat pada ketiga Kecamatan tersebut. Kecamatan Kamang Baru dan Kecamatan Sumpur Kudus memiliki nagari masing-masing 11 (sebelas) nagari, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Tanjung Gadang 9 (sembilan) nagari. Ketiga kecamatan yang paling luas tesebut juga memiliki jumlah jorong yang paling banyak. Kecamatan Kamang Baru memiliki 61 Jorong, Kecamatan Sijunjung 56 Jorong dan Kecamatan Sumpur Kudus 55 Jorong. Rincian luas wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Thd Luas Kab (persen)	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Kamang Baru	837,80	26,76	11	61
2.	Tanjung Gadang	459,79	14,69	9	41
3.	Sijunjung	748,00	23,89	9	56
4.	Lubuk Tarok	187,60	5,99	6	24
5.	IV Nagari	96,30	3,08	5	17
6.	Kupitan	82,01	2,62	3+1 desa	14
7.	Koto VII	143,90	4,60	6 + (1 Nagari persiapan)	36
8.	Sumpur Kudus	575,40	18,38	11	55
Jumlah		3130,80	100	62	304

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), sebagian besar daerah Kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter, yaitu sebesar 80 persen. Sisanya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara umum, gambaran mengenai daerah yang memiliki luas paling besar di Kabupaten Sijunjung berada pada:

- Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 ha (0,86 persen) terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sijunjung.
- Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan 79.257 ha (25,32 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
- Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha (20,9 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII.
- Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII.
- Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91 persen) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII.
- Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 ha (8,78 persen) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII,
- Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 ha (5,76 persen) tersebar pada seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan.

- h. Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 ha (3,29 persen) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung.
- i. Ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 ha (4,12 persen) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada Kecamatan Sumpur Kudus.

Dengan kondisi topografi tersebut, potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sijunjung bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.

B. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (*global climate change*) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem, ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas.

Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran tahun 2015 pada bulan November tetapi pada tahun 2018 dan 2019 terjadi pergeseran ke bulan Oktober dan Desember. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Suhu terendah (C °)	21	21	21	21	21
2.	Suhu tertinggi (C °)	33	33	33	33	33
3.	Curah hujan terendah (mm ³)	36	46	46	54	83
		Juli	Okt	Okt	Feb	Juli
4.	Curah hujan tertinggi (mm ³)	383	447	447	308	569
		Nov	Jan	Jan	OKt	Des

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

C. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah:

- a. Jenis Tanah Alluvial

Tanah Aluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara

keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah ± 443 Ha (0,15 persen) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru.

b. Jenis Tanah Andosol

Tanah Andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau hidroksida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memiliki Ph antara 4,5-6. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 Ha (6,82 persen) dari luas wilayah Kabupaten.

c. Jenis Tanah Glei Humus

Tanah Glei Humus adalah jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung bahan organik lebih dari 3 persen sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral, tingkat kesuburannya sedang dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60 persen Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555 Ha (14,55 persen) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru.

d. Jenis tanah Kambisol

Tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481 (45,45 persen). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

e. Jenis Tanah Latosol

Tanah Latosol, jenis tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 Ha (7,38 persen) dari luas wilayah Kabupaten.

f. Jenis Tanah podsolik

Tanah Podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 persen, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi.

Sementara itu, produktifitas tanah yang rendah sampai sedang ternyata mengalami pertumbuhan dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Sedangkan tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ± 77.125 Ha (24,64persen) dari seluruh luas tanah yang ada. Kondisi tanah seperti ini hampir terdapat di seluruh kecamatan

dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

D. Kawasan Hutan dan Penggunaan Lahan

Luas kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan tata batas sampai dengan Tahun 2011, luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung adalah ± 204.018 ha, berdasarkan SK 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung adalah 184.604 Ha. Pada tahun 2016 perkembangan kawasan hutan setelah keluarnya Suatu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 424/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 7 Juni 2016 menjadi 175.943 ha atau 56,20 persen dari luas kabupaten, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten

No	Kawasan Hutan	Kawasan Hutan No.Sk 422/Mehut-II/1999 dan Tata Batas s.d 2011		Kawasan Hutan No.Sk 35/ Menhut-II/ 2013		Kawasan Hutan No.Sk 424/ MeMenLHK/Setjen/PLA.2/6 /2016	
		Luas (ha)	% Thdp Luas Kab.	Luas (ha)	% Thdp Luas Kab.	Luas (ha)	% Thdp Luas Kab
1.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	40.271	12,90	40.271	12,90	40.271	12,86
2.	Hutan Lindung	83.683	26,70	78.824	25,20	77.897	24,88
3.	Hutan Produksi Terbatas	27.955	8,90	28.260	9,00	28.260	9,03
4.	Hutan Produksi	33.672	10,80	22.318	7,10	19.954	6,37
5.	Hutan Produksi Konversi	18.439	5,90	14.931	4,80	9.561	3,05
	Jumlah	204.020	65,20	184.604	59,00	175.943	56,20

Sumber: Bappeda Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas kawasan hutan 56,20 persen dari luas Kabupaten sisanya 43,80 persen merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan sebgai kawasan budidaya, pertambangan, perikanan dan perumahan, perkantoran dan ruang publik. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan. Ini perlu adanya arah dan kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung. Perkembangan pembangunan yang pesat baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan permukiman dan sektor lainnya jelas akan memiliki implikasi terhadap kebutuhan lahan sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap pengembangannya. Pekembangan penggunaan lahan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Sijunjung Tahun 215-2019

No	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kawasan Hutan	184.604	184.604	184.604	184.604	175.943
2.	Lahan Sawah	10.629	10.729	10.220	10.790	10.790
3.	Lahan Tegalan	15.577	15.586	15.586	16.635	13.293

No	Penggunaan Lahan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
4.	Ladang	5.237	5.228	5.228	5.228	3.432
5.	Lahan Sementara Tidak diusahakan	7.321	7.363	7.827	4.026	3.345
6.	Perumahan Perkantoran, pertambangan, perikanan, fasilitas umum dan lain-lain	89.712	89.571	89.617	91.800	106.277
	Jumlah	313.080	313.080	313.080	313.080	313.080

Sumber: BPS Sijunjung Dalam Angka

E. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori potensi pengembangan ekonomi suatu wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi geografis daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator: 1). Distribusi/kontribusi kategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan yang cukup besar bilamana kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar pula; 2). Laju pertumbuhan kategori dan subkategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya. Kedua indikator ini dapat mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut sektor dan subsektor di Kabupaten Sijunjung, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,00	31,55	30,64	29,59	27,88
2.	Pertambangan dan Penggalian	14,84	14,32	14,02	14,02	14,20
3.	Industri Pengolahan	3,11	3,18	3,04	3,00	2,53
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6.	Konstruksi	12,58	12,78	13,07	13,40	14,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,04	11,08	11,50	11,74	11,80
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,28	7,45	7,50	7,50	7,76
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,68	0,75	0,78	0,81	0,85
10.	Informasi dan Komunikasi	2,70	2,72	2,90	3,05	3,18
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,55	2,58	2,49	2,42	2,29
12.	Real Estat	1,22	1,21	1,21	1,20	1,21
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,69	4,66	4,60	4,68	5,13
15.	Jasa Pendidikan	4,03	4,27	4,62	4,76	4,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,63	1,67	1,76	1,84	1,87
17.	Jasa lainnya	1,55	1,68	1,75	1,88	1,94
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Berdasarkan Tabel diatas, selama kurun waktu tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Sijunjung didominasi oleh 5 (lima) sektor lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan penggalian; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta Transportasi dan pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung. Lapangan usaha yang memberikan peran terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,88 persen (angka ini menurun sebesar 4,12 persen dari tahun 2015).

Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 14,20 persen (turun 0,64 persen dari tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,33 persen (naik 1,75 persen dari tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,80 persen (naik sebesar 0,76 persen di tahun 2015) dan lapangan usaha Transportasi dan pergudangan sebesar 7,50 persen (naik 0,48 persen dari tahun 2015).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, perdagangan, transportasi dan pergudangan serta Konstruksi adalah sektor yang mengalami peningkatan peranan selama 5 tahun terakhir. Sementara untuk Pertanian, kehutanan dan perikanan serta Pertambangan dan penggalian, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 7 persen.

Salah satu penyebab turunnya peranan pertanian, kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut, intensifikasi pertanian tidak berkembang, dan penurunan harga produk perkebunan yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Sijunjung. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Potensi pembangunan wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan. Pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031 terbagi 8 (delapan) kawasan untuk kepentingan lahan budidaya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi
Pengembangan kawasan hutan produksi hingga tahun 2031 seluas 16.438 ha dari luas yang ada sekarang seluas 30.615 ha. Pengembangan hutan produksi tersebut tersebar ke-8 kecamatan,

dengan luas terbesar di Kecamatan Sijunjung seluas 7.660 ha dan terkecil di Kecamatan Sumpur Kudus seluas 521 ha.

- b. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah
Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dialokasikan seluas 12.303 Ha terutama di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, wilayah bagian bawah Kecamatan Sumpur Kudus.
- c. Kawasan peruntukan perkebunan
Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok dan untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, pengembangan tanaman hortikultura, terutama manggis dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok.
- d. Kawasan peruntukan perternakan
Pengembangan kawasan perternakan diarahkan antara lain untuk: a) budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya, b) pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Koto VII sebagai sentranya, dan c) budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang.
- e. Kawasan peruntukan pertambangan
Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, karena ke-8 kecamatan memiliki bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksplorasi.
- f. Kawasan peruntukan perindustrian
Pengembangan kawasan perindustrian untuk Kabupaten Sijunjung adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan Kamang Baru). Kedua lokasi tersebut terletak pada posisi yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh petani dalam menyalur hasil pertaniannya.
- g. Kawasan peruntukan pariwisata
Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada Kawasan Geopark Silokek Ranah Minang dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sijunjung, Wahana Wisata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru, Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung, dan objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok.

- h. Kawasan peruntukan permukiman
Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perumahan perkotaan diarahkan di Muaro Sijunjung (Kecamatan Sijunjung), Palangki (Kecamatan IV Nagari), Tanjung Ampalu (Kecamatan Koto VII), Kamang, dan Sei Tambang (Kecamatan Kamang Baru).

F. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 ha atau 24,45 persen), Batu Andesit Campur Tufa (61.833 ha atau 19,75 persen), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 ha atau 19,44 persen), Batu Napal dan Lempung (36.850 ha atau 11,77 persen), Batu Napal Gamping (34.640 ha atau 11,06 persen), Batu Sabah campur Batu Gamping (24.405 ha atau 7,8 persen), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap.

Kabupaten Sijunjung dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu sungai Batang Ombilin, Batang Sukam dan sungai Batang Palangki. Sungai Batang Ombilin saat ini mengalami pendakalan, erosi, pencemaran air dan perubahan pola aliran sungai. Sungai Batang Palangki adalah sungai yang paling mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan kondisi sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sukam. Sdimen pada sungai ini sangat besar kontribusinya terhadap Muara Tiga Sungai. Terlihat dalam analisa sedimen bahwa Sungai Palangki memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi dan perlu segera di tanggulangi. Dan Berdasarkan hasil survey dan Investigasi, kondisi sungai Batang Sukam masih dalam kondisi baik, hanya di temukan beberapa spot sedimentasi dan erosi tebing yang hanya berada di hilir sungai Batang Sukam. Namun kondisi tebing sungai Batang Sukam yang terkikis yang jika dibiarkan dapat memakan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Muaro Tiga Sungai merupakan daerah *bottle-neck*. Tingginya erosi dan sedimentasi pada sungai-sungai tersebut menyebabkan terjadi penumpukan sedimen yang cukup signifikan yang di Muara Tiga Sungai, sehingga daya tampung sungai menurun, seperti terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.2: Petemuan Tiga Sungai (Batang Ombilin, Sukam dan Batang Kuantan)

Perubahan pola aliran sungai, erosi dan sedimentasi yang terjadi sepanjang aliran Sungai Batang Ombilin, Batang Sukam dan Batang Palangki yang ditambah dengan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung yang sebagian besar didominasi bebatuan mangakibatkan sering terjadinya banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah. Beberapa kasus tanah longsor dan banjir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Kasus bencana Alam di kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020

No	Kasus	Tahun	Gambar
1.	Tanggal 8 Februari 2020, Jembatan Nagari Batu Manjula putus, tanah longsor dan banjir hampir di seluruh Kecamatan di Kab. Sijunjung	2020	
2.	Tanggal 5 November 2019 akibat hujan lebat jalan penghubung 10 nagari di kawasan nagari Kumanis ambblas sepanjang 75 m.	2019	
3.	Tanggal 7 Juli 2018 terjadi banjir di Jorong Muaro Linggo, Jorong Liambang dan Jorong Koto Langki , Kab. Sijunjung, (41 rumah tergenang	2018	
5.	Tanggal 3 Maret 2017 terjadi banjir dan tanah longsor di Kec. Kamang Baru dan Kec. Lubuak Tarok, Kab. Sijunjung (100 ha lahan pertanian tergenang	2018	
6.	Tanggal 17 April 2016 Kec. Sijunjung, akibat luapan Sunagi Palangki(12 rumah rusak)	2017	
7.	Tanggal 8 Pebruari 2016 Kab. Sijunjung diterjang banjir akibat luapan S.Sukam dan S. Palangki (51 KK dievakuasi	2016	

Sumber: Bapppeda

Frekuensi kejadian bencana banjir, tanah longsor, kebakaran dan anging kencang di Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Frekuensi Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2015-2019

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Erosi Sungai	3	3	3	3	3
2.	Angin Kencang	3	3	3	2	33
3.	Banjir	28	18	-	11	8
4.	Banjir Bandang	-	1	4	3	-
5.	Hanyut/Tenggelam	1	2	-	1	1
6.	Kebakaran	36	3	28	1	-
7.	Kebakaran Lahan	113	171	29	29	23
8.	Longsor	23	24	12	12	30

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

G. Demografi

Ditinjau dari Aspek demografi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung, jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 222.510 jiwa menjadi 237.376 jiwa pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk per tahun tahun 2019 terhadap tahun 2010 mencapai 1,78 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan IV Nagari 2,54 prsen dan yang terendah Kecamatan Lubuk Tarok 0,97 persen. Perkembangan jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015-2019 dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (Persen) Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 Terhadap Tahun 2010

No	Kecamatan	Tahun					Pertumbuhan 2010-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Kamang Baru	47.170	48.150	49.359	50.438	51.477	2,41
2.	Tjg. Gadang	24.430	24.750	24.977	25.242	25.494	1,17
3.	Sijunjung	44.650	45.350	45.951	46.585	47.196	1,52
4.	Lubuk Tarok	14.930	15.100	15.205	15.338	15.467	0,97
5.	IV Nagari	16.140	16.480	16,932	17.319	17.698	2,54
6.	Kupitan	13.600	13.810	13.977	14.161	14.332	1,45
7.	Koto VII	36.540	37.200	37.902	38.565	39.201	1,94
8.	Sumpur Kudus	25.050	24.450	25.801	26.162	26.511	1,56
	Total	222.510	226.300	230.104	233.810	237.376	1,78

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kepadatan penduduk. Secara rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 76 jiwa per km², artinya setiap satu km² wilayah Kabupaten Sijunjung ditempati sekitar 76 jiwa. Kecamatan Koto VII menjadi

wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 272 jiwa per km². Sebaliknya Kecamatan Sumpur Kudus menjadi wilayah dengan kepadatan terendah, yaitu sebesar 40 jiwa per km².

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

N o	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Bruto (Jiwa/km²)
1.	Kamang Baru	837,80	51.477	61
2.	Tanjung Gadang	459,79	25.494	55
3.	Sijunjung	748,00	47.196	63
4.	Lubuk Tarok	187,60	15.467	82
5.	Kupitan	82,01	17.698	184
6.	IV Nagari	96,30	14.332	175
7.	Koto VII	143,90	39.201	272
8.	Sumpur Kudus	575,40	26.511	46
Jumlah		3.130,80	237.376	76

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Ditinjau dari segi jumlah penduduk, penduduk usia produktif (15-65 tahun) Kabupaten Sijunjung tahun 2019 sebanyak 151.142 jiwa atau 63,67 persen lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun sebanyak 86.234 jiwa atau 3,32 persen. Usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, ini artinya Kabupaten Sijunjung telah memilik bonus demografi tahun 2019, seperti terlihat pada tableberikut.

Tabel 2.10
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	13.334	12 .803	26.137
2.	5-9	12.725	12.433	25.158
3.	10-14	11.186	11.186	22872
4.	15-19	9.598	9.234	18.832
5.	20-24	9.560	9.081	18.277
6.	25-29	9.623	9.553	19.176
7.	30-34	9.521	9.234	18.755
8.	35-39	8.660	8.779	17.439
9.	40-44	7.507	7.499	15.006
10.	45-49	6.821	6.639	13.460
11.	50-54	5.954	5.937	11.891
12.	55-59	5.025	5.274	10.299
13.	60-64	3.874	4.133	8.007
14.	65+	5.487	6.580	12.067
		119.011	118.365	237.376

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Dari sisi Rasio ketergantungan (depedency ratio) atau angka beban ketergantungan, suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dapat diukur dengan membandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun) ditambah dengan penduduk usia 65 tahun keatas dibagi dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun dikali seratus persen. Makin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka

ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Dan berdasarkan data Tabel 2.5 diatas angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebesar 57 persen (tergolong tinggi), artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif akan menanggung 57 orang dari usia non produktif.

Bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat di Kabupaten Sijunjung harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan bonus demografi. Terdapat banyak cara untuk mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif. Bonus demografi bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali.

Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari sini bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Sijunjung salah satunya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi suatu daerah. Terjadinya peningkatan dan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap tahapan kegiatan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia. Hal ini dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta berbagai macam program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan

pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga disebut sebagai salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 sebagai berikut.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Sektor Usaha	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3,63	3,36	2,25	2,57	0,41
2.	Pertambangan dan Pengalian	6,27	1,67	1,17	4,24	6,27
3.	Industri Pengolahan	4,37	7,44	0,46	4,57	-5,49
4.	Listrik dan Gas	3,99	10,06	7,24	7,31	4,33
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,82	7,43	5,61	3,89	3,95
6.	Konstruksi	6,76	8,19	9,39	7,12	7,97
7.	Perdagangan besar dan Enceran	6,44	6,21	7,41	6,55	7,15
8.	Transportasi dan Penggudangan	8,07	8,45	7,63	5,84	7,98
9.	Penyediaan Akomodasi&Makanan	5,21	10,43	9,24	7,97	7,92
10.	Informasi dan Komunikasi	7,55	7,22	11,71	9,7	10,01
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	6,93	-2,01	0,61	2,09
12.	Real Estat	4,89	4,42	5,17	4,43	5,54
13.	Jasa Perusahaan	5,49	5,82	5,04	5,60	6,35
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,21	5,11	5,21	6,13	5,25
15.	Jasa Pendidikan	9,06	8,89	8,10	8,59	8,22
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,10	7,80	8,33	8,27	7,49
17.	Jasa Lainnya	8,76	9,90	9,07	8,93	9,20
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,69	5,26	5,27	5,10	4,83

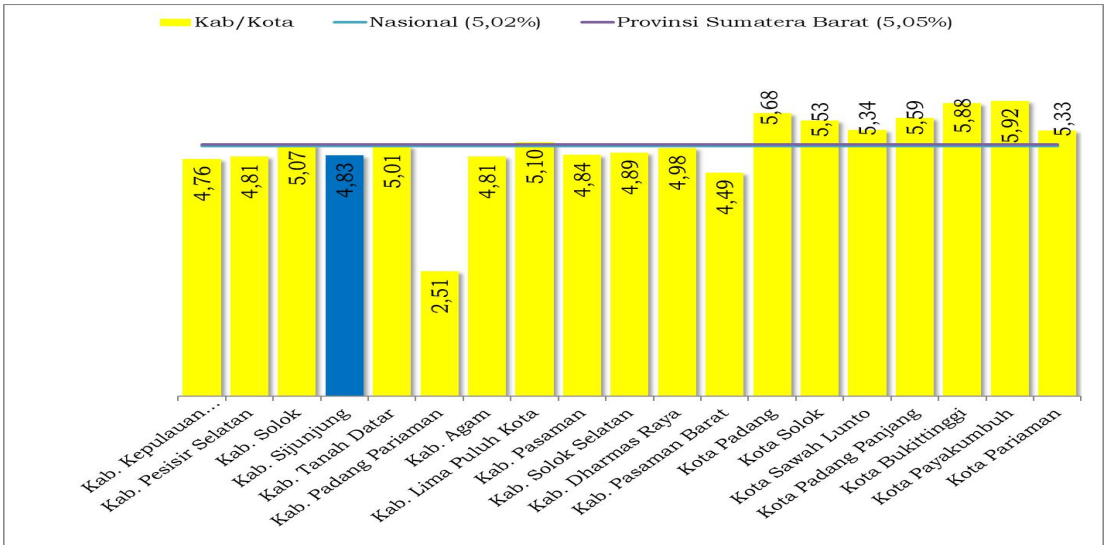
Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Dari Tabel diatas nilai PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Perlambatan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai produksi hampir diseluruh lapangan usaha ditambah lagi dengan adanya goncangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 mencapai 4,83 persen melambat bila dibandingkn tahun 2018 yang telah mencapai 5,10 persen.

Dari 17 sektor lapangan usaha yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019, terdapat 7 lapangan usaha dengan persentase pertumbuhan dibawah 6 persen, yaitu: Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Dan satu lapangan usah dengan pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan dengan pertumbhan -5,49 persen.

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2019 mencapai 4,83 persen, Kabupaten Sijunjung menempati peringkat ke 14 dari 19 kab/kota Kondisinya ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2018 Kabupaten Sijunjung menempati peringkat ke 15, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Grafik 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung Provinsi se Sumatera, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung dan BPS Provinsi Sumatera Barat

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar Harga Herlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku dan konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita berdasarkan harga kostan dan berlaku tercatat sebesar 31,26 dan 24,89 juta rupiah naik menjadi 38,48 dan 28,48 juta rupiah tahun 2019. Secara nominal terus mengalami kenaikan, namun dilihat dari pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan terus mengalami penurunan dari 4,14 persen tahun 2015 menjadi 3,26 persen tahun 2019. Nilai PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	PDRB	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB (Juta)					
	ADHB	6.955.425,78	7.439.227,39	7.978.030.46	8.491.256,40	9.133.599,30
	ADHK	5.537.779,26	5.829.043,58	6.136.255,76	6.448.358,44	6.759.893,90
2.	PDRB Perkapita (Juta)					
	ADHB	31,26	32,87	34,67	36,32	38,48
	ADHK	24,89	25,76	26,67	27,58	28,48
	Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen)	4,14	3,50	3,53	3,41	3,26
3.	Jumlah Penduduk	222.510	226.300	230.104	233.810	237.376
	Pertumbuhan Penduduk	1.80	1.70	1.68	1.61	1.78

Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

Laju Inflasi

Infalasi secara sederhana didefenisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa pada waktu tertentu. Dan laju perekonomian dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Barometer inflasi di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh inflasi Provinsi , Nasional, inflasi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Desember 2019, capaian inflasi di Kota Padang sebesar 0,07 persen sedangkan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar -0,01 persen Laju inflasi tahun kalender sampai bulan Desember 2019 di Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing sebesar 1,72 persen dan 1,31 persen Laju inflasi *year on year* (Desember 2018 – Desember 2019) di Kota Padang sebesar 1,72 persen dan Kota Bukittinggi sebesar 1,31 persen Laju Inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year on Year Kota Padang dan Kota Bukittinggi Bulan Desember 2019 (Persen)

No	Inflasi	Padang	Bukittinggi
1	Desember	0,07	-0,01
2	Desember (Tahun) Terhadap Desember	1,72	1,31
3	Tahun-n terhadap Desember (Tahun n-1) (Year on Year)	1,72	1,31

Sumber: Berita Resmi Statistik, No. 01/01/13/Th XX II, 2 Januari 2020

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa laju inflasi di Sumatera Barat secara akumulatif *year on year* selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan. Kondisi ini agak sedikit berbeda dengan capaian laju inflasi Nasional yang cenderung menurun jika dibandingkan dengan capaian laju inflasi tahun sebelumnya.

Tabel 2.14
Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015 – 2019

No	Inflasi	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sumatera Barat	1,08	4,89	2,02	2,60	1,66
2.	Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

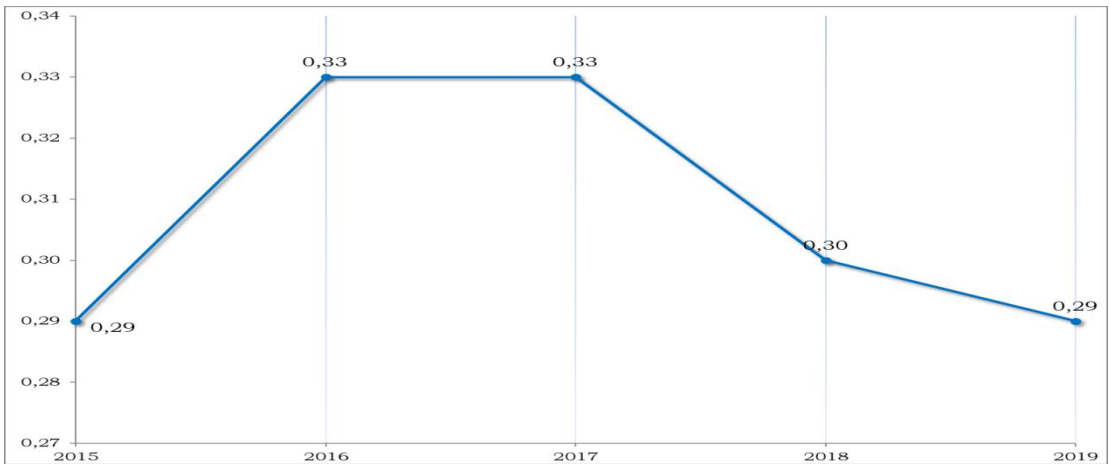
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Gini Ratio

Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang bisa menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Koefisien Gini yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain bahwa untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk, maka Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0.

Gini Rasio atau Koefisien Gini Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015 tercatat sebesar 0,29, angka ini berfluktuasi terus hingga tahun 2019, kondisinya sama dengan tahun 2015. Kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir tahun 2017-2019 Gini Rasio atau Koefisien Gini Rasio semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk semakin baik. Perkembangan Gini Rasio atau Koefisien Gini Rasio Kabupaten Sijunjung selama periode 2015-2019, dapat dilihat pada grafik berikut:

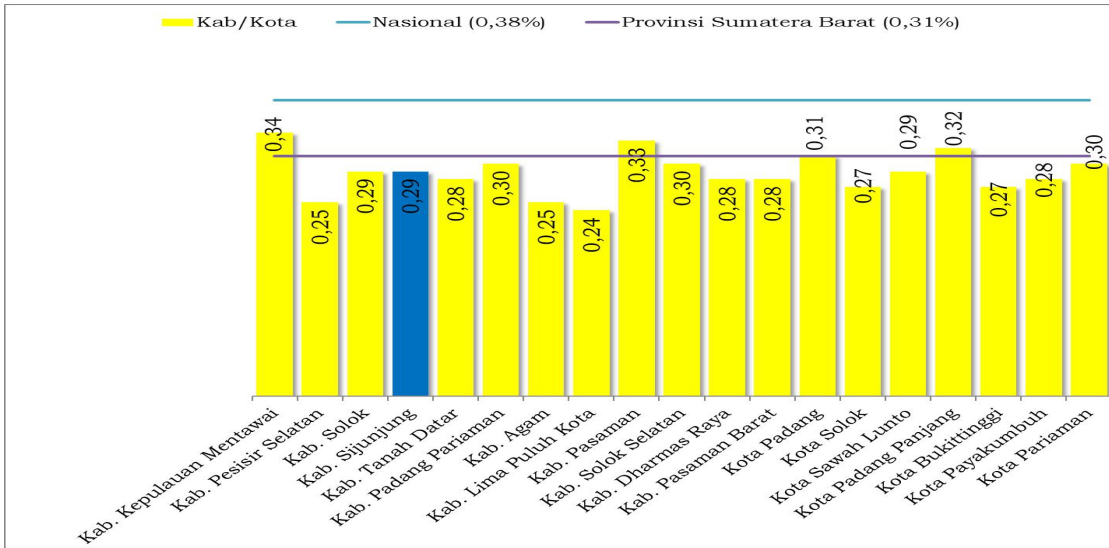
Grafik 2.2
Gini Ratio Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Bila dibandingkan dengan gini rasio Provinsi , Nasional dan kab/kota, Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata Nasional, Provinsi dan peringkat ke-10 terendah dari 19 kab/kota sama dengan kondisi tahun 2018, seperti terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.3
Perbandingan Indeks Gini Rasio Kabupaten Sijunjung, Provinsi se Sumatera, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung pada kondisi 2019 adalah 16.650 jiwa, dan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 100 jiwa dibandingkan kondisi 2018. Namun dari segi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung tahun 2018 sebesar 7,11 persen penurunan menjadi 7,04 persen pada tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut:

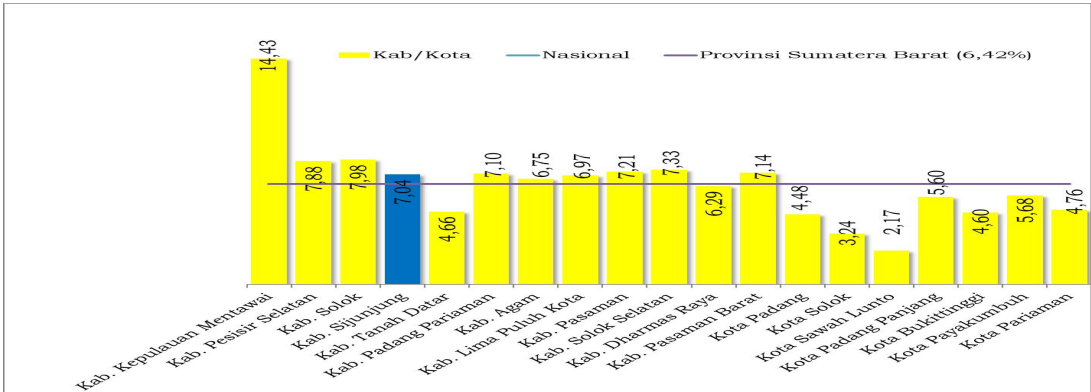
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten
Sijunjung Tahun 2015-2019

N o	Uraian	Tahun				
		22015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sijunjung	17.520	17.120	16.830	16.550	16.650
2.	Persentase Kemiskinan Kabupaten Sijunjung	7,87	7,60	7,35	7,11	7,04

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional serta kabupaten/kota tahun 2019, data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan dibawah rata-rata Nasional. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung tahun 2019 sebesar 7,04 persen berada pada peringkat ke 12 dari 19 kab/kota, peringkat ini lebih baik bila dibandingkan dengan peringkat pada tahun 2018 yang menempati peringkat ke-13 terendah dari 19 kab/kota.

Grafik 2.4
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi ,
Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Sijunjung dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparah
an Kemiskinan (P2) Kabuapten Sijunjung Tahun 2015-2019

N o	Indek Kemiskinan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indek kedalaman Kemiskinan (P1)	0.55	1.25	1.12	0.88	0.17
2	Indek keparahan kemiskin (P2)	0.25	0.28	0.23	0.17	0.22

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Tabel di atas menunjukkan bahwa kurun waktu tahun 2015-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2015 adalah 0,55 dan mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,25 menjadi 0,22 pada kurun waktu yang sama.

Tingkat Pengangguran

Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tahun 2019, jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sijunjung sebanyak 164.140 orang dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 49.409. Angkatan kerja sebanyak 114.731 orang. Angkatan kerja mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan pengangguran dari tahun 2015 sampai tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja dan Tingkat di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angkatan kerja	106.754	106.754	107.708	109.572	114.731
	Bekerja	102.210	102.210	104.130	106.061	110.511
	Pengangguran	4.544	4.544	3.578	3.511	4.220
2.	Bukan Angkatan Kerja	44.890	44.890	50.201	51.172	49.409
	Sekolah	12.628	12.628	14.388	15.506	12.816
	Mengurus Rumah Tangga	26.002	26.002	30.692	28.871	31.167
	Lainnya	6.260	6.260	5.121	6.795	5.426
	Jumlah	151.644	151.644	157.909	160.744	164.140

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sijunjung mengalami menurun dari 4,26 persen pada tahun 2015 menjadi 3,68 persen pada tahun 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2019 lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran tahun 2018. Perkembangan TPT Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 dapat lihat pada tabel berikut:

Grafik 2.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran TeKabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

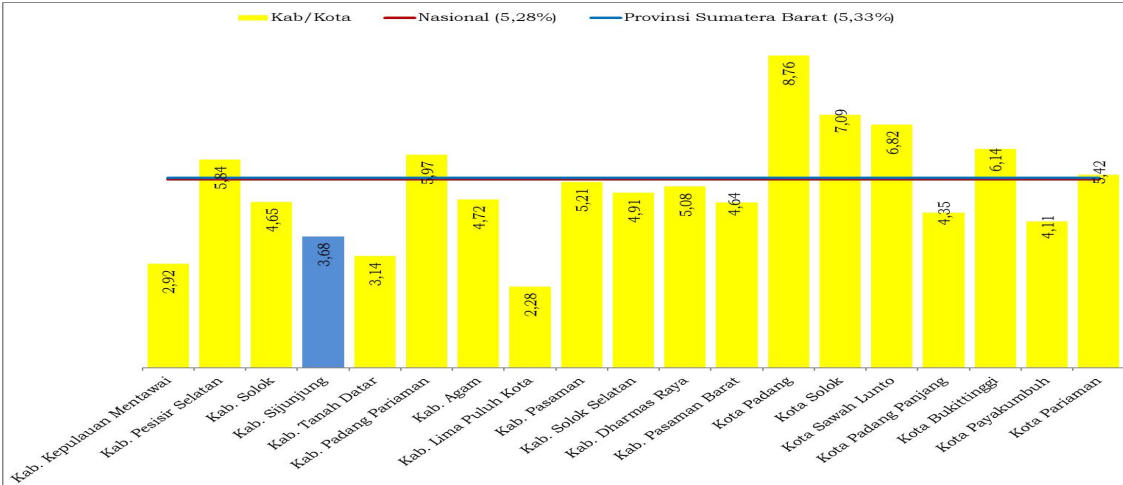


Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Jika dibandingkan TPT Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kabupaten/Kota pada tahun 2019, terlihat bahwa tingkat TPT Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata TPT

Provinsi dan Nasional. Kabupaten Sijunjung berada pada peringkat keempat terendah dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, seperti terlihat pada Grafik berikut:

Grafik 2.6
Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/kota Tahun 2019



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan. Tahun 2019 struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dan sektor industri. Sektor-sektor ini penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 43.944 orang atau 39,76 persen dan pada sektor industri sebanyak 22.261 orang atau 20,14 persen. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 16.702 orang, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung (Orang) Tahun 2019

NO	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	45.716	45.716	45.870	48.255	43.944
2.	Industri Pengolahan	5.468	5.468	5.430	5.559	22.261
3.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	20.301	20.301	18.340	18.001	-
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	16.381	16.381	18.26	15.093	-
5.	Lainnya	14.344	15.345	16.364	19.207	44 306
	Jumlah	102.210	103.211	104.130	106.061	110.511

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Ditinjau dari status pekerjaan utama, dari 110.511 orang yang bekerja pada Tahun 2019 yang terbanyak adalah berusaha sendiri sebesar 38.322 orang atau 34,68 persen diikuti buruh/karyawan/pegawai sebanyak 33,52 orang atau 33,52 persen. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar sebesar 13.834 orang atau 12,64 persen, pekerja bebas dan

Pekerja keluarga/tak dibayar masing-masing 10.215 orang atau 9,61 persen dan 8.800 orang atau 8,36 persen sedangkan yang terkecil adalah Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh dibayar sebesar 3.377 orang atau 3,12 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2019

N O	Status Pekerjaan Utama	2015	2016	2017	2018	2019	Persen tase 2019
1.	Berusaha sendiri	37.431	37.431	37.349	28.573	38.322	34,68
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	14.812	14.812	13.685	18.959	13.834	12,64
3.	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	3.216	3.216	4.635	4.082	3.377	3,12
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	27.083	27.083	26.782	28.059	35.963	33,52
5.	Pekerja Bebas	9.578	9.578	10.152	14.933	10.215	9,61
6.	Pekerja keluarga/tak dibayar	10.090	10.090	11.527	11.455	8.800	8,36
	Jumlah	102.210	102.210	104.130	106.061	110.511	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Dalam lima tahun terakhir yang menarik dari tabel diatas adalah adanya perkembangan status pekerjaan yang semakin menurun dan semakin meningkat. Status pkerjaan yang semakin menurun yaitu pekerja keluarga/tak dibayar, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar masing-masing tahun 2015 sebesar 14.812 orang dan 10.090 menjadi 13.834 dan 8.800 orang tahun 2019. Sementara Buruh/Karyawan/Pegawai perkembangannya semain meningkat dari 27.083 orang tahun 2015 menjadi 35,963 orang tahun 2019. Menurunnya pekerja yang tidak dibayar menindikasikan bahwa meningkatnya pekerja yang dibayar sehingga akan dongkrak perkembangan ekonomi dan meningkatkan total pendapatan pekerja.

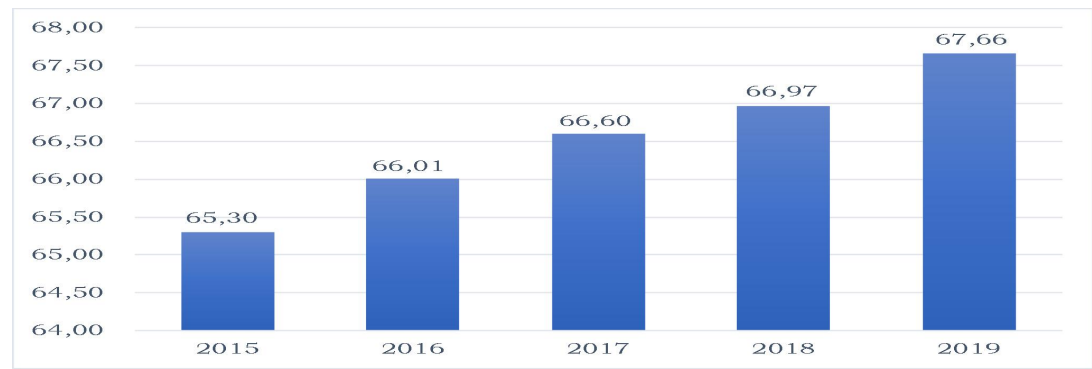
Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dari enam status pekerjaan secara sederhana dapat diidentifikasi 2 kelompok utama terkait kegiatan ekonomi formal dan informal. Kegiatan formal terdiri dari mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan, sementara sisanya termasuk kegiatan informal. Pada Tahun 2019 terdapat 39.340 orang atau 35,60 persen pekerja bergerak pada kegiatan ekonomi formal dan sisanya sebesar 71.171 orang atau 64,40 persen yang bergerak di sector informal.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial
Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Untuk mengukur perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat baik suatu negara maupun daerah indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapn Hidup Saat Lahir (HHSL), digunakan untuk mengukur peluang hidup, angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status pendidikan dan Pengeluaran Riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya alam serta standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM.

Perkembangam IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2015 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 65,30 poin dan kemudian meningkat menjadi sebesar 67,66 poin pada tahun 2019. Angka IPM Kabupaten Sijunjung ini termasuk pada golongan IPM menengah atas karena memiliki nilai dalam rentang batas 65-80 poin. Peningkatan angka IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2015-2019 menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Perkembangan angka IPM Kabupaten Sijunjung selama periode 2015-2019, dapat dilihat pada garfik dibawah ini:

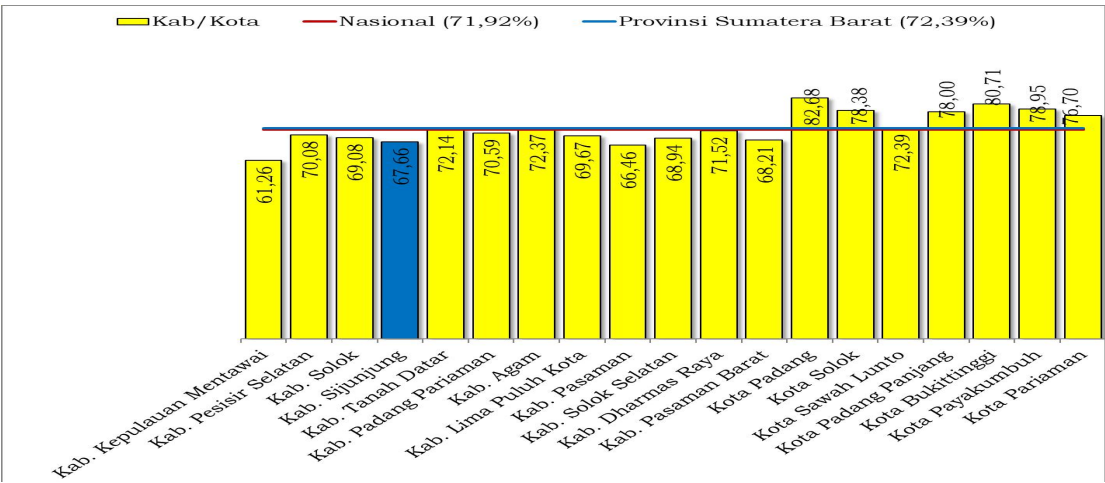
Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

IPM Kabupaten Sijunjung bila disandingkan dengan IPM Provinsi , Nasional dan Kab/Kota tahun 2019. IPM Kabupaten Sijunjung berada pada posisi 17 (tujuh belas) dari 19 kab/kota sama dengan kondisi tahu 2018. IPM Kabupaten Sijunjung masih barada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan Nasional, IPM Nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 72,39 poin dan Nasional 71,39 poin seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung
dengan Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2019



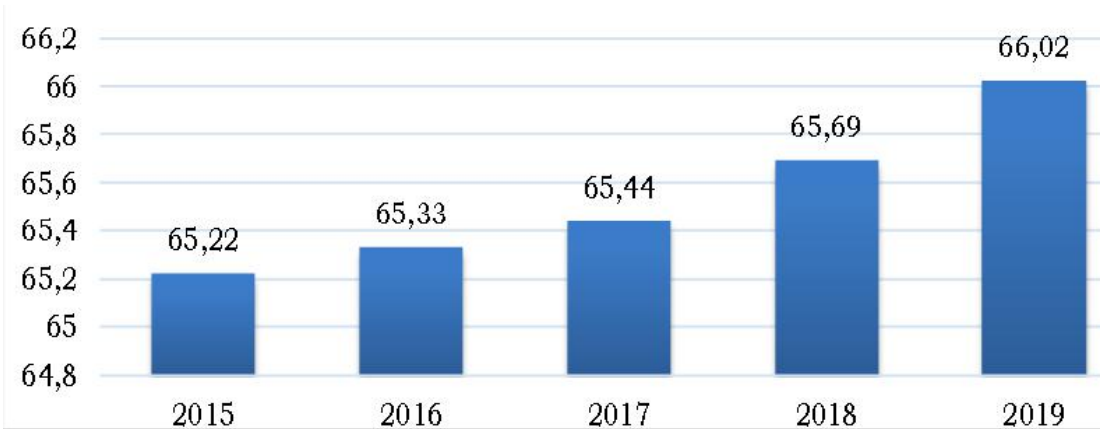
Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Angka Harapan Hidup Saat Lahir

Perkembangan angka Harapan Hidup Saat Lahir (HHLS) Kabupaten Sijunjung dalam periode 2015-2019 cenderung stabil dari tahun ketahun, dan angkanya masih relatif rendah. Pada tahun 2015 Angka Harapan

Hidup Saat Lahir Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 65.22 tahun dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu menjadi 66,02 tahun. Hal ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung sudah mampu mempertahankan kualitas pelayanannya dasar di bidang kesehatan, namun belum bisa meningkatkannya secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.9
Perkembangan Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

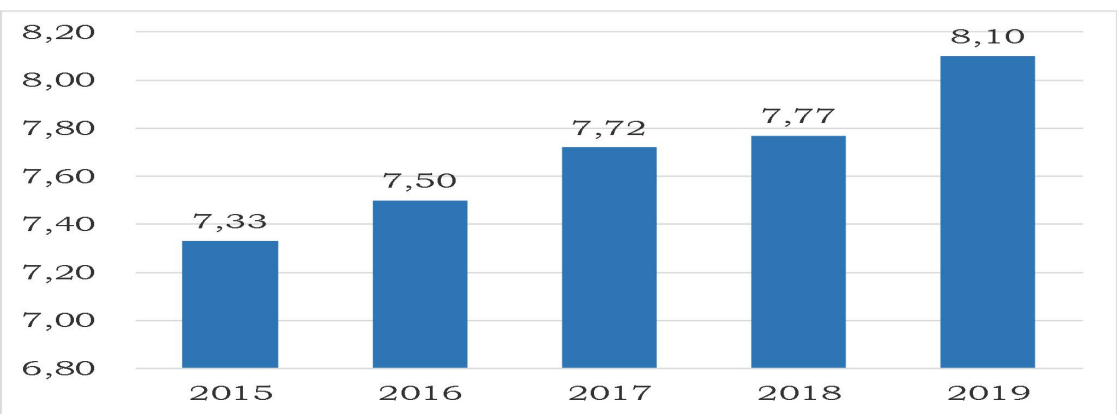


Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan dari 7,33 tahun atau setingkat kelas 1 (satu) SMP menjadi 8,10 atau setingkat kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan SPM standar Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2015-2019 belum mencapai SPM. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, dimana hanya sampai di tingkat SMP saja. Disamping itu, minat anak-anak untuk melanjutkan sekolah juga masih rendah. Sebagian besar mereka lebih tertarik untuk bekerja sektor pertambangan dan sektor perkebunan sawit. Kenyataan yang demikian sudah tentu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, sebab akan menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung dimasa mendatang. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sijunjung dalam periode tahun 2015-2018, dapat dilihat pada grafik

Grafik 2.10
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

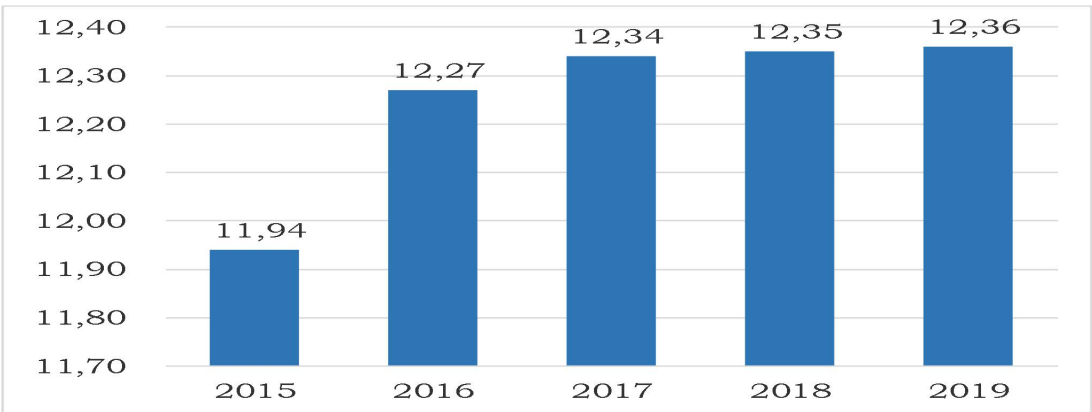


Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Angaka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 mencapai 11,94 tahun meningkat menjadi 12,36 tahun pada tahun 2019, seperti terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

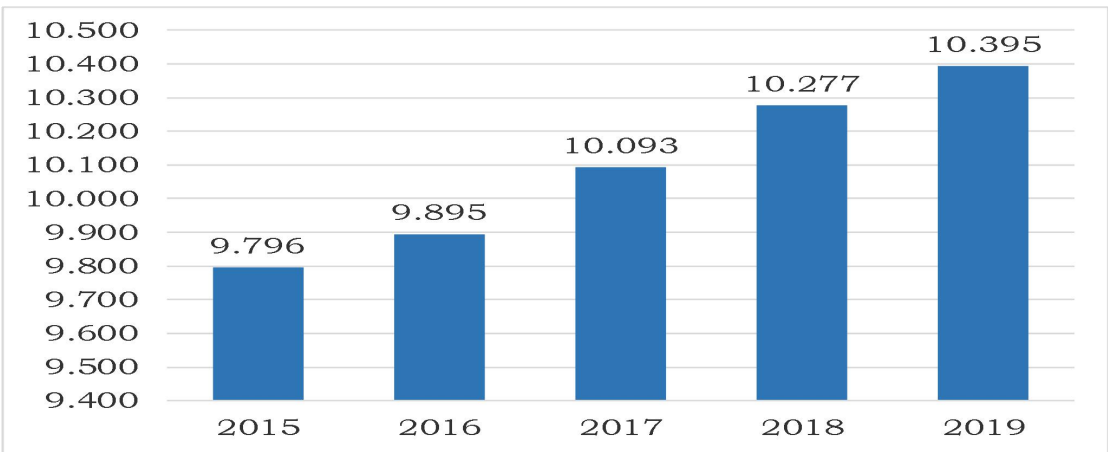


Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat, akses terhadap sumberdaya. Pengeluaran rill perkapita yang masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 sebesar Rp 9.796 juta per-orang dan kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 10.393 juta pada tahun 2019. Perkembangan pengeluaran rill perkapita masyarakat Kabupaten Sijunjung pada periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Perkembangan komponen IPM Kabupaten Sijunjung selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Namun, bila dibandingkan Berdasarkan tabel diatas komponen pembentuk IPM, maka capaian komponen IPM Kabupaten Sijunjung selalu berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.20
Perbandingan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Sijunjung,
Provinsi dan Nasional Tahun 2019

No	Komponen IPM	Satuan	Tahun 2019		
			Sijunjung	Provinsi	Nasional
1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	66,02	69,31	71,34
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,36	14,01	12,95
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,10	8,92	8,24
4	Pengeluaran Per Kapita Dise suaikan	Ribu Rp/ Org/Th	10.395	10.950	11.299
Indek Pembangunan Manusia		Poin	67,66	71,39	71,92
Pertumbuhan IPM		Persen	1,03	0,92	0,74

Sumber: *Sijunjung Dalam Angka 2020*

Tahun 2019, capaian Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kabupaten Sijunjung mencapai 66,02 tahun, capaian Provinsi dan Nasional masing-masing 69,31 tahun dan 71,34 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Sijunjung baru mencapai 8,10 tahun Provinsi dan Nasional masing-masing 8,92 tahun dan mencapai 8,24 tahun, artinya baik Kabupaten Sijunjung, Provinsi dan Nasional rata-rata pendidikannya belum tamat SMP. Begitu juga dengan komponen IPM lainnya berada dibawah rata-rata Provinsi dan Nasional.

Pertumbuhan capaian IPM Kabupaten Sijunjung diatas pertumbuhan IPM Provinsi dan Nasional. Pertumbuhan IPM kabupaten Siunjung tahun 2019 mencapai 1,03 persen sementara Provinsi dan Nasional masing-masing 0,92 persen dan 0,74 persen. Ini adalah peluang bagi Kabupaten Sijunjung untuk meningkatkan IPM Kabupaten Sijunjung dengan cara menekan angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta meningkakan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah diberbagai nagari. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Peningkatan IPM juga dapat didorong melauai peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat. Disamping itu, mengenjot pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dengan pengembanga ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.

C. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Masyarakat Kabupaten Sijunjung telah berkembang menjadi masyarakat yang heterogen dan multikultur. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat, dan efek pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak seimbang dalam masyarakat. Di tengah perbedaan yang begitu menggejala melahirkan berbagai seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung beragam. Namun, karakteristik seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung masih dominan berbasiskan Adat Minangkabau dan praktek ajaran Agama Islam.

Di kabupaten Sijunjung terdapat beberapa jenis seni budaya yang berkembang dimasyarakat diataranya Randai, Telempong, Pencak Silat, Salung Rabab, Tari rakyat, Gurindam Dan Reog. Perkembangan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2015-2019

N O	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Randai	68	68	137	99	62
2.	Talempong	80	80	80	113	70
3.	Pencak Silat	41	41	41	51	65
4.	Saluang Rabab	64	64	74	64	66
5.	Tari Rakyat	88	88	88	36	66
6.	Gurindam	8	-	-	11	1
7.	Reog	4	3	3	2	3
8.	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	19	14	16	19	27
9.	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang terstandarisasi/layak	-	-	-	2	60

Sumber: Sijunjung Dalam Angka

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah layanan urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 (enam) urusan dan urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 18 (delapan belas) urusan, sedangkan untuk layanan urusan pemerintahan pilihan daerah meliputi 8 (delapan) urusan.

A. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2015-2019 secara umum akan memperlihatkan perkembangan kemajuan, peningkatan indikator-indikator kinerja penyelenggaran urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

Urusan Wajib Pendidikan

Urusan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan konkuren. Urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara penuh urusan ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi terhitung mulai tahun 2017. Namun untuk menggambarkan, kondisi eksisting pelayanan wajib pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sijunjung tetap ditampilkan. Untuk menggambarkan capaian urusan wajib pendidikan akan di analisis beberapa indikator urusan wajib pendidikan diataranya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS), angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA.

APK dan APM menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Dan RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sementara angka HLS didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun)

yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Perkembangan APK, APM, RLS dan HLS selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pendidikan
di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajad (persen)	111,06	112,02	111,49	109,64	105,57
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Sederajad (persen)	83,75	96,791	83,47	92,37	85,27
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederat	64,33	51,6	77,61	69,94	78,26
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajad (persen)	99,03	88,18	99,65	100,00	99,60
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Sederajad (persen)	71,33	84,2	70,22	75,12	74,71
6	Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA/Sederat (persen)	51,71	69,28	55,41	59,16	59,85
7	Harapan Lama Sekolah	11,74	12,77	12,34	13,35	12,36
8	Rata-rata Lama Sekolah	7,33	7,50	7,72	7,77	8,10

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Dari tabel di atas, APK untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar tahun 2015-2019 sudah diatas 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada anak usia sekolah usia (7-12 tahun) yang tidak menempuh pendidikan sekolah dasar. Kondisi APK diatas 100 persen juga mengambar masih ada anak diatas umur 12 tahun masih duduk dibangku sekolah dasar. APK untuk jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari 83,75 persen pada tahun 2015 menjadi 85,27 persen pada tahun 2019, begitu juga dengan APK SMA mengalami peningkatan dari 64,33 persen menjadi 78,26 persen pada tahun 2019.

Angka Partisipasi Murni merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (tingkat SD kelompok usia 7-12 tahun, tingkat SLTP kelompok usia 13-15 tahun dan tingkat SLTA kelompok usia 16-18 tahun) dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Indikator APM digunakan untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Nilai APM tinggi, berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APM adalah 100 persen Perkembangan dan APM untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA berturut-turut pada tahun 2019 yaitu 99,60 persen, 74,71 persen, 59,85 pesen masih berada dibawah 100 persen

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan dari 7,33 tahun atau setingkat kelas 1 (satu) SMP menjadi 8,10 atau setingkat kelas 2 (dua) SMP pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan SPM standar Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun. Hal ini disebabkan

karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah, dimana hanya sampai di tingkat SMP saja. Disamping itu, minat anak-anak untuk melanjutkan sekolah juga masih rendah. Sebagian besar mereka lebih tertarik untuk bekerja sektor pertambangan dan sektor perkebunan sawit. Kenyataan yang demikian sudah tentu tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, sebab akan menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sijunjung dimasa mendatang. Dan HLS Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 mencapai 11,94 tahun meningkat menjadi 12,36 tahun pada tahun 2019.

Urusan Wajib Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan baik melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (promotif dan preventif) dan Upaya Kesehatan Perorangan (kuratif dan rehabilitatif). Pelayanan kesehatan perorangan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan mutu layanan, pemerataan aksesibilitas layanan dan penjangkauan pelayanan kesehatan sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat dilakukan dengan upaya promotif-preventif melalui Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), peningkatan kualitas lingkungan, *screening* faktor risiko penyakit tidak menular.

Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator berkurangnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Neonatal, Angka Kematian Ibu, gizi buruk, meningkatnya layanan kesehatan terhadap masyarakat miskin. Untuk mewujudkan capaian indikator tersebut perlu didukung dengan keterjangkauan pelayanan kesehatan baik melalui peningkatan infrastruktur maupun suprastruktur. Capaian indikator urusan kesehatan tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	13	17	20	16	6
2.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	6	8	9	7	7
3.	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	6	4	4	5	5
4.	Cakupan Pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin (persen)	80,50	89,10	81,25	68,31	84,90
5.	Cakupan Balita gizi buruk mendapat pertolongan (persen)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan tabel diatas AKB per 1.000 kelahiran di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi. AKB pada tahun 2015 sebesar 13 per 1.000 kelahiran menjadi 6 per 1.000 kelahiran meningkat menjadi 17 per 1.000 kelahiran tahun 2016 dan 20 per 1.000 kelahiran pada tahun 2017. Pada tahun 2019 AKB 6 per 1.000 kelahiran, kondisi ini lebih baik bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Begitu juga dengan AKN dan AKI di Kabupaten Sijunjung juga maengalami fluktuasi. Tahun 2019 AKN mencapai 7 per 1000 kelahiran hidup dan Angka Kematian ibu 5 per 100.000 kelahiran hidup. Cakupan

balita gizi buruk telah mencapai 100 persen, artinya tidak ada kasus gizi buruk yang tidak mendapat pertolongan atau pelayanan kesehatan di Kabupaten Sijunjung. Sementara untuk pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di kabupaten Sijunjung selama tahun 2015-2019 belum semuanya dapat terlayani. Berdasarkan data diatas tahun 2019 masyarakat miskin yang terlayani baru mencapai 84,90 persen artinya masih terdapat 15,10 persen yang belum mendapat pelayanan.

Fluktuasi capaian AKB, AKN dan AKI yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, menunjukkan belum konsistennya pelayanan kesehatan, terjadinya penurunan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan, bayi baik dalam kandungan maupun pasca melahirkan. Disamping itu, tingginya angka kematian ibu dan bayi karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melahirkan melalui non medis dan ditambah keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan relatif terbatas.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan membangun fasilitas dan menyediakan tenaga kesehatan. Karena, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Sijunjung Fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, posyandu, pustu, poliklinik. Untuk melihat memadai atau tidaknya fasilitas dan tenaga kesehatan dapat diukur dengan rasio fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Rasio Fasilitas Kesehatan, Dokter dan Tenaga Medis Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Posyandu per satuan balita	1:85	1:55	1:69	1:59	1:84
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:3.477	1:3.482	1:3.772	1:3.772	1:3.829
3.	Rasio Dokter terhadap satuan penduduk	1:6.544	1:3.902	1:4.565	1:4.031	1:4.102
4.	Rasio tenaga Medis terhadap satuan penduduk	1:3.836	1:3.835	1:3.709	1:3.247	1:3.247

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Angka rasio posyandu per satuan balita mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran pada tahun-tahun tertentu seperti pada tahun 2015 dan tahun 2019 sementara peningkatan jumlah posyandu relatif sedikit. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2015 sebesar 1:85, tahun 2016 sebesar 1:55, tahun 2017 sebesar 1:69 pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 rasio posyandu per satuan balita telah mencapai 1:84 artinya pada tahun 2019 tersebut 1 unit posyandu melayani 84 orang balita. Dan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk mengalami peningkatan dari 1:3.477 tahun 2015 menjadi 1:3.829 pada tahun 2019, satu unit puskesmas, poliklinik, pustu melayani 3.829 penduduk. Fasilitas-fasilitas kesehatan ini merupakan sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana (KB), peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak, menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk mencapai masyarakat sehat dan sejahtera.

Disamping itu, rasio dokter dan tenaga medis terhadap satuan penduduk mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2019. Penurunan angka rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk merupakan peluang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Tahun 2019 rasio dokter dan tenaga medis terhadap jumlah penduduk masing-masing 1:4.102 dan 1:3.247 kondisi ini jauh lebih baik bila dibandingkan tahun 2015 yaitu mencapai 1:6.544 untuk Rasio Dokter terhadap satuan penduduk dan 1:3.836 untuk rasio tenaga medis terhadap satuan penduduk, artinya pada tahun 2019 satu orang dokter melayani 4.102 orang dan 1 tenaga medis melayani 3.247 orang.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator Urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikur dengan 8 (delapan) indikator yaitu: 1). Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam); 2). Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m; 3).Rasio Jaringan Irigasi; 4). Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik; 5). Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; 6). Luasan RTH publik sebesar 20 persen dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan; 7). Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan dan 8). Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan persentase Penyelesaian kasus tanah Negara, capaian-capaian indikator tersebut sebagai berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan Indkator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2019

No .	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	22,11	24,50	32,46	34,86	38,94
2.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,62	0,62	0,62	0,79	0,79
3.	Rasio Jaringan Irigasi (persen)	52,07	54,23	52,32	59,47	58,58
4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	55,46	57,34	58,6	60,73
5.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	-	2,30	2,30	2,30
6.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	7,65	7,99	8,34	8,80	9,10
7.	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-
8.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	-	-	50	100	50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2020

Jalan merupakan urat nadi perekonomian, karena perekonomian masyarakat akan sangat ditentukan oleh seberapa lancar dan mudahnya arus barang dan jasa antar daerah (accessibility). Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan masih merupakan prioritas pembangunan bidang PUPR setiap tahunnya. Untuk ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga lebih dari 50 persen anggaran pembangunan di Dinas PUPR dialokasikan untuk kegiatan sektor jalan dan jembatan. Dari data yang ada dengan pembangunan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, Pemerintah masih kekurangan anggaran untuk sektor ini, sehingga sampai akhir tahun RPJM 2016 – 2021, kondisi jalan dengan kondisi baik 38,94 persen, artinya dari 829,42 KM (SK 2018)

kondisi jalan Kabupaten di Kabupaten Sijunjung terdapat ± 506,4 km jalan Kabupaten yang kondisinya kurang baik (tidak mantap). Untuk mencapai target pembangunan dari sektor jalan ini kedepan tentu diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar setiap tahunnya.

Begitu juga dengan pembangunan di sektor Sumber daya Air, dengan keterbatasan anggaran APBD setiap tahunnya, Pemerintah kabupaten masih mengandalkan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus. Dari data dapat dilihat bahwa ketersediaan jaringan irigasi untuk mengairi lahan budidaya pertanian khususnya persawahan samapai akhir tahun 2019 masih 58,58 persen Artinya masih kurang dari separuh keseluruhan luas budidaya pertanian yang belum dilayani oleh jaringan irigasi. Disamping dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi setiap tahunnya, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis kabupaten yang berbukit sehingga memerlukan bangunan pengantar (lining saluran) yang panjang dari sumber air ke lahan budidaya/persawahan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang merupakan isu strategis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persoalan wilayah kabupaten yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Kabupaten Sijunjung sudah memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang Daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011- 2031. Seiring dengan perubahan dan kondisi daerah, maka RTRW ini harus disesuaikan (direvisi) dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan /persetujuan dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengukur ketaatan Ketaatan terhadap RTRW yang merupakan kesesuaian antara RTRW dengan struktur ruang di lapangan didapat dari hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan RTRW. Data ini belum pernah diukur sebelumnya, karena untuk mendapatkan data awal harus dilakukan dengan cara menganalisis citra satelit (foto udara) terbaru Kabupaten Sijunjung untuk pemanfaatan ruangnya dibandingkan dengan rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu data ini belum dapat ditampilkan kedalam matrik tersebut diatas.

Disektor penataan bangunan, salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan), maka seluruh kegiatan pembangunan bangunan baik rumah, toko, bangunan pemerintah dan swasta harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan ini adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk bangunan gedung kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : Pembangunan bangunan gedung baru atau Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung yang meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan dan pelestarian/pemugaran.

Dari data yang ada pengurusan IMB oleh masyarakat dan swasta dari tahun ketahun ada peningkatan yang cukup baik, namun dari sisi angka keseluruhan Ratio Bangunan ber- IMB per satuan bangunan yang merupakan erbandingan jumlah bangunan yang memiliki IMB dengan Jumlah bangunan keseluruhan di Kabupaten Sijunjung sampai akhir tahun 2019 masih 9,10 persen Ini berarti masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Bangunan yang tidak ber IMB ini berada pada rumah

atau bangunan yang dibangun oleh masyarakat yang tersebar di Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Sijunjung yang sudah existing sebelum regulasi IMB diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Ketaatan terhadap pengurusan IMB ini oleh masyarakat memang masih kurang, karena pengawasan dan penegakkan hukum atas pendirian bangunan yang tidak ber IMB oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga masih relatif sangat minim. Oleh karena ini tantangan kedepan supaya seluruh bangunan yang akan dan sedang dibangun perlu diawasi oleh pihak-pihak terkait dan bagi yang melanggar diberikan sanksi yang tegas, sehingga ada efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar dan menjadi perhatian bagi yang lain untuk yang datang.

Permasalahan Pertanahan atau Sengketa tanah di Kabupaten Sijunjung masih berkisar dalam hal pemanfaatan tanah negara untuk pembangunan publik. Dari beberapa kasus yang terjadi, kebanyakan sengketa tanah berasal dari gugatan pemilik tanah ulayat kepada Pemerintah Daerah ketika akan dan sedang melaksanakan kegiatan pembangunan di areal atau lokasi tanah tersebut, yangmana tanah tersebut sudah diserahkan atau dibebaskan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya. Kemudian ada kasus pembebasan lahan untuk pembangunan yang biasanya permasalahannya adalah tidak adanya kesepakatan ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemilik Ulayat.

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kemampuan pemerintah dalam menyediakan akses air minum, sanitasi layak, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU serta tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Capaian indikator Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.26
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019.

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase rumah layak Huni terhadap jumlah KK (persen)	-	-	63,19	64,67	62,41
2.	Jumlah rumah layak huni			35.75	36.59	41.59
3.	Cakupan lingkunagn yang sehat dan aman yang dididukung dengan PSU (persen)	-	-	96,77	96,92	98,47
4.	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat (persen)	67,73	67,73	69.56	71,27	71,60
5.	Cakupan akses air minum aman masyarakat (persen)	66,80	67,70	68,78	69,43	69,11

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung 2020

Berdasarkan tabel diatas persentase rumah layak huni terhadap jumlah KK pda tahun 2019 sebesar 62,41 persen menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 masing-masing 63,19 persen 64, 67 persen. Bila dilihat dari jumlah rumah layak huni tahun 2019 sebanyak 41.593 rumah meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 mencapai 36.591 rumah dan 35.755 pada tahun 2017. Peningkatan rumah layak huni tahun 2019 sebanyak 5.002 rumah disebabkan oleh kegiatan lingkunagn sehat perumahan dan ditambah dengan kegiatan swadaya masyarakat.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2017 capaian indikator ini 96,77 persen meningkat menjadi 98,47 persen tahun 2019. Dan cakupan akses sanitasi layak masyarakat pada periode tahun 2015-2019 juga mengalami perbaikan. Tahun 2015 cakupan akses sanitasi layak masyarakat 67,73 persen meningkat menjadi 71,60 persen tahun 2019. Sementara untuk cakupan akses air minum aman tahun 2019 mencapai 69,11 persen pertumbuhannya sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 69,43 persen.

Rendahnya capaian indikator rumah layak huni, akses sanitasi dan air minum layak pada tahun 2019, secara umum disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Disamping itu, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah juga sebagai penghambat dalam pembangunan perumahan, sanitasi dan pembangunan akses air minum layak. Namun, pada tahun 2015-2019 untuk mendorong peningkatan capaian indikator-indikator ini pemerintah daerah melalui dinas terkait telah melakukan berbagai kegiatan, seperti kegiatan pembangunan drainase dan gorong-gorong, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, penyediaan sarana dan prasarana limbah, perumahan, permukiman dan kegiatan distribusi air minum.

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu faktor penunjang agar meningkatnya nilai investasi di suatu daerah adalah adanya kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta perlindungan terhadap masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian indikator-indikator: 1). Persentase menurunnya kasus tindak kriminal; 2). Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan; 3). Persentase kejadian kebakaran yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas pemadam kebakaran dan 4). Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana.

Capaian indikator Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2015-2019 selalu 100 persen, ini artinya kondisi Kabupaten Sijunjung sangat kondusif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan tinggal di Kabupaten Sijunjung. Capaian indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Perkembangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	100	100	100	100	100
2.	Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	100	100	100	100	100
3.	Persentase kejadian kebakaran yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas pemadam kebakaran	100	100	100	100	100
4.	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	100	100	100	100	100

Sumber: SKantor Kesbangpol, Dinas Satpol PP dan Damkar, Dinas Satpol PP dan Damkar dan BPBD Tahun 2020

Urusan Wajib Sosial

Perkembangan indikator urusan wajib sosial berdasarkan data tahun 2019 menunjukkan seluruh fakir miskin telah mendapatkan bantuan kebutuhan dasar. Untuk indikator PMKS yang memperoleh bantuan dan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS, secara persentasi menunjukkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2019 Perkembangan indikator ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.28
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Kabupaten Sijunjung
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	45,00	48,40	56,70	57,0	100
2.	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100
3.	Persentase korban bencana yang diberi bantuan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial PPr PA Tahun 2020

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja pembangunan Urusan Tenaga Kerja secara umum dapat dilihat dari: 1). Persentase penempatan pencari kerja terdaftar; 2). Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 sesuai standar; 3). Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, 4). Persentase tenaga kerja yang mendapatkan; 5). Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Capaian indikator-indikator tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten
Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	15,23	16,00	48,74	53,00	36,56
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan K3 sesuai standar	-	-	-	-	100
3.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100
4.	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	76,8	81,81	88,88	91,42	90,18
5.	Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Nakertrans Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2019 sebesar 36 persen, dan mengalami penurunan menjadi 54 persen pada tahun 2018. Turunnya capaian indikator ini disebabkan kurangnya minat pencari kerja yang akan bekerja diluar kabupaten, terkendala dengan izin orang tua. Disamping itu, pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan pada tahun 2019 masih banyak yang tidak melapor. Capaian untuk indikator jumlah perusahaan yang menerapkan K3 sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 100 persen dari 15 perusahaan yang dibina. Dan capaian indikator tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari tahun 2018 dan tahun 2019 berada Pada angka 100 persen dimana peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan kewirausahaan sebanyak 50 orang terdiri dari 2 paket masing-masing per paketnya 25 orang.

Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, jika dilihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dikarenakan semakin banyak peserta pelatihan yang terserap untuk mengikuti pelatihan. Faktor lain disebabkan semakin banyaknya jumlah paket pelatihan yang diadakan oleh UPTD BLK Sijunjung baik melalui Anggaran APBD maupun APBN. Namun demikian pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan karena peserta hanya berminat untuk mengikuti pelatihan dengan kejuruan tertentu saja seperti tata boga, menjahit, dan komputer. Sementara untuk indikator Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari 2015-2019 telah mencapai 100 persen, artinya tidak permasalahan antar pekerja dengan perusahaan yang tidak diselesaikan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu indikasi terciptanya kesetaraan gender adalah kontribusi yang sama dalam sektor publik antara laki-laki dan perempuan. Ini dapat digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan. Dan IDG mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Perkembangan IDG dan IPG di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Perkembangan Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin	56,21	56,00	56,84	56,84	55,47
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin	92,34	92,80	93,40	93,40	93,21

Sumber : BPS 2020

Urusan Wajib Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang ada Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sijunjung 69,44 tahun 2015 meningkat menjadi 91,70 tahun 2018. Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019, sebagai berikut:

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor Pola Pangan Harapan	69,44	70,31	81,45	83,60	91,70

Sumber: Dinas Paperi Kabupaten Sijunjung 2020

Urusan Wajib Pertanahan

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, aset bangsa. Manajemen aset tanah sangat penting dirasakan bagi mereka yang berpendapatan sebagai pengusaha daripada sebagai pegawai atau buruh. Begitu pentingnya manajemen aset tanah, sehingga pada awalnya Undang-undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam konsideran) telah mengamanatkan bahwa dengan diundangkannya UUPA, Pemerintah/Negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah.

Untuk pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah, saat ini terus diupayakan secara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan tanah dan penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Selama periode tahun 2015-2019 tidak ada terjadi konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase sengketa lahan dan konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda yang diselesaikan	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung 2020

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor akibat dari aktifitas kegiatan manusia serta kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang disebabkan oleh prose alami bumi. Akan tetapi untuk Kabupaten Sijunjung permasalahan lingkungan tampaknya lebih banyak disebabkan oleh aktifitas kegiatan manusia terutama kegiatan pertambangan seperti masih terjadinya penambangan emas. Kegiatan penambangan emas tersebut lebih banyak dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai (DAS), tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan terutama penggunaan merkuri pada tambang emas yang akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia secara tidak langsung.

Dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai maupun pada lahan kering lainnya dalam beberapa tahun terakhir dan terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi yang demikian sudah tentu juga membawa dampak buruk terhadap kehidupn masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak meluasnya kerusakan lingkungan, pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan pembinaan secara kontinu kepada masyarakat. Disamping itu Pemerintah Daerah juga tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Selain itu penanganan sampah juga merupakan isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Perkembangan pencemaran status mutu air dan cakupan penanganan sampah Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2019 menunjukkan capaian kinerja yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.33
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Pertanahan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	73,8	75,00	64,92	78,13
2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	-	14,10	17,03	23,63
3.	Indek Kualitas Udara	-	-	-	91,25	86,93

Sumber: Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung 2020

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan salah satu modal utama pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang serius agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi penting dalam perencanaan pembangunan.Berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah telah mengeluarkan Kepres RI No. 88 tahun 2004 tentang Sistim Informasi Kependudukan (SIAK). Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistim tesebut maka pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Untuk menerapkan hal itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berupaya untuk menerapkannya secara optimal, namun demikian kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil periode 2015-2019 belum maksimal. Kondisi capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	79,21	75,00	89,76	94,12	115,28
2.	Persentase penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik	75,00	89,00	94,10	96,72	94,77
3.	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	NA	45	50	60	40,76

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung 2020

Dari data tabel diatas, tahun 2018 persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga sebesar 115,28 persen. Sementara untuk penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik mencapai 94.77 persen. Dan untuk penduduk yang memiliki Akte Kelahiran hannya mencapai 40,76 persen, ini menunjukan tertib administrasi kependudukan di kabupaten Sijunjung semakin membaik. Khusus untuk Akte kelahiran depannya perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkannya.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dapat dikur secara umum dengan indikator-indikator capaian persentase kerapatan adat nagari yang aktif, jumlah nagari berkembang, persentase nagari yang membuat laporan keuangan, jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kopetensinya. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase kerapatan adat nagari yang aktif	100	100	100	100	100
2.	Jumlah nagari berkembang	10	13	20	22	25
3.	Persentase Nagari yang membuat laporan keuangan	100	100	100	100	100
4	Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kopetensinya	30	38	50	54	61

Sumber: Dinas pemberdayaan masyarakat dan Nagari 2020

Berdasarkan tabel diatas indikator capaian persentase kerapatan adat nagari yang aktif dan indikator persentase nagari yang membuat laporan keuangan telah telah mencapai 100 persen. Sementara untuk jumlah nagari berkembang masih 25 persen dan jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kopetensinya mencapai 61 persen.

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil dapat dilihat dari indikatpr Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR), Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif, Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) (Anak/WUS)	2,3	2,8	2,6	2,5	2,5
2.	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	72,06	68,62	70,57	72,56	69,09
3.	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,02	31,25	31,25	29,17	20,90

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

Berdasarkan data dari tabel diatas Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana melalui dinas terkait perlu melakukan terobosan untk peningkatan capain Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif dan Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dalam lima tahun terakhir capaian indikator kinerjanya mengalami penurunan. Tahun

2015 capaian indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif 72,06 persen menurun menjadi 69,09 persen pada tahun 2019. Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I juga mengalami penurunan dari 29,02 persen pada tahun 2015 menjadi 20,90 persen tahun 2019.

Urusan Wajib Perhubungan

Untuk mengukur Urusan Wajib Perhubungan terdapat tiga indikator yaitu persentase kendaraan bermotor yang layak jalan, persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa serta indikator persentase penduduk yang telah menggunakan listrik. Capaian indikator untuk kendaraan tahun 2015-2019 dengan kondisi layak jalan diatas 90 persen. Dan kebutuhan terhadap perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa seperti rabu-rambu jalan, marka jalan dan zebracross capaian indikator ini 63 persen pada tahun 2019. Namun, lebih baik capaiannya dari tahun sebelumnya. Listrik merupakan energi vital dalam kehidupan masyarakat, capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 95,67 persen artinya masih ada 4,33 persen masyarakat atau rumah tangga yang belum menikmati energi listrik, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase kendaraan bermotor yang layak jalan	93,00	90,45	94,00	95,00	95,65
2.	Persentase Tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	30,5	47,67	87,94	59,08	63,00
3.	Persentase penduduk yang telah menggunakan listrik	90,00	93,13	94,60	95,00	95,67

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung 2020

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik(*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 telah mempunyai website resmi yaitu; www.sijunjung.go.id. Disamping itu, dilakukan juga pembangunan infrastruktur jaringan internet (LAN dan WAN) di dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan internet tersebut memungkinkan terkoneksiya tiap-tiap PD dalam jaringan internet, sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Jaringan internet di Kabupaten terdiri dari jaringan terrestrial dan satellite. Untuk jaringan terrestrial baru menjangkau lima kecamatan dengan jaringan broadband *fiber optic*. Tiga kecamatan yang belum terjangkau *fiber optic* adalah Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus dan Lubuk Tarok.

Layanan internet di wilayah Kabupaten Sijunjung sebarannya didominasi oleh jaringan nirkabel dengan suplai bandwith dari BTS (*Base Transceiver Station*) operator baik GSM maupun CDMA / WCDMA. Secara fisik sebaran BTS sudah hampir merata di setiap wilyah kabupaten Sijunjung terutama lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Akan tetapi karena kondisi geografi dan topografi yang berbukit-bukit maka yang menjadi faktor pembatas jangkauan BTS bukan hanya masalah jarak tetapi juga keterhalangan oleh topografi yang berbukit-bukit. Masih banyak lokasi yang sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan BTS tetapi tidak dapat menerima signal internet.

Nagari-nagari yang belum terjangkau jaringan internet diantaranya adalah di kecamatan Kamang Baru nagari Lubuk Tarantang, Tanjung Kaliang dan Padang Tarok; nagari Kampung Dalam dan Silongo kecamatan Lubuk Tarok; nagari Paru dan Solok Ambah kecamatan Sijunjung; nagari Silantai, Sisawah, Tanjung Labuah dan Unggan kecamatan Sumpur Kudus; nagari Langki, Pulasan dan Sibakur kecamatan Tanjung Gadang.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga informasi dapat disediakan dan disampaikan secara lebih cepat, tepat, mudah dan wajar. Sebagai lembaga masyarakat KIM ini bertugas mewujudkan jaringan informasi dan media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pengembangan KIM di Kabupaten Sijunjung baru dimulai pada tahun 2017. Sampai saat ini sudah terbentuk 11 Kelompok Informasi Masyarakat.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pemerintah. Penilaian Indeks SPBE ini meliputi lima perspektif yaitu : 1) Kebijakan dan Tatakelola Kelembagaan SPBE; 2) Kebijakan dan Tatakelola Strategi dan Perencanaan SPBE; 3) Kebijakan dan Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi; 4) Kebijakan dan Tatakelola Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 4) Kebijakan dan Tatakelola Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Penilaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sijunjung baru dilakukan selama dua tahun yaitu 2018 dengan nilai 1,78 poin (kurang) dan tahun 2019 dengan nilai 2,04 poin (Cukup). Penilaian ini melibatkan hampir seluruh instansi dan PD lingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan layanan internet setiap nagari/desa (persen)	43	43	43	43	48
2.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan (persen)	-	-	8	11	11
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (poin)	-	-	-	1,46	2,04

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu barometer ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Keberhasilan urusan Wajib Koperasi dan UMKM dapat dilihat dari capaian indikator koperasi yang aktif, nilai Sisa Hasil Usaha (SHU), akses terhadap permodalan dan kualiatas SDM yang dimilik.

Perkembangan jumlah koperasi yang aktif di Kabupaten Sijunjung 36,70 persen pada tahun 2015 menjadi 79,17 persen pada tahun 2019. Ditinjau dari indikator Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan “Sehat” sampai tahun 2019 berjumlah 13 koperasi, kondisi ini lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah koperasi yang sehat djuga diikuti oleh peningkatan SHU koperasi. Pada tahun 2015 SHU koperasi Rp 2.867 juta meningkat menjadi Rp 48147 juta pada tahun 2019. Disamping itu perkembangan jumlah UKM yang meningkat pengetahuan kewirausahaan 43,40 persen tahun 2015 menjadi 57,33 persen pada tahun 2019. Peningkatan pengetahuan UKM mempunyai korelasi positif terhadap akses permodalan. Akses UKM terhadap permodalan selama lima tahun terakhir cenderung meningkat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

N o	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase koperasi aktif	36,70	37,98	47,46	47,46	79,17
2.	Persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan “Sehat”	8	8	10	10	13
3	Rata-rata nilai SHU Koperasi Rp (juta)	2.867	15.296	7.119	9.9544	48.147
4.	Persentase peningkatan jumlah UKM yang meningkat pengetahuan kewirausahaannya	43,40	45,67	48,00	50,00	57,33
5.	Persentase peningkatan jumlah UMKM dan Koperasi yang mengakses permodalan	8,55	28,45	40,32	50,00	50,82

Sumber: Dinas Dagperinkop UKM Tahun 2020

Urusan Wajib Penanaman Modal

Indikator untuk urusan wajib penanaman dalam rangka pencapaian target RPJMD 2016-2021 dapat dilihat diukur dari jumlah investor dan realisasi investasi. Jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah realisasi investasi PMDN tahun 2015 Rp. 957.631 ribu dengan jumlah investor 95 investor dan tahun 2019 mencapai Rp. 8.097.746 ribu dengan jumlah investor 144 investor. Namun, untuk investor luar negeri tahun 2016, jumlah investor sebanyak 6 investor dengan realisasi investasi \$ 32.370 dan tahun 2019 \$ 189.937 dengan jumlah investor 10 investor. Jumlah investor yang memiliki nomor Induk Berusaha (NIB), dan hak akses setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten
Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Investor PMDN	95	98	118	124	144
2.	Jumlah Investor PMA	6	6	6	9	10
3.	Realisasi investasi PMDN (Rp. ribu)	957.631	1.279.875	4.133.355	7.109.779	8.097.746
4.	Realisasi investasi PMA US\$	-	32.370	122.170,8	158.668,11	189.937

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung

Selain indikator-indikator diatas keberhasilan urusan wajib penanaman modal juga diukur dengan lama proses perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan. Lama proses perizinan selama tahun 2015-2019 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu paling lambat lima hari kerja. Indek Kepuasan Masyarakat ditentukan dengan melakukan survey terhadap masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan. Survey dilakukan Setiap tahunnya dimulai pada tahun 2017-2019. Berdasarkan hasil survey capaian Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2017 mencapai 76,90 poin meningkat menjadi 83,53 poin tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Lama Proses Perizinan dan Indek Kepuasan
Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Lama Prose Perizinan (hari)	5	5	5	5	5
2.	Indek Kepuasan Masyarakat (poin)	-	-	76,90	83,14	83,53

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Untuk keberhasilan Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga dapat diukur dari capaian indikator; 1). Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif; 2). Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat; 3). Persentase sarana dan prasarana olah raga yang terstandarisasi/layak.

Secara umum capaian indikator urusan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan capaian yang cukup baik dan terus meningkat selama periode 2015-2019. Terutama untuk indikator kinerja peringkat Kabupaten Sijunjung pada Porprov Sumatera Barat yang diadakan sekali 2 tahun pada tahun 2015 Kabupaten Sijunjung berada peringkat ke-18 dan terakhir pada tahun 2019 mendapat peringkat ke-9.

Capaian-capaian indikator Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari masyarakat terutama organisasi kempeudaan yang semakin aktif berperan dalam mengalikan olah raga di kabupaten Sijunjung. Disamping itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang representatif mempunyai peranan penting dalam meningkatkan prestasi olah raga. Capaian indikator-indikator Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah Raga
Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	19	14	16	19	27
2.	Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	18	-	16	-	9
3.	Persentase sarana dan prasarana olah raga yang terstandarisasi/layak	-	-	-	20	60

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tahun Tahun 2020

Urusan Wajib Statistik

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; a) statistik dasar, b) statistik sektoral dan statistik khusus.

Sesuai penyelenggaraannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut: 1) Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, PD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data. 2) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. 3) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan per undang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi telah dilakukan di antaranya sebagai berikut 1) Mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku Tupoksi penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik. 2) Dibutuhkan adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masing-masing instansi penyedian data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu. 3) Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik.

Urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pola kerjasama selain melibatkan seluruh PD juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung. Produk yang

sudah dikerjasamakan selama ini adalah penyusunan Buku Kabupaten Sijunjung Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung. Kedua buku tersebut diatas selain dicetak dalam versi manual/analog juga tersedia dalam versi elektronik / e-Book. Buku Kabupaten Sijunjung Dalam Angka dan Produk Domestik Regional Bruto tersebut didistribusikan ke seluruh PD dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sijunjung. Untuk versi digital dapat diunduh dari website Pemerintah Kabupaten Sijunjung (*sijunjung.go.id*) dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung (*sijunjungkab.bps.go.id*).

Data statistik yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah statistik sektoral. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Terkait statistik sektoral ini, saat ini belum dilakukan pengembangan sistem dan jaringan data yang terintegrasi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Urusan Urusan Statistik
Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka	100	105	105	105	105
3.	Jumlah Buku Produk Domestik Regional Bruto	65	75	75	75	65

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Urusan Wajib Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan Kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara Perangkat Daerah Kabupaten.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka keamanan informasi dan dokumen menjadi isu krusial. Disinilah peran persandian menjadi sangat penting. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Implementasi yang sudah diterapkan terkait persandian ini dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah penggunaan sertifikat digital. Saat ini memang Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melum mengambil kebijakan penggunaan sertifikat digital untuk keseluruhan dokumen. Yang sudah mengimplementasikan sertifikat digital saat ini

diantaranya adalah dokumen Laporan Harian Kerja, Aplikasi dan Dokumen e-Planning dan Aplikasi dan Dokumen Monev. Indikator kinerja untuk urusan persandian ini adalah persentase PD yang menggunakan pengamanan data sistem dengan persandian, sampai kondisi tahun 2015-2016 belum terdapat PD yang menggunakan persandian untuk pengamanan sitem informasi daerah. Perangkat daerah menggunakan sandi dalam komunikasi dimulai pada tahun 2017, capaian indikator ini tahun 2017-2019 baru mencapai 10 persen seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Urusan Persandian
Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	10	10	10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

Urusan Wajib Kebudayaan

Keberhasilan Urusan Wajib Kebudayaan dapat dilihat dari persentase warisan budaya yang dilestarikan, jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan, jumlah sekolah yang mengembangkan seni dan budaya berbasis Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah (ABS-SBK), Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK.

Indikator kinerja prsentase warisan budaya yang dilestarikan pada tahun 2017 sebanyak 30,00 persen meningkat menjadi 60,00 persen tahun 2019. Indikator mengembangkan seni dan budaya berbasis Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah (ABS-SBK tahun 2017 sebanyak 2 sekolah menjadi 8 sekolah pada tahun 2019. Dan secara umum perkembangan capaian Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	-	30,00	54,55	60,00
2.	Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembagkan seni dan budaya berbasis Adat Basandi Sara Sara	-	-	2	4	8
3.	Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan	-	-	2	4	41
4.	Jumlah SDM seni budaya yang dikembangkan potensinya	-	-	80	130	150
5.	Jumlah SDM sejarah dan kepurbakalaan yang dikembangkan potensinya	-	-	80	130	150

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Urusan Wajib Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana definisi perpustakaan adalah sebuah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan semakin baik dan berkualitasnya layanan perpustakaan di kabupaten Sijunjung, maka akan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	88	895	1.029	1.052	896
2	Jumlah koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	19.898	20.140	20.956	21.480	21.480
3	Jumlah Rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	10.252	9.143	9.204	9.674	6.665
4	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

Urusan Wajib Kearsipan

Indikator pembangunan Urusan Wajib Kearsipan periode tahun 2015-2019 menunjukkan perkembangan yang baik bila kita bandingkan dengan tahun 2015-2017 karena pada periode tersebut belum ada Perangkat Daerah yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku. Namun, pada tahun 2018 sudah Perangkat Daerah sudah mulai melakukan pengelolaan arsip secara baku, walaupun capaiannya baru mencapai 15,6 persen dari jumlah perangkat daerah yang ada, angka capaian ini terus mengalami kenaikan mencapai 65,60 persen pada tahun 2019. Untuk indikator jumlah SDM pengelola kearsipan sesuai kompetensi tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku	-	-	-	15,6	65,60
2	Persentase jumlah SDM pengelola kearsipan sesuai kompetensi	20,00	33,30	50,00	66,70	75

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Capaian Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yaitu: 1). Produksi perikanan budidaya; 2). Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi; 3) Nilai Tukar Pembudidayaan Nkan (NTP).

Produksi perikanan melalui program budidaya selama periode 2015-2019. Produksi ikan budidaya tertinggi terdapat pada tahun 2019 tercatat sebesar 13.879 kg dan terendah pada tahun 2016 dengan produksi 10.156 kg. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir produksi ikan budidaya mulai mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di 3 (tiga) Balai Benih Ikan (BBI), BBI Sumpur Kudus, Aie Amo dan BBI Latang sebagai suply bibit ikan. Disamping itu, untuk memasarkan produksi ikan yang semakin meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir telah dikembangkan usaha perikanan berbasis agribisnis yang terintegrasi sampai tahun 2019 telah dikembangkan sebanyak 7 unit. Sementara untuk indikator Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan selama periode tahun 2015-2019 secara umum diatas 100 persen, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

N o	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan budidaya (kg)	12,711	10.156	10.692	11.197	13.879
2	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	-	-	2	4	7
3	Nilai Tukar Pembudidayaan ikan	99,93	103.32	101.26	101.30	101.30

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2020

Urusan Pilihan Pariwisata

Perkembangan capaian dari Urusan Pilihan Pariwisata berdasarkan data indikator yang ada, untuk kunjungan wisatawan mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Dijadikannya Geopark Silokek sebagai Geopark Nasional tentu kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sijunjung kedepannya akan lebih meningkat. Untuk itu, perlu diimbangi dengan pengembangan destinasi wisata lainnya, pembangunan infrastruktur yang mendukung penegembangan pariwisata. Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019 seperti terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

N o	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah destinasi wisata yang berkembang	1	1	3	3	3
2	Jumlah Kunjungan wisatawan	5.966	8.861	12.466	13.305-	14.404

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020

Urusan Pilihan Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Sijunjung memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja dan input bagi sektor industri. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Sijunjung selama tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan. Tahun 2019 laju pertumbuhannya 0,41 persen, ini merupakan laju pertumbuhan terendah selama lima tahun teakhir.

Produktivitas sektor tanaman padi dan tanaman pangan lokal lainnya secara umum juga mengalami penurunan. Produktivitas tanaman padi dari 5,20 ton/ha tahun 2015 menjadi 3,96 ton/ha tahun 2019, kedelai 1,06 ton/ha tahun 2015 menjadi 1,19 tahun 2019 begitu juga dengan produktivitas kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar juga mengalami penurunan selama periode tahun 2015-2019. Namun, yang cukup mengembirakan pada tahun 2015-2019 produktivitas untuk tanaman jagung mengalami peningkatan dari 6,34 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 6,75 pada tahun 2019. Produksi untuk sektor perkebunan karet, kelapa sawit juga mengalami peningkatan pada periode 2015-2019 kecuali untuk produksi kakao.

Produksi pada sektor peternakan juga mengalami penurunan. Produksi daging sapi turun dari 478,94 ton menjadi 426,11 ton pada tahun 2019, daging kerbau dari 74 ton tahun 2015 meningkat menjadi 125 ton tahun 2018 dan tahun 2019 produksinya turun menjadi 122 ton. Sementara untuk sektor produksi telur ayam mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 514,53 ton pada tahun 2015 menjadi 1168,99 ton pada tahun 2019. Capaian indikator kinerja Urusan Pilihan Pertanian pertanian tahun 2015-2019, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pertanian
di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian/perkebunan	3,63	3,36	2,25	2,57	0,41
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,93	99,93	96,97	95,31	96,01
4.	Jumlah produksi komoditas perkebunan Ton					
	Produksi Karet	54.267	48.194	52.492	50.256	62.005
	Produksi Sawit	18.713	37.329	107.949	116.069	117.473
	Produksi Kakao	638	1.263	1.261	1.326	1.130
5.	Jumlah produktivitas padi dan bahan utama lokal lainnya (Ton/Ha)					
	Produktivitas Padi	5,20	5,42	4,99	4,57	3,96
	Produktivitas Jagung	6,34	5,79	5,48	4,63	6,75
	Produktivitas Kedelai	1,06	-	-	1,28	1,19
	Produktivitas Kacang Tanah	1,17	1,28	0,92	2,50	1,25
	Produktivitas Kacang Hijau	1,00	-	1,00	1,00	0,95
	Produktivitas Ubi Kayu	31,60	34,86	14,12	41,17	40,86
	Produktivitas Ubi Jalar	-	-	-	-	12,53
	Produktivitas Cabe	1,18	1,14	0,58	1,60	1,85
6.	Jumlah produksi peternakan (Ton)					
	Produksi daging sapi	478,94	509,73	507,58	326,82	426,11
	Produksi daging kerbau	74	76	66	125	122
	Produksi Telur (ayam buras, ras, itik)	514,53	547,02	869,32	691,26	1168,99

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2020

Urusan Pilihan Perdagangan

Capaian indikator kinerja perdagangan dalam negeri di Kabupaten Sijunjung terlihat dari laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan metrologi legal. Selama periode

2015-2019 laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015 laju pertumbuhan sektor ini mencapai 6,44 persen naik menjadi 7,15 persen tahun 2019. Hal ini memberikan gambaran bahwa perdagangan besar dan eceran di kabupaten Sijunjung sudah mulai tumbuh. Pesatnya pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Keberhasilan Urusan Pilihan Perdagangan juga diukur dari indikator Persentase UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan metrologi legal (persen) selama periode 2015-2019 telah mencapai 100 persen. Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di
Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	6,44	6,21	7,41	6,55	7,15
2	UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan metrologi legal	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung 2020

Urusan Pilihan Perindustrian

Keberhasilan perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pilihan Perindustrian dapat dilihat Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian dan Jumlah IKM yang memanfaatkan Teknologi Tepat, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di
Kabupaten Sijunjung, Tahun 20143-2018

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	4,37	7,44	0,46	4,57	-5,49
3	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan teknologi tepat guna	30	34	38	46	50

Sumber : Dinas Nakertrans Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2015-2019 laju pertumbuhan PDRB sektor perindustrian mengalami fluktuatif. Tahun 2015 laju pertumbuhan sektor ini mencapai 4,37 persen mengalami perlambatan pertumbuhannya -5,49 persen tahun 2019, laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 7,44 persen. Untuk itu kedepanya, khususnya perencanaan tahun 2021 pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu untuk meningkatkan pembinaan terhadap IKM. Semetara untuk Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan teknologi tepat guna capaian indikatornya terus mengalami penigkatan, kondisi tahun 2019 mencapai 50 persen. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pilihan Perindustrian di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Grafik berikut:

Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerjasama antar pemerintah daerah baik pemerintah daerah pengirim maupun pemerintah daerah penerima dengan pemerintah pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Fokus utama transmigrasi adalah penempatan dan membangun transmigrasi baru serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat lokal sekitarnya. Nagari Padang Tarok merupakan Nagari di Kabupaten Sijunjung yang dijadikan sebagai lokasi transmigrasi dengan program Transmigrasi Umum (TP) pola lahan Kering (TPLK). Jumlah warga dari tahun 2015 sampai 2019, terdapat 221 KK yang ditempatkan di UPT Padang Tarok SP.1 dengan rincian pada tahun 2016 sebanyak 30 KK yaitu : 5 KK dari Kab. Klatem Prop Jawa Tengah. 5 KK Kulon Progo DI. Yogyakarta, 8 KK Korban Gempa Sumbar (3 KK Kab. Padang Pariaman dan 5 KK Kab. Agam dan 12 Kab. Sijunjung. Sementara pada tahun 2018 sebanyak 191 KK terdiri dari: 120 KK Prop. Jawa Tengah, 10 KK Prop. DI. Yokyakarta dan 61 KK dari Kabupaten Sijunjung, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah transmigran yang ditempatkan per tahun	-	30	-	191	221
2	Jumlah transmigran yang dibina	-	30	30	191	221

Sumber : Dinas Nakertrans Tahun 2020

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dapat menggambarkan perkembangan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain baik kabupaten/kota maupun Provinsi yang berdekatan. Untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu:

1. Memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia menurut tingkat permintaan yang tinggi, dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh daerah lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etas kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokannya dapat memenuhi kebutuhan serta selera konsumen baik di pasar domestik, regional maupun global.
2. Memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya, misalnya produk-produk yang dihasilkan dari SDA, seperti karet, minyak sawit (CPO) dan puluhan produk hilirnya .

Kabupaten Sijunjung akan menggunakan kedua strategi ini untuk meningkatkan daya saing daerah. Beberapa aspek penting dalam peningkatan daya saing daerah yang akan dipaparkan pada bagian ini yaitu; kemampuan ekonomi daerah, fasilitas daerah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

A. Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator yaitu ; a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, b). Pendapatan per-kapita, dan c). Nilai Tukar Petani (NTP) dan d). pengeluaran ril per kapita. Untuk nilai tukar petani bila $NTP > 100$ berarti petani mengalami surplus, bila $NTP = 100$, artinya petani mengalami impas atau *break event*, bila $NTP < 100$ artinya petani mengalami defisit.

Perkembangan PDRB, pendapatan per-kapita, dan pengeluaran ril perkapita mengalami kenaikan p periode 2015-2019. Sementara untuk NTP masih dibawah angka 100. Hal ini menggambarkan petani mengalami defisit, sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli petani. Perkembangan keempat indikator kemampuan daya saing ekonomi Kabupaten Sijunjung selama periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	PDRB	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PDRB (Juta)					
	ADHB	6.955.425,78	7.439.227,39	7.978.030,46	8.491.256,40	9.133.599,30
	ADHK	5.537.779,26	5.829.043,58	6.136.255,76	6.448.358,44	6.759.893,90
2.	PDRB Perkapita (Juta)					
	ADHB	31,26	32,87	34,67	36,32	38,48
	ADHK	24,89	25,76	26,67	27,58	28,48
3.	Pengeluaran Ril per Kapita (ribu)	9.796	9.895	10.093	10.277	10.309
4.	Nilai Tukar Petani (persen)	101,07	98,88	99,93	99,93	96,01

Sumber: BPS

B. Fasilitas Daerah

Ketersediaan infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor pada suatu daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah tersebut. Secara umum ketersediaan infrastruktur suatu daerah dapat dilihat dari; a). Fasilitas sarana transportasi, Energi listrik dan komunikasi dan Rencana tata ruang wilayah.

Sarana Transportasi

Infrastruktur jalan mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas, kecamatan dan desa/nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jaringan jalan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui kondisi jalan di Kabupaten Sijunjung. Panjang jalan kabupeten di Kabupaten Sijunjung 1056,86 km sebelum dilakukan updating tahun 2018. Setelah dilakukan updating tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor

188.45/252/KPTS-BPT-2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan kabupaten 829,49 km. Sementara untuk jalan Provinsi dan Negara di Kabupaten Sijunjung masing-masing 49 km dan 109 km. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk perbaikan jalan Provinsi dan jalan Negara perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2019 kondisi jalan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan jenis permukaan dengan jenis permukaan aspal 460,92 km atau 55,57 persen, rigid 142,16km atau 17,14 persen, 142,86 km atau17,22 persen dengan jenis permukaan kerikil dan masih ada jalan dengan permukaan tanah 83,55 km atau 10,07 persen. Jalan dengan jenis permukaan aspal dari tahun 2015-2019 terus bertambah tahun 2015 sepanjang 360,98 km menjadi 460,90 km pada tahun 2019. Dan jalan dengan jenis permukaan rigid dan tanah mengalami pengurang. Jalan dengan jenis permukaan rigid tahun 2015 sepanjang 203,99 km menjadi 142,16 km tahun 2019, jalan dengan jenis permukaan tanah tahun 2015 sepanjang 188,25 km menjadi 83,55 tahun 2019, begitu juga dengan jalan dengan jenis permukaan berkerikil mengalami pengurangan tahun 2015 sepanjang 303,64 km menjadi 142,86 km tahun 2019, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Permukaan Jalan (km)				
	Aspal	Rigid	Tanah	Kerikil	Jumlah
2015	360,98	203,99	188,25	303,64	1056,86
2016	475,44	122,65	296,86	156,21	1056,86
2017	477,14	126,65	296,86	156,21	1056,86
2018	458,82	145,73	102,10	127,35	834,00
2019	460,92	142,16	83,55	142,86	829,49
Persentase Kondisi 2019	55,57	17,14	10,07	17,22	100

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Bila ditinjau dari segi kondisi kerusakan jalan, pada tahun 2019 jalan dengan kondisi baik 322,97 km atau 38,98 persen, rusak sedang 186,13 km atau 22,44 persen, rusak ringan 165,80 km atau 19,99 persen dan rusak berat 154,55 km atau 18,63 persen. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan kondisi kerusakan selama 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kerusakan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2019

Tahun	Kondisi kerusakan (Km)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
2016	343,01	220,62	98,98	394,24	1 056,85
2017	365,91	217,02	95,28	378,64	1 056,85
2018	275,91	178,42	216,49	154,18	834,00
2019	322,97	186,13	165,80	154,55	829,49
Persentase Kondisi 2019	38,94	22,44	19,99	18,63	100

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung

Energi Listrik dan Telekomunikasi

Cakupan layanan energi listrik di Kabupaten Sijunjung telah mencapai diatas 90 persen. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan layanan energi listrik untuk setiap nagari dan jorong telah terpenuhi sampai tahun 2019 mencapai 97 persen. Sementara itu, ketersediaan sarana telekomunikasi khususnya telepon selular, hingga tahun 2019 telah menjangkau 100 persen dari 60 Nagari dan satu desa. Perkembangan cakupan layanan energi listrik dan telekomunikasi di Kabupaten Sijunjung periode 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Perkembangan Cakupan Layanan Energi Listrik dan Telekomunikasi di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Layanan energi listrik	95	95	95	95	95,67
2	Cakupan layanan telekomunikasi	88,52	94,23	96,23	96,23	100

Sumber : Sijunjung Dalam Angka

Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2011-2031, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung maka untuk periode RPJMD 2016-2021 telah ditetapkan beberapa kawasan pembangunan. Untuk menetapkan kawasan potensial sebagai kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten Sijunjung, telah ditetapkan 7 (tujuh) wilayah kawasan strategis yaitu: (1) Kawasan strategis Tanah Badantuang, (2) Kawasan Strategis Kandang Baru, (3) Kawasan Strategis Aie Amo, (4) Kawasan Strategis Palangki, (5) Kawasan Strategis Istano Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang (Kecamatan Lubuk Tarok), (6) Kawasan Strategis Sumpur Kudus, (7) Kawasan Strategis Geopark Silokek.

C. Sumber Daya Manusia

Analisis daya saing terhadap Sumber Daya Manusia adalah salah satunya dilakukan dengan melihat tingkat rasio ketergantungan. Tingkat rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun), dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Jumlah penduduk, penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sijunjung tahun 2019 sebanyak 151.142 jiwa atau 63,67 persen lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun sebanyak 86.234 jiwa atau 3,32 persen. Usia produktif lebih besar daripada usia non produktif, ini artinya Kabupaten Sijunjung telah memilik bonus demografi tahun 2019, seperti terlihat pada tableberikut.

Tabel 2.58
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2015-2019

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk berusia < 15 Tahun	71.408	72.191	72.914	73.595	74.167
2.	Jumlah Penduduk berusia > 64 Tahun	10.213	10.569	11.001	11.501	12.067

No	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
3.	Jumlah Pddk Usia Tidak Produktif	81.621	82.760	83.915	85.096	86.234
4.	Jumlah Penduduk produktif Usia 15-64 Tahun	140.891	143.540	146.189	148.714	151.142
5	Rasio Ketergantungan (persen)	57,93	57,66	57,40	57,22	57,00

Sumber: Sijunjung Dalam Angka

Dari sisi Rasio ketergantungan (*depedency ratio*) atau angka beban ketergantungan, suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dapat diukur dengan membandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun) ditambah dengan penduduk usia 65 tahun keatas dibagi dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun dikali seratus persen. Makin besar rasio ketergantungan berarti makin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30 - 40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Dan berdasarkan data Tabel 2.5 diatas angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 sebesar 57 persen (tergolong tinggi), artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif akan menanggung 57 orang dari usia non produktif.

Bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat di Kabupaten Sijunjung harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan bonus demografi. Terdapat banyak cara untuk mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif. Bonus demografi bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali.

Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari sini bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

D. Tata Kelola Pemerintahan

Aspek penting lainnya dalam peningkatan daya saing yang perlu dibenahi dalam peningkatan daya saing Kabupaten Sijunjung adalah aspek Tata Kelola Pemerintah Daerah Menurut Hos (2011) untuk meningkatkan

daya saing daerah maka perlu menjadikan birokrasi pemerintahan daerah lebih profesional dalam rangka mewujudkan *good governance*, untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Pemerintah daerah lebih konsentrasi pada aspek pengaturan dengan membuat kebijakan dari pada sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk menggeser peran birokrasi dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan. Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani bisa berubah menjadi alat pemerintah yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat
2. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan *bargaining position* mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai *social control* terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Masyarakat luas hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan pesan moral dan budaya malu terhadap tindakan birokrat yang tercela
3. Membangun karakter aparat birokrasi agar terjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual sehingga pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada pengembangan moralitas/karakter

E. Potensi Ekonomi Lainnya

Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga terdapat objek wisata alam yang dapat dikembangkan potensinya. Selain memiliki potensi obyek wisata alam, Kabupaten Sijunjung juga memiliki potensi wisata sejarah dan budaya. Potensi wisata dimaksud tersebar di setiap kecamatan-kecamatan, sehingga mengalami kesulitan untuk dikembangkan secara terstruktur. Oleh sebab itu, potensi obyek wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di masa mendatang adalah kawasan Silokek yang merupakan icon Geopark Ranah Minang Silokek. Geopark Silokek merupakan suatu kawasan wisata yang pada dasarnya didukung oleh beberapa objek wisata alam yang memiliki perbukitan batu-batuan yang sudah berumur 350 juta tahun dan air terjun yang sangat indah dan menarik.

Oleh karena itu, pengembangan dan penataan kawasan Silokek merupakan urgensi pelaksanaan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan (*sustainability*) sebagai daya ungkit untuk terwujudnya Kabupaten Sijunjung menjadi kawasan Unesco Global Geopark (UGG). Pengembangan kawasan Geopark Silokek mampu menstimulus aktivitas ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Terwujudnya Pengembangan kawasan Geopark Silokek dengan sendirinya akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan Geopark Silokek khususnya dan Kabupaten Sijunjung secara umumnya. Salah satu konsep yang akan dikembangkan adalah penataan kawasan Geopark Silokek melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang lainnya serta pengembangan sumber daya manusia di Nagari Silokek. Selain itu, juga menggali faktor-faktor budaya dan sejarah yang ada di kawasan Silokek.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan dengan dukungan masyarakat harus lebih berusaha ekstra keras untuk melestarikan situs-situs sejarah di Kabupaten Sijunjung, khususnya dengan cara merawatnya dengan baik, mempelajarinya dan mempertahankan keaslian nilai-nilai

sejarah yang terkandung di dalamnya. Berbagai kalangan sangat berharap agar dibangun sebuah museum untuk menyelamatkan benda-benda sejarah mulai dari masa sebelum penjajahan Belanda, masa kolonial, masa revolusi hingga saat ini agar tidak berpindah tangan demi keuntungan materi sesaat.

Selain pembenahan infrastruktur yang menunjang pariwisata agar destinasi wisata yang ditawarkan bisa diakses dan dijangkau dengan mudah, perlu fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang harus disiapkan agar wisatawan betah dan bisa berwisata dengan nyaman dan berkesan. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya perlu dilakukan karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Kedepannya, dalam rangka membangun daya saing ekonomi daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut *supply* dan *demand*, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dilakukan terhadap tiga komponen utama: 1). Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu; 2). Review capaian kinerja RPJMD; dan 3). Evaluasi capaian pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan.

Evaluasi kinerja RKPD 2019. Tujuan evaluasi kinerja RKPD 2019 lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun 2021.

Kegiatan review capaian prioritas dan target program RPJMD dimaksudkan untuk mengkaji arah kebijakan serta prioritas dan target kinerja program di tahun 2021, dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja sampai dengan tahun 2020. Hasil kajian tersebut digunakan sebagai masukan dalam merumuskan permasalahan pembangunan dan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD tahun 2021, dengan tujuan agar target kinerja RPJMD di akhir tahun periode RPJMD dapat tercapai.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.

Hasil evaluasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD sesuai Tabel T-B.4 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara lengkap telah dituangkan dalam dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2019 dan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2020. Jadi dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2019 dan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKPD Tahun 2021.

Untuk peyederhanaan penyusunan RKPD Tahun 2021, maka pada bagian ini akan ditampilkan hasil ringkasan dari Evaluasi RKPD Tahun 2019 dan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2020. Ringkasan hasil evaluasi dikelompokkan kedalam dua kelompok status yaitu: 1. Telah tercapai dengan simbol  ; 2). Belum tercapai dengan simbol .

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 7 (tujuh) program pembangunan dengan 32 (tiga puluh dua) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pendidikan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini									Dinas Dikbud
	1) APK PAUD	%	79,6	78,0	79,41	101,8	79,6	100		
	2) Persentase PAUD terakreditasi	%	20	18	78,49	436,1	78,49	392,5		
	3) Persentase Jorong yang memiliki PAUD	%	95	77,62	82,23	105,95	90,00	94,74		
2	Program Pendidikan Sekolah Dasar									Dinas Dikbud
	1) APK SD/MI/Paket A	%	114,15	114,09	105,57	92,53	114,15	99,96		
	2) APM SD /MI/Paket A	%	99,9	99,85	99,60	99,75	99,89	99,99		
	3) Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah	%	137,0	137,0	132,0	96,35	137,0	100		
	4) Angka melanjutkan ke SMP	%	95	94,41	95,83	101,50	94,50	99,47		
	5) Persentase ruang kelas baik SD	%	90	89,5	76,60	85,58	89,55	99,50		
	6) Rata-rata Nilai Ujian SD	angka	75	74,15	74,29	100,19	74,20	98,93		
	7) Persentase SD yang mencapai SPM	%	90	60	55,29	92,15	70,00	77,78		

No	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini									Dinas Dikbud
	8) SD yang berakreditasi minimal B	%	90	84,20	88,46	105,06	88,46	98,29	▼	
	9) Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD	Cabor	8	6	3	50	13	162,5	●	
	10) Jumlah SD yang memenuhi SNP	sklh	5	2	2	100	4	80,00	●	
3	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									Dinas Dik- bud
	1) APK SMP/MTs/Paket B	%	107	106,94	85,27	79,74	106,95	99,95	●	
	2) APM SMP/MTs/Paket B	%	82,25	82,2	74,71	90,89	85,02	103,4	▼	
	3) Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah	%	137	136	198,35	145,85	198,35	144,7	●	
	4) Ruang kelas baik SD	%	100	90,00	78,54	87,27	95,00	95,00	▼	
	5) Rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs	angka	70	65	49,58	76,28	67,00	95,71	●	
3	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									Dinas Dik- bud
	6) SMP/MTs yang mencapai SPM	%	90	80	67,31	84,13	90	100	●	
	7) SMP/MTs yang berakreditasi minimal B	%	100	90,2	70,37	78,02	95,05	95,05	▼	
	8) Jumlah sekolah rujukan	sklh	3	2	1	50	4	133,3	●	
	9) Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP/MTs	Cabor	8	8	11	137,5	11	137,5	●	
	10) Jumlah SMP/MTs yang memenuhi SNP	sklh	5	2	5	250	8	160	●	
4	Program Pendidikan Non Formal									
	1) Angka Melek Huruf	%	99,8	99,55	99,55	100	99,7	99,90	●	
	2) Jumlah PKBM	PKBM	18	18	9	50	18	100	●	
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan									Dinas Dik- bud
	1) Guru yang bersertifikat pendidik	%	75	50	49,07	98,15	65,00	86,67	▼	
	2) Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80	%	75	55	60	109,9	65	86,67	▼	
	3) Persentase guru berkualifikasi S1	%	95	90	90	100	95	100	●	
6	Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter									Dinas Dik- bud
	1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter	%	50	30	33,07	110,25	40	80	▼	
	2) Siswa yang mendapatkan nilai perilaku minimal baik	%	90	70	69,50	99,28	80	88,89	▼	
	3) Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan sekolah sehat	sklh	23	18	18	100	20	86,96	▼	
	Program Pendidikan Inklusif									
	4).Jumlah sekolah inklusif	sklh	273	210	282	134,2	282	103,3	●	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 19 (sembilan belas) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disini lain masih terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 17 (tujuh belas) program pembangunan dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kesehatan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase UPTD kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	%	100	85	85	100	100	100	●	
	2) Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan	%	80	80	70	87,5	100	125	●	
2	Program Upaya Pelayanan Kesehatan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	100	100	100	●	
3	Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak									Dinas Kesehatan
	1) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	90	85	85	100	87	96,67	▼	
	2) Persentase pelayanan kunjungan neonatal 1 (KN1) sesuai standar	%	90	85	85	100	87	96,67	▼	
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat									Dinas Kesehatan
	1) Persentase balita gizi kurang	%	9	10,5	20,4	51,47	20,4	44,12	▼	
5	Program Pencapaian Mutu dan Kualitas Pelayanan Kesehatan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	●	
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	●	
7	Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular									Dinas Kesehatan
	1) Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	%	100	1	1	100	1	100	●	
8	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular									Dinas Kesehatan
	1) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	60	40	40	100	55	91,67	▼	
9	Program Pengawasan Obat dan Makanan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase pengawasan obat dan makanan	%	60	55	55	100	60	100	●	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	●	
11	Program Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan									Dinas

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	1) Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan pemeliharaan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	●	Kesehatan
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat									Dinas Kesehatan
	1) Persentase nagari siaga aktif	%	80	80	80	100	80	100	●	
	2) Persentase sekolah sehat	%	85	85	85	100	85	100	●	
13	Program Penyehatan Lingkungan									Dinas Kesehatan
	1) Persentase nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	%	50	40	35	87,5	45	90	▼	
	2) Persentase kecamatan yang memfasilitasi kawa- san sehat	%	100	100	100	100	100	100	●	
14	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit									RSUD
	1) Persentase sarana dan prasarana fisik rumah sakit yang memenuhi standar rumah sakit tipe C	%	100	100	75	75	90	90	▼	
	2) Persentase sarana dan prasarana alat kesehatan rumah sakit yang memenuhi standar rumah sakit tipe C	%	100	100	75	75	90	90	▼	
15	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit									RSUD
	1) Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	●	
16	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan									RSUD
	1) Kategori akreditasi rumah sakit	Kategori	paripurna	paripurna	utama	80	Paripurna	100	●	
	2) Persentase tingkat hunian rumah sakit (bed occupancy rate)	%	75	65	55	100	65	86,67	▼	
	3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD	%	82	78	72,5	93,38	80	97,56	▼	
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD									RSUD
	1) Persentase peningkatan pendapatan BLUD	%	20	15	15	100	15	75	▼	

Sumber: Dinas Kesehatan dan RSUD Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 14 (empat belas) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 10 (sepuluh) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 11(sebelas) program pembangunan dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja program.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tergambar bahwa 7 (tujuh) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 6 (enam) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut,

menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan									Dinas PUPR
	1) Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	65,0	60	38,94	64,90	62	95,38		
	2) Persentase panjang jembatan pada jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	65,0	60	61	101,67	63	96,92		
2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya									Dinas PUPR
	1) Cakupan luas daerah irigasi dengan kondisi baik	%	85	75	70	93,33	70	82,35		
3	Program Pemutakhiran Data Base jalan dan jembatan									Dinas PUPR
	1) Persentase tersedianya data/informasi jalan dan jembatan untuk perencanaan pembangunan jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	0	100		
4	Program Penguatan dan Normalisasi Sungai									Dinas PUPR
	1) Panjang sungai yang dinormalisasi	meter	1.300	750	689	91,87	1.239	95,31		
5	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku									Dinas PUPR
	1) Luas cakupan layanan air baku yang dikelola/dibangun	ha	5.000	1.000	945	94,5	5.878	117,6		
6	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik									Dinas PUPR
	1) Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100		
7	Program Perencanaan Tata Ruang									Dinas PUPR
	1) Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten berserta rencana rincinyamelalui peta analog dan peta digital	%	100	80	40	50	60	60		
8	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang									Dinas PUPR
	1) Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	%	100	100	100	100	100	100		
9	Program Pengembangan Utilitas Perkotaan									Dinas PUPR
	1) Panjang akses pejalan kaki dan disabilitas	meter	2.000	1.000	0	0	0	0		
	2) Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	m²	4.000	1.000	2.579	257,85	4.813	120,3		
10	Program Pembangunan Gedung Kantor									Dinas PUPR

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	1) Persentase gedung kantor Pemda yang representative	%	100	80	85	106,25	100	100		
11	Program Pembinaan Jasa Konstruksi									
	1) Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi	Rekom	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2020

Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 4 (empat) program pembangunan dengan 4 (empat) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD	
				Target	Real.	%		%	Status		
1	Program Lingkungan Sehat Perumahan									Dinas Per- kim & LH	
	1) Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung denganm PSU (persen)	%	70	65	98,47	151,49	75	107,1			
2	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum									Dinas Per- kim & LH	
	1) Cakupan akses air minum aman masyarakat	%	100	100	69,11	69,11	85	85			
3	Program Pengelolaan Limbah									Dinas Per- kim & LH	
	1) Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	%	100	100	71,60	71,60	85	85			
4	Program Penataan Kawasan Perdesaan									Dinas Per- kim & LH	
	1) Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	%	55	35	96,96	277,06	100	181,8			

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa hanya 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 10 (sepuluh) program pembangunan dengan 14 (empat belas) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan									
	1) Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Satpol PP & Damkar
	2) Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100		Kantor Kesbang & Pol
2	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat									
	1) Persentase nagari yang terlayani kamtrantibmas	%	100	100	100	100	100	100		Dinas Satpol & Damkar
	2) Jumlah SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang deteksi dini dan manajemen konflik.	Org	311	62	65	104,84	60	100		Kantor Kesbang & Pol
3	Program Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati									Dinas Satpol & Damkar
	1) Persentase kasus pelanggaran Perda/Perbup yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100		
4	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran									Dinas Satpol & Damkar
	1) Persentase kejadian kebakaran yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas pemadam kebakaran	%	100	100	100	100	100	100		
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan									Kantor Kesbang & Pol
	1) Persentase pemahaman generasi muda dan tokoh agama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	%	100	100	100	100	100	100		
6	Program Pendidikan Politik Masyarakat									Kantor Kesbang & Pol
	1) Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pilkada	%	75	75	81,07	108,10	81,07	108,1		
7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat									
	1) Persentase penurunan penyakit masyarakat per tahun	%	5	5	5	100	5	100		Dinas Satpol & Damkar
8	Program Peningkatan Mitigasi Bencana									BPBD
	1) Jumlah dokumen mitigasi bencana	Dok.	14	1	1	100	3	21,42		
9	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana									BPBD
	1) Jumlah nagari tangguh bencana	Nagara-ri	4	1	1	100	4	100		

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	2) Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	KSS B/ KSB	30	6	6	100	31	103,3	●	
10	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana									BPBD
	1) Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	●	
11	Program Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam									BPBD
	1) Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan	%	100	100	100	100	100	100	●	

Sumber: Dinas Satpol PP & Damkar, Kantor Kesbangpol dan BPBD Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 13 (tiga belas) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sangat baik dari perspektif perencanaan Walaupun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD.

Urusan Wajib Sosial

Penyelenggaraan urusan bidang sosial dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Bidang Sosial sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 –2021

No	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Perlindungan Sosial Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) / Keluarga Sangat Miskin (KSM)									Dinas So- sial, PR & PA
	1) Persentase RTSM/KSM yang menerima bantuan	%	100	100	100	100	100	100	●	
2	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial									Dinas So- sial, PR & PA
	1) Persentase PMKS yang menerima bantuan	%	100	100	100	100	100	100	●	
3	Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial									Dinas So-sial, PR & PA
	1) Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	●	

No	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	2) Jumlah anggota Tagana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	%	200	40	40	100	240	120	●	
	3) Persentase korban bencana yang diberi bantuan	%	100	100	100	100	100	100	●	

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 5 (lima) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan Sosial sangat baik dari perspektif perencanaan.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No .	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak.Re al. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja									Dinas Nakertrans
	1) Persentase pencari kerja yang telah dilatih	%	38	37	97,28	262,92	97,28	256		
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja									Dinas Nakertrans
	1) Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	%	35	35	36,56	104,45	36,56	104,5		
3	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan									Dinas Nakertrans
	1) Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan Tenaga Kerja sangat baik dari perspektif perencanaan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 4 (empat) indikator kinerja

program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak									Dinas So- sial, PR & PA
	1) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	kasus	16	8	8	8	14	87,5		
	2) Jumlah kasus kekerasan terhadap anak.	kasus	16	8	8	8	11	68,8		
2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan									Dinas So- sial, PR & PA
	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,45	92,38	93,21	100,9	92,4	99,95		
	2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	56,33	56,27	55,47	98,58	56,3	99,95		

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Pangan

Penyelenggaraan urusan bidang Pangan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pangan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak.Rea l. RPJMD Sampai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									Dinas Pa- ngan & Peri- kanan
	1) Skor Pola Pangan Harapan	%	95,90	91,70	91,7	100	91,70	95,62		

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar jelas bahwa indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Pertanahan

Penyelenggaraan urusan bidang Pertanahan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan									Dinas PUPR
	1) Persentase sengketa lahan dan konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda yang diselesaikan	%	100	0	0	0	100	100		

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar jelas bahwa indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Jika perangkat daerah terkait dapat menyelesaikan fasilitasi Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tahun 2020.

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									Dinas Per-kim & LH
	1) Indeks kualitas lingkungan hidup	%	73,80	73,8	78,13	105,72	78,02	78,02	●	
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									Dinas Per-kim & LH
	1) Persentase perlindungan dan konservasi SDA	%	87	83	76	91,57	85	97,70	▼	
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									Dinas Per-kim & LH
	1) Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	%	20	12	16,75	139,58	20	100	●	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan LH Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Targe t	Real.	%		%	Status	
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan									Dinas Duk-capil
	1) Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	95	97,99	115,28	115,28	97,99	103,2		
	2) Persentase penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik	%	95	95	94,77	99,76	94,77	99,76		
	3) Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	75	65	40,76	62,71	70	93,33		

Sumber: Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 4 (empat) indikator kinerja program. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Tar get	Real.	%		%	Sta tus	
1	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Nagari									Dinas PMN
	1) Persentase Kerapatan Adat Nagari yang aktif	%	100	100	100	100	100	100		
	2)Jumlah nagari/desa ber-kembang	Nagari /Desa	30	25	25	100	25	83,33		
2	Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari									Dinas PMN
	1) Persentase nagari yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100		
	2)Jumlah aparatur pemerin-tah nagari yang meningkat kompetensinya	orang	305	61	61	100	305	100		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Tahun 2020

Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan RKPD Tahun 2020
dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD Sampai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Keluarga Berencana									Dinas PP & KB
	1) Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	%	72,24	72,18	69,09	95,71	72,21	99,96	●	
2	Program Pembangunan Keluarga									Dinas PP & KB
	1) Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	23,62	25,42	20,90	82,22	22,99	97,33	▼	
3	Program Pengendalian Penduduk									Dinas PP & KB
	1) Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)I	%	2,68	2,74	2,5	91,24	2,71	101,2	●	

Sumber: DinasPengendalian Penduduk dan KB Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Perhubungan

Penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perhubungan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak.Re al. RPJMD Sampai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019		PD
				Tar get	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jalan dan Perkeretaapian									Dinas Per- hubung an
	1) Persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan	%	100	100	95,65	95,65	100	100		
2	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas									Dinas Per- hubung an
	1) Persentase tersedianya perlengkapan jalan se- suai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	%	80	60	63	105	70	87,5		
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan									Dinas Per- hubung an
	1) Persentase penduduk yang menggunakan listrik	%	97,55	95,67	95,67	100	98,50	100		

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja program. Berdasarkan data, tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik									Dinas Ko-minfo
	1) Jumlah media elektronik dan tradisional Pemerintah Daerah yang dapat diakses publik	media	11	2	2	100	8	72,73		
2	Program Pengembangan e-government Pemerintah Daerah									Dinas Ko-minfo
	1) Persentase PD yang menerapkan e-govern-ment	%	100	85	85	100	100	100		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

UrusanWajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebaga berikut:

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah									Dinas Dag-perinkop & UKM
	1) Persentase peningkatan jumlah UMKM dan koperasi yang meng- akses permodalan	%	50	10	5,82	58,26	50,83	101,7		
	2) Rata-rata nilai SHU Koperasi	Rp juta / tahun	12.545	11.390	48.147	422,71	9.954	384		
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi									Dinas Dag-perinkop & UKM
	1) Persentase koperasi aktif	%	45,51	42,13	79,17	183,01	79,17	178,4		
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kope rasi									Dinas Dag-perinkop & UKM
	1) Jumlah pelaku UKM yang meningkat pengetahuan kewirausahaannya	orang	85	75	57,33	76,44	80	94,12		
	2) Persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan “Sehat”	%	18	15	13	86,67	15	83,33		

Sumber: Dinas Perdagangan. Perindustrian, Koperasi & UKM Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 4 (empat) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Promosi, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									Dinas PMPTSP
1.	Jumlah investor PMDN	Perusahaan	154	134	142	105	154	100		
2.	Jumlah investor PMA	Perusahaan	12	10	12	120	12	100		
3.	Realisasi investasi PMDN	M Rp	8.779,88	5.779.875	8.097.747	140	8,779,875	100		
4.	Realisasi investasi PMA	US\$	190.00	114.000	189.937	167	189.937	99,97		

Sumber: Dinas Penanaman Modal & PTSP, 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa ke-4 (empat) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan Penanaman Modal sangat baik dari perspektif perencanaan.

Urusan Wajib Kepemudaaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaaan dan Olahraga dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 6 (enam) program prioritas dengan 6 (enam) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaaan dan Olahraga sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan									Dinas Par-pora
	1) Jumlah organisasi kepe- mudaan yang aktif	Org.	25	25	27	108	27	108		
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									Dinas Par-pora

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	1) Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Peringkat	10	10	9	111	9	111		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									Dinas Parpora
	1) Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak / terstandarisasi	%	70	60	60	100	70	100		

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda & Olahraga, 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga sangat baik dari perspektif perencanaan.

Urusan Wajib Statistik

Penyelenggaraan urusan bidang Statistik dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebagai berikut ini.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Urusan Statistik sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Statistik Sektoral									Dinas Ko-minfo
	1) Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia tepat waktu	dok.	15	3	3	100	15	100		

Sumber: Dinas Komunikasi & Informatika Tahun Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa indikator kinerja program program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana karena jumlah dokumen yang hasilkan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan BPS melahirkan setiap tahunnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Urusan Wajib Persandian

Penyelenggaraan urusan bidang Persandian dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program prioritas dengan 1 (satu) indikator kinerja program. Berdasarkan data tergambar bahwa indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Persandian sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah									Dinas Ko-minfo
	1) Persentase PD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	%	100	75	85	113,33	95	95		

Sumber: Dinas Komunikasi & Informatika Tahun 2020

Urusan Wajib Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengelolaan Kekayaan Sejarah dan Budaya									Dinas Dik-bud
	1) Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	60	60	100	80	80		
2	Program Pengembangan Nilai Budaya									Dinas Dik-bud
	1) Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK	lembaga	15	8	8	133	25	166,7		
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah dan Budaya									Dinas Dik-bud
	1) Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan	Sekolah	64	10	41	410	61	95,31		
	2) Jumlah SDM seni budaya yang dikembangkan potensinya	orang	258	75	150	200	515	137,3		
	3) Jumlah SDM sejarah dan kepurbakalaan yang dikembangkan potensinya	orang	375	75	150	200	375	100		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja

program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan									Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun	Eksemplar	14.580	12.056	17.150	142,25	17.150	117,6		
	Jumlah perpustakaan	unit	345	250	255	102	297	86,08		
	Jumlah perpustakaan terstandar	unit	170	130	135	103,85	150	88,23		
	Jumlah anggota perpustakaan	orang	39.700	24.500	24.556	100,23	32.000	80,60		
	Jumlah pengunjung perpustakaan/ pemustaka dalam setahun	orang	28.000	25.000	6.665	26,66	26.500	94,64		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar hanya 1 (satu) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 4 (empat) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 6 (enam) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah									Dinas Per-pustakaan & Kearsipan
	1) Persentase PD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku	%	100	60	65,60	108,33	85	85		
	2) Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Box arsip	3.000	1.800	1852	102,89	1.500	111,7		

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan									Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	1) Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan	Dok	5	0	0	0	3	60		
3	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan									Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	1) Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan kearsipannya per tahun	orang	80	0	0	0	100	125		
	2) Jumlah dokumen / arsip daerah yang dialih mediakan per tahun	Dok	120	120	120	100	120	100		
	3) Jumlah arsip konvensional/naskah kuno yang dipelihara	Naskah	80	40	40	100	60	75		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020

Berdasarkan data, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan									Dinas Pa- peri
	1) Produksi perikanan budidaya	ton	14.000	13.879	13.879	100	13.879	99,14		
2	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan									Dinas Pa- peri
	1) Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Unit usaha	9	8	7	87,5	8	88,89		

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Pilihan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 4 (empat) program pembangunan dengan 5 (lima) indikator kinerja program

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pariwisata sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata									Dinas Par- pora
	1) Jumlah kemitraan pariwisata	Kerja-sama	4	1	1	100	4	100		
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata									Dinas Par- pora
	1) Jumlah even promosi pariwisata yang diikuti dan diselenggarakan	iven	18	9	9	100	18	100		
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata									Dinas Par- pora
	1) Jumlah destinasi wisata yang berkembang	Objek wisata	11	5	3	60	5	45,45		
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif									Dinas Par- pora
	1) Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	Orang	30	30	33	110	33	110		

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Pilihan Pertanian

Penyelenggaraan urusan bidang Pertanian dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 10 (sepuluh) program pembangunan dengan 12 (dua belas) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanian sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Tar get Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020			PD
				Tar get	Real.	%			%	Status	
1	Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian										Dinas Pertanian Dinas Pertanian
	1) Persentase UP3HP yang terbina	%	100	80	80	100	100	100			
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian										
	1) Persentase pening- katan penyediaan dan pengembangan prasa- rana dan sarana pert- anian/ perkebunan per tahun	%	100	100	100	100	100	100			
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										Dinas Per- tanian
	1) Nilai Tukar Petani	%	100,21	100,16	96,01	95,85	95,86		96,01		

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Tar get Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Tar get	Real.	%		%	Status	
	(NTP)									
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan									Dinas Per-tanian
	1) Produktivitas padi	Ton/ha	6,0	5,8	3,96	68,28	5,8	96,66		
	2) Produksi karet	Ton/ha	71.600	69.922	62.005	88,68	69.922	97,65		
5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan									Dinas Per-tanian
	1) Produksi daging sapi/ kerbau	Ton	720	720	122	16,94	720	100		
	2) Produksi telur ayam ras	Ton	416.000	416	1169,99	281	416.000	132,9		
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak									Dinas Per-tanian
	1) Tingkat kematian ternak	%	3	5	4	80	4	75		
7	Program penjaminan produk hewan yang asuh dan berdaya saing									Dinas Per-tanian
	1) Persentase pemotongan hewan yang ASUH di RPU/RPA/RPH	%	100	100	100	100	100	100		
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan									Dinas Per-tanian
	1) Jumlah ternak yang terjual di pasar ternak	Ekor/thn	20.000	20.000	21.108	105,5	21.108	105,5		
9	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan									Dinas Per-tanian
	1) Jumlah kelompok usaha pertanian dengan agribisnis yang terintegrasi	Klpk usaha	40	10	10	100	40	100		
10	Program Pemantapan Pe rencanaan Pembangunan Pertanian									Dinas Per-tanian
	1) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pertanian	%	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 8 (delapan) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 4 (empat) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Urusan Pilihan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan bidang Perdagangan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perdagangan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

N o.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD	
				Target	Real.	%		%	Status		
1	Program Peningkatan Usaha Perdagangan										Dinas Dagperi nko p & UKM
	1) Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	6,49	6,47	7,15	111	6,47	99			

Sumber: Dinas Perdagangan. Perindustrian, Koperasi & UKM Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja perdagangan sangat baik dari perspektif perencanaan.

Urusan Pilihan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Bidang Perindustrian sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Potensi Lokal dan Sentra									Dinas Dagperin kop& UKM
	1) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	4,56	4,52	-4,49	-99,34	4,57	100,2		
	2) Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda	Sentra	4	1	1	100	6	150		
2	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna Industri Kecil dan Menengah									Dinas Dagperin kop& UKM
	1) Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna	IKM	180	50	50	100	180	100		

Sumber: Dinas Perdagangan. Perindustrian, Koperasi & UKM Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa ke-3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan perindustrian sangat baik dari perspektif perencanaan.

Urusan Pilihan Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan bidang Transmigrasi dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebagai berikut :

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Bidang Transmigrasi sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi									Dinas Nakertrans
	1) Jumlah transmigran yang ditempatkan per tahun	KK	100	191	221	115,71	191	191		
	2) Jumlah transmigran yang dibina	KK	300	60	221	368,33	221	73,66		
2	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT)									Dinas Nakertrans
	1) Persentase sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi yang dibangun	%	100	43	43	100	75	75		

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 1 (satu) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

Fungsi Perencanaan

Penyelenggaraan fungsi Perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Perencanaan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat .	Targ et Akhi r RPJ MD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD Samp ai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019		PD
				Tar get	Re al.	%		%	Statu s	
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah									Bappeda
	1) Tingkat keselarasan Ren- stra terhadap RP JMD`	%	100	100	100	100	100	100		
	2) Tingkat keselarasan RK- PD terhadap RPJMD	%	100	90	85	94,4	100	100		
	3) Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	%	100	90	85	94,4	100	100		

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa ke-3 (tiga) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Hal ini mencerminkan kinerja urusan Perencanaan sangat baik dari perspektif perencanaan.

Fungsi Keuangan

Penyelenggaraan fungsi Keuangan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 2 (dua) program pembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja program, sebagai berikut.

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Keuangan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak.Real . RPJMD Sampai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									BKAD
	1) Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100	100	100	100		
	2) Nilai Pendapatan Asli Daerah	M. Rp	123,28	107,92	77.084,49	71,4	80,89	65,57		
2	Program Peningkatan Sis- tem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerahh									BKAD
	1) Persentase kasus TP- TGR yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 2 (dua) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana, Namun disisi lain masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 3 (tiga) program pembangunan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD	
				Target	Real.	%		%	Status		
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										BKP SDM
	1) Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	%	100	60	60	100	70	70			
	2) Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi	%	100	50	40	80	60	60			
	3) Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar/izin belajar per tahun	orang	1.430	50	50	100	586	40,98			
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										BKPSDM
	1) Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	%	50	23,33	40	171,41	50	100			
	2) Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun	orang	600	150	150	100	688	125			
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										BKPSDM
	1) Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100			
	2) Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100			
	3) Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	85	75	85	113,33	85	100			

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
	4) Persentase tingkat ke- lengkapan dalam penya- jian data dan informasi kepegawaian	%	85	85	100	100	85	100		
	5) Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 7 (tujuh) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan fungsi Penelitian dan Pengembangan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 1 (satu) program pembangunan dengan 1 (satu) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penelitian dan Pengembangan sampai dengan RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No .	Program/Indikator Kinerja	Sat	Tar get Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD Samp ai 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2019		PD
				Tar get	Rea l.	%		%	Sta tus	
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah									Bappeda
	1) Persentase hasil peneli- tian dan pengembangan yang dimanfaatkan / di- pedomani dalam penyu- sunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah`	%	75	60	25	41,66	65	86,66		

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, terlihat jelas bahwa indikator kinerja program diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Fungsi Penunjang Lainnya

Penyelenggaraan fungsi Penunjang Lainnya dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 terdapat 11 (sebelas) program pembangunan dengan 14 (empat belas) indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program tersebut, sampai dengan prakiraan realisasi RKPD tahun 2020 yang dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.93
Capaian Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Lainnya sampai dengan
RKPD Tahun 2020 dan Realisasi RPJMD 2016 – 2021

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	Target Akhir RPJMD	RKPD 2019			Prak. Real. RPJMD s/d RKPD 2020	Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD 2020		PD
				Target	Real.	%		%	Status	
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									Setdakab
	1) Nilai AKIP Pemda	skor	B	B	B	100	B	100		
	2) Nilai LPPD	Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	100	Sangat Tinggi	100		
2	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah									Setdakab
	1) Persentase SKPD yang melakukan analisa jabatan	%	100	100	100	100	100	100		
3	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik									Setdakab
	1) Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	100		
	2) Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	I Indeks	82,0	80	70,35	87,94	80	97,56		
4	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa									Setdakab
	1) Persentase lelang pengadaan barang dan jasa yang memenuhi standar pelayanan	%	100	100	100	100	100	100		
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									Setdakab
	1) Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya	%	100	100	100	100	100	100		
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat									Setdakab
	1) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100		
7	Program Pengendalian Pembangunan Daerah									Setdakab
	1) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	100		
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah									Inspektora t
	1) Leveling Maturitas SPIP	Level	4	3	3	100	4	100		
	2) Persentase PD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	%	100	100	90	90	95	95		
9	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan									Inspektora t
	1) Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat kompetensi teknis pengawasan	%	100	85	85	132	95	95		
10	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah									Sekretariat DPRD
	1) Penetapan RAPBD	waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100	Tepat waktu	100		
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu									DPMPSTSP
	1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	indeks	84,0	80,71	82,00	101,6	84,0	100		

Sumber: Satdakab, Setwan, Inspektorat Daerah & DPMPSTSP Tahun 2020

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa 11 (sebelas) indikator kinerja program diperkirakan tercapai hingga akhir periode RPJMD sesuai dengan rencana. Namun disisi lain masih terdapat 3 (tiga) indikator kinerja program capaiannya diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Kondisi tersebut, menunjukkan belum adanya konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai yang direncanakan.

Berangkat dari gambaran capaian indikator kinerja program dimasing-masing urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan realisasinya sampai Tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan terhadap sasaran akhir RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini ditandai dengan telah tercapainya tingkat indikator kinerja program sesuai dengan target akhir RPJMD sebesar 66,34 persen Namun disisi lain tingkat capaian indikator kinerja program sebesar 33,66& diperkirakan tidak akan tercapai sampai dengan target akhir RPJMD. Rekapitulasi capaian indikator kinerja program sampai dengan RKPD 2020 terhadap target akhir RPJMD, dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.94
Rekapitulasi Status Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan RPJMD 2016-2021 sampai dengan RKPD 2020

No.	Status Capaian	Jml Indikator Kinerja Program	Persentase
1	Tercapai	136	66,34
2	Tidak Tercapai	69	33,66
	Jumlah	205	100

Berdasarkan data tergambar bahwa evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD 2016-2021 sampai dengan prakiraan realisasi RKPD 2020 baru tercapai 66,34 persen Oleh karena itu, dalam perumusan dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1). Perlu adanya komitmen yang kuat dari Perangkat Daerah terhadap konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, sehingga target indikator kinerja program di RPJMD dan RKPD dapat tercapai secara optimal. 2). Melakukan reuiu terhadap keselarasan antara program dengan kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang indikator kinerja program yang belum tercapai sesuai dengan target akhir RPJMD. 3).Seluruh Perangkat Daerah diharapkan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja program dan kegiatan secara berkala, sehingga menghasilkan langkah-langkah yang antisipatif dalam upaya mencapai sasaran akhir RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi dalam mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Ekonomi yang berdaya saing tinggi

Permasalahan serta sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam prioritas pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang melambat
- b. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB semakin menurun

- c. Rendahnya daya saing produk pertanian, produk usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
- d. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
- e. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan bagi pelaku usaha ekonomi
- f. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi.

2. Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya

Permasalahan serta sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam prioritas pembangunan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya sebagai berikut:

- a. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek.
- b. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
- c. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
- d. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
- e. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
- f. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
- g. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

3. Membangun ketahanan pangan

Beberapa permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam membangun ketahanan pangan sebagai berikut:

- a. Rendahnya daya saing produk pertanian
- b. Nilai tambah produk pertanian belum berkembang
- c. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
- d. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
- e. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

4. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga

Beberapa permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
- b. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah
- c. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
- d. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
- e. APM pendidikan menengah pertama dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.

5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Beberapa permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

- a. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
- b. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),

- c. Akreditasi Rumah Sakit.
- d. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

Permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam pemeliharaan infrastruktur dasar sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.
- b. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai
- c. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
- d. Belum optimalnya sistim perencanaan penanganan sampah
- e. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
- f. Belum optimal konektifitas dan aksesibilitas antar daerah,

7. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah

Permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam peningkatan kinerja dan pelayanan daerah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- b. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
- d. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
- e. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
- g. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
- h. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, Provinsi dan kabupaten

8. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

Permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sebagai berikut:

- a. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
- b. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
- c. Belum terkelolanya sumber daya alam, air, minyak bumi, gas dan sumberdaya mineral lainnya.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan.
- e. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah

9. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya

Permasalahan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau.
- b. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda

- c. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- d. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
- e. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah tahun 2021 dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Namun, yang lebih penting adalah indentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2019. Permasalahan-permasalahan pembangunan tahun 2021 diklasifikasikan berdasarkan urusan sebagai berikut:

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Beberapa permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah, pada tahun 2019 baru sebesar 8,10 tahun dan angka ini berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi dan Nasional masing-masing 8,92 tahun dan 8,24 tahun.
- b. Masih rendahnya harapan lama sekolah, pada tahun 2019 harapan lama sekolah 12,36 tahun. Angka ini berada dibawah rata-rata harapan lama sekolah Provinsi dan Nasional masing-masing 14,01 tahun dan 12,95 tahun.
- c. Masih rendahnya akses pendidikan SMP yang ditunjukkan oleh rendahnya APM SMP yaitu sebesar 74,71 persen pada tahun 2019.

2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya angka kematian bayi tahun 2019 mencapai 6 per 1.000 kelahiran
- b. Masih adanya kelahiran bayi yang ditolong oleh tenaga non medis.
- d. Masih rendahnya Angka Harapan Hidup pada tahun 2017 baru mencapai 66,02, angka ini berada dibawah Provinsi dan Nasional masing-masing 69,31 tahun dan 71,34 tahun.
- c. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak. Hal ini dapat dilihat dari persentase jalan kabupaten dalam kondisi

baik 38,94 persen atau 323,47 km dari 829,42 km jalan kabupaten

- b. Masih banyaknya daerah irigasi yang mengalami kerusakan dan banyaknya sawah yang belum dialiri irigasi. Irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar 60,73 persen
- c. Masih kurangnya sarana drainase sehingga kejadian genangan air masih cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari persentase jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air pada tahun 2019 baru mencapai 0,79 persen
- d. Masih rendahnya RTH publik pada tahun 2019 baru mencapai 2,30 persen masih jauh dari syarat minimal 20 persen.
- e. Masih relatif sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur kawasan perumahan. Ini terlihat dari persentase rumah layak huni terhadap jumlah KK pada tahun 2019 sebesar 62,41 persen menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 masing-masing 63,19 persen 64, 67persen
- b. Belum optimalnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. Ketersediaan rumah layak huni untuk masyarakat miskin baru dapat dipenuhi 41.593 unit sementara yang dibutuhkan
- f. Masih rendahnya pemenuhan air minum dan sanitasi yang layak. Ini dapat dilihat dari cakupan akses sanitasi layak baru mencapai 71,60 persen pada tahun 2019. Sementara untuk cakupan akses air minum aman masyarakat tahun 2019 mencapai 69,11persen

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan mendasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan Perda.
- b. Sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban belum memadai.

6. Urusan Sosial

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi dengan permasalahan yang semakin kompleks.
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial yang ditandai dengan masih kecilnya jumlah panti.
- c. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan terhadap penyandang cacat.

B. Urusan Wajib yang Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja.

- b. Masih rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan untuk berusaha. Hal ini ditandai dengan persentase penempatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan baru mencapai 36,56 persen pada tahun 2019

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pengarusutamaan gender (PUG) yang belum optima dapat dilihat dari nilai Indeks IPG dan IDG Kabupaten Sijunjung tahun 2019 masing-masing sebesar 93,21 poin dan 55,47 poin. Angka tersebut berada di bawah IPG dan IDG Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang masing-masing sebesar 94,74 poin dan 65,42 poin.
- b. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam mendorong percepatan pembangunan.
- c. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Urusan Pangan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kerawanan pangan
- b. Rendahnya produktivitas lahan tanaman pangan yang ditandai dengan produktivitas tanaman pangan relatif rendah pada tahun 2019 produktivitas padi 3,96 ton/ha dan jagung 6,75 ton/ha.

4. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan lingkungan hidup adalah :

- a. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah sampah yang tertangani baru mencapai 23,63 persen pada tahun 2019.
- b. Masih adanya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas usaha yang tidak berwawasan lingkungan seperti penambangan emas ilegal dan ilegal logging. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten Sijunjung tahun 2019 baru mencapai 78,13 poin dan Indeks Kualitas Udara 86,93 poin
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ini dapat dilihat dari persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 40,76 persen pada tahun 2019 dan persentase penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik belum mencapai 100 persen, pada tahun 2019 hanya mencapai 94,77 persen
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan nagari. Pada tahun jumlah nagari berkembang masih 25 persen. Hal ini disebabkan karena jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya baru mencapai 61 persen pada tahun 2019

- b. Belum optimalnya peran masyarakat dan lembaga nagari dalam pembangunan nagari.
- c. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi produktif di nagari.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya angka kelahiran pada tahun 2019 2,5
- b. Masih rendahnya cakupan PUS peserta KB aktif . Berdasarkan data peserta KB aktif 72,06 persen pada tahun 2015 menurun menjadi 69,09 persen pada tahun 2019.
- c. Masih rendahnya kesejahteraan keluarga. Ditandai dengan Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I mengalami penurunan dari 29,02 persen pada tahun 2015 menjadi 20,90 persen tahun 2019.

8. Urusan Perhubungan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perhubungan adalah :

- a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan terhadap perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa seperti rabu-rambu jalan, marka jalan dan *zebracross baru terpenuhi* 63 persen pada tahun 2019.
- b. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum yang ditandai masih sedikitnya jumlah angkutan darat yang tersedia.
- c. Terbatasnya cakupan pelayanan angkutan umum.
- d. Masih terbatasnya kualitas layanan angkutan umum dan pengawasannya.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik government (e-government) dalam menunjang penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) baru mencapai 2,04 poin pada tahun 2019.
- b. Belum tersedianya rencana induk pengembangan e-government.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif
- d. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur jaringan komputer (LAN dan WAN) di Kabupaten Sijunjung yang ditandai dengan cakupan layanan internet setiap nagari/desa masih rendah yaitu 48 persen pada tahun 2019.
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik.
- f. Belum meratanya ketersediaan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi.

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut :

- a. Daya saing produk UMKM masih rendah.
- b. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama antar UMKM.

- c. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif. Koperasi yang aktif di Kabupaten Sijunjung 36,70 persen pada tahun 2015 menjadi 79,17 persen pada tahun 2019.
- d. Masih rendahnya jumlah KSP/USP dengan kategori kesehatan koperasi “sehat” pada tahun 2019 hanya 13 koperasi dari 158 koperasi yang ada di kabupaten sijunjung.
- e. Masih lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- f. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik.
- g. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai pengetahuan kewirausahaannya UMKM yang relatif rendah baru mencapai 57,33 persen pada tahun 2019.
- h. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi.

11. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah, baik penyediaan media promosi, kerjasama promosi maupun strategi pemasaran investasi.
- b. Belum optimalnya penyelesaian pengurusan lahan atau tanah yang akan menjadi objek lokasi bagi calon investor.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya prestasi olahraga daerah, pada tahun 2019 kabupten sijung menempati peringkat ke 9 dari 19 kab/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Belum optimalnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan karakter yang ditandai dengan masih rendahnya jumlah organisasi kepemudaan yang aktif, pada tahun 2019 baru mencapai 27 organisasi dari 62 organisasi pemuda yang ada di akbupaten sijunjung.
- c. Belum optimalnya penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan yang ditandai dengan persentase sarana dan prasarana oleh raga yang terstandarisasi/layak masih 60 persen pada tahun 2019.

13. Urusan Statistik

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan statistik adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- b. Terbatasnya ketersediaan statistik daerah/ statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan data daerah.

14. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kebudayaan adalah :

- a. Belum optimalnya pengelolaan, pengembangan dan pelestarian budaya lokal yang ditandai dengan jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembagkan seni dan budaya berbasis Adat Basandi Sara Sara baru mencapai 8 lembaga.
- b. Belum optimalnya pelestarian warisan budaya.

- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan kesenian anak nagari.
- d. Masih rendahnya pemahaman terhadap sejarah budaya lokal.
- e. Terbatasnya media pengembangan kreativitas kebudayaan masyarakat.
- f. Masih kurangnya implementasi budayadalam kehidupan masyarakat
- g. Kurangnya pendidikan budaya di sekolah. Berdasarkan data Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan baru mencapai 41 sekolah pada tahun 2019.

15. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perpustakaan adalah :

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat, yang ditandai dengan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun baru mencapai 6.665 orang dari jumlah penduduk berusia 5-64 tahun (199.172 orang) penduduk Kabupaten Sijunjung.
- b. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpustakaan.
- c. Sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan belum memadai.
- d. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan bagi masyarakat.

16. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) yang ditandai dengan persentase PD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku baru mencapai 65,60 persen pada tahun 2019.
- b. Masih kurangnya kesadaran aparaturnya tentang peningnya arsip disebabkan karena persentase jumlah SDM pengelola kearsipan sesuai kompetensi baru mencapai 75 persen pada tahun 2019.
- c. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai.

17. Urusan Persandian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan persandian adalah masih kurangnya penerapan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi baru mencapai 10 persen dari 35 perangkat daerah yang ada

18. Urusan Pertanahan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pertanahan belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan untuk keperluan pembangunan daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Perikanan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perikanan adalah :

- a. Tingginya harga pakan ikan.
- b. Rendahnya daya saing produk perikanan.
- c. Belum terjaminnya keamanan pangan produk perikanan, khususnya perikanan tangkap.

2. Urusan Pertanian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pertanian adalah :

- a. Lemahnya penguasaan teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga tingkat produktivitas pertanian masih rendah.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk usaha pertanian.
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya minat anak muda di bidang pertanian.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
- e. Belum adanya kepastian serapan pasar terhadap produk pertanian dengan tingkat harga yang menguntungkan petani..
- f. Belum optimalnya pengembangan kawasan peternakan.
- g. Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan telur terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan.

3. Urusan Kehutanan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kehutanan adalah :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Masih tingginya penebangan hutan secara liar oleh masyarakat sebagai akibat dari rendahnya pengawasan.
- c. Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nagari/desa didalam dan diluar kawasan hutan.
- d. Masih banyaknya lahan kritis

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan energi yang terbarukan.
- b. Masih belum diketahuinya potensi energi maupun sumber daya mineral secara nyata.
- c. Belum dimanfaatkannya potensi energi listrik maupun energi sumber daya mineral lainnya.

5. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pariwisata adalah :

- a. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata terutama Geopark Ranah minag Silokek dan Perkampunagn adat
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
- c. Belum optimalnya kelembagaan pariwisata.
- d. Belum optimalnya pengelolaan industri pariwisata.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mamajukan pariwisata.

6. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perdagangan adalah :

- a. Sarana dan prasarana pasar tradisional belum representatif.
- b. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.

- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana pasar komoditi produk unggulan kabupaten Sijunjung.
- d. Masih terbatasnya informasi harga komoditi baik bagi petani maupun pedagang lokal.
- e. Belum terbangunnya kerjasama antar pedagang lokal maupun antar pedagang daerah.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

7. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan industri adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pelaku usaha industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri.
- c. Belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- d. Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

8. Urusan Transmigrasi

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi.
- b. Belum terlaksananya pembangunan kota terpadu mandiri.

D. Fungsi Penunjang Urusan pemerintahan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perencanaan daerah, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersusunnya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon peraturan perundang-undangan yang baru dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis. Beberapa perda yang dibutuhkan daerah seperti perda RDRT belum semesta (7 kawasan strategis daerah) yang memiliki Perda RDTR dan belum tersedia Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Geopark.
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi pelayanan informasi pada PD dan Pemerintah Nagari untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan daerah.
- d. Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, disebabkan karena masih terbatasnya jumlah aparat pengawas/auditor yang sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- e. Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, baik pajak maupun retribusi daerah.
- f. Belum dimanfaatkannya pinjaman sebagai sumber pembiayaan alternatif.
- g. Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel belum optimal, disebabkan karena terbatasnya kapasitas SDM dan peralatan kerja.
- h. Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai administrasi pertanahan.
- i. Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penerimaan PAD.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ini merupakan gambaran ekonomi makro regional pembangunan daerah serta keuangan daerah yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan tahun 2021.

Untuk menghasilkan usulan program yang baik, dan sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah pada tahun kelima dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, maka pada Bab III diawali dengan mereview kondisi terkini tentang ekonomi dan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2021. Disamping itu, arah kebijakan ekonomi dan keuangan Kabupaten Sijunjung sangat dipengaruhi oleh Kebijakan ekonomi Nasional dan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

A. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Covid-19 memberikan tekanan negatif terhadap ekonomi global dan Indonesia, akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sangat lambat pada tahun 2020, dan pemulihan ekonomi diharapkan berlangsung di tahun 2021. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp 5.853,1 triliun hingga Rp5.868,1 triliun.

Indonesia dalam Visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020-2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7–6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021. Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021.

Pandemi Covid-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak Covid-19 dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah pusat pada tahun 2020 menjadi bagian penting perumusan sasaran makro pembangunan daerah tahun 2021.

Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,3 persen, direvisi ke bawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDB. Melihat realisasi pertumbuhan triwulan I 2020 yang melambat signifikan menjadi sebesar 3,0 persen, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan melambat mendekati nol dengan puncak penurunan terjadi pada triwulan II 2020.

Dari sisi PDB pengeluaran konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRt) diperkirakan melambat, hanya tumbuh -0,6–1,8 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 4,9 persen. Perlambatan tersebut salah satunya disebabkan oleh berkurangnya permintaan masyarakat, terutama untuk wisata dan hiburan, sebagai dampak dari pembatasan sosial (*social distancing*) untuk menghentikan penyebaran wabah Covid-19. Daya beli masyarakat juga turun disebabkan oleh hilangnya pendapatan sebagian masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan potensi kenaikan harga karena gangguan di sisi penawaran. Perluasan bantuan sosial yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat menahan laju perlambatan konsumsi masyarakat.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi diperkirakan terkena dampak negatif yang besar, tumbuh sebesar -2,8–0,3 persen pada tahun 2020, lebih rendah dari sasaran RKP 2020 sebesar 6,0 persen. Tekanan pada neraca keuangan perusahaan akibat rendahnya penerimaan seiring penurunan permintaan, ketidakpastian penyelesaian Covid-19 yang mendorong investor asing maupun domestik menunda keputusan investasi, dan ditunda atau dihentikannya proyek infrastruktur pemerintah menjadi beberapa faktor yang mendorong perlambatan investasi. Ekspor barang dan jasa yang pada awalnya ditargetkan tumbuh 3,7 persen, diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,7–3,0 persen pada tahun 2020. Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh turunnya permintaan dunia akan barang ekspor Indonesia.

Selain ekspor barang, penurunan ekspor jasa juga akan mengalami penurunan, terutama jasa transportasi dan jasa perjalanan. Turunnya ekspor perjalanan didorong oleh penurunan wisatawan mancanegara sebagai dampak penutupan perbatasan Indonesia dan negara lainnya untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sementara itu, impor barang dan jasa diperkirakan juga mengalami kontraksi sebesar 12,0–7,5 persen dari sebelumnya diperkirakan tumbuh sebesar 3,2 persen, akibat turunnya aktivitas ekonomi domestik.

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019 ^{a)}	2020: Sebelum COVID-19 ^{b)}	2020: Setelah COVID-19 ^{c)}
Pertumbuhan PDB	5,0	5,3	(0,4)–2,3
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRt	5,2	4,9	(0,6)–1,8
Konsumsi Pemerintah	3,2	4,3	3,3–4,0
Investasi (PMTB)	4,4	6,0	(2,8)–0,3
Ekspor Barang dan Jasa	(0,9)	3,7	(7,7)–(3,0)
Impor Barang dan Jasa	(7,7)	3,2	(12,0)–(7,5)

RKP Tahun 2021

Dari sisi PDB lapangan usaha, dampak negatif Covid-19 dirasakan merata di hampir semua sektor. Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, perdagangan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi merupakan sektor yang merasakan dampak negatif terbesar pada tahun 2020.

Tabel 3.2
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019 ^{a)}	2020: Sebelum COVID-19 ^{b)}	2020: Setelah COVID-19 ^{c)}
Pertumbuhan PDB	5,02	5,3	(0,4)–2,3
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	3,7	0,8 –2,5
Pertambangan dan Penggalian	1,2	1,9	(2,1)–0,5
Industri Pengolahan	3,8	5,0	(1,9)–1,8
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	4,0	4,2	1,6–3,4
Pengadaan Air	6,8	4,0	1,7–4,5
Konstruksi	5,8	5,7	(0,9)–2,2
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,6	5,5	(2,0)–0,5
Transportasi dan Pergudangan	6,4	7,0	(7,5)–(3,1)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,8	6,0	(7,9)–(5,2)
Informasi dan Komunikasi	9,4	7,3	8,3–11,2
Jasa Keuangan	6,6	6,3	2,5–5,4
<i>Real Estate</i>	5,7	4,9	(0,2)–2,5
Jasa Perusahaan	10,3	8,3	1,2–3,9
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,7	4,5	4,4–5,1
Jasa Pendidikan	6,3	5,1	3,8–6,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,7	7,5	11,2–13,3
Jasa Lainnya	10,6	8,9	3,7–6,5

RKP Tahun 2021

Sebagai gambaran, pada RKP tahun 2020 sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang diharapkan tumbuh tinggi (6,0 persen) seiring dengan prioritas pembangunan di sektor pariwisata. Namun pembatasan pergerakan manusia, penutupan perbatasan, dan penghentian sebagian besar penerbangan internasional dan domestik menyebabkan aktivitas pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun domestik, turun tajam. Selain itu, pembatasan pergerakan manusia berdampak pula terhadap restoran dan warung makanan yang hanya bisa melayani *delivery* atau *take away*. Sebagai akibatnya, pertumbuhan sektor ini diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 7,9–5,2 persen.

Sektor industri pengolahan mengalami tekanan yang cukup besar, baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Dari sisi *supply*, gangguan pada rantai pasok global menyebabkan kenaikan biaya produksi terutama untuk memenuhi pasokan bahan baku impor. Selain itu, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak pada tenaga kerja sektor industri pengolahan yang mendorong turunnya aktivitas produksi.

Dari sisi *demand*, di satu sisi industri pengolahan secara keseluruhan dihadapkan pada turunnya permintaan masyarakat akan produk industri, terutama produk yang bukan kebutuhan dasar. Namun di sisi lain,

terdapat juga industri yang berkembang di antaranya: industri makanan minuman, produk kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan farmasi. Dengan perkembangan tersebut, sektor ini diperkirakan akan tumbuh sebesar -1,9–1,8 persen.

Turunnya volume dan aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional, memberikan pengaruh bagi kinerja sektor perdagangan. Sektor ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar -2,0–0,5 persen. Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan berkontraksi sebesar 7,5–3,1 persen, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi, terutama transportasi udara. Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan hingga sebesar -0,9–2,2 persen.

Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertambangan, pertanian, dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar -2,1–0,5; 0,8–2,5; dan 1,6–3,4 persen pada tahun 2020. Sektor pertambangan diperkirakan terkena dampak tidak langsung dari penyebaran wabah Covid-19 yakni penurunan permintaan dan harga komoditas di tingkat internasional. Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama *work from home*. Sektor jasa kesehatan dan informasi dan komunikasi diperkirakan masing-masing tumbuh sebesar 11,2–13,3 persen dan 8,3–11,2 persen pada tahun 2020.

Dari sisi kewilayahan, Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan mengalami perlambatan hingga -0,5–1,9 persen. Perlambatan ini terjadi karena sebagian besar daerah di wilayah ini telah memberlakukan PSBB yang berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian Jawa-Bali, utamanya industri dan pariwisata. Sementara itu, Wilayah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki ketergantungan terhadap komoditas primer juga mengalami dampak perlambatan pada pertumbuhan ekonominya. Sumatera dan Kalimantan diperkirakan akan tumbuh melambat sebesar -0,3–2,6 persen dan -0,4–2,1 persen yang utamanya disebabkan oleh transmisi perdagangan luar negeri akibat penurunan harga komoditas

dunia dan turunnya suplai input antara pada industri pengolahan khususnya di wilayah Jawa-Bali.

Dampak Covid-19 mendorong pelemahan sektor pariwisata, terhambatnya pemulihan pembangunan pascagempa, dan terpukulnya sektor pertambangan perekonomian Wilayah Nusa Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini diperkirakan tumbuh melambat sebesar 0,0–3,1 persen. Sementara itu, Wilayah Sulawesi diperkirakan hanya tumbuh -0,5–4,0 persen yang disebabkan oleh tertahannya laju investasi dan menurunnya kunjungan wisman. Pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan masih mampu tumbuh mencapai -0,3–5,0 persen dengan sektor yang terdampak cukup berat adalah sektor perikanan. Kinerja ekspor diperkirakan menurun seiring dengan pembatasan aktivitas ekonomi baik lokal maupun internasional. Lebih lanjut, perekonomian wilayah Papua akan mengalami tekanan dampak Covid-19 yang relatif terbatas karena efek tekanan sektor tambang yang sudah menurun. Wilayah Papua diperkirakan mampu tumbuh mencapai -0,0–2,0 persen.

Tabel 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Tahun 2019-2020 (Persen)

Uraian	2019 ^{a)}	2020: Sebelum COVID-19 ^{b)}	2020: Setelah COVID-19 ^{c)}
Sumatera	4,6	4,8	(0,3)–2,6
Jawa – Bali	5,5	5,4	(0,5)–1,9
Nusa Tenggara	4,5	5,9	0,0–3,1
Kalimantan	5,0	6,4	(0,4)–2,1
Sulawesi	6,7	6,8	(0,5)– 4,0
Maluku	5,8	6,1	(0,3)–5,0
Papua	-10,7	6,0	(0,0)–2,0

RKP Tahun 2021

Sehubungan dengan potensi pelemahan ekonomi yang tajam pada tahun 2020, tahun 2021 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 terutama dalam rangka mengejar target jangka menengah dan panjang. Upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi: industri, pariwisata, dan investasi melalui perbaikan pada berbagai aspek. Aktifnya mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan serta menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait

Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak wabah Covid-19, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Sementara itu, dari sisi domestik, jika penyelesaian wabah Covid-19 tidak selesai hingga masuk triwulan IV tahun 2020 atau bahkan tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan turun lebih dari 2,3 persen, bahkan dapat menuju negatif.

Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi lebih berat dan berpotensi membentuk pola huruf L (tidak pulih) pada kasus

terburuk. Namun jika wabah Covid-19 dapat ditangani pada tahun 2020, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2021 berpotensi tumbuh tinggi.

Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBPN SDA Nonmigas. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja negara antara lain (1) belum optimalnya *outcome* atau *output* yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi Covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid- 19.

Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2021

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5–5,5 persen pada tahun 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (*Atlas Method*) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110–4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 3.4
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

Uraian	2019	2020* Outlook	2021**)	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 –2,3	5,4–5,7	4,5–5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
PertumbuhanEksporNonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)–(5,7)	6,3	6,0–7,9
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 –128,1	133,2	131,8–132,4
- dalam bulan impor	7,3	9,4 –8,7	7,0	9,1–8,5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)–(1,7)	(2,3)	(1,7)–(1,9)

Uraian	2019	2020* Outlook	2021**)	
			RPJMN	Sasaran
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	8,7	10,1–10,7	8,3–8,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1–0,0	(1,2)–(2,1)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)–(1,7)	(3,2)–(4,2)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4–30,0	36,7–38,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)–3,0	5,8 –6,2	6,0 –7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Target Pembangunan				73,22
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7 –10,2	8,0 –8,5	9,2 –9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8 – 8,5	4,8 – 5,0	7,5–8,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379 –0,381	0,375–0,379	0,377–0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11–72,16	73,26	72,78–72,90

RKP Tahun 2021

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup

1. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.

2. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata.

4. Pembangunan SDM

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasanperlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

5. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

6. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA) *Free Trade Agreement* (FTA) *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.

7. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan *event* olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan. Secara lebih rinci strategi pemulihan tersebut akan diwujudkan melalui upaya sebagai berikut.

B. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Sumatera Barat. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang terintegrasi antar pelaku usaha (usaha besar, usaha kecil dan koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang dikelola melalui model ekonomi inklusif yang melibatkan para pelaku usaha (besar, kecil dan koperasi) secara terintegrasi (vertikal dan horisontal) sehingga berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. *Potensi pertama* adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. *Potensi kedua* adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini

terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. *Potensi ketiga* terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2020 mendatang.

Tabel berikut memperlihatkan beberapa indikator makro Ekonomi yang telah dicapai selama ini:

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target	
			2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,16%	5,05%	1,37%	4,22%
2.	Tingkat Kemiskinan	persen	6,64%	6,40%	6,28%	6,15%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,55%	5,33%	7,87%	7,77%
4.	Rasio Gini	poin	0,320	0,310	0,307	0,304
5.	IPM	poin	71,73	72,39	72,35	72,99

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2020

Beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya sebagai berikut:

- Dorongan pertumbuhan ekonomi ternyata lebih disebabkan oleh konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto, serta transportasi dan pengudangan dan informasi dan komunikasi. Artinya sektor riil ekonomi Sumatera Barat telah bergerak. Pergerakan sektor riil ekonomi masih terasa lambat, yang terlihat dari masih rendahnya realisasi investasi swasta, tetapi perbaikan infrastruktur mulai memperlihatkan trend meningkat walaupun masih belum dalam bentuk komoditi unggulan utama produk pertanian, sehingga peningkatan nilai industri pengolahan dapat lebih ditingkatkan lagi melalui pembangunan zona prosesing ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang mulai pulih (*recovery*) diperkirakan *digenerate* oleh nilai konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto dan pengolahan produk pertanian dan ekonomi kreatif yang berasal dari komoditi pertanian dan budaya lokal yang mendukung kegiatan pariwisata. Terbangunnya zona pengolahan ekspor dan terpenuhi infrastruktur pada koridor ekonomi, serta peran *autonomous investment* yang masih tetap besar, karena pembangunan jalan tol, meskipun dilaksanakan dengan menggunakan sistem investasi *public*

private partnership (PPP), tetapi pembebasan lahan dan fasilitas publik pendukungnya sebagai bagian pemerintah akan semakin besar.

- b. Rendahnya peran investasi pihak swasta internal maupun eksternal wilayah yang tercermin dari rendahnya pertumbuhan konsumsi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rendahnya peran investasi pihak lembaga swasta untuk mengerakan sektor riil sangat terkait dengan beberapa hal diantaranya adalah: belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dari hasil laut, bahan tambang, dan bahan galian yang ada, sistem pelayanan publik untuk perizinan usaha dan investasi yang masih menjadi hambatan untuk pengembangan investasi baru. Keamanan sistem *property right* (*secure property right*) masih menjadi kendala utama untuk berkembangnya investasi dalam negeri di wilayah Sumatera Barat, sikap beberapa kalangan elemen masyarakat yang menolak investasi swasta pada destinasi wisata dengan dalih ikatan-ikatan primordial juga memberikan andil terhadap rendah investasi swasta di Sumatera Barat.
- c. Pengembangan agrobisnis dan agro industri harus sejalan dengan pengembangan zona pengolahan industri produk pertanian di perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan cepat tumbuh seperti kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh, kawasan agropolitan, kawasan industri manufaktur perkotaan dan zona pengolahan ekspor. Semua kawasan tersebut seyogyanya diintegrasikan dengan pusat pertumbuhan koridor ekonomi Sumatera. Setiap kawasan unggulan yang berbasis pengolahan industri pertanian, harus terkoneksi dengan pusat-pusat unggulan utamanya seperti pusat unggulan Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Solok. Sehingga konektivitas secara lokal ini akan membuat semakin kuatnya konektivitas pada tingkat regional yakni koridor ekonomi Sumatera.
- d. Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor dari luar negeri dengan mengembangkan ekonomi kreatif sendiri yang mendukung usaha pariwisata yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki daya tarik obyek wisata dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi budaya lokalnya.
- e. Mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja memerlukan percepatan pertumbuhan ekonomi.
- f. Memperkuat peran bisnis daerah sebagai mitra utama dari investor luar daerah. Investasi yang besar akan mengalir ke suatu wilayah dimana terdapat peran bisnis yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Perpaduan bisnis swasta daerah dan BUMD provinsi, kota dan kabupaten adalah instrumen peningkatan investasi baik lokal maupun supra lokal.
- g. Memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas teknis pengelolaan agrobisnis dan agro industri dan pengembangan pariwisata. Ekspor non migas yang telah memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti, baik volume dan nilainya masih perlu dicermati keberlanjutannya karena dari segi jenis komoditi dan negara tujuan belum banyak mengalami perkembangan. Komoditi ekspor dari industri dan pertanian, kualitas dan ketersediaannya masih rendah yang akan mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan ekspor tersebut. Sementara itu dibidang pariwisata

masih dirasakan kurangnya penataan infrastruktur daya tarik obyek wisata dan pembenahan serta pengadaan sarana dan prasarana untuk perjalanan dan penginapan, serta adanya pandangan sebagian besar masyarakat yang menganggap pariwisata lebih membawa dampak negatif terhadap adat, budaya dan agama. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata berbasis laut (*marine tourism*) agar lebih diutamakan.

- h. Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, khususnya beras, karena masih banyak penduduk miskin yang mempunyai daya beli yang sangat rendah dan perlu mendapat perhatian.

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN mengharuskan semua elemen dunia usaha mulai dari petani komoditi ekspor, pedagang dan eksportir harus mampu bersaing menghadapi pesaing baru yang diberi izin masuk dan bebas bea masuk/cukai, sehingga akan terjadi persaingan harga, persaingan kualitas, dan persaingan pelayanan pada konsumen akhir melalui penetapan standar barang dan jasa yang diperdagangkan. Persaingan ini membutuhkan peningkatan keahlian, kualitas, kemampuan melakukan inovasi terhadap produk baik pada produk hilir maupun hulu, yang pada gilirannya akan mengarah kepada efisiensi biaya produksi dan biaya pemasaran, sehingga siapa yang berhasil memenangkan persaingan perdagangan ini adalah siapa yang paling mampu memproduksi secara efisien dan berhasil mengembangkan sistem inovasi produk yang mengarah kepada penguasaan pangsa pasar. Oleh karena itu, tantangan pasar bebas ASEAN mengugah kemampuan ekonomi Sumatera Barat dalam berkompetisi ditingkat regional, terutama dalam merebut pangsa pasar ekspor ke negara ASEAN seperti karet, sawit, dan barang-barang ekspor lainnya

C. Arah Kebijakan Ekonomi dan Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease-9* di Kabupaten Sijunjung

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun terakhir mengalami perlambatan. Pada tahun 2015 pertumbuhannya 5,69 persen terus mengalami perlambatan sampai 4,83 persen tahun 2019. Dari 17 sektor lapangan usaha yang digunakan dalam penghitungan laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015-2019, hampir semua sektor lapangan usaha pertumbuhannya mengalami perlambatan. Tujuh lapangan usaha dengan persentase pertumbuhan dibawah 6 persen, yaitu: Pertanian, Kehutanan & Perikanan, Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Dan satu lapangan usaha dengan pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Industri Pengolahan dengan pertumbuhan - 5,49 persen.

Laju perekonomian di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Barometer inflasi di Kabupaten Sijunjung dipengaruhi oleh inflasi provinsi, nasional, inflasi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Desember 2019, capaian inflasi di Kota Padang sebesar 0,07% sedangkan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar -0,01%. Laju inflasi tahun kalender sampai bulan Desember 2019 di Kota Padang dan Kota Bukittinggi masing-masing sebesar 1,72% dan 1,31%. Laju inflasi year on year (Desember 2018 – Desember 2019) di Kota Padang sebesar 1,72% dan Kota Bukittinggi sebesar 1,31%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2020, tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi nasional. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia termasuk Kabupaten Sijunjung. Prospek

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2020 yang pada awalnya ditargetkan mencapai 5,5 direvisi kebawah menjadi -0,4–2,3 persen dengan mempertimbangkan terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen PDRB. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh melambat Sementara itu sektor transportasi dan pergudangan diperkirakan juga melambat pertumbuhannya, sebagai dampak dari dampak pembatasan pergerakan masyarakat dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan terhadap permintaan angkutan transportasi.

Sektor lainnya, sektor konstruksi, terkena dampak penundaan atau penghentian berbagai proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sektor lain yang perlu mendapat perhatian adalah sektor pertambangan, pertanian, dan pengadaan listrik yang masing-masing diperkirakan dapat tetap tumbuh, diperkirakan terkena dampak tidak langsung dari penyebaran wabah Covid-19 yakni penurunan permintaan dan harga komoditas di tingkat. Sementara itu, sektor pertanian subsektor tanaman pangan diperkirakan tidak akan mengalami gangguan dalam jangka pendek, tetapi gangguan diperkirakan terjadi pada subsektor perkebunan dan perikanan, terutama dari sisi ekspor. Sektor pengadaan listrik terbantu oleh peningkatan konsumsi listrik rumah tangga yang meningkat seiring dengan kebijakan *work from home* dan pembebasan tarif listrik, meski permintaan listrik industri dan bisnis mengalami penurunan.

Sektor jasa kesehatan dan informasi komunikasi menjadi sektor yang diperkirakan dapat bertahan di tengah wabah Covid-19. Jasa kesehatan merupakan kebutuhan esensial terutama dalam hal pemenuhan obat-obatan, farmasi, dan alat kesehatan. Selain itu, permintaan akan produk sektor informasi dan komunikasi meningkat cukup signifikan, khususnya pada paket data untuk memenuhi kebutuhan selama *work from home*.

Dampak dari pandemi COVID 19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung tahun 2021 dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi Nasional diprakirakan akan berada pada rentang 4,5%-5,5% (yoy), diarahkan untuk percepatan pemulihan dampak COVID 19. Pemulihan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan dengan mengerakan sektor-sektor utama di Kabupaten Sijunjung seperti lapangan usaha pertanian, lapangan usaha Perdagangan, lapangan usaha transportasi pergudangan, lapangan usaha konstruksi dan lapangan usaha industri olahan diyakini masih menjadi mesin penggerak utama perekonomian Kabupaten Sijunjung. Untuk memperbaiki kinerja perekonomian di tahun 2021, sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2021 yaitu *"Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, didukung Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"*, maka fokus pembangunan Tahun 2021 diarahkan kepada pemulihan ekonomi dan target yang harus dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	Satuan	Realisasi			Target	
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,27	5,10	4,83	1,96	3,63
2.	Tingkat Kemiskinan	persen	7,35	7,11	7,04	7,27	7,07
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,32	3,20	3,68	5,24	4,82
4.	Rasio Gini	poin	0,33	0,30	0,29	0,33	0,325
5.	IPM	poin	66,60	66,97	67,66	67,67	68,39

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan uraian diatas dan kondisi dan arah kebijakan perekonomian Nasional dan Provinsi Sumatera Barat diatas, maka untuk arah kebijakan pemulihan perekonomian Kabupaten Sijunjung dari dampak COVID 19 tentunya tidak akan jauh bergerak dari kondisi dan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Dalam tahun 2021, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi, penciptaan sektor ekonomi yang tangguh melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, optimalisasi sektor-sektor basis pembentuk PDRB, membangun infrastruktur, meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, memperluas jaringan perlindungan sosial, penguatan kesehatan dan mengembangkan birokrasi yang baik. Langkah-langkah kebijakan tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM

Diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan.

2. Mengembangkan sektor-sektor basis pembentuk PDRB

Sektor Basis pembentuk PDRB di Kabupaten Sijunjung yaitu: 1). Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2). Pertambangan dan Penggalian; 3). Pengadaan Listrik dan Gas; 4). Real Estat; 5). konstruksi; 6). Jasa Pendidikan; 7). Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial haruslah mendapat perhatian lebih besar karena berkontribusi besar terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Sijunjung tanpa mengabaikan sektor-sektor lain

3. Mengembangkan usaha kecil menengah

Dilakukan dengan mengadakan pembinaan, pelatihan manajemen serta mencari informasi dan peluang pasar. Perlunya memfasilitasi akses permodalan serta peralatan bagi pedagang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dan tentunya deregulasi peraturan diperlukan untuk mempermudah pedagang kecil, menengah dan koperasi dalam akses permodalan, informasi pasar serta menghapus distorsi pasar.

4. Peningkatan iklim investasi

Dilakukan dengan mengurangi atau memperkecil hambatan berusaha, melalui penekanan biaya investasi, penyerdahanaan prosedur investasi, kepastian pelayanan investasi dan pengurangan hambatan terhadap masuknya investasi. Disamping itu perlu mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Sijunjung. Dan juga perlu diciptakan suatu sistem pemantauan atas perkembangan investasi sehingga dapat diketahui hambatan yang muncul dalam pengembangan investasi di Kabupaten Sijunjung.

5. Pembangunan infrastruktur

Pengembangan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendorong sektor-sektor basis ekonomi sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

6. Memperluas jaringan perlindungan sosial

Perluasan jaringan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan, pascapandemi Covid-19.

7. Penguatan sistem kesehatan

Melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas *health security* terutama surveilans, jejaring dan kapasitas

laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.

8. Memperbaiki sistem birokrasi

Mengembangkan sistem pengaturan yang baik dalam sistem pengelolaan pemerintah yang kondusif bagi peningkatan peluang investor dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan investasinya di kabupaten Sijunjung

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah peran yang sangat strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Hal ini disebabkan karena kebijakan keuangan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran berkorelasi langsung dengan pembiayaan/pendanaan atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, keterbatasan sumber biaya tentunya perlu beberapa kebijakan baik dari sisi penerimaan maupun dari pengeluaran sehingga tujuan dari pembangunan dapat dicapai.

Pada sub bab ini akan dianalisis kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan (1. Transfer Umum dan DBB, 2. Transfer Khusus DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan bagi hasil, dan Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota) Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana darurat dari pemerintah dan hibah.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah ini maka arah kebijakan yang akan ditempuh tahun 2021 berdasarkan komponen pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
2. Melakukan optimalisasi penggunaan asset daerah dan keuangan daerah
3. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak
4. Meningkatkan kinerja dan kesehatan badan usaha milik daerah dengan melakukan penataan manajemen sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah
5. Merififikasi data pajak dan pendataan potensi pajak dan retribusi sebagai dasar menetapkan target pendapatan.

3.2. 1. Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan RPJMD

Untuk Proyeksi Pendapatan Daerah pada tahun 2021, dianalisis berdasarkan dari capaian realisasi pendapatan yang sudah dilalui sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Pendapatan daerah tahun 2021 dalam RKPD ini diproyeksikan Rp.1.228.707 juta yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 123.279 juta dan Pendapatan Transfer Rp. 1.105.42 juta. Pendapatan ini diasumsikan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN,

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Hibah BOS diasumsikan seperti terlihat pada, Karena besarnya tergantung dari penerimaan netto APBN. Struktur pendapatan daerah, realisasi tahun 2018-2019 dan proyeksi untuk tahun 2020-2021 secara rinci digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2019 dan Proyeksi
Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun			Proyeksi RPJMD 2021
	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	1.019.177	995.976	1.023.106	1.228.707
Pendapatan Asli Daerah	82.738	83.906	81.239	123.279
Pendapatan Pajak Daerah	11.746	14.284	14.409	16.292
Pendapatan Retribusi Daerah	7.332	4.347	4.019	10.169
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.697	12.334	13.170	23.873
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.961	52.938	49.640	72.943
Pendapatan Transfer	936.438	912.070	901.511	1.105.428
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	782.899	736.140	779.030	932.446
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	17.027	11.079	13.852	20.279
Dana Alokasi Umum	591.884	560.403	566.115	704.944
Dana Alokasi Khusus	173.987	164.657	199.061	207.221
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	114.537	81.236	78,875	126.865
Dana Insentif Daerah	50.000	22.448	19.206	50.000
Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN	64.537	58.787	59.669	76.865
Transfer Pemerintah Provinsi	39.001	94.693	43.605	46.116
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.251	44.556	42.849	44.366
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Hibah BOS	1.750	50.136	41.111	1.750

Sumber: BKAD Tahun 2020 dan RPJMD 2016-2021

Pada perencanaan pendapatan sebagaimana yang disebutkan pada RPJMD 2016-2021, bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi pendapatan dan ekstensifikasi pendapatan. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa upaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah, pemerintah akan tetap secara rutin dan berkala melakukan upaya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi seperti sebagai berikut: 1). 1.Menggali potensi / jenis penerimaan baru; 2). Merubah pola tarif; 3). Meningkatkan pelayanan dan sumber daya manusia; 4). Meningkatkan sarana dan prasarana khususnya berbasis Teknologi Informasi (IT), 5). Manajemnen Aset dan Kas.

Sesuai dengan asumsi proyeksi pendapatan, maka proyeksi belanja tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan untuk membiayai belanja tersebut sesuai dengan yang tertera dalam RPJMD tahun 2016-2021. Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah dalam RKPD Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 1.290.143 juta yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp 501.443 juta dan Belanja Langsung 788.700 juta, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Belanja 2018-2020 dan
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun			Proyeksi RPJMD 2021
	2018	2019	2020	
BELANJA DAERAH	958.137	998.888	1.097.684	1.290.143
Belanja Tidak Langsung	491.308	514.793	576.692	501.443
Belanja Pegawai	367.770	380.880	410.817	
Belanja Hibah	13.146	11.631	42.598	
Belanja Bantuan Sosial	220	3.098	500	
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/ Kota & Pemerintahan Nagari	1.978	2.002	1.755	
Belanja Bantuan kpd Prov/Kab/ Kota & Pemerintahan Nagari	106.931	117.032	117.682	
Belanja Tak Terduga	1.263	1.500	2.500	
Belanja Langsung	466.829	484.095	520.991	788.700
Belanja Pegawai	37.919	36.462	36.462	
Belanja Barang dan Jasa	223.092	243.422	243.422	
Belanja Modal	205.818	204.210	204.210	

Sumber: BKAD Tahun 2020 dan RPJMD Tahun 2016-021

Kebijakan penyusunan dan penggunaan belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 2). Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam menunjang visi dan misi daerah terutama meningkatkan sumberdaya manusia dan pemerataan infrastruktur berbasis pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing.
2. Belanja daerah diprioritas untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
3. Belanja pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Smentara untuk pembiayaan daerah dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (Silpa) serta pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah :

1. Sisa lebih perhitungan tahun lalu diperhitungkan dari persentase penghematan belanja. dimana persentasenya semakin menurun dari tahun ke tahun sebagai akibat rasionalisasi perencanaan yang tepat yang mengakibatkan serapan anggaran yang besar. Disamping itu diproyeksikan berdasarkan defisit sebesar 4.25 persen dari pendapatan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan tentang batas defisit APBD.
2. Terhadap penyertaan modal dilaksanakan seefektif mungkin tergantung kebutuhan dan lebih diprioritaskan untuk dapat menambah pendapatan asli daerah.
3. Mengoptimalkan pendapatan daerah dan merasionalkan belanja sehingga terhindar dari resiko terjadinya pinjaman daerah.

Selanjutnya dapat dilihat alokasi realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan 2018-2020 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Uraian	Tahun			Proyeksi RPJMD 2021
	2018	2019	2020	
PEMBIAYAAN	122.568	95.319	74.577	54.935
Penerimaan Pembiayaan	136.395	110.180	75.077	65.935
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	132.009	106.286	75.077	61.435
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1.384	894	1.500	1.500
Penerimaan Kembali Investasi Daerah	3.000	3.000	3.000	3.000
Pengeluaran Pembiayaan	13.825	14.861	13.331	11.000
Penyertaan	13.000	13.397	12.331	10.000
Pemberian Pinjaman Daerah	825	1.464	1.000	1.000

Sumber: BKAD 2020 dan RPJMD Tahun 2016-2021

B. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan RKPD
Pendapatan

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan bagi hasil pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi.

Tabel 3.10
Proyeksi Pendapatan di RPJMD dan Proyeksi Pendapatan di RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 (Juta Rupiah)

Uraian	RPJMD 2021	RKPD 2021	Bertambah/ Berkurang
PENDAPATAN	1.228.702	1.212.287	(16.415)
Pendapatan Asli Daerah	123.277	85.519	(37.758)
Pendapatan Pajak Daerah	16.292	14.409	(1.883)
Pendapatan Retribusi Daerah	10.169	4.315	(5.854)
Pendapatan Hasil Pengelolaan	23.873	13.170	(10.703)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72.943	53.625	(19.318)
Pendapatan Transfer	932.444	1.004.288	71.844
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	20.279	13.770	(6.509)
Dana Alokasi Umum	704.944	666.115	(38.829)
Dana Alokasi Khusus	207.221	324.403	117.182
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	126.865	78.875	(47.990)
Dana Insentif Daerah	50.000	19.206	(30.794)
Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN	76.865	59.669	(17.196)
Transfer Pemerintah Provinsi	46.116	43.605	(2.511)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.366	42.849	(1.517)
Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi/Hibah BOS	1.750	756	(994)

Sumber: RPJMD 2016-2021 dan BKAD Tahun 2021

Berdasarkan data tabel diatas Pendanaan untuk tahun 2021. Pendapatan diproyeksikan Rp 1.029.163 juta sedikit megalami penurunan Rp 199.544 juta bila dibandingkan dengan proyeksi RPJMD 2016-2021 Rp 1.228.707 juta. Sumber pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp 86.014 juta; Pendapatan Transfer Rp 901.428 juta; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp 78.876 juta Transfer Pemerintah Provinsi Rp 43.605 juta.

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun terakhir relatif rendah, karena rata-rata pertumbuhan sebesar 4,84%. Belum signifikannya pertumbuhan pendapatan daerah disebabkan karena rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 9,51% dan diikuti juga rata-rata pertumbuhan dana perimbangan sebesar 4,80%. Belum optimalnya pertumbuhan PAD, disebabkan karena rata-rata pertumbuhan pendapatan retribusi daerah minus 26,44% dan belum optimalnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan PAD yang tandai rendahnya rata-rata pertumbuhan sebesar 7,12%.

Sementara itu, pertumbuhan pendapatan pajak daerah tidak meningkat secara signifikan dengan rata-rata sebesar 13,42%. Cenderung menurunnya pertumbuhan pendapatan retribusi daerah disebabkan karena belum tergalinya potensi pajak dan retribusi daerah. Disisi lain, belum optimalnya pertumbuhan dana perimbangan disebabkan karena cenderung menurunnya dana bagi hasil pajak, sehingga rata-rata pertumbuhannya minus 10,43% dan rata-rata pertumbuhan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2,19% serta rata-rata pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 22,99%

Melambatnya rata-rata pertumbuhan sumber-sumber pendapatan daerah sangat berimplikasi terhadap belanja pembangunan daerah, sehingga berkorelasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan relatif sempitnya ruang fiskal pembangunan daerah. Perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun					Pertum buan (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.008,44	76.833,97	107.915,72	79.055,94	83.906,45	9,51
Pendapatan Pajak Daerah	8.778,64	10.787,39	13.427, 64	14.110,25	14.284,70	13,42
Pendapatan Retribusi Daerah	22.251,96	6.377,76	4.813,75	4.487,077	4.348,00	(26,44)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.636,52	11.781,76	12.082,25	10.777,42	12.334,97	7,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.341,32	47.887,06	77.592,09	49.681,20	52.938,78	32,34
DANA PERIMBANGAN	618.274,23	725.803,70	710.605,07	700.524,76	737.765,49	4,80
Dana Bagi Hasil Pajak	12.581,32	12.235,86	8.893,11	10.446,04	7.405,98	(10,43)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.994,88	4.851,26	11.357,21	1.999,72	3.673,95	29,09
Dana Alokasi Umum	516.685,15	558.382,09	548.573,11	548.573,11	562.028,2	2,19
Dana Alokasi Khusus	83.012,85	150.334,49	150.674,76	139.505,88	164.657,29	22,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	145.109,22	82.093,53	157.428,83	162.027,94	175.929,97	14,96
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	81.236,26	0
Dana Penyesuaian	0	0	0	0	81.236,26	0
Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN	18.156,86	40.677,75	51.629,93	49.651,44	116.283,75	70,33
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.876,23	0	37.146,58	37.467,62	44.556,77	(20,05)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	32.803,29	11.932,27	(20,05)
TOTAL PENDAPATAN	828.391,86	884.731,20	975.949,63	941.608,64	995.976,94	4,84

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Sedangkan perkembangan dan rata-rata pertumbuhan komponen-komponen pendapatan yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2016-2019, terlihat pada tabel berikut ini.

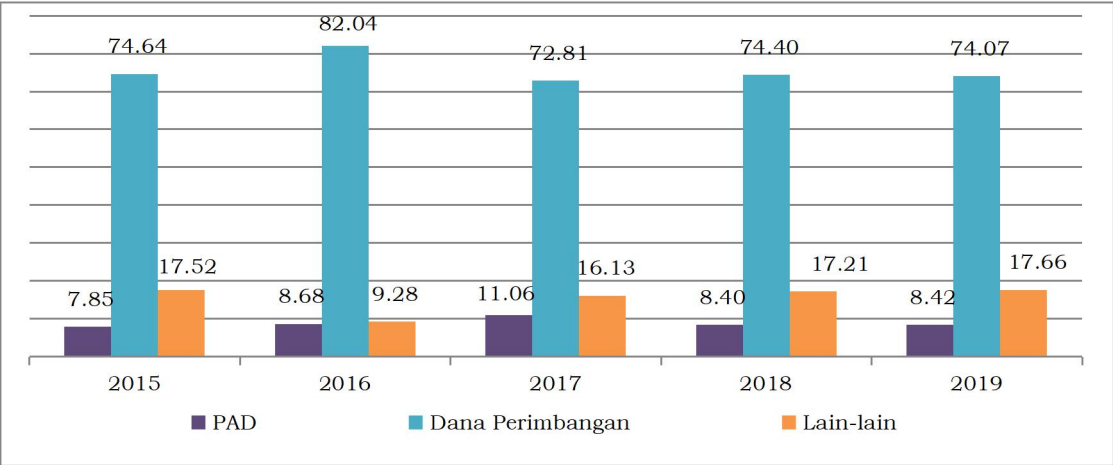
Tabel 3.12
Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2016-2019

Uraian	2016	2017	2018	2019	Pertum buhan (%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,19	40,45	-26,74	6,14	9,51
Pendapatan Pajak Daerah	22,88	24,48	5,08	1,23	13,42
Pendapatan Retribusi Daerah	(71,33)	(24,52)	(6,79)	(3,10)	(26,44)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22,26	2,55	(10,80)	14,45	7,12
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96,73	62,03	(35,97)	6,56	32,34
DANA PERIMBANGAN	17,39	(2,09)	(1,42)	5,32	4,80
Dana Bagi Hasil Pajak	(2,75)	(27,32)	17,46	(29,10)	(10,43)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	(19,08)	134,11	(82,39)	83,72	29,09
Dana Alokasi Umum	8,07	(1,76)	0	2,45	2,19
Dana Alokasi Khusus	81,10	0,23	(7,41)	18,03	22,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(43,42)	91,77	2,92	8,58	14,96
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0
Alokasi Dana Desa yang Berasal dari APBN	124,04	26,92	(3,83)	134,20	70,33
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	(100)	0	0,86	18,92	(20,05)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	0	0	0	(63,62)	(20,05)
PENDAPATAN	6,80	10,31	(3,51)	5,77	4,84

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Sementara itu, proporsi pendapatan daerah masih mengandalkan kepada dana perimbangan. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung belum mencapai kepada tingkat kemandirian fiskal. Hal ini menjadi tantangan pembangunan lima tahun kedepan, dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis serta proposional. Perkembangan proporsi pendapatan Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2015-2019 cenderung fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 3.1
Proporsi Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019 (Persen)



Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait fungsi pemerintah daerah itu sendiri. Belanja daerah terdiri dari dua pos besar belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya proyeksi belanja daerah tahun untuk tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut

Tabel 3.13
Proyeksi Belanja di RPJMD dan Proyeksi Belanja di RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021(Rp Juta)

Uraian	RPJMD 2021	RKPD 2021
BELANJA DAERAH	1.290.143	1.286.864
Belanja Tidak Langsung	501.443	500.440
Belanja Pegawai		431.037
Belanja Hibah		3.800
Belanja Bantuan Sosial		500
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Nagari		1.550
Belanja Bantuan kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintahan Nagari		53.553
Belanja Tak Terduga		10.000
Belanja Langsung	788.700	786.424

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 6,01%. Hal ini disebabkan karena belanja langsung bertumbuh secara rata-rata sebesar 8,15% dan diikuti pertumbuhan komponen belanja tidak langsung dengan rata-rata 4,21%. Sementara itu, pertumbuhan belanja langsung yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja barang dan jasa dengan rata-rata sebesar 11,54% dan diikuti belanja modal secara rata-rata sebesar 7,74%. Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja barang dan jasa terhadap komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah.

Sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung yang meningkat secara signifikan terdapat pada komponen belanja bantuan sosial dengan rata-rata sebesar 371,08% dan diikuti belanja tidak terduga sebesar 162,21%. Sementara itu, komponen belanja gaji dan tunjangan bertumbuh secara rata-rata sebesar 9,18%. Perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2015-2019, terlihat pada tabel berikut ini.

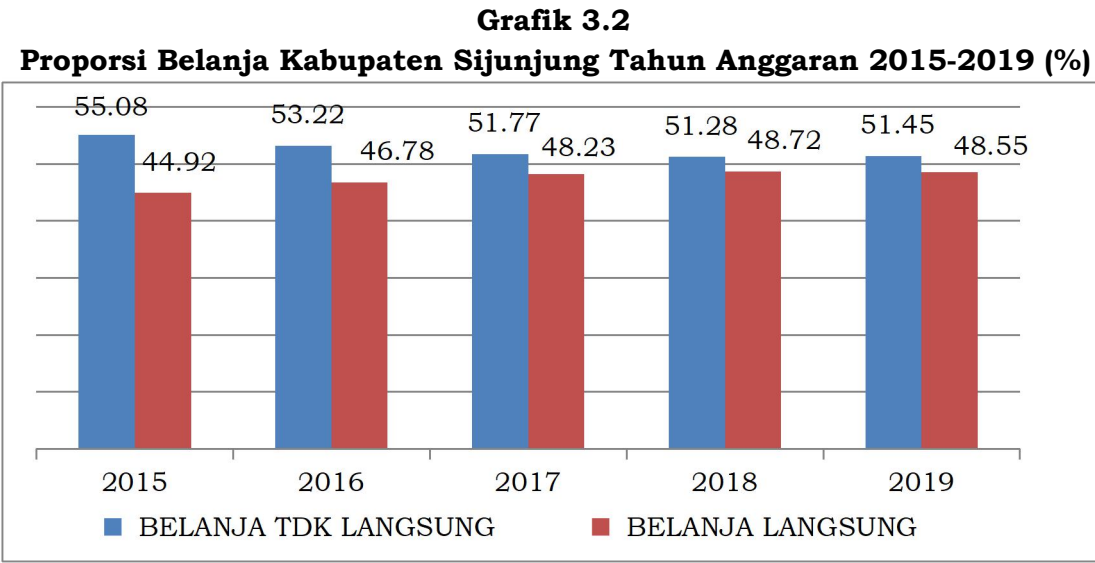
Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2018-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Pertum Buhan (%)
A. BELANJA TIDAK LANG-SUNG	440.350	496.037	463.862	491.309	514.793	4,21
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	269.845	283.664	340.454	367.769	380.879	9,18
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Pertum Buhan (%)
3. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Hibah	19.587	8.992	8.973	13.145	11.631	-4,83
5. Belanja Bantuan Sosial	169	603	401	220	3.097	371,08
6. Belanja Bagi Hasil	1.318	2.489	1.836	1.978	2.002	17,89
7. Belanja Bantuan Keuangan	51.541	99.610	111.832	106.931	117.032	27,65
8. Belanja Tidak Terduga	40	204	363	1.263	150	162,21
B. BELANJA LANGSUNG	359.076	435.994	432.172	466.829	485.720	8,15
1. Belanja Pegawai	30.551	33.405	41.606	37.919	36.462	5,30
2. Belanja Barang dan Jasa	160.835	158.631	200.809	223.091	245.047	11,54
3. Belanja Modal	167.689	243.956	189.756	205.818	204.210	7,74
TOTAL BELANJA	799.426	932.031	896.035	958.138	1.000.514	6,01

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Sementara itu, dari sisi proporsi belanja daerah menunjukkan perkembangan arah yang lebih baik. Hal ini terlihat perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung, dimana pada tahun 2015 perbandingannya 55,08% : 44,92% dan pada tahun 2019 perbandingannya 51,45% : 48,55%. Cenderung membaiknya proporsi belanja daerah menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan proporsi belanja daerah Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2015-2019, tergambar pada grafik berikut ini.



Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam hal ini meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (silpa) serta pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal kepada BMD, Bank Nagari BRI dan BNI. Proyeksi pembiayaan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan di RPJMD dan Proyeksi Pembiayaan di RKPD
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

Uraian	RPJMD 2021	RKPD 2021	Bertambah/ Berkurang
PEMBIAYAAN	66.577	74.577	-
Penerimaan Pembiayaan	79.577	79.577	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	75.077	75.077	-
Penerimaan Kembali Pinjaman	1.500	1.500	-
Penerimaan Kembali Investasi	3.000	3.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	13.000	5.000	-
Penyertaan	12.000	4.000	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.000	1.000	-

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah lima tahun terakhir belum menunjukkan capaian yang optimal, karena penerimaan pembiayaan lebih banyak kontribusinya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penerimaan kembali investasi daerah. Walaupun rata-rata pertumbuhannya sebesar 24,87%, namun nilainya relatif kecil kontribusi terhadap penerimaan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan pembiayaan daerah belum proporsional, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang optimal. Perkembangan realisasi dan rata-rata pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015–2019, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Kabupaten
Sijunjung Tahun Anggaran 2015–2019 (Rp Juta)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata- Rata Pertumb uhan (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	01.630,12	117.509,51	63.254,10	136.393,73	110.179,83	16,46
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	99.227,12	115.709,51	58.763,10	133.393,73	106.038,56	18,47
Penerimaan Kembali Investasi Daerah	2.403,00	1.800,00	4.491,00	3.000,00	3.247,77	24,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.700,00	14.400,00	11.146,00	13.825,00	14.861,40	1,72
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.700,00	14.400,00	10.000,00	13.000,00	13.396,90	0,11
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	1.146,00	825,00	1.464,50	12,37
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	87.364,70	55.809,32	132.022,40	106.038,56	95.318,43	17,66

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Berdasarkan analisis pembiayaan tersebut, maka defisit riil anggaran yang terjadi pada tahun anggaran 2016, 2018 dan 2019 ditutupi melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan penutupan defisit riil anggaran tidak mempengaruhi anggaran belanja daerah. Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan defisit riil anggaran Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17
Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Pendapatan	828.391,86	884.731,20	975.949,63	941.608,64	997.601,92	4,88
Belanja	799.426,36	932.031,39	896.035,33	958.138,80	1.000.514,06	6,02
Pengeluaran pembiayaan	28.965,51	47.300,19	45.573,31	16.530,17	2.219,15	(22,66)
Defisit riil	0	(94.600,38)	34.340,99	(33.060,33)	(5.131,29)	(4,26)

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu daerah pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah akan menggambarkan informasi mengenai kondisi keuangan suatu daerah, sehingga menjadi salah satu faktor penentuan asumsi-asumsi dalam perumusan kebijakan keuangan daerah.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Siijunjung dan rata-rata pertumbuhannya Tahun Anggaran 2015-2019 menunjukkan kondisi relatif baik. Hal ini ditandai rendahnya rata-rata pertumbuhan aset sebesar 0,04% dan rata-rata pertumbuhan ekuitas minus sebesar 0,09%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan karena relatif tingginya pertumbuhan akumulasi penyusutan aset tetap dengan rata-rata 24,72%. Kondisi ini mencerminkan relatif banyaknya jumlah aset tetap yang tidak bernilai ekonomis, sehingga membebankan terhadap kondisi keuangan daerah. Gambaran perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca Kabupaten Sijunjung Anggaran Tahun 2015–2019.

Tabel 3.18
Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbu han (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	60.0232,83	159.999,26	682.808,15	14.609,28	80.407,79	1,51
Kas di Bendahara Pengeluaran	646,02	6.881,43	1.090,33	112,37	6.529,36	16,25
Kas di Bendahara Penerimaan	7.660,67	17,85	3,14	2,17	2,43	(0,50)
Setara Kas	99.500,00	9.500,00	0,42	2,05	0	0,24
Piutang	1.172,92	10.138,77	9.287,43	11.374,22	12.440,94	1,97
Penyisihan Piutang	0	8.040,86	6.558,60	6.560,74	(6.543,56)	(0,55)
Belanja Dibayar Dimuka	310,64	133,17	207,08	100,73	199,34	0,11
Persediaan	3.832,61	10.301,54	13.864,41	8.761,52	13.790,38	0,56
Jumlah Aset Lancar	713.355,69	144.669,85	704.170,22	37.824,24	146.438,47	1,24
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Dana Bergulir Penguat Modal UKM	8.598,26	8.362,12	2.889,19	2.436,87	2.507,88	(0,20)
Penyisihan Investasi Dana Bergulir Penguat Modal UKM	(3.935,34)	(4.041,07)	(14,45)	(12,18)	(12,18)	(0,28)
Jumlah Investasi Non Permanen	4.662,92	4.321,05	2.874,75	2.424,69	2.495,69	(0,13)
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	83.378,66	96.615,47	101.332,00	124.241,72	125.530,80	0,11
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Jumlah Investasi Permanen	83.378,66	96.615,47	101.332,00	124.241,72	125.530,7	0,11
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	88.041,58	100.936,52	104.206,75	126.666,41	128.026,49	0,10
ASET TETAP						
Tanah	172.396,15	172.341,05	139.574,76	145.432,41	145.914,63	(0,03)
Peralatan dan Mesin	230.495,59	267.205,24	225.498,85	319.708,31	364.459,91	0,14
Gedung dan Bangunan	588.319,19	645.312,58	424.392,76	755.319,05	811.156,74	0,15
Jalan, Jaringan dan Irigasi	822.752,04	918.096,25	992.020,20	1.068.510,80	1.245.183,41	0,11
Aset Tetap Lainnya	31.282,96	26.972,20	3.272,87	26.572,21	29.173,29	1,55
Konstruksi dalam pengerjaan	69.758,80	45.777,70	65.392,62	110.295,22	31.260,36	0,01
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.969,52)	(893.448,44)	(820.899,75)	(895.428,93)	(1.126.666,87)	24,72
Jumlah Aset Tetap	1.906.035,21	1.182.256,57	1.029.243,90	1.530.409,08	1.500.481,49	(0,01)
ASET LAINNYA						
Aset tak berwujud	419,82	197,73	562,98	1.697,43	800,85	0,70
Aset Lain-lain	1.277,21	1.405,81	15.323,45	18.280,72	5.393,54	2,37
Aset Dalam Penelusuran	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Lainnya	1.758,46	1.603,54	15.701,28	20.161,07	6.194,39	2,07
TOTAL ASET	2.621.149,36	1.035.234,46	1.853.330,56	1.588.394,39	1.781.140,84	0,04
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(2,12)	5,46	11,58	87,45	19,96	0,83
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,65	10.168,46	49,92	0,49	0,96	3.910,43
Pendapatan Diterima Dimuka	1.138,37	1.212,45	1.188,72	80,99	24,79	(0,39)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.511,06	15.369,77	33.989,05	51.922,35	11.062,10	2,53
JUMLAH KEWAJIBAN	1.511,06	15.369,77	33.989,05	51.922,35	11.062,10	2,53
EKUITAS DANA	2.488.651,43	936.574,62	859.710,28	1.306.925,35	1.081.022,55	(0,09)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.490.162,49	951.944,39	893.699,33	1.358.847,70	1.092.084,65	(0,09)

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020 (data diolah)

Berdasarkan neraca daerah di atas, selanjutnya dilakukan analisis terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Analisis rasio likuiditas menunjukkan perkembangan relatif baik, sedangkan analisis rasio solvabilitas cenderung kurang baik karena rasio total hutang terhadap total aset sebesar 0,62%. Kondisi ini mencerminkan kemampuan aset dalam menutupi kewajiban jangka pendek sangat kecil, sehingga berpengaruh terhadap keuangan daerah. Perkembangan analisis rasio keuangan Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2015-2019, terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Perkembangan Rasio Keuangan Kabupaten Sijunjung
Tahun Anggaran 2015-2019 (%)

	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	472,09	9,41	20,71	0,72	13,24
	Rasio quick	469,55	8,74	20,31	0,56	11,99
	Kas Rasio	468,57	11,47	20,12	0,28	7,86
Rasio Solvabilitas	Rasio total hutang terhadap total aset	0,06	1,48	1,94	3,27	0,62
	Rasio Total hutang terhadap modal	0,06	1,64	3,95	3,97	1,02

Sumber : Badan Keuangan Aset Daerah, 2020

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah.

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur daerah sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam terminologi keuangan daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak-hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah.

Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber pendapatan asli daerah didapat dari penerimaan pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus penempatannya merupakan kewenangan Pemerintah (pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Namun diakui daerah memiliki keterbatasan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan kondisi potensi kapasitas fiskal yang terbatas, daerah dituntut menjadi lebih kreatif dalam mencari dan mengefektifkan sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah sehingga diharapkan kemandirian pembiayaan dapat bertumpu pada kekuatan daerah sendiri. Disadari Kabupaten Sijunjung memiliki keterbatasan atas sumber pendapatan daerah sehingga sangat diperlukan upaya optimalisasi dan mobilisasi untuk mengamankan penerimaan daerah sebagai pembiayaan pembangunan.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pengelolaan pendapatan pada tahun 2021 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah perlu dilakukan optimalisasi hasil (*yield*) yang berazaskan keadilan (*equity*), efisiensi ekonomi atau tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) bagi aparatur dan kemampuan membayar (*ability to pay*) bagi masyarakat.
2. Perhitungan administrasi penerimaan daerah perlu diupayakan dengan mengukur upaya pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak. Hasil guna pendapatan juga perlu dilakukan dengan mengukur hubungan antara hasil pungut dengan daya guna penerimaan (belanja).
3. Daya guna penerimaan meliputi pengelolaan administrasi dalam hal menentukan wajib pajak/retribusi, menetapkan nilai kena pajak/retribusi, pemungutan pajak/retribusi dan pembukuan penerimaan.

4. Perlunya pengawasan dalam efisiensi/efektifitas penerimaan daerah adalah penghindaran wajib pajak/retribusi, kolusi antara wajib pajak/retribusi dengan petugas/aparatur serta penipuan oleh petugas/aparatur.
5. Penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan kondisi daerah yaitu perkembangan PDRB per kapita, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi.
6. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dengan memperhitungkan penyesuaian tariff, pembangunan fasilitas baru, adanya sumber pendapatan baru dan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah.
7. Pelunya upaya-upaya dalam hal penggalan potensi, penyuluhan kepada masyarakat dan tertib administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Peningkatan kompetensi aparatur dan kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah diperlukan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik secara professional.

Upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi kepada kualitas pelayanan publik, maka strategi pencapaian pendapatan pada tahun 2021 diarahkan pada upaya sebagai berikut: 1). Intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; 2). Peningkatan kualitas aparatur yang professional; 3). Peningkatan partisipasi publik terutama dalam hal kemauan membayar kewajiban; 4). Optimalisasi sistem dan kelembagaan pendapatan dan; 5). Penegakan peraturan yang berhubungan pendapatan daerah.

B. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2021 dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) harus SMART (*Spesifict, Measurable, Acceptable, Reliable, Time*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut: 1). Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan; 2). Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang - undangan; 3). Dana alokasi umum ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan umum; 4). Dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5). Pemerintah daerah menyediakan dana pendamping atau *cost sharing* pada program dan kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak mengalokasikan anggaran belanja pegawai bagi pegawai yang telah dialihkan status kepegawaiannya dampak dari pemindahan kewenangan Kabupaten ke Propinsi dan Pusat
3. Diperkirakan adanya gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR)/gaji ke-14.
4. Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan "*accres*" gaji paling tinggi 2,5 persen yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
5. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN daerah diberikan tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Untuk pemberian tambahan penghasilan ASN Tahun 2020 direncanakan berdasarkan koordinasi dan hasil evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
6. Pemberian honorarium bagi ASN dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Bupati;

7. Hibah dan Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tersebut tidak secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Untuk dana hibah dan bantuan sosial tahun 2020 penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawabannya sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
8. Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun diupayakan semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrument pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
9. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah nagari digunakan untuk menganggarkan alokasi dana nagari, hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Direncanakan pada tahun 2017 Alokasi Dana Nagari yang berasal dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dengan persentase 10 persen. Untuk itu perlu perhatian secara khusus tentang pengelolaan keuangan nagari ini. Tentunya besaran ini akan berpengaruh terhadap penganggaran belanja lainnya terutama belanja langsung.
10. Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
11. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

C. Pembiayaan

Pembiayaan direncanakan berasal dari SILPA. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam APBD perubahan dan digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan, kewajiban pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMD. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah di tahun 2021 mengacu pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran pembangunan dan prioritas daerah Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, diantaranya terhadap Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, Politik, Hukum dan Ketahanan Keamanan.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut *Pilar Pertama* Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; *Pilar Kedua* Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; *Pilar Ketiga* Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan *Pilar Kempat* Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Adapun Visi RPJMN 2020-2024 adalah: “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; (5) Kemajuan Budaya yang

Mencerminkan Kepribadian Bangsa; (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), yang fokus kepada membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan strategi yakni : a). Pemenuhan Layanan dasar dan Perlindungan Sosial. B). Peningkatan Produktifitas SDM dan c). Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dengan fokus kepada melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, dengan strategi yakni : a). Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Dasar; b). Peningkatan Infrastruktur Ekonomi; c). Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; d). Peningkatan dan Keberlanjutan Akses Energi dan Ketenagalistrikan; e). Peningkatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital
3. Penyederhanaan Regulasi, dengan focus kepada menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM, dengan strategi yakni : a). Penerapan pendekatan *Omnibus Law* yakni Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya.; b). Pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun melalui Analisis Dampak Regulasi dan Analisis Biaya dan Manfaat.
4. Penyederhanaan Birokrasi, dengan focus kepada memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dengan strategi yakni : b). Penyederhanaan Prosedur; b). Penyelenggaraan e-Government; c). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, Dan Kepelabuhan
5. Transformasi Ekonomi, dengan focus kepada transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan strategi yakni : a). Industrialisasi; b). Pengembangan Destinasi Unggulan; c). Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan

mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a). Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; b). Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: a). Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah; b). Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang; c). Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; d). Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta e). Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: a). Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; b). Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; c). Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; d). Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; e). Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; f). Pengentasan kemiskinan; dan g). Peningkatan produktivitas dan daya saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsabangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui: a). Memperkokuh ketahanan budaya bangsa; b). Memajukan kebudayaan; c). Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama; d). Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta e). Meningkatkan budaya literasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui: a). Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; b). Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; e). Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; f). Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta g). Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan

- daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: a). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; b). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta c). Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: a). Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; b). Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; d). Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; c). Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; d). Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Melalui pelaksanaan arahan presiden dan juga pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut, maka sasaran makro pembangunan Nasional yang diproyeksi di tahun 2024, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,2-6,5%
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,0-7,0%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,6-4,3%
4. Rasio Gini sebesar 0,360-0,374
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,54
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,3%

Mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019 serta kebijakan pembangunan tahun 2020 dan dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 adalah “*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*”, dengan fokus pembangunan pada : a). Pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; b). Reformasi sistem kesehatan nasional; c). Reformasi sistem perlindungan sosial; dan d). Reformasi sistem ketahanan bencana. Sehingga sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator pembangunan yakni :

Tabel 4.1
Target Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2024 pada RPJMN 2020-2024	Target 2021 (Revisi akibat Dampak Covid-19)		
		Nasional	Pulau Sumatera	Sumatera Barat
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	4,5-5,5	3,9 – 5,1	4,9 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,6 - 4,3	7,5-8,2	7,2	7,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,2	9,2-9,7	9,6	6,4

Sumber Data : RKP Tahun 2021

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yaitu:“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

MISI	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan	Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antarumat beragama Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekot)
	Penguatan kelembagaan agama dan adat.	Meningkatnya Kesalehan sosial masyarakat dalam masalah sosial Menngkatnya lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat Meningkatnya Pemahaman dan Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat.
Misi 2: Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.	Meningkatkan kapasitas dan manajemen aparatur Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam

MISI	Tujuan	Sasaran
		pencapaian sasaran pembangunan
	Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya integritas peserta didik
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan
	Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
	Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna	Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak Meningkatnya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak
Misi 4: Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing	Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah
	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan,	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi

MISI	Tujuan	Sasaran
regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani Meningkatnya	pangan Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman
	Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
	Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal	Menurunnya jumlah penduduk miskin Menurunnya tingkat pengangguran terbuka Menuntaskan penanganan daerah tertinggal Menurunnya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Misi 5: Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya kualitas jalan Provinsi\ Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi Meningkatnya keselamatan lalu lintas Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan dan bangunan gedung; Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
	Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan

MISI	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana	Berkurangnya resiko bencana Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana
	Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	Terpeliharanya debit sungai Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, “Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” terkait dengan isu strategis Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Adat dan Agama.

Tujuan Misi Pertama diwujudkan dengan pencapaian sasaran yang diukur dengan implementasi pemahaman dan pengamalan keagamaan dan budaya yang baik akan melahirkan pengamalan agama dan budaya yang baik pula. Untuk sasaran penerapan nilai-nilai agama dan budaya, diperlukan keselarasan antara tujuan, sasaran dengan program-program budaya yang lebih memfokuskan pada penerapan nilai-nilai ABS-SBK ke dalam perilaku masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional” terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat, dan terkait pula dengan isu Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan dan peranan pemerintah daerah yang semakin besar dalam menggerakkan proses pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, “Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi” terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan isu strategis tentang jiwa dan semangat kewirausahaan yang cukup tinggi dan ulet masyarakat Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saingregional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah” terkait dengan isu strategis daya beli masyarakat, daya saing daerah untuk menghadapi globalisasi, akses dengan daerah tetangga, prasarana dan sarana daerah, daerah tertinggal dan ketimpangan pembangunan serta dukungan pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, “Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” terkait dengan isu strategis bencana alam dan kualitas lingkungan hidup. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD tersebut yang difokuskan dalam pencapaian Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat berdasarkan capaian Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2020, ketidakpastian penyelesaian akan wabah Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik,

serta dukungan terhadap pencapaian Tema dan Fokus Pembangunan RKP Tahun 2021, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat: *“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”*

Sejalan dengan revisi target indikator pembangunan Nasional dan Sumatera Barat tahun 2021 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemic covid-19 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maka juga dilakukan penyesuaian target indikator pembangunan Sumatera Barat jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 4.3
Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2021

Indikator Pembangunan	Target 2021 pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Target 2021 pada RKP 2021	Revisi Target pada RKPD 2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,2 - 6,5	4,9 – 5,6	4,22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,6 - 4,3	7,7	7,77
Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,2	6,4	6,15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,56	-	72,99
Indeks Gini (ratio)	0,327	-	0,304

Sumber Data : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-221, RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

C. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan fase ketiga dari tahapan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025. Pada fase kedua RPJMD Tahun 2011-2015 Kabupaten Sijunjung telah sampai pada tahap “Pemantapan Akselerasi Penataan Pembangunan Daerah dengan Kemajuan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Basis Perekonomian Daerah”. Akhir periode RPJMD Tahun 2016-2021, Kabupaten Sijunjung diharapkan sudah mencapai tahap “Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian Masyarakat di Segala Bidang”. Untuk mewujudkan pemantapan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di segala bidang pada akhir periode RPJMD 2016-2021, maka tujuann dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 sejalan dengan Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016-2021 yaitu: “*Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera*” yang dirumuskan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Kuat, Cerdas, dan Berakhlak Mulia
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bekerja dan Melayani
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan
6. Melakukan Revitalisasi Adat dan Budaya Berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah

Misi pembangunan tersebut dijabarkan kedalam 13 (tiga belas) tujuan dan 27 (dua puluh tujuh) sasaran pembangunan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat, berdaya saing tinggi dan sejahtera	1. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas berbasis ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 3. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
	2. Meningkatkan pembangunan, pengembangan, dan promosi pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisata
	3. Meningkatkan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya ketersediaan pangan 2. Tumbuhnya usaha pertanian dengan agribisnis yang terintegrasi 3. Meningkatnya kesejahteraan petani
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia	1. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, dan berkarakter	1. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 2. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat 3. Meningkatnya kapasitas pemuda dan epemimpinan pemuda dalam pembangunan 4. Meningkatnya prestasi olahraga daerah 5. Meningkatnya pendidikan karakter siswa
	2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 3. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi dan wilayah	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan 2. Meningkatnya kualitas irigasi
	2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	1. Meningkatnya kawasan permukiman sehat dan menurunnya rumah tidak layak huni 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan air bersih, sanitasi dan limbah

Misi	Tujuan	Sasaran
4. Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani	1. Meningkatkan aparatur pemerintahan yang profesional	1. Meningkatkan kapasitas, kinerja dan integritas aparatur
	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan pemanfaatan lahan 2. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
6. Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya	1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
	2. Meningkatkan keselarasan sosial dan penguatan kelembagaan adat dan budaya	1. Menguatnya implementasi adat dan budaya dalam tata kehidupan masyarakat
	3. Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal	1. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal

Sejalan dengan misi, tujuan, sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung dan mempedomani revisi target indikator pembangunan Nasional dan provinsi Sumatera Barat tahun 2021, serta mempertimbangkan dampak pandemic covid-19 dalam , maka tema RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 *"Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, didukung Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"*, Sehingga sasaran pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro pembangunan khususnya pemulihan perekonomian Kabupaten Sijunjung yang terdampak pandemi Covid-19, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator pembangunan yakni :

Tabel 4.5
Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung

No	Indikator	Satuan	Target RPJMD Kab. Sijunjung Tahun 2016-2021	Target 2021 pada RKPD 2021	Revisi Target pada RKPD 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi	persen	6,10	4,5-5,5	3,63
2.	Tingkat Kemiskinan	persen	6,40	7,04-7,54	7,07
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	4,0	3,5-4,2	4,82
4.	Rasio Gini	poin	-	0,377-0,379	0,325
5.	IPM	poin	67	68,52-68,81	68,39

Sumber: RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-221, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dan Olahan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Sijunjung

4.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

A. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah “*Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial*”, Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2021, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), *health security*, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, baik bencana alam maupun bencana non alam. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, maka Prioritas Nasional dalam RKP 2021 merupakan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dengan penekanan terhadap Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui: menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2021 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan *health security*; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan

kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2021, diarahkan untuk: penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2021 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (*law and order*). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas, sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

B. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pencapaian RPJMD tahun 2016-2021 sehingga hasil evaluasi pelaksanaan 2016-2019 digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan.

Sehingga arah kebijakan pembangunan tahun 2021 tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2016-2021, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 juga adaptif dan responsive terhadap dampak pandemic Covid-19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dan pelaksanaan Fokus dan Sub Fokus RKP dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 merupakan tindak lanjut atau dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Penyusunan prioritas dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dengan demikian Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.6
Prioritas Pembangunan Sumatera Barat

No.	Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1.	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat
2.	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3.	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5.	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis
6.	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi
7.	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan
8.	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal
9.	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur
10.	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

C. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Penyusunan prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 dengan memperhatikan beberapa kriteria yaitu:

- 1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 sampai tahun berjalan;
- 2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan Kabupaten Sijunjung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021.
- 3. Korelasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan. Pelaksanaan program pembangunan tahun-tahun sebelumnya yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021. terutama bidang infrastruktur diharapkan sudah menampakkan hasil. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahun 2021 difokuskan pada pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan pariwisata, investasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia dengan tetap meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2021 dan dengan menyelaraskan tema RKP dan tema RKPD provinsi Sumatera Barat maka tema pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 adalah *"Pemulihan Ekonomi dengan Pembangunan Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Potensi Daerah Yang Berwawasan Lingkungan, didukung Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"*. Dengan demikian Prioritas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hubungan antara Prioritas Pembangunan RJMD dan RKPD

Prioritas Pembangunan RPJMD	Prioritas Pembangunan RKPD
1. Ekonomi yang berdaya saing tinggi	1. Ekonomi yang berdaya saing tinggi
2. Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya	2. Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya
3. Membangun ketahanan pangan	3. Membangun ketahanan pangan
4. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga	4. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar	6. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
7. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah	7. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah
8. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	8. Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
9. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya	9. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya

Penyelarasan Antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Kabupaten Sijunjung disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung

	Prioritas Pembangunan RKP	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung
1.	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	Membangun ketahanan pangan (Prioritas 3)
2.	Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Ekonomi yang berdaya saing tinggi (Prioritas 1)
1.	SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga (Prioritas 4)
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat (Prioritas 6)
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya (Prioritas 9)
5.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar (Prioritas 6)
		Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	Pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung infrastruktur, transportasi, industri, perdagangan dan perhotelan serta informasi, komunikasi dan sektor terkait lainnya (Prioritas 2)
6.	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan (Prioritas 8)
7.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah (Prioritas 7)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

Pada bab ini disajikan rekapitulasi program dan kegiatan daerah berikut dengan jumlah pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Secara eksplisit juga memuat matrik tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Penyusunan nomenklatur program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 mempedomani Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Tidak Pelayanan Dasar serta Urusan Pilihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ Tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 telah dipetakan (*mapping*) ke kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program dan kegiatan yang telah dipetakan (*mapping*) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Dokumen RKPD ini.

Program dan kegiatan dalam RKPD tahun 2021 diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah pelaksana. Tahun Anggaran 2021 pagu indikatif seperti terlihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2021

NO	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	99.490.596.590
2	DINAS KESEHATAN	67.521.525.151
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	69.059.522.849
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	219.000.000.000
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	38.765.627.000

NO	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.349.482.968
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2.396.289.000
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.641.290.625
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.554.000.000
10	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	14.828.784.067
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.465.468.560
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	5.918.197.372
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.208.692.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	21.479.025.000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.837.917.305
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	14.023.392.600
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.456.197.942
18	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	20.042.674.400
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	18.334.245.405
20	DINAS PERTANIAN	52.914.176.848
21	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	4.847.146.960
22	SEKRETARIAT DAERAH	28.133.647.271
23	SEKRETARIAT DPRD	30.524.000.000
24	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.382.340.000
25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	9.296.229.712
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.141.000.000
27	INSPEKTORAT	4.146.623.518
28	KECAMATAN KAMANG BARU	1.177.593.900
29	KECAMATAN TANJUNG GADANG	1.159.007.300
30	KECAMATAN LUBUK TAROK	991.699.312
31	KECAMATAN SIJUNJUNG	1.208.010.167
32	KECAMATAN IV NAGARI	930.305.860
33	KECAMATAN KOTO VII	1.069.829.458
34	KECAMATAN KUPITAN	931.544.031
35	KECAMATAN SUMPUR KUDUS	1.198.113.500
JUMLAH		786.424.196.671

Tabel 5.2

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
TOTAL PAGU					99.490.596.590				109.123.145.395
1.01	Pendidikan				93.091.596.590				93.988.145.395
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD Persentase PAUD Terakreditasi Persentase Jorong yang memiliki PAUD	Kab. Sijunjung		13.928.000.000				15.100.103.413
1.01.15.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	Kab. Sijunjung	80 persen	5.000.000.000	APBD II		79,60	8.950.000.000
1.01.15.21	Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Kab. Sijunjung	30 Lembaga	8.528.000.000	APBD II/DAK		30	5.590.103.413
	PAVING BLOK PAUD PERMATA BUNDA BUKIK GOMBAK		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TOILET DAN MUSHOLA TKN 1 KAMANG BARU		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 4 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KOTO PUNTIAN		200.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR TKN 2 KAMANG BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN APE PAUD LUAR RUANGAN TKN 3 KOTO VII		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		50.000.000	APBD II/DAK			
	PAVING BLOK PAUD PERMATA SUNGAI GEMIRI		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 1 KAMANG BARU		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SIKAYAN		200.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK TK N 2 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO BARU		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		200.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK TK 2 TARATAK BARU TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 2 TANJUNG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, BONAI		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR TK KARTINI NAGARI TANJUNG BONAI AUR SELATAN		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KOTO PUNTIAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PAUD TKN 6 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KAMPUNG RAJO		15.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN APE PAUD LUAR RUANGAN TKN 6 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN GUDANG PAUD PERMATA BUNDA BUKIK GOMBAK		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA TKN 1 KOTO TUO IV NAGARI		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		75.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR TK AL IZHA MUARO TAKUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 2 TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN APE PAUD LUAR RUANGAN TKN 4 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD QURATUL AYYUN		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB PAUD IMPIAN		KOTO VII, PALALUAR, RANAH		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM TKN 1 KOTO VII		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JAMBAN BESERTA SANITASINYA SKB		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN NF		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		350.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE (SALURAN AIR) TKN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSA		35.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN DAM DAN PAGAR TKN 1 KAMPUNG BARU		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		200.000.000	APBD II			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SKB		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PERLENGKAPAN MAINAN TK BUNGA TANJUNG KOTO VII		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TK HUSNUL KHOTIMAH SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, PASAR		150.000.000	APBD II			
	DRAINASE TK PEMBINA MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR TKN 1 KAMANG BARU		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SIKAYAN		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GAPURA DAN TEMPAT BERMAIN PAUD NEGERI PERCONTOHAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 1 KOTO VII		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		400.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG TK TUNAS HARAPAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM PENAHAN TANAH TKN 1 KUPITAN		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO TONGAH		220.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 3 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		250.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA TKN 1 PEMBINA KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA TK 2 SP. KUDUS		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, BONAI		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM DAN PAGAR TK LUBUAK SIPUNAI		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 3 KOTO VII		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PAUD TKN 3 KOTO VII		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		15.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN PAGAR TK BUNDA		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH TKN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		70.000.000	APBD II			
	PENGADAAN APE PAUD LUAR RUANGAN TKN 5 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KOTO PUNTIAN		50.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN GEDUNG TK SAWAH LIEK		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BATANG DIKEK		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN PAGAR TK PERTIWI		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB TKN 2 KAMANG BARU		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		80.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SKB MUARO SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		300.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PAUD TKN 4 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		15.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB TKN PEMBINA KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR TKN 3 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		178.000.000	APBD II			
	PEMABNGUNAN PAGAR DAN GERBANG PAUD KELOMPOK BERMAIN TUNAS BAKTI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PAUD TKN 5 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, BATANG SOMI		15.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG PENUNJANG LAINNYA BESERTA PERABOTNYA SKB		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		300.000.000	APBD II/DAK			
	DAM TK BUNGA TANJUNG LUBUK TAROK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		100.000.000	APBD II			
	REHAB ASRAMA SKB		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		1.000.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.01.15.22	Penunjang Operasional TK Negeri	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh dana operasional pada TK Negeri	Kab. Sijunjung	20 Lembaga	400.000.000	APBD II		20	560.000.000
1.01.17	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf Jumlah PKBM	Kab. Sijunjung		842.700.000				1.425.986.995
1.01.17.01	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan keaksaraan	Kab. Sijunjung	300 Orang	125.800.000	APBD II		300	90.000.000
1.01.17.03	Peringatan HAI, Pameran dan Bazar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Sijunjung	2 Kegiatan	66.000.000	APBD II		2	125.000.000
1.01.17.08	Pendidikan Kesetaraan	Warga masyarakat DO dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SD sederajat SMP sederajat dan SMA sederajat	Kab. Sijunjung	70 Orang	148.900.000	APBD II		70	400.000.000
1.01.17.02	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan program kecakapan hidup	Kab. Sijunjung	40 Orang	0	APBD II		40	90.000.000
1.01.17.09	Penunjang Operasional SKB	Jumlah bulan penunjang operasional SKB	Kab. Sijunjung	12 Bulan	150.000.000	APBD II		12	250.000.000
1.01.17.13	Program Retrival dan Transisi	Jumlah orang anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang dibantu penyelenggaraan pendidikan	Kab. Sijunjung	400 Orang	352.000.000	APBD II		50	470.986.995
1.01.18	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru yang bersertifikat pendidik - Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80 - Persentase guru berkualifikasi S1	Kab. Sijunjung		2,093,500,000				4.491.400.000
1.01.18.04	Pemberdayaan MGMP, MKKS dan MKPS	Jumlah kelompok kerja yang melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB)	Kab. Sijunjung	23 Kelompok	250.000.000	APBD II		23	500.000.000
1.01.18.03	Pemberdayaan KKG, KKKS dan KKPS	Jumlah kelompok kerja yang melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan	Kab. Sijunjung	55 Kelompok	350.000.000	APBD II		55	850.000.000
1.01.18.01	Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima sertifikat pendidik	Kab. Sijunjung	1381 Orang	100.000.000	APBD II		1200	131.400.000
1.01.18.13	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelola Pustaka dan Labor	Jumlah pengelola pustaka dan labor yang mengikuti pelatihan	Kab. Sijunjung	0 Orang	0	APBD II		0	350.000.000
1.01.18.05	Pengembangan ICT Sekolah	Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan ICT Sekolah	Kab. Sijunjung	0 Kegiatan	0	APBD II		0	0
1.01.18.06	Perhitungan Angka Kredit Poin Tenaga Fungsional	Jumlah pendidik, tenaga kependidikan, pamong, penilik dan pustakawan yang dihitung angka kredit dalam 1 tahun untuk kenaikan pangkat	Kab. Sijunjung	1500 Orang	100.000.000	APBD II		0	180.000.000
1.01.18.07	Penyusunan Database Pendidikan	Jumlah buku profil yang disusun	Kab. Sijunjung	0 Buku	0	APBD II		0	0
1.01.18.10	Rekrutmen dan Diklat Peningkatan kompetensi Kepsek dan pengawas	Jumlah kepsek dan pengawas yang direkrut dan mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Kab. Sijunjung	60 Orang	250.000.000	APBD II		60	250.000.000
1.01.18.14	Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelola Ketatausahaan Sekolah	Jumlah pengelola tata usaha yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi	Kab. Sijunjung	0 Orang	0	APBD II		0	0
1.01.18.15	Implementasi dan Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah sekolah yang memiliki dokumen KTSP dengan nilai minimal baik	Kab. Sijunjung	208 Sekolah	150.000.000	APBD II		203	400.000.000
1.01.18.16	Implementasi dan Pengembangan Kurikulum SMP	Jumlah sekolah yang memiliki dokumen KTSP dengan nilai minimal baik tingkat SMP	Kab. Sijunjung	54 Sekolah	100.000.000	APBD II		50	250.000.000
1.01.18.17	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD	Jumlah guru yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi	Kab. Sijunjung	300 Orang	300.000.000	APBD II		300	600.000.000
1.01.18.18	Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SMP	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi	Kab. Sijunjung	150 Orang	150.000.000	APBD II		80	450.000.000
1.01.18.19	Penguatan Sistem Pengendalian Mutu Internal Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang melaksanakan pengendalian mutu pendidikan	Kab. Sijunjung	0 Sekolah	0	APBD II		0	0
1.01.18.24	Workshop Guru Matematika	Jumlah guru yang meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran matematika	Kab. Sijunjung	200 Orang	143.500.000	APBD II		200	270.000.000
1.01.18.27	Bimtek Pengembangan Muatan Lokal	Jumlah guru yang dilatih dalam pengembangan muatan lokal	Kab. Sijunjung	80 Orang	100.000.000	APBD II		80	140.000.000
1.01.18.28	Penunjang Operasional Manajemen BOS Kabupaten	Jumlah SD dan SMP yang mendapatkan pembinaan manajemen BOS	Kab. Sijunjung	260 Sekolah	100.000.000	APBD II		260	120.000.000
1.01.24	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- APK SMP/MTs/Paket B - APM SMP/MTs/Paket B - Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah - Persentase ruang kelas baik SMP - Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs - Persentase SMP mencapai SPM - Persentase SMP yang minimal akreditasi B - Jumlah sekolah rujukan SMP - Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP - Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Kab. Sijunjung		39.578.000.000				28.900.000.000
1.01.24.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah tingkat SMP	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembangunan Sarana dan Prasarana	Kab. Sijunjung	50 Sekolah	6.908.000.000	APBD II		50	12.965.654.987
	PEMASANGAN KERAMIK RUANG KEPALA SEKOLAH DAN RUANG GURU SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	REHAP RUMAH GURU SLTP N 19		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG OSIS SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	MOBILER GURU SMPN 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II			
	ALAT DRUMBEN SMPN 19		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	PEMBUATAN LAPANGAN UPACARA DI SMPN 3 SIJUNJUNG.		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 15 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II			
	MOBILER GURU SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	PEMBANGUNANPAGAR SMP 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	MOBILER GURU SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	REHAB RUMAH DINAS KEPSEK SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		150.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	REHAB MUSHOLLA SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNN PAGAR SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		0	APBD II			
	PENGADAAN PERALATAN UKS SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	PEMBANGUN PAGAR SMPN 9 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMP N 43 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG GURU SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAVING BLOK DAN COR BETON SMPN 21 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	REHAB RUANG MULTIMEDIA SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	PENAMBAHAN SUMBER AIR BERSIH SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		100.000.000	APBD II			
	RIGID BETON LAPANAGN UPACARA DAN LAPANGAN BASKET SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMB GEDUNG SERBA GUNA SMP 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		1.500.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		0	APBD II			
	MOBILER PERPUSTAKAAN SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG BK SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		100.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR DAN PAVING BLOK SMP 15 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SEKOLAH TINGKAT SMP		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAL		350.000.000	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 19 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		54.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SMP N 22 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		0	APBD II			
	LANJUTAN PAVINGBLOK SMP 23		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 11 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN BAK PENAMPUNGAN AIR DAN INSTALASI SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	DAM SMPN 41 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANGAN TATA USAHA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	DAM SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	DAM SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 22 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		0	APBD II			
	PAGAR SMPN 31 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		100.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHAB PAGAR SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN LABOR BAHASA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		0	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMPN 11 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN SUMUR BOR, INSTALASI AIR, DAN PENGADAAN WATER TANK SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		0	APBD II			
	MOBILER LABOR KOMPUTER SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	REHAB PAGAR SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		250.000.000	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	REHAB RUANG MULTIMEDIA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	PAVING BLOK SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER RUANG KOMPUTER SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT UKAS SMPN 9 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		0	APBD II			
	WC GURU SMPN 19		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOCK SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 12 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		0	APBD II			
	MOBILER SMPN 6 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		54.000.000	APBD II			
	MOBILER GURU SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBUATAN PAGAR SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		100.000.000	APBD II			
	REHAB GEDUNG SERBAGUNA SMPN 2 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	REHAP RUMAH KEPALA SEKOLAH SMPN 19		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GUDANG SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	PENGADAAN AAT DRUMBAND SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		0	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK LAPANGAN UPACARA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	PAGAR SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		150.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN KERAMIK LABOR KOMPUTER SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	DAM PENAHAN TANAH SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TARATAK BARU		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHAB MUSHOLLA SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		0	APBD II			
	PEMABANGUNAN DRAINASE SMPN 19 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		250.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II			
	REHAB MUSHOLLA SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		0	APBD II			
	REHAB LAPANGAN BASKET SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUMBAND SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		0	APBD II			
	REHAB LAPANGAN UPACARA SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN TAMAN SEKOLAH DAN GAZEBO SMPN 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH AGA SMPN 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	MOBILER SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		0	APBD II			
	RIGIT BETON LOKASI UPACARA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MARCHING BAND SMP 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		50.000.000	APBD II			
	REHAB PAGAR SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II			
	BANTUAN PAVING BLOK DAN PERBAIKAN LAPANGAN BASKET SMP 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		200.000.000	APBD II			
	MOBILER LABOR IPA SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	REHAB RUANG PENUNJANG LAINNYA (RUANG GURU, PUSTAKA) SMPN 12 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		0	APBD II			
	DAM SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		200.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK LAPANGAN SEKOLAH SMPIT AR RAHMAN PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		100.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SMP 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHAB MUSHOLLA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR BETON SMP N 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		150.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK DAN COR BETON SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		0	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMP IUT		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAH RAGA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		0	APBD II			
	REHAB KANTIN SEKOLAH SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 9 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER LABOR IPA SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUMBAND SMP IUT		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		50.000.000	APBD II			
	MOBILER SISWA SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
1.01.24.01	Lomba-lomba kependidikan tingkat sekolah SMP	Jumlah Jenis lomba kependidikan tingkat SMP	Kab. Sijunjung	8 Cabang	360.000.000	APBD II		4	1.400.000.000
1.01.24.02	Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi Tingkat SMP	Jumlah siswa SMP sederajat yang mendapatkan beasiswa berprestasi	Kab. Sijunjung	134 Orang	150.000.000	APBD II		63	550.000.000
1.01.24.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pendidikan Tingkat SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Kab. Sijunjung	30 Sekolah	30.960.000.000	APBD II/DAK		30	9.475.345.013
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA BIOLOGI SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		25.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		300.000.000	D A K			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN WC SMP 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 2 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 39 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN KANTOR SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, TARATAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA FISIKA SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MALORO, TANJUNG BALIK		25.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN RKB SMPN 34		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BATANG DIKEK		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		300.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 11 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		30.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, RIMBO AMBACANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA BIOLOGI SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		25.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA FISIKA SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		25.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 12 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 41 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, BANCAH SIBAKUR		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 43 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN KANTOR SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, BATANG KATI		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 19 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA FISIKA SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, GALOGAH		25.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		100.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 36 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR BESERTA PERABOTNYA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		100.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG LABOR IPA BESERTA PERABOTNYA SMPN 12 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 31 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 31 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		200.000.000	D A K			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 18 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 31 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT SMP		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		350.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 15 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BUKIT SABALAH		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 9 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, PARIK MALINTANG		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, PARIK MALINTANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 21 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, TARATAK		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 11 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	MCK SEKOLAH SMP 4		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		400.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, PASAR		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 11 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 19 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA FISIKA SMPN 43 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		25.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 24 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG LABOR IPA BESERTA PERABOTNYA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, BATANG KATI		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 18 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 45 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		450.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, PASAR		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 21 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		450.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		100.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 16 SIJUNJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 15 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 15 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 22 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 22 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, BUKIK TUJUH		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 30 SIJUNJUNG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 20 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, PULASAN, AMBACANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN MINIMAL SEDANG BESERTA PERABOTNYA SMPN 2 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		100.000.000	D A K			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 13 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG PERPUSTAKAAN DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG/BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 3 SIJUNJUNG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 31 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 5 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG LABOR IPA BESERTA PERABOTNYA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 7 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		30.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		100.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA BIOLOGI SMPN 43 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		25.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB RUANG KELAS SMPN 19 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		150.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG GURU DAN KANTOR SMPN 4 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT LABOR IPA BIOLOGI SMPN 28 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		25.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	RUANG KELAS SMP 4		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		600.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 21 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 32 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		300.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB JAMBA SISWA SMPN 41 SIBAKUA BERIKUT INSTALASI AIR BERSIHNYA		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 47 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		50.000.000	D A K			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 41 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		30.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 6 SIJUNJUNG		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		50.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 6 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 46 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 8 SIJUNJUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SMPN 36 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 34 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		450.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		100.000.000	D A K			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 22 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 42 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		450.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 40 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 10 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 48 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 14 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 25 SIJUNJUNG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 9 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 2 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		250.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		250.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 29 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 17 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SMPN 27 SIJUNJUNG		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KANTOR DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SMPN 26 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SMPN 44 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SMPN 38 SIJUNJUNG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SMPN 35 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 39 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		450.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LABOR KOMPUTER BESERTA PERABOTNYA SMPN 36 SIJUNJUNG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAAHRAHA DAN KESEHATAN (PJOK) SMPN 37 SIJUNJUNG		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN WC GURU SMPN 38 SJJ		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		150.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SMPN 33 SIJUNJUNG		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		100.000.000	APBD II/DAK			
1.01.24.05	Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	Kab. Sijunjung	70 Poin	200.000.000	APBD II		67	1.509.000.000
1.01.24.07	Kemah Siswa Nasional	Jumlah regu yang mengikuti kegiatan Kemah Siswa Nasional	Kab. Sijunjung	2 Kelompok	0	APBD II		2	0
1.01.24.08	Pelaksanaan Program Kelas Olah Raga	0	Kab. Sijunjung	0 Siswa	0	APBD II		0	0
1.01.24.09	Pelaksanaan Pembinaan Olahraga Tertentu	Jumlah siswa yang mengikuti pelaksanaan program pembinaan olahraga tertentu	Kab. Sijunjung	10 Siswa	0	APBD II		10	0
1.01.24.10	Penunjang Operasional SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan dana Operasional	Kab. Sijunjung	48 Sekolah	1.000.000.000	APBD II		48	3.000.000.000
1.01.25	Program Pendidikan Inklusif	Jumlah sekolah inklusif	Kab. Sijunjung		350.000.000				450.000.000
1.01.25.01	Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Jumlah sekolah reguler yang mengikuti pendidikan inklusif	Kab. Sijunjung	273 Sekolah	350.000.000	APBD II		273	450.000.000
1.01.26	Program Pengembangan dan Penguatan Pendidikan Karakter	- Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter - Persentase siswa yang mendapatkan nilai perilaku minimal baik - Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan sekolah sehat	Kab. Sijunjung		680.000.000				1.570.000.000
1.01.26.01	Pembinaan Kepramukaan dan Kepalangmerahan Berbasis Sekolah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan gugus depan kepramukaan berbasis sekolah	Kab. Sijunjung	150 Orang	200.000.000	APBD II		150	270.000.000
1.01.26.02	Pembinaan Sekolah Sehat SD	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan UKS untuk sekolah sehat	Kab. Sijunjung	100 Sekolah	180.000.000	APBD II		207	300.000.000
1.01.26.03	Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti SD	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter	Kab. Sijunjung	203 Sekolah	100.000.000	APBD II		203	500.000.000
1.01.26.04	Pembinaan Sekolah Sehat SMP	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan UKS untuk sekolah sehat	Kab. Sijunjung	10 Sekolah	100.000.000	APBD II		8	250.000.000
1.01.26.05	Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti SMP	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter	Kab. Sijunjung	30 Sekolah	100.000.000	APBD II		30	250.000.000
1.01.28	Program Pendidikan Sekolah Dasar	- APK SD/MI/Paket A - Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah - Angka melanjutkan ke SMP - Persentase ruang kelas baik SD - Rata-rata nilai Ujian Sekolah Dasar - Persentase SD yang mencapai SPM - Persentase SD yang minimal akreditasi B - Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD - Persentase SD yang memenuhi SNP - APM SD/MI/Paket A	Kab. Sijunjung		35.594.396.590				42.050.654.987
1.01.28.01	Lomba-lomba Kependidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah Medali yang diperoleh pada lomba-lomba kependidikan tingkat Sekolah Dasar	Kab. Sijunjung	9 Jenis	453.396.590	APBD II		4	1.800.000.000
1.01.28.02	Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi Tingkat SD	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan beasiswa berprestasi	Kab. Sijunjung	350 Orang	400.000.000	APBD II		350	1.393.000.000
1.01.28.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pendidikan SD	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah	Kab. Sijunjung	35 Sekolah	14.850.000.000	APBD II/DAK		35	10.389.000.000
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 9 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 14 ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 13 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 16 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 19 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 14 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SDN 35 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKAMUR		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 17 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		200.000.000	D A K			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 14 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KAMBUK KOMAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 13 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 2 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 21 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 6 LALAN		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 32 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 3 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK)		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 10 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 30 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		30.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 10 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KAMPUNG RAJO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 22 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 33 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 12 MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 16 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 19 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, UJUNG PADANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 6 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 5 SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 23 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOMAN KOCIK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 18 GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 23 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SDN 37 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 29 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 9 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 15 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, TARATAK ARO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 4 MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINAG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 8 KAMPUNG BARU		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO TONGAH		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 6 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG ALAM		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PROGRAM PENDIDIKAN SD		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		350.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 7 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 15 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 1 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 22 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, PASAR		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 23 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, SAWAH GADANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 19 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, SIBISIR		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 11 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 5 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KOTO BENEK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 24 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 3 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 2 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 17 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 23 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, SAWAH GADANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 23 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, BATANG KATI		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, TAMBANG AMEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 1 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 3 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 10 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PADANG RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 9 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 13 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 19 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSAH		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB LOKAL SDN 07 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 16 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 19 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKA SEKOLAH BESERTA PERABOTNYA SDN 31 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 12 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 18 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 23 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 7 KABUN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 28 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SAWAH TAROK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 16 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 12 RUMBAI		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SDN 19 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SDN 23 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMAU SUNDAI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 20 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SDN 20 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 20 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SDN 23 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		50.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 04		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 8 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 7 MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 10 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 25 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 37 KUNANGAN PARIK RANTANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 14 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 11 KOTO TUO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 27 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 21 TANJUNG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, BONAI		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SDN 16 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 19 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SDN 4 MUARO TAKUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 13 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 35 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 19 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 7 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD11 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) SISWA BESERTA SANITASINYA SDN 25 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 13 BATU MANJULUA		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 5 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 36 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 26 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PADANG RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 19 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 24 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 17 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 4 MUARO TAKUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 36 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, LUBUK KAPIEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 2 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		200.000.000	D A K			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 12 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 01 BULUH KASOK		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 10 JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 10 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK UJUNG LUHAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 10 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 19 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 37 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 26 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 27 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 27 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, BATANG SOMI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 11 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 18 GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 08 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 31 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 16 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PADANG RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 21 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 28 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 20 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 36 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 8 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SAWAH TAROK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 23 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMA SUNDAL		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 2 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 6 BUKIT BUAL		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 29 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SITONGEK SELATAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 1 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK UJUNG LUHAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 25 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 6 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 7 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 23 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 35 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 15 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 25 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 7 KABUN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 4 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 6 BUKIT BUAL		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO MUDIK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 6 BUKIT BUAL		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAH) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA SANITASINYA SD 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN NANTO		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 3 MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 17 AIR AMO		KAMANG BARU, MALORO, PASAR		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 17 AIR AMO		KAMANG BARU, MALORO, PASAR		120.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAH) BESERTA SANITASINYA SDN 2 KAMPUNG BARU		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 4 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 2 JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 26 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 12 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 23 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	REHAB LOKAL SDN 19 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYASDN6 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		250.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 13 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, BATANG KATI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 37 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 5 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 10 JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 23 TANJUANG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KOTO PUNTIAN		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 3 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 13 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAH RAGA DAN KESEHATAN (PJOK) SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 9 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, MANGKUDU KODOK		400.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 19 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN TOLLET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 22 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSAH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 2 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 18 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 27 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 23 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 1 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 9 MANGANTI		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TAPI BALAI		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 8 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 12 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		600.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PADANG RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 37 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, TANGGALO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOLILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 16 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 5 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 5 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 22 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 28 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 24 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SDN 10 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK UJUNG LUHAK		50.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 9 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) SISWA DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA SANITASINYA SDN 24 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 1 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 11 TANJUNG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, PAUH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 29 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 12 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		0	APBD II/DAK			
	REHAB RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 8 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		300.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 9 KOTO TUO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 29 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 12 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 10 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, BATANG SOMI		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 20 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOLILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 35 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 24 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK UJUNG LUHAK		100.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 5 SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, SIKALADI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 17 PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, SUMPADANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 5 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 4 MUARO TAKUANG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 32 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 28 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 31 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG GURU DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 08 PARU		SIJUNJUNG, PARU, BUKIK BUAR		100.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 28 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, TANGGALO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 8 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 38 SOLOK AMBAH		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, RIMBO AMBACANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 26 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 10 KUNANGAN PARIK RANTANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 14 ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 32 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 12 RUMBAI		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 16 TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SD N 08 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 12 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 27 PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBA) GURU BESERTA SANITASINYA SDN 06 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 5 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 9 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 8 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		100.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 1 BULUH KASOK		LUBUAK TAROK, BULUAK KASOK, KOTO BULUH KASOK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 17 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBA) BESERTA SANITASINYA SDN 29 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		200.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 17 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, SAWAH GADANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 21 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 25 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN SARANA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN (PJOK)		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 1 TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PENGADAAN BUKU KOLEKSI PERPUSTAKAAN (BUKU REFERENSI, BUKU PENGAYAAN, BUKU PANDUAN PENDIDIK) SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 9 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 27 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 1 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK SIPUAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 9 KUNANGAN PARIK RANTANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 5 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 20 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 4 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 36 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 10 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN NANTO		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 2 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 2 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 22 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 11 TANJUNG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO TINGGI		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 22 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 11 PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT, BESERTA PERABOTNYA SDN 04 BATU MANJULUA		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 33 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		200.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI TOILET (JAMBAN) DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG DAN BERAT BESERTA SANITASINYA SDN 26 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 11 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 1 TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 13 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, TAMBANG AMEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 6 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		200.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 18 TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 20 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 38 SOLOK AMBAH		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 20 AIE AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 18 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMAU SUNDAI		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 11 KOTO TUO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 18 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PONDOK JAGO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 2 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 12 SOLOK AMBAH		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 33 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 5 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SDN 11 SILOKEK		SIJUNJUNG, SILOKEK, SANKIAMO		200.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 16 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		200.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN ALAT KESENIAN TRADISIONAL SDN 8 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		50.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 4 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 10 PAMUATAN		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG UKS SDN 14 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RKB BESERTA PERABOTNYA SD 27 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 30 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PADANG RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 28 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 14 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 12 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PERABOTNYA SDN 12 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN BESERTA PERABOTNYA SDN 5 SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 28 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) BESERTA SANITASINYA SDN 2 KAMPUNG BARU		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO PANJANG		200.000.000	D A K			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 37 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 8 PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II/DAK			
	REHABILITASI RUANG KELAS DENGAN TINGKAT KERUSAKAN SEDANG ATAU BERAT BESERTA PEABOTNYA SDN 16 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
1.01.28.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Tingkat SD	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana	Kab. Sijunjung	50 Sekolah	16.591.000.000	APBD II		50	20.565.654.987
	PENGADAAN DRUM BAND SD 03 DAN SD 10 PAMUATAN		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		160.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 2 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	MOBILER SDN 4 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	MOBILER SDN 2 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		0	APBD II			
	MOBILER SDN 23 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	MOBILER SDN 24 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 03 AIR AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO TUO		150.000.000	APBD II			
	PAVING BLOCK SDN 16 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		100.000.000	APBD II			
	PAVING BLOCK SDN 8 SILONGO		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		100.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SDN 15 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		150.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR SDN 21 AIR AMO		KAMANG BARU, PADANG TAROK, PINTU BATU		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR DAN GERBANG SDN 29 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 6 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR DAN PINTU GERBANG SD 04 PEMATANG PANJANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN DRUM BAND SDN 33 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG ABADI		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH SDN 34 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		150.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR SD N 12 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 8 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		0	APBD II			
	DAM SDN 06 PADANG SIBUSUK.		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 1 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, CILACAP		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 20 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR DAN GAPURA SDN 29 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH GURU SDN 07 AIE AMO		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GAPURA DAN PAGAR SDN 11 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 2 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II			
	SAMBUNGAN PAGAR SDN 17 MALORO		KAMANG BARU, MALORO, PASAR		150.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBUATAN PAGAR SDN 12 RUMBAI		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 2 KAMPUNG BARU		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO PANJANG		0	APBD II			
	MOBILER SDN 4 MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SD 18 AIA AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	PENGCORAN LAPANGAN SEKOLAH SD 13		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 05 GUGUAK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 02 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN NANTO		100.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR SD 25 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		150.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK SDIT SALAM CENDIKIA		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		200.000.000	APBD II			
	REHAP RUMAH GURU SDN 04		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II			
	REHABILITASI PAGAR SD N 13 TANJUNG BONAI AUR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO BARU		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 25 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SD NEGERI 12 RUMBAI		LUBUAK TAROK, LALAN, RUMBAI		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 14		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		125.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 9 MANGGANTI		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II			
	MOBILER SDN 26 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SD 07 AIA AMO		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 22 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	REHAP RUMAH KEPALA SEKOLAH SDN 04		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS SDN 12,		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		200.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 10 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM DAN PAGAR SDN 4 SIBAKUR		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, BANCAH SIBAKUR		100.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR DAN GAPURA SDN 5 PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		150.000.000	APBD II			
	DAM DAN PAGAR SD 34 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		300.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 17 PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, BUNGO		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH GURU SD 19 AIA AMO		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIAK IMUAK		75.000.000	APBD II			
	PAGAR SDN I SUNGAI LANSEK JORONG CILACAP		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, CILACAP		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SDN 10 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLAH SDN 17 KAMPUNG DALAM		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		100.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK SD 37 KUNPAR.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSALLAH SDN 35 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		80.000.000	APBD II			
	PEMABNGUNAN KANTIN SEKOLAH SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN GAPURA SDN 20 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 20 AIR AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 19 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	MOBILER SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		0	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR SDN 18 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		150.000.000	APBD II			
	DAM SDN 1 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		200.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR & SUMUR BOR SD N 11 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		120.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SD 12 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		100.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR SDN 18 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	DAM HALAMAN PUSTAKA SDN 33 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR BETON DAN PAVING BLOK SD 17 PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, BATANG KATI		200.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 5 GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		96.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 1 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSALLAH SDN 14 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		80.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SDN 33 KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR & PAVING BLOK SDN 37 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		200.000.000	APBD II			
	PAGAR SDN 6 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		100.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK SDN 32 MALORO		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	DAM SDN 27 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 9 PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II			
	REHAB PAGAR SDN 03 LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH SDN 5 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO TUO, BUKIK MALINTANG		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLLA SDN 3 MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		80.000.000	APBD II			
	REHAB PAGAR SDN 10 JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN DRUMBAND UNTUK SD 04 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		80.000.000	APBD II			
	PAVING BLOCK SD N 03 NAGARI KAMPUNG DALAM		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 18 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG ALAM		48.000.000	APBD II			
	REHAB KANTOR SDN 11 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 5 SILANTAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		48.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN KANTIN PERMANEN SDN 17		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAVING BLOK LAPANGAN SDN 3 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		100.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PAGAR SD NEGERI 5 SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, SIKALADI		100.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DAM TEBING SD 16 SILALAK KULIK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SILALAK KULIK		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN SDN 8 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		1.500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAVING BLOCK HALAMAN SDN 5 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO TUO, BUKIK MALINTANG		100.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR SD N 21		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		150.000.000	APBD II			
	SAMBUNGAN PAGAR SDN 32 MALORO		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 17 PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		0	APBD II			
	REHAB BERAT MUSHALLAH SDN 12		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN MUSHOLA SDN 25 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GAPURA SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLA DAN SUMUR GALI SDN 08		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		80.000.000	APBD II			
	TAMAN PERMANEN SDN 04		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR KOMPLEK SD N 7 PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SDN 19 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG SEKOLAH TINGKAT SD		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		350.000.000	APBD II			
	PAGAR DAN GERBANG SDN 5 SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		150.000.000	APBD II			
	REHAP RUMAH GURU SDN 02		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		250.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR DAN PAVING BLOK LAPANGAN SD 2		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM SDN 20 KUMANIS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG ALAM		0	APBD II			
	PENGADAAN MOBILER SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	MOBILER SDN 11 KOTO BARU		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GAPURA DAN DRAINASE SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLAH SD N 13 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN MUSHOLAH SDN 05 PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		80.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR KOMPLEK SD N 6 PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM BELAKANG SD N 19 TAMPARUNGO DAN PEMATANAGAN LOKASI		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SITONGEK		100.000.000	APBD II			
	PAVING BLOK SDN 16 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		100.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN PAVING BLOK SDN 17 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		200.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 21 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, MANGKUDU KODOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN GAPURA SDN 7 DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GAPURA, GERBANG DAN PAGAR SDN 5 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KOTO BENEK		200.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN PAGAR SDN 24 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		100.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN GERBANG SEKOLAH SDN 16 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		95.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN /PERBAIKAN PAGAR SD 09		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		150.000.000	APBD II			
	ALAT DRUMBEN SDN 4		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 29 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SENTOSA		150.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN MUSHOLLA SD 13		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		80.000.000	APBD II			
	REHAB PAGAR DAN PINTU GERBANG SDN 7 MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		100.000.000	APBD II			
	TALI BANDAR SDN 1 PALANGKI		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAPIK BLOK SDN 19 AIE AMO		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIAR IMUAK		100.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN PAGAR SD N 15 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		150.000.000	APBD II			
	REHAB PAGAR SDN 9 KOTO TUO		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	REHAB MUSALLAH SDN 11 SILOKEK		SIJUNJUNG, SILOKEK, SANKIAMO		80.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN GAPURA DAN PAGAR SDN 11 KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		150.000.000	APBD II			
	PAVINK BLOCK HALAMAN SD NEGERI 5 SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, SIKALADI		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SD 07		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		150.000.000	APBD II			
	GAPURA DAN PAGAR SDN 04 SIJUNJUNG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		150.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 17 TAMPARUNGO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO UTARA		0	APBD II			
	PAVING BLOCK SD 23 SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		100.000.000	APBD II			
	PAGAR DAN ATAP RUANGAN GURU SDN 19 MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 10 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		0	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUMBAND SDN 40 MUARO TAKUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		0	APBD II			
	MOBILER SDN 12 SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		0	APBD II			
	PAGAR SDN 10 KUNPAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		100.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN PAGAR DAN PEMASANGAN PAVING BLOCK SDN 2 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		200.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 4 SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	PAGAR SDN 13 BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR SDN 39 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKUR		150.000.000	APBD II			
	REHAP PAGAR SDN 6 SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, PADANG TAROK, MUARO BUAN		150.000.000	APBD II			
	DRAINASE SDN 04		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GERBANG SDN 29 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SENTOSA		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT DRUM BAND SDN 14 KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN PAVING BLOK SDN 22 SUNGAI LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		6.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PAGAR DAN PAVING SDN 12 (LOKAL JARAK JAUH)		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO MUDIAR		150.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBUATAN PAGAR DI SD N10 TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		100.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 15 UNGGAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK UJUNG LUHAK		0	APBD II			
	MOBILER SDN 9 MANGGANTI		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		48.000.000	APBD II			
	MOBILER SDN 9 LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		0	APBD II			
1.01.28.06	Penunjang Operasional Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan dana operasional	Kab. Sijunjung	204 Sekolah	3.000.000.000	APBD II		204	6.000.000.000
1.01.28.05	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar	Rata-rata nilai ujian SD	Kab. Sijunjung	75 Poin	300.000.000	APBD II		207	1.903.000.000
1.01.31	Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
1.01.31.01	Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021	Jumlah Renstra yang disusun SKPD	Muaro Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		0	0
1.17	kebudayaan		Kab. Sijunjung		1.496.000.000				3.005.000.000
1.17.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	- Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK	Kab. Sijunjung		375.000.000				230.000.000
1.17.15.01	Apresiasi Terhadap Karya Seni	Jumlah lembaga yang mengembangkan kegiatan apresiasi karya seni dan budaya berbasis ABS SBK	Kab. Sijunjung	5 Lembaga	375.000.000	APBD II		60	230.000.000
1.17.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN SEJARAH BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Kab. Sijunjung		678.000.000				2.050.000.000
1.17.16.10	Pembuatan Buku Inventarisasi Sejarah dan Benda Purbakala	Jumlah buku inventaris sejarah dan benda purbakala	Kab. Sijunjung	1 Buku	75.000.000	APBD II		1	75.000.000
1.17.16.06	Pelaksanaan Pentas Seni dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pagelaran seni Kebudayaan daerah yang dilaksanakan	Kab. Sijunjung	9 Pagelaran	140.000.000	APBD II		9	300.000.000
1.17.16.09	Bintek Sejarah dan Kepurbakalaan	Jumlah peserta dalam pelaksanaan bintek sejarah dan kepurbakalaan	Kab. Sijunjung	40 Orang	58.000.000	APBD II		40	200.000.000
1.17.16.05	Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya (Dana Pendamping)	Jumlah museum yang dibangun	Kab. Sijunjung	1 Unit	0	APBD II		1	500.000.000
1.17.16.07	Pemilihan Duta Budaya Kabupaten Sijunjung	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta budaya Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung	32 Orang	80.000.000	APBD II		32	200.000.000
1.17.16.01	Pengembangan dan penataan kawasan perkampungan adat Nagari Sijunjung	Jumlah kegiatan pengembangan dan penataan kawasan perkampungan adat nagari Sijunjung	Kab. Sijunjung	2 Kegiatan	0	APBD II		2	450.000.000
1.17.16.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Koleksi Mesium	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan fasilitas budaya yang dikembangkan	Kab. Sijunjung	14 Buah	250.000.000	APBD II		14	250.000.000
1.17.16.08	Pendataan dan Pendokumentasian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda	Jumlah cagar budaya yang didata dalam pendokumentasian warisan benda dan tak benda	Kab. Sijunjung	25 Cagar Budaya	75.000.000	APBD II		25	75.000.000
1.17.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Sejarah dan Budaya	- Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan - Jumlah SDM seni budaya yang dikembangkan potensinya - Jumlah SDM sejarah dan kepurbakalaan yang dikembangkan potensinya	Kab. Sijunjung		443.000.000				725.000.000
1.17.20.06	Pembinaan dan pengembangan Sekolah berbasis budaya	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan sekolah berbasis budaya	Kab. Sijunjung	4 Sekolah	100.000.000	APBD II		4	150.000.000
1.17.20.01	Bimbingan Teknis Penyusunan Buku Budaya Alam Minangkabau Kabupaten Sijunjung	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penyusunan Buku Budaya Alam Minangkabau Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung	0 Orang	0	APBD II			0
1.17.20.02	Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam Berpidato Adat Minangkabau	Jumlah siswa yang meningkatkan kompetensi dalam berpidato adat minangkabau	Kab. Sijunjung	60 Orang	93.000.000	APBD II		60	100.000.000
1.17.20.03	Pembinaan, Pengembangan dan Sosialisasi Sejarah, Seni dan Budaya di Kabupaten Sijunjung		Kab. Sijunjung	Sekolah	0	APBD II			0
1.17.20.04	Bimbingan Teknis dan Lomba Penulisan Cerita Rakyat Sijunjung	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek dan lomba penulisan cerita rakyat sijunjung	Kab. Sijunjung	50 Orang	100.000.000	APBD II		50	225.000.000
1.17.20.05	Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni dan Budaya	Jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya	Kab. Sijunjung	50 Orang	150.000.000	APBD II		50	250.000.000
	PEMBINAAN ADAT, SENI DAN BUDAYA		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		150.000.000	APBD II			
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		4.903.000.000				12.130.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		4.000.000.000				8.415.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	800.000.000	APBD II		12	3.470.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan penunjang opsional jasa perkantoran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	3.200.000.000	APBD II		12	4.945.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		313.000.000				2.765.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	313.000.000	APBD II		12	2.765.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		340.000.000				550.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur kantor yang meningkatkan kompetensi setiap tahun	Kab. Sijunjung	77 Orang	340.000.000	APBD II		77	550.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		150.000.000				50.000.000
9.99.06.07	Penyusunan Laporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tetat waktu	Kab. Sijunjung	4 Dokumen	150.000.000	APBD II		4	50.000.000
9.99.07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset	Persentase sekolah yang terkelola asetnya	Kab. Sijunjung		100.000.000				350.000.000
9.99.07.02	Peningkatan Manajemen Aset Dinas Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang dikelola asetnya	Kab. Sijunjung	78 Sekolah	100.000.000	APBD II		78	350.000.000
DINAS KESEHATAN									
TOTAL PAGU					67.521.525.151				104.632.000.000
1.02	Kesehatan				63.745.742.712				100.617.000.000
1.02.15	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya yang representatif	Kab. Sijunjung		14.200.000.000				19.000.000.000
1.02.15.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya	Kab. Sijunjung	100 persen	4.200.000.000	APBD II/DAK		100	7.000.000.000
	ADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA FASYANKES		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		600.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PUSKESMAS MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		450.000.000	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN RUANG PUSKESMAS PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		850.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN PAGAR PUSKESMAS LUBUK TAROK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, TIGO KORONG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN RUANG PUSKESMAS MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		850.000.000	D A K			
	REHAB PUSTU		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II/DAK			
	RELOKASI PUSTU SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		400.000.000	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN RUANG PUSKESMAS AIR AMO		KAMANG BARU, MALORO, PASAR		850.000.000	D A K			
1.02.15.03	Peningkatan Prasarana/Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan di puskesmas sesuai standar	Kab. Sijunjung	100 persen	10.000.000.000	APBD II/DAK		100	12.000.000.000
1.02.16	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan data informasi kesehatan	Terlaksananya pengumpulan data kesehatan, pengolahan data, pembuatan profil kesehatan dan visualisasi data	Kab. Sijunjung		400.000.000				550.000.000
1.02.16.01	Pengelolaan data dan Informasi kesehatan	Berkembangnya kualitas data dan informasi kesehatan	Kab. Sijunjung	90 persen	400.000.000	APBD II		100	550.000.000
1.02.17	Proram Upaya Pelayanan Kesehatan	• Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	Kab. Sijunjung		25.244.460.712				30.250.000.000
1.02.17.01	Pelayanan Keperawatan	Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan masyarakat	Kab. Sijunjung	100 persen	20.000.000	APBD II		100	25.000.000
1.02.17.02	Pelayanan Praktek Perorangan Klinik dan Rumah Sakit swasta	Persentase klinik pratama, RSUD, RS Swasta, Praktek Mandiri yang memenuhi standar pelayanan kesehatan	Kab. Sijunjung	90 persen	20.000.000	APBD II		90	25.000.000
1.02.17.18	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	meningkatkan capaian SPM bidang kesehatan	Kab. Sijunjung	100 persen	11.000.000.000	D A K		100	15.000.000.000
1.02.17.03	Upaya Kesehatan Pengembangan	Terlaksananya penguatan program UKGS & UKGMD, program indera, pelayanan kesehatan tradisional, kegiatan P3K, penguatan manajemen puskesmas & laboratorium	Kab. Sijunjung	100 persen	215.000.000	APBD II		100	250.000.000
1.02.17.06	BLUD Puskesmas Sungai Lansek	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Kamang Baru	100 persen	850.000.000	APBD II		100	900.000.000
1.02.17.07	BLUD Puskesmas Kamang	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Kamang Baru	100 persen	1.300.000.000	APBD II		100	1.400.000.000
1.02.17.08	BLUD Puskesmas Air Amo	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Kamang Baru	100 persen	500.000.000	APBD II		100	550.000.000
1.02.17.09	BLUD Puskesmas Tanjung Gadang	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Tanjung Gadang	100 persen	1.450.000.000	APBD II		100	1.500.000.000
1.02.17.10	BLUD Puskesmas Lubuk Tarok	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Lubuk Tarok	100 persen	850.000.000	APBD II		100	900.000.000
1.02.17.11	BLUD Puskesmas Gambok	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Sijunjung	100 persen	1.050.000.000	APBD II		100	1.100.000.000
1.02.17.12	BLUD Puskesmas Sijunjung	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Sijunjung	100 persen	2.300.000.000	APBD II		100	2.450.000.000
1.02.17.13	BLUD Puskesmas Muaro Bodi	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. IV Nagari	100 persen	850.000.000	APBD II		100	900.000.000
1.02.17.14	BLUD Puskesmas Padang Sibusuk	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Kupitan	100 persen	750.000.000	APBD II		100	800.000.000
1.02.17.15	BLUD Puskesmas Tanjung Ampalu	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Koto VII	100 persen	1.600.000.000	APBD II		100	1.650.000.000
1.02.17.16	BLUD Puskesmas Kumanis	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Sumpur Kudus	100 persen	750.000.000	APBD II		100	800.000.000
1.02.17.17	BLUD Puskesmas Sumpur Kudus	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Sumpur Kudus	100 persen	550.000.000	APBD II		100	600.000.000
1.02.17.19	BLUD Puskesmas Padang Laweh	Terlaksananya pelayanan kesehatan perorangan	Kec. Koto VII	100 persen	320.000.000	APBD II		100	400.000.000
1.02.17.20	Operasional Puskesmas	Terlaksananya pelayanan kesehatan di puskesmas	Kab. Sijunjung	100 persen	869.460.712	APBD II		100	1.000.000.000
1.02.19	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Makanan Minuman dan pengelolaan alkes	• Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kab. Sijunjung		3.105.000.000				27.850.000.000
1.02.19.02	Pelayanan Kefarmasian	Terwujudnya pelayanan kefarmasian dan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar	Kab. Sijunjung	100 persen	75.000.000	APBD II		100	100.000.000
1.02.19.04	Pengawasan perizinan sarana Kesehatan Swasta	Terwujudnya kepatuhan pelaku usahakesehatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kab. Sijunjung	100 persen	150.000.000	APBD II/DAK		100	300.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.19.05	Peningkatan Pengawasan Makmin	Terwujudnya pengawasan makanan dan minuman sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhinya peraturan tentang keamanan pangan oleh pelaku industri Rumah tangga (IRT)	Kab. Sijunjung	100 persen	380.000.000	APBD II/DAK		100	450.000.000
1.02.19.06	Operasional Gudang Farmasi	Terjaminnya ketersediaan Obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas dan meningkatnya pelayanan di UPTD Gudang Farmasi	Kab. Sijunjung	100 persen	2.500.000.000	APBD II/DAK		100	27.000.000.000
1.02.20	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Ke RSUD Sijunjung	Kab. Sijunjung		700.000.000				1.050.000.000
1.02.20.01	Pencapaian Mutu dan Kualitas Pelayanan Puskesmas	Terjaminnya mutu pelayanan di puskesmas melalui akreditasi, tercapainya kepuasan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Sijunjung	80 persen	500.000.000	APBD II/DAK		100	600.000.000
1.02.20.02	Operasional Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya pelayanan UPTD Labkesda	Kab. Sijunjung	12 Bulan	200.000.000	APBD II		100	450.000.000
1.02.21	Program Kesehatan Ibu dan Anak	• Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan • Persentase pelayanan kunjungan neonatal 1 (KN1) sesuai standar	Kab. Sijunjung		1.875.000.000				2.150.000.000
1.02.21.01	Pembinaan kesehatan bayi, anak	Menurunnya jumlah kematian bayi dan balita	Kab. Sijunjung	100 persen	115.000.000	APBD II		100	200.000.000
1.02.21.02	Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi	Persentase ibu hamil, bersalin, nifas, PUS yang mendapatkan pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi dibanding dengan jumlah sasaran	Kab. Sijunjung	100 persen	160.000.000	APBD II		100	250.000.000
1.02.21.03	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	Kab. Sijunjung	100 persen	1.600.000.000	D A K		100	1.700.000.000
1.02.22	Program Perbaikan Gizi masyarakat	• Persentase balita kurang gizi	Kab. Sijunjung		510.000.000				400.000.000
1.02.22.01	Pembinaan perbaikan gizi masyarakat	Menurunnya persentase anemia pada ibu hamil	Kab. Sijunjung	100 persen	350.000.000	APBD II		100	150.000.000
	PEMBINAAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI KADER NAGARI		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		150.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN STANTING		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		100.000.000	APBD II			
1.02.22.02	Pemantauan status gizi masyarakat	Menurunnya prevalensi underweight pada balita	Kab. Sijunjung	100 persen	50.000.000	APBD II		100	100.000.000
	PEMANTAUAN STATUS GIZI MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		50.000.000	APBD II			
1.02.22.03	Pembinaan kesehatan lansia	Lansia mendapat pelayanan kesehatan	Kab. Sijunjung	90 persen	110.000.000	APBD II		100	150.000.000
1.02.23	Program Pengendalian dan pencegahan Penyakit Menular	• Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk	Kab. Sijunjung		1.412.282.000				1.500.000.000
1.02.23.03	Pengendalian penyakit bersumber binatang	Tidak adanya kematian akibat penyakit bersumber binatang	Kab. Sijunjung	100 persen	286.282.000	APBD II		100	200.000.000
	ALAT ANTISIPASI DEMAM BERDARAH		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		150.000.000	APBD II			
	PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER DARI BINATANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		136.282.000	APBD II			
1.02.23.04	Peningkatan surveilans dan penyakit berpotensi wabah	Cakupan penanggulangan KLB < 24 jam	Kab. Sijunjung	100 persen	250.000.000	APBD II		100	300.000.000
1.02.23.01	Peningkatan cakupan pelayanan imunisasi	Terimunisasinya bayi, baduta, anak sekolah dan WUS	Kab. Sijunjung	100 persen	176.000.000	APBD II		100	200.000.000
1.02.23.02	Pengendalian penyakit menular langsung	Penemuan terduga TBC, angka keberhasilan pengobatan TBC, Deteksi dini kasus HIV pada kelompok beresiko	Kab. Sijunjung	100 persen	700.000.000	APBD II/DAK		100	800.000.000
1.02.24	Program Pengendalian Penyakit Tidak menular	• Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Kab. Sijunjung		299.000.000				450.000.000
1.02.24.01	Pengendalian Penyakit tidak menular	Terselenggaranya pengendalian penyakit tidak menular secara terpadu	Kab. Sijunjung	100 persen	184.000.000	APBD II		100	300.000.000
1.02.24.02	Meningkatnya pelayanan kesehatan jemaah haji	Terlaksananya pembinaan kesehatan dan screening faktor resiko PTM di Posbindu Kesehatan haji	Kab. Sijunjung	100 persen	30.000.000	APBD II		100	50.000.000
1.02.24.03	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBH CHT)	Terselenggaranya pengendalian penyakit tidak menular akibat dampak asap rokok	Kab. Sijunjung	25 persen	85.000.000	Default		100	100.000.000
1.02.25	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	• Persentase nagari siaga aktif • Persentase sekolah sehat	Kab. Sijunjung		500.000.000				700.000.000
1.02.25.01	Pemberdayaan Masyarakat	Peran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat	Kab. Sijunjung	80 persen	200.000.000	APBD II		100	300.000.000
1.02.25.02	Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Kab. Sijunjung	80 persen	150.000.000	APBD II		100	200.000.000
1.02.25.03	Peningkatan Kesehatan Anak Usia sekolah	Meningkatnya sekolah sehat	Kab. Sijunjung	80 persen	150.000.000	APBD II		100	200.000.000
1.02.26	Program Penyehatan Lingkungan	• Persentase nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) • Persentase kecamatan yang memfasilitasi kawasan sehat	Kab. Sijunjung		500.000.000				717.000.000
1.02.26.02	Pengembangan kawasan sehat	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Kab. Sijunjung	85 persen	200.000.000	APBD II		87	367.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.02.26.01	Penyehatan lingkungan pemukiman	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan pemukiman	Kab. Sijunjung	85 persen	300.000.000	APBD II		100	350.000.000
1.02.27	Program pengembangan Pembiayaan dan jaminan pemeliharaan Kesehatan				15.000.000.000				16.000.000.000
1.02.27.01	Operasional penguatan Jaminan kesehatan Nasional	Terwujudnya pengelolaan program JKSS	Kab. Sijunjung	80 persen	15.000.000.000	APBD II		100	16.000.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD			25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Renstra OPD tahun 2021-2026 selesai	Kab. Sijunjung	100 persen	25.000.000	APBD II		100	0
2.05.16.66	Evaluasi Renstra OPD	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung	100 persen	0	APBD II		100	0
2.07	Pemerintahan		Kab. Sijunjung		36.176.250				50.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		36.176.250				50.000.000
2.07.15.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Pengadaan laporan kinerja	Kab. Sijunjung	100 persen	36.176.250	APBD II		100	50.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana				3.714.606.189				3.965.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		2.764.798.705				3.000.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi kantor dinas kesehatan	Muaro Sijunjung	12 Bulan	692.673.705	APBD II		100	500.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terjadinya Operasional Jasa Perawatan	Muaro Sijunjung	12 Bulan	2.072.125.000	APBD II		100	2.500.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		367.618.280				600.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kab. Sijunjung	100 persen	367.618.280	APBD II		100	600.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		582.189.204				365.000.000
9.99.05.45	Pengembangan Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan dan menerapkan hasil pelatihan sesuai dengan kompetensinya	Kab. Sijunjung	100 persen	572.324.204	APBD II		100	350.000.000
	PELATIHAN TENAGA MEDIS		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TENAGA MEDIS		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		150.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		272.324.204	APBD II			
9.99.05.55	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tenaga kesehatan yang yang memahami produk hukum dan perundang-undangan	Kab. Sijunjung	100 persen	9.865.000	APBD II		100	15.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)									
TOTAL PAGU					69.059.522.849				34.415.937.151
1.02	Kesehatan				65.007.208.224				34.415.937.151
1.02.20	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan Kunjungan Pasien Ke RSUD Sijunjung	Kab. Sijunjung		1.543.850.000				1.543.850.000
1.02.20.03	Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan	Jumlah dokter spesialis reveral yang dibutuhkan	RSUD Sijunjung	6 Orang	1.543.850.000	APBD II		6	1.543.850.000
1.02.31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	• Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesehatan BLUD di RSUD Sijunjung	Kab. Sijunjung		32.872.087.151				32.872.087.151
1.02.31.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Jumlah operasional pelayanan kesehatan BLUD yang dibutuhkan	RSUD Sijunjung	12 Bulan	32.872.087.151	APBD II		12	32.872.087.151
1.02.36	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana yang memenuhi standar RS Tipe C	Kab. Sijunjung		30.591.271.073				0
1.02.36.04	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Kab. Sijunjung	1 Paket	7.479.557.800	APBD II/DAK			0
1.02.36.03	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana rumah sakit yang dibangun dan ditingkatkan	RSUD Sijunjung	1 Paket	23.111.713.273	D A K		1	0
	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		21.111.713.273	D A K			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN RAWAT INAP KELAS III		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		2.000.000.000	APBD II			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah bulan Renstra OPD yang di buat	RSUD Sijunjung	12 Bulan	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		4.027.314.625				0
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		3.187.314.625				0
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran yang dibutuhkan	RSUD Sijunjung	12 Bulan	3.187.314.625	APBD II		12	0
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		840.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.05.17	Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas SDM Pelayanan Kesehatan	Kab. Sijunjung	102 Orang	840.000.000	APBD II			0
	PENINGKATAN KUALITAS SDM PELAYANAN KESEHATAN		SIJUNJUN SIJUNJUNG, GANTING		240.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TENAGA MEDIS		SIJUNJUNG, GANTING		600.000.000	APBD II			
			Kab. Sijunjung						
			Kab. Sijunjung						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		TOTAL PAGU			219.000.000.000				4.641.497.488.113
1.03	Pekerjaan Umum		Kab. Sijunjung		194.021.681.000				4.537.599.350.000
1.03.15	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		1.450.000.000				1.650.000.000
1.03.15.03	Operasional Labor	Terlaksananya pengujian bahan dan mutu serta terpeliharanya peralatan laboratorium	Kab.Sijunjung	12 Bulan	250.000.000	APBD II		12	250.000.000
1.03.15.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat berat	Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi alat-aklat berat	Kab.Sijunjung	12 Bulan	1.200.000.000	APBD II		12	1.400.000.000
1.03.16	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN		Kab. Sijunjung		69.109.719.000				1.770.000.000
1.03.16.01	Kegiatan Peningkatan Jalan	Persentase jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sijunjung	55 persen	39.901.719.000	APBD II		7	200.000.000
	PENINGKATAN JALAN SISAWAH KE KABUN KE MUARO		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN DI NAGARI KAMPUNG DALAM		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		225.000.000	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMAU SUNDAI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN BATU MANJULUR KE KOTO BARU		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II/DAK			
	PEMBUKAAN JALAN DAN PEMBERSIHAN TPU		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		0	APBD II			
	REHAB BERAT JALAN PADANG LAWEH KE TANJUNG AMPALU		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN MUTU JALAN SOLOK MANGGIS KE SDN 12 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II/DAK			
	JALAN DURIAN GADANG - TAPUIH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN SOLOK MANGGIS TARATAK BETUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PENGANTIAN LANTAI JEMBATAN DARI KAYU KE COR BETON DIJALAN KABUPATEN (TERSEBAR DI SETIAP JORONG)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II/DAK			
	DRAINASE JALAN SUNGAI LIMAU		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG TIGO		0	APBD II			
	MUDIK IMUK - BANJAR TENGAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	JEMBATAN GANTUNG MUARO ANGGAI		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II/DAK			
	SIMPANG MUDIK MALIH - MUDIK MALIH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIK MALIH		0	APBD II			
	PENGASPALAN /RIGID JALAN GUGUAK-KUMANIS		KOTO VII, GUGUK, PADANG LALANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN DRAENASE PALOKOTO		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II/DAK			
	DRAINASE JALAN LOGAS LEWAT KODIM 0310 SS		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		0	APBD II			
	SIMPANG PAMUATAN - PAMURO		KUPTAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN CALAU - TANAH BATO		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II/DAK			
	PEREHAPAN DAN PERAWATAN JALAN TARATAK BARU KE BULUH KASOK /DRAINASE		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		0	APBD II/DAK			
	RIGID BETON JALAN SIMPANG LAPANGAN TELENG KE SOLOK MANGGIS		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		0	APBD II			
	ASPAL HITAM JALAN LAWEH		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENINGKATAN JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JL DURIAN GADANG-RUMBAI SISAWAH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, TANGGALO		0	APBD II/DAK			
	PEMBUKAAN JALAN BARU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	REHAB JALAN ADINEGORO MENUJU SAWAH TAROK		KOTO VII, PADANG LAWEH, SAWAH TAROK		0	APBD II			
	KOTO TUO - MUARO		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN BATU MANJULUR KE KOTO BARU		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN EKOR KOTO SUNGAI GEMIRI		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN BUKIK TAMBUSU MENUJU KAYU ANGIK		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	MUARO BODI - KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		300.000.000	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN PADANG TARANG ULU PALIKI		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO TINGGI		0	APBD II			
	DRAINASE DARI SOPAN TANAH KE SUNGAI BATANG KARIMO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KABUPATEN KOTO BARU - MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	LANJUTAN HOTMIX JALAN BATANG LAWAS		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JALAN SISAWAH KE KABUN KE MUARO		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II/DAK			
	DAMAN TEBING JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MUARO BODI KE MUNDAM		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN DI JORONG GUGUAK TINGGI		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	PERAWATAN DAN PENGASPALAN JALAN KABUPATEN TERSEBAR DI NAGARI		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	PEMBUKAAN DAN PENINGKATAN JALAN DARI KAYU GADANG- BATANG LAWAS-BUKIT PONGGANG		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN BATU GANDANG KE BATU BALANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGIT JALAN DURI - PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	KAYU GADIH - SAWAH GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN MENUJU LAPANGAN VOLLY BALL COLAU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	LANJUTAN PENGKERASAN DAN PENGASPALAN JALAN PT.KARBINDO - PASAR BARU KUNPAR (JR.SUNGAI TAMBANG 1 - JR.KUNANGAN - JR.SUNGAI TAMBANG II)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		2.000.000.000	APBD II			
	RIGID BETON SIMARU - KOTO SALO		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		0	APBD II			
	REHAB DAN PENGASPALAN JALAN UNGGAN KE PAMUSIAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNANAN /REHAB/PENINGKATAN JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		0	APBD II/DAK			
	ADINEGORO - BATU GANDANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN SIMARU KOTO SLAO DAN BAHU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		0	APBD II			
	PENINGKATAN MUTU JALAN SOLOK MANGGIS KE SDN 12 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		2.038.400.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBUKAAN JALAN BARU DARI AIR ABU ATAU KE SOPAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II			
	PASAR JUMAT - TANAH BATO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TANAH BATO		0	APBD II			
	PELEBARAN DAN PEINGKATAN JALAN BATU KUPIK		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN TANJUNG PAUH KE BATU GANDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN SILALAK KULIK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SILALAK KULIK		0	APBD II/DAK			
	PELEBARAN JALAN DAN PEMBUAKAAN JALAN TEMBUS SIBISIR - TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, SIBISIR		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN BUKIK LANTAK		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK SIPUAH		0	APBD II			
	RIGID BETON RUAS JALAN BUKIT BUAL - PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	UNGGAN - BATAS TANAH DATAR		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		0	APBD II			
	LANJUTAN HOTMIX JALAN LINGKAR		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		2.000.000.000	APBD II			
	BANJAR TENGAH - MUDIAK IMUAK		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN KAMPUNG BARU - TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		900.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN UNGGAN BUKIK - UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		0	APBD II			
	LINTAS HARAPAN		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN AUR TANAM		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KOTO BARU KE MUARO BODI		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		2.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN TANJUNG AMPALU MENUJU MUARO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II			
	TANAH BATO - PADANG RANAH		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TANAH BATO		0	APBD II			
	RIGIT BETON DARI SD SAMPAI DPRD		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PELEBARAN DAN PENINGKATAN JALAN BATU KUPIK		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		1.500.000.000	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN KUMANIS - SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		5.666.729.000	APBD II/DAK			
	SIMPANG KARIMUN - MUDIAK IMUK		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II			
	TANJUNG BONAI AUR - SIBOLIN		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, LABAN BUNGKUK		0	APBD II			
	DURIAN GADANG - TAPUI		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN DI JORONG GUGUAK TINGGI		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	LANSEK MANIH		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN LINKAR KOTO RANAH		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN DI NAGARI TANJUNG KALIANG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN PALANGKI KE MUARO SIJUNJUNG (BUKIK BATANG CABE KE DAMAR PUTIH)		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	LANJUTAN Pengerasan & Pengaspalan Jalan Pt.Karbindo-Pasar Baru Kunpar (JR Sungai Tambang I- JR KUNANGAN-JR Sungai Tambang II		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN DIGIT BETON JALAN KOTO SISAWAH KE JORONG RUMBAI		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, RUMBAI		0	APBD II/DAK			
	RIGHT BETON JALAN TANJUNG BERINGIN SD KAMPUNG BARU		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	TANAH BAJANG - ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIGHT BETON TIMPEH 7		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN RIGID BETON JALAN STASIUN DARI LUBUK BONAI KE PANTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PANDAM - KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN DURI - PANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	PEMBUATAN POLONGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	HOT MIX, RIGHT BETON DAN DRAINASE JALAN KOTO TUO - MUARO		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		10.000.000.000	APBD II			
	DAM BUKIK LAMO		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN KOTO SISAWAH KE JORONG RUMBAI		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, RUMBAI		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN SOLOK AMBAH KE SUNGAI BETUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KUMANI - GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	HOT MIX JALAN KAMANG BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	Pengerasan Jalan Sei.Kandi ke Buluh Kasok		TANJUNG GADANG, PULASAN, SAWAH GADANG		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON SDN 20 PADANG LAWEH KEC. KOTO VII KE BUKIT PENCORAN		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		750.000.000	APBD II			
	JLN. LINGKAR MUARO BELAKANG GEDUNG PANCASILA		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	BATU MANJULUR - KOTO BARU		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAIASE JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGHT JALAN MANGGI - PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN TARATAK SUNGAI KANDI		LUBUAK TAROK, BULUAK KASOK, TARATAK		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN DAN PEMBERSIHAN TPU		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		0	APBD II			
	SMPN 45 - KOTO TUO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN PALANGKI KE MUARO SIJUNJUNG (BUKIK BATANG CABE KE DAMAR PUTHI)		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		0	APBD II			
	JLN. LINGKAR BELAKANG LOGAS - SIMPANG TUGU SUER		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBUATAN DRAENASE JALAN KABUPATEN		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN KOTO		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		0	APBD II			
	RIGHT BETON JALAN MACANG KUMOLOU JORONG SITAMPUANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		0	APBD II			
	DAM BAHU JALAN KABUPATEN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		150.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RIGID BETON JALAN KANDANG BARU - MUNDAM SAKTI		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBUATAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN SONTU KE TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	RIGID BETON SUNGAI KALULUK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MENUJU OBJEK WISATA		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PEMBUATAN BATU GARONJONG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN ADINEGORO MENUJU IPUH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TARATAK BARU		0	APBD II			
	KANDANG BARU - MUNDAM SAKTI		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JALAN RIGID BETON DARI STASIUN KE BATU BOLANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	SIMPANG MUDIK BETUNG - MUDIK BETUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIK MALIH		0	APBD II			
	REHAB BERAT JALAN PADANG LAWEH KE TANJUNG AMPALU		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	BANJAR TANGAH - LUBUK KAPIYEK		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	REHAB JL. SIMPANG KUMBAYAK KE TANDIKEK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		0	APBD II			
	PELEBARAN / DAM JALAN RANAH PALAM - KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	LANJUTAN JALAN BUKIK KOJAI KE JORONG KABUN/ JALAN WISATA		SIJUNJUNG, SILOKEK, SANKIAMO		200.000.000	APBD II/DAK			
	RIGID BETON JALAN RUMBAI		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		0	APBD II			
	DAMAN TEBING JALAN KABUPATEN SIMPANG 3 KALUMPANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		75.000.000	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JALAN CALAU - TANAH BATO		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	TANJUNG AMPALU - PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN PAL 10 (SEPULUH) - SOLOK MANGGIH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		4.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MUNDAM SAKTI, KOTO BARU DAN MUARO BODI		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN DURIAN GADANG - TAPUIH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, TANGGALO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN MANGGANTI DURIAN GADANG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN TARATAK MALINTANG KE AIC		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		1.500.000.000	APBD II/DAK			
	BULUH KASOK - SUNGAI KANDIH		LUBUAK TAROK, BULUH KASOK, KOTO BULUH KASOK		0	APBD II			
	RIGID BETON RUAS JALAN BUKIT BUAL-PALALUAR		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		349.590.000	APBD II/DAK			
	RIGID BETON JALAN INPRES KE MELAYU		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO HILIR		300.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KOTO BATU KE BATU MANJULUR		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		1.000.000.000	APBD II			
	KOTO TUO - SILALAK KULIK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KANDANG BARU-MUNDAM SAKTI		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENINGKATAN JALAN MUDIEK AIA		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		0	APBD II			
	KAYU GADIIH - SAWAH GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIIH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	DAM TEBING JALAN KABUPATEN SIMPANG 3 KALUMPANG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	TIMPEH LAMA (SP2) - TIMPEH III (SP3)		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN HOTMIX JALAN BATANG LAWAS		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN ATEH GUGUAK KE PAYO SYAHADAT		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE PEMUKIMAN JALAN KABUPATEN /JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, BANCAH SIBAKUR		0	APBD II/DAK			
	RANAH MUDIAD MILAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIK MALIH		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN SOLOK AMBAH KE SUNGAI BETUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO MUDIK		0	APBD II/DAK			
	BATU AJUNG - SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		0	APBD II			
	SISAWAH - RUMBAL		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN SIBISI KOTO TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KOTO BARU KE MUARO BODI		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN - JALAN BATU GANDANG KE BATU BALANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		297.000.000	APBD II			
	PENGASAPALAN JALAN TIMPEH V MENUJU TIMPEH VI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHABILITASI DRAINASE JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON JL. SILALAK KULIK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SILALAK KULIK		0	APBD II			
	SAMBUNGAN RIGID BETON JALAN BENDAHARAAN - BUKIT GOMBAK		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	PENGERASAN JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II			
	KAYU GADIIH - PULASAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIIH		0	APBD II			
	LINGKAR KANTOR WALI NAGARI TAKUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON JALAN JORONG MUDIAD IMUAK		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIAD IMUAK		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN KAMPUNG BARU - TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		0	APBD II/DAK			
	BELUM ADANYA BAHU RUAS JALAN		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN PADANG LOWE		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN DRAINASE SD RANAH PALAM - LUBUK TABIR		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	LANJUTAN PERBAIKAN JALAN GUGUAK MURAI SITAMPUANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN KE PASAR BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
	BATU MANJULUR - KOTO BARU		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENINGKATAN JALAN TARATAK SUNGAI KANDI		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, TARATAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN LAIDAM JALAN JORONG SIMPANG AMPEK		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KANDANG BARU - MUNDAM SAKTI		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II			
	KOTO BARU - KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO BARU		0	APBD II			
	PENGERASAN DAN RIGIT BETON JALAN		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KOTO BARU KE MUARO BODI		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		0	APBD II/DAK			
	PENGERASAN JALAN SIMPANG KPN - JORONG BANJAR TENGAH		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	SIMPANG V PADANG SIBUSUK - BATANG LAWEH		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	BATU BALANG - BATU GANDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II/DAK			
	KOTO GADANG - SIBOLIN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIBOLIN		0	APBD II			
	ASPAL HITAM DI JALAN BATANG LAWEH		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN PENINGKATAN JALAN TANGGALO		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, TARATAK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN SIBISIR KOTO TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGID BETON DARI JORONG RANAH SIGADING MENUJU SUNGAI GEMIRI		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II			
	PENGASPALAN / RIGID JALAN GUGUAK - KUMANIS		KOTO VII, GUGUK, PADANG LALANG		1.500.000.000	APBD II			
	PANCANG BUKIT - PULAU GADANG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	LANJUTAN DRAINASE SD RANAH PALAM-LUBUK TABIR		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	PENGASPALAN JALAN MUDIAK IMUAK		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIAK IMUAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN KABUPATEN DI NAGARI TANJUNG KALIANG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		0	APBD II/DAK			
	SOLOK AMBAH - SUNGAI BETUNG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, RIMBO AMBACANG		0	APBD II			
	BANJAR TENGAH - LUBUAK KAPIEK		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE SD RANAH PALAM - LUBUK TABIR		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		150.000.000	APBD II			
	PENGERASAN JALAN SEI.KANDI KE BULUH KASOK		TANJUNG GADANG, PULASAN, SAWAH GADANG		0	APBD II/DAK			
	RIGID BETON SUNGAI KALULUK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II			
	LANJUTAN REHAB JALAN SIMPANG KALUMBUK-LUMBARU		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN PADANG LOWE		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BARU JALAN BATANG LURAH		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN MANGGANTI - SIMAWIK		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN SIMARU-KOTO SALO		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		2.000.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMASANGAN DAM PENAHAN JALAN LUBUK MUTAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN DARI POLSEK KE KANTOR CAMAT		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN SILOKEK		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II			
	PADANG SIBUSUK - BATU MANJULUR		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	PENGASPALAN JALAN JORONG BANJAR TENGAH - LUBUAK KAPIEK		KAMANG BARU, AIA AMO, LUBUK KAPIEK		0	APBD II/DAK			
	REHAB BERAT RIGIT BETON JALAN DALAM NAGARI		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	KOTO BARU - MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE SIMPANG TUGU SIBILURU		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG TIGO		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LPN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON SIMPANG TANAH BAJANG KE ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN KOTO BATU KE BATU MANJULUR		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II/DAK			
	RANAH SIGADING - KOTO PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN DAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
1.03.16.02	Kegiatan Peningkatan Jembatan	Persentase jembatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sijunjung	30 persen	29.208.000.000	APBD II		5	1.570.000.000
	PEMBANGUNAN JEMBATAN KAMANG MADANI KE KAMANG ABADI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG ABADI		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN PERMANEN LOBUO TONGAH		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II			
	JEMBATAN MINI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG BINUANG		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		200.000.000	APBD II			
	REHAB BERAT JEMBATAN GANTUNG		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG KE MUDI AK TAKOCIAK		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUBARANG GADANG		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN TANJUNG KELING - MUDI AK IMUK		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, MUDI AK IMUAK		4.500.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MUDI AK MALIH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDI AK MALIH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN NAGARI TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG KUBANG SILOSAH		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		750.000.000	APBD II			
	PEMINDAHAN JEMBATAN UTAMA YANG LAMA		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		800.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN SUNGAI BETUNG II		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PAUD TANDIKEK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG (KUBU, KUBANGAN DAN BUKIK ARAK)		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TARATAK TANGAH JORONG BUKIK SABALAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BUKIT SABALAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG TAKUNG KE BATANG DIKEK		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BATANG DIKEK		0	APBD II/DAK			
	JEMBATAN PARMANEN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN BATU PALIMAWAN		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI USAU		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG BINUANG		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		0	APBD II/DAK			
	JEMBATAN GANTUNG MUARO ANGGAI		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG KE MUDIAK TAKOCIAK		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN LEGER KE TOMPAT		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN BATU PALIMAWAN		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II/DAK			
	JEMBATAN MINI GURUN GSI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN NAGARI TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BANJAR TENGAH		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN KE SAWAH SEI, SONSANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMANEN		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN LANTAI JEMBATAN KOBUN JORONG TOMBANG		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN SAWAH LADIANG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN TANJUNG GADANG - PULASAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SAWAH ITIEK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		1.500.000.000	APBD II			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN DI NAGARI KAMPUNG DALAM		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN BANGUNAN ATAS JEMBATAN LUBUK TARANTANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JEMBATAN BULUH ROTAN		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN PINANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		258.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN MUARO KAKO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN JALAN LANGKI- MUARO KALUAI		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO KALUAI		1.000.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN JEMBATAN BATANG SARIAU SARUNDUNG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, AIR SERIAU		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN-		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		7.000.000.000	APBD II/DAK			
	PENGGANTIAN LANTAI JEMBATAN DARI KAYU KE COR BETON DI JALAN KABUPATEN (TERSEBAR DISETIAP JORONG)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MINI DUSUN II JORONG GUGUAK NANEH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	DAM BAHU JALAN KABUPATEN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MINI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			
	JEMBATAN BETON TIGO KORONG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, TIGO KORONG		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JEMBATAN PULASAN - SUNGAI KANDIS		TANJUNG GADANG, PULASAN, SUNGAI KANDI		0	D A K			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BINJAI		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MELANG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		500.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BUKIT SABALAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BUKIT SABALAH		800.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN KE SAWAH SEI SONSANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		0	APBD II			
	JEMBATAN GANTUNG JORONG LEMBAH GUNUNG-		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		300.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN BETON TIGO KORONG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, TIGO KORONG		0	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN MANGGANTI - DURIAN GADANG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON		KAMANG BARU, KAMANG, GALOGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN SAWAH LADIANG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN MUARO KAKO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		0	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN BATANG SIDUO		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		400.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG DI SURAU SARIK		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		360.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON (LEGER)		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BATANG OMBILIN		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN LANGKI - MUARO KALUAI		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO KALUAI		0	APBD II			
	PERBAIKAN JEMBATAN DI RANAH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JALAN KE KANTOR CAMAT TJ.GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN DUSUN 3 KAMANG BAKTI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG TAKUNG KE BATANG DIKEK		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BATANG DIKEK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PAUD TANDIKEK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		240.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN PERMANEN LOBUO TONGAH		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SAWAH LIEK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG KUBANG SILOSAH		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG AMBATAN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN DARI PADANG RUMBIO KE KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PERMANEN BATU AJUNG KARENA JEMBATAN SEKARANG MASIH JEMBATAN KAYU		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		500.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BANDAR GADANG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG LELO		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	DAM BAHU JALAN KABUPATEN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN JEMBATAN PADANG RUMBIO KE KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG LUBUK BUYANG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		0	APBD II			
	JEMBATAN MOBIL KE SEBERANG KOTO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	REHAB / PENINGKATAN JEMBATAN MUARO SIMERU DAN LONCAI		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG TARATAK		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PENGEMBANGAN JIDES		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		0	APBD II			
	REHAB BERAT JEMBATANG BATANG SIBAKUR NAGARI LANGKI		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BUKIT SABALAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BUKIT SABALAH		0	APBD II/DAK			
	JEMBATAN PERMANEN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BINJAI		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN UNTUK MEMPERLANCAR TRANSPORTASI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MELANG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN PADANG RUMBIO KE KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	REHAB BERAT JEMBATAN PASAR PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		1.500.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN JEMBATAN BATANG SERUNDUN		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, AIR SERIAU		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN NAGARI LALAN (BENTANG 15 M)		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		800.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN JEMBATAN BATANG SIDUO KOCIK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN LUBUK CUPAK		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON SUNGAI BATANG TAKUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, CILACAP		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	PEMB/REHABILITASI JEMBATAN MUARO SIMARU DAN LONCAI		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG		IV NAGARI, PALANGKI, TANJUNG UDANI		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN LLUBUK CUPAK		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JEMBATAN SUNGAI SOPAN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II/DAK			
	PENGgantian JEMBATAN SIMAWIK - MANGGANTI		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TAPI BALAI		4.500.000.000	APBD II			
	JEMBATAN MESJID ISTIQOMAH SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II			
1.03.19	PROGRAM PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN		Kab. Sijunjung		23.424.660.000				34.179.350.000
1.03.19.01	Kegiatan Preservasi Jalan	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi	Kab. Sijunjung	55 persen	15.770.700.000	APBD II		21	33.700.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERBAIKAN JALAN BUKIT LANTIAK/JALAN KABUPATEN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK SIPUAH		0	APBD II/DAK			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN DI JORONG KOTO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II			
	DRAINASE KP3		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN BETON JALAN BATANG KERING		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON SUNGAI KALULUK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		0	APBD II/DAK			
	REHAB BERAT JALAN SIMPANG KAMANG SUNGAI BATUANG		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II			
	DAM BUKIT SATU LAMO		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JALAN MANGANTI DURIAN GADANG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II/DAK			
	KANDANG ITIK - TARATAK MALINTANG		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN SIMPANG KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	BATANG KERING - TIMPEH IV		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	LANJUTAN REHAB JALAN SIMPANG KALUMBUK LUMBARU		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON BATU BALANG MENUJU SOLOK BADAQ.		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MUARO BODI KE MUNDAM.		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	PERAWATAN JALAN LATANG JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		500.000.000	APBD II			
	DRAINASE NAGARI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	DRAINASE NAGARI BATU MANJULUR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN RIGIT BETON JALAN SATASIUN DARI LUBUK BONAI KE PANTO		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHAB JEMBATAN RANAH PALAM		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN RIGIT BETON DARI STASIUN KE BATU BOLANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN SIMPANG PASAR LAMO - TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, PASAR LAMO		0	APBD II			
	REHAB DAN PENGASPALAN JALAN UNGGAN KE PAMUSIAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		30.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN SALURAN AIR DARI BAHU JALAN SUMPUR KUDUS KE UNGGAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMAU SUNDAI		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN ADINEGORO MENUJU IPUH.		KOTO VII, PADANG LAWEH, TARATAK BARU		0	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN ADINEGORO MENUJU SAWAH TAROK.		KOTO VII, PADANG LAWEH, SAWAH TAROK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KUMANIS SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		0	APBD II/DAK			
	DRAINASE JALAN KOTO BARU - MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PARU - TAPUIH		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		0	APBD II			
	PEMBUATAN POLONGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN TUGU SIMPANG 3		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		0	APBD I			
	SIMPANG PINTU BATU - TANJUNG KELING		KAMANG BARU, PADANG TAROK, PINTU BATU		0	APBD II			
	TANAH BADANTUNG - LALAN		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KUMANI-GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN KE PASAR BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
	PEMINDAHAN TUGU DI SIMPANG TIGA		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN KE SILOKEK/JALAN KABUPATEN		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN Pengerasan Jalan Nagari Maloro		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN KABUPATEN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	KUMANIS - GUGUAK		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN BARU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KOTO		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		500.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MUNDAM SAKTI, KOTO BARU DAN MUARO BODI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II/DAK			
	REHAB BERAT JALAN SUMPUR KUDUS - KUMANIS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		0	APBD II			
	PASAR JUMAT - TANAH BATO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		6.000.000.000	APBD II			
	BULUH ROTAN - GUGUAK		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II			
	AIR AMO - SUNGAI BETUNG		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II			
	DRAINASE KOTO LUBUAK CUPAK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	Pengerasan Jalan Mudiak Imuk - Lubuk Kapiak		KAMANG BARU, AIA AMO, LUBUK KAPIK		0	APBD II			
	REHAB JALAN KABUPATEN KE JORONG SILUKAH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	SIMPANG V PADANG SIBUSUK - BATANG LAWEH		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		3.000.000.000	APBD II			
	REHAP JALAN KABUPATEN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN/JALAN KABUPATEN BANDA MALINTANG - BATAS TANAH DATAR		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG ALAM		0	APBD II/DAK			
	HOT MIX, RIGIT BETON DAN DRAINASE JALAN KOTO TUO-MUARO		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MENUJU DUSUN TINGGI I		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		0	APBD II			
	KAMPUNG BARU - TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	Pengerasan Jalan		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN KANDANG BARU-MUNDAM SAKTI		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II			
	REHAB JALAN KABUPATEN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		0	APBD II			
	TIMBULUN - TIMBULUN PATAH		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE SIMPANG TIGO SABILURU		SUMPUR KUDUS, TANJUNG LABUAH, SIMPANG TIGO		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LPN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBUKAAN JALAN TARATAK LUBUK- BUKIT BUAL		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE JALAN LINGKAR JORONG KANDANG HARIMAU		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN/JALAN KABUPATEN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN BOREM JALAN SIMPANG PAMUATAN KE MASJID		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		0	APBD II			
	REHAB JALAN SIMPANG KUMBAYAK KE TANDIKEK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		0	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN KABUPATEN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		150.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN ADINEGORO MENUJU BAWAH GIGI UJUNG.		KOTO VII, PADANG LAWEH, TARATAK BARU		0	APBD II			
	DAMAN TEBING JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		0	APBD II/DAK			
	RIGHT BETON JALAN SOLOK MANGGIS TARATAK BETUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KUMANIS SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		0	APBD II			
	KOTO BARU - MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	REHAB BERAT JALAN SIMPANG KAMANG SUNGAI BETUNG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		140.700.000	APBD II			
	JALAN HAMKA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	SUNGAI BETUNG - PINTU BATU		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		0	APBD II			
	REHAB BERAT JALAN SIMPANG KAMANG SUNGAI BATUANG		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II/DAK			
	REKANA PEMBAGUNAN JEMBATAN MOBIL PERMANEN ANTARA JORONG KOTO TUO DAN JORONG TARUKO		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	SIMPANG MUDIK BETUNG - MUDIK BETUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIK MALIH		0	APBD II			
	REHAB JALAN LAMA (DARI PASAR NAGARI S/D LUBUK BATU)		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		100.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN MANGGANTI KE SISAWAH JORONG TARUKO		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, TARUKO		0	APBD II			
	BATU MANJULUR - KOTO BARU		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	D A K			
	SIMPANG MUARO TAKUNG - MUARO TAKUNG		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		0	APBD II			
	RIGHT BETON JALAN SIMPANG LAPANGAN TELENG KE SOLOK MANGGIS		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		0	APBD II			
	JALAN TANJUNG AMPALU MENUJU MUARO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD I			
	GUGUK - BATAS KUMANIS		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	KELOK RIAK - TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN TANJUNG PAUAH KE BATU GANDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		0	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN LAMA (DARI PASAR NAGARI SD LUBUK BATU)		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
	RIGHT BETON JALAN KE AUR TANAM		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN /JALAN KABUPATEN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		0	APBD II/DAK			
	HOT MIC JALAN KAMANG BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN NAGARI DI JORONG GUGUAK TINGGI		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN MUDI AK AIA		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN DRAINASE DAN RIGIT BAHU JALAN KABUPATEN DARI NAG.SMPUR KUDUS KE NAGARI MANGANTI		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		0	APBD II/DAK			
	BUKIT BUAL - KAMPUNG BARU		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PADANG SIBUSUK - BATU MANJULUR		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHABILITAS DRAINASE JALAN KABUPATEN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	LALAN - LUBUK TAROK		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN KOTO BARU - MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN/JALAN KABUPATEN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN DRAINASE JALAN KABUPATEN		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	REHAB JALAN BATANG LASA NAGARI KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	REHAB BERAT JALAN BETON DALAM NAGARI		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		0	APBD II			
	GUGUAK - BATAS KUMANIS		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	MUARO BODI - KOTO BARU		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		5.000.000.000	APBD II			
	PENGASPALAN JALAN TIMPEH V MENUJU TIMPEH IV		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		0	APBD II			
1.03.19.02	Kegiatan Preservasi Jembatan	Persentase Jembatan di Rehabilitasi	Kab. Sijunjung	7 Unit	7.653.960.000	APBD II		7	479.350.000
	JEMBATAN GANTUNG MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II			
	REHAB BERAT JEMBATAN BATANG SIBAKUR NAGARI LATANG		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		1.000.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN LANTAI JEMBATAN KOBUN JORONG TOMBANG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KABUN		100.000.000	APBD II			
	REHAP JEMBATAN KOTO SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MINI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	RENOVASI JEMBATAN GANTUNG GUGUK KUNANGAN JORONG SIMAWIK		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		200.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JEMBATAN BULU ROTAN		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II			
	REHAB JEMBATAN GANTUNG SANGKIAMO		SIJUNJUNG, SILOKEK, SANKIAMO		99.960.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MINI DUSUN II JR.GUGUK NANEH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BETON JALAN KE KANTOR CAMAT TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II/DAK			
	REHAB JEMBATAN KOTO SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		100.000.000	APBD II			
	JEMBATAN UJUNG PADANG KE KAMPUNG JUAR		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN MINI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERBAIKAN JEMBATAN GANTUNG TALAO		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		100.000.000	APBD II			
	JEMBATAN GANTUNG KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN BATANG LELO		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	REHAP/PEMBANGUNAN JEMBATAN RANAH PALAM		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II/DAK			
	JEMBATAN MESJID ISTIQOMAH SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II			
	COR BETON JEMBATAN JALAN POROS SUKOREJO SUNGAI TENANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PEMINDAHAN JEMBATAN UTAMA YANG LAMA		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	REHAP BERAT JEMBATAN GANTUNG		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		134.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB JEMBATAN GANTUNG LUMBARU DAN KOTO TUO		KOTO VII, TANJUNG, LUMBARU		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG BATANG OMBILIN.		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	RENOVASI JEMBATAN GANTUNG GUGUK KUNANGAN JORONG SIMAWIK		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		200.000.000	APBD II			
	REHAB JEMBATAN KOTO SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		100.000.000	APBD II			
	JEMBATAN GANTUNG OMBILIN SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAU TABEK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG DARI BIO-BIO KE TARATAK BETUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN GANTUNG AMBATAN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MINI KADAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JEMBATAN DI RANAH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		300.000.000	APBD II			
	REHAP JEMBATAN BELAKANG GUMARANG PASAR TANJUNG GADANG.		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN DARI PADANG RUMBIO KE KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN LANTAI JEMBATAN BIARO DARI KUMANIS KE TANJUNG BONAI AUR SELATAN		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	REHAB JEMBATAN BELAKANG GUMARANG PASAR GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JEMBATAN GANTUNG		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO BARU		0	APBD II			
	REHABILITASI JEMBATAN KALO LANCAI		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		100.000.000	APBD II			
	REHAB LANTAI JEMBATAN BARATOK JAMBU LIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		250.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN MINI JR.PANDAM		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN JORONG BATANG KERING		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	REHAB BERAT JEMBATAN PASAR PULASAN		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		1.500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG (KUBU, KUBANGAN DAN LUBUK ARAK		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN/REHAB JEMBATAN BANDAR GADANG		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	RENOVASI JEMBATAN GANTUNG GUGUK KUNANGAN JORONG SIMAWUIK		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIMAWIK		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	REHAB JEMBATAN GANTUNG TALUAK GADANG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG		270.000.000	APBD II			
	JEMBATAN MESJID ISTIQOMAH SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II			
	PERBAIKAN JEMBATAN DI RANAH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	REHAB JEMBATAN BATANG KARIANG - TIMPEH IV		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		2.000.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN JEMBATAN BATANG SARIAU SARUDUNG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, AIR SERIAU		0	APBD II			
	JEMBATAN MOBIL KE SEBERANG KOTO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JEMBATAN MUDIK MALIH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIK MALIH		0	APBD II			
1.03.20	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN		Kab. Sijunjung		8.148.366.000				0
1.03.20.01	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Tersedianya Panjang Jalan yang di Pelihara	Kab. Sijunjung	75 persen	8.148.366.000	APBD II			0
	SILOKEK - DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		89.423.000	APBD II			
	SIMARU - KOTO SALO		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		124.376.000	APBD II			
	TANJUNG AMPALU - PALALUAR		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		25.011.000	APBD II			
	LUBUAK TAROK - BULUH KASOK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, PADANG BASIKU		123.183.000	APBD II			
	JALAN VETERAN		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		6.639.000	APBD II			
	BUKIT GOMPAK - STOPLAT PALALUAR		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		62.768.000	APBD II			
	KAPALO KOTO - SIMPANG V PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		16.112.000	APBD II			
	PADANG LAWEH - TARATAK BETUNG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		55.565.000	APBD II			
	TIMBULUN PATAH - KAYU GADIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIS		38.011.000	APBD II			
	TANJUNG GADANG - PULASAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		95.676.000	APBD II			
	SITAMPUANG - KALUMPANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		50.222.000	APBD II			
	TARATAK BARU - LATANG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		43.097.000	APBD II			
	JALAN ADINEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		111.344.000	APBD II			
	BATU AJUNG - SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		65.250.000	APBD II			
	PEMATANG PANJANG - SIKALADI		LUBUAK TAROK, LALAN, SIKALADI		93.132.000	APBD II			
	JALAN JUANDA		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		30.262.000	APBD II			
	PALEH - BATU AJUNG		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		77.074.000	APBD II			
	TAMPARUNGO - SISAWAH		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SITONGEK SELATAN		215.923.000	APBD II			
	SIMPANG TANJUNG PAUH - BATU GANDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		22.335.000	APBD II			
	SIMPANG 4 PASAR - SIMPANG 3 PASAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		8.793.000	APBD II			
	PULASAN - SUNGAI KANDIS		TANJUNG GADANG, PULASAN, SUNGAI KANDI		35.468.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	MUARO - KABUN		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSA		138.621.000	APBD II			
	TARATAK BARU - BULUH KASOK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		98.901.000	APBD II			
	PULASAN - SIBAKUR		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		110.764.000	APBD II			
	IPUH - ADINEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		23.183.000	APBD II			
	MAKAM UMUM - JALAN ADINEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		19.688.000	APBD II			
	TAPIAN DIARO - KELOK LABAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		14.109.000	APBD II			
	LATANG - JAMBULIPO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		74.038.000	APBD II			
	PARU - SUNGAI BETUNG		SIJUNJUNG, PARU, BUKIK BUAR		189.305.000	APBD II			
	ADINEGORO - RANAH SIGADING		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		34.806.000	APBD II			
	GUGUAK PANDAM - KAMPUNG BERLIAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		6.113.000	APBD II			
	PAL 11 - KAMPUNG JUA		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		29.515.000	APBD II			
	SUNGAI TAMBANG - SUNGAI TANANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		118.394.000	APBD II			
	TANJUNG BONAI AUR - KOTO GADANG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, PAUH		44.898.000	APBD II			
	JALAN RASUNA SAID		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		6.631.000	APBD II			
	AIE ANGEK - BATU KUPIK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KULAMPI		81.836.000	APBD II			
	GANTING - PASAR JUMAT		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		28.528.000	APBD II			
	MUARO - SILOKEK		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSA		193.521.000	APBD II			
	SIMPANG TAKUNG HILIR - TAKUNG HILIR		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		13.897.000	APBD II			
	SIJUNJUNG - AIE ANGEK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TANAH BATO		225.517.000	APBD II			
	KOTO TUO - MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		132.286.000	APBD II			
	PUDAK - PADANG DOTO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		110.185.000	APBD II			
	LURAH JIRAK - TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		45.588.000	APBD II			
	PULASAN - PADANG LAWEH		TANJUNG GADANG, PULASAN, PADANG LAWEH		77.244.000	APBD II			
	KOTO BARU - SUNGAI NAPAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, SUNGAI NAPAR		45.252.000	APBD II			
	BANDAR MALINTANG - BATAS TANAH DATAR		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, KOTO PUNTIAN		73.914.000	APBD II			
	TANJUNG BONAI AUR - KOTO PANJANG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO TANGAH		44.928.000	APBD II			
	JALAN AGUS SALIM		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		22.530.000	APBD II			
	PARIT RANTANG - KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		87.695.000	APBD II			
	GANTING - PALAM		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		23.203.000	APBD II			
	TANAH BEDANTUNG - PUDAK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		21.820.000	APBD II			
	PENGEMBALIAN FUNGSI JALAN DAN JEMBATAN		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		2.761.407.000	APBD II			
	PASAR JUMAT - PERUMNAS SALASAH INDAH		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		19.692.000	APBD II			
	JALAN MEDAN NAN BAPANEH		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		24.041.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMATANG PANJANG - KANDANG BARU		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		65.459.000	APBD II			
	SIBAKUR - LANGKI		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		172.900.000	APBD II			
	KAMANG - KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		99.156.000	APBD II			
	BATANG KARING - BANJAR TENGAH		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		150.366.000	APBD II			
	AIE ANGEK - PARU		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KAPALO KOTO		179.195.000	APBD II			
	TANAH BATO - PUDAK		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TANAH BATO		82.365.000	APBD II			
	LALAN - BATU AJUNG		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		53.434.000	APBD II			
	MANGGANTI - DURIAN GADANG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		167.476.000	APBD II			
	SISAWAH - PADANG LAWEH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		92.109.000	APBD II			
	TIMPEH V - TIMPEH VI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		110.421.000	APBD II			
	TANJUNG BERINGIN - GUGUK		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		31.282.000	APBD II			
	KUMANIS - BATAS TANAH DATAR		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG GADANG UTARA		38.129.000	APBD II			
	MUARO IPUH - PALANGKI		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		111.790.000	APBD II			
	GUGUAK DADOK - PASAR SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		45.367.000	APBD II			
	PANDAM - BATU KUPIK		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		121.941.000	APBD II			
	KOTO TUO - LADANG CENGKEH		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		17.412.000	APBD II			
	SINYAMU - TANDIKEK		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		91.603.000	APBD II			
	PAL 10 - PERUMNAS GAMBOK		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		93.549.000	APBD II			
	PEMATANG PANJANG - SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		66.230.000	APBD II			
	SITAMPUANG - TAPIAN NANTO BATAS MUARO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN NANTO		26.468.000	APBD II			
1.03.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya		Kab. Sijunjung		42.809.800.000				0
1.03.21.01	Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi alur sungai	Persentase Panjang sungai yang dinormalisasi	Kab. Sijunjung	2500 Meter	31.109.800.000	APBD II			0
	BRONJONG DARI LUBUK LAUNG KE JEMBATAN GANTUNG		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		300.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG PALANGKI (PENGERUKAN DAN BATU BRONJONG PADA TITITIK TERTENTU)		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		0	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI JR SUNGAI TAMBANG IV		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		210.000.000	APBD II			
	NORMALISASI BATANG SARIAU		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIPUAH		300.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG PALANGKI DI NAGARI MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		2.000.000.000	APBD II/DAK			
	DAM NORMALISASI SUNGAI BATANG KULAMPI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		400.000.000	APBD II			
	NORMALISASI BATANG SARIYAU		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIPUAH		300.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI BATANG SALOSA		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSA		100.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		175.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI SIAUR		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, TIGO KORONG		150.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMASANGAN BATU GERONJONG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		0	APBD II/DAK			
	PEMASANGAN BATU GERONJONG DI BATANG LASI JR. PAMUATAN TIMUR		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG KULAMPAI		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		3.500.000.000	APBD II/DAK			
	BRONJONG MUARO SUNGAI BATANG SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		175.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI TAMBANG IV		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		450.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG LANGKI		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		500.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG LASI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		1.000.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BELAKANG POLSEK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		150.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		3.500.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SENTOSA		50.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM PENAHAN SUNGAI		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		500.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI JORONG KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		3.500.000.000	APBD II			
	BRONJONG/TANGGUL SUNGAI BATANG TAKUANG JR. KLILIRAN JAO.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KLILIRAN JAO		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI BATANG SUKAM		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		500.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SALURAN AIR PEMBUANGAN		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN BRONJONG MESJID NURUL YAKIN LIAMBANG		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI TIANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		200.000.000	APBD II			
	LANJUTAN NORMALISASI BATANG SUKAM KE SURAU SIMAUNG (JORONG TAPIAN DIARO)		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		1.150.000.000	APBD II			
	SAMBUNGAN DAM BATANG LANSEK		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		75.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG LAWEH		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		200.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG PALANGKI DI MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI BATANG ITANG		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		200.000.000	APBD II			
	DAM/ BATU BERONJONG DI LURAH		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN / REHAP IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG PALANGKI DI MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		2.000.000.000	APBD II			
	NORMALISASI BATANG SUKAM (BINTUNGAN)		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PUDAK		1.000.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG KULAMPI		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		199.800.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		200.000.000	APBD II			
	BRONJONG BATANG LASI		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		300.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN BRONJONG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		250.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENDAMAN BATANG MANUI (SAMPING MASJID NURUL QADSI JORONG CALAU)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		400.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI PADANG LENGKUEH		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		2.000.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG GOSAN		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN GUGUK BULEK		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI BATANG SUMPUR		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, KAMPUNG BARU		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN DAM SUNGAI BATANG TAKUNG -		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		400.000.000	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG TAKUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BUKIT SABALAH		1.500.000.000	APBD II			
	DAM PARIT SUNGAI PINGPING		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	PEMBUATAN DAM SUNGAI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG TAKUNG		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		200.000.000	APBD II			
	DAM/ BATU BERONJONG DI BELAKANG KANTOR WALI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II/DAK			
	PEMASANGAN BATU BRONJONG TEBING SUNGAI DI BAWAH KANTOR WALI NAGARI MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		2.000.000.000	APBD II/DAK			
	DAM PINGGIR SUNGAI KETAPING BATU		KAMANG BARU, SIAUR, KOTO TANGAH		125.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GERONJONG DI LUBUK PUJAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI BATANG PALANGKI DI MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	PENGENDALIN BANJIR ATAU GRONJONG LUBUK BATAPUAK NAGARI UNGGAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		500.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN DAM PENAHAN JALAN LUBUK MUTAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	NORMALISASI SUNGAI TAMBANG I		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		450.000.000	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI TAMBANG.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI BELAKANG BPD SUNGAI TAMBANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
	DAM NORMALISASI SUNGAI BATANG KULAMPI		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI TAMBANG.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		0	APBD II			
	NORMALISASI SUNGAI JORONG KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II			
1.03.21.02	Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang sudah dibangun	Tersedianya cakupan luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung	60 persen	1.500.000.000	APBD II			0
	PENGEMBALIAN FUNGSI JARINGAN IRIGASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PANGKA LABUAH		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI PERPIPAAN		SIJUNJUNG, PARU, BATU RANJAU		0	APBD II/DAK			
	PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		1.000.000.000	APBD II			
1.03.21.03	Kegiatan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung	60 persen	10.200.000.000	APBD II			0
	BATANG LANSEK SL		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, KOTO		850.000.000	APBD II			
	REHAB IRIGASI CANIAGO		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		0	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN IRIGASI MUDI AK SIMPANG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, PINCURAN TUJUH		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI BATANG LOWE		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II			
	REHAB IRIGASI EKORBANDAR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II/DAK			
	PEMELIHARAAN SALURAN IRIGASI BATANG TAYE		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRAINASE SUNGAI SAMPIR (PEMASANGAN BATU DAN PLASTERAN)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHAP IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	AMPANG TABEK SURAU		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		700.000.000	APBD II			
	SUNGAI MANI		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		750.000.000	APBD II			
	PENGAIRAN / TALI BANDAR BENDUNGAN BATANG PALI JRG. KILIRAN JAO – JRG. SUNGAI SARIK.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		0	APBD II/DAK			
	PANGKAL JALAN		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		800.000.000	APBD II			
	MUDIK SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	BATANG TELOR		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		750.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN SALURAN IRIGASI LUBUK ROSAM		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN IRIGASI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	BATU KAPUR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		800.000.000	APBD II			
	SAWAH NONGAH		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, UJUNG KOTO		0	APBD II			
	IRIGASI BATANG LOWE		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	REHAP SALURAN IRIGASI SITUGAR		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, LUBUAK BATAPUAK UNGGAN		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI SUNGAI BULUH KASOK		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		0	APBD II/DAK			
	SAWAH LAWAS		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN IRIGASI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	SITUGAR I DAN II		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		0	APBD II			
	BANDAR GADANG KINKIN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II			
	PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN IRIGASI BANDAR PULAI		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI SAWAH MUDI AK PITI		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		0	APBD II/DAK			
	BELUM ADANYA BENDUNGAN UNTUK MENAHAN AIR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI LUBUK KARAK		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI SAWAH SILAYIR		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II/DAK			
	SALURAN IRIGASI DAN TALI BANDAR MUDI AK SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN IRIGASI LUBUK BATU RANJAU (PRIORITAS)		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	LUBUAK PARAKU		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PERMANEN TALI BANDAR NAN PANJANG		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO MUDIK		0	APBD II/DAK			
	SUNGAI RAMBUTAN		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		0	APBD II			
	SAMBUNGAN IRIGASI KAPALO AIE		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN GUGUK BULEK		0	APBD II/DAK			
	MUDIAK KAKO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		750.000.000	APBD II			
	REHAP TOTAL IRIGASI PADANG SIANIK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, PADANG DOTO		0	APBD II/DAK			
	LUBUAK HIJAU		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	LURAH BATU KUDO		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		800.000.000	APBD II			
	BATANG TALANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, KOTO BARU		0	APBD II			
	SUNGAI KUNIK		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, BANJAR PEMATANG		0	APBD II			
	PEMBUATAN IRIGASI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
	IRIGASI LUBUK BATU RANJAU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II/DAK			
	REHAB SALURAN IRIGASI DI TARARAK		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		0	APBD II/DAK			
	BATU HAMPAR I		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		1.000.000.000	APBD II			
	BATANG TALAO		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG RAYA		1.000.000.000	APBD II			
1.03.22	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		Kab. Sijunjung		28.585.000.000				0
1.03.22.01	Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Pengambilan Saluran Pembawa	Tersedianya persentase layanan air baku yang dikelola/dibangun	Kab. Sijunjung	1500 Meter	14.080.000.000	APBD II			0
	SAWAH TARATAK		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		1.000.000.000	APBD II			
	SUNGAI KUNIK		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		100.000.000	APBD II			
	LANJUTAN DRAINASE SUNGAI TIGO		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		500.000.000	APBD II			
	REHAB IRIGASI EKOR BANDAR		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		120.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TALI BANDAR LUBUK MANTU LOLO		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO TANGAH		150.000.000	APBD II			
	SAMBUNGAN IRIGASI KAPALO AIE		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN GUGUK BULEK		150.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN DAN PEMBUATAN SALURAN IRIGASI BANDAR PULAI		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II/DAK			
	TALI BANDAR D.I BATU GADANG		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		0	APBD II			
	LOSUANG BATU		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		0	APBD II			
	TAMPAYAK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		0	APBD II			
	SITUGAR I DAN II		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, KOTO UNGGAN		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE SUNGAI SAMPIR (PEMASANGAN BATU DAN PLASTERAN)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		300.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN / REHAB IRIGASI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN IRIGASI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		2.100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN IRIGASI PANGKA LABUAH		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		1.500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN IRIGASI LUBUK BATU RANJAU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		800.000.000	APBD II			
	LURAH BATU KUDO		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	BELUM ADANYA BENDUNGAN UNTUK MENAHAN AIR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		2.000.000.000	APBD II			
	DAMAR - DAMAR		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOMAN KOCIK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN IRIGASI LUBUK KARAK		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		1.500.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN / REHABILITASI IRIGASI DAN EMBUNG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		410.000.000	APBD II			
	PENGAIRAN / TALI BANDAR BENDAUNGAN BATANG PALI JORONG KILIRAN JAO - JORONG SUNGAI SIANIK		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		350.000.000	APBD II			
	PADANG SIANIK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SUNGAI DUO		0	APBD II			
	BATANG SIANIK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SUNGAI DUO		500.000.000	APBD II			
1.03.22.02	Integrated Participatory Development And Management Irrigation (IPDMIP)	Tersedianya persentase air baku yang dikelola/dibangun	Kab. Sijunjung	1500 Meter	14.505.000.000	APBD II			0
	D.I SUNGAI PANDAN		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO HILIR		562.500.000	APBD II			
	D.I BATANG LANSEK TL		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		487.500.000	APBD II			
	D.I BATANG GOZAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		725.000.000	APBD II			
	D.I LUBUK MANDALING		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		675.000.000	APBD II			
	D.I BATANG SUDU		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		625.000.000	APBD II			
	SUNGAI BELIMBING (IPDMIP)		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		120.000.000	APBD II			
	BANDAR XI LURAH (IPDMIP)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		120.000.000	APBD II			
	MUARO SOMO (IPDMIP)		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		120.000.000	APBD II			
	D.I BATANG GOBAH		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SUNGAI AMPANG		575.000.000	APBD II			
	D.I BATANG SAMEK		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		900.000.000	APBD II			
	D.I BATANG LANGO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		587.500.000	APBD II			
	BATANG SUO (IPDMIP)		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		120.000.000	APBD II			
	D.I BATANG GOZAN II		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		625.000.000	APBD II			
	BATANG SARIAU (IPDMIP)		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, AIR SERIAU		120.000.000	APBD II			
	AIE AMO (IPDMIP)		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		120.000.000	APBD II			
	SUNGAI TALANG (IPDMIP)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		120.000.000	APBD II			
	D.I PINCURAN TUJUH		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		487.500.000	APBD II			
	D.I BATANG KUMPAI		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		762.500.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	D.I BATANG LAWAS		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		687.500.000	APBD II			
	BATANG LAWAS KUPITAN (IPDMIP)		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		120.000.000	APBD II			
	BATANG LASI (IPDMIP)		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		120.000.000	APBD II			
	D.I BATU KAPUR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		712.500.000	APBD II			
	D.I LUBUK RIMBO		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		475.000.000	APBD II			
	D.I TABEK GADANG		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		537.500.000	APBD II			
	D.I SAWAH MANANGAH		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		500.000.000	APBD II			
	D.I MUDIK AIR		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		650.000.000	APBD II			
	D.I BATU HAMPAR I		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		587.500.000	APBD II			
	D.I MUDIK PARU		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		562.500.000	APBD II			
	D.I SUNGAI LANGKOK		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		562.500.000	APBD II			
	D.I LUBUK RUMBIO		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		487.500.000	APBD II			
	D.I BATANG TALAOK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, PADANG BASIKU		650.000.000	APBD II			
1.03.23	Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi		Kab. Sijunjung		500.000.000				0
1.03.23.01	Sosialisasi, pembinaan dan survey usaha jasa konstruksi	1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Jasa Kontruksi 2. Terlaksananya jumlah rekomendasi jasa kontruksi 3. Terlaksananya Bimtek dan Pelatihan jasa kontruksi 4. Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan untuk jasa kontruksi	Kab. Sijunjung	60 persen	500.000.000	APBD II			0
1.03.25	Pembangunan Gedung Kantor	• Persentase gedung kantor Pemda yang representatif	Kab. Sijunjung		19.994.136.000				4.500.000.000.000
1.03.25.01	Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya persentase gedung kantor Pemda yang presentative	Kab.Sijunjung	24 Paket	19.744.136.000	APBD II		1	4.500.000.000.000
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA NAGARI TANJUNG GADANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	LANJUTAN KANTOR CAMAT KAMANG BARU		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II			
	PENGAWASAN APEMBANGUNAN KANTOR BERSAMA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN NAGARI DI JORONG GUGUAK TINGGI		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN KAMANG SEJAHTERA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PERENCANAAN PAGAR DAN GAPURA KANTOR CAMAT KUPITAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		45.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN LANJUTAN KANTOR CAMAT KAMANG BARU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		77.200.000	APBD II			
	PERENCANAAN TEMPAT PARKIR DAN DAM TEBING HALL PB HARAPAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PAVING BLOCK DAN PENGECATAN GEDUNG SERBAGUNA		KOTO VII, LIMO KOTO, TANJUNG AMPALU		150.000.000	APBD II			
	BIAYA UMUM		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		450.000.000	APBD II			
	REHAB GEDUNG UDKP		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		405.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BERSAMA		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBUATAN PINTU GERBANG SIMPANG KAMPUNG BARU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA NAGARI TANJUNG GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	REHAB GEDUNG UDKP		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TUGU SIMPANG 3		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		45.275.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN UMUM		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	BIAYA PERENCANAAN 2021- 2022		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG LPTQ AMIRUL MUKMINIM JORONG I A3 SUNGAI TAMBANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BERSAMA		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	PERENCANAAN REHAB GEDUNG UDKP		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		65.048.000	APBD II			
	LANDSCAPE KANTOR BUPATI		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		1.681.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN KAMANG SEJAHTERA		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		0	APBD II			
	PEMBUATAN PINTU GERBANG SIMPANG KAMPUNG BARU		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BARU		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERTEMUAN NAGARI DI JORONG GUGUAK TINGGI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PENGAWASAN REHAB GEDUNG UDKP		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		38.904.000	APBD II			
	PENGAWASAN LANDSCAPE KANTOR BAPPEDA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		115.520.000	APBD II			
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN KANTOR BERSAMA		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		42.471.000	APBD II			
	TEMPAT PARKIR DAN DAM TEBING HALL PB HARAPAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	PAGAR DAN GAPURA KANTOR CAMAT KUPITAN		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		200.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN LANDSCAPE KANTOR BUPATI		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		118.443.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TUGU SIMPANG 3		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		200.000.000	APBD II			
	LANDSCAPE KANTOR BAPPEDA		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		1.600.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN GAPURA & PAGAR KANTOR CAMAT IV NAGARI.		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN PERTEMUAN UMUM		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		12.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN KANTOR BERSAMA DI KEC,KAMANG BARU		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG LPTQ AMIRUL MUKMINIM JORONG I A3 SUNGAI TAMBANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN MENARA MESJID AN NUR JORONG MUARO GAMBOK		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	LANJUTAN KANTOR CAMAT KAMANG BARU		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		1.000.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA NAGARI LUBUK TARANTANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		0	APBD II			
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA NAGARI LUBUK TARANTANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN MESJID RAYA KAMANG BARU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
	PERENCANAAN KANTOR PUPR DAN PERKIM LH		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		500.000.000	APBD II			
	PERENCANAAN PAVING BLOCK DAN PENGECATAN GEDUNG SERBAGUNA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		45.275.000	APBD II			
	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR POLRES SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		815.000.000	APBD II			
1.03.25.02	Penunjang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (IMG, TABG, SLF,dll)	Terlaksananya kegiatan penunjang penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kab. Sijunjung	1 Kegiatan	250.000.000	APBD II			0
1.23	Penataan Ruang		Kab. Sijunjung		20.633.040.000				100.000.000.000
1.23.16	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Kab. Sijunjung		150.000.000				0
1.23.16.01	Pengawasan pemanfaatan ruang	Terlaksananya Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kab. Sijunjung	60 persen	150.000.000	APBD II			0
1.23.17	Program Penyelesaian konflik konflik Pertanahan		Kab. Sijunjung		4.000.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.23.17.01	Fasilitasi Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus kasus tanah	Terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum	Kab. Sijunjung	50 persen	4.000.000.000	APBD II			0
1.23.18	Pengembangan Utilitas Perkotaan	• Panjang akses pejalan kaki dan disabilitas, • Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Sijunjung		16.483.040.000				100.000.000.000
1.23.18.01	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya panjang akses pejalan kaki dan disabilitas luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Sijunjung	7 Lokasi	16.483.040.000	APBD II		1	100.000.000.000
	PENGAWASAN LANDSCAPE KANTOR DPRD		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		320.660.000	APBD II			
	LANJUTAN RTH LOGAS		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		3.000.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN PENATAAN BATAS KABUPATEN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		87.740.000	APBD II			
	PERENCANAAN LANDSCAPE KANTOR DPRD		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN LANJUTAN RTH LOGAS		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		187.740.000	APBD II			
	LANDSCAPE KANTOR DPRD		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		5.000.000.000	APBD II			
	RTP LANSEK MANIH		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		5.000.000.000	APBD II			
	PERENCANAAN REST AREA KUPITAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		200.000.000	APBD II			
	PENGAWASAN RTP LANSEK MANIH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		270.500.000	APBD II			
	PENATAAN BATAS KABUPATEN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		1.000.000.000	APBD II			
	PERENCANAAN RTP LANSEK MANIH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		464.000.000	APBD II			
	BIAYA PERENCANAAN 2021- 2022		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	PERENCANAAN PENATAAN BATAS KABUPATEN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		101.200.000	APBD II			
	PERENCANAAN LANJUTAN RTH LOGAS		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		301.200.000	APBD II			
	BIAYA UMUM		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		350.000.000	APBD II			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		405.000.000				0
1.23.15	Program Perencanaan Tata Ruang	• Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Kab. Sijunjung		380.000.000				0
1.23.15.01	Survey dan pemetaan	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Sijunjung	1 Ls	150.000.000	APBD II			0
1.23.15.02	Penyusunan kebijakan RTRK, RDTRK dan RTBL	Meningkatnya penyelenggaraan Penataan Ruang	Kab. Sijunjung	1 Perda	230.000.000	APBD II			0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
2.09	Kepegawaian dan Latihan		Kab. Sijunjung		85.000.000				0
2.09.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Non Aktif)	• Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Kab. Sijunjung		85.000.000				0
2.09.16.15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (NA)	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai tupoksi	Kab. Sijunjung	85 persen	85.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		3.855.279.000				3.898.138.113
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		2.186.779.000				1.966.779.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	85 persen	920.000.000	APBD II			0
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya Pelayanan Jasa Perkantoran	Muaro Sijunjung	85 persen	1.266.779.000	APBD II		90	1.966.779.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		1.548.500.000				1.931.359.113
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana kantor bagi Aparatur	Kab.Sijunjung	85 persen	1.548.500.000	APBD II		90	1.931.359.113
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		120.000.000				0
9.99.06.01	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Kab. Sijunjung	85 persen	60.000.000	APBD II			0
9.99.06.12	Manajemen Aset	Tersedianya persentase Informasi Aset Dinas	Kab. Sijunjung	85 persen	60.000.000	APBD II			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
			Kab. Sijunjung						
			Kab. Sijunjung						
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
		TOTAL PAGU			38.765.627.000				54.403.425.000
1.04	Perumahan Rakyat				13.262.500.000				17.300.000.000
1.04.17	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	• Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	Kab. Sijunjung		500.000.000				700.000.000
1.04.17.01	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan permukiman yang tersusun	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	500.000.000	APBD II		2	700.000.000
1.04.18	Program Lingkungan Sehat Perumahan	• Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	Kab. Sijunjung		10.562.500.000				14.200.000.000
1.04.18.01	Perumahan dan Permukiman	Panjang Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Terbangun	Kab. Sijunjung	14 Paket	3.400.000.000	APBD II		8	5.100.000.000
	MOHON BANTUAN COR BETON JALAN BUKIT LINGKARAN SIBISIR.		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, SIBISIR		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN CONGKIANG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		0	APBD II			
	RIGID BETON SUNGAI LINTAN JORONG BATU GONDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		200.000.000	APBD II			
	JALAN LINGKAR NAGARI MTSN KE KUD SIJUNJUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN PULAU BERAMBAL		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAL		200.000.000	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON PASAR TJ.GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		0	APBD II			
	RIGID BETON JALUR DUA KAMANG SEJAHTERAH		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN SMP 45 JR RANTAU JAMBU		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LUNDANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PEMBUATAN GAPURA		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON SD IT		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN MENUJU SD 4 PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LINGKAR PASAR JUM'AT		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		400.000.000	APBD II			
	JALAN LINGKAR PASAR NAGARI MENUJU JALAN TITI		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO MUDIK		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LUBUAK KOCIAK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON KE MAKAM		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II			
	RIGID BETON KARYA DARMA DUA		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		400.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LINGKAR PERUMNAS IPUH		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		400.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON JALAN MAKAM / TOMPAT		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALUR 2 KAMANG SEJAHTERA		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON LOWE		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO TUO		0	APBD II			
	BEDAH RUMAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON JALAN PEMUKIMAN		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON DUSUN KOTO TANGAH		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO TONGAH		200.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RIGID BETON JALAN BUKIT LINGKARAN SIBISIR.		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, SIBISIR		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN KE PUSKESMAS SUMPUR KUDUS		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		200.000.000	APBD II			
1.04.18.02	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Kab. Sijunjung	668 Unit	7.162.500.000	APBD II		668	9.100.000.000
	REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		262.500.000	APBD II/DAK			
	BEDAH RUMA MASYARAKAT KURANG MAMPU JORONG RANAH PINAGAO		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		525.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN PERUMAHAN TIDAK LAYAK HUNI.		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		600.000.000	APBD II			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		175.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI		KUPTAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		350.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		175.000.000	APBD II/DAK			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TIAU		0	APBD II			
	BANTUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI JORONG KOTO TANGAH		KAMANG BARU, SIAUR, KOTO TANGAH		437.500.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		525.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		0	APBD II			
	BANTUAN PERUMAHAN TIDAK LAYAK HUNI.		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		0	APBD II/DAK			
	REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		350.000.000	APBD II/DAK			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, AIA AMO, LUBUK KAPIEK		700.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUGARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		175.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		0	APBD II			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		262.500.000	APBD II/DAK			
	REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		1.050.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB RUMAH TAK LAYAK HUNI		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		350.000.000	APBD II/DAK			
	REHAP RUMAH TAK LAYAK HUNI		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		175.000.000	APBD II/DAK			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, BATANG KINKIN		262.500.000	APBD II/DAK			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KOTO VII, TANJUNG, UJUNG PADANG		0	APBD II			
	PENGADAAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		0	APBD II			
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		262.500.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		175.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		175.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		0	APBD II			
	BANTUAN RUMAH TAK LAYAK HUNI		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		175.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN PERUMAHAN TIDAK LAYAK HUNI.		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
1.04.20	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	• Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	Kab. Sijunjung		2.200.000.000				2.400.000.000
1.04.20.01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Kab. Sijunjung	11 Paket	2.200.000.000	APBD II		12	2.400.000.000
	DRAINASE SMPN 19 SIJUNJUNG.		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	REHAB, PELEBARAN DAN DRAINASE JALAN KABUPATEN DAN JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		0	APBD II			
	DRAINASE BATU LICIN KE JEMBATAN GANTUNG		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN JALAN NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PENGADAAN TPA NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	DRAINASE DEPAN RUMAH PAK AMIN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	BANTUAN MAMPERBAIKI SALURAN AIR (SELOKAN) SEBELAH MUSOLLA.		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	PEMBUATAN SALURAN BANDAR		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAL		0	APBD II/DAK			
	DRAINASE BELAKANG SDN 10		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	DRAINASE BANDA KOPAK		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		200.000.000	APBD II			
	DARINASE JL. KILIRAN JAO DUSUN TINGGI.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
	DRAINASE JALAN MARAPALAM BATANG KALOKO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		200.000.000	APBD II			
	BANTUAN MAMPERBAIKI SALURAN AIR (SELOKAN)		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	DRAINASE SDN 04 SIJUNJUNG.		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE LURAH MONGGODO JORONG SILABAU		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, SILABAU		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN/REHAP/ PENINGKATAN DRAINESE NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON DAN DRAINASE JALAN SIMPANG TUGU KE KANDANG AMPEK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		200.000.000	APBD II			
	DRAINASE PEMUKIMAN JORONG BANCAH SIBAKUR		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, BANCAH SIBAKUR		200.000.000	APBD II			
	DRAINASE DAN RIGHT MENUJU PUSTU KE SD 4		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN/REHAP/ PENINGKATAN DRAINESE NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN JALAN NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE JALAN BUNDO KANDUANG		SUMPUR KUDUS, KUMANIS, TANJUNG ALAM		200.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN DRAINASE JALAN		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SALURAN DRAINASE KOTO LUBUK CUPAK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP/ PENINGKATAN DRAINESE NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	DRAINASE SIMPANG LIMA KE PILIANG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO TANGAH		200.000.000	APBD II			
	DRAINASE SIMPANG PULAI.		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DARINASE JALAN KABUPATEN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		0	APBD II			
	DRAINASE DEPAN SMA II SIJUNJUNG JORONG TIMPEH V KURNIA KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		0	APBD II			
	DRAINASE PINGGIR SD NAGARI SIAUR		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		200.000.000	APBD II			
	DRAINASE JALAN PASAR KOTO BARU		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		200.000.000	APBD II			
1.24	Pemukiman dan Lingkungan Hidup		Kab. Sijunjung		22.412.137.000				25.407.445.000
1.24.17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	• Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	Kab. Sijunjung		950.000.000				1.400.000.000
1.24.17.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	1. Jumlah Sosialisasi / Bimtek / Kampanye 2. Jumlah Bank Sampah 3. Laporan Periodik Volume Sampah	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	700.000.000	APBD II		8	750.000.000
	BIMTEK		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		70.000.000	APBD II			
	SOSIALISASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		115.500.000	APBD II			
	PERENCANAAN BANK SAMPAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
	KAMPANYE		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		21.000.000	APBD II			
	OPERASIONAL BANK SAMPAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	LAPORAN PERIODIK VOLUME SAMPAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
	LAPORAN JAKSTRADA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	OPERASIONAL KEGIATAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		71.700.000	APBD II			
	PENGADAAN BANK SAMPAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		161.800.000	APBD II			
1.24.17.05	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Kab. Sijunjung	1 Tahun	250.000.000	APBD II		1	650.000.000
	CONTAINER SAMPAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TEMPAT PEMBUANGAN LIMBAH		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN BANK SAMPAH		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PENGADAAN TONG SAMPAH NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	PEMBUATAN BENTOR SAMPAH		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	BANTUAN ADANYA TONG SAMPAH DISETIAP RUMAH MASYARAKAT		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH NAGARI		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	BECAK MOTOR		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		50.000.000	APBD II			
	WADAH SAMPAH TERPILAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		160.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN PENGELOLAHAN SAMPAH		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		0	APBD II			
	PEMBUATAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II			
	PENGADAAN TPA NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.24.18	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	• Indeks kualitas lingkungan hidup	Kab. Sijunjung		3.075.031.000				3.502.445.000
1.24.18.07	Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup	1. Terlaksananya Pengambilan dan Pengujian Air Sungai, Air Hujan, Udara, Limbah dan Tanah 2. Terlaksananya Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Sijunjung	1 Tahun	900.000.000	APBD II		1	925.000.000
	PEMANTAUAN KUALITAS TANAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		28.000.000	APBD II			
	BELANJA BAHAN MATERIAL PRAKTEK		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		15.000.000	APBD II			
	PEMBELIAN BAHAN KIMIA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		180.000.000	APBD II			
	KUALITAS LIMBAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		15.000.000	APBD II			
	SOSIALISASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		7.000.000	APBD II			
	CROSSCHECK SAMPEL KE PADANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		40.000.000	APBD II			
	PEMANTAUAN KUALITAS UDARA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		18.000.000	APBD II			
	KAMPANYE		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		3.000.000	APBD II			
	AIR EMBUNG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		8.000.000	APBD II			
	PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR SUNGAI, EMBUNG, AIR HUJAN, UDARA, LIMBAH DAN TANAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		50.000.000	APBD II			
	PEMBELIAN PERALATAN LABOR		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		190.000.000	APBD II			
	BIMTEK		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		110.000.000	APBD II			
	AIR HUJAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
	BELANJA SERTIFIKASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		161.000.000	APBD II			
	PEMANTAUAN KUALITAS AIR SUNGAI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		45.000.000	APBD II			
1.24.18.05	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan MIH		Kab. Sijunjung	0 persen	0	APBD II		0	0
1.24.18.03	Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Pemegang Izin Lingkungan Yang Difasilitasi	Kab. Sijunjung	1 Tahun	200.000.000	APBD II		50	202.445.000
	FASILITASI PENGADUAN DARI MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		21.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		119.000.000	APBD II			
	BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		60.000.000	APBD II			
1.24.18.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Program Adiwiyata	Kab. Sijunjung	1 Tahun	985.000.000	APBD II		1	1.000.000.000
	TAMAN SEKOLAH ADIWIYATA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		505.800.000	APBD II			
	PEMBINAAN 14 SEKOLAH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		230.300.000	APBD II			
	BIMTEK		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		35.000.000	APBD II			
	PENGADAAN GREEN HOUSE		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		213.900.000	APBD II			
1.24.18.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Perumahan Bersih, Nagari Bersih, Perkampungan Adat Bersih	Kab. Sijunjung	100 persen	425.031.000	APBD II		100	450.000.000
	PENILAIAN PERUMAHAN BERSIH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		20.000.000	APBD II			
	SOSIALISASI ADIPURA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		20.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN DAN PENILAIAN ADIPURA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		295.031.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENILAIAN NAGARI BERSIH		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		70.000.000	APBD II			
	PENILAIAN PERKAMPUNGAN ADAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		20.000.000	APBD II			
1.24.18.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kelompok sasaran yang di bina	Kab. Sijunjung	32 Kali	65.000.000	APBD II		35	85.000.000
	SOSIALISASI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		16.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN KE FASYANKES (15 FASYANKES)		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		49.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN BAK PENAMPUNGAN LIMBAH TAHU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		0	APBD II			
1.24.18.08	Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	500.000.000	APBD II		2	840.000.000
	PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD 2020 SERTA DOKUMEN IKLH 2020		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
	KLHS RPJMD		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		400.000.000	APBD II			
1.24.20	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	• Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	Kab. Sijunjung		300.000.000				950.000.000
1.24.20.03	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Pembinaan kampung Iklim dan Kalpataru, Sosialisasi, Penyusunan video dan Profil, Penilaian Proklamasi dan Kalpataru	Kab. Sijunjung	1 Tahun	300.000.000	APBD II		4	950.000.000
	PENYUSUNAN VIDEO DAN PROFIL		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
	FASILITASI TIM PENILAI PROKLIM DAN KALPATARU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		35.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN KAMPUNG IKLIM DAN KALPATARU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		205.000.000	APBD II			
	SOSIALISAI		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
1.24.21	Pengembangan Pengelolaan Air Minum	• Cakupan akses air minum aman masyarakat	Kab. Sijunjung		1.230.000.000				2.500.000.000
1.24.21.02	Pengembangan Sistem Distribusi air Minum	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Kab. Sijunjung	1 Tahun	450.000.000	APBD II		5	1.000.000.000
	PEMINDAHAN BAK IKK PDAM LUBUK TAROK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		300.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN SISTIM DISTRIBUSI AIR MINUM		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN JARINGAN PIPA AIR BERSIH		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II/DAK			
1.24.21.01	Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi desa rawan air	Jumlah DED yang disusun	Kab. Sijunjung	1 Tahun	210.000.000	APBD II		1	250.000.000
	PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BAGI DESA RAWAN AIR		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN SUMUR BOR AIR BERSIH		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		60.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN JARINGAN PIPA AIR BERSIH		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II/DAK			
	BANTUAN POMPA AIR.		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
1.24.21.03	Penyediaan air minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Kab. Sijunjung	1 Tahun	570.000.000	APBD II		5	1.250.000.000
	PENGADAAN ,PEMBUATAN AIR BERSIH		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		0	APBD II			
	PENAMBAHAN SUMBER AIR BERSIH		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		0	APBD II			
	AIR BERSIH		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		0	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN JARINGAN SARANA AIR BERSIH		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		300.000.000	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN JARINGAN PIPA AIR BERSIH		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DAN PENGGANTIAN PIPA AIR BERSIH PAMSIMAS		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		120.000.000	APBD II/DAK			
	PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
1.24.22	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah		Kab. Sijunjung		2.580.000.000				3.235.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.24.22.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Limbah	Jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Kab. Sijunjung	17 Paket	500.000.000	APBD II		25	735.000.000
	DRAINASE JALAN KE RANAH PALAM		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN WC UMUM DEKAT SDN 24 TANJUNG LOLO		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, BATANG DIKEK		0	APBD II			
	SARANA KOMUNAL DI SEKOLAH ADIWIYATA DAN MCK KOMUNAL		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		500.000.000	APBD II			
1.24.22.02	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampungan	Kab. Sijunjung	1 Tahun	2.080.000.000	APBD II		1	2.500.000.000
	PEMBANGUNAN WC UMUM NAGARI		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN MCK		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		100.000.000	APBD II/DAK			
	SANITASI MASYARAKAT (JAMBA KELUARGA)		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO TANGAH		250.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN WC KUMUNAL		TANJUNG GADANG, LANGKI, LIAMBANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN MUSHALLAH DAN MCK PASAR NAGARI		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, BUKIK TUJUH		300.000.000	APBD II/DAK			
	MCK/WC MESJID LAMA JORONG KOTO RANAH.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN WC BAGI RUMAH TANGGA YANG BELUM PUNYA WC UNTUK MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU DI NAGAR		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN MCK		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		450.000.000	APBD II/DAK			
	MCK/WC MAKAM KERAMAT TOMPAT KAPALO KOTO JRG. LAMO.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		0	APBD II			
	PEMBUATAN WC KUMUNAL		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		180.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBUATAN C KUMUNAL		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		150.000.000	APBD II/DAK			
	SANITASI MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		100.000.000	APBD II			
1.24.26	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERDESAAN	• Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	Kab. Sijunjung		8.527.106.000				8.000.000.000
1.24.26.01	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pedesaan	Jumlah PSU di kawasan permukiman perdesaan	Kab. Sijunjung	7 KM/m	8.527.106.000	APBD II		7	8.000.000.000
	RIGID BETON JALAN KE LURAH CERKE PINCURAN TUJUAH		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, PINCURAN VII		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN DEPAN MESJID AL IKHLAS SUKOREJO		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN JORONG MALAYU		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO HILIR		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP/ PENGINEK JALAN MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	RIGIT JALAN DARI RANAH PAUH KE PULAU BOTUANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LINGKAR KOPI TIMBULUN PATAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II			
	RIGID BETON T. LAPANG KE SUKORMIA		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN RUMBAI		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON MUDIK MULAN.		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN SDN 20 PADANG LAWEH KE BUKIT PINCURAN		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		750.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI SOLOK MANGI KE RANAH		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERBAIKAN JALAN JORONG DALAM NAGARI		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		300.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PERBAIKAN JALAN GUGUK MURAI SITAMPUANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LINGKAR		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TIAU		0	APBD II			
	PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA JALAN KE MUSOLLA		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN RIGID JR SILUKAH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	RIGIT BETON POROS TAHAP 2		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIJIT BETON TIMPEH 7		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II/DAK			
	RIGID BETON JALAN LINGKUNGAN		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		600.000.000	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGIT BETON KOMANG PATAH KE BUKIT KOMANG.		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN /REHAP/PENGERASAN JALAN LINGKAR NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II			
	RIGIT BETON SOLOK NONAM S/D PONTIEN		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	RIGIT JALAN LINGKAR TIMBULUN PATAH.		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALUR TENGAH KAMANG BAKTI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN RUMAH BUK SINEM JORONG III SUNGAI TAMBANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI SOKAM MACANG KE SIBUO.		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADANG LAWE KE PATIKIN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PEMBUATAN JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			
	PENGERASAN DAN RIGIT BETON JALAN		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN MENUJU LAPANGAN VOLLY BALL COLAU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN PERUMNAS GSI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON LOWE NAGARI AIA AMO		KAMANG BARU, AIA AMO, BANJAR TENGAH		200.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI TANAH LAPANG KE MESJID		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	RIGID BETON PONDAM PAKUBURAN JR SUNGAI ALAI		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN JALAN NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN DARI JEMBATAN PULO KOCIAK-TARATAK		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN SEBELAH RUMAH TENGGU RANCAK JORONG I A3 SUNGAI TAMBANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGID BETON JALAN MUDIK MOTUNG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN EKOR KOTO SUNGAI GEMIRI		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	LANJUTAN PENERASAAN JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN DUSUN SEBERANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKMUR		0	APBD II			
	SAMBUNGAN RABAT JALAN BUKIT ANTobat		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RIGIT BETON JORONG DUSUN TINGGI		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LINGKAR KOTO SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		200.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN RIGIT JORONG SILUKA		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		200.000.000	APBD II			
	JALAN POROS ARAH KE MAKAM JR III SUNGAI TAMBANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN SIPUAH ATAS KE LONTIAK		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGIT BETON PALE KUPAK.		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN JR.KOTO BARU		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO BARU		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN-JALAN RUSAK DI JORONG KOTO BARU		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO BARU		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN TEMPAT KERAMAT		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II			
	DRAINASE LINGKUNGAN DI JORONG PANDAM		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		0	APBD II			
	RIGIT BETON JL. TK PAUD JRG. BATANG TALANG.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TALANG		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN INPRES KE MELAYU		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO HILIR		300.000.000	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON JALAN BLOK C JR III SUNGAI TAMBANG.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		0	APBD II			
	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BUKIT SAPU-SAPU		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON MENUJU SAWAH GADANG.		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	REHAB JALAN BOREM JALAN SIMPANG PAMUATAN KE MASJID		KUPTAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		140.700.000	APBD II			
	PEMBUATAN JALAN LINGKAR DI SDN 11 PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		0	APBD II			
	RIGIT BETON MAKAM KERAMAT.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN ALAHAN TANJUNG TARATAK BARU KE KAYU GADIH.		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	RIGIT JALAN LINGKAR KAYU GADIH.		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN LINGKAR KE SIBOLIN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		200.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI SD 2 KE KANTOR JORONG		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	RIGIT BETON		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II			
	JALAN LINGKAR SIMARU SEI LABAN		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SIMARU		0	APBD II			
	PENGASPALAN JALAN POROS DARI PASAR KE MESJID		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO TONGAH		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN DURI - PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BELAKANG KANTOR WALI NAGARI GUGUK KE BULU ROTAN		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		0	APBD II			
	RIGIT BETON DARI SD SAMPAI DPRD		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN MUDI K MALAU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		0	APBD II			
	LANJUTAN JALAN RIGIT BETON JALAN PDESAAN MUDI K MOKOK		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDI K MALIH		0	APBD II			
	PEMBUATAN DAM JALAN LOKUAK SINGKULANG		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO BARU		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERBAIKAN JALAN RIGIT JORONG SILUKA		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN KOTO JORONG KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	MOHON BANTUAN RIGIT BETON JALAN LEKOK ROYLANG.		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II			
	DRAYNASE JALAN SUNGAI LIMAUI		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG TIGO		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN PEMUKIMAN JORONG KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT JALAN MANGGI – PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI SOLOK PINANG KE BENDARAHAHAN		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		200.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN BINTUNGAN JORONG GANTIANG (RIGIT BETON)		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	PEMBUATAN LAIDAM JALAN JORONG SIMPANG AMPEK		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON TARATAK CABE		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		0	APBD II			
	RIGIT BETON TIMPEH VII		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON SD,N 20 PADANG LAWEH KECAMATAN KOTO VII KE BUKIT PENCORAN.		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN KE LINGKUNGAN PEMUKIMAN JR.GUGUK NANEH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN DAM JALAN SOLOK BARU		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN ATEH GUGUAK KE PAYO SYAHADAT		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN LINGKAR LURAH MANGGI		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	LANJUTAN HOTMIX JALAN LINGKAR		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		0	APBD II			
	SAMBUNGAN RABAT JALAN LURAH KADAN KE PUJAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN PANAI KE LUBUK ANGKAK DI JORONG SELJODI		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		0	APBD II			
	PERBAIKAN RUAS JALAN DARI JEMBATAN KE NGALAU SISAWAH		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		0	APBD II			
	REGIT BETON JALAN BARU BATU RAJO PARANTIAN GADANG.		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN JEMBATAN BARU JORONG MEKAR JAYA		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PELEBARAN/DAM JALAN RANAH PALAM-KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		0	APBD II/DAK			
	REHAP JALAN MUDIAP MOTUANG-MUDIAP MAWUNG		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN DARI SIMPANG CALAU MENUJU LAPANGAN VOLLY BALL		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II/DAK			
	RIGID BETON JALAN MUDIAP BARU		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, PAYO LAWE		200.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN MUDIAP SALA		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, TIMBULUN PATAH		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN DUSUN I JORONG TIMPEH V JOORNG KURNIA KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		0	APBD II			
	REHAB JALAN LOBUOH SOMPIK KE TITIAN BOSI		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO PANJANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN SUNGAI MAUNG		KAMANG BARU, KAMANG, SIMPANG KAMANG		0	APBD II			
	SAMBUNGAN RIGIT BETON JALAN BENDARAHAHAN - BUKIT GOMBAK		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RIGIT BETON DAN DRAINASE SEPUTARAN DUSUN I		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	REHAB DRAINASE DUSUN SILAMBAO		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II/DAK			
	JARINGAN PIPA AIR PDAM MAKAM MENUJU JALAN ADI NEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	REGIT BETON DEPAN KANTOR WALI NAGARI		KAMANG BARU, PADANG TAROK, KOTO TANGAH		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN DRENASE JALAN		KAMANG BARU, PADANG TAROK, KOTO TANGAH		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN BARU/PERBAIKAN JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JALAN RIGIT BETON SUNGAI LINTAN JORONG BATU GONDANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BEDIENG		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN RIGIT BAHU JALAN BETON SURAU SIMANGGUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN MUDIK DINDING		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, TALANG		0	APBD II			
	BANTUAN JALAN RIGIT BETON		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN SAMURAI		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		200.000.000	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LINGKAR PAYO KARIANG		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN DRAENASE JALAN LUBUK CUPAK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II/DAK			
	PENGERASAN JALAN LINGKAR		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN JALAN DARI PULAU BASUANG KE PULOWE		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LINGKAR JORONG KOTO RANAH SUNGAI SARIAK.		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		0	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN DARI SAWAH TAROK MENUJU PINANG.		KOTO VII, PADANG LAWEH, SAWAH TAROK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN BUKIT CABANG TIGO		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		0	APBD II			
	PELEBARAN JALAN MAKAM MENUJU JALAN ADI NEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON JALAN PADANG TARANG-ULU PALIKI		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, KOTO TINGGI		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN SMPN 35 SIJUNJUNG JORONG KUNANGAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		0	APBD II			
	PENGASPALAN JALAN MULAI DARI SIMPANG KAYU GADIH SAMPAI KE DALAM SEKITAR 4 METER		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		0	APBD II			
	RIGIT JALAN BATU BOLANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	RIGID BETON JALAN LINGKAR TRANSMIGRASI PADANG TAROK		KAMANG BARU, PADANG TAROK, MUARO BUAN		200.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP/ PENERASAN JALAN MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		0	APBD II			
	PENYELESAIAN RIGIT BETON JALAN LUNDANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMAU SUNDAL		200.000.000	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN LINGKAR KOTO.		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP/ PENERASAN JALAN MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RIGIT BETON JALAN DEPAN MUSHOLA ASOBIRIN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN MACANG KUMOLOU JORONG SITAMPUANG.		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		0	APBD II			
	SAMBUNGAN REHAT JALAN LINGKAR BUKIT ANTOLAK 1000 M.		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		0	APBD II			
	JALAN SOLOK NONOM SAMPAI KE LIMOA MANI		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN DEPAN BIONO JORONG MEKAR JAYA		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON DARI JUMANGKEK KE SAWAH GADANG		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU BALANG		0	APBD II			
	PENGERASAN/RIGIT BETON JALAN JONTI KE LURAH JAMBU		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BARU JALAN BATANG LURAH		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KOTO		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		200.000.000	APBD II			
	RIGIT JALAN JORONG LUBUAK KAPIEK		KAMANG BARU, AIA AMO, LUBUK KAPIEK		0	APBD II			
	LANJUTAN PERBAIKAN JALAN GUGUK MURAI SITAMPUANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN RIGIT BETON SURAU SIMANGGUNG		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN DIARO		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		0	APBD II/DAK			
	RIGIT BETON DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN PEMUKIMAN SE-NAGARI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		326.406.000	APBD II/DAK			
	PENYELESAIAN RIGIT BETON JALAN PURIN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMA SUNDAL		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN TAMPANG SAMPAI KE MAKAM LANGGANG		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN KE NGALAU POSUOK		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN TARATAK TANGAH KE TOLANG KOCIAK (RIGIT BETON)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN TALI BANDAR NAGARI		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, MUDIKA IMUAK		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALUR 2 KAMANG MAKAMUR		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG MAKAMUR		0	APBD II			
	REHAP JALAN KOTO SINYAMU		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		0	APBD II			
	LANJUTAN COR BOTON JALAN MUDIKA IKEK JORONG TANDIKEK.		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, TANDIKEK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN BINTUNGAN JORONG GANTIAN (RIGIT BETON)		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		0	APBD II			
	LANJUTAN COR RIGIT JALAN MUDIKA MULAU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		300.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN KE MESJID ALMUKARMAH JR.MUDIKA MALIH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, MUDIKA MALIH		0	APBD II			
	JALAN LINGKAR NAGARI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		200.000.000	APBD II			
	RIGIT BETON JALUR SEBERANG JORONG KURNIA KAMANG		KAMANG BARU, KAMANG, KURNIA KAMANG		0	APBD II			
	PENGERASAN JALAN MUDIKA LAMPI KE KANTOR CAMAT		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		510.000.000	APBD II			
	REHAB BERAT RIGIT BETON JALAN DALAM NAGARI		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, KOTO RANAH		200.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN RIGIT BETON JALAN LINGKAR.		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN CONGGIANG		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		200.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PERBAIKAN JALAN.		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		0	APBD II			
	REHAB JALAN BATANG LASA NAGARI KANDANG BARU		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN LUBUAK MANARAHAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT JALAN MANGGI – PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	LANJUTAN RIGIT BETON DARI JORONG RANAH SIGADING MENUJU JORONG SUNGAI GEMIRI		KOTO VII, PADANG LAWEH, RANAH SIGADING		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BINJAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN BARU JALAN BATANG LURAH		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMA SUNDAL		0	APBD II			
	RIGIT BETON LUBUK MUNYANG – LUBUK		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN PUARO-SAMURAI		IV NAGARI, KOTO BARU, PASAR		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN SONTU KE TANJUNG BERINGIN		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN TANJUNG BERINGIN S/D KAMPUNG BARU		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN BUKIT TAMBUSU MENUJU KAYU ANGK.		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN DARI SIMPANG TANJUANG KE JEMBATAN.		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN PERUMNAS.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		0	APBD II/DAK			
	LANJUTAN RIGID BETON DAN DRAINASE JALAN ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		0	APBD II			
	PERBAIKAN JALAN PAUAH KE PUSKESMAS.		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		0	APBD II			
	PEMBUKAAN DAN Pengerasan JALAN DI MATO AYI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		0	APBD II			
	PEMBANGUNAN RIJIT BETON		KAMANG BARU, KAMANG, BATANG KARIANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALUR 1 JORONG KAMANG BHAKTI		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		0	APBD II			
	PENINGKATAN JALAN DURI PARANTIANG GADANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN POROS DEPAN MESJID JORONG KAMANG SENTOSA		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SENTOSA		0	APBD II/DAK			
	REHAB JALAN DARI MASJID KE SDN 14 ANDOPAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, ANDOPAN		300.000.000	APBD II			
	Pengerasan dan pemasangan GORONG-GORONG JALAN BARU LINGKAR NAGARI		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		200.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN PEREKONOMIAN SAWAH TANJUNG PANIAGAN		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		0	APBD II			
	RIGIT BETON JALAN SOLOK SAMBUNG S/D IMBO IBU		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		0	APBD II			
	RIGIT BETON BATU MENJULUR SIMPANG LEKOK RIMBO SIKAMPUANG		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		0	APBD II			
	JALAN LINGKAR DUSUN KOTO TONGAH (SIMPANG TIGO LOBUAH SOMPIK) DI DUSUN KOTO TONGAH		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO TONGAH		200.000.000	APBD II			
1.24.27	Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan		Kab. Sijunjung		5.750.000.000				5.820.000.000
1.24.27.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penangkulungan K3 dan Kendaraan Operasional Kebersihan	Terwujudnya Pemeliharaan K3, Sarana dan Prasarana K3 dan Fasilitas K3	Kab. Sijunjung	1 Tahun	4.850.000.000	APBD II		1	5.000.000.000
	OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		426.260.000	APBD II			
	PERALATAN KEBERSIHAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		202.180.000	APBD II			
	BBM OPEARIONAL KEBERSIHAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		538.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	UPAH PETUGAS KEBERSIHAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		2.990.000.000	APBD II			
	OPERASIONAL TPA		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		500.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN K3		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		193.560.000	APBD II			
1.24.27.03	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya Pemeliharaan RTH Taman Kota	Kab. Sijunjung	1 Tahun	900.000.000	APBD II		1	820.000.000
	BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		260.000.000	APBD II			
	UPAH PETUGAS TAMAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		547.500.000	APBD II			
	UANG KESEJAHTERAAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		14.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN TUGU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		15.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN TROTOAR		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		30.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN TAMAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		11.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAN PAGAR		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		22.500.000	APBD II			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Dokumen Renstra	Dinas Perkim-LH	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		0	0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		3.065.990.000				11.695.980.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		2.050.000.000				5.300.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkim-LH	100 persen	800.000.000	APBD II		100	1.200.000.000
	40 DOKUMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		800.000.000	APBD II			
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Jasa Perkantoran	Muaro Sijunjung	100 persen	1.250.000.000	APBD II		100	4.100.000.000
	36 DOKUMEN BELANJA PEGAWAI		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		1.250.000.000	APBD II			
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		200.000.000				250.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kompetensi yang sesuai Tupoksi	Dinas Perkim-LH	1 Tahun	200.000.000	APBD II		1	250.000.000
	DIKLAT, KURSUS, BIMTEK		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		200.000.000	APBD II			
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		89.950.000				95.980.000
9.99.06.01	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disampaikan Tepat Waktu. 2. Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disampaikan Tepat Waktu	Dinas Perkim-LH	9 Dokumen	89.950.000	APBD II		9	95.980.000
	5 DOKUMEN PERENCANAAN (DPA, RENJA, PK, RTP, RENCANA AKSI)		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		59.950.000	APBD II			
	4 DOKUMEN PELAPORAN (LKJIP, LKPI, DAK, SPM)		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		30.000.000	APBD II			
9.99.08	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		726.040.000				6.050.000.000
9.99.08.01	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara	Kab. Sijunjung	100 persen	726.040.000	APBD II		100	6.050.000.000
	PEMBELIAN DISPENSER BESAR		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		26.640.000	APBD II			
	PEMBELIAN AC FLOOR STANDING UNTUK RUANG RAPAT		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		35.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN BANGUNAN LABOR LINGKUNGAN HIDUP		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		200.000.000	APBD II			
	PEMILIHARAAN GEDUNG KANTOR		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		200.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN KOMPUTER/PC		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		48.200.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		45.900.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA EMPAT (DOUBLE GARDAN)		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		36.800.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMELIHARAAN ALAT RUMAH TANGGA		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		57.000.000	APBD II			
	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		5.000.000	APBD II			
	PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA EMPAT		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		71.500.000	APBD II			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
TOTAL PAGU					12.349.482.968				20.655.000.000
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Kab. Sijunjung		3.864.243.727				13.600.000.000
1.05.15	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat		Kab. Sijunjung		1.559.223.577				3.550.000.000
1.05.15.01	Pengamanan Obyek Vital	Jumlah bulan terlaksananya pengamanan obyek vital dan acara pemerintah / masyarakat	Kab. Sijunjung	12 Bulan	224.158.577	APBD II		12	250.000.000
1.05.15.02	Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat	Jumlah hari penugasan piket pengamanan kantor dan rumah dinas pejabat	Kab. Sijunjung	365 Hari	1.164.785.000	APBD II		365	3.000.000.000
1.05.15.03	Pembinaan linmas	Jumlah pembinaan	Kab. Sijunjung	63 Nagari/Desa	170.280.000	APBD II		63	200.000.000
1.05.15.04	Penertiban Anak Sekolah	Jumlah lokasi penertiban anak sekolah	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	0	APBD II		8	100.000.000
1.05.16	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran		Kab. Sijunjung		1.420.985.250				7.600.000.000
1.05.16.01	Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarpras damkar	Kab. Sijunjung	12 Bulan	0	APBD II		12	1.500.000.000
1.05.16.02	Pengadaan Alat Pengendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah alat pengendalian kebakaran	Kab. Sijunjung	6 Unit	0	APBD II		1	3.500.000.000
1.05.16.03	Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah bulan pelaksanaan pemadaman kebakaran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.336.025.250	APBD II		12	2.000.000.000
1.05.16.04	Gladi Posko Kebakaran	Jumlah peserta gladi posko pemadam kebakaran	Kab. Sijunjung	3 Institusi	0	APBD II		5	50.000.000
1.05.16.05	Pelatihan Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah personel damkar yang mengikuti pelatihan	Kab. Sijunjung	90 Orang	0	APBD II		90	300.000.000
1.05.16.06	Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran	Jumlah bulan pelaksanaan pengawasan alat proteksi kebakaran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	0	APBD II		12	100.000.000
1.05.16.07	Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	84.960.000	APBD II		8	150.000.000
1.05.17	Program Penegakkan Pelanggaran Perda dan Perkada		Kab. Sijunjung		638.661.600				1.750.000.000
1.05.17.01	Operasional Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah bulan operasional Sekber PPNS	Kab. Sijunjung	12 Bulan	349.266.600	APBD II		12	750.000.000
1.05.17.02	Penegakan Perda dan Penyidikan Perkada	Jumlah penegakan Perda dan Penyidikan Perkada	Kab. Sijunjung	12 Bulan	289.395.000	APBD II		12	1.000.000.000
1.05.18	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Kab. Sijunjung		245.373.300				700.000.000
1.05.18.01	Bakti Sosial	Jumlah pelaksanaan bakti sosial di dalam dan di luar kabupaten	Kab. Sijunjung	6 Kali	43.200.000	APBD II		12	100.000.000
1.05.18.02	Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	46.800.000	APBD II		365	400.000.000
1.05.18.03	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring	Kab. Sijunjung	12 Bulan	155.373.300	APBD II		12	200.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		8.485.239.241				7.055.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		2.471.837.466				3.000.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya operasional administrasi umum perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	444.646.298	APBD II		12	800.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya operasional Jasa umum perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	2.027.191.168	APBD II		12	2.500.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		5.594.980.000				3.000.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana	Muaro Sijunjung	12 Bulan	5.594.980.000	APBD II		12	3.000.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		418.421.775				755.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah personel yang menyelesaikan pendidikan	Muaro Sijunjung	12 Orang	50.000.000	APBD II		12	100.000.000
9.99.05.61	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas	Jumlah bulan pelaksanaan latihan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	310.878.000	APBD II		12	400.000.000
9.99.05.39	Operasional PTI	Jumlah bulan pelaksanaan penindakan internal	Kab. Sijunjung	12 Bulan	32.543.775	APBD II		12	40.000.000
9.99.05.42	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta pendidikan	Kab. Sijunjung	10 Orang	0	APBD II		90	200.000.000
9.99.05.40	Perencanaan dan Program	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kab. Sijunjung	6 Dokumen	25.000.000	APBD II		1	15.000.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
TOTAL PAGU					6.641.290.625				8.326.876.725
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Kab. Sijunjung		60.000.000				2.000.000.000
2.08.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana		Kab. Sijunjung		60.000.000				2.000.000.000
2.08.30.01	Peningkatan Sapras Kebencanaan	Jumlah sapras kebencanaan yang ada	Kab. Sijunjung	12 Bulan	60.000.000	APBD II		12	2.000.000.000
	PENGADAAN PERAHU KARET		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		60.000.000	APBD II/DAK			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000			0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	jumlah dokumen renstra yang disusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		0
2.08	Pemerintahan Lainnya		Kab. Sijunjung		4.640.000.000			3.300.000.000
2.08.15	Program Peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana	• Jumlah nagari tangguh bencana • Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	Kab. Sijunjung		620.000.000			1.050.000.000
2.08.15.01	Peningkatan Kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana	Kebencanaan di daerah rawan bencana	Kab. Sijunjung	8 persen	170.000.000	APBD II	8	250.000.000
2.08.15.02	Peningkatan operasional pusdalop penanggulangan bencana	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	Kab. Sijunjung	12 Bulan	300.000.000	APBD II	12	400.000.000
2.08.15.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Nagari Tangguh yang terbentuk dan terbina	Kab. Sijunjung	6 Kelompok	150.000.000	APBD II	8	400.000.000
2.08.16	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	• Jumlah dokumen mitigasi bencana (rencana penanggulangan kedaruratan bencana)	Kab. Sijunjung		1.620.000.000			550.000.000
2.08.16.01	Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Tersedianya dokumen kebijakan yang dihasilkan (RPB, RAD-PRB,Rekon perjenis bencana, SOP Rekon perjenis bencana, SOP dan MOU) yang tersedia	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	1.420.000.000	APBD II	1	200.000.000
2.08.16.02	Peningkatan informasi kebencanaan	Persentase SDM Pengelola Kebencanaan Nagari yang dilatih	Kab. Sijunjung	12 Dokumen	100.000.000	APBD II	60	200.000.000
2.08.16.03	Penyusunan Data Kebencanaan	Persentase SDM Pengelola Kebencanaan Nagari yang dilatih	Kab. Sijunjung	12 Bulan	100.000.000	APBD II	12	150.000.000
2.08.17	Program Penanganan Tanggap Darurat	• Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Kab. Sijunjung		500.000.000			1.200.000.000
2.08.17.01	Operasional Penanganan Darurat	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	Kab. Sijunjung	100 persen	300.000.000	APBD II	100	1.000.000.000
2.08.17.02	Penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	Kab. Sijunjung	12 Bulan	200.000.000	APBD II	12	200.000.000
2.08.18	Program Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam	• Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Kab. Sijunjung		400.000.000			500.000.000
2.08.18.01	Operasional /Penilaian Kondisi serta Penanganan Darurat Pasca Bencana	Jumlah Sarpras yang diperbaiki	Kab. Sijunjung	12 Bulan	350.000.000	APBD II	12	400.000.000
2.08.18.04	Inventarisasi Nilai Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	Jumlah laporan JITU Pasna yang dihasilkan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	50.000.000	APBD II	12	100.000.000
2.08.19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan		Kab. Sijunjung		1.500.000.000			0
2.08.19.01	Peningkatan Sarana dan prasarana penanganan tanggap darurat bencana	Terlaksananya peralatan dalam menghadapi bencana	Kab. Sijunjung	1 Unit	1.500.000.000	APBD II		0
2.09	Kepegawaian dan Latihan		Kab. Sijunjung		0			0
2.09.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Non Aktif)	• Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Kab. Sijunjung		0			0
2.09.16.11	Pelatihan rutin anggota TRC (NA)	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan-pelatihan rescue	Kab. Sijunjung	36 Orang	0	APBD II		0
2.09.16.10	Peningkatan simulasi dan pelatihan (NA)	Jumlah Aparatur yang ikut Bimtek, kursus, prlatihan-pelatihan	Kab. Sijunjung	5 Orang	0	APBD II		0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.916.290.625			3.026.876.725
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		961.500.000			1.550.000.000
9.99.01.38	Penunjang Jasa Administrasi Perkantoran	jumlah bulan terpenuhi kebutuhan adm perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	461.500.000	APBD II	12	950.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	jumlah bulan terpenuhi kebutuhan adm perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	500.000.000	APBD II	12	600.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		700.000.000			1.472.086.100
9.99.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Kab. Sijunjung	14 Unit	300.000.000	APBD II	16	300.000.000
9.99.02.70	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Dinas /Operasional	jumlah bulan terpenuhi peningkatan sapras kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	400.000.000	APBD II	12	1.172.086.100
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		250.000.000			0
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang ikut Bimtek, kursus, pelatihan-pelatihan	Kab. Sijunjung	5 Orang	50.000.000	APBD II		0
9.99.05.36	Pelatihan rutin anggota TRC dan Penanggulangan Bencana	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan rescue	Kab. Sijunjung	36 Orang	200.000.000	APBD II		0
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		4.790.625			4.790.625
9.99.06.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan keuangan	jumlah dokumen yang dihasilkan	Muaro Sijunjung	4 Dokumen	4.790.625	APBD II	4	4.790.625
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
TOTAL PAGU					2.396.289.000			3.465.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				25.000.000			0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000			0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra dengan baik	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		0
2.06	Kesatuan Bangsa dan Politik		Kab. Sijunjung		1.667.589.000			2.635.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.06.01	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	• Persentase menurunnya kasus tindak kriminal	Kab. Sijunjung		705.514.000				1.220.000.000
2.06.01.03	Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kali terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Muaro Sijunjung	1 Kali	205.514.000	APBD II		1	220.000.000
2.06.01.02	Pengendalian Konflik Sosial dan Terorisme	Jumlah kali kegiatan terlaksananya Rapat Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Kab. Sijunjung dan jumlah Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	8 Kec. dan Muaro Sijunjung	36 Kali	500.000.000	APBD II		36	1.000.000.000
2.06.02	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	• Jumlah generasi muda dan tokoh agama yang meningkatawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kab. Sijunjung		343.075.000				570.000.000
2.06.02.03	Peningkatan toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	-Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi (FGD) dilaksanakan oleh Bakor Pakem - Jumlah pelaksanaan Rakor FKUB	Muaro Sijunjung	1 Kali	50.000.000	APBD II		1	90.000.000
2.06.02.04	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan FGD pembauran bangsa bagi Generasi Muda	Muaro Sijunjung	2 Kali	70.000.000	APBD II		2	180.000.000
2.06.02.02	Peningkatan Rasa Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah angkatan dan orang yang ikut Diklat peningkatan Cinta Tanah Air dan Bela Negara	Muaro Sijunjung	2 Angkatan	162.000.000	APBD II		1	300.000.000
2.06.02.06	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Kebangsaan	Terlaksananya Upacara-upacara hari besar	Kab. Sijunjung	13 Kegiatan	61.075.000	APBD II			0
2.06.03	Program pendidikan politik masyarakat	• Jumlah Pengurus Parpol, Ormas, dan LSM yang meningkat pengetahuannya tentang politik, • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Legislatif , • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden, • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Provinsi Sumbar, • Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung		284.000.000				340.000.000
2.06.03.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah kali dan orang peserta penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang politik bagi Ormas, Parpol dan LSM	Muaro Sijunjung	1 Kali	47.000.000	APBD II		1	70.000.000
2.06.03.02	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah kali dan peserta Bimbingan Teknis pengelolaan bantuan keuangan Parpol dan jumlah kali koordinasi forum forum diskusi politik	Muaro Sijunjung	1 Kali	32.000.000	APBD II		1	70.000.000
2.06.03.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Parpol dan Ormas terpantau keberadaan dan pemutakhiran data Parpol, Ormas di Kab. - Jumlah Parpol yang diverifikasi terhadap kelengkapan administrasi parpol dan verifikasi pengajuan permohonan bantuan keuangan terhadap Parpol	8 Kec. dan Muaro Sijunjung	2 Kegiatan	100.000.000	APBD II		94	90.000.000
2.06.03.04	Fasilitasi Organisasi Veteran dan Pejuang	Jumlah kali pertemuan dan jumlah orang peserta Temu Ramah Antara Pemerintah Daerah dengan Pejuang di Kab. Sijunjung	Muaro Sijunjung dan Kec.	4 Kali	105.000.000	APBD II		4	110.000.000
2.06.04	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	• Jumlah siswa sekolah yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	Kab. Sijunjung		335.000.000				505.000.000
2.06.04.01	Penyuluhan Pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan Narkoba	Jumlah sekolah terlaksana penyuluhan narkoba terhadap siswa siswi SLTP/SLTA dan jumlah sample urine secara acak terhadap SLTP/SLTA dan Jambore Anti Narkoba serta jumlah masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat	sekolah-sekolah, Nagari dan Muaro Sijunjung	20 Sekolah	335.000.000	APBD II		20	505.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		703.700.000				830.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		555.000.000				590.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	435.000.000	APBD II		12	450.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan penunjang jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	120.000.000	APBD II		12	140.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		113.700.000				200.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	113.700.000	APBD II		12	200.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		35.000.000				50.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sijunjung	10 Orang	35.000.000	APBD II		10	50.000.000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
TOTAL PAGU					3.554.000.000				7.122.300.000
1.06	Sosial				2.588.000.000				5.916.300.000
1.06.03	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	1). Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan , 2). Jumlah kasus tidak terlindunginya hak anak yang ditangani	Kab. Sijunjung		503.000.000				1.340.420.000
1.06.03.02	Sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan dan Perlindungan Anak	Jumlah Sosialisasi dan Jumlah Kasus yang difasilitasi permasalahan dan Perlindungan Anak	Kab. Sijunjung	Sekolah	55.000.000	APBD II		1	171.200.000
1.06.03.04	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan	1.Pembinaan organisasi perempuan / kelompok perempuan 2.Fasilitasi organisasi perempuan	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	80.000.000	APBD II		8	423.720.000
1.06.03.05	Kota Layak Anak	1). Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak2). Bimbingan Teknis Perlindungan Anak Terpadu bagi Relawan PATBM	Kab. Sijunjung	1 Paket	110.000.000	APBD II		1	160.500.000
1.06.03.06	Fasilitasi Model Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah fasilitasi model sekolah dan puskesmas ramah anak	Kab. Sijunjung	Sekolah	50.000.000	APBD II		1	160.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.03.07	Fasilitasi Kegiatan Forum Anak	Jumlah Forum anak yang terfasilitasi	Kab. Sijunjung	1 Tahun	50.000.000	APBD II		1	50.000.000
1.06.03.10	Fasilitasi Pelaksanaan Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung	1 Paket	158.000.000	APBD II		1	374.500.000
1.06.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyandang Disabilitas.lanjut Usia Terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan dasar	Kab. Sijunjung		525.000.000				1.240.000.000
1.06.16.02	Pelatihan bagi Korban Tindak Kekerasan	1). Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi KTK beserta Toolkit 2). Terlaksananya Sosialisasi KTK bagi tokoh masyarakat	Kab. Sijunjung	45 Orang	75.000.000	APBD II		50	250.000.000
1.06.16.05	Pemberian bantuan bagi lansia terlantar dan produktif	Terlaksananya penyediaan tambahan makanan bergizi bagi lansia terlantar	Kab. Sijunjung	280 Orang	115.000.000	APBD II		280	250.000.000
1.06.16.14	Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Bagi Korban Penyalahgunaan Napza dan Lanjut Usia	Jumlah Korban Napza dan Lansia yang difasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial	Kab. Sijunjung		0	APBD II		5	0
1.06.16.13	Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyaluran BANTU LU	1). Monitoring penyaluran Dana BANTU LU2). Dilaksanakan rapat evaluasi pendamping BANTU LU	Kab. Sijunjung		0	APBD II			0
1.06.16.12	Fasilitasi Pemberian Bantuan Bagi PMKS	1). Jumlah Anak yang difasilitasi pelayanan Rehabilitasi Sosial 2). Jumlah orang Terlantar yang difasilitasi pemulangan dan penguburan 3). Kegiatan satu hari bersama Anak 4). Jumlah Anak yang difasilitasi proses Adopsi 5). Pembinaan, monitoring dan Evaluasi Terhadap LKSA/ Panti	Kab. Sijunjung	1 Tahun	200.000.000	APBD II		1	400.000.000
1.06.16.10	Peningkatan Kemampuan Penyandang Disabilitas	1). Monitoring dan Evaluasi Terhadap Penyaluran dana ASPDB 2). Jumlah Penyandang Disabilitas Penerima Bantuan yang Diverifikasi 3). Jumlah Penyandang Disabilitas Berat kurang mampu yang diberikan Tambahan Makanan bergizi dan peralatan Kebersihan 4). Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas berat yang diberikan UEP 5). Jumlah Penyandang Disabilitas yang di fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Kab. Sijunjung	1 Tahun	135.000.000	APBD II		1	340.000.000
1.06.21	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	1). Persentase kelembagaan PUG aktif, 2). Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Kab. Sijunjung		270.000.000				150.000.000
1.06.21.02	Pembinaan Organisasi Perempuan	1). Rapat Peringatan Hari Ibu (PHI) (3 Kali Rapat) 2). Peringatan Hari Ibu (PHI) Kabupaten, Provinsi dan Nasional 3). Rapat Persiapan Peringatan Hari DWP (3 kali Rapat) 4).Pembinaan organisasi perempuan, Industri rumahan (IR) yang dikelola Perempuan , Perempuan Kepala Keluarga 6).Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan 7).Kualitas Hidup Perempuan yang Beresponsif pengarusutamaan Gender (PUG)	Kab. Sijunjung		120.000.000	APBD II		1	0
1.06.21.03	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1). Persiapan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2). sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG) kepada Anggota Pokja dan Anggota Focal Point 3).Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari 4).Sosialisasi Peningkatan SDM Organisasi Perempuan terhadap Pengarusutamaan Gender 5).Sosialisasi Peningkatan SDM Masyarakat tentang kesetaraan Gender 6).Pembinaan, evaluasi dan monitoring dalam rangka PUG percepatan program PUG 7).Rapat Koordinasi PUG Anggota Pokja dan Focal Point	Kab. Sijunjung	1 Tahun	150.000.000	APBD II		1	150.000.000
1.06.28	Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	1). Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar, 2). Persentase PMKS yang diberdayakan	Kab. Sijunjung		845.000.000				2.099.430.000
1.06.28.01	Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Jumlah Pelaksanaan monitoring dan pembinaan posdaya dan LKKS2. Jumlah Pelaksanaan rapat pengurus LKKS	Kab. Sijunjung	1 Tahun	60.000.000	APBD II		1	240.750.000
1.06.28.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	1). Jumlah Rapat persiapan binjut bagi penerima KUBE 2). Jumlah Bimbingan berlanjut binjut bagi penerima KUBE 3). Jumlah lomba KUBE berprestasi 4). Jumlah monitoring dan evaluasi KUBE FM yang masih aktif 5). Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUBE Penumbuhan	Kab. Sijunjung	1 Tahun	106.000.000	APBD II		1	346.680.000
1.06.28.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	1). Jumlah Pendistribusian BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)2). Jumlah Pelaksanaan Rapat tim koordinasibantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 3). Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Pematapan Evaluasi Rastra/BPNT 4). Jumlah Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)5).Jumlah penanganan FM (Terpenuhi Kebutuhan Dasar FM)	Kab. Sijunjung	1 Tahun	95.000.000	APBD II		1	455.000.000
1.06.28.07	Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Kesejahteraan Sosial	1). Jumlah Pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu Fakir Miskin 2). Jumlah Nagari yang dilaksanakan pendataan PMKS/PSKS, 3). Jumlah Orang yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas Sekretariat SLRT4). Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	Kab. Sijunjung	1 Tahun	450.000.000	APBD II		1	450.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.28.05	Pembinaan Kelembagaan Sosial	1). Jumlah Pembinaan dan Lomba PSKS berprestasi 2). Jumlah rapat PSKS yang Akan Dilaksanakan 3). Jumlah Karang Taruna yang dibina 4). Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis PSM	Kab. Sijunjung	1 Tahun	95.000.000	APBD II		1	460.000.000
1.06.28.06	Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan /Budaya Kepahlawanan dan hari-Hari Besar Kesejahteraan Sosial	1). Jumlah Pelaksanaan Apel kehormatan dan renungan Suci 2). Jumlah Pelaksanaan Upacara bendera peringatan hari pahlawan	Kab. Sijunjung	1 Tahun	39.000.000	APBD II		1	147.000.000
1.16.23	Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial • Jumlah anggota Tagana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana • Persentase korban bencana yang diberi bantuan	Kab. Sijunjung		445.000.000				1.086.450.000
1.16.23.01	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	1). Terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) 2). Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan KSB 3). Terlaksananya Rapat Tim Pembentukan KSB	Kab. Sijunjung	1 Tahun	80.000.000	APBD II		1	175.000.000
1.16.23.05	Penguatan Tenaga Pelopor Perdamaian	1). Terlaksananya sosialisasi dan terbentuknya Tenaga Pelopor Perdamaian, 2). Terlaksananya pembekalan Tenaga Pelopor Perdamaian	Kab. Sijunjung		0	APBD II		1	0
1.16.23.02	Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1). Jumlah TAGANA yang Dilatih 2). Jumlah Bhakti Sosial yang dilaksanakan, 3). Pelatihan Penanganan Konflik di Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung	1 Tahun	115.000.000	APBD II		1	150.000.000
1.16.23.03	Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1). Jumlah Korban Bencana Terbantu 2). Jumlah Pelaksanaan Dapur Umum	Kab. Sijunjung	1 Tahun	100.000.000	APBD II		1	144.450.000
1.16.23.04	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial	1). Jumlah monitoring, Perkom (P2K2) dan Monev Penyaluran Bantuan PKH yang dilaksanakan 2. Jumlah Penduduk tidak mampu yang terdaftar sebagai pemenuhan data dan Penyaluran KIS JKSS dan Penduduk yang terdaftar oleh pemerintah Daerah	Kab. Sijunjung	1 Tahun	150.000.000	APBD II		1	617.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Renstra yang diselesaikan	Kab. Sijunjung	1 Buku	25.000.000	APBD II		1	25.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		941.000.000				1.181.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		680.000.000				833.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	368.000.000	APBD II		12	475.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	312.000.000	APBD II		12	358.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		204.000.000				263.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	204.000.000	APBD II		12	263.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		25.000.000				50.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kab. Sijunjung	3 Orang	25.000.000	APBD II		3	50.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		32.000.000				35.000.000
1.13.01.02	Penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja, LKPJ dan LPPD	jumlah laporan yang disusun	Muaro Sijunjung	1 Tahun	32.000.000	APBD II		1	35.000.000
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI									
TOTAL PAGU					14.828.784.067				9.678.870.067
1.03	Pekerjaan Umum				1.000.000.000				1.045.000.000
1.06.26	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	• Jumlah transmigran yang ditempatkan per tahun • Jumlah transmigran yang dibina	Kab. Sijunjung		1.000.000.000				1.045.000.000
1.06.26.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial	1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sosial ekonomi : -rumah ibadah, -SD, -fasilitas kesehatan, - sarana pertanian, - sarana olahraga 2. Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi ; -Pembinaan keagamaan, - pembinaan sosial ekonomi, - pelatihan bagi kelompok tani, kelompok keagamaan, kelompok kewirausahaan	Padang Tarok, Kab. Sijunjung	12 Bulan	850.000.000	APBD II		12	850.000.000
1.06.26.01	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka	1. Terlaksananya pembinaan transmigran daerah asal 2. Terlaksananya koordinasi dengan Kemendes, PDT dan Transmigrasi 3. Terlaksananya koordinasi dengan daerah asal	Padang Tarok	1 Paket	150.000.000	APBD II		2	195.000.000
06-Jan	sosial		Kab. Sijunjung		9.143.914.000				5.840.000.000
1.06.23	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	• Persentase pencari kerja yang telah dilatih	Kab. Sijunjung		2.218.914.000				1.390.000.000
1.06.23.01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.175.000.000	APBD II		12	890.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PELATIHAN KETERAMPILAN MENJAHIT TERSEBAR DI SELURUH JORONG DI NAGARI KUNANGAN PARIK RANTANG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TATA TATA BOGA		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		225.000.000	APBD II			
	PELATIHAN /PEMBINAAN KOMPUTER DAN INSTALASI LISTRIK		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN BENGKEL/LAS		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN MENJAHIT		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO PANJANG		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TATA RIAS KECANTIKAN		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN MENJAHIT		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN DAN KETERAMPILAN ANAK PUTUS SEKOLAH		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KOMPUTER		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KETERAMPILAN PKK/PEMUDA		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TATA BOGA		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN MENJAHIT DAN BORDIR		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN LISTRIK		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TATA BOGA		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KETERAMPILAN PKK/PEMUDA		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN MENYULAM		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		75.000.000	APBD II			
	PENGADAAN PELATIHAN KETERAMPILAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		0	APBD II			
	PELATIHAN OTOMOTIF		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TATA BOGA		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KETERAMPILAN OTOMOTIF TERSEBAR DI SELURUH JORONG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN MENJAHIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		225.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN (BENGKEL,LAS,SERVIS HP,DLL)		IV NAGARI, PALANGKI, PANTAI CERMIN		300.000.000	APBD II			
	PELATIHAN SERVIS ELEKTRONIK		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, PARIK MALINTANG		75.000.000	APBD II			
1.06.23.04	pemagangan bagi peserta pelatihan dan pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	Kab. Sijunjung	50 Orang	43.914.000	APBD II		70	250.000.000
1.06.23.06	Rehabilitasi sarana dan prasarana BLK	Rehap sarana dan prasarana BLK	Kab. Sijunjung	1 Unit	0	APBD II		12	250.000.000
1.06.25	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	• Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	Kab. Sijunjung		425.000.000				1.200.000.000
1.06.25.03	Penyebarluasan Informasi dan Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya : 1.Jumlah pencari kerja yang terdaftar 2. jumlah pencari kerja yang ditempatkan 3. Penilaian tingkat kepuasan masyarakat 4. Jumlah data pencari kerja. 5. Job fair 6. Sosialisasi/ Pembinaan Jabatan bagi siswa SMK/SMA 7. Laporan Informasi Pasar Kerja	Kab. Sijunjung	1710 Orang	200.000.000	APBD II		2060	600.000.000
1.06.25.02	Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	1. Jumlah wirausaha yang dilatih 2. pelatihan setelah tamat sekolah	Kab. Sijunjung	48 Orang	225.000.000	APBD II		60	300.000.000
	PELATIHAN UNTUK WIRAUSAHA		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN GENERASI MUDA		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, KOTO KAMPUNG DALAM		75.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.06.25.05	perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna	Jumlah pencari kerja yang dilatih dengan membentuk kelompok	Kab. Sijunjung	60 Orang	0	APBD II		60	300.000.000
1.06.27	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (PKT)		Kab. Sijunjung		6.500.000.000				3.250.000.000
1.06.27.01	Persiapan Rencana Pembangunan Transmigrasi	1. Peningkatan jalan akses menuju transmigrasi 2. Pemasangan listrik kerumah dan fasilitas umum 3. Tambah lokal SD 4. Pembangunan embung 5. Administrasi umum	Padang Tarok, Kab. Sijunjung	10 KM/m	6.500.000.000	APBD II		1	3.250.000.000
1.21	tenaga kerja		Kab. Sijunjung		2.991.000.000				970.000.000
1.21.16	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	• Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kab. Sijunjung		441.000.000				520.000.000
1.21.16.06	Pembentukan dan Pembinaan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Buruh/Serikat Pekerja	1. Bimbingan teknis pembentukan PP, PKB dan SB/SP 2. jumlah PP yang disahkan 3. Jumlah PKB yang didaftarkan 4. Jumlah SB/SP yang dicatatkan.	Kab. Sijunjung	20 Perusahaan	142.000.000	APBD II		30	162.000.000
1.21.16.07	Pembinaan dan Monitoring Perjanjian Kerja/Perjanjian Kerja Waktu tertentu	1.Terlaksananya monitoring perajian kerja 2. jumlah PKWT yang dicatatkan 3. Jumlah perjanjian pemborongan pekerjaan yang didaftarkan 4. Jumlah perjanjian penyediaan jasa yang didaftarkan	Kab. Sijunjung	40 Perusahaan	64.000.000	APBD II		30	63.000.000
1.21.16.10	Pembinaan dan monitoring kepersertaan BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan di perusahaan	1. Penyelenggaraan pendataan dan informasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di perusahaan 2. Sosialisasi program BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan di perusahaan	Kab. Sijunjung	45 Perusahaan	55.000.000	APBD II		50	75.000.000
1.21.16.11	Pembinaan dan penerapan sistem manajemen K3	Terlaksananya 1. pembinaan teknis penerapan sistem manajemen k3 2. Jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen k3	Kab. Sijunjung	40 Perusahaan	0	APBD II		40	0
1.21.16.03	Pembentukan dan Pembinaan LKS Biparti, DPC SPSI dan Dewan Pengupahan serta Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1. Julah LKS bipartit yang dicatatkan 2. jumlah DPCSPSI yang didaftarkan 3. jumlah penyelesaian kasus perselisihan hubungan inudustrial 4. Fasilitas upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial 5.Penyelenggaraan peringatan hari buruh internasional	Kab. Sijunjung	5 Kegiatan	180.000.000	APBD II		3	60.000.000
1.21.16.13	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Monitoring Pelaksanaan UMP/UMK serta Monitoring THR ke Perusahaan	1. terlaksananya survey IKHL dan monitoring pelaksanaan UMP/UMK 2. Jumlah pasar yang di survey 3. Jumlah dokumen KHL sebagai dasar usulan perhitungan KM/UMP 4. Jumlah perusahaan yang dimonitor pembayaran UMP/UMK dan THR	Kab. Sijunjung	55 Perusahaan	0	APBD II		55	55.000.000
1.21.16.09	Peringatan Hari Buruh Internasional	1. terlaksananya kegiatan hari buruh internasional 2. jumlah sasaran dialog interaktif dengan perusahaan	Kab. Sijunjung	1 Kali	0	APBD II		1	105.000.000
1.21.17	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Kab. Sijunjung		2.550.000.000		2175000000		450.000.000
1.21.17.01	Padat Karya	Jumlah penempatan pencari kerja yang terserap melalui kegiatan padat karya	Kab. Sijunjung	561 Orang	2.550.000.000	APBD II	4.725.000.000	120	450.000.000
	KEGIATAN PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		150.000.000	APBD II			
	BANTUAN PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBANGUNAN JALAN PADAT KARYA PULAI KE KASANG (RIGIT BETON)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		150.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN RIGIT BETON PADAT KARYA		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KOTO		150.000.000	APBD II			
	PEMBUKAAN JALAN CANG TINGGI KE POTAI (PADAT KARYA)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		150.000.000	APBD II			
	BANTUAN PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		150.000.000	APBD II			
	BANTUAN PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		150.000.000	APBD II			
	PELEBARAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI (PADAT KARYA)		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, BUKIK TUJUH		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBUATAN J USAHA TANI DARI SILILIR KE JALAN LINGKAR		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		150.000.000	APBD II			
	PELEBARAN DAN PENINGKATAN JALAN USAHA TANI (PADAT KARYA)		SIJUNJUNG, SOLOK AMBAH, BUKIK TUJUH		150.000.000	APBD II/DAK			
	KEGIATAN PADAT KARYA		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN JALAN PADAT KARYA PALANDUAK SIKIJANG (RIGIT BETON)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		150.000.000	APBD II			
	PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		150.000.000	APBD II			
	PADAT KARYA DI JORONG KAYU GADIH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		150.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBUATAN GORONG-GORONG JADI		TANJUNG GADANG, SINYAMU, POLAK SINYAMU		150.000.000	APBD II			
	KEGIATAN PADAT KARYA		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		150.000.000	APBD II			
	LANJUTAN PEMBUKAAN JALAN TANAH BATO KE BALAI DAGANG (PADAT KARYA)		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KAMPUNG RAJO		150.000.000	APBD II			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				15.000.000
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				15.000.000
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Sijunjung	1 Laporan	25.000.000	APBD II	1	15.000.000	
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.668.870.067				1.808.870.067
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.267.403.000				1.457.403.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	1. Jumlah pegawai honoro daerah dan tenaga harian lepas yang dibayarkan honoranya 2. Jumlah pembayaran SIPKD 3. Jumlah bulan berlangganan surat kabar	Muaro Sijunjung	12 Bulan	417.403.000	APBD II	12	417.403.000	
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya : 1.surat menyurat dinas. 2.pelaksanaan sarana kebersihan. 3.pelaksanaan BBM. 4.pelaksanaan cetakan. 5.pelaksanaan foto copy. 6.pelaksanaan rapat. 7.pelaksanaan ATK. 8.pelaksanaan pakaian dinas. 9.pelaksanaan koordinasi dalam dan luar daerah. 10.Pelaksanaan dekorasi hari jadi, pawai dan kantor.	Kab. Sijunjung	12 Bulan	625.000.000	APBD II	12	750.000.000	
9.99.01.29	Kegiatan Operasional Penyelenggaraan UPTD BLK	1.Terpenuhnya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran 2. Rehap workshop	Kab. Sijunjung	12 Bulan	225.000.000	APBD II	12	290.000.000	
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		300.000.000				300.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya : 1.Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diservis 2. jumlah kendaraan dinas roda 3 yang diservis 3. jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diservis 5. jumlah pengadaan tv 6. jumlah pengadaan laptop 7. jumlah pengadaan printer 8. pengadaan kamera	Kab. Sijunjung	1 Paket	300.000.000	APBD II	1	300.000.000	
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		50.000.000				0
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah asn yang mendapatkan peningkatan SDM Aparatur	Kab. Sijunjung	10 Orang	50.000.000	APBD II		0	
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		51.467.067				51.467.067
1.13.01.02	Penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja, LKJP dan LPPD	Terlaksananya : 1.Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP). 2.Penyusunan Laporan Keuangan. 3.Penyusunan Laporan LPPD/LKPj. 4.Penyusunan Renja OPD. 5.Buku profil dinas Nakertrans	Kab. Sijunjung	20 Dokumen	51.467.067	APBD II	20	51.467.067	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI									
TOTAL PAGU					5.918.197.372				8.791.896.760
1.09	Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Desa				5.004.356.221				7.203.083.550
1.09.16	Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari	• Persentase nagari yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu • Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya	Kab. Sijunjung		2.011.666.063				2.445.607.850
1.09.16.02	Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Aset Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dan Pendayagunaan Aset Nagari	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	60.710.463	APBD II	61	97.702.850	
1.09.16.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan - Kegiatan Pemerintahan Nagari	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan Pemerintahan Nagari	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	25.226.785	APBD II	61	75.500.000	
1.09.16.04	Fasilitasi Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	79.115.643	APBD II	61	127.644.000	
1.09.16.05	Pembekalan Aparatur Pembina Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pembina Nagari yang dibina	Kab. Sijunjung	16 Nagari/Desa	82.350.389	APBD II	20	167.758.000	
1.09.16.07	Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang akan dibina dalam administrasi Keuangan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	98.301.456	APBD II	61	156.700.000	
1.09.16.08	Fasilitasi Kerjasama Nagari	Jumlah Nagari yang melaksanakan kerja sama	Kab. Sijunjung	5 Nagari/Desa	25.477.250	APBD II	9	55.350.000	
1.09.16.09	Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari	Jumlah Nagari yang akan dibina dalam administrasi Keuangan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	55.906.296	APBD II	61	103.333.000	
1.09.16.10	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	127.029.400	APBD II	61	179.550.000	
1.09.16.11	Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Nagari dan BPN	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan tupoksi dan Jumlah anggota BPN yang mengikuti pelatihan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	746.424.976	APBD II	61	440.000.000	
	PELATIHAN/ PENINGKATAN SDM BPN MUNDAM SAKTI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		50.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN KAPASITAS BAGI APARATUR NAGARI DAN BPN		Kec. TES, KELURAHAN TES, JORONG TES		426.424.976	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PELATIHAN/ PENINGKATAN SDM PEMERINTAH NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		150.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN SDM BAGI PERANGKAT NAGARI PADANG LAWEH		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		120.000.000	APBD II			
1.09.16.12	Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	Jumlah Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang mengikuti penilaian	Kab. Sijunjung	8 Orang	107.811.195	APBD II		8	201.945.000
1.09.16.13	Fasilitasi Pemilihan Wali Nagari dan BPN Serta Kajian Pemekaran Nagari dan Jorong	Jumlah pemilihan walinagari	Kab. Sijunjung	16 Orang	300.000.000	APBD II		6	326.125.000
1.09.16.16	Fasilitasi Sistem Keuangan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Nagari	Jumlah sistem/aplikasi yang dikelola dan jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban nagari	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	114.906.100	APBD II		61	155.350.000
1.09.16.17	Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan-kegiatan Bidang Keuangan dan Pembangunan Nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi bidang keuangan dan pembangunan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	82.144.097	APBD II		61	95.000.000
1.09.16.15	Fasilitasi Batas Administrasi Nagari dan Penataan Nagari		Kab. Sijunjung	35 Kali	106.262.013	APBD II		35	263.650.000
1.09.17	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Nagari				2.992.690.158				4.757.475.700
1.09.17.04	Koordinasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Bulan terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	106.367.055	APBD II		61	255.000.000
1.09.17.05	Fasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan KKL	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	53.131.693	APBD II		8	125.000.000
1.09.17.06	Pembinaan Posyandu	Jumlah Posyandu yang dilaksanakan Pembinaa	Kab. Sijunjung	321 Orang	456.258.191	APBD II		321	425.000.000
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	KEGIATAN POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		306.258.191	APBD I			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		0	APBD II			
	PENGADAAN PERALATAN POSYANDU NAGARI MUARO		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		150.000.000	APBD I			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSAH		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, TONGAH		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN PERALATAN POSYANDU		KAMANG BARU, TANJUNG KALIAN, MUDIAK IMUAK		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSAH		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSAH		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		0	APBD II			
	TIMBANGAN BAYI UNTUK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG ANJUNG		0	APBD II			
	TIKAR KARAKTER ANAK-ANAK UTK POS YANDU		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		0	APBD II			
	KURSI PLASTIK MEREK NAPOLI UNTUK POSYANDU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG OMBAK		0	APBD II			
1.09.17.07	Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah LPM yang aktif dan yang diberikan pembinaan	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	27.526.250	APBD II		61	85.000.000
1.09.17.08	Facilitasi dan Pendayagunaan Profil Nagari	Persentase entri data nagari	Kab. Sijunjung	50 persen	27.073.861	APBD II		100	72.000.000
1.09.17.12	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang terlayani pemberian makan tambahan	Kab. Sijunjung	16 Sekolah	85.518.862	APBD II		16	275.000.000
1.09.17.13	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ((BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam terlaksananya BBGRM dan Penilaian BBGRM serta short course bagi Pemenang BBGRM	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	229.023.425	APBD II		61	185.000.000
1.09.17.14	Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	Kab. Sijunjung	100 persen	235.380.047	APBD II		100	550.000.000
1.09.17.15	Pembinaan dan Monitoring BPSPAM/PAMSINAS	Jumlah BPSPAM yang dibina dan jumlah ketua BPSPAM yang dinilai	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	23.863.351	APBD II		61	65.500.000
1.09.17.16	Facilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Kab. Sijunjung	60 Nagari/Desa	108.153.825	APBD II		61	235.500.000
1.09.17.17	Pembinaan dan Facilitasi Posyantek dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah Posyantek yang dibina dalam pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Jumlah Posyantek yang terbentuk	Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	57.410.676	APBD II		61	55.408.700
1.09.17.18	Facilitasi Tenaga Pendamping Desa	Jumlah Pendamping Profesional P3MD yang terfasilitasi	Kab. Sijunjung	34 Orang	32.470.200	APBD II		34	87.550.000
1.09.17.22	Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Persentase lembaga adat yang aktif dan jumlah lembaga adat yang dibina	Kab. Sijunjung	200 Orang	348.096.670	APBD II		118	510.000.000
1.09.17.24	Facilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Jambore yang di ikuti dan jumlah penilaian yang dilaksanakan	Kab. Sijunjung	9 Kegiatan	581.424.718	APBD II		9	975.500.000
1.09.17.25	Pelaksanaan Pemuktahiran Data Indek Desa Membangun		Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	30.523.197	APBD II		61	155.000.000
1.09.17.26	pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Nagari dan Pemerintahan Nagari		Kab. Sijunjung	61 Nagari/Desa	187.768.206	APBD II		61	215.000.000
1.09.17.27	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Kab. Sijunjung	1 Kawasan	202.457.197	APBD II		1	269.600.000
1.09.17.28	Facilitasi Lembaga Ekonomi Nagari		Kab. Sijunjung	61 Meter	149.624.876	APBD II		61	106.417.000
1.09.17.23	Facilitasi LKAAM dan Bundo Kanduang Kabupaten Sijunjung		Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	50.617.858	APBD II		61	110.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		888.841.151				1.588.813.210
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		706.112.792				718.950.515
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional Administrasi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	331.367.792	APBD II		12	415.539.715
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Jasa Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	374.745.000	APBD II		12	303.410.800
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		145.300.000				412.752.942
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peningkatan dan Pemeliharaan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	145.300.000	APBD II		12	412.752.942
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		12.821.500				31.087.100
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Kab. Sijunjung	2 Orang	12.821.500	APBD II		2	31.087.100
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		24.606.859				426.022.653

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.06.03	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Kab. Sijunjung	5 Laporan	24.606.859	APBD II		5	426.022.653
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
TOTAL PAGU					6.208.692.000				4.606.200.000
1.10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.271.200.000				2.628.200.000
1.10.15	Program Keluarga Berencana	• Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	Kab. Sijunjung		3.678.500.000				925.500.000
1.10.15.01	Pengadaan Sarana Mobilitas TIM KB Keliling (DAK)	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	3.150.000.000	APBD II/DAK		8	200.000.000
1.10.15.02	Pembentukan dan pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Kab. Sijunjung	26 Nagari/Desa	100.000.000	APBD II/DAK		26	321.000.000
1.10.15.06	Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Penggerakan yang dilaksanakan untuk pencapaian Akseptor	Kab. Sijunjung	4 Paket	289.000.000	APBD II		4	220.000.000
1.10.15.07	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah PUS yang mendapatkan konseling KESPRO	Kab. Sijunjung	400 Orang	64.500.000	APBD II		400	64.500.000
1.10.15.08	Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB yang dilakukan tindakan Medis Operasi	Kab. Sijunjung	90 Orang	75.000.000	APBD II		90	120.000.000
2.20.23	Pengendalian Penduduk	• Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Sijunjung		1.019.700.000				1.009.700.000
2.20.23.01	Penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga	Jumlah penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan pengendalian penyuluhan dan advokasi	Kab. Sijunjung	62 Nagari/Desa	516.000.000	APBD II		62	516.000.000
2.20.23.02	Pendataan Keluarga	Jumlah Keluarga yang didata	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	175.000.000	APBD II		8	175.000.000
2.20.23.03	Pembinaan Monitoring Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB yang dilaksanakan	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	28.700.000	APBD II		8	28.700.000
2.20.23.04	Advokasi dan komunikasi Informasi Edukasi(KIE) Tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Sekolah yang dilakukan advokasi dan KIE tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Sijunjung	40 Sekolah	100.000.000	APBD II		40	100.000.000
2.20.23.05	Penguatan dan Perluasan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan dibina	Kab. Sijunjung	4 Sekolah	50.000.000	APBD II		4	40.000.000
2.20.23.06	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Pelaksanaan Rakorda Program KKBPK Tk. Kabupaten	Kab. Sijunjung	10 Kali	150.000.000	APBD II		10	150.000.000
2.20.24	Program Pembangunan Keluarga	• Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Kab. Sijunjung		573.000.000				693.000.000
2.20.24.01	Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga	Jumlah usaha ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Kab. Sijunjung	23 Kelompok	93.000.000	APBD II		23	93.000.000
2.20.24.02	Kegiatan Penguatan dan pembinaan PKLK	Jumlah PKLK yang dilakukan penguatan dan pembinaan	Kab. Sijunjung	26 Kelompok	130.000.000	APBD II		26	200.000.000
2.20.24.03	Jambore Institusi masyarakat perdesaan	Jumlah Event Jambore yang di ikuti Institusi Masyarakat	Kab. Sijunjung	2 Paket	150.000.000	APBD II		2	200.000.000
2.20.24.05	Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di Luar Sekolah	Jumlah kelompok remaja dan sebaya diluar sekolah yang disediakan fasilitas pelayanan KRR	Kab. Sijunjung	2 Paket	200.000.000	APBD II		2	200.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				5.000.000
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				5.000.000
2.05.16.63	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Sijunjung	1 Laporan	25.000.000	APBD II		1	5.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		912.492.000				1.973.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		551.242.000				1.546.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	390.000.000	APBD II		12	1.251.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	161.242.000	APBD II		12	295.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		136.250.000				302.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	136.250.000	APBD II		12	302.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		225.000.000				125.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Sijunjung	32 Orang	225.000.000	APBD II		32	125.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
TOTAL PAGU					2.465.468.560				2.556.388.560
1.08	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Muaro Sijunjung		1.019.000.000				1.059.920.000
1.08.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang terlayani	Kab. Sijunjung		1.019.000.000				1.059.920.000
1.08.15.14	Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan yang inovatif	Kab. Sijunjung	50000 DATA	153.000.000	APBD II		50000	153.000.000
1.08.15.14	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Inovasi pelayanan data kependudukan	Kab. Sijunjung						
1.08.15.01	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Kepemilikan KK	Kab. Sijunjung	14000 KK	116.000.000	APBD II		14000	131.920.000
1.08.15.04	Penerbitan identitas penduduk	Jumlah kepemilikan KTP-el	Kab. Sijunjung	8000 KTP	150.000.000	APBD II		8000	175.000.000
1.08.15.17	Sinkronisasi dan Pemanfaatan Data	Jumlah Sinkronisasi Data ke Nagari	Kab. Sijunjung	30000 DATA	0	APBD II		30000	0
1.08.15.18	Peningkatan SDM Pengelola Teknis Adm Kependudukan	Jumlah pelaksanaan Bimtek pengelola teknis administrasi kependudukan	Muaro Sijunjung	2 Angkatan	0	APBD II		2	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.08.15.19	Survey Kepemilikan Cakupan Status Perkawinan	Terbitnya akta perkawinan dan verifikasi status perkawinan penduduk	Kab. Sijunjung	500 Dokumen	0	APBD II			0
1.08.15.20	Peningkatan Cakupan Akta kelahiran dan Kematian	Jumlah Akta kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	Kab. Sijunjung	8000 Akta Kelahiran	0	APBD II		8000	0
1.08.15.16	Pemetaan Penduduk	Jumlah pemetaan KK berdasarkan titik koordinat	Kec. Sijunjung, Sumour Kudus, Tanjung Gadang dan Lubuk Tarok	35000 KK	450.000.000	APBD II		35000	450.000.000
1.08.15.06	Peningkatan cakupan kepemilikan akta peristiwa penting	Jumlah Akta kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	Kab. Sijunjung	8000 Akta Kelahiran	150.000.000	APBD II		8	150.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD			25.000.000				0
2.05.16.64	Penyusunan dan Evaluasi Renstra 2021-2026	Tingkat keselarasan renstra dengan RPJMD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.421.468.560				1.496.468.560
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.019.045.560				1.019.045.560
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terlaksananya administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	578.285.000	APBD II		12	578.285.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terlaksananya jasa operasional perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	440.760.560	APBD II		12	440.760.560
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		352.423.000				402.423.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	352.423.000	APBD II		12	402.423.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		50.000.000				75.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah personil yang mengikuti diklat, bimtek dan sejenisnya	Kab. Sijunjung	10 Orang	50.000.000	APBD II		39	75.000.000
DINAS PERHUBUNGAN									
		TOTAL PAGU			21.479.025.000				17.714.427.500
1.11	Perhubungan				19.829.025.000				15.514.427.500
1.11.17	Program peningkatan pelayanan angkutan				782.000.000				1.624.700.000
1.11.17.02	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan perizinan angkutan	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	32.000.000	APBD II		8	35.200.000
1.11.17.01	Pengendalian disiplin pengeporasian angkutan umum di jalan raya	Terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/daerah,pengamanan lebaran,natal dan tahun baru, berkurangan kemacetan dan kecelakaan lalin di jalan raya dalam kabupaten sijunjung	Kab. Sijunjung	12 Bulan Bulan	300.000.000	APBD II		12	599.500.000
1.11.17.09	Optimalisasi Pengendalian Lalu Lintas, angkutan dan Perkeretaapian	Terlaksananya Sosialisasi keselamatan lalu lintas, Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas tingkat nasional, Terlaksananya pendataan penilaian WTN Tingkat nasional, Terlaksananya penambahan jaringan transportasi, Tersedianya kebutuhan data perhubungan bagi instansi lainya	Kab. Sijunjung	300 Peserta 2 orang 1 dokumen PESERTA	150.000.000	APBD II		12	550.000.000
1.11.17.10	Optimalisasi Pelayanan Parkir dan Kawasan Pasar	Jumlah pelataran parkir yang disediakan dikawasan pasar dan wisata, Jumlah atribut parkir yang dibutuhkan,Mengurangi kemacetan dan menghindari kecelakaan lalu lintas di tepi jalan umum dan kawasan pasar	Kab. Sijunjung	2 lokasi pembangunan pelataran parkir 25 paket 12 bulan Lokasi	300.000.000	APBD II		12	440.000.000
	PEMOTONGAN BUKIK UTK LAHAN PARKIR CALAU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		0	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LAPANGAN PARKIR KAWASAN CALAU		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		300.000.000	APBD II/DAK			
1.11.19	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		Kab. Sijunjung		300.000.000				550.000.000
1.11.19.01	operasional penyelenggaraan UPTD PKB	jumlah bulan terpenuhinya operasional penyelenggaran UPTD PKB	Kab. Sijunjung	12 Bulan Bulan	300.000.000	APBD II		12	550.000.000
1.11.21	Program Peningkatan pelayanan lalu lintas		Kab. Sijunjung		18.747.025.000				13.339.727.500
1.11.21.01	Optimalisasi Pengadaan dan Pemakaian Alat Keselamatan Lalu Lintas	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas alat keselamatan lalu lintas di jalan berupa marka jalan (zebra cross, pita kejut, zoss merah, full line) terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, aman selamat, tertib, lancar dan terpadu	Kab. Sijunjung	150 Unit	327.025.000	APBD II		150	359.727.500
1.11.21.02	Pemeliharaan rutin LPJU	Terlaksananya pengadaan peralatan LPJU,Teralksananya pemeliharaan LPJU, Terlaksananya meterisasi LPJU, terlaksananya penerangan di lokasi Geopark	Kab. Sijunjung	12 Bulan	18.273.000.000	APBD II		12	12.375.000.000
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, RANAH TANJUNG BUNGO		18.000.000	APBD II			
	PENGGANTIAN BOLA LAMPU MERCURI KE LED		Kec. TES, KELURAHAN TES, JORONG TES		570.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		18.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU PENERANGAN JALAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		0	APBD II/DAK			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN SIMPANG BRI - TAPIAN TOBO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		9.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		180.000.000	APBD II			
	" PENGADAAN LAMPU JALAN"		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU PENERANG JALAN UMUM (LPJU)		IV NAGARI, KOTO TUO, KOTO TANGAH		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU PENERANG JALAN UMUM (LPJU)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, MEKAR JAYA SUNGAI TENANG		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG BHAKTI		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		36.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		180.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		360.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, AIR SERIAU		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		18.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, LIMO KOTO, AUR GADING		90.000.000	APBD II			
	LPJU		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		27.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		45.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN LPJU		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, LUMBARU		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN NAGARI		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, SIAUR, KOTO TANGAH		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		18.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, KAMPUNG RAJO		27.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		45.000.000	APBD II			
	LAMPU JALAN DI JORONG KAMPUNG JUAR		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, GANTING		18.000.000	APBD II			
	LAMPU PENERANGAN JALAN.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		45.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, KOTO LAMO		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE GUGUK DADOK		45.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN LAMPU JALAN PASAR LAMO DAN SAWAH LIEK		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, PASAR LAMO		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN DAN PERBAIKAN LAMPU JALAN		LUBUAK TAROK, BULUAH KASOK, KOTO BULUH KASOK		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO BARU		45.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		54.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		180.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, AIA AMO, GUGUK TINGGI		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, KAMPUNG JUAR		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		450.000.000	APBD II			
	LPJU JORONG SUKOREJO		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		90.000.000	APBD II			
	LAMPU JLAN PASAR TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		27.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SUNGAI ABU		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PONDOK JAGO		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LPJU		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO ATEH		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LPJU		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TUO TANJUNG		18.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN LPJU JALAN DI JORONG KP. BERLIAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		45.000.000	APBD II/DAK			
	MOHON BANTUAN LAMPU JALAN TDI TARATAK LUBUK KE SONTU		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SEJAHTERA		45.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PARAK GADANG		18.000.000	APBD II			
	LPJU JR.GUGUK NANEH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		135.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO HILIR		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN PENERANGAN JALAN UMUM		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KALUMPANG		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, TAPIAN NANTO		18.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		45.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	LAMPU JALAN DARI SIMPANG KE MUSOLA BABUL KHAIRAT		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		45.000.000	APBD II/DAK			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, PALALUAR, RANAH		90.000.000	APBD II			
	LPJU		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDI		45.000.000	APBD II			
	LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU TENAGA SURYA		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		90.000.000	APBD II			
	LPJU		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDI		90.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, SILUKAH		27.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		18.000.000	APBD II			
	KOMPONEN PEMELIHARAAN		Kec. TES, KELURAHAN TES, JORONG TES		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, MUARO, BATANG SALOSA		90.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		36.000.000	APBD II			
	LAMPU JALAN UMUM		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		90.000.000	APBD II			
	MOHON BANTUAN LAMPU JALAN DARI STASIUN KE POTAI		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PAYO SAHADAT		135.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PONDOK JAGO		18.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LPJU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG IV		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		90.000.000	APBD II			
	LPJU		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO BARU		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, UJUNG PADANG		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN (LPJU) TERSEBAR DINAGARI		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		180.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		45.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, DUSUN TINGGI II		45.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, TARUKO		9.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LPJU		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMA SUNDAL		18.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMASANGAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN NAGARI LIMO KOTO		KOTO VII, LIMO KOTO, PASAR TANJUNG AMPALU		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO TUO		45.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOMAN KOCIK		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		36.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR SELATAN, PINCURAN VII		90.000.000	APBD II			
	LPJU		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		36.000.000	APBD II			
	LAMPU PENERANGAN JALAN MAKAM MENUJU JALAN ADI NEGORO		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOMAN KOCIK		18.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN DAN PERBAIKAN YANG RUSAK		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		36.000.000	APBD II			
	LAMPU PENERANGAN JALAN.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN DAN PERBAIKAN YANG RUSAK		IV NAGARI, KOTO BARU, KOTO PANJANG		45.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, UNGGAN BUKIK		90.000.000	APBD II			
	PENERANGAN JALAN		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		90.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TOMBANG		54.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALN UMUM (LPJU)		IV NAGARI, PALANGKI, LINTAS HARAPAN		45.000.000	APBD II			
	BANTUAN LAMPU JALAN KE MUSOLLA.		IV NAGARI, MUARO BODI, BUNGO PINANG		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, LIMA SUNDAL		18.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		54.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN PENGADAAN LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		63.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KAMPUNG BERLIAN		18.000.000	APBD II			
	PEMASANGAN JARINGAN LISTRIK		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG I		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TAMBAHAN LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		45.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN LAMPU PENERANGAN JALAN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KAMBUK KOMAN		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		45.000.000	APBD II			
	METERISASI LPJU		Kec. TES, KELURAHAN TES, JORONG TES		500.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		45.000.000	APBD II			
	LAMPU JALAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		63.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KOTO VII, TANJUNG, KOTO TANJUNG		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, DURI		36.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN KARENA BELUM ADANYA PENERANGAN LAMPU JALAN		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, PALE		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		45.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN GUGUK PANDAN (PASANG BARU) JORONG KANDANG HARIMAU		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, KANDANG HARIMAU		18.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG III		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		18.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MOBIL CRANE		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		1.700.000.000	APBD II			
	LPJU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, LUBUK CUPAK		90.000.000	APBD II			
	PEMBAYARAN LPJU		Kec. TES, KELURAHAN TES, JORONG TES		6.800.000.000	APBD II			
	PENAMBAHAN LAMPU JALAN DEKAT SDN 24 AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KAPALO KOTO		90.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN LAMPU JALAN		IV NAGARI, PALANGKI, TAMBANG AMEH		45.000.000	APBD II			
1.11.21.03	Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksannya pelayanan Angkutan BUS Sekolah, Bus Perintis sesuai kebutuhan, Terlaksannya sosialisasi peraturan pemerintah tentang angkutan orang dan barang	Kab. Sijunjung	12 Bulan Bulan	100.000.000	APBD II		12	165.000.000
1.11.21.04	Operasional Terminal Tipe C	Jumlah bulan nya terpenuhinya pengelolaan terminal tipe c	Kab. Sijunjung	12 Bulan Bulan	47.000.000	APBD II		12	440.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	jumlah dokumen yang tersusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.625.000.000				2.200.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.126.000.000				1.545.500.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan ADM perkantoran, dan terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas dan atribut bagi aparatur bagi perhubungan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	526.000.000	APBD II		12	885.500.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah pembayaran jasa tenaga harian lepas, jumlah tagihan rekening telepon, listrik, speedy, air dan surat kabar	Muaro Sijunjung	12 Bulan	600.000.000	APBD II		12	660.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		429.000.000				544.500.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah terpeliharanya kendaraan bermotor roda enam, empat, tiga, dua, Jumlah terpeliharanya gedung dan peralatan kantor, jumlah pengadaan kendaraan roda 2	Kab. Sijunjung	12 Bulan	429.000.000	APBD II		12	544.500.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		70.000.000				110.000.000
9.99.05.05	Diklat Dasar Aparatur Perhubungan	Adanya peningkatan SDM tentang perhubungan	Kab. Sijunjung	10 Orang	50.000.000	APBD II		5	55.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Kab. Sijunjung	8 Orang	20.000.000	APBD II		10	55.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
TOTAL PAGU					7.837.917.305				7.837.917.305
1.12	Komunikasi dan Informatika				6.162.917.305				6.162.917.305
1.12.15	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	• Jumlah media elektronik dan tradisional Pemerintah Daerah yang dapat diakses publik	Kab. Sijunjung		2.777.917.305				2.777.917.305
1.12.15.03	Pengembangan pengolahan Domain dan sub domain Pemerintah daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan Domain dan sub domain di nagari dan desa se Kab. Sijunjung	Kab. Sijunjung	8 Nagari/Desa	80.000.000	APBD II		1 kali, 8 Nagari 32 Peserta, 61 kali , 100 %	80.000.000
1.12.15.02	Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Publik	1. Jumlah berita yang masuk ke Website Sijunjung.go.id 2. Jumlah lomba jurnalistik tingkat SLTP dan SLTA 3. Jumlah lomba fotografi tingkat SLTP dan SLTA	Kab. Sijunjung	1000 Berita	200.000.000	APBD II		1000 Berita, 75 peserta, 75 peserta	200.000.000
1.12.15.04	Pengembangan sarana Komunikasi,diseminasi informasi Pemerintah melalui media Tradisonal,KIM dan media luar ruang	1. Jumlah peserta sosialisasi KIM yang akan dilaksanakan 2. Jumlah desiminasi yang dilakukan melalui media tradisional 3. Jumlah peserta untuk bintek website KIM 4. Jumlah informasi yang disampaikan melalui M-Pustika 5. Jumlah Aplikasi yang dikembangkan dan dimaintenance	Kab. Sijunjung	200 Orang	400.000.000	APBD II		200 orang, 16 kali, 8 Kec, 61 peserta, 16 informasi, 1 aplikasi	400.000.000
1.12.15.06	Operasional Penyelenggaraan Radio Lansek manih	1. Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih 2. Persentase sarana dan prasarana operasional yang terpenuhi	Kab. Sijunjung	12 Bulan	382.000.000	APBD II		12 bulan, 90 %	382.000.000
1.12.15.09	Pengelolaan PPID Kabupaten Sijunjung	1. Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengelolaan PPID 2. Jumlah peserta bintek penyusunan daftar Informasi Publik 3. Jumlah OPD yang mengikuti pengujian konsekwenSI informasi publik 4. Jumlah admin website PPID yang dibina dan jumlah daftar informasi Publik12	Kab. Sijunjung	12 Bulan	81.000.000	APBD II		12 bulan, 200 orang, 35 OPD, 61 orang	81.000.000
1.12.15.10	Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Melalui Media	Jumlah Media kerjasama penyebarluasan informasi pada media online	Kab. Sijunjung	35 Media	1.346.239.886	APBD II		35 Media	1.346.239.886
1.12.15.11	Pengembangan Promosi /Potensi Desa/Nagari/Pariwisata Melalui Media Online	1. Jumlah peserta pelatihan jurnalis media online 2. Jumlah paket vidiotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung 3. Jumlah paket vidiowall yang tersedia 4. Jumlah vidio atau berita yang	Kab. Sijunjung	5 Orang	288.677.419	APBD II		5 orang, 1 paket, 1 paket, 10 Dokumen	288.677.419
1.12.16	Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah	• Persentase SKPD yang menerapkan e-government	Kab. Sijunjung		2.750.000.000				2.750.000.000
1.12.16.03	Pembangunan dan Pengembangan Tatakelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	1. Jumlah Perda dan Perbup yang tersedia 2. Jumlah koordinasi dan konsultasi tentang SPBE 3. Jumlah tersedianya laptop untuk tata kelola	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	100.000.000	APBD II		2 Dokumen , 4 kali, 1 unit	100.000.000
1.12.16.04	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Informatika	1. Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa layanan internet 2. Jumlah sekolah dan peserta sosialisasi internet sehat di Kab. Sijunjung 3. Jumlah koordinasi dan konsultasi ke BAKTO, Kementerian Kominfo dan Provider 4. Jumlah kecamatan dan nagari yang difasilitasi daerah blankspot	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	100.000.000	APBD II		8 Kecamatan , 4 SLTP dan 4 SLTA, 800 Peserta, 3 kali, 8 Kec dan 48 Nagari	100.000.000
1.12.16.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan LAN /WAN	1. Jumlah bulan pembayaran sewa bandwith 2. Jumlah paket terpenuhinya sarana prasarana peralatan jaringan untuk 3 Kecamatan 3. Jumlah OPD yang dilakukan pemeliharaan jaringan 4. Jumlah paket internet yang tersedia untuk 3 kecamatan 5. Persentase terpenuhinya operasional pengembangan infrastruktur jaringan LAN/WAN untuk 1 tahun	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.000.000.000	APBD II		12 bulan, 3 paket, 32 OPD, 3 paket, 100 %	2.000.000.000
1.12.16.06	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik yang Terintegrasi	1. Jumlah aplikasi yang dimaintenance 2. Jumlah terpenuhinya rehab ruang aplikasi 3. Jumlah terpenuhinya pembuatan ruang server 4. Jumlah tersedianya server dan rak server 5. Jumlah tersedianya perangkat komputer (PC) untuk aplikasi	Kab. Sijunjung	4 APLIKASI	375.000.000	APBD II		4 aplikasi, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 1 unit	375.000.000
1.12.16.07	Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang mengikuti Bintek penggunaan aplikasi-aplikasi di Diskominfo Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana ruang bintek	Kab. Sijunjung	35 OPD	175.000.000	APBD II		35 OPD, 80 %	175.000.000
1.12.20	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	• Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia tepat waktu	Kab. Sijunjung		235.000.000				235.000.000
1.12.20.01	Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah	1. Jumlah dokumen ketersediaan data statistik dalam rangka mendukung perencanaan, pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan daerah 2. Jumlah nagari yang dibina untuk pembentukan nagari statistik 3. Jumlah aplikasi yang tersedia	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	235.000.000	APBD II		3 Dokumen, 3 Nagari, 1 Aplikasi	235.000.000
1.12.26	Program Pengelolaan dan pengembangan Persandian Daerah	• Persentase SKPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	Kab. Sijunjung		400.000.000				400.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.12.26.02	Penyiapan Tata Kelola Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	1. Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik 2. Jumlah roadmap persandian 3. Jumlah sosialisasi pengamanan informasi daerah 4. Jumlah sosialisasi Perbup tentang persandian dan Perbup Tata Kelola Sertifikat Elektronik 5. Persentase Infrastruktur persandian terpenuhi 6. Jumlah workshop pengujian keamanan informasi (website atau aplikasi)	Kab. Sijunjung	35 OPD	400.000.000	APBD II		35 OPD, 1 Dok, 1 kali, 2 kali, 75 %, 1 kali	400.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
2.05.16.64	Penyusunan dan Evaluasi Renstra 2021-2026	Persentase tingkat keselarasan renstra dengan RPJMD	Muaro Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		1 Dokumen	25.000.000
2.07	Pemerintahan		Kab. Sijunjung		10.000.000				10.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		10.000.000				10.000.000
2.07.15.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Muaro Sijunjung	1 Dokumen	10.000.000	APBD II		1 Dokumen	10.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.640.000.000				1.640.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.040.000.000				1.040.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	350.000.000	APBD II		12 bulan	350.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	690.000.000	APBD II		12 bulan	690.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		500.000.000				500.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	500.000.000	APBD II		12 bulan	500.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		100.000.000				100.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat lulus/mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai tupoksi x	Kab. Sijunjung	20 Orang	100.000.000	APBD II		20	100.000.000
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
TOTAL PAGU					14.023.392.600				6.390.892.600
1.13	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				744.000.000				970.000.000
1.13.16	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	• Jumlah pelaku UKM yang meningkat pengetahuan kewirausahaannya • Persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan	Kab. Sijunjung		221.000.000				221.000.000
1.13.16.01	Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan KUKM	Jumlah KUKM yang dilatih dan Pendataan KUKM yang dilakukan .	Kab. Sijunjung	50 Kop/UMKM	221.000.000	APBD II		50 KUKM, 1.830 UKM	221.000.000
	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DAN FASILITASI KEMITRAAN KUKM		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		221.000.000	APBD II			
	PELATIHAN UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK	0		APBD II			
	PELATIHAN UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH	0		APBD II			
1.13.17	Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	• Persentase peningkatan jumlah UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan • Rata-rata nilai SHU Koperasi	Kab. Sijunjung		298.000.000				524.000.000
1.13.17.02	Monitoring pembiayaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro	Jumlah money dan pengawasan yang dilakukan, Bimtek usaha pemula yang dilaksanakan .	Kab. Sijunjung	110 Kop/UMKM	74.000.000	APBD II		110 KUKM, 30 WUP	74.000.000
1.13.17.04	Pelayanan Pengelolaan Dana Bergulir KUKM	Jumlah KUKM yang dilayani kredit penguatan modalnya, Jumlah KUKM yang dikelola penggunaan dana bergulirnya.	Kab. Sijunjung	320 Kop/UMKM	162.000.000	APBD II		320 KUKM, 293 KUKM	300.000.000
1.13.17.05	Pembinaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan terhadap KSP dan USP	Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya, Jumlah lomba koperasi yang dilakukan, Pelatihan koperasi pola syariah yang dilaksanakan .	Kab. Sijunjung	80 Kop/UMKM	62.000.000	APBD II		80 Koperasi, 5 KPR, 20 KSP/USP	150.000.000
1.13.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	• Persentase koperasi aktif	Kab. Sijunjung		225.000.000				225.000.000
1.13.18.01	Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Koperasi dan Persiapan RAT Koperasi	Jumlah koperasi yang dibina, Jumlah bimtek yang dilaksanakan, Jumlah dekopinda yang difasilitasi.	Kab. Sijunjung	96 Koperasi	225.000.000	APBD II		91 KOperasi,3 (tiga) kali, 1 (satu) Dekopinda	225.000.000
1.18	perdagangan		Kab. Sijunjung		7.317.500.000				1.560.000.000
1.18.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	• Persentase UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan Metrologi Legal	Kab. Sijunjung		240.000.000				240.000.000
1.18.15.04	Pengawasan Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Jumlah pengawasan alat UTTP dan BDKT yang diawasi .	Kab. Sijunjung	50 DEFAULT	50.000.000	APBD II		50 BDKT	50.000.000
1.18.15.06	Operasional UPTD Metrologi	Jumlah bulan operasional UPTD terpenuhi.	Kab. Sijunjung	12 Bulan	70.000.000	APBD II		12	70.000.000
1.18.15.03	Fasilitasi tera dan tera ulang alat UTTP	Jumlah UTTP yang ditera ulang.	Kab. Sijunjung	250 DEFAULT	60.000.000	APBD II		250 UTTP	60.000.000
1.18.15.05	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah pengawasan alat UTTP yang dilakukan .	Kab. Sijunjung	150 DEFAULT	60.000.000	APBD II		150 UTTP	60.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.18.16	Peningkatan Usaha Perdagangan	• Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Kab. Sijunjung		7.077.500.000				1.320.000.000
1.18.16.01	Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun dan direvitalisasi (DAK dan APBD).	Kab. Sijunjung	10 DEFAULT	5.982.500.000	APBD II/DAK		6 pasar	900.000.000
	REAHAB PASAR NAGARI TIMBULUN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN LOS PASAR NAGARI TANJUNG KALIANG		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		250.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN LOS PASAR NAGARI TARATAK BARU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO		250.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN PASAR NAGARI MALORO		KAMANG BARU, MALORO, PASAR		1.000.000.000	D A K			
	REHAB PASAR NAGARI T.J.GADANG		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		300.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB LOS PASAR NAGARI AIE ANGEK		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KAPALO KOTO		300.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN KIOS DAN LOS PASAR CALAU NAGARI SUMPUR KUDUS SELATAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		400.000.000	APBD II			
	PASAR BECEK DAN TIDAK SEHAT.		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUNGAI TAMBANG II		1.000.000.000	APBD II/DAK			
	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR GAMBOK.		KOTO VII, PADANG LAWEH, PASAR GAMBOK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA PASAR		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		1.032.500.000	APBD II			
	REVITALISAASI PASAR NAGARI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		500.000.000	D A K			
	PEMBANGUNAN PASAR NAGARI LUBUK TAROK		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		500.000.000	APBD II			
1.18.16.02	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar	Jumlah pasar rakyat dibina dan diawasi.	Kab. Sijunjung	54 DEFAULT	55.000.000	APBD II		54 pasar	55.000.000
1.18.16.03	Monitoring harga dan pasar murah bahan pokok dan barang penting	Jumlah monitoring harga yang dilakukan, Jumlah operasi pasar yang dilakukan.	Kab. Sijunjung	52 Kali	70.000.000	APBD II		52	70.000.000
1.18.16.04	Pembinaan dan pengembangan usaha dagang	Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha dagang yang dilakukan, Jumlah promosi dagang yang diikuti.	Kab. Sijunjung	30 Kali	825.000.000	APBD II		30 kali, 4 promosi dagang	150.000.000
	PENGADAAN GEROBAK DAN ETALASE USAHA KECIL PEDAGANG DI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		120.000.000	APBD II			
	PENGADAAN GEROBAK DAN ETALASE USAHA KECIL PEDAGANG DI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		120.000.000	APBD II			
	PENGADAAN GEROBAK DAN ETALASE USAHA KECIL PEDAGANG DI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		120.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAGANG		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN GEROBAK DAN ETALASE USAHA KECIL PEDAGANG DI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		120.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA DAGANG		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG		75.000.000	APBD II			
	PENGADAAN GEROBAK DAN ETALASE USAHA KECIL PEDAGANG DI PADANG SIBUSUK		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		120.000.000	APBD II			
1.18.16.05	Pengawasan Pupuk bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan.	Kab. Sijunjung	30 Kali	60.000.000	APBD II		30	60.000.000
1.18.16.06	Pengelolaan dan Penataan Pasar Inpres	Jumlah bulan pengelolaan dan penataan pasar inpres terpenuhi.	Kab. Sijunjung	12 Bulan	85.000.000	APBD II		12	85.000.000
1.19	perindustrian		Kab. Sijunjung		4.023.500.000				2.097.500.000
1.19.15	Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Tepat Guna IKM	• Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sijunjung		2.031.000.000				590.000.000
1.19.15.02	Pelatihan peningkatan produksi industri makan dan minum	jumlah IKM minum yang dilatih	Kab. Sijunjung	20 DEFAULT	120.000.000	APBD II		20 IKM	120.000.000
1.19.15.03	Pelatihan peningkatan mutu industri logam	Jumlah IKM logam yang dilatih.	Kab. Sijunjung	20 DEFAULT	120.000.000	APBD II		20 IKM	120.000.000
1.19.15.01	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah mesin dan peralatan yang diadakan, Jumlah IKM yang dilatih kemampuan dalam pengembangan usaha.	Kab. Sijunjung	25 DEFAULT	1.791.000.000	APBD II		25 IKM, 6 UNit	350.000.000
	BANTUAN MESIN UNTUK KELOMPOK PENGRAJIN ROTAN SERASIH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		220.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN MESIN JAHIT		KOTO VII, GUGUK, PADANG LALANG		75.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT TENUN SEMI OTOMATIS		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KINKIN		75.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALAT-ALAT UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		150.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PELATIHAN MENJAHIT		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO PANJANG		75.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALAT-ALAT UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		75.000.000	APBD II/DAK			
	PELATIHAN TENUN, SULAM, DAN BORDIR		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN JAHIT		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		100.000.000	APBD II/DAK			
	PELATIHAN MEMBORDIR		KOTO VII, GUGUK, PADANG LALANG		75.000.000	APBD II			
	PENGUATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		196.000.000	APBD II			
	PENGADAAN PERALATAN MESIN UNTUK KELOMPOK PENGRAJIN ROTAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN BORDIR KOMPUTER 12 HEAD		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, PAUH		75.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN ALAT-ALAT UNTUK USAHA INDUSTRI KECIL		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN PERALATAN TENUN DAN BATIK DI KELOMPOK EKONOMI KREATIF		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PELATIHAN MENJAHIT DAN DIVERSIFIKASI PRODUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		75.000.000	APBD II			
1.19.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Potensi Lokal dan Sentra	• Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian • Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda	Kab. Sijunjung		1.992.500.000				1.507.500.000
1.19.16.04	Pemberdayaan Kelembagaan Dekranasda	Jumlah IKM yang dibina oleh Dekranasda, Jumlah Ivent yang diikuti.	Kab. Sijunjung	25 DEFAULT	500.000.000	APBD II		25 IKM, 5 Ivent	500.000.000
1.19.16.05	Pengembangan Industri berbasis sentra	Jumlah lokasi sentra yang dibangun (DAK)	Kab. Sijunjung	3 DEFAULT	300.000.000	APBD II/DAK		3 (tiga) sentra	300.000.000
1.19.16.01	Pembinaan Industri Agro	Jumlah IKM agro yang dibina.	Kab. Sijunjung	50 DEFAULT	125.000.000	APBD II		50 IKM	125.000.000
1.19.16.02	Pembinaan Industri Non Agro	Jumlah IKM agro yang dibina, Lomba desain motif yang dilaksanakan, Pelatihan ceta bacorak, mahani, mangarok, dan celup.	Kab. Sijunjung	50 DEFAULT	765.000.000	APBD II		50 IKM, 21 SMU/SMK/ 4 kali	280.000.000
	PELATIHAN MERAJUT		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		35.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KELOMPOK PKK		KOTO VII, TANJUNG, TANJUNG BERINGIN		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN TENUN		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		200.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN INDUSTRI NON AGRO		SIJUNJUNG, SIJUNJUNG, PASAR SIJUNJUNG		280.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN INDUSTRI KERAJINAN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		100.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PEMBUATAN CENDERA MATA DAN SOUVENIR		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		75.000.000	APBD II			
1.19.16.07	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri kecil menengah (IKM)	Jumlah IKM yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ke-tiga, Jumlah IKM yang bersertifikasi, Jumlah produk IKM yang bersertifikasi.	Kab. Sijunjung	28 DEFAULT	220.000.000	APBD II		28 IKM	220.000.000
1.19.16.11	Pendataan dan Penyusunan Profile IKM	jumlah dokumen yang tersusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	82.500.000	APBD II		1	82.500.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra opd 2022 - 2026	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.913.392.600				1.763.392.600
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.063.392.600				1.013.392.600
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran.	Muaro Sijunjung	12 Bulan	656.871.600	APBD II		12	656.871.600
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan penunjang operasional jasa perkantoran terpenuhi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	406.521.000	APBD II		12	356.521.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		650.000.000				550.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	650.000.000	APBD II		12	550.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		50.000.000				50.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Kab. Sijunjung	25 Orang	50.000.000	APBD II		25	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		150.000.000				150.000.000
1.13.01.02	Penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja, LKPD dan LPPD	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Kab. Sijunjung	4 Laporan	150.000.000	APBD II		4 laporan, 30 monev	150.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
TOTAL PAGU					2.456.197.942				4.224.054.000
1.14	Penanaman Modal				1.305.496.386				2.222.850.000
1.14.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	• Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	Kab. Sijunjung		324.472.195				562.168.000
1.14.18.14	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Izin yang diterbitkan	Kab. Sijunjung	1200 Izin	218.678.000	APBD II		1200	392.686.000
1.14.18.15	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen hasil survey IKM	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	32.660.020	APBD II		2	41.500.000
1.14.18.24	Penyusunan Pedoman Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen yang disusun	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	18.982.675	APBD II		2	33.218.000
1.14.18.25	Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Media	Kab. Sijunjung	2 Media	54.151.500	APBD II		2	94.764.000
1.14.19	Program Peningkatan Promosi, Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	• Jumlah investor PMDN, • Jumlah investor PMA, • Realisasi investasi PMDN, • Realisasi investasi PMA	Kab. Sijunjung		981.024.191				1.660.682.000
1.14.19.15	Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah regulasi yang disusun	Muaro Sijunjung	1 Perda	184.120.838	APBD II		1 Rancangan	322.210.000
1.14.19.03	Survey Potensi Investasi Penanaman Modal	Jumlah buku potensi peluang investasi	Kab. Sijunjung	35 Buku	100.000.000	APBD II		50 buku	187.348.000
1.14.19.08	Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Laporan LKPM	Kab. Sijunjung	40 Perusahaan	97.000.000	APBD II		40	134.764.000
1.14.19.09	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	Kab. Sijunjung	20 Perusahaan	70.000.000	APBD II		20	89.016.000
1.14.19.10	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan penanaman modal yang diawasi	Kab. Sijunjung	90 Perusahaan	62.603.353	APBD II		90	109.555.000
1.14.19.11	Promosi Investasi	Jumlah Event yang diikuti	Dalam dan Luar Negeri	3 Even	467.300.000	APBD II		4	817.789.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Renstra yang di susun dan di Evaluasi	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.125.701.556				2.001.204.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		864.002.556				1.511.981.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	357.387.556	APBD II		12	625.405.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	506.615.000	APBD II		12	886.576.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		236.699.000				414.223.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Kab. Sijunjung	12 Bulan	236.699.000	APBD II		12	414.223.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		25.000.000				75.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek	Kab. Sijunjung	40 Orang	25.000.000	APBD II		40	75.000.000
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA									
TOTAL PAGU					20.042.674.400				34.352.674.400
2.01	Pariwisata				15.156.745.275				15.156.745.275
2.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	• Jumlah iven promosi pariwisata yang diikuti dan diselenggarakan • Jumlah media promosi pariwisata	Kab. Sijunjung		2.284.045.944				2.284.045.944
2.01.15.09	Festival Lansek Manih	Jumlah kelompok./grup kesenian	Muaro Sijunjung	5 Kelompok	300.000.000	APBD II		5	300.000.000
2.01.15.02	Tour de Singkarak	Jumlah pembalap yang difasilitasi	Kab. Sijunjung	1100 Orang	503.269.890	APBD II		1100	503.269.890
2.01.15.08	Fasilitas Seni Anak Nagari	Jumlah group yang dibina	Kab. Sijunjung	9 Group	300.000.000	APBD II		9	300.000.000
2.01.15.07	Promosi Kesenian Pariwisata Sijunjung	Jumlah event pagelaran seni	Luar Kabupaten	4 Even	450.000.000	APBD II		4	450.000.000
2.01.15.10	Promosi Geopark Silokek	Tersedia promosi geopark	Kab. Sijunjung	1 Kawasan	730.776.054	APBD II		1	730.776.054
2.01.15.01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah promosi pariwisata	Kab. Sijunjung	7 Eksemplar	0	APBD II		7	0
2.01.15.12	Peningkatan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah media promosi pariwisata	Kab. Sijunjung	5 Media	0	APBD II		5	0
2.01.15.13	Partisipasi Keikutsertaan Event/Pameran	Jumlah even yang diikuti	Kab. Sijunjung	4 Even	0	APBD II		4	0
2.01.15.14	Kerjasama Pengembangan Pariwisata	Jumlah kerjasama dengan pihak lain	Kab. Sijunjung	10 Orang	0	APBD II		10	0
2.01.15.15	Event Promosi Daerah	Jumlah even	Kab. Sijunjung	2 Even	0	APBD II		2	0
2.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	• Jumlah destinasi wisata yang berkembang	Kab. Sijunjung		11.354.099.331				11.354.099.331
2.01.16.03	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kab. Sijunjung	10 Paket	9.604.099.331	APBD II/DAK		10	9.604.099.331

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.01.16.04	Pengembangan Geopark Silokek	Jumlah pengembangan kawasan	Kec. Sijunjung dan Kec. Sumpur Kudus	13 Kegiatan	1.750.000.000	APBD II		13	1.750.000.000
2.01.16.01	Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah pembangunan objek wisata	Kab. Sijunjung	6 Paket	0	APBD II		6	0
2.01.16.05	Pembangunan Fasilitas Wisata Minat Khusus Paralayang	Jumlah pembangunan	Kab. Sijunjung	1 Paket	0	APBD II		1	0
2.01.16.06	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah pembangunan sarana di objek wisata	Kab. Sijunjung	3 Kawasan	0	APBD II		3	0
2.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	• Jumlah kemitraan pariwisata	Kab. Sijunjung		325.000.000				325.000.000
2.01.17.01	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang dibina	Dalam dan Luar Kabupaten	4 Dokumen	75.000.000	APBD II		4	75.000.000
2.01.17.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Pokdarwis	Kab. Sijunjung	28 Kelompok	250.000.000	APBD II		28	250.000.000
2.01.22	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	• Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	Kab. Sijunjung		1.193.600.000				1.193.600.000
2.01.22.01	Pemilihan dan Pemberdayaan Duta Wisata Sijunjung	Jumlah pemilihan duta wisata sijunjung	Kab. Sijunjung	10 Pasang	432.000.000	APBD II		10	432.000.000
2.01.22.03	Kegiatan Festival Kuliner	Jumlah festival	Muaro Sijunjung	1 Kali	200.000.000	APBD II		1	200.000.000
2.01.22.04	Pendataan dan Pemetaan Pelaku Ekonomi	Jumlah peserta lomba fotografi	Kab. Sijunjung	16 Sektor	345.600.000	APBD II		16	345.600.000
2.01.22.05	Lomba Fotografi	Jumlah pembinaan atau pelatihan	Kab. Sijunjung	16 Orang	0	APBD II		16	0
2.01.22.06	Pembinaan atau Pelatihan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan atau pelatihan	Kab. Sijunjung	30 Orang	0	APBD II		30	0
2.01.22.02	Partisipasi dan Peningkatan Jejaring Kerjasama	Jumlah festival produk pelaku ekonomi kreatif	Kab. Sijunjung	1 Kali	0	APBD II		1	0
2.01.22.07	Parade Seni Kreatif Kabupaten	Jumlah parade	Kab. Sijunjung	1 Even	0	APBD II		1	0
2.01.22.08	Gelar Karya Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya di Tingkat Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan	Kab. Sijunjung	1 Even	0	APBD II		1	0
2.01.22.09	Persiapan Pembentukan Zona Kratif di Kabupaten Sijunjung	Jumlah tempat rancangan	Kab. Sijunjung	1 Unit	216.000.000	APBD II		1	216.000.000
2.01.25	Informasi dan Komunikasi Kepariwisataaan		Kab. Sijunjung		0				0
2.01.25.01	Pendataan dan Pemetaan Potensi Wisata Kabupaten Sijunjung	Jumlah buku dokumen data potensi wisata dan peta Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung	1 Buku	0	APBD II		1	0
2.04	Pemuda dan Olah Raga		Kab. Sijunjung		3.146.143.125				17.456.143.125
2.04.15	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	• Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Kab. Sijunjung		2.127.264.125				16.437.264.125
2.04.15.01	Pembinaan Pemuda Pelopor dan Keamanan Lingkungan	Jumlah pemuda pelopor dan JPI	Kab. Sijunjung	17 Orang	530.064.125	APBD II		17	530.064.125
2.04.15.05	Kursus Pembinaan Dasar dan Lanjutan	Jumlah orang yang dibina	Kab. Sijunjung	110 Orang	0	APBD II		110	0
2.04.15.06	Seleksi, Pelatihan serta Karyawisata Paskibraka	Jumlah pelatihan atau karyawisata paskibraka	Dalam dan Luar Kabupaten	100 Orang	1.597.200.000	APBD II		100	15.907.200.000
2.04.15.02	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta bimtek, perlombaan even dan peserta perkemahan	Kab. Sijunjung	130 Orang	0	APBD II		130	0
2.04.15.07	Kepramukaan	Jumlah peserta	Kab. Sijunjung	300 Orang	0	APBD II		300	0
2.04.15.08	Pendataan Potensi Kepemudaan	Jumlah potensi pemuda yang didata	Kab. Sijunjung	50 Orang	0	APBD II		50	0
2.04.15.09	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kab. Sijunjung	1 Paket	0	APBD II		1	0
2.04.15.03	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah pemuda yang dilatih	Kab. Sijunjung	30 Orang	0	APBD II		30	0
2.04.15.04	Jambore Kepanduan	Jumlah peserta jambore	Kab. Sijunjung	150 Orang	0	APBD II		150	0
2.04.16	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	• Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	Kab. Sijunjung		580.500.000				580.500.000
2.04.16.01	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah senam kesegaran jasmani	Muaro Sijunjung	55 Kali	100.000.000	APBD II		55	100.000.000
2.04.16.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah cabor	Kab. Sijunjung	4 Cabang	400.000.000	APBD II		4	400.000.000
2.04.16.03	Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	Kab. Sijunjung	3 Kegiatan	80.500.000	APBD II		3	80.500.000
2.04.16.04	Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Jumlah cabor	Kab. Sijunjung	5 Cabang	0	APBD II		5	0
2.04.16.05	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Jumlah cabang olahraga yang unggul	Kab. Sijunjung	4 Cabang	0	APBD II		4	0
2.04.16.06	Pembinaan Cabang Olahraga Potensi di Tingkat Daerah	Jumlah cabang yang dibina	Kab. Sijunjung	7 Cabang	0	APBD II		7	0
2.04.16.07	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	Jumlah orang yang berdedikasi dan berprestasi	Kab. Sijunjung	75 Orang	0	APBD II		75	0
2.04.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	• Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak / terstandarisasi	Kab. Sijunjung		438.379.000				438.379.000
2.04.17.01	Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Kab. Sijunjung	2 Unit	0	APBD II		2	0
2.04.17.03	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah bulan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga	Muaro Sijunjung	12 Bulan	438.379.000	APBD II		12	438.379.000
2.04.20	Sarana dan Prasarana Pemuda		Kab. Sijunjung		0				0
2.04.20.01	Pembangunan Gedung Pemuda	Jumlah pembangunan gedung	Kab. Sijunjung	1 Unit	0	APBD II		1	0
2.04.20.02	Pengembangan Kawasan Lemcendikia Kabupaten Sijunjung	Jumlah kawasan	Kab. Sijunjung	1 Kawasan	0	APBD II		1	0
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		75.000.000				75.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		75.000.000			75.000.000
2.05.16.65	Monitoring Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi, perencanaan dan pelaporan	Muaro Sijunjung	8 Dokumen	75.000.000	APBD II	8	75.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.664.786.000			1.664.786.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.110.094.000			1.110.094.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Muaro Sijunjung	12 Bulan	703.776.000	APBD II	12	703.776.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	406.318.000	APBD II	12	406.318.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		479.692.000			479.692.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	479.692.000	APBD II	12	479.692.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		75.000.000			75.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Dalam dan Luar Kabupaten	15 Orang	75.000.000	APBD II	15	75.000.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								
TOTAL PAGU					18.334.245.405			4.090.000.000
1.15	Perpustakaan				390.000.000			805.000.000
1.15.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan/ pemustaka dalam setahun	Kab. Sijunjung		390.000.000			805.000.000
1.15.15.03	Pemeliharaan Bahan Pustaka	Jumlah Buku/ Bahan Pustaka Yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	2000 Buku	30.000.000	APBD II	2000	45.000.000
1.15.15.04	Publikasi Budaya Baca	- Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling - Jumlah Perpustakaan Yang Terstandar - Jumlah Perpustakaan Yang di Bina	Muaro Sijunjung	127 Lokasi	100.000.000	APBD II	93	275.000.000
1.15.15.06	Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	- Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan	Muaro Sijunjung	80 Orang	80.000.000	APBD II	35	80.000.000
1.15.15.07	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	Muaro Sijunjung	35 Lokasi	60.000.000	APBD II	50	80.000.000
1.15.15.08	Diklat Penulisan Sastra	- Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan - Jumlah Peserta Bimtek Penulisan Sastra	Muaro Sijunjung	0 Orang	0	APBD II	50	145.000.000
1.15.15.05	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	- Jumlah Paket Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Jumlah Kelompok Pencinta Buku di Nagari	Muaro Sijunjung	20 Paket	120.000.000	APBD II	30	180.000.000
1.16	kearsipan		Kab. Sijunjung		634.000.000			715.000.000
1.15.16	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	• Jumlah ASN yang meningkat pengetahuan kearsipannya per tahun • Jumlah dokumen / arsip daerah yang dialih mediakan per tahun • Jumlah arsip konvensional / naskah kuno yang dipelihara	Kab. Sijunjung		225.000.000			315.000.000
1.15.16.04	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Secara Digital	Jumlah Dokumen Arsip/ Buku Induk Siswa Yang Di Alih Mediakan	Muaro Sijunjung	250 Buku	50.000.000	APBD II	300	150.000.000
1.15.16.03	Pengawasan Kearsipan	- Jumlah OPD, Kecamatan dan Bagian Setda Yang Di Audit Tentang Penyelenggaraan Kearsipan - Jumlah OPD Yang Arsipnya Dimonitoring dan Dievaluasi	Muaro Sijunjung	67 Lokasi	115.000.000	APBD II	41	80.000.000
1.15.16.01	Penataan dan Pemeliharaan Arsip Naskah Kuno	Jumlah Arsip Naskah Kuno Yang Dipelihara	Muaro Sijunjung	30 Buku	60.000.000	APBD II	50	85.000.000
1.16.15	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Kab. Sijunjung		145.000.000			280.000.000
1.16.15.01	Pembinaan Arsip	Jumlah Nagari/Desa Yang Dibina	Muaro Sijunjung	30 Nagari/Desa	50.000.000	APBD II	30	55.000.000
1.16.15.02	Akuisisi Arsip	Jumlah Box/Kotak Arsip Yang Berada Di Depo LKD	Muaro Sijunjung	2000 Kotak	40.000.000	APBD II	3500	80.000.000
1.16.15.04	Evaluasi dan Monitoring Kearsipan	Jumlah OPD Yang Arsipnya Dimonitoring dan Dievaluasi	Muaro Sijunjung	0 OPD	0	APBD II	33	80.000.000
1.16.15.07	Lomba Peduli Arsip	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip	Muaro Sijunjung	8 Kecamatan	55.000.000	APBD II	25	65.000.000
1.16.17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	• Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan	Kab. Sijunjung		264.000.000			120.000.000
1.16.17.02	Sosialisasi Perda Kearsipan	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Kearsipan	Muaro Sijunjung	120 PESERTA	24.000.000	APBD II	120	35.000.000
1.16.17.04	Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	Muaro Sijunjung	103 PESERTA	240.000.000	APBD II	35	85.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		25.000.000			0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000			0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		17.285.245.405			2.570.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		907.245.405			1.035.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	407.705.405	APBD II	12	485.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Jasa Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	499.540.000	APBD II	12	550.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		16.353.000.000			1.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	16.353.000.000	APBD II/DAK		12	1.500.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		25.000.000				35.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Orang yang mengikuti bimtek, pelatihan, kursus, diklat dalam rangka peningkatan SDM Aparatur	Muaro Sijunjung	10 Orang	25.000.000	APBD II		15	35.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		0				0
9.99.06.11	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan	Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan OPD	Kab. Sijunjung	4 Dokumen	0	APBD II		4	0
DINAS PERTANIAN									
TOTAL PAGU					52.914.176.848				32.904.263.616
1.01	Pendidikan				25.000.000				25.000.000
1.01.31	Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
1.01.31.01	Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021	Jumlah dokumen pendukung Renstra	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		1	25.000.000
2.02	pertanian		Kab. Sijunjung		50.002.991.848				29.968.051.616
2.02.15	Program Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pertanian	Kab. Sijunjung		200.000.000				200.000.000
2.02.15.01	Pengelolaan Statistik Pertanian	1. Terlaksananya pelaporan statistik pertanian 2. Terlaksananya Pengambilan Ubinan 3. Terlaksananya Pertemuan pembenahan Statistik Pertanian	Kab. Sijunjung	12 Bulan	100.000.000	APBD II		12	100.000.000
2.02.15.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1. Terlaksananya penyusunan laporan rutin Dinas 2. Terlaksananya pembuatan proposal APBN/DAK 3. Terlaksananya rapat MONEV Kegiatan Dinas 4. Terlaksananya Akuntabilitas pelaporan Kegiatan Dinas	Kab. Sijunjung	12 Bulan	100.000.000	APBD II			100.000.000
2.02.16	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pemasaran	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Kab. Sijunjung		1.213.000.000				120.000.868
2.02.16.01	Pengembangan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura	1. Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen Hasil Tanaman Jengkol 2. Terlaksananya Promosi Produk olahan hasil Tanaman Hortikultura 3. Terlaksananya Lomba buah durian lokal Sijunjung 4. Terlaksananya Dampingan kegiatan TP-APBN 5. Terlaksananya Sharing Informasi tentang Pasca Panen Komoditi Tanaman Hortikultura.	Kab. Sijunjung	12 Bulan	120.000.000	APBD II		12	120.000.000
2.02.16.02	Pengembangan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	1. Terlaksananya pelatihan Pengolahan Hasil Komoditi Tanaman Pangan 2. Terlaksananya Sharing Informasi tentang teknologi pengolahan jerami padi sawah 3. Terlaksananya Promosi Produk olahan hasil Tanaman Pangan. 4. Terlaksananya cetak buku kehilangan hasil (Losis) Padi	Kab. Sijunjung	12 Bulan	125.000.000	APBD II			0
2.02.16.03	Pengembangan Pasca Panen Pengolahan hasil Tanaman Perkebunan	1. Pengadaan sarana dan prasarana panen pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan 2. Pembangunan Pasar Lelang Karet 3. Fasilitasi Pembangunan Pasar Lelang Karet 4. Pelatihan Teknis Panen/Pascapanen tanaman perkebunan 5. Pertemuan Kemitraan Usaha Komoditi perkebunan 6. Pertemuan Pasar Lelang Karet 7. Pembinaan kelompok pengolahan hasil Perkebunan, pasar lelang karet, panen/pasca panen tanaman perkebunan 8. Study Teknis Pasar Lelang Karet 9. Pencatatan / Survey Harga Pasar Komoditi Perkebunan 10. Dukungan Operasional Kegiatan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	968.000.000	APBD II		12	868
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PANEN PASCA PANEN DAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PERKEBUANAN		SUMPUR KUDUS, TAMPARUNGO, SITONGEK		50.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN PASCA PANEN PENGOLAHAN PENGEOLAHAN HASIL TANAMAN PERKEBUANAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		868.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN PASAR LELANG KARET		SUMPUR KUDUS, TANJUNG BONAI AUR, PAUH		50.000.000	APBD II			
2.02.17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/ perkebunan per tahun	Kab. Sijunjung		10.198.064.000				8.529.064.000
2.02.17.01	Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	1. Terlaksananya Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi 2. Terlaksananya Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida 3. Terlaksananya Pembinaan UPPU/APPO Pertanian 4. Terlaksananya Pelatihan Alat dan Mesin Pertanian 5. Terlaksananya Pembinaan UPJA 6. Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Kartu Tani 7. Terlaksananya study tiru Petugas Alsintan 8. Terlaksananya Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.534.000.000	APBD II		12	330.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN ALSINTAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		120.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALSISTAN		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALSINTA		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		0	APBD II			
	PENGADAAN MESIN HANDTRATOR		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, LUBUAK BATAPUAK UNGGAN		30.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALSINTAN		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, TARATAK TANGAH		0	APBD II			
	PENGADAAN MESIN PANEN (RISE COMVINE HARVETOR) UNTUK GAPOKTAN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		450.000.000	APBD II			
	PENGADAAN HANDTRAKTOR RODA 2		SIJUNJUNG, MUARO, ILIE PASA JUMAK		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALSINTAN CULTIVATOR		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALSINTAN		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALAT PERTANIAN (HENTRAKTOR, PERONTOK PADI, TRESER)		KAMANG BARU, SUNGAI LANSEK, SIKAYAN		30.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN PERONTOK GABAH		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, LUBUAK BATAPUAK UNGGAN		40.000.000	APBD II			
	PENYEDIAAN ALAT-ALAT PERTANIAN		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		30.000.000	APBD II			
	PENGLOLAAN PUPUK PESTISIDA DAN ALAT MESIN PERTANIAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		330.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT PERTANIAN		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALSINTAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		60.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN (ALAT PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PERTANIAN)		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
	PENGADAAAAN ALAT PERTANIAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN PENGADAAN ALSINTAN UNTUK KELOMPOK TANI DI JORONG GUGUK NANEH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		30.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT PRODUKSI DAN ALAT PERTANIAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALSINTAN TRAKTOR, CULTIVATOR, HANDTRASER		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN BAJAK		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		300.000.000	APBD II			
	BANTUAN PENGADAAN ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK KELOMPOK TANI SETIA KAWAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN TRAKTOR		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		30.000.000	APBD II			
	SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN PANEN PADI		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIBOLIN		0	APBD II			
	PENGADAAN MESIN BAJAK		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIAK IMUAK		30.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN PERONTOK GABA		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		30.000.000	APBD II			
	BANTUAN ALSINTAN CULTIVATOR, HANDTRASER		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		64.000.000	APBD II			
	SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MESIN TRAKTOR DAN MESIN PERONTOK GABAH		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		50.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, KOTO		30.000.000	APBD II			
2.02.17.03	Pengelolaan Alat Mesin Pertanian	1. Terlaksananya Pembinaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan 2. Terlaksananya Pemeliharaan Alsintan 3. Terlaksananya Pengelolaan Alsintan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	400.000.000	APBD II			0
2.02.17.04	Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perlindungan Tanaman	1. Terlaksananya gerakan PHT 2. Eksplorasi calon biang agen hayati 3. Pelatihan Pembuatan Agen hayati	Kab. Sijunjung	12 Bulan	90.764.000	APBD II		12	90.764.000
2.02.17.05	Pengelolaan Pengembangan Lahan Pertanian	1. Terlaksananya Pembangunan Jalan Usaha Tani 2. Terlaksananya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 3. Terlaksananya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 4. Terlaksananya Pendampingan IPDMIP 5. Terlaksananya Pendmpingan Pemanfaatan Cetak Sawah Baru	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.000.000.000	APBD II		12	400.000.000
2.02.17.06	Pengelolaan Pengembangan Irigasi Pertanian	1. Terlaksananya Mimbar Sarasehan P3A 2. Terlaksananya Pembinaan Kelompok P3A 3. Terlaksananya Pembuatan Embung (DAK) 4. Terlaksananya Pembuatan Dam Parit (DAK) 5. Terlaksananya Pembuatan SID Kegiatan TP PSP 6. Terlaksananya Pengawasan Kegiatan Bapem TP PSP 7. Terlaksananya Pembuatan Embung (APBD) 8. Terlaksananya pembangunan JIDES 9. Terlaksananya Pembangunan Irigasi dan Tali Bandar 10. Terlaksananya Pembangunan Pompanisasi 11. Pembangunan Dam Parit (APBD)	Kab. Sijunjung	12 Bulan	4.100.000.000	APBD II/DAK		12	5.635.000.000
	TALI BANDAR IRIGASI SUNGAI MENGKUANG		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		40.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN PEMBUATAN BAK PENAMPUNGAN AIR DI SAWAH GODANG		KUPTAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN EMBUNG		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		150.000.000	APBD II/DAK			
	IRIGASI DAN TALIBANDAR MUDI K BARANGAN		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		40.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN IRIGASI SAWAH SOPAN		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO TUO		100.000.000	APBN			
	TALI BANDAR BATANG SAO-SAO		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, PINANG		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN TALI BANDAR MUDI K LURAH		LUBUAK TAROK, SILONGO, PAKORONGAN		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DESA (JIDES)(NAGARI)		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		40.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN IRIGASI KAJATAN		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP EMBUNG NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		150.000.000	APBD II/DAK			
	REHAB BERAT JIDES		SIJUNJUNG, PARU, KAMPUNG TARANDAM		40.000.000	APBD II/DAK			
	REHAP JIDES		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN EMBUNG PERIKANAN TANBONCAH		LUBUAK TAROK, SILONGO, PAKORONGAN		150.000.000	APBD II/DAK			
	POMPANISASI SAWAH MUKABU		KUPTAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		40.000.000	APBD II			
	TALI BANDAR SUNGAI TOMBANG KE BARIANG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		40.000.000	APBD II			
	IRIGASI MUDI K KADAM		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		100.000.000	APBN			
	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI BATANG TALANG		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JIDES/JITUT DI SOPAN		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		40.000.000	APBD II			
	LANJUTAN IRIGASI LOSUONG BATU		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		40.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN EMBUNG BONCAH RUMBAI		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		150.000.000	APBD II/DAK			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PEMBANGUNAN SALURAN IRIGASI SEI PAKU		KAMANG BARU, LUBUK TARANTANG, LUBUK TARANTANG		40.000.000	APBD II			
	TALI BANDAR DARI SDN 15 TIGO KORONG KE PUSKESMAS		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, TIGO KORONG		40.000.000	APBD II			
	IRIGASI PERSAWAHAN PADANG KOMANG KOTO BARU		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO BARU		100.000.000	APBN			
	PEMBANGUNAN EMBUNG PERTANIAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		150.000.000	APBD II/DAK			
	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN IRIGASI PERTANIAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		890.000.000	APBD II			
	REHAB IRIGASI DAN TALI BANDAR SOPAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO ILIE		40.000.000	APBD II			
	PEMBUATAN TALI BANDAR DARI SILILIR KE BATANG PIRUKO		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		40.000.000	APBD II			
	SALURAN IRIGASI DI JR.PANDAM		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		100.000.000	APBN			
	PENGEMBANGAN IRIGASI DESA		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO SISAWAH		40.000.000	APBD II			
	KALI BANDAR PANAI KE BAWAH KOTO		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, SUNGAI JODI		40.000.000	APBD II			
	DAM PARIT MUDIK MAYAK		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KUMBAYAK		150.000.000	APBD II/DAK			
	PEMBANGUNAN IRIGASI MUDIKA ALU		LUBUAK TAROK, LALAN, BATU AJUNG		100.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN EMBUNG DI JORONG PALINTANGAN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		150.000.000	APBD II/DAK			
	IRIGASI DAN TALI BANDAR PERSAWAHAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		100.000.000	APBN			
	DAM PARIT MUDIK MULAU		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, KOTO RANAH		150.000.000	APBD II/DAK			
	TALI BANDAR SAWAH PADANG,SITAWAR,RAWANG		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, KOTO TUO		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN JIDES/JITUT DI SOPAN POGAN		IV NAGARI, KOTO TUO, RANTAU JAMBU		40.000.000	APBD II			
	TALI BANDAR KELOMPOK TANI SERBAGUNA		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		40.000.000	APBD II			
	TALIBANDAR KELOMPOK TANI PINAGO INDAH		KAMANG BARU, SIAUR, RANAH PINAGO		0	APBD II			
	REHAB TALI BANDAR SAWAH TANJUANG		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, KOTO		40.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN /REHAP EMBUNG NAGARI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		150.000.000	APBD II/DAK			
	PERBAIKAN IRIGASI		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO BARU		100.000.000	APBD II			
	IRIGASI SAWAH TARATAK		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO RANAH		100.000.000	APBN			
	IRIGASI RANAH		LUBUAK TAROK, LUBUAK TAROK, JAMBU LIPO		40.000.000	APBD II			
2.02.17.09	Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Terpadu Partisipatif/IPDMIP	1. Terlaksananya Staf Lapangan Program IPDMIP 2. Terlaksananya Pelatihan Penyuluh Pertanian Swadaya 3. Terlaksananya Sekolah Lapang Tani 4. Terlaksananya Pengadaan Buku Catatan Usaha Tani 5. Terlaksananya Forum Berbagi Pengalaman Antar Petani 6. Terlaksananya Kunjungan Lintas Perdesaan 7. Terlaksananya Pertemuan Bulanan Penyuluh 8. Terlaksananya Penghargaan Penyuluh 9. Terlaksananya Penghargaan Petani 10. Terlaksananya Demonstrasi Alsintan 11. Terlaksananya Demonstrasi 12. Terlaksananya Pemetaan Awal Rantai Nilai 13. Terlaksananya Validasi Rantai Nilai 14. Terlaksananya Administrasi Kegiatan 15. Terlaksananya Peralatan Mendukung Manajemen	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.073.300.000	Default		12	2.073.300.000
2.02.18	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian /Perkebunan	• Produktivitas padi, • Produksi karet	Kab. Sijunjung		23.397.386.000				8.379.786.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.02.18.01	Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Terlaksananya penangkaran benih padi 2. Terlaksananya sarana produksi benih padi 3. Terlaksananya pemurnian varietas padi unggul lokal 4. Terlaksananya perbaikan varietas padi lokal 5. Terlaksananya pembibitan tanaman hortikultura 6. Terlaksananya uji padi/galur terhadap hama dan penyakit 7. Terlaksananya Dukungan Operasional Kegiatan 8. Terlaksananya pembelian GKP benih/benih lulus padi	Kab. Sijunjung	12 Bulan	480.069.000	APBD II		12	480.069.000
2.02.18.03	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	1. Terlaksananya dampingan kegiatan TP APBN 2. Terlaksananya Pertemuan penyusunan sasaran tanam dan panen tanaman pangan 3. Terlaksananya Pencanangan Gerakan Tanam Serentak 4. Terlaksananya Pengembangan Benih Padi Inbrida 5. Terlaksananya Fieldday Tanaman Pangan (Pajale) 6. Terlaksananya Pertemuan koordinasi upsus pajale 7. Terlaksananya Sosialisasi program dan kegiatan tanaman pangan 8. Terlaksananya Bimtek Jagun 9. Terlaksananya demplot jagung 10. Terlaksananya Pengembangan Jagung Hibrida	Kab. Sijunjung	12 Bulan	620.000.000	APBD II		12	500.000.000
	PENGADAAN BENIH UNGGUL PADI & JAGUNG TERSEBAR DI SELURUH JORONG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, KUNANGAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BENIH BERSUBSIDI		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		20.000.000	APBD II			
	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		500.000.000	APBD II			
2.02.18.04	Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	1. Terlaksananya pembinaan dan monitoring peredaran benih tanaman pangan 2. Terlaksananya pembinaan penangkar benih tanaman pangan 3. Terlaksananya Forum perbenihan tanaman pangan 4. Terlaksananya pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan 5. Terlaksananya Fieldday perbenihan tanaman pangan 6. Terlaksananya SLPHT Padi 7. Terlaksananya Fieldday di lokasi SLPHT Padi 8. Terlaksananya dukungan perbenihan tanaman pangan 9. Terlaksananya Bimtek penangkar benih tanaman pangan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	878.000.000	APBD II		12	778.000.000
	PENGADAAN BENIH UNGGUL PADI DAN JAGUNG		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		0	APBD II			
	PENYEDIAAN BIBIT YANG BERSERTIFIKAT		KOTO VII, PALALUAR, BUNGO		100.000.000	APBD II			
	PENGLOLAAN PEREBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		778.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BENIH BERSUBSIDI		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		0	APBD II			
2.02.18.05	Kegiatan Pengembangan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1. Pembibitan kelapa sawit 2. Pembibitan karet stump mata tidur 3. Pembibitan pinang 4. Pembibitan Kopi 5. Pemeliharaan bibit sawit lanjutan 6. Pemeliharaan kebun entres karet 7. Pemeliharaan kebun entres kakao 8. Dukungan Operasional Kegiatan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	638.694.000	APBD II		12	483.694.000
	BANTUAN KELOMPOK TANI		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, KOTO BARU		200.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN BENIH UNGGUL TANAMAN PERKEBUNAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		438.694.000	APBD II			
2.02.18.06	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1. Terlaksananya Peremajaan Tanaman Karet 2. Terlaksananya Optimalisasi Lahan Karet 3. Terlaksananya Pembangunan Kebun Kakao 4. Terlaksananya Pembangunan Kebun Kopi Robusta 5. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tanaman Karet 6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tanaman Kakao 7. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tanaman Kelapa Sawit 8. Terlaksananya Sosialisasi ISPO Kelapa Sawit 9. Terlaksananya Studi Teknis Budidaya Komoditi Perkebunan 10. Terlaksananya Pemeliharaan Lanjutan Kebun Contoh/koleksi 11. Terlaksananya Rapat Koordinasi Bidang Perkebunan 12. Terlaksananya Pendukung Operasional Kegiatan 13. Terlaksananya Operasional Peremajaan Sawit 14. Terlaksananya Sekolah Lapangan (SL) Perkebunan 15. Terlaksananya Budidaya Tanaman Kopi Lokal 16. Terlaksananya Pengadaan dan Pelatihan Bibit Kelapa Sawit	Kab. Sijunjung	12 Bulan	5.128.600.000	APBD II		12	2.238.000.000
	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		2.238.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN BIBIT CACAO		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		50.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT PERTANIAN SAWIT		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		50.000.000	APBD II			
	ADANYA BANTUAN BIBIT UNTUK KELOMPOK TANI KWT		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN / PERMOHONAN BIBIT SAWIT		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KAKAO		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAWIT		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		0	APBD II			
	BANTUAN KELOMPOK TANI		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERKEBUNAN DAN PERIKANAN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT KARET.		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN GUGUK BULEK		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT CENGKEH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		80.000.000	APBD II			
	KEBUN KARET		KUPTAN, PAMUATAN, PAMUATAN TIMUR		200.000.000	APBD II			
	SL PERKEBUNAN		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, PALINTANGAN		75.000.000	APBD II			
	BUDIDAYA TANAMAN KOPI LOKAL DAN TATACARA PEMANGKASAN		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET,MANGGIS, PINANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN KECAMBAH SAWIT		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		90.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET,MANGGIS, PINANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMURUH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAWIT		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		85.600.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SEPerti ,SAWAIT,KARET,KAKAO,KOPI,DLL (NAGARI MANGANTI)		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN KECAMBAH PINANG HIBRIDA		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT KARET SERTA PAGAR WARING		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAWIT		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT UNTUK KELOMPOK PILIANG SAKATO DAN KWT JR.KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN DAN PELATIHAN BIBIT KELAPA SAWIT		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET UNGGUL		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		80.000.000	APBD II			
	PENYEDIAAN BIBIT YANG BERSETIFIKAT		KOTO VII, PALALUAR, BUNGO		50.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BANTUAN BIBIT KOPI ROBUSTA		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PINANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		75.000.000	APBD II			
2.02.18.09	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	1. Terlaksananya Dampingan TP Hortikultura dan Operasional Kegiatan 2. Terlaksananya SLGAP Manggis 3. Terlaksananya Pemeliharaan rumah jamur tiram 4. Terlaksananya sosialisasi program dan kegiatan tanaman hortikultura 5. Terlaksananya Bimtek Cabe Merah kegiatan APBD 6. Terlaksananya Pertemuan penyusunan sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura 7. Terlaksananya Bimtek Penerapan GAP/SOP manggis 8. Terlaksananya Pengembangan cabe merah 9. Terlaksananya Fieldday tanaman hortikultura 10. Terlaksananya Sosialisasi registrasi manggis 11. Terlaksananya Demplot Cabe Merah 12. Terlaksananya Pengadaan Bibit Manggis 13. Terlaksananya Pengadaan Bibit Jeruk Nipis 14. Terlaksananya Pengadaan Bibit Durian	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.832.000.000	APBD II		12	1.544.000.000
	PENGADAAN BIBIT DURIAN,MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS, DURIAN, PETAI, JERUK NIPIS, JENGKOL UNTUK KELOMPOK TANI SETIA KAWAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		20.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAWIT DAN MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT KARET, PADI, JERUK NIPIS, KAKAO, MANGGIS, JAGUNG DAN KELAPA HIBRIDA		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN MANGGIS		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN,MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT JERUK		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG TIGO		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT (SAWIT,COKLAT,CERUK MANIS, SANGKIS)		TANJUNG GADANG, PULASAN, SUNGAI KANDI		72.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN,MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT DURIAN MUSANG KING		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT PERKEBUNAN KARENA KURANGNYA BIBIT MANGGIS		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		80.000.000	APBD II			
	PENYEDIAAN BIBIT UNGGUL SAWIT,PINANG,DURIAN,MANGGIS DLL		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT JERUK NIPIS		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		80.000.000	APBD II			
	REKLAMASI TANAHAH BEKAS TAMBAG UNTUK DI JADIKAN LAHAN PERTANIAN		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KOTO BENEK		20.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TIAU		80.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN HORTIKULTURA		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS DAN SAWIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT DURIAN UNGGUL		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT AGRO WISATA		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		40.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TALANG		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS DAN SAWIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS.		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		80.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		40.000.000	APBD II			
2.02.18.12	Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura	1. Terlaksananya dukungan pengelolaan perbenihan hortikultura 2. Terlaksananya dukungan pengelolaan perlindungan tanaman hortikultura 3. Monitoring Perbenihan hortikultura 4. Monitoring Perlindungan Tanaman hortikultura 5. Terlaksananya eksplorasi dan determinasi pohon induk varietas unggul lokal 6. Terlaksananya demplot perbenihan hortikultura 7. Terlaksananya dukungan pengelolaan perbenihan hortikultura 8. Terlaksananya SLPHT Manggis 9. Terlaksananya Bimbingan Teknis OPT Hortikultura 10. Terlaksananya Pengembangan Tanaman Hortikultura 11. Terlaksananya Bimtek Pengembangan Tanaman Hortikultura 12. Terlaksananya Koordinasi Perbenihan Hortikultura	Kab. Sijunjung	12 Bulan	4.214.000.000	APBD II		12	400.000.000
	PENGADAAN BIBIT JERUK NIPIS		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, AIE ANGEK, KOTO BENEK		65.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, SILOKEK, TANJUNG MEDAN		50.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TALANG		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT DURIAN UNGGUL		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		75.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KILIRAN JAO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS DAN SAWIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS DURIAN, PETAI, JERUK NIPIS, JENGKOL UNTUK KELOMPOK TANI SETIA KAWAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PANDAM		100.000.000	APBD II			
	PENGLOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN HORTIKULTURA		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		1.544.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, GUGUK NANEH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KAYU GADIH		50.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT AGROWISATA		SIJUNJUNG, KANDANG BARU, SAMIAK		0	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT UGGUL PERTANIAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU UTARA, PISANG KOLEK		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PEMBIBITAN		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		80.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS DAN SAWIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDI		75.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO LAMO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT JERUK		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG TIGO		75.000.000	APBD II			
	PENYEDIAAN BIBIT UGGUL (MANGGIS, DURIAN, PINANG, SAWIT)		IV NAGARI, KOTO BARU, SIMPANG AMPEK		65.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT (COKLAT, JERUK MANIS, SUNKIS, SAWIT)		TANJUNG GADANG, PULASAN, SUNGAI KANDI		75.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT MANGGIS		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		70.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		TANJUNG GADANG, PULASAN, KOTO PULASAN		75.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN, MANGGIS, JENGKOL, PETAI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT PERTANIAN (KARET, PADI, KAKAO, MANGGIS, JAGUNG DAN KELAPA HIBRIDA)		KOTO VII, BUKIT BUAL, KOTO TANGAH		40.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT DURIAN GADANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDI		50.000.000	APBD II/DAK			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, DUSUN TINGGI I		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT MANGGIS		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, BATANG TIAU		100.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.02.18.13	Kegiatan Pengelolaan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih Tan. Perkebunan Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Penangkar Benih Perkebunan Terlaksananya Pelatihan Teknis Okulasi Tanaman Karet Terlaksananya Pelatihan Pembibitan Kelapa Sawit Terlaksananya Pengamatan OPT Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pelatihan Teknis Sambung Pucuk Kakao Terlaksananya SLPHT Tanaman Karet Terlaksananya SLPHT Tanaman Kakao Terlaksananya Pengadaan Bibit Karet Terlaksananya Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Terlaksananya Pengadaan Kecambah Kelapa Sawit Terlaksananya Pengadaan Bibit Pinang Terlaksananya Pengadaan Kecambah Pinang Terlaksananya Pengadaan Bibit Kopi Sambung Terlaksananya Pengadaan Bibit Kakao Terlaksananya Pertemuan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Terlaksananya Studi Teknis Perbenihan Kelapa Sawit/Tanaman Perkebunan Terlaksananya Studi Teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan Terlaksananya Pelatihan Perbanyakan Trichoderma conii Terlaksananya Pertemuan Kelompok Brigade Karet Terlaksananya Pertemuan Kelompok Brigade Kak Terlaksananya Temu Lapang Pendukung Operasional Kegiatan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	8.606.023.000	APBD II		12	1.956.023.000
	BANTUA BIBIT KOPI ROBUSTA		SUMPUR KUDUS, SILANTAI, KOTO TANGAH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET, MANGGIS, PINANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		300.000.000	APBD II			
	PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		1.956.023.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		KAMANG BARU, MALORO, SUNGAI ALAI		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAWIT DAN MANGGIS		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, KOTO TANJUNG LOLO		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN KECAMBAH PINANG HIBRIDA		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		200.000.000	APBD II			
	PENGADAAN KECAMBAH SAWIT		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PINANG		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT PERKEBUNAN KARENA KURANGNYA BIBIT MANGGIS		LUBUAK TAROK, LALAN, LALAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		400.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BANTUAN BIBIT SAWIT		KAMANG BARU, SUNGAI BATUANG, PASAR		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		400.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAAAN BIBIT SAWIT		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT PERTANIAN SAWIT		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		400.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAWIT		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAWIT		KAMANG BARU, MUARO TAKUANG, SUNGAI SARIEK		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT UNTUK KWT		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		300.000.000	APBD II			
	BATUAN BIBIT KARET SERTA PAGAR WARING		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		0	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BANTUAN BIBIT SAWIT		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN KELAPA SAWIT		KAMANG BARU, MALORO, KOTO RANAH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERKEBUNAN DAN PERIKANAN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN KELOMPOK TANI		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		300.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KAKAO		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT UNTUK KELOMPOK PILIANG SAKATO DAN KWT JR. KOTO RANAH		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, KOTO RANAH		300.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT PERTANIAN DAN PERKEBUNAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		400.000.000	APBD II/DAK			
	PENGADAAN KECAMBAH BIBIT KELAPA SAWIT		LUBUAK TAROK, SILONGO, RANAH LAWEH		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT CENGKEH		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN DAN PERKEBUNAN (SEPERTI SAWIT, KARET, KAKAO , KOPI)		SUMPUR KUDUS, MANGGANTI, BALAI LAMO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KAKAO		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		50.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		KUPTAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN GUGUK BULEK		300.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAWIT TEPI SUNGAI		KOTO VII, TANJUNG, UJUNG PADANG		0	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET, MANGGIS, PINANG		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		300.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT KARET		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		100.000.000	APBD II			
2.02.19	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Tingkat kematian ternak	Kab. Sijunjung		2.280.568.000				2.280.568.000
2.02.19.02	Operasional UPTD Puskesmas Muaro	1. Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan penular rabies 2. Terlaksananya vaksinasi jembrana pada sapi bali 3. Terlaksananya vaksinasi SE pada sapi dan kerbau 4. Meningkatnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan 5. Meningkatnya jenis Pelayanan Kesehatan Hewan 6. Terlaksananya pembangunan ruang inap/rawat pasien 7. Terlaksananya pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C 8. Terlaksananya operasional di UPTD Puskesmas Muaro	Kab. Sijunjung	12 Bulan	420.000.000	APBD II		12	420.000.000
2.02.19.03	Operasional UPTD Puskesmas Palangki	1. Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan penular rabies 2. Terlaksananya vaksinasi jembrana pada sapi bali 3. Terlaksananya vaksinasi SE pada sapi dan kerbau 4. Meningkatnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan 5. Meningkatnya jenis Pelayanan Kesehatan Hewan 6. Terlaksananya pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C 7. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan biosekuriti hewan di Lingkup UPTD Pusekswan dan UPTD Pasar Ternak palangki 8. Terlaksananya operasional di UPTD Puskesmas Palangki	Kab. Sijunjung	12 Bulan	230.000.000	APBD II		12	230.000.000
2.02.19.04	Operasional UPTD Puskesmas Kiliran Jao	1. Terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan penular rabies 2. Terlaksananya vaksinasi jembrana pada sapi bali 3. Terlaksananya vaksinasi SE pada sapi dan kerbau 4. Terlaksananya pembangunan gudang dan tempat jaga paramedis veteriner 5. Meningkatnya jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan 6. Meningkatnya jenis Pelayanan Kesehatan Hewan 7. Terlaksananya pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C 8. Terlaksananya operasional di UPTD Puskesmas Kiliran Jao	Kab. Sijunjung	12 Bulan	305.000.000	APBD II		12	305.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.02.19.05	Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	1. Terlaksananya pengendalian penyakit hewan menular strategis dan zoonosis 2. Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan 3. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan Hewan 4. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keswan bagi petugas medis veteriner dan paramedis veteriner 5. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan hewan dan biosekuriti di Pasar Ternak Kumanis dan RPH Kumanis 6. Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional petugas medis veteriner dan paramedis veteriner 7. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana teknis di Unit Pelayanan Kesehatan Hewan 8. Terlaksananya pengawasan dan peredaran mutu obat hewan, Sarana dan Bahan Medik	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.234.300.000	APBD II		12	1.234.300.000
2.02.19.06	Surveilans, Identifikasi dan Pemetaan Penyakit Hewan	1. Tersedianya informasi penyakit 2. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana 3. Terlaksananya surveilans penyakit hewan 4. Terlaksananya monitoring vaksinasi rabies pada hewan penular rabies 5. Terlaksananya monitoring vaksinasi jembrana pada sapi bali 6. Terlaksananya monitoring vaksinasi SE pada sapi dan kerbau 7. Terlaksananya pelaporan unit pelayanan keswan 8. Terlaksananya pengiriman sampel penyakit asal hewan	Kab. Sijunjung	12 Kecamatan	91.268.000	APBD II		8	91.268.000
2.02.20	Program Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya	• Persentase pemotongan hewan yang ASUH di RPU/RPA/RPH, • Jumlah ternak yang terjual di pasar ternak	Kab. Sijunjung		978.500.000				978.500.000
2.02.20.01	Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	1. Terlaksananya pengawasan ante mortem/post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan qurban 2. Terlaksananya pengawasan ante mortem dan post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan di luar RPH 3. Terlaksananya pengujian sampel produk hewan 4. Terlaksananya sosialisasi dan Penerbitan Pemotongan hewan Di Luar RPH 5. Terlaksananya pengawasan ante mortem dan post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan di RPH Kumanis 6. Terlaksananya operasional RPH Kumanis 7. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah inap RPH Kumanis 8. Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor bagi petugas pengawas kesmavet, keur master 9. Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Kesehatan Masyarakat Veteriner 10. Terlaksananya pembinaan unit usaha yang memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 11. Terlaksananya rehab batu bronjong dan Pagar Tembok pembatas di RPH Kumanis 12. Terlaksananya pembangunan drainase di RPH Kumanis	Kab. Sijunjung	12 Bulan	978.500.000	APBD II		12	978.500.000
2.02.20.02	Operasional Rumah Potong Hewan (RPH) Kumanis	1. Terlaksananya pengawasan ante mortem dan post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan di RPH Kumanis 2. Terlaksananya operasional RPH Kumanis 3. Terlaksananya pembangunan pagar di RPH Kumanis 4. Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah inap RPH Kumanis 5. Terlaksananya pengadaan kendaraan bermotor bagi petugas pengawas kesmavet, keur master	Kab. Sijunjung	12 Bulan	0	APBD II		12	0
2.02.21	Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	• Produksi daging sapi/kerbau, • Produksi telur ayam ras	Kab. Sijunjung		5.518.016.000				6.938.016.000
2.02.21.01	Pembibitan dan Perawatan Ternak	1. Terlaksananya pengadaan frozen semen 2. Terlaksananya pengadaan peralatan inseminasi buatan 3. Terlaksananya Bimbingan rakor Bagi petugas inseminasi buatan 4. Terlaksananya pengadaan bibit hpt 5. Terlaksananya pengadaan obat-obatan ternak 6. Terlaksananya pengadaan pakan ternak 7. Terlaksananya pengadaan N2cair 8. Terlaksananya pengadaan peralatan kandang 9. Terlaksananya pengadaan Kerbau 10. Pembangunan Gedung SPIB Kab 11. Pembangunan pagar unit pembibitan unggas 12. Terlaksananya bimbingan/koordinasi pembibitan peternakan 13. Terlaksananya pengadaan pembelian laptop dan printer 14. Terlaksananya pembelian kendaraan roda 2 lapangan 15. Terlaksananya pengadaan sapi 16. Terlaksananya pengadaan kambing 17. Terlaksananya pengadaan Itik	Kabupaten Sijunjung	12 Bulan	1.302.416.000	APBD II		12	1.062.416.000
	PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		282.416.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN INDUK SAPI PRODUKTIF KELOMPOK TANI ANDALAN FAM JORONG SUKA MAJU		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA MAJU SUNGAI TENANG		185.000.000	APBD II			
	PENGGEMUKAN / PENGEMBANGAN SAPI		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR BARAT		80.000.000	APBD II			
	PETERNAKAN KAMBING		KOTO VII, GUGUK, BULUH ROTAN		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TERNAK SAPI		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, MUDIKA IMUAK		185.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TERNAK SAPI		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PINCURAN TUJUH		185.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT ITIK		SUMPUR KUDUS, TANJUANG LABUAH, SIMPANG SAWAH SILUPAK		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN TERNAK SAPI GUGUK		KOTO VII, GUGUK, KOTO GUGUK		185.000.000	APBD II			
2.02.21.02	Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	1. Pengadaan ternak sapi pendistribusian 2. Revolving Ternak 3. Pertemuan Kemitraan 4. Informasi Pasar/Survey Harga Komoditi Peternakan 5. Pelaksanaan AUTS/K 6. Pembinaan kelompok ternak revolving, Pengolahan hasil komoditi peternakan, permodalan dan investasi serta perizinan 7. Pembinaan kelompok ternak revolving, Pengolahan hasil komoditi peternakan, permodalan dan investasi serta perizinan 8. Pengadaan ternak besar 9. Pengadaan ternak kecil	Kab. Sijunjung	12 Bulan	3.956.600.000	APBD II		12	5.616.600.000
	BANTUAN TERNAK ITIK TANJUNG		KOTO VII, TANJUNG, UJUNG PADANG		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN SAPI		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN TERNAK SAPI DAN KAMBING		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, TANJUNG MEDAN		185.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TERNAK SAPI		KAMANG BARU, TANJUNG KALIANG, PARIK MALINTANG		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT ITIK		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		100.000.000	APBD II			
	MOHON BANTUAN BIBIT SAPI		KOTO VII, LIMO KOTO, BATU GANDANG		185.000.000	APBD II			
	DEMPLOT PETERNAKAN KAMBING		KOTO VII, PALALUAR, KOTO PALALUAR		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAPI		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		185.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAPI BALI		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO KALUAI		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAPI UNTUK KELOMPOK TANI PINCURAN DAGANG		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KORAN		92.500.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAPI PO		SUMPUR KUDUS, UNGGAN, LUBUAK BATAPUAK UNGGAN		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT ITIK		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		100.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAN TERNAK BESAR SAPI		LUBUAK TAROK, LATANG, IMBANG JOYO		150.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT UNGGUL PETERNAKAN		TANJUNG GADANG, TANJUNG LOLO, PASAR BARU		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAPI		KOTO VII, PADANG LAWEH, TERATAK BETUNG		185.000.000	APBD II			
	PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA MASYARAKAT		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		316.600.000	APBD II			
	PENGADAAN BANTUAN TERNAK SAPI		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, SUKA REJO SUNGAI TENANG		120.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAPI		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, LUBUK TOLANG		120.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT SAPI SIMENTAL		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIKA		120.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	BANTUAN BIBIT KAMBING BOER		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		185.000.000	APBD II			
	INDUKAN SAPI UNGGUL		KAMANG BARU, KAMANG, KAMANG SENTOSA		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT TERNAK (ITIK).		IV NAGARI, MUARO BODI, DUSUN TUO		100.000.000	APBD II			
	PENGADAAN TERNAK SAPI		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, SITAMPUANG		92.500.000	APBD II			
	BANTUAN ITIK DAN PAKAN UNTUK KELOMPOK		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT TERNAK (ITIK).		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		100.000.000	APBD II			
	BANTUAN TERNAK SAPI, KAMBING DAN UNGGAS DI NAGARI PADANG SIBUSUK		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN TERNAK SAPI, KERBAU, KAMBING DAN UNGGAS		KAMANG BARU, AIA AMO, KOTO TUO		120.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT KAMBING BOERKA		KOTO VII, PADANG LAWEH, BUKIK GOMBAK		200.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT SAPI AN TERNAK UNTUK KELOMPOK TANI RANAH SEPAKAT		KOTO VII, PALALUAR, RANAH		200.000.000	APBD II			
2.02.21.03	Pengembangan Agribisnis Peternakan	1. Berpartisipasinya Kab Sijunjung pada acara kontes ternak Tk Propinsi 2. Terlaksananya pembinaan Kelompok Tani 3. Terlaksananya Bimtek bagi kelompok-kelompok peternakan 4. Terlaksananya pembelian Laptop dan printer 5. Terlaksananya pembelian kendaraan roda 2 lapangan 6. Terlaksananya pembangunan kandang untuk kontes ternak Tk Kabupaten 7. Terlaksananya koordinasi pembangunan peternakan 8. Terlaksananya pendampingan program-program APBN dan APBD 9. Terlaksananya kontes ternak Tk kabupaten 10. Terlaksananya pembelian infocus 11. Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan kawasan komoditi peternakan 12. Terlaksananya inventarisir kelompok pengembangan usaha peternakan 13. Terlaksananya pembelian wireless	Kab. Sijunjung	12 Bulan	259.000.000	APBD II		12	259.000.000
	PELATIHAN BIMTEK PEMBUATAN PAKAN TERNAK		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO LAMO		55.000.000	APBD II			
	PENGEMBANGAMN AGRIBISNIS PETERNAKAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		204.000.000	APBD II			
2.02.22	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah ternak yang terjual di pasar ternak	Kab. Sijunjung		153.000.000				153.000.000
2.02.22.01	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan	1. Terlaksananya Rehap kandang pasar ternak kumanis 2. Terlaksananya operasional di UPTD pasar ternak 3. Terlaksananya Rigid di Pasar Ternak Palangki	Kab. Sijunjung	12 Bulan	153.000.000	APBD II		12	153.000.000
2.02.23	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	• Nilai Tukar Petani (NTP)	Kab. Sijunjung		5.561.078.848				1.886.078.848
2.02.13.02	Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan	1. Meningkatkan Kelembagaan Petani 2. Terlaksananya Pembinaan/Pendampingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 3. Terlaksananya Penilaian Berprestasi 4. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Poslunhag 5. Terwujudnya Data Base Kelompok 6. Pengadaan Sarana Kostra Tani (DAK) 7. Terlaksananya Rembug Tani Tk. Kabupaten	Kab. Sijunjung	12 Bulan	3.475.000.000	APBD II/DAK		12	400.000.000
	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PENYULUHAN		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		3.400.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN KTNA		KOTO VII, PALALUAR, KAMPUNG BARU		75.000.000	APBD II			
2.02.23.02	Optimalisasi Pelaksanaan Penyuluh	1. Meningkatkan Kelembagaan Petani 2. Terlaksananya Pembinaan/Pendampingan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha 3. Terlaksananya Penilaian Berprestasi 4. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Poslunhag 5. Terwujudnya Data Base Kelompok 6. Pengadaan Sarana Kostra Tani (DAK) 7. Terlaksananya Rembug Tani Tk. Kabupaten 8. Kursus Tani 9. Rembug Tani 10. Sekolah Lapang 11. Pelaksanaan Operasional UPTD BPPP 12. Operasional BPP kecamatan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	2.086.078.848	APBD II/DAK		12	1.486.078.848
	PELATIHAN/PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		75.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PELATIHAN KELOMPOK TANI		TANJUNG GADANG, SIBAKUR, KOTO SIBAKUR		100.000.000	APBD II			
	PELATIHAN KELOMPOK TANI		TANJUNG GADANG, LANGKI, KOTO LANGKI		100.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PETANI		KUPITAN, PAMUATAN, PAMUATAN BARAT		40.000.000	APBD II			
	PELATIHAN/PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		75.000.000	APBD II			
	BIMTEK KELOMPOK TANI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, SIMANCUNG		75.000.000	APBD II			
	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENYULUH		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		1.196.078.848	APBD II			
	BIMTEK KELOMPOK TANI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, KAPALO KOTO		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN PERKEBUNAN		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO LAMO		50.000.000	APBD II			
	BIMTEK KELOMPOK TANI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, GUGUK TINGGI		75.000.000	APBD II			
	BIMTEK KELOMPOK TANI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, LADANG KAPEH		75.000.000	APBD II			
	BIMTEK KELOMPOK TANI		KUPITAN, PADANG SIBUSUK, TAPI BALAI		75.000.000	APBD II			
	PELATIHAN/PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		75.000.000	APBD II			
2.02.24	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Jumlah kelompok usaha pertanian dengan agribisnis yang terintegrasi	Kab. Sijunjung		503.379.000				503.037.900
2.02.24.09	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	1. Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian 2. Meningkatkan Penggunaan Teknologi 3. Temu Karya Penyuluh 4. Temu Teknis Tk. Kabupaten 5. Seminar Penyuluh 6. Workshop Penyuluh Pertanian Swadaya 7. Penilaian Kredit Point Penyuluh 8. Evaluasi Kinerja Penyuluh 9. Supervisi Penyuluh 10. Pendampingan Dana Dekonsentrasi Penyuluh	Kab. Sijunjung	12 Bulan	183.379.000	APBD II		12	183.037.900
2.02.24.11	Pemantapan Sistem dan Informasi Penyuluhan Pertanian	1. Terlaksananya Pameran Pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten 2. Terlaksananya Pelaksanaan Hari Krida Pertanian di Kabupaten Sijunjung 3. Terlaksananya Pawai Pembangunan dalam rangka HUT RI 4. Terlaksananya partisipasi dalam ieven2 lainnya 5. Terlaksananya penyebaran informasi mengenai perkembangan pertanian melalui Wabsite Penyuluhan. 6. Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Simluhtan di Kabupaten Sijunjung.	Kab. Sijunjung	12 Bulan	320.000.000	APBD II		12	320.000.000
2.09	Kepegawaian dan Latihan		Kab. Sijunjung		0				25.000.000
2.09.16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Non Aktif)	• Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Kab. Sijunjung		0				25.000.000
2.09.16.15	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (NA)	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Kab. Sijunjung	10 Orang	0	APBD II		10	25.000.000
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		0	APBD II			
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		2.886.185.000				2.886.212.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		2.365.285.000				2.365.312.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	1. Terlaksananya operasional ADM Perkantoran 2. Terlaksana pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya 3. Tersedia Progran sistem Aplikasi kepegawaian	Muaro Sijunjung	12 Bulan	719.882.000	APBD II		12	719.882.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	1. Terlaksana pembayaran Honorarium THL 2. Terlaksana Belanja telepon 3. Terlaksana belanja air 4. Terlaksana belanja Listrik 5. Terlaksana pemeliharaan Jaringan radio SIPKD 6. Jasa Buruh	Muaro Sijunjung	12 Bulan	1.645.403.000	APBD II			1.645.430.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		495.900.000				495.900.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Terlaksana Belanja Surat Tanada kendaraan bermotor roda 2/3 2. Terlaksana Belanja Surat Tanada kendaraan bermotor roda 4 3. Terlaksana Pemeliharaan kendaraan Bermotor roda 2/3 4. Terlaksana Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4 5. Terlaksana pemeliharaan gedung kantor 6. Terlaksana Pemeliharaan Peralatan kantor 7. Terlaksana Pemeliharaan genset 8. Terlaksana pemeliharaan CCTV 9. Terlaksana pengadaan Laptop 10. Terlaksana Pengadaan Printer 11. Terlaksana pengadaan filleng kabinet 12. Terlaksana pengadaan rak arsip 13. Terlaksana Pengadaan meja 1/2 biro	Kab. Sijunjung	12 Bulan	495.900.000	APBD II		12	495.900.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		25.000.000				25.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kab. Sijunjung	12 Bulan	0	APBD II		12	25.000.000
	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		SIJUNJUNG, MUARO, PEMATANG SARI BULAN		0	APBD II			
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur			10 Orang	25.000.000	APBD II			0
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN									
TOTAL PAGU					4.847.146.960				1.150.000.000
1.07	Pangan				2.865.610.000				1.150.000.000
1.07.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Sijunjung		1.141.160.000				1.150.000.000
1.07.15.01	Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM), jumlah pelaksanaan pasar murah komoditi pangan	Kab. Sijunjung	2 persen	192.400.000	APBD II		2	450.000.000
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Kab. Sijunjung						
	PENGEMBANGAN DISTRIBUSI DAN STABILITAS HARGA PANGAN		SIJUNJUNG, MUARO, MUARO GAMBOK		92.400.000	APBD II			
	PUPM (PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT)		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		100.000.000	APBD II			
1.07.15.06	Pengembangan Ketersediaan Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Kab. Sijunjung						
		Jumlah kategori lomba ketahanan pangan	Kab. Sijunjung	20 Ton	0	APBD II			0
		Jumlah data ketersediaan pangan	Kab. Sijunjung						
1.07.15.08	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Masyarakat yang mendapat bantuan rawan pangan, Jumlah Data rawan pangan (Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi), Jumlah data kerentanan pangan (FSVA), Jumlah rapat kebijakan penanganan rawan pangan	Sijunjung	20 persen	273.500.000	APBD II		20	450.000.000
	PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		148.500.000	APBD II			
	BANTUAN BAHAN PANGAN (BERAS)		IV NAGARI, MUARO BODI, TANJUNG PAUH		125.000.000	APBD II			
1.07.15.05	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan, event promosi, pengambilan sampel pangan segar yang aman di konsumsi	Sijunjung	8 Sample	77.360.000	APBD II		8	250.000.000
1.07.15.03	Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal, Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal, Pelaksanaan pembinaan pangan lokal, Pelaksanaan event promosi, Pasar kuliner	Kab. Sijunjung	4 Dokumen	317.900.000	APBD II		4	0
1.07.15.04	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL (bibit tanaman buah, sayur dan ternak), Pembinaan pemanfaatan pekarangan	Kab. Sijunjung	50 Kelompok	280.000.000	APBD II		23	0
	BANTUAN BIBIT TANAMAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		10.000.000	APBD II			
	PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		260.000.000	APBD II			
	KRPL		TANJUNG GADANG, TANJUNG GADANG, PASAR TANJUNG GADANG		10.000.000	APBD II			
1.07.16	Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Kab. Sijunjung		1.724.450.000				0
1.07.16.01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR, Pengadaan UPR, Jumlah Pengadaan pakan ikan	Kab. Sijunjung	30 Paket	302.000.000	APBD II		30	0
	PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		77.000.000	APBD II			
	MOHON BANTUAN MAKANAN IKAN		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		125.000.000	APBD II			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	PENGADAAN UPR		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS, PINTU RAYO		100.000.000	APBD II			
1.07.16.02	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan SL Perikanan, Pembinaan, Bantuan bibit ikan dan pakan, pembangunan/ rehabilitasi kolam kelompok	Kab. Sijunjung	15 Paket	945.500.000	APBD II		15	0
	BANTUAN BIBIT IKAN , AYAM, ATAU SAPI		KUPITAN, DESA KAMPUNG BARU, DUSUN KOTO LAMO		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT IKAN DAN PAKAN		KUPITAN, BATU MANJULUR, BATU MANJULUR TIMUR		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN REHAP KOLAM DAN PEMBAGUNAN KOLAM		LUBUAK TAROK, KAMPUNG DALAM, LIMA SUNDAL		150.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT IKAN		TANJUNG GADANG, LANGKI, MUARO LINGGO		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT IKAN NILA DAN LELE		KOTO VII, PADANG LAWEH, SUNGAI GEMIRI		30.000.000	APBD II			
	REHAB KOLOM MASYARAKAT		SUMPUR KUDUS, SUMPUR KUDUS SELATAN, CALAU		45.000.000	APBD II			
	PENGADAAN PETERNAKAN IKAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, TANJUNG RAYA		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BENIH PERIKANAN		TANJUNG GADANG, TIMBULUN, BALAI-BALAI		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT IKAN		SIJUNJUNG, PEMATANG PANJANG, KOTO TANGAH		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT IKAN (GURAMI,RAYO,LELE,PATIN,BELUT)		TANJUNG GADANG, PULASAN, PASAR PULASAN		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT IKAN NILA DAN LELE		KOTO VII, PADANG LAWEH, KOTO PADANG LAWEH		30.000.000	APBD II			
	PEMBANGUNAN KOLAM BETON BAGI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (TERSEBAR DI SEMUA JORONG)		KAMANG BARU, KUNANGAN PRK RANTANG, PARIT RANTANG		150.000.000	APBD II			
	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		60.500.000	APBD II			
	BANTUAN PAKAN DAN BIBIT IKAN		TANJUNG GADANG, TARATAK BARU, RANAH PALAM		60.000.000	APBD II			
1.07.16.05	Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penyediaan vitamin dan obat ikan, Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI), Pembinaan Lubuk Larangan, Penumbuhan POKMASWAS perairan umum, Pengadaan bibit ikan dan makanan ikan untuk lubuk larangan	Kab. Sijunjung	1 Paket	476.950.000	APBD II		1	0
	PENGADAAN BIBIT IKAN		SIJUNJUNG, MUARO, SUBARANG SUKAM		60.000.000	APBD II			
	MOHON BANTUAN BIBIT IKAN DAN MAKANAN IKAN		KOTO VII, LIMO KOTO, KOTO PANJANG		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT IKAN		SIJUNJUNG, DURIAN GADANG, KOTO MUDIK		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT IKAN LARANGAN		TANJUNG GADANG, SINYAMU, KOTO SINYAMU		60.000.000	APBD II			
	BANTUAN BIBIT IKAN SUNGAI LARANGAN		KAMANG BARU, SIAUR, LAMBAH GUNUANG		60.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LUBUK LARANGAN DAN BIBIT IKAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, KAMPUNG PINANG		60.000.000	APBD II			
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT IKAN		SIJUNJUNG, MUARO, PULAU BARAMBAI		36.950.000	APBD II			
	PENGADAAN BIBIT IKAN		SUMPUR KUDUS, SISAWAH, SIBOLIN		30.000.000	APBD II			
	PENGADAAN LUBUK LARANGAN DAN BIBIT IKAN		IV NAGARI, MUNDAM SAKTI, RANAH PASAR		50.000.000	APBD II			
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		Kab. Sijunjung		50.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		50.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Penyusunan rancangan awal renstra dan renstra 2021-2026	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	50.000.000	APBD II		1	0
2.13	Kelautan dan Perikanan		Kab. Sijunjung		699.347.960				0
2.13.01	Pengembangan Budidaya Perikanan		Kab. Sijunjung		504.707.960				0
2.13.01.05	Operasional BBI Sumpur Kudus	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Kab. Sijunjung	953535 Ekor	258.905.990	APBD II			0
		Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Kab. Sijunjung						
		Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Kab. Sijunjung						

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.13.01.06	Operasional BBI Latang	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Kab. Sijunjung	661575 Ekor	245.801.970	APBD II			0
		Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Kab. Sijunjung						
		Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Kab. Sijunjung						
2.13.03	Peningkatan Pemasaran dan Agribisnis Perikanan	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kab. Sijunjung		194.640.000				0
2.13.03.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Pembinaan /Fasilitasi bimbingan teknis pemasaran, Pelaksanaan Event/promosi produk perikanan, Fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan	Kab. Sijunjung	2 Kali	56.300.000	APBD II		2	0
2.13.03.02	Penguatan kelembagaan Pokhlasar	Pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan, Fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP	Kab. Sijunjung	1 Kali	31.440.000	APBD II		1	0
2.13.03.03	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan, Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan FORIKAN tingkat Nagari, Pelaksanaan Lomba GEMARIKAN	Kab. Sijunjung	1 Kali	106.900.000	APBD II		1	0
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		1.232.189.000				0
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		977.189.000				0
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	439.189.000	APBD II		12	0
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Honorarium pegawai honorer / THL	Muaro Sijunjung	12 Bulan	538.000.000	APBD II		12	0
		Terlaksananya pengadaan surat kabar	Kab. Sijunjung						
		Belanja faksimili / internet	Kab. Sijunjung						
		Belanja plakat/cendramata	Kab. Sijunjung						
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		190.000.000				0
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 4, Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 2, Jumlah Pemeliharaan Komputer, Jumlah Pengadaan Komputer /Laptop/Aquarium	Kab. Sijunjung	8 Unit	190.000.000	APBD II		8	0
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		15.000.000				0
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pengiriman peserta pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi SDM	Kab. Sijunjung	3 Orang	15.000.000	APBD II		3	0
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		50.000.000				0
9.99.06.01	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung	19 Kegiatan	50.000.000	APBD II			0
		Pelaksanaan Monitoring	Kab. Sijunjung						
		Pelaksanaan Rapat Evaluasi	Kab. Sijunjung						
		Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	Kab. Sijunjung						
		Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	Kab. Sijunjung						
INSPEKTORAT DAERAH									
TOTAL PAGU					4.146.623.518				4.585.409.718
2.07	Pemerintahan				815.632.050				815.632.050
2.07.18	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase SKPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan • Leveling Maturitas SPIP	Kab. Sijunjung		348.748.550				348.748.550
2.07.18.16	Melaksanakan Pemeriksaan Khusus	Terlaksananya pemeriksaan khusus	Kab. Sijunjung	6 Dokumen	33.039.550	APBD II			33.039.550
2.07.18.17	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	- Fasilitasi sosialisasi Tim UPP Kab dan Prov dan Tersedianya laporan Tim UPP Kab	Kab. Sijunjung	4 Kali 4 Lap Dokumen	142.000.000	APBD II			142.000.000
2.07.18.18	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tersedianya Laporan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP OPD dan Supervisi dan Move penyelenggaraan SPIP OPD	Kab. Sijunjung	1 Lap 4 kali Dokumen	30.777.000	APBD II		1 Lap 4 Kali	30.777.000
2.07.18.20	Review Pengadaan Barang dan Jasa, Dana Desa dan Serapan Anggaran	Meningkatnya pengendalian terhadap sistem pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dana desa dan serapan anggaran	Kab. Sijunjung	4 Kali 4 Lap Dokumen	26.056.000	APBD II			26.056.000
2.07.18.22	Asistensi, Pendampingan dan Fasilitasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Asistensi, pendampingan dan fasilitasi UPG terhadap OPD	Kab. Sijunjung	2 Kegiatan	52.650.000	APBD II			52.650.000
2.07.18.25	Pembangunan sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS)	Aplikasi Sistem Manejemen Pengawasan	Kab. Sijunjung	1 Paket Paket	64.226.000	APBD II		1 pAKET	64.226.000
2.12.16	Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	• Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat kompetensi teknis pengawasan	Kab. Sijunjung		466.883.500				466.883.500
2.12.16.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan	Terjadinya Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kab. Sijunjung	15 Orang	449.725.000	APBD II		25	449.725.000
2.12.16.02	Peningkatan kapabilitas APIP	Meningkatnya kapabilitas APIP di Kabupaten Sijunjung	Kab. Sijunjung	1 Paket Paket	17.158.500	APBD II		1 Paket	17.158.500
2.12	Pengawasan		Kab. Sijunjung		1.298.069.325				1.236.855.525
2.12.15	Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		Kab. Sijunjung		829.291.825				768.078.025
2.12.15.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal secara berkala	Kab. Sijunjung	65 Dokumen	593.450.025	APBD II		75	593.450.025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.12.15.02	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda (pemeriksaan kasus/khusus)	Jumlah LHP pemeriksaan kasus/khusus	Kab. Sijunjung	8 Dokumen	53.628.000	APBD II		8	53.628.000
2.12.15.03	Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan	Terlaksananya Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Terpantaunya Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengawasan	Kab. Sijunjung	6 Kali	61.213.800	APBD II			0
2.12.15.10	Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah Laporan Monitoring Dana Desa, Dana Bos dan Pelayanan Publik	Kab. Sijunjung	30 Kali	86.000.000	APBD II		30	86.000.000
2.12.15.07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Penilaian PMPRB	Kab. Sijunjung	3 OPD	35.000.000	APBD II		3	35.000.000
2.12.17	Program Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	• Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat kompetensi teknis pengawasan, • Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD, • Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, • Nilai LPPD, • Nilai AKIP Pemda	Kab. Sijunjung		468.777.500				468.777.500
2.12.17.01	Penguatan Rancangan Dokumen perencanaan Daerah/SKPD	Terselenggaranya Reviu RKPD, dan RKA OPD	Kab. Sijunjung	21 Dokumen	225.498.000	APBD II		21	225.498.000
2.12.17.02	Pengendalian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan laporan lainnya	Terselenggaranya Reviu LKPD, Reviu, LAKIP OPD	Kab. Sijunjung	8 Kali	93.279.500	APBD II		8	93.279.500
2.12.17.04	Rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RADPPK)	Terbangunnya sistem pengendalian dan pemberantasan korupsi pada pemda kab.Sijunjung	Kab. Sijunjung	3 Laporan	150.000.000	APBD II		3	150.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana				2.032.922.143				2.532.922.143
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		861.735.660				961.735.660
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Layananan Operasional Adminstrasi Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 bulan Bulan	704.946.660	APBD II		12	804.946.660
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terlaksananya Layananan Operasional Adminstrasi Jasa Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 bulan Bulan	156.789.000	APBD II		12	156.789.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		1.149.986.483				1.549.986.483
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor sesuai Ketentuan untuk menunjang Fungsi Pengawasan	Kab. Sijunjung	12 Bulan Unit	1.149.986.483	APBD II		12	1.549.986.483
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		21.200.000				21.200.000
9.99.06.02	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan keuangan	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan ,LAKIP,LKPJ,LPPD dan Program Kegiatan Pembangunan	Kab. Sijunjung	5 Lap Dokumen	21.200.000	APBD II		5	21.200.000
BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)									
TOTAL PAGU					9.382.340.000				8.276.000.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				6.990.000.000				5.821.000.000
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		6.090.000.000				4.871.000.000
2.05.16.10	Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung	jumlah laporan evaluasi RKPD	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	150.000.000	APBD II		2	160.000.000
2.05.16.05	Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun melalui SIPPD	Kab. Sijunjung	3 Dokumen	650.000.000	APBD II		3	660.000.000
2.05.16.20	Koordinasi dan Fasilitasi Program Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	Jumlah laporan koordinasi IPDMIP	Kab. Sijunjung	1 Laporan	350.000.000	APBD II		1	350.000.000
2.05.16.14	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pelaksanaan rakor TKPK dan jumlah laporan pelaksanaan	Kab. Sijunjung	3 Kali	450.000.000	APBD II		3	250.000.000
2.05.16.60	Penyusunan RPJMD Kab Sijunjung	Jumlah dokumen yang disusun	Kab. Sijunjung	2 Dokumen	750.000.000	APBD II			0
2.05.16.13	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah bulan pengelolaan SIPD	Kab. Sijunjung	12 Bulan	300.000.000	APBD II		12	300.000.000
2.05.16.39	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	200.000.000
2.05.16.40	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kab. Sijunjung	100 persen	250.000.000	APBD II		100	200.000.000
2.05.16.41	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian dan Statistik	Kab. Sijunjung	100 persen	150.000.000	APBD II		100	150.000.000
2.05.16.48	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Energi Sumber Daya Mineral	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Transnaker, PM dan ESDM	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	187.000.000
2.05.16.47	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD lingkup Dagperinkop dan UKM	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	179.000.000
2.05.16.52	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pertanian dan Lingkungan Hidup	Tingkat keselarasan renja terhadap renstra PD lingkup Pertanian dan LH	Kab. Sijunjung	100 persen	250.000.000	APBD II		100	185.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.05.16.61	Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Dana Tugas Pembantuan (TP), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana APBD Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi DAK dan TP	Kab. Sijunjung	8 Dokumen	250.000.000	APBD II		8	300.000.000
2.05.16.15	Pendampingan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM)	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi AMPL dan persentase usulan lokasi Pamsimas yang diverifikasi oleh panitia kemitraan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	500.000.000	APBD II		12	500.000.000
2.05.16.18	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan penganggaran Gender Anaysis Pathway (GAP)	Kab. Sijunjung	100 persen	140.000.000	APBD II		100	150.000.000
2.05.16.44	Evaluasi Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah dokumen SDG's yang disusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	500.000.000	APBD II		1	500.000.000
2.05.16.46	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	200.000.000
2.05.16.45	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	200.000.000
2.05.16.51	Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kab. Sijunjung	100 persen	200.000.000	APBD II		100	200.000.000
2.05.16.66	Evaluasi Renstra OPD	Jumlah dokumen evaluasi yang dihasilkan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	100.000.000	APBD II		1	0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen renstra yang disusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	100.000.000	APBD II		1	0
2.05.21	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	• Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan / dipedomani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Kab. Sijunjung		900.000.000				950.000.000
2.05.21.02	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan daerah	Kab. Sijunjung	12 Bulan	300.000.000	APBD II		12	350.000.000
2.05.21.01	Penyusunan Dokumen Kelitbangan	Jumlah dokumen kajian kelitbangan	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	300.000.000	APBD II		1	300.000.000
2.05.21.03	Penguatan Inovasi Daerah	Jumlah inovasi pembangunan daerah	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	300.000.000	APBD II		1	300.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		2.392.340.000				2.455.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.147.340.000				1.200.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	714.340.000	APBD II		12	750.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kab. Sijunjung	12 Bulan	433.000.000	APBD II		12	450.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		1.000.000.000				1.000.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket pengadaan dan pemeliharaan sapras kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.000.000.000	APBD II		12	1.000.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		190.000.000				200.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Kab. Sijunjung	48 Orang	190.000.000	APBD II		48	200.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		55.000.000				55.000.000
9.99.06.11	Penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	Kab. Sijunjung	4 Laporan	55.000.000	APBD II		4	55.000.000
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)									
TOTAL PAGU					9.296.229.712				10.207.131.440
2.07	Pemerintahan				299.262.145				40.378.910
2.07.18	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase SKPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan • Leveling Maturitas SPIP	Kab. Sijunjung		299.262.145				40.378.910
2.07.18.01	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		Kab. Sijunjung	1 Laporan	299.262.145	APBD I		1	40.378.910
2.11	Keuangan Daerah		Kab. Sijunjung		6.253.008.454				7.148.397.506
2.11.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keu. Daerah	• Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kab. Sijunjung		6.253.008.454				7.148.397.506
2.11.15.01	Penyusunan tentang APBD		Kab. Sijunjung	10 Dokumen	945.235.209	APBD II		10	945.235.209
2.11.15.02	Penyusunan laporan keuangan daerah		Kab. Sijunjung	4 Dokumen	558.567.000	APBD I		4	614.423.700
2.11.15.03	Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)		Kab. Sijunjung	4 APLIKASI	282.958.494	APBD I		4	675.866.070
2.11.15.04	Peningkatan manajemen aset/barang daerah		Kab. Sijunjung	1 Laporan	180.130.000	APBD I		1	198.143.000
2.11.15.05	Peningkatan manajemen investasi daerah		Kab. Sijunjung	1 Laporan	67.025.000	APBD I		1	73.727.500
2.11.15.07	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMMD)		Kab. Sijunjung	1 Laporan	111.955.175	APBD I		1	123.150.693
2.11.15.36	Pelaksanaan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah		Kab. Sijunjung	100 persen	222.211.000	APBD I		100	244.432.100
2.11.15.25	Evaluasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah (PAD)		Kab. Sijunjung	1 Jenis	232.583.334	APBD II		1	255.841.667
2.11.15.32	Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Daerah Bawahan		Kab. Sijunjung	1 Paket	187.055.000	APBD I		1	205.760.500
2.11.15.33	Administrasi Penatausahaan Bendahara Umum Daerah (BUD)		Kab. Sijunjung	1 Laporan	69.885.006	APBD I		1	76.873.507

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.11.15.27	Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Sijunjung	1 Dokumen	335.968.248	APBD I		1	369.565.073
2.11.15.12	Pengamanan aset milik daerah		Kab. Sijunjung	1 Laporan	449.267.500	APBD I		1	494.194.250
2.11.15.37	Rekonsiliasi Data Aset dan Sosialisasi Aplikasi SIMDA BMD		Kab. Sijunjung	1 Laporan	195.343.343	APBD I		1	214.877.677
2.11.15.28	Penyusunan Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran SKPKD		Kab. Sijunjung	1 Dokumen	537.500.000	APBD I		1	591.250.000
2.11.15.15	Pelayanan dan pendaftaran data pajak daerah		Kab. Sijunjung	2 Dokumen	477.551.000	APBD I		2	525.306.100
2.11.15.16	Pemutakhiran dan verifikasi data pajak daerah		Kab. Sijunjung	1 Paket	132.000.000	APBD II		1	145.200.000
2.11.15.17	Penetapan dan keberatan pajak daerah		Kab. Sijunjung	1 Kasus	276.100.000	APBD I		1	303.710.000
2.11.15.29	Penagihan dan Evaluasi Pajak		Kab. Sijunjung	100 persen	319.690.000	APBD I		100	351.659.000
2.11.15.30	Pengelolaan dana Perimbangan		Kab. Sijunjung	1 Laporan	191.721.000	APBD I		1	210.893.100
2.11.15.34	Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD		Kab. Sijunjung	1 Laporan	299.262.145	APBD I		1	329.188.360
2.11.15.35	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelaporan		Kab. Sijunjung	1 Laporan	181.000.000	APBD I		1	199.100.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		2.743.959.113				3.018.355.024
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		1.394.663.000				1.534.129.300
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Tersedia pelayanan administrasi perkantoran.	Kab. Sijunjung	100 persen	708.922.000	APBD II		100	779.814.200
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Operasional Jasa Perkantoran.	Kab. Sijunjung	100 persen	685.741.000	APBD II		100	754.315.100
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		690.296.113				759.325.724
9.99.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.	Kab. Sijunjung	100 persen	150.000.000	APBD II		100	165.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Kab. Sijunjung	4 Unit	540.296.113	APBD I		4	594.325.724
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		659.000.000				724.900.000
9.99.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal		Kab. Sijunjung	100 persen	159.000.000	APBD I		100	174.900.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Kab. Sijunjung	100 persen	500.000.000	APBD I		100	550.000.000
			Kab. Sijunjung						
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
TOTAL PAGU					6.141.000.000				6.141.000.000
1.01	Pendidikan				25.000.000				0
1.01.31	Program Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
1.01.31.01	Penyusunan Rencana Strategis 2016-2021	jumlah dokumen Renstra yang diselesaikan	Maro Sijunjung	1 Buku	25.000.000	APBD II			0
2.08	Pemerintahan Lainnya		Kab. Sijunjung		70.000.000				70.000.000
9.99.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti 2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun	Kab. Sijunjung		70.000.000				70.000.000
9.99.03.09	Penanganan Disiplin ASN	Jumlah kasus yang diselesaikan	Muaro Sijunjung	7 Kasus	40.000.000	APBD II		7	40.000.000
9.99.03.07	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalancana karya satya	Muaro Sijunjung	150 Orang	30.000.000	APBD II		150	30.000.000
2.09	Kepegawaian dan Latihan		Kab. Sijunjung		1.491.000.000				1.491.000.000
2.09.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	• Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu • Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu • Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian • Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi • Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti • Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian	Kab. Sijunjung		1.491.000.000				1.491.000.000
2.09.15.11	Pembinaan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang kepegawaian	Muaro Sijunjung	36 Orang	45.000.000	APBD II		36	45.000.000
2.09.15.03	Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Muaro Sijunjung	700 Orang	160.000.000	APBD II		700	160.000.000
2.09.15.04	Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang naik pangkat	Muaro Sijunjung	750 Orang	95.000.000	APBD II		750	95.000.000
2.09.15.05	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang di up date data kepegawaiannya	Muaro Sijunjung	4000 Orang	60.000.000	APBD II		4000	60.000.000
2.09.15.09	Penyusunan Formasi PNS	Jumlah kebutuhan formasi formasi PNS	Muaro Sijunjung	1800 Orang	30.000.000	APBD II		1800	30.000.000
2.09.15.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS	Muaro Sijunjung	3 Kali	32.000.000	APBD II		3	32.000.000
2.09.15.10	Pengelolaan Administrasi Pensiun dan Status Kepegawaian	Jumlah SK pensiun, Karis/Karsu dan Karpeg yang selesai pengurusannya	Muaro Sijunjung	385 Orang	100.000.000	APBD II		385	100.000.000
2.09.15.12	Ujian Dinas dan ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta Ujian Dinas TK I, II dan Penyesuaian Ijazah	Luar Daerah	70 Orang	44.000.000	APBD II		70	44.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.09.15.13	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah ASN yang diterima sesuai formasi	Muaro Sijunjung	250 Orang	925.000.000	APBD II		250	925.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		4.555.000.000				4.580.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		465.000.000				465.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	270.000.000	APBD II		12	270.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	195.000.000	APBD II		12	195.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		180.000.000				180.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	180.000.000	APBD II		12	180.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		3.910.000.000				3.935.000.000
9.99.05.50	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	Muaro Sijunjung	200 Orang	1.820.000.000	APBD II		200	1.845.000.000
9.99.05.51	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan	Luar Daerah	34 Orang	1.335.000.000	APBD II		34	1.335.000.000
9.99.05.52	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsi	Luar Daerah	40 Orang	300.000.000	APBD II		40	300.000.000
9.99.05.56	Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat bendaharawan	Luar Daerah	30 Orang	250.000.000	APBD II		30	250.000.000
9.99.05.59	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan pemberian izin belajar	Muaro Sijunjung	4 Orang	180.000.000	APBD II		4	180.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pegawai BKPSDM yang mengikuti diklat	Luar Daerah	5 Orang	25.000.000	APBD II		5	25.000.000
9.99.05.53	Pendidikan dan Pelatihan pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	Kab. Sijunjung	0 Orang	0	APBD II		0	0
SEKRETARIAT DAERAH									
TOTAL PAGU					28.133.647.271				27.080.000.000
TERBILANG DUA PULUH DELAPAN MILYAR DUA RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RUPIAH									
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				25.000.000				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		25.000.000				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	terlaksananya penyusunan renstra setda kab sijunjung 2021-2026	Muaro Sijunjung	1 Dokumen	25.000.000	APBD II		1	0
2.07	Pemerintahan				10.355.829.485				8.705.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		334.633.900				350.000.000
2.07.15.02	Kegiatan Koordinasi Penyusunan LPPD	ketepatan waktu penyampaian laporan, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Muaro Sijunjung	3 Dokumen	89.633.900	APBD II		3	100.000.000
2.07.15.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	terlaksananya penyusunan LKJIP Setda dan Pemda Tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2021 terlaksananya penyusunan LKJIP Laporan Semester terlaksananya penyusunan IKU Pemda Tahun 2021-2026 Terlaksananya Penyusunan IKU Setda tahun 2021-2026	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	245.000.000	APBD II		2	250.000.000
2.07.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		Muaro Sijunjung		1.967.640.235				1.950.000.000
2.07.16.03	Fasilitasi Pelayanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah	Muaro Sijunjung	12 Bulan	304.297.500	APBD II		12	350.000.000
2.07.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah pertemuan audiensi dengan tokoh masyarakat	Muaro Sijunjung	10 Kali	1.055.650.000	APBD II		10	1.100.000.000
2.07.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah kunjungan pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Muaro Sijunjung	30 Kali	370.500.000	APBD II		30	400.000.000
2.07.16.06	Fasilitasi Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan APKASI	jumlah rapat koordinasi pemerintah daerah meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Muaro Sijunjung	6 Kali	77.192.735	APBD II		6	100.000.000
2.07.16.07	Pelantikan dan Pisah Sambut KDH/WKDH	Terlaksananya pelantikan, serah terima dan pisah sambut Kepala Daerah	Muaro Sijunjung	1 Kali	160.000.000	APBD II		1	0
2.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Sijunjung		200.000.000				300.000.000
2.07.17.01	Koordinasi dan Penyusunan Data Perekonomian Kerakyatan	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan Sumber Daya Mineral	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	50.000.000	APBD II		2	100.000.000
2.07.17.02	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan BUMD	terlaksananya pembinaan BUMD terlaksananya pembinaan BLUD Monitoring perkembangan BPR	Kab. Sijunjung	26 Unit	150.000.000	APBD II		26	200.000.000
2.07.18	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	• Persentase SKPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan • Leveling Maturitas SPIP	Muaro Sijunjung		829.267.900				905.000.000
2.07.18.04	Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Produk Unggul Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya alam meliputi pertanian, perikanan, peternakan, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan kehutanan	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	100.000.000	APBD II		2	100.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.18.02	Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Ketepatan waktu penyampaian laporan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Muaro Sijunjung	2 Dokumen	118.329.900	APBD II		2	150.000.000
2.07.18.13	Kegiatan Faslitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	jumlah naskah kerjasama antar daerah/ provinsi/ kementrian/ kelembagaan meningkatnya efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah (10 MOU)	Muaro Sijunjung	10 Nagari/ Desa	127.938.000	APBD II		10	130.000.000
2.07.18.09	Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Dokumen Administrasi Program dan Kegiatan Pembangunan	tersusunnya dokumen administrasi program dan kegiatan pembangunan	Muaro Sijunjung	3 Dokumen	155.000.000	APBD II		3	150.000.000
2.07.18.10	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	terlaksana rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan, terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di lingkup pemda kab sijunjung (4 kali; 52 kali)	Muaro Sijunjung	4 Dokumen	70.000.000	APBD II		4	75.000.000
2.07.18.11	Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aturan yg berlaku	Muaro Sijunjung	70 Kali	70.000.000	APBD II		70	75.000.000
2.07.18.26	Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa	terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	Muaro Sijunjung	4 Dokumen	50.000.000	APBD II		4	75.000.000
2.07.18.27	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Muaro Sijunjung	4 Kali	0	APBD II		4	0
1.07.18.25	Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah		Muaro Sijunjung	1 Paket	0	APBD II		1	0
2.07.18.12	Kegiatan Pembinaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pembinaan, sosialisasi dan bimtek pengadaan barang dan jasa terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi pengadaan barang/jasa dan penanganan masalah kontrak dengan mediasi	Muaro Sijunjung	4 Kali	138.000.000	APBD II		4	150.000.000
2.07.19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Kab. Sijunjung		284.632.700				300.000.000
2.07.19.01	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	terbentuknya penanganan kasus pengaduan masyarakat serta terlayannya masyarakat / aparat yang membutuhkan konsultasi (2 paket & 75 orang)	Muaro Sijunjung	75 Orang	251.632.700	APBD II		75	250.000.000
2.07.19.03	Bantuan hukum untuk rakyat miskin	terwujudnya peningkatan supremasi untuk masyarakat miskin serta terlaksananya pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin baik secara litigasi maupun non litigasi (2 paket & 2 perkara)	Muaro Sijunjung	12 Dokumen	33.000.000	APBD II		12	50.000.000
2.07.20	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Sijunjung		551.704.750				600.000.000
2.07.20.03	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Masyarakat	Muaro Sijunjung	10 Kali	53.323.600	APBD II		10	60.000.000
2.07.20.04	Publikasi peraturan perundang-undangan	Agar Aparatur dan Masyarakat Mengetahui tentang Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tersedianya Website JDIIH, Dokumentasi dan Informasi Hukum	Muaro Sijunjung	5 Dokumen	113.000.000	APBD II		5	125.000.000
2.07.20.05	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah	Terciptanya Produk Hukum Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta terlaksananya kajian dan evaluasi Produk Hukum Daerah (3 Perda & 5 Perbup)	Muaro Sijunjung	62 Dokumen	28.523.000	APBD II		62	30.000.000
2.07.20.07	Bimbingan Teknis Legal Drafting	Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan serta meningkatkan kemampuan Aparatur negara dalam Pembuatan Produk Hukum	Muaro Sijunjung	40 Orang	78.225.345	APBD II		40	80.000.000
2.07.20.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlaksananya tertib humum kepada aparat dan masyarakat / masyarakat peduli HAM dan desa sadar hukum	Muaro Sijunjung	32 Nagari/ Desa	101.199.945	APBD II		32	125.000.000
2.07.20.02	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	tercapainya penataan peraturan perundang-undangan serta adanya produk dasar hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Muaro Sijunjung	45 Dokumen	177.432.860	APBD II		45	180.000.000
2.07.21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Kab. Sijunjung		0				0
2.07.21.02	Survey dan Inventarisasi Unsur-unsur Rupa Bumi di wilayah Kabupaten Sijunjung		Kab. Sijunjung	100 Sample	0	APBD II		100	0
2.07.22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		Kab. Sijunjung		565.000.000				575.000.000
2.07.22.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya ketersediaan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan Pimpinan Daerah	Kab. Sijunjung	12 Bulan	400.000.000	APBD II		12	400.000.000
2.07.22.03	Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Daerah	jumlah ketersediaan penyampaian informasi yang dibutuhkan pimpinan daerah	Kab. Sijunjung	90 Paket	165.000.000	APBD II		90	175.000.000
2.07.23	Program Pelayanan Kehidupan Beragama		Kab. Sijunjung		3.871.950.000				1.625.000.000
2.07.23.02	MTQ tingkat propinsi	Jumlah khafilah yang dilatih, 5 besar	Muaro Sijunjung	74 Orang	2.500.000.000	APBD II		74	0
2.07.23.10	Pembinaan dan Pemberdayaan Guru TPQ/TPSQ dan Lembaga Didikan Subuh	terbinanya imam, khatib, garim dan guru TPQ/TPSQ	Muaro Sijunjung	62 Orang	291.000.000	APBD II		62	300.000.000
2.07.23.08	Pembinaan Rumah Tahfidz	Terbinanya dan terfasilitasinya rumah Tahfidz	Muaro Sijunjung	40 Orang	338.000.000	APBD II		40	500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.23.07	Kegiatan Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Sijunjung	terfasilitasinya keberangkatan dan kepulangan jemaah haji	Muaro Sijunjung	200 Orang	108.000.000	APBD II		200	125.000.000
2.07.23.05	Pelatihan Pengelola Masjid dan Penilaian Masjid Teladan	terlaksananya fasilitasi pengelolaan Masjid Agung Istiqlal dan pelatihan pengelola Masjid	Muaro Sijunjung	120 Orang	305.000.000	APBD II		120	350.000.000
2.07.23.11	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Kontak Majelis Takdim (BKMT)	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan BKMT	Muaro Sijunjung	12 Kali	85.000.000	APBD II		12	100.000.000
2.07.23.06	Kegiatan Wirid Bulanan, Hari-hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya	Jumlah Pelaksanaan Wirid dan hari besar Islam	Muaro Sijunjung	9 Kali	48.950.000	APBD II		9	50.000.000
2.07.23.03	Safari Ramadhan	Jumlah MASJID/ Mushalla yang mendapatkan kunjungan TIM Safari Ramadhan	Muaro Sijunjung	40 Unit	196.000.000	APBD II		40	200.000.000
2.07.23.09	MTQ Tingkat Kabupaten		Kab. Sijunjung	1 Paket	0	APBD II		1	0
2.07.24	Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat		Kab. Sijunjung		180.000.000				275.000.000
2.07.24.01	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	terlaksananya fasilitasi dan monitoring bantuan sosial , keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya	Kab. Sijunjung	40 Orang	50.000.000	APBD II		40	100.000.000
2.07.24.02	Kegiatan Monitoring Bantuan Sosial, Pendidikan, Keagamaan, BAZ dan Sosial Kemasyarakatan Lainnya	Terlaksananya fasilitasi dan monitoring bantuan sosial, keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya	Kab. Sijunjung	3 Paket	80.000.000	APBD II		3	100.000.000
2.07.24.05	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Zakat	Koordinasi dan Pembinaan pengelolaan Zakat	Kab. Sijunjung	1 Paket	50.000.000	APBD II		1	75.000.000
2.07.26	Program Peningkatan Manajemen Publik		Kab. Sijunjung		455.000.000				575.000.000
2.07.26.02	Kegiatan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi	-Terlaksananya Bimtek Penyusunan Rencana Aksi 2021-2026 (35 OPD) -terlaksananya penyusunan Perbup Road Map Pemda Tahun 2021-2026 (1 Dokumen) -Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemda Tahun 2021 (10 OPD)	Kab. Sijunjung	35 Orang	100.000.000	APBD II		35	150.000.000
2.07.26.05	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Unit Kerja Pelayanan Publik	-Terlaksananya Pembinaan terhadap Unit Kerja Pelayanan Publik yang ikut kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (2 Unit) - Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring pada Unit Pelayanan Publik (9OPD) - Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (5 Unit)	Kab. Sijunjung	35 OPD	175.000.000	APBD II		35	200.000.000
2.07.26.06	Fasilitasi Pengembangan Penyusunan SOP	-Terlaksananya Bimtek Penyusunan SOP OPD (35 OPD) - Terfasilitasinya Penyusunan SOP OPD(35 OPD)	Muaro Sijunjung	35 OPD	50.000.000	APBD II		35	75.000.000
2.07.26.07	Penguatan ketatalaksanaan Daerah		Kab. Sijunjung	35 OPD	0	APBD II		35	0
2.07.26.01	Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Fasilitas Pelayanan PATEN Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Kab. Sijunjung	8 Kecamatan	130.000.000	APBD II		8	150.000.000
2.07.34	Program Pengembangan Potensi Ekonomi		Kab. Sijunjung		65.000.000				75.000.000
2.07.34.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengendalian Inflasi Daerah	terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	65.000.000	APBD II		1	75.000.000
2.07.34.02	Pembinaan BUMD dan BLUD		Kab. Sijunjung	26 Unit	0	APBD II		26	0
2.07.34.01	Koordinasi dan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Alam		Kab. Sijunjung	1 Paket	0	APBD II		1	0
2.07.35	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Kab. Sijunjung		100.000.000				150.000.000
2.07.35.01	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring Penyaluran Kredit Usaha Rakyat monitoring perkembangan KP-RI Kab Sijunjung Monitoring Penyaluran Dana CSR Perusahaan	Kab. Sijunjung	4 Paket	50.000.000	APBD II		4	75.000.000
2.07.35.02	Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Produk Bersubsidi	Terlaksananya Monitoring penyaluran produk bersubsidi (Pupuk, BBM, LPG, dll)	Kab. Sijunjung	3 Jenis	50.000.000	APBD II		3	75.000.000
2.07.36	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		Kab. Sijunjung		335.000.000				375.000.000
2.07.36.01	Kegiatan Fasilitas Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru	terlaksananya perubahan perda SOTK Kesbangpol terlaksananya Bimtek Anjab dan ABK Terlaksananya Evaluasi Anjab ABK Terlaksananya perubahan Perbup OPD tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi serta tata kerja pada OPD/UPTD Terlaksananya revisi evaluasi jabatan	Kab. Sijunjung	35 OPD	175.000.000	APBD II		35	200.000.000
2.07.36.02	Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas dan Inventarisasi Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Sijunjung	Jumlah Bangunan Rupa Bumi Meningkatnya Administrasi Pertanahan Yang Baik	Kab. Sijunjung	100 Jenis	160.000.000	APBD II		100	175.000.000
2.11.17	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Sijunjung		616.000.000				650.000.000
2.11.17.01	Kegiatan Penunjang Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	terlaksananya pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan aplikasi pendukung	Kab. Sijunjung	150 Paket	616.000.000	APBD II		150	650.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		17.752.817.786				18.375.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		8.832.822.436				8.975.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Muaro Sijunjung	12 Bulan	1.833.009.400	APBD II		12	1.850.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Muaro Sijunjung	12 Bulan	3.539.354.536	APBD II		12	3.600.000.000
9.99.01.22	Penunjang operasional administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional KDH/WKDH	Muaro Sijunjung	12 Bulan	2.184.698.500	APBD II		12	2.200.000.000
9.99.01.23	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional Jasa Perkantoran KDH/ WKDH	Muaro Sijunjung	12 Bulan	755.400.000	APBD II		12	800.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99.01.24	Penunjang Operasional Administrasi Keuangan	jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional Adm Keuangan	Muaro Sijunjung	12 Bulan	270.360.000	APBD II		12	275.000.000
9.99.01.25	Penunjang Operasional staf Ahli Bupati	jumlah bulan terselenggaranya kegiatan operasional Staf Ahli Bupati	Muaro Sijunjung	12 Bulan	250.000.000	APBD II		12	250.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		8.389.502.150				8.750.000.000
9.99.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Muaro Sijunjung	7 Unit	1.760.210.000	APBD II		7	1.750.000.000
9.99.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Muaro Sijunjung	14 Jenis	480.184.500	APBD II		14	500.000.000
9.99.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan Gedung Kantor	Muaro Sijunjung	10 Paket	738.208.750	APBD II		10	750.000.000
9.99.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Muaro Sijunjung	3 Unit	148.927.100	APBD II		3	150.000.000
9.99.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jumlah unit terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	Muaro Sijunjung	25 Unit	154.783.750	APBD II		25	175.000.000
9.99.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah paket terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor	Muaro Sijunjung	1 Paket	1.226.920.550	APBD II		1	1.250.000.000
9.99.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah unit terpeliharanya kendaraan jabatan	Muaro Sijunjung	6 Unit	98.325.000	APBD II		6	100.000.000
9.99.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Muaro Sijunjung	112 Unit	1.080.311.000	APBD II		112	1.250.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah persentase terselenggaranya peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor	Muaro Sijunjung	12 Bulan	1.486.245.000	APBD II		12	1.500.000.000
9.99.02.55	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	jumlah persentase terselenggaranya peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana rumah jabatan	Muaro Sijunjung	12 Bulan	194.870.000	APBD II		12	200.000.000
9.99.02.60	Penunjang operasional penyelenggaraan rumah tangga KDH/WAKDH	jumlah bulan terselenggaranya kegiatan harian rumah tangga KDH/ WAKDH	Muaro Sijunjung	12 Bulan	1.020.516.500	APBD II		12	1.125.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		530.493.200				650.000.000
9.99.05.47	Pembinaan, Evaluasi dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan	pembinaan, evaluasi dan penilaian aparatur pemerintah kecamatan	Kab. Sijunjung	8 Orang	155.977.450	APBD II		8	175.000.000
9.99.05.18	Perayaan Hari-hari Besar Nasional / Daerah	Jumlah Hari Besar Nasional/ Daerah Meningkatnya Penatausahaan Sekretariat Daerah	Muaro Sijunjung	2 Even	194.308.900	APBD II		2	200.000.000
9.99.05.09	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	jumlah persentase terselenggaranya kapasitas SDA Pelayanan Adm. Kepegawaian	Muaro Sijunjung	12 Bulan	26.644.850	APBD II		12	50.000.000
9.99.05.24	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	jumlah SDM yang ditingkatkan	Muaro Sijunjung	50 Orang	108.062.000	APBD II		50	125.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	Muaro Sijunjung	10 Orang	45.500.000	APBD II		10	100.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		0				0
9.99.06.08	Kegiatan koordinasi penyusunan LPPD	ketepatan waktu penyampaian laporan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Sijunjung	1 Bulan		0 APBD II			0
SEKRETARIAT DPRD									
TOTAL PAGU					30.524.000.000				41.180.400.000
2.05	Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan				0				0
2.05.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kab. Sijunjung		0				0
2.05.16.62	Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen renstra OPD yang disusun	Kab. Sijunjung	1 Dokumen	0	APBD II		1	0
2.07	Pemerintahan		Kab. Sijunjung		17.554.000.000				20.629.400.000
2.07.28	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Kab. Sijunjung		17.554.000.000				20.629.400.000
2.07.28.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dana dan SDM	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.900.000.000	APBD II		12	2.750.000.000
2.07.28.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terlaksananya Hearing dan koordinasi	Kab. Sijunjung	9 Kegiatan	54.000.000	APBD II		9	59.400.000
2.07.28.03	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna Yang Dilaksanakan	Kab. Sijunjung	5 Kegiatan	600.000.000	APBD II		5	660.000.000
2.07.28.04	Kegiatan Reses	3 Kali Pelaksanaan Reses	Kab. Sijunjung	3 Kali	1.200.000.000	APBD II		3	1.980.000.000
2.07.28.05	Kunjungan Kerja Pimp dan Anggota DPRD dalam daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kab. Sijunjung	4260 Kali	1.900.000.000	APBD II		4260	2.090.000.000
2.07.28.10	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat Komisi,Pansus,Rapat Kerja,Rapat Fraksi	Kab. Sijunjung	12 Bulan	300.000.000	APBD II		12	330.000.000
2.07.28.11	Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya BinteK dan Kunjungan Kerja Tim DPRD	Kab. Sijunjung	7 Kali	4.600.000.000	APBD II		7	5.060.000.000
2.07.28.12	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Luar Daerah	Kab. Sijunjung	11 Kali	7.000.000.000	APBD II		11	7.700.000.000
2.08	Pemerintahan Lainnya		Kab. Sijunjung		300.000.000				330.000.000
9.99.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti 2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun	Kab. Sijunjung		300.000.000				330.000.000
9.99.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas Untuk Anggota DPRD	Kab. Sijunjung	152 Stel	300.000.000	APBD II		153	330.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
9.99	Sarana dan Prasarana		Kab. Sijunjung		12.670.000.000				20.221.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Sijunjung		3.975.000.000				4.840.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penunjang Operasional Adm Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	650.000.000	APBD II		12	715.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terlaksananya Penunjang Operasional Adm Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	1.950.000.000	APBD II		12	2.145.000.000
9.99.01.24	Penunjang Operasional Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penunjang Administrasi Perkantoran	Muaro Sijunjung	12 Bulan	50.000.000	APBD II		12	275.000.000
9.99.01.32	Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kabupaten sijunjung	Terpublikasinya Informasi Kegiatan DPRD	Kab. Sijunjung	12 Bulan	775.000.000	APBD II		12	1.100.000.000
9.99.01.37	Pelayanan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Terhadap Pimpinan	Kab. Sijunjung	12 Bulan	550.000.000	APBD II		12	605.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kab. Sijunjung		8.650.000.000				15.290.000.000
9.99.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD yang Dipelihara	Kab. Sijunjung	32 Unit	350.000.000	APBD II		32	440.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	Kab. Sijunjung	12 Bulan	1.800.000.000	APBD II		12	2.750.000.000
9.99.02.58	Pembuatan landscape DPRD	Terlaksananya Pembuatan landscape Kantor DPRD	Kab. Sijunjung	12 Bulan	6.000.000.000	APBD II		12	6.600.000.000
9.99.02.67	Penunjang Operasional Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Terlaksananya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Muaro Sijunjung	12 Bulan	500.000.000	APBD II		12	5.500.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kab. Sijunjung		45.000.000				66.000.000
9.99.05.91	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Terhadap ASN dan Operator	Kab. Sijunjung	9 Orang	45.000.000	APBD II		10	66.000.000
9.99.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kab. Sijunjung		0				25.000.000
1.13.01.02	Penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja, LKPJ dan LPPD	LAKIP,LKPJ,LPPD,Renstra,Renja,Laporan Keuangan Semester	Kab. Sijunjung	12 Bulan	0	APBD II		12	25.000.000
KECAMATAN KAMANG BARU									
		TOTAL PAGU			1.177.593.900				978.032.600
2.07	Pemerintahan				311.877.500				316.478.600
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Kamang Baru		311.877.500				316.478.600
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Evaluasi, Monitoring Penyusunan RKP Nagari	Kec. Kamang Baru	1 Dokumen	12.000.000	APBD II		1	13.750.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	75.748.000	APBD II		12	71.995.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	35.772.500	APBD II		12	20.350.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Lomba UKS dan MTQ Tk. Kecamatan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	72.265.000	APBD II		12	112.260.500
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Lomba Nagari, Pelaksanaan Monitoring BBGRM, Pembinaan dan Pengawasan Tim Peng PKK dan Pemerintahan Nagari	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	75.209.000	APBD II		12	73.473.500
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) dan Pelayan Terpadu Kecamatan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	40.883.000	APBD II		12	24.649.600
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Kamang Baru		865.716.400				661.554.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kamang Baru		595.209.800				534.854.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi, Perencanaan dan Pelaporan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	422.769.800	APBD II		12	409.354.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terpenuhinya Operasional Pelayanan Jasa Kantor dan Pengembangan Organisasi Kecamatan	Kec. Kamang Baru	12 Bulan	172.440.000	APBD II		12	125.500.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Kamang Baru		260.506.600				125.500.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		Kec. Kamang Baru	100 persen	260.506.600	APBD II		100	125.500.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Kamang Baru		10.000.000				1.200.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat	Kec. Kamang Baru	6 Orang	10.000.000	APBD II		7	1.200.000
KECAMATAN TANJUNG GADANG									
		TOTAL PAGU			1.159.007.300				1.334.500.000
2.07	Pemerintahan				307.923.000				369.500.000
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Tanjung Gadang		307.923.000				369.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Nagari dan Kecamatan	Kec. Tanjung Gadang	1 Dokumen	15.000.000	APBD II		1	19.500.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan seksi pemerintahan dan kependudukan	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	77.500.000	APBD II		12	90.000.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan seksi perekonomian dan pembangunan	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	48.500.000	APBD II		12	60.000.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	48.000.000	APBD II		12	60.000.000
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	75.000.000	APBD II		12	90.000.000
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Terselenggaranya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	43.923.000	APBD II		12	50.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Tanjung Gadang		851.084.300				965.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Tanjung Gadang		690.084.300				800.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terselenggaranya Jasa Kantor dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	180.084.300	APBD II		12	200.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Operasional Administrasi Perkantoran	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	510.000.000	APBD II		12	600.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Tanjung Gadang		150.000.000				150.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	150.000.000	APBD II		12	150.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Tanjung Gadang		11.000.000				15.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Kec. Tanjung Gadang	12 Bulan	11.000.000	APBD II		12	15.000.000
KECAMATAN LUBUK TAROK									
TOTAL PAGU					991.699.312				909.000.000
2.07	Pemerintahan				399.700.000				307.500.000
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Lubuk Tarok		399.700.000				307.500.000
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Musrenbang	Kec. Lubuk Tarok	1 Dokumen	13.000.000	APBD II		1	13.500.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	113.300.000	APBD II		12	115.000.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Rakor secara berkala	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	27.450.000	APBD II		12	28.000.000
		Meningkatnya kualitas koordinasi secara berkala	Kec. Lubuk Tarok						
		Persentase Hasil Koordinasi dan fasilitasi yang ditindak lanjuti	Kec. Lubuk Tarok						
		Jumlah Rakor Secara berkala	Kec. Lubuk Tarok						
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase hasil koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	136.000.000	APBD II		12	43.500.000
		Jumlah Rakor Secara berkala	Kec. Lubuk Tarok						
		Jumlah Rakor secara berkala	Kec. Lubuk Tarok						
		Meningkatnya kualitas koordinasi secara berkala	Kec. Lubuk Tarok						
		Persentase Hasil Koordinasi dan fasilitasi yang ditindak lanjuti	Kec. Lubuk Tarok						
		Persentase hasil koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti	Kec. Lubuk Tarok						
		Persentase ketersediaan data kepegawain	Kec. Lubuk Tarok						
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Persentase Koordinasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	27.450.000	APBD II		12	27.500.000
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Bulan Koordinasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	82.500.000	APBD II		12	80.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Lubuk Tarok		591.999.312				601.500.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Lubuk Tarok		463.039.312				463.500.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	298.154.312	APBD II		12	298.500.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	164.885.000	APBD II		12	165.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Lubuk Tarok		121.460.000				130.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang memadai	Kec. Lubuk Tarok	12 Bulan	121.460.000	APBD II		12	130.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Lubuk Tarok		7.500.000				8.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat	Kec. Lubuk Tarok	4 Orang	7.500.000	APBD II		4	8.000.000
KECAMATAN SIJUNJUNG									
TOTAL PAGU					1.208.010.167				1.847.341.500
2.07	Pemerintahan				384.000.000				887.341.500
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Sijunjung		384.000.000				887.341.500
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan musrenbang	Kec. Sijunjung	1 Dokumen	20.000.000	APBD II		1	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Persentase hasil koordinasi dan fasilitas yang ditindaklanjuti	Kec. Sijunjung	100 persen	150.000.000	APBD II		100	286.841.500
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Persentase hasil koordinasi dan fasilitas yang ditindaklanjuti	Kec. Sijunjung	100 persen	33.000.000	APBD II		100	74.250.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase hasil koordinasi dan fasilitas yang ditindaklanjuti	Kec. Sijunjung	100 persen	75.000.000	APBD II		100	263.250.000
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil koordinasi dan fasilitas yang ditindaklanjuti	Kec. Sijunjung	100 persen	75.000.000	APBD II		100	148.000.000
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Persentase Jumlah koordinasi dan Fasilitas yang ditindaklanjuti	Kec. Sijunjung	100 persen	31.000.000	APBD II		100	75.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Sijunjung		824.010.167				960.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sijunjung		608.355.207				625.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terlaksananya Operasional Jasa Perkantoran	Kec. Sijunjung	12 Bulan	145.328.000	APBD II		12	175.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	Kec. Sijunjung	12 Bulan	463.027.207	APBD II		12	450.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Sijunjung		208.154.960				325.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah bulan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	Kec. Sijunjung	12 Bulan	208.154.960	APBD II		12	325.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Sijunjung		7.500.000				10.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	persentase aparatur yang mengikuti diklat/binteks	Kec. Sijunjung	21 persen	7.500.000	APBD II		25	10.000.000
KECAMATAN IV NAGARI									
TOTAL PAGU					#REF!				1.713.365.000
TERBILANG									
2.07	Pemerintahan				309.000.000				421.065.000
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. IV Nagari		309.000.000				421.065.000
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen Laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Kec. IV Nagari	1 Dokumen	8.500.000	APBD II		1	18.700.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Kec. IV Nagari	12 Bulan	99.100.000	APBD II		12	113.965.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Kec. IV Nagari	12 Bulan	41.600.000	APBD II		12	50.800.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah bulan dilaksanakannya Koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Kemiskinan	Kec. IV Nagari	12 Bulan	44.100.000	APBD II		12	55.100.000
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah bulan dilaksanakannya koordinasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Kec. IV Nagari	12 Bulan	84.100.000	APBD II		12	93.300.000
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Jumlah bulan dilaksanakan nya koordinasi seksi ketentraman dan ketertiban	Kec. IV Nagari	12 Bulan	31.600.000	APBD II		12	54.300.000
2.07.27.07	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Kec. IV Nagari	5 Nagari/Desa	0	APBD II		12	34.900.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. IV Nagari		#REF!				1.292.300.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. IV Nagari		500.405.860				887.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya Administrasi Perkantoran	Kec. IV Nagari	12 Bulan	366.302.860	APBD II		12	612.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Jasa Perkantoran	Kec. IV Nagari	12 Bulan	134.103.000	APBD II		12	275.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. IV Nagari		#REF!				390.000.000
		Jumlah kendaraan Dinas Roda 4 yang dapat pemeliharaan	Kec. IV Nagari						
		Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang mendapat pemeliharaan	Kec. IV Nagari						
		Jumlah AC yang mendapat Pemeliharaan	Kec. IV Nagari						
		Jumlah Mesin Tik yang mendapat Pemeliharaan	Kec. IV Nagari						
		Jumlah Komputer yang mendapat Pemeliharaan	Kec. IV Nagari						
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. IV Nagari		7.500.000				15.300.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Kec. IV Nagari	2 Orang	7.500.000	APBD II		2	15.300.000
KECAMATAN KOTO VII									
TOTAL PAGU					1.069.829.458				1.129.829.458
2.07	Pemerintahan				311.581.685				371.581.685
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Koto VII		311.581.685				371.581.685
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Pelaksanaan Koordinasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penagulangan Kemiskinan, UKS, MTQ	Kec. Koto VII	12 Bulan	47.889.500	APBD II		12	107.889.500
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Koordinasi Seksi Perekonomian & Pembangunan	Kec. Koto VII	12 Bulan	45.424.500	APBD II		12	45.424.500
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitas Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, HUT RI	Kec. Koto VII	12 Bulan	51.566.235	APBD II		12	51.566.235

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Hasil pelaksanaan musrenbang	Kec. Koto VII	6 Bulan	31.000.000	APBD II		12	31.000.000
2.07.27.05	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi Seksi Pemberdayaan & Partisipasi Masyarakat, PKK, Jambore PKK, BBGRM	Kec. Koto VII	12 Bulan	100.585.750	APBD II		12	100.585.750
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Pelaksanaan tata kelola Pelayanan yang sesuai SOP	Kec. Koto VII	12 Bulan	35.115.700	APBD II		12	35.115.700
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Koto VII		758.247.773				758.247.773
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Koto VII		504.043.773				504.043.773
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Administrasi perkantoran, Pawai Budaya, Hari Jadi Kabupaten	Kec. Koto VII	12 Bulan	385.826.773	APBD II		12	385.826.773
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Kec. Koto VII	12 Bulan	118.217.000	APBD II		12	118.217.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Koto VII		246.204.000				246.204.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (3 unit kendaraan dinas roda 4, 10 unit kendaraan dinas roda 2, 4 unit AC, 2 unit mesin tik dan 13 unit laptop dan PC)	Kec. Koto VII	33 Unit	246.204.000	APBD II		12	246.204.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Koto VII		8.000.000				8.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kec. Koto VII	4 Orang	8.000.000	APBD II		4	8.000.000
KECAMATAN KUPITAN									
TOTAL PAGU					931.544.031				1.115.000.000
TERBILANG									
2-07	Pemerintahan				241.479.650				300.000.000
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Kupitan		241.479.650				300.000.000
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Kupitan	12 Bulan	22.847.000	APBD II		12	30.000.000
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Kec. Kupitan	1 Dokumen	12.430.150	APBD II		1	20.000.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Kupitan	12 Bulan	79.000.000	APBD II		12	85.000.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Kupitan	12 Bulan	22.500.000	APBD II		12	30.000.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Kupitan	12 Bulan	48.702.500	APBD II		12	60.000.000
2.07.27.08	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Kupitan	12 Bulan	56.000.000	APBD II		12	75.000.000
9.99	Sarana dan Prasarana		Kec. Kupitan		690.064.381				815.000.000
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kupitan		460.039.381				500.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan operasional administrasi perkantoran	Kec. Kupitan	100 persen	311.679.381	APBD II		100	350.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan layanan operasional jasa perkantoran	Kec. Kupitan	100 persen	148.360.000	APBD II		100	150.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Kupitan		220.025.000				300.000.000
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Kec. Kupitan	100 persen	220.025.000	APBD II		100	300.000.000
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi	Kec. Kupitan		10.000.000				15.000.000
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang mengikuti Diklat	Kec. Kupitan	12 Bulan	10.000.000	APBD II		12	15.000.000
KECAMATAN SUMPUR KUDUS									
TOTAL PAGU					1.198.113.500				1.158.113.500
2..07	Pemerintahan				285.500.000				260.500.000
2.07.27	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase terlaksananya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kec. Sumpur Kudus		285.500.000				260.500.000
2.07.27.01	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Musrenbang	Kec. Sumpur Kudus	1 Dokumen	13.000.000	APBD II		1	13.000.000
2.07.27.02	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemerintahan & Kependudukan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	47.000.000	APBD II		12	47.500.000
2.07.27.03	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	35.000.000	APBD II		12	35.000.000
2.07.27.04	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	75.000.000	APBD II		12	75.000.000
2.07.27.08	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	68.000.000	APBD II		12	68.000.000
2.07.27.07	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Kec. Sumpur Kudus	11 Nagari/Desa	22.000.000	APBD II		12	22.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
2.07.27.10	Koordinasi dan Fasilitasi Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	25.500.000	APBD II			0
9.99	Sarana dan Prasarana				912.613.500				897.613.500
9.99.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Sumpur Kudus		550.000.000				550.000.000
9.99.01.20	Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	400.000.000	APBD II		12	400.000.000
9.99.01.21	Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan terpenuhinya administrasi perkantoran	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	150.000.000	APBD II		12	150.000.000
9.99.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kec. Sumpur Kudus		347.613.500				347.613.500
9.99.02.45	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpeliharanya Sarana dan Prasarana yang memadai	Kec. Sumpur Kudus	12 Bulan	347.613.500	APBD II		12	347.613.500
9.99.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat/Pelatihan	Kec. Sumpur Kudus		15.000.000				0
9.99.05.90	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kec. Sumpur Kudus	3 Orang	15.000.000	APBD II			0

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Target capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2020 dan 2021 disajikan dalam Tabel 6.1 :

Tabel 6.1
Indikator KinerjaUtama Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2021

Misi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2020	2021
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang kuat, berdaya saing tinggi dan sejahtera	Investasi PMDN	Rp. Juta/ tahun	3.529.875	4.279.875
	Investasi PMA	US \$	152.000	190.000
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	6,48	6,49
	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	4,54	4,56
	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	3,61	3,62
	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	11,206	11,767
	Angka kemiskinan	%	6,80	6,40
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,10	4,00
	Nilai Tukar Petani	%	100,16	100,21
Misi 2 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat , cerdas dan berakhlak mulia	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,00	12,00
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun		
	Angka harapan hidup	Tahun	65,45	67,50
	Indek pemberdayaan gender	%	56,30	56,33
	Indek pembangunan gender	%	92,40	92,45

Misi	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	
			2020	2021
Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	62,00	65,00
	Persentase kawasan permukiman sehat	%	73,00	75,00
	Penurunan Rumah tidak layak huni	Unit/tahun	200	200
	Rata-rata peningkatan kualitas bangunan	Nilai		
	Rata-rata peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air	Nilai		
Meningkatnya Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani	Nilai AKIP	Predikat	B	B
	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP
	Leveling Maturitas SPIP	level	4	4
	Indeks e-Governance/SPBE	Angka		
	Indeks Profesionalitas ASN	Angka		
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,00	82,00
Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan	Indeks kualitas Lingkungan hidup	Nilai	73,80	73,80
	Persentase penurunan titik rawan bencana alam	%		
Misi 6 : Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah	Persentase penurunan sengketa adat nagari	%	80,00	100,00
	Persentase warisan Budaya yang dilestarikan	%	80,00	100,00

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai nai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	1,96	3,63
2	PDRB per kapita	Rp juta	42,19	44,72
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,67	68,39
4	Angka kemiskinan	%	7,27	7,07
5	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,24	4,82
B	Aspek Pelayanan Umum			
1	Urusan Wajib			
a	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.1	Urusan Pendidikan			
1.1.1	APK SD/MI/Paket A	%	114,15	115,10
1.1.2	APM SD/MI/Paket A		99,99	100,00
1.1.3	APK SMP/MTs/Paket B	%	106,95	107,00
1.1.4	APM SMP/MTs/Paket B	%	85,02	86,06
1.1.5	APK PAUD	%	79,60	79,60
1.1.6	Rata-rata nilai ujian SD	poin	74,20	75,00
1.1.7	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs	poin	67,00	70,00
1.1.8	Persentase sekolah yang mencapai SPM	%	80	90
1.1.9	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	12,00
1.1.10	Harapan lama sekolah	tahun	12,80	12,85
1.1.11	Persentase siswa yang mendapatkan	%	80,00	90,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
	nilai perilaku minimal baik			
1.2	Urusan Kesehatan			
1.2.1	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	87	88
1.2.2	Persentase balita kurang gizi	%	9,6	9,0
1.2.3	Jumlah kematian ibu melahirkan	orang	1	1
1.2.4	Angka kematian bayi	orang/1.000 kelahiran hidup	12,40	12,40
1.2.5	Angka harapan hidup	tahun	66,03	66,66
1.2.6	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan pemeliharaan kesehatan	%	100	100
1.2.7	Kategori akreditasi rumah sakit	kategori	paripurna	paripurna
1.2.8	Persentase tingkat hunian rumah sakit (<i>bed occupancy rate</i>)	%	100	100
1.2.9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD	%	80,00	82,00
1.2.10	Persentase pelayanan kesehatan di RSUD yang memenuhi standar pelayanan minimal	%	80	90
1.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1.3.1	Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik	%	62,00	65,00
1.3.2	Persentase panjang jembatan pada jalan kabupaten dengan kondisi baik	%	63,00	65,00
1.3.3	Cakupan luas daerah irigasi dengan kondisi baik	%	70,00	73,00
1.3.4	Cakupan akses air minum aman masyarakat	%	70,00	75,00
1.3.5	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	%	73,50	74,30
1.4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1.4.1	Persentase kawasan permukiman sehat	%	98,00	100,00
1.4.2	Penurunan jumlah rumah tidak layak huni	unit / tahun	200	200
1.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1.5.1	Jumlah kasus konflik sosial	kasus	0	0
1.5.2	Persentase kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	kasus	100	100
1.5.3	Persentase kejadian kebakaran yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas pemadam kebakaran	%	100	100
1.5.4	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	%	100	100
1.6	Urusan Sosial			

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
1.6.1	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	%	60	70
1.6.2	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100
1.6.3	Persentase korban bencana yang diberi bantuan	%	100	100
1. b	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
1.7.	Urusan Tenaga Kerja			
1.7.1	Persentase pencari kerja yang telah dilatih	%	90,18	100
1.7.2	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar	%	36,50	37.00
1.7.3	Cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100
1.8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1.8.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	56,63	56,33
1.8.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92,24	92,80
1.9.	Urusan Pangan			
1.9.1	Skor Pola Pangan Harapan	nilai	91.70	93.00
1.10	Urusan Pertanahan			
1.10.1	Persentase sengketa lahan dan konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda yang diselesaikan	%	100	100
1.11	Urusan Lingkungan Hidup			
1.11.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	78,02	83,80
1.11.2	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	%	25	30
1.12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.12.1	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	%	97,99	100
1.12.2	Persentase penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP Elektronik	%	94,77	96
1.12.3	Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	70	75
1.13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.13.1	Jumlah nagari cepat berkembang	nagari	25	30
1.13.2	Persentase kelembagaan Kerapatan Adat Nagari yang aktif	%	100	100
1.14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1.14.1	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	Anak / WUS	2,71	2,68
1.14.2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	%	72,21	72,24
1.14.3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22,99	23,62

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
1.15	Perhubungan			
1.15.1	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	%	29	30
1.15.2	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	%	70	80
1.16	Komunikasi dan Informatika			
1.16.1	Jumlah media elektronik dan tradisional Pemerintah Daerah yang dapat diakses publik	%	8	9
1.16.2	Persentase SKPD yang menerapkan e-government	%	100	100
1.17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
1.17.1	Persentase koperasi aktif	%	79,17	80
1.17.2	Persentase Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dengan tingkat kesehatan “Sehat”	%	15	18
1.17.3	Rata-rata nilai SHU Koperasi	Rp. juta / th	9.954	12,545
1.18	Urusan Penanaman Modal			
1.18.1	Realisasi investasi PMDN	Rp juta	8.779.875	8.779.87
1.18.2	Realisasi investasi PMA	US \$	189.937	190.000
1.19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
1.19.1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	organisas i	27	30
1.19.2	Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat	peringkat	9	8
1.20	Urusan Statistik			
1.20.1	Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia tepat waktu	dokumen	2	2
1.21	Urusan Persandian			
1.21.1	Persentase SKPD yang menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	%	95	100
1.22	Urusan Kebudayaan			
1.22.1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100
1.22.2	Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan	sekolah	61	61
1.22.3	Jumlah sekolah yang mengembangkan seni dan budaya berbasis Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	sekolah	25	30
1.22.4	Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK	lembaga	25	30
1.23	Urusan Perpustakaan			
1.23.1	Jumlah perpustakaan	unit	297	345
1.23.2	Jumlah perpustakaan terstandar	unit	150	170

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
1.23.3	Jumlah anggota perpustakaan	orang	32.000	39.700
1.23.4	Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam setahun	orang	26.500	28.000
1.24	Urusan Kearsipan			
1.24.1	Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku	%	85,00	100,00
1.24.2	Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	box	1.500	3.000
1.24.3	Jumlah dokumen / arsip daerah yang dialih mediakan	dokumen	120	120
1.24.4	Jumlah arsip konvensional / naskah kuno yang dipelihara	naskah	60	70
2	Urusan Pilihan			
2.1	Urusan Kelautan dan Perikanan			
2.1.1	Produksi perikanan budidaya	ton/thn	13.879	14.000
2.1.2	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	pokdakan	8	11
2.1.3	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	195,86	100,21
2.2	Urusan Pariwisata			
2.2.1	Jumlah destinasi wisata yang berkembang	objek wisata	5	11
2.2.2	Jumlah kunjungan wisatawan	orang/tahun	13.000	16.767
2.3	Urusan Pertanian			
2.3.1	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	3,61	3,62
2.3.2	Produktivitas padi	ton/ha	5.8	6.0
2.3.3	Produksi karet	ton/thn	69.922	71.600
2.3.4	Produksi daging sapi/kerbau	ton/thn	720	720
2.3.5	Produksi telur ayam ras	ton/thn	416	416
2.3.6	Jumlah usaha pertanian dengan agribisnis terintegrasi	kel. usaha pertanian	45	50
2.3.7	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,16	100,21
2.3.8	Luas lahan sementara tidak diusahakan	ha	4.821	4.321
2.4	Urusan Perdagangan			
2.4.1	Persentase UTP wajib tera yang memenuhi persyaratan Metrologi Legal	%	100	100
2.4.2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	%	6,47	6,49
2.5	Urusan Perindustrian			
2.5.1	Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	%	4,57	4,56
2.5.2	Jumlah IKM yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna	IKM	180	180
2.6	Urusan Transmigrasi			
2.6.1	Jumlah transmigran yang ditempatkan per tahun	KK	191	100
2.6.2	Jumlah transmigran yang dibina	KK	200	300

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
			2020	2021
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
3.1	Fungsi Perencanaan			
3.1.1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran (kesesuaian program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, dan satuan indikator kinerja program/kegiatan pada RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan APBD)	%	70	80
3.1.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten	%	95	95
3.2	Fungsi Keuangan			
3.2.1	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	predikat	WTP	WTP
3.2.2	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp juta/thn	80.917,9	123.279,8
3.3	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.3.1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	85	90
3.3.2	Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	%	85	85
3.3.3	Persentase aparatur dengan nilai SKP minimal baik	%	100	100
3.4	Fungsi Penelitian dan Pengembangan			
3.4.1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	50	60
3.5	Fungsi Penunjang Lainnya			
3.5.1	Nilai AKIP Pemda	predikat	B	B
3.5.2	Nilai LPPD	predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.5.3	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	%	80,00	82,00
3.5.4	Persentase objek pemeriksaan yang diperiksa tepat waktu	%	85	85
3.5.5	Persentase kasus TP-TGR yang diselesaikan	%	100	100
3.5.6	Persentase kenaikan nilai zakat yang dikelola badan amil zakat	% kenaikan per tahun	6	6
3.5.7	Peringkat Kabupaten Sijunjung pada MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat	peringkat	16	15
D. Aspek Daya Saing Daerah				
1.	Realisasi investasi PMDN	Rp juta	8.779.875	8.779.87
2.	Realisasi investasi PMA	US \$	189.937	190.000
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	100,16	100,21

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2021 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. RKPD tahun 2021 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Program dan kegiatan yang dimuat dalam RKPD Tahun 2021 mengacu pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Nomenklatur program dan kegiatan telah dipetakan dari Nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke nomenklatur program dan kegiatan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RKPD Tahun 2021, sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2021, memusatkan perhatian pada pencapaian tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional.

Disamping itu, RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi dan Nasional, pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sijunjung.



LAMPIRAN II

**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2021**

BAPPPEDA SIJUNJUNG



PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																						
1	01	1	01	01	01	Wajib Pelayanan Dasar	Urusan Pendidikan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran													
1	01	1	01	01	01			Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya baik;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	01
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan ATK yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya baik;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	10

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	14	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	17	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	18	
1	01	1	01	01	01			Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan penunjang operasional jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas dan jasa kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	08	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	02			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik													
1	01	1	01	01	02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	13
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	22

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Mobiler	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan penunjang operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	30	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah bulan peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubiler	Jumlah bulan peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.03	35	
1	01	1	01	01	03			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset	Persentase sekolah yang terkelola asetnya														
1	01	1	01	01	03			Peningkatan manajemen aset Dinas Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang dikelola asetnya														
1	01	1	01	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	05			Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur kantor yang meningkatkan kompetensi setiap tahun	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah aparatur kantor yang meningkatkan kompetensi setiap tahun	Peningkatan Disiplin Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya baik;Persentase sekolah yang terkelola asetya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.04	02
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur kantor yang meningkatkan kompetensi setiap tahun	Peningkatan Disiplin Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya baik;Persentase sekolah yang terkelola asetya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.04	09
1	01	1	01	01	07			program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	07			Penyusunan Laporan SKPD	Jumlah Laporan Dinas Pendidikan	Penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah renstra dan renja yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.01	01
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.01	02
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisinya;Persentase sekolah yang dikelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.01	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi tentang Perencanaan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat adaerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.01	05	
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisibaik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2.02	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / semesteran yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2,02	07	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase sekolah yang terkelola asetnya;Persentase apratur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD;Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	01	2,02	08	
1	01	1	01	01	08		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD • Persentase PAUD terakreditasi • Persentase Jorong yang memiliki PAUD															
1	01	1	01	01	08		Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (BOP Non Fisik)	Meningkatnya APK PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase PAUD terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	13		
									Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (Insentif Guru PAUD	Kesejahteraan Pendidik PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase PAUD terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	15		
									Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD (Bimtek Guru PAUD)	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase PAUD terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	16		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Monev kelembagaan PAUD)	Pembinaan terhadap Lembaga PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	17	
										Penilaian Kelayakan usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Terkoordinirnya Operasional lembaga	Penerbitan Izin PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	Program pengendalian perizinan pendidikan	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	05	2.02	01	
										Pengendalian dan pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Terkoordinirnya Operasional lembaga	Penerbitan Izin PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	05	2.02	02	
										Pembinaan PAUD dan Pendidikan non Formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibina	Penerbitan Izin PAUD dan pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah PAUD dan lembaga non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	05	2.02	03	
1	01	1	01	01	08			Penunjang Operasional TK Negeri	Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh dana operasional pada TK Negeri	Pemeliharaan rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Meningkatnya kualitas bangunan sekolah TK negeri	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	05	
										Pemeliharaan rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatnya kualitas bangunan sekolah TK Negeri	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	06	
										Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Meningkatnya kualitas pelayanan bagi peserta didik TK Negeri	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	08	
										Pengadaan Perlengkapan PAUD (APE)	Meningkatnya kualitas pendidikan bagi peserta didik	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	09	
1	01	1	01	01	08			Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Pembangunan Gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	01	
										Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Meningkatnya kualitas bangunan sarana prasarana PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	02	
										Rehab Sedang/Berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	03	
										Rehab Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Mobiler PAUD	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase PAUD terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	07	
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (membeli crayon, balok-balok, alat peraga lainnya)	Meningkatnya kreatifitas peserta didik PAUD dan PNF	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase lembaga yang mendapatkan pembangunan sarana dan prasarana pada tingkat PAUD dan PNF	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APK PAUD; Persentase PAUD terakreditasi;Persentase jorong yang memiliki PAUD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	12	
1	01	1	01	01	10			Program Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI/Paket A • Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah • Angka melanjutkan ke SMP • Persentase ruang kelas baik SD • Rata-rata Nilai Ujian Sekolah Dasar • Persentase SD yang mencapai SPM • Persentase SD yang minimal akreditasi B • Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD • Persentase SD yang memenuhi SNP • APM SD/MI/Paket A														
1	01	1	01	01	10			Lomba-lomba kependidikan Tingkat Sekolah Dasar	Jumlah Medali yang diperoleh pada lomba-lomba kependidikan tingkat Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang dibina dalam peningkatan minat, bakat dan kreatifitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	25	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	10			Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi Tingkat SD	Jumlah siswa SD yang mendapatkan beasiswa berprestasi	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah siswa SD yang diberikan beasiswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	21
1	01	1	01	01	10			Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pendidikan tingkat SD	Jumlah SD yang mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	02
										Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/Kepsek/TU yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang pustaka yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	05
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	08
										Rehab sedang/berat Ruang/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Kepsek/TU yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	09

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	11
										Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana dan utilitas sekolah yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	12
	1	01	1	01	01	10		Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah tingkat SD	Jumlah SD yang mendapatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Mobiler Sekolah	Jumlah pengadaan mobiler	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	14
										Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	04

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	06	
										Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	07	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	10	
										Rehab sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga sekolah yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	13	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	16
										Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	22
	1	01	1	01	01	10		Pelaksanaan Ujian Akhir SD	Rata-rata Nilai ujian SD	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian akhir sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	23
	1	01	1	01	01	10		Penunjang Operasional SD	Jumlah SD yang Mendapatkan dana operasional	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah alat rumah tangga sekolah yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	15

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	19
										Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	17
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar (Honor Guru BOSDA)	Jumlah tenaga kependidikan honoror yang dibayarkan honorornya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	26

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	01	1	01	01	11			Program Pendidikan Menengah Pertama	• APK SMP/MTs/Paket B • APM SMP/MTs/Paket B • Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah • Persentase ruang kelas baik SMP • Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/MTs • Persentase SMP yang mencapai SPM • Persentase SMP yang minimal akreditasi B • Jumlah sekolah rujukan SMP • Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP • Jumlah SMP yang memenuhi SNP														
1	01	1	01	01	11			Lomba-lomba Kependidikan Tingkat Sekolah SMP	Jumlah cabang Olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang dibina dalam peningkatan minat, bakat dan kreatifitas	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Program Pengelolaan Pendidikan	APK, APM			1	01	02	2.02	38	
1	01	1	01	01	11			Pelaksanaan Beasiswa Berprestasi Tingkat SMP	Jumlah siswa SMP yang mendapatkan beasiswa berprestasi	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa SMP yang diberikan beasiswa	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;JUmlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	32	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	11			Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pendidikan Tingkat SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	02
										Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang guru/Kepsek/TU yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	03
										Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	05

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	06	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	14	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	15	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	17
										Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Sekolah	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	18
										Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	27

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	01	1	01	01	11			Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Tingkat SMP	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Penunjang tingkat SMP	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	04	
										Pembangunan Ruang Serbaguna / Aula	Jumlah Ruang serbaguna/Aula yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	07	
										Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/Penjaga sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	10	
										Pembangunan kantin sekolah	Jumlah Kantin sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	11	
										Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	12	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehab sedang/ berat Ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	16
										Rehab sedang/berat ruang serbaguna/aula	Jumlah Ruang serbaguna/Aula yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	19
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepsek/Guru/ Penjaga sekolah yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	21

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehabilitasi Sedang/Berat kantin sekolah	Jumlah ruang kantin yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	23
										Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah	Jumlah Sarpras dan utilitas sekolah yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	24
										Pengadaan Mobiler Sekolah	Jumlah mobiler yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	25

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	11			Pelaksanaan Ujian Akhir SMP	Rata-rata Nilai UN SMP/MTs	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik	Jumlah sekolah yang mengikuti proses belajar dan ujian bagi peserta didik	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	36
										Penyiapan dan tindaklanjuti Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang ditindaklanjuti setelah dievaluasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	37
1	01	1	01	01	11			Penunjang Operasional SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan dana Operasional	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah alat rumah tangga sekolah yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	26

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah perlengkapan siswa yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	28
										Pemeliharaan rutin Bangunann Gedung dan Ruangan	Jumlah sekolah yang melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	29
										Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sekolah yang melaksanakan pemeliharaan rutin sarpras dan utilitas sekolah	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	30

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan satuan pendidikan SMP yang dibayarkan insentifnya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	39	
1	01	1	01	01	13			Program Pendidikan Non Formal	• Angka Melek Huruf • Jumlah PKBM														
1	01	1	01	01	13		Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah kelompok warga belajar yang mengikuti pendidikan keaksaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Menurunnya angka buta aksara	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	09		
									Penyelenggaraan proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah PKBM dan PNF yang menyelenggarakan proses belajar	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	12		
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan Non Formal yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	15		
1	01	1	01	01	13		Peringatan HAI, Pameran dan Bazar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan non formal/kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan Non Formal yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	15		
1	01	1	01	01	13		Program Retrival dan Transisi	Jumlah orang anak putus sekolah dan terancam putus sekolah yang dibantu penyelenggaraan pendidikan	Penyediaan Biaya Personil peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Mengurangi angka putus sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	10		
									Perlengkapan belajar peserta didik	Jumlah perlengkapan peserta didik non formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	1	2	2.02	34		
1	01	1	01	01	13		Pendidikan Kesetaraan	Warga masyarakat Do dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat	Penyelenggaraan proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	Menurunnya angka buta aksara	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	12		
									Penyediaan Biaya Personil peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah siswa Non formal yang diberikan bantuan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	10		
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga pendidikan Non Formal yang ditingkatkan kompetensinya	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	15		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal /kesetaraan	Mengurangi angka putus sekolah	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	16	
1	01	1	01	01	13			Penunjang Operasional SKB	Jumlah bulan penunjang operasional SKB	Pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal /kesetaraan	Jumlah perlengkapan yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	09	
										Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal /kesetaraan	Meningkatnya kualitas bangunan sarana SPNF SKB	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	02	
										Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal /kesetaraan	Meningkatnya kualitas pembangunan SPNF SKB	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	04	
										Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah non formal /kesetaraan	Meningkatnya kualitas bangunan sarana SPNF SKB	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	05	
										Pengadaan Meubiler Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Terpenuhinya mobiler SPNF SKB	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	07	
										Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Terpenuhinya alat rumah tangga SPNF SKB	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	08	
										Penyelenggaraan proses Belajar Nonformal /Kesetaraan	Jumlah lembaga yang melaksanakan proses belajar	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	12	
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan non formal /kesetaraan (Honor Pamong, Tenaga Kependidikan non formal)	Meningkatnya kompetensi pamong dan pendidik	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal /kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.04	14	
1	01	1	01	01	14			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	• Persentase guru yang bersertifikat pendidik • Persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80 • Persentase guru berkualifikasi S1														
1	01	1	01	01	14			Pelaksanaan Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima sertifikat pendidik	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidik Nonformal /Kesetaraan	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima sertifikat pendidik dan jumlah guru pamong, peniik dan pustakawan yang dihitung angka kredit dalam 1 tahun untuk tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru berkualifikasi S!	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	04	2.01	01	
										Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima sertifikat pendidik dan jumlah guru pamong, peniik dan pustakawan yang dihitung angka kredit dalam 1 tahun untuk tenaga kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru berkualifikasi S!	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	14			Pemberdayaan KKG, KKKS, dan KKPS	Jumlah kelompok kerja yang melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	27
1	01	1	01	01	14			Pemberdayaan MGMP, MKKS, dan MKPS	Jumlah kelompok kerja yang melaksanakan program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	40
1	01	1	01	01	14			Penghitungan Angka Kredit Poin Tenaga Fungsional	Jumlah guru pamong, penilik dan pustakawan yang dihitung angka kredit dalam 1 tahun untuk kenaikan pangkat	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang menerima sertifikat pendidik dan jumlah guru pamong, penilik dan pustakawan yang dihitung angka kredit dalam 1 tahun untuk kenaikan pangkat	Pemerataan Kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru berkualifikasi SI	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	04	2.01	01
1	01	1	01	01	14			Workshop Guru Matematika	Jumlah guru yang meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran matematika	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	27

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	1	01	1	01	01	14			Rekrutmen dan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepsek dan Pengawas	Jumlah Kepsek dan Pengawas yang direkrut dan mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.01	27
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.02	40		
									Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang tingkatkan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.03	16		
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan kompetensi pendidik	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase kelulusan pendidikan non formal/kesetaraab	Pengelolaan Pendidikan	Angka melek huruf;Jumlah PKBM	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.04	15		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	01	1	01	01	14			Bimtek Pengembangan Muatan Lokal	Jumlah guru yang dilatih dalam pengembangan muatan lokal	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Muatan lokal yang disusun	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	03	2.01	01	
									Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus yang disusun	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	03	2.01	02		
									Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah guru yang dilatih dalam penyusunan kurikulum muatan lokal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase guru yang bersertifikat pendidik;persentase guru yang mendapatkan nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) minimal 80; Persentase guru	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	03	2.01	04		
1	01	1	01	01	14			Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SD	Jumlah guru yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang tingkatan kompetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	27	
1	01	1	01	01	14			Diklat Peningkatan Kompetensi Guru SMP	Jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang tingkatan komepetensinya	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	40	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	14			Penunjang Operasional Manajemen BOS Kabupaten	Jumlah SD dan SMP yang mendapatkan pembinaan manajemen BOS	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan kurikulum dan BOS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	28
										Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	41
1	01	1	01	01	14			Implementasi dan Pengembangan Kurikulum SMP	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti bimtek implementasi kurikulum tingkat SMP	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	41
									Jumlah sekolah yang memiliki dokumen KTSP dengan nilai minimal baik tingkat SMP													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	01	1	01	01	14			Implementasi dan Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang mengikuti bimtek implementasi kurikulum	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	28	
									Jumlah sekolah yang memiliki dokumen KTSP dengan nilai minimal baik														
1	01	1	01	01	16			Program Pendidikan Inklusif	• Jumlah sekolah inklusif														
1	01	1	01	01	16			Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Jumlah sekolah reguler yang mengikuti pendidikan inklusif	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang diberikan insentif	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.03	15	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar (Honor GPK)	Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang diberikan insentif	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	26	
										Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang diberikan insentif	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	39	
1	01	1	01	01	15			Program Pendidikan Karakter	• Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan penguatan pendidikan karakter • Persentase siswa yang mendapatkan nilai perilaku minimal baik • Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan sekolah sehat														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	01	1	01	01	15			Pembinaan Kepramukaan dan Kepalangmerahan Berbasis Sekolah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan gugus depan kepramukaan berbasis sekolah	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang dibina dalam peningkatan minat, bakat dan kreatifitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	25
										Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.02	38
1	01	1	01	01	15			Pembinaan Sekolah Sehat SD	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaan UKS untuk sekolah sehat	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	25
1	01	1	01	01	15			Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti SD	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar	1	01	02	2.01	25

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/paket A;APM SD/MI/Paket A;Rasio SD/MI terhadap penduduk usia sekolah;angka melanjutkan ke SMP;Persentase ruang kelas baik SD;Rata-rata nilai ujian SD;Persentase SD yang mencapai SPM;Persentase SD yang berakreditasi minimal B; Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SD; Jumlah SD	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.01	28
1	01		1	01	01	15			Pembinaan Sekolah Sehat SMP	Jumlah SMP yang mendapatkan pembinaan UKS untuk sekolah sehat	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.02	38
1	01		1	01	01	15			Pendidikan Karakter & Budi Pekerti SMP	Jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang dibina dalam peningkatan minat, bakat dan kreatifitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP yang memenuhi SNP	Pengelolaan Pendidikan	APK SMP/Mys/Paket B;APM SMP/MTs/Paket B;Rasio SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah;persentase ruang kelas baik SMP;Rata-rata nilai ujian Nasional SMP/MTs;Persentase SMP yang mencapai SPM;Persentase SMP yang berakreditasi minimal B; Jumlah sekolah rujukan SMP;Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan medali tingkat SMP;Jumlah SMP yang memenuhi SNP	Urusan Pendidikan	Wajib Pelayanan Dasar		1	01	02	2.02	38
1	22	01		01	44		PENDIDIKAN	KEBUDAYAAN	Program Pengelolaan Kekayaan Sejarah dan Budaya	• Persentase warisan budaya yang dilestarikan														
1	22	01		01	44	02			Pengembangan dan Penataan Kawasan Perkampungan Adat Nag.	Jumlah kegiatan pengembangan dan penataan kawasan perkampungan adat nagari sijnjung	Register Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di register	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	KEBUDAYAAN	PENDIDIKAN		2	22	5	2.01	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pencegahan dan penanggulangan dari Kerusakan, kehancuran atau kemusnahan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dicegah dan ditangulangi dari kehancuran, kerusakan atau kemusnahan							2	22	5	2.01	02	
										Peningkatan Potensi Nilai, Informasi dan Promosi Cagar budaya serta pemanfaatannya	Jumlah cagar budaya yang ditingkatkan potensi nilai, informasi, promosi serta pemanfaatannya							2	22	5	2.01	03	
										Pendayagunaan Cagar Budaya	jumlah pendayagunaan cagar budaya							2	22	5	2.01	04	
										Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	jumlah tenaga cagar budaya yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya							2	22	05	2.01	05	
								Pelestarian Cagar Budaya dan Konservasi Koleksi Museum	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan fasilitas budaya yang dikembangkan	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Jumlah Jupel yang ditingkatkan kapasitasnya	Pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten / Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan			2	22	05	2.02	05	
										Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	jumlah tenaga cagar budaya yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan			2	22	05	2.01	05	
								Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya	Jumlah kegiatan dalam pembangunan museum sejarah dan budaya	Register Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang di register	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	KEBUDAYAAN	PENDIDIKAN	2	22	05	2.01	01	
										Pencegahan dan penanggulangan dari Kerusakan, kehancuran atau kemusnahan cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dicegah dan ditangulangi dari kehancuran, kerusakan atau kemusnahan							2	22	05	2.01	02	
										Peningkatan Potensi Nilai, Informasi dan Promosi Cagar budaya serta pemanfaatannya	Jumlah cagar budaya yang ditingkatkan potensi nilai, informasi, promosi serta pemanfaatannya							2	22	05	2.01	03	
										Pendayagunaan Cagar Budaya	jumlah pendayagunaan cagar budaya							2	22	05	2.01	04	
										Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	jumlah tenaga cagar budaya yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya							2	22	05	2.01	05	
								Pelaksanaan Pentas Seni dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pagelaran pentas seni kebudayaan daerah yang dilaksanakan	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional		Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan			2	22	02	2.02	02	
								Pemilihan Duta Budaya Kab. Sijunjung	Jumlah peserta yang mengikuti pemilihan duta budaya Kabupaten Sijunjung	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan			2	22	02	2.01	02	
								Bimtek Sejarah dan Kepurbakalaan	Jumlah peserta dalam pelaksanaan bimtek sejarah dan kepurbakalaan	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten / Kota		Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah lokal yang dibina			2	22	04	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	22					KEBUDAYAAN		Program Pengembangan Nilai Budaya	• Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK														
								Apresiasi Terhadap Karya Seni	Jumlah lembaga yang mengembangkan kegiatan apresiasi karya seni dan budaya berbasis ABS-SBK	Pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pembinaan kebudayaan	Jumlah peserta/ lembaga yang menerima penghargaan	Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan				2	22	02	2.02	03
								Program Pembinaan Pengembangan Pendidikan Sejarah dan Budaya	• Jumlah sekolah yang mengimplementasikan muatan lokal ke dalam kurikulum pendidikan • Jumlah SDM seni budaya yang dikembangkan potensinya • Jumlah SDM sejarah dan keurbakalaan yang dikembangkan potensinya														
								Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Berbasis Budaya	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan sekolah berbasis budaya	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan				2	22	02	2.01	02
								Peningkatan Kompetensi Siswa Dalam Berpidato Adat Minang Se Kab. Sijunjung	Jumlah siswa yang meningkatkan kompetensi dalam berpidato adat minangkabau	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan		Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan				2	22	02	2.01	02
								Bimtek dan Lomba Penulisan Cerita Rakyat Sijunjung	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan lomba penulisan cerita rakyat Sijunjung	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten / Kota		Pembinaan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah sejarah lokal yang dibina				2	22	04	2.01	01
								Peningkatan Kapasitas Pelaku Seni Budaya	Jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitas pelaku seni dan budaya	Peningkatan kapasitas tatakelola lembaga kesenian tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapsitasnya	Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten / Kota		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					2	22	03	2.01	03
DINAS KESEHATAN																							
						Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi keuangan		Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	04	
1	02	01	01			KESEHATAN	Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
1	02	01	01	20		KESEHATAN		Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi	Administrasi keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
										Penyediaan alat tulis kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	11	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	13	
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	14	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	16	
										Penyediaan makanan dan minuman	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	17	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	18	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.04	02	
										Pengadaan pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.04	05	
1	02	01	02	21				Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Meningkatnya pengelolaan jasa perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pengelolaan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Meningkatnya pengelolaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	02	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pengelolaan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Meningkatnya pengelolaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	08	
1	02	01	02			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
1	02	01	02	45				Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	09	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	12	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	20	
										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	22	
										Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	28	
										Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	29	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	32	
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	34	
										Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	38	
										Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Administrasi Umum	Meningkatnya cakupan sarana dan prasarana kantor dengan baik	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.03	40	
1	02	01	05			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	05	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman petugas terhadap produk hukum	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman petugas terhadap produk hukum	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pemahaman petugas terhadap produk hukum	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.04	10	
										Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman petugas terhadap produk hukum	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pemahaman petugas terhadap produk hukum	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tupoksi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.04	11	
1	02	01	05	17		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Pemberdayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten / kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan teknis, Pengawasan Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.02	01	
										Pelatihan dan uji kopetensi tenaga kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan teknis, Pengawasan Praktek Teanaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.02	02	
										Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan teknis, Pengawasan Praktek Teanaga Kesehatan di wilayah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.02	03	
										Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabuapten Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.03	01	
										Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM manusia di wilayah kabuapten Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.03	02	
										Peningkatan kopetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	pengembangan mutu dan peningkatan kompentensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkasnya kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.04	01	
										sertifikasi tenaga kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	pengembangan mutu dan peningkatan kompentensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.04	02	
										Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.05	01	
										Pengelola sistim informasi sumber daya manusia kesehatan	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten / Kota	Meningkatnya Kualitas SDM Kesehatan	program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	meningkatkan kapasitas sumber daya manusia	urusan pemerintah bidang kesehatan	urusan pemerintah bidang kesehatan	1	02	03	2.05	02	
1	02	01	06			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
1	02	01	06	06		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya capaian laporan kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Meningkatnya capaian laporan kinerja SKPD	Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	01	2.02	06		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1	02	01	15		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
	1	02	01	15	02	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	03	
										Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	04	
										Pengembangan Puskesmas	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	06	
										Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	07	
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	09	
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	10	
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	11	
										Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan sarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana gedung pelayanan kesehatan dengan kondisi baik	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	12	
	1	02	01	15	03	KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Prasarana / Peralatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	13	
										Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	14	
										Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	15	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	18	
										Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	19	
										Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan / alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten	Meningkatnya cakupan layanan prasarana dan peralatan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat yang memenuhi standart	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2,01	20	
1	02	01	16			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan data informasi kesehatan	Persentase UPTD kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	16	01				Pengelolaan data dan Informasi kesehatan	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data yang diterima petugas data	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data yang diterima petugas data	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data yang diterima petugas data	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPTD kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
										Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data yang diterima petugas data	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data yang diterima petugas data	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase UPTD kesehatan yang menggunakan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Proram Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Keperawatan	Meningkatkan kegiatan perkesmas dimasyarakat	-	-	-	-	-	-								
1	02	01	17	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Praktek Perorangan Klinik dan Rumah Sakit Swasta	Pendataan dan pemantauan praktek perorangan klinik dan rumah sakit swasta	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Pendataan dan pemantauan praktek perorangan klinik dan rumah sakit swasta	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab	Pendataan dan pemantauan praktek perorangan klinik dan rumah sakit swasta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	KESEHATAN	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.04	04	
										Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah	Pendataan dan pemantauan praktek perorangan klinik dan rumah sakit swasta	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab	Pendataan dan pemantauan praktek perorangan klinik dan rumah sakit swasta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	KESEHATAN	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.04	02	
1	02	01	17	03		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Upaya Kesehatan Pengembangan	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pembinaan kesehatan kerja, kes.tradional, kes.gigi dan kes.olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pembinaan kesehatan kerja, kes.tradional, kes.gigi dan kes.olahraga	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pembinaan kesehatan kerja, kes.tradional, kes.gigi dan kes.olahraga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	KESEHATAN	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.02	19	
										Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (Indera, UKGS/UKGMD, Perkesmas)	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pembinaan kesehatan kerja, kes.tradional, kes.gigi dan kes.olahraga	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan pembinaan kesehatan kerja, kes.tradional, kes.gigi dan kes.olahraga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	KESEHATAN	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.02	23	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	02	01	20	01		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Pencapaian Mutu dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	Kesehatan	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.02	35	
									Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas dengan indeks kepuasan masyarakat baik	Kesehatan	PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	1	02	02	2.04	03	
1	02	01	17	04		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Sungei Lansek	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	05		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Kamang	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	06		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Air Amo	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	07		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Tanjung Gadang	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	08		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Lubuk Tarok	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	09		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Gambok	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	10		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Sijunjung	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	11		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Muaro Bodi	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	12		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Padang Sibusuk	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	13		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Tanjung ampalu	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	14		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Kumanis	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	15		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Sumpur Kudus	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	16		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	BLUD Puskesmas Padang Laweh	Meningkatnya Kegiatan operasional puskesmas BLUD							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	17	17		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Operasional Puskesmas								Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	19	18		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)								Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1	02	01	19		KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan pengelolaan alat kesehatan	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar														
	1	02	01	19	02	KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Meningkat pembinaan puskesmas dengan pemakaian obat rasional	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkat pembinaan puskesmas dengan pemakaian obat rasional	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Meningkat pembinaan puskesmas dengan pemakaian obat rasional	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.01	01	
	1	02	01	19	04	KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Pengawasan perizinan sarana Kesehatan	Pemantauan, pembinaan izin sarana kesehatan	Penyediaan dan Pengelolaan data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemantauan, pembinaan izin sarana kesehatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemantauan, pembinaan izin sarana kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.01	02	
										Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemantauan, pembinaan izin sarana kesehatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemantauan, pembinaan izin sarana kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.01	03	
	1	02	01	19	05	KESEHATA N	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Pengawasan Makanana dan Minuman	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kleas I tertentu perusahaan rumah tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kleas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.02	01	
										Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesahatan rumah tangga kelas I tertentu perusahaan rumah tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kleas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.02	02	
										Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P- IRT sebagai izin produksi, untuk produk makan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh idustri rumah tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P- IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.03	01	
										Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan dan sentra makanan jajanan	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Penerbitan stiker pembinaan pada makan jajanan dan sentra makanan jajanan	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	4	2.05	01	
										Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Pemeriksaan dan tidak lanjut Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.06	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Pemeriksaan dan tidak lanjut Post Market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Pemantauan dan pembinaan IRT- Pangan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.06	02	
1	02	01	19	07		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	OPERASIONAL GUDANG FARMASI	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Pengadaan obat dan vaksin	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	16	
										Pengadaan bahan habis pakai	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	17	
										Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	10	
										Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	18	
										pemeliharaan rutin dan berkala alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	20	
										Pengelolaan sistim informasi sumber daya manusia kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehtan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	3	2.05	2	
1	02	01	20			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Pencapaian Mutu dan Kualitas pelayanan	Persentase puskesmas yang terakreditasi							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar						
1	02	01	20	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pencapaian Mutu dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Labrator	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kota	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terjaminnya Mutu Pelayanan Di Puskesmas Melalui Akreditasi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	35	
										Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kab	Meningkatn mutu dan kualitas pelayanan pada UPT pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tercapainya Kepuasan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.04	03	
1	02	01	20	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Operasional Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya pelayanan laboratorium kepada masyarakat	Pengadaan obat dan vaksin	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	16	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan bahan habis pakai	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	17	
										Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenagan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	10	
										Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenagan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	18	
										pemeliharaan rutin dan berkala alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenagan daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.01	20	
										Pengelolaan sistim informasi sumber daya manusia kesehatan	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehtan untuk UKM dan UKP tingkat daerah kabupaten	Tercukupinya persediaan obat dan operasional gudang farmasi selama 1 tahun	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	3	2.05	2	
1	02	01	21			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase menurunnya angka kematian ibu dan bayi							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar						
1	02	01	21	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pembinaan kesehatan bayi, anak	Meningkatkan pelayanan dan pemantauan perkembangan kesehatan bayi dan anak	pengelolaan pely kes bayi baru lahir	Meningkatkan pelayanan dan pemantauan perkembangan kesehatan bayi dan anak	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pelayanan neonatal esensial	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	03	
										pengelolaan pely kes balita	Meningkatkan pelayanan dan pemantauan perkembangan kesehatan bayi dan anak	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	04	
1	02	01	21	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi	Meningkatnya pelayanan dan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap kesehatan ibu hamil	pengelolaan pely kes ibu hamil	Meningkatnya pelayanan dan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap kesehatan ibu hamil	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya pelayanan dan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap kesehatan ibu hamil	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) sesuai standar	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	02	
										pengelolaan pely kes ibu bersalin	Meningkatnya pelayanan dan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap kesehatan ibu hamil	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya pelayanan dan pemantauan sekaligus pembinaan terhadap kesehatan ibu hamil	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	setiap persalinan dilakukan difasilitasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	02	
1	02	01	21	03		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	pengelolaan pely kes bayi baru lahir	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pelayanan neonatal esensial dan penanganan komplikasi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										pengelolaan pely kes ibu hamil,	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	tersedianya Rumah Tunggu kelahiran (RTK) dan dukungan biaya rujukan ibu hamil dengan resiko tinggi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2	02	01
										pengelolaan pely kes ibu bersalin	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan pelayanan persalinan kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	dukungan biaya persalinan dan nifas komplikasi	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2	02	02
1	02	01	22			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Perbaikan Gizi masyarakat	Persentase balita gizi kurang							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar						
1	02	01	22	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pembinaan perbaikan gizi masyarakat	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	pengelolaan pely kes gizi masyarakat	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	balita kurus mendapat makanan tambahan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2	02	15
1	02	01	22	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pemantauan status gizi masyarakat	Pemantauan Status Gizi	pengelolaan pely kes gizi masyarakat ,	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian vitamin A	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2	02	15
1	02	01	22	03		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pembinaan kesehatan lansia	Meningkatkan pemantauan kesehatan lansia	pengeloaan pely kes pada usia lanjut	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	Penyediaan Fasilitas pely kes utk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten Kota	Meningkatkan penanggulangan dan pembinaan masalah gizi kepada masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	pemeriksaan tingkat kemandirian pada lansia	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2	02	04
1	02	01	23			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Pengendalian dan pencegahan Penyakit Menular	Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk														
1	02	01	23	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN IMUNISASI	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	PENGLOLAAN KESEHATAN BUMIL	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Program Imunisasi	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2	02	01
										PENGLOLAAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi					1	02	02	2	02	03
										PENGLOLAAN KESEHATAN BALITA	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi					1	02	02	2	02	04
										PENGLOLAAN KESEHATAN PADA PENDIDIKAN DASAR	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi					1	02	02	2	02	05
										INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASAL)	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya cakupan perlindungan untuk bayi dan balita dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi					1	02	02	2	02	36

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	02	01	23	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pengendalian penyakit menular langsung	Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	23	03		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pengendalian penyakit bersumber binatang	meningkatkan penanggulangan penyakit bersumber binatang							Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02				
1	02	01	23	04		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	PENINGKATAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN WABAH	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	PENGLOLAAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KLB	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	13	
										PENGLOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	14	
										PENGLOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	20	
										PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABOR RUKUN /NASIONAL	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	28	
										PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Meningkatnya penata laksanaan KLB dengan pendataan dan pemantauan serta pelaporan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	37	
1	02	01	24			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Pengendalian dan pencegahan TidakP enyakit Menular	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu														
1	02	01	24	01		Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Tidak Menular secara terpadu	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terselenggaranya Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk usia produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya skrining Faktor Resiko Usia Produktif minimal 1 kali setahun untuk Penyakit menular dan Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Setiap warga usia 15 s/d 59 tahun mendapat pelayanan sesuai standar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	06	
										Pengelolaan Pelayanan Penderita Hipertensi	Terselenggaranya Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya pelayanan setiap Penderita Hipertensi sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Seluruh penderita Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	08	
										Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	Terselenggaranya Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Penderita DM	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya pelayanan setiap Penderita DM sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Seluruh penderita DM mendapat pelayanan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	09	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terselenggaranya Pelayanan kesehatan sesuai standar untuk Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya pelayanan setiap Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa sesuai standar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Seluruh Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa mendapat pelayanan sesuai standar	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	21	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya kegiatan pelayanan, deteksi dini dan penyuluhan kesehatan jiwa dan NAPZA	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan pelayanan, deteksi dini dan penyuluhan kesehatan jiwa dan NAPZA	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Setiap Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan, deteksi dini dan penyuluhan kesehatan jiwa dan NAPZA	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	22	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya kegiatan Posbindu di masyarakat, Institusi, jemaah haji, CERDIK di Sekolah dan di Tempat-Tempat Umum	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Keaktifan Posbindu dimasyarakat, Institusi, Jemaah Haji, di Sekolah dan ditempat-tempat umum	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			1	02	02	2.02	25		
										Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat									
										Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terselenggaranya screening NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kumulatif Screening NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			1	02	02	2.02	27		
1	02	01	24	02		Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan jemaah haji	Meningkatnya pemantauan dan pengendalian penyakit tidak menular														
1	02	01	24	03		Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (PENGISIAN)	Meningkatnya kesehatan calon jemaah haji	BELUM TERAKOMODIR													
1	02	01	25			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase nagari siaga aktif														
1	02	01	25	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	meningkatnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesehatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hidup sehat	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	18	
									Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hidup sehat	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	05	2.02	01		
									Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hidup sehat	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	05	2.03	01		
1	02	01	25	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN																
1	02	01	25	03		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Peningkatan Kesehatan Anak Usia sekolah	Meningkatnya peran anak sekolah dalam bidang kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Meningkatnya peran anak sekolah dalam bidang kesehatan	meningkatnya sekolah sehat	Meningkatnya peran anak sekolah dalam bidang kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	terwujudnya anak didik dan sekolah sehat	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	02	01	26			KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Program Penyehatan Lingkungan	Persentase nagari yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)														
1	02	01	26	01		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Penyehatan lingkungan pemukiman	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	16	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	17	
										Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat Laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan /restoran dan depot air minum	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	04	2.04	01	
1	02	01	26	02		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Pengembangan Kawasan sehat	Meningkatkan peran pengambil kebijakan dalam memfasilitasi kawasan sehat	Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	Meningkatkan peran pengambil kebijakan dalam memfasilitasi kawasan sehat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatkan peran pengambil kebijakan dalam memfasilitasi kawasan sehat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran masyarakat dalam peningkatan kesehatan lingkungan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1	02	02	2.02	29	
1	02	01	27					Program pengembangan Pembiayaan dan jaminan pemeliharaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin yang terlayani jaminan pemeliharaan kesehatan														
1	02	01	27	1		KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Operasional penguatan Jaminan kesehatan nasional	Pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan Kesehatan Masyarakat	penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten /Kota	Pengelolaan dan penyelenggaraan jaminan Kesehatan Masyarakat	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Terwujudnya pengelolaan Program JKSS dan Jamkesda	Kesehatan	Urusan wajib pelayanan dasar	1	02	02	2.02	26	
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)																							
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Biaya Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	02	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ASN yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jaminan Kesehatan ASN	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	02	01	2.03	04	
1	02	01						I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase terpenuhinya kegiatan jasa perkantoran														
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah biaya operasional Jasa perkantoran Yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya operasional Jasa perkantoran Yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya kegiatan jasa perkantoran	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	02	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah biaya Jasa Kebersihan perkantoran Yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terpenuhinya kegiatan jasa perkantoran	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1	02	01	2.03	08	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Kesehatan	Jumlah biaya operasional Jasa perkantoran Yang disediakan	Penyediaan Fasilitas Pemenuhan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS tipe C	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase terpenuhinya kegiatan jasa perkantoran	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	02	2.01	19
								II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur														
								Peningkatan Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan yang mengikuti diklat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	01	2.04	11
										Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kualitas SDM Pelayanan Kesehatan yang mengikuti diklat	Pembinaan Teknis, pengasapan praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten /kota	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	03	2.02	03
								III. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan prasarana yang ditingkatkan														
								Pengadaan alat-alat rumah sakit	Jumlah alat kesehatan RS yang diadakan	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah paket kegiatan alat kesehatan RS yang disediakan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Jumlah Sarana dan prasarana yang ditingkatkan	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	02	2.01	14
								Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Jumlah Sarpras RS yang dibangun dan ditingkatkan	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarpras RS yang dibangun dan ditingkatkan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Jumlah Sarana dan prasarana yang ditingkatkan	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	02	2.01	12
										Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan KEsehatan	jumlah paket kegiatan pengadaan prasarana pendukung fasilitasn pelayanan kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar RS Tipe C	Program Pemenuhan UKP dan UKM	Jumlah Sarana dan prasarana yang ditingkatkan	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	02	2.01	13
								IV. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan														
								Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan	Jumlah dokter spesialis yang bekerja sama	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokter spesialis yang bekerja sama	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten /kota	Persentase pemenuhan perencanaan kebutuhan dokter spesialis sesuai dengan standar RS Tipe C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	03	2.03	02
								V. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan BLUD yang Terlaksana														
								Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pendukung BLUD	Jumlah Biaya Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah bulan pelaksanaan Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten /kota	Jumlah Biaya Pelayanan BLUD yang dibutuhkan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan BLUD yang Terlaksana	Bidang Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		1	02	02	2.02	32
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhi Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2	02	01	
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Persentase Tersedianya jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2	03	03	
							Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2	03	10	
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	11	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	12	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	13	
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	14	
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	17	
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	18	
									Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2	04	02	
							Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2	03	01	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	02	
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	03	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	06	
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2	03	07	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																	
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	08					
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	09					
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik																		
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Presentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2.03	20					
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	22					
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	24					
										Pengadaan Mebeleur	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	25					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	28					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	29					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	30					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	32					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	34					
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	35					
										Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum					1	03	01	2.03	38					

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Kantor bagi Aparatur		Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Umum						1	03	01	2.03	40	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Pelaporan kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu															
								Monitoring Program dan Pelaporan	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		1	03	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi							1	03	01	2.01	02
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi							1	03	01	2.01	03
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi							1	03	01	2.01	04
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi							1	03	01	2.01	05
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		1	03	01	2.02	03	
										Penyusunan Akutansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan							1	03	01	2.02	04
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan							1	03	01	2.02	05
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan							1	03	01	2.02	06
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan							1	03	01	2.02	07
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang dilaksanakan Tepat Waktu		Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan							1	03	01	2.02	09

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / Lulus diklat peningkatan Kompetensi teknis yang sesuai dg tupoksi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat lulus Pendidikan dan Pelatihan Formal sesuai dengan Tupoksi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / Lulus diklat peningkatan Kompetensi teknis yang sesuai dg tupoksi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	01	2,04	09	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan Tupoksi		Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					1	03	01	2,04	11	
								Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta														
								Kegiatan Penyusunan kebijakan RTRK, RDTRK dan RTBL	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen yang ditetapkan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	12	2.01	01	
										Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		Jumlah Dokumen yang ditetapkan					1	03	12	2.01	02	
										Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		Jumlah Dokumen yang ditetapkan					1	03	12	2.01	03	
										Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital		Jumlah Dokumen yang ditetapkan					1	03	12	2.01	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Survey Pemetaan	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase Tersedianya Database Spasial untuk kebutuhan perencanaan tata ruang melalui peta analog dan peta digital	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan database pemanfaatan ruang untuk inventasi dan Pembangunan Daerah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	12	2.03	02	
								Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang														
								Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Persetase Ketersedian Database Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	12	2.03	01	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	12	2.04	02	
										Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan rencana peruntukan ruang		Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan				Wajib Pelayanan Dasar	1	03	12	2.04	04	
								Program Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum														
								Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus-kasus	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus-kasus	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus-kasus	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	Penyelesaian Sengketa Tanah garapan	Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	Bidang Pertanahan	Wajib Pelayanan Dasar	2	10	04	2.01	01	
										Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus-kasus		Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah					2	10	04	2.01	02	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian kasus-kasus	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab /Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Terlaksananya Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	Bidang Pertanahan	Wajib Pelayanan Dasar	2	10	05	2.01	02	
								Program Pembangunan Gedung Kantor	Persentase gedung kantor pemda yang representatif														
								Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah Kabupaten Kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi	Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	08	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai, serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	02
										Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	03
										Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	04
										Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	05
										Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	06
										Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang ditetapkan tingkat Kabupaten / Kota	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	07
										Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Pemilik Bangunan	Persentase Gedung Kantor Pemda yang representatif		Persentase Bangunan Gedung yang laik fungsi		Persentase bangunan Gedung Yang Baik Fungsi				1	03	08	2.01	09
								Program Pengembangan Utilitas Perkotaan	Panjang akses pejalan kaki dan disabilitas, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
								Pembangunan Ruang Terbuka Hijau	Panjang akses pejalan kaki dan disabilitas, luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luas kawasan lingkungan yang terbangun	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Luas kawasan lingkungan yang terbangun	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luas Kawasan Lingkungan Yang Terbangun	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar		1	03	09	2.01	03
								Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi														
								Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikasi	Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi penerbitan IUJK	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar		1	03	11	2.01	04
										Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi jasa Konstruksi Cakupan daerah Kabupaten / Kota	Penilaian informasi / data Jasa Konstruksi yang di input dalam SIPJAKI		Penilaian pelayanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten				1	03	11	2.02	01
										Dukungan / fasilitasi penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi		Jumlah Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi				1	03	11	2.03	02
										Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha , tertib Penyelenggaraan dan Tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Baik dan Tertibnya penyelenggaraan kegiatan Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha yang diberi izin	Pengawasan tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha yang dilakukan pemantauan dan pengawasan		Jumlah Badan Usaha yang dilakukan pemantauan dan pengawasan				1	03	11	2.04	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dg Kondisi Mantap dan Pesentase Panjang Jembatan pada jalan Kabupaten dengan kondisi mantap														
								Kegiatan Peningkatan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten kabupaten dengan kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	01	
										Pengelolaan Leger Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik				Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten kabupaten dengan kondisi Baik			1	03	10	2,01	03	
										Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik				Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten kabupaten dengan kondisi Baik			1	03	10	2,01	04	
										Pembangunan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik				Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten kabupaten dengan kondisi Baik			1	03	10	2,01	05	
										Pelebaran Jalan Menuju Standar	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik				Persentase Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten kabupaten dengan kondisi Baik			1	03	10	2,01	06	
								Kegiatan Peningkatan Jembatan	Persentase Panjang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik	Pembangunan Jembatan	Persentase Panjang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dg Kondisi Mantap dan Pesentase Panjang Jembatan pada jalan Kabupaten dengan kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	12	
										Penggantian Jembatan	Persentase Panjang Jembatan Pada Jalan Kabupaten Dengan Kondisi Baik				Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik			1	03	10	2,01	16	
								Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan kondisi tanggap darurat yang dikembalikan fungsinya														
								Kegiatan Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan kondisi tanggap darurat yang dikembalikan fungsinya	Penanggulangan Bencana /Tanggap Darurat	Persentase Panjang Jalan kondisi tanggap darurat yang dikembalikan fungsinya	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	21	
								Program Preservasi Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dg Kondisi Mantap dan Persentase Panjang Jembatan pada jalan Kabupaten dg kondisi baik														
								Kegiatan Preservasi Jalan	Presentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Rehabilitasi Jalan	Presentase Panjang Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	09	
								Kegiatan Preservasi Jembatan	Presentase Panjang Jembatan pada jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Rehabilitasi Jembatan	Presentase Panjang Jembatan pada jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten /Kota	Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	18	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	Panjang Jalan dan Jembatan dengan Kondisi Mantap														
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	Panjang Jalan dan jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan dan jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	10	2,01	10	
										Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan dan jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik				Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik			1	03	10	2,01	11	
										Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jalan dan jumlah Jembatan dengan Kondisi Baik				Persentase panjang jalan dan jembatan kabupaten dengan kondisi baik			1	03	10	2,01	19	
								Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan luas daerah irigasi dengan kondisi baik														
								Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun	Luas cakupan daerah irigasi dengan kondisi baik	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Irigasi dan Rawa	Luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	02	2,02	01	
								Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Luas cakupan layanan air baku yang dikelola/ dibangun														
								Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Pengambilan Saluran Pembawa	Persentase layanan air baku yang dikelola/dibangun	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	02	2,02	08	
										Peningkatan Bendung irigasi	Jumlah Bendung dengan kondisi baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik			1	03	02	2,02	09	
								Integrated Participatory Development And Management Irrigation	Persentase air baku yang dikelola / dibangun	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi dengan kondisi baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Wajib Pelayanan Dasar	1	03	02	2,02	14	
										Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung dengan kondisi baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik			1	03	02	2,02	15	
										Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara dengan baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik			1	03	02	2,02	21	
										Operasi Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung dengan kondisi baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik			1	03	02	2,02	22	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Bendung dengan kondisi baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik				1	03	02	2.02	27
										Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Panjang jaringan irigasi dengan kondisi baik				Cakupan Luas Daerah Irigasi dengan Kondisi Baik				1	03	02	2.02	28
								Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebinamargaan	Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik														
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat berat	Persentase alat-alat berat yang baik dalam melayani pembangunan	Merupakan Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja													
								Operasional Labor	Persentase terlaksananya uji mutu pekerjaan konstruksi	Merupakan Belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP																							
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur														
								Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.01	02	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan infrastruktur	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.01	03	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat														
								Perumahan dan Permukiman	Panjang sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Panjang sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang terbangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	04	2.01	01	
										Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Panjang sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang terbangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Panjang sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang terbangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	04	2.01	03	
							Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.03	01		
									Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.03	02		
									Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.03	03		
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.03	04		
									Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang di bantu	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase pengurangan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase prasarana dasar lingkungan perumahan yang memenuhi kriteria lingkungan sehat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	03	2.03	05		
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak														
							Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-gorong	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	01		
									Supervisi Pembangunan /Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	03		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah <i>Kabupaten / Kota</i>	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	05
										Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah <i>Kabupaten / Kota</i>	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	06
										Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah <i>Kabupaten / Kota</i>	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	07
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	jumlah DED yang disusun dan saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah <i>Kabupaten / Kota</i>	jumlah saluran drainase kawasan permukiman yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase kawasan permukiman dengan akses drainase yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	06	2.01	09
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat													
								Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah sosialisasi / bimtek / kampanye	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sosialisasi / bimtek / kampanye	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	02
								Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah sosialisasi / bimtek / kampanye	Pengelolaan Sampah	Jumlah sosialisasi / bimtek / kampanye	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	04
								jumlah bank sampah		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah bank sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	04
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			jumlah bank sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	05
								Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaan Ulang dan Pemanfaatan Kembali			jumlah bank sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	02
								Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	05

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kelompok sasaran yang dibina	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kelompok sasaran yang dibina	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	05	2.01	01	
										Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kelompok sasaran yang dibina	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	05	2.01	02	
										Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah kelompok sasaran yang dibina	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi lokasi pengumpulan limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	05	2.02	01	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan , Pemanfaatan , Pengolahan, dan /atau Penimbunan	Jumlah kelompok sasaran yang dibina	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah rekomendasi lokasi pengumpulan limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan persampahan masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	05	2.02	02	
								Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup												
								Pengelolaan Labor Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan labor lingkungan hidup serta pengambilan dan pengujian kualitas air sungai, air hujan, udara, limbah, dan tanah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Terlaksananya Pengambilan dan pengujian kualitas air sungai, air hujan, udara, limbah, dan tanah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Jumlah objek lingkungan yang di uji	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	03	2.01	01	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Pengambilan dan pengujian kualitas air sungai, air hujan, udara, limbah, dan tanah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota	Jumlah objek lingkungan yang di uji	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	03	2.01	02	
								Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pemegang izin lingkungan yang di fasilitasi	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah pemegang izin lingkungan yang di fasilitasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi dokumen izin lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	06	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemegang izin lingkungan yang di fasilitasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi dokumen izin lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	06	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah pemegang izin lingkungan yang di fasilitasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mematuhi dokumen izin lingkungan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	06	2.01	04	
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya program adiwiyata	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya program adiwiyata	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	09	2.01	01	
										Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya program adiwiyata	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang didampingi	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	08	2.01	02	
1.2	4.1.							Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Perumahan Bersih, Nagari Bersih, Perkampungan Adat Bersih	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perumahan Bersih, Nagari Bersih, Perkampungan Adat Bersih	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	09	2.01	01	
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup								
										Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen yang disusun	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	02	2.02	01	
										Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen yang disusun	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	02	2.02	02	
										Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun	Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan	2	11	02	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA														
								Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem dan MIH	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	04	2.01	04	
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	04	2.01	07	
										Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	04	2.01	05	
										Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	04	2.01	02	
										Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Jumlah rehabilitasi DAS 2. Luas Penanaman sempadan sungai, dan 3. Jumlah pembuatan sumur resapan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	09	2.01	01	
								Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Jumlah objek lingkungan yang di uji	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	03	2.01	02	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Cakupan akses air minum aman masyarakat														
								Pengembangan sistem distribusi air minum	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	01	
										Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	03	
										Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	04	
										Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	05	
										Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	06	
										Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	07	
										Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	08	
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	11	
										Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	12	
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	13	
										Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	14	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	15	
										Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Cakupan akses air minum aman masyarakat	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	16	
								Penyediaan Prasarana dan sarana air minum bagi desa rawan air	Jumlah DED yang disusun	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	01	
										Supervisi Pembangunan / peningkatan / perluasan / perbaikan SPAM	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	02	
										Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	04	
										Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	06	
										Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	08	
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah DED yang disusun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	11	
								Penyediaan air minum & Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	01	
										Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	03	
										Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	04	
										Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	05	
										Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	06	
										Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	07	
										Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	08	
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	11	
										Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	12	
										Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	13	
										Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN BIDANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	14	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	15	
										Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana prasarana air minum dan sanitasi yang tersedia	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang terpasang jaringan air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan akses air minum aman masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	03	2.01	16	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Limbah	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat														
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Limbah	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	01		
								Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	02		
								Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	03		
								Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	04		
								Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	05		
								Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	07		
								Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	08		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan prasarana sanitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	09	
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sarana sanitasi di daerah rawan sanitasi	Pengelolaan dan prasarana sanitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	10	
								Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SANIMAS)	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	01	
										Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	02	
										Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	03	
										Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	04	
										Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	05	
										Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	07	
										Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	08	
										Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sambungan rumah yang memiliki sanitasi di daerah dampingan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana sanitasi masyarakat yang di bangun	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan akses sanitasi layak masyarakat	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	05	2.01	10	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Permukiman dan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak														
							Pembangunan Prasarana dan Sarana Pedesaan	Pembangunan Infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	07	2.01	01	
								Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun		Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	07	2.01	02	
								Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun		Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	07	2.01	03	
								Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun		Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur di kawasan permukiman yang terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur kawasan perdesaan yang layak	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	03	07	2.01	04	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Pemerintahan dan Prioritas Pembangunan	Program Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan	1. Jumlah perumahan yang dilayani pengangkutan sampahnya 2. Jumlah RTH yang di kelola 3. Jumlah tugu yang dikelola														
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Penanggulangan K3 dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Terwujudnya pemeliharaan K3, sarana dan prasarana K3 dan fasilitas K3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Terwujudnya pemeliharaan K3, sarana dan prasarana K3 dan fasilitas K3	Pengelolaan Sampah	Persentase penurunan timbulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Jumlah perumahan yang dilayani pengangkutan sampahnya 2. Jumlah RTH yang di kelola 3. Jumlah tugu yang dikelola	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	11	2.01	03		
							Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terlaksananya pemeliharaan RTH taman kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya pemeliharaan RTH taman kota	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Taman Kehati yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	1. Jumlah perumahan yang dilayani pengangkutan sampahnya 2. Jumlah RTH yang di kelola 3. Jumlah tugu yang dikelola	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	11	04	2.01	04		
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD, Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik, Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/ lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi.	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	11	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	14	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	15	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	18	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	02
										Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	03
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengelolaan Administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	05
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.02	01
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.02	02
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	1	2.02	04
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	01
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	02
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	03
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	04
										Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	1	2.03	05
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	07

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	08	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya pelayanan Jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	1	2.03	09	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
							Monitoring Evaluasi dan pelaporan		1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	05	
							Monitoring Evaluasi dan pelaporan		1. Jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu 2. Jumlah dokumen pelaporan yang disampaikan tepat waktu	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.02	03	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Penyusunan RENSTRA Daerah	Dokumen RENSTRA yang tersusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.01	01	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	06	
										Pengadaan Mobil Jabatan	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	19	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	32	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	35	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	38	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	39	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.03	40	
						Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/ lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														
							Peningkatan sumber daya aparatur		Terlaksananya kegiatan dan pelatihan pegawai	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kegiatan dan pelatihan pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	09	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan dan pelatihan pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya kegiatan dan pelatihan pegawai	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	01	2.04	11	
KEGIATAN YANG BELUM DIUSULKAN KEDALAM RENJA 2021 NAMUN KEGIATAN YANG DIWAJIBKAN ADA MENYANGKUT SPM																							
										Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	01	
										Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	03	
										Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	04	
										Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	05	
										Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah yang terbangun kembali akibat bencana dan relokasi program pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	1	04	02	2.01	06	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																							
								BELANJA LANGSUNG															
								PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan											01	05	01	
												Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan		WAJIB PELAYANAN DASAR			01	05	01	2.01
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat									01	05	01	2.01
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat									01	05	01	2.01
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat									01	05	01	2.01
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat									01	05	01	2.01
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat									01	05	01	2.01
												Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan administrasi keuangan							01	05	01	2.02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN							01	05	01	2.02	01	
								BELANJA LANGSUNG															
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD							01	05	01	2.02	06	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan /semester							01	05	01	2.02	07	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun							01	05	01	2.02	09	
												Administrasi Umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum					01	05	01	2.03		
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pendukung kinerja	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan administrasi persuratan							01	05	01	2.03	01	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pendukung kinerja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, listrik, dan air							01	05	01	2.03	02	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pendukung kinerja	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa petugas kebersihan							01	05	01	2.03	08	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pendukung kinerja	Belanja Jasa Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pendukung kinerja							01	05	01	2.03	07	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK							01	05	01	2.03	10	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan							01	05	01	2.03	11	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik lainnya							01	05	01	2.03	12	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan / perlengkapan kantor yang dibeli							01	05	01	2.03	13	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli							01	05	01	2.03	14	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli							01	05	01	2.03	15	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang dibeli							01	05	01	2.03	17	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							01	05	01	2.03	18	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli							01	05	01	2.03	20	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli							01	05	01	2.03	22	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli							01	05	01	2.03	24	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeuler yang dibeli							01	05	01	2.03	25	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung mako/posko yang menjalani pemeliharaan							01	05	01	2.03	28	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang menjalani pemeliharaan							01	05	01	2.03	30	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang menjalani pemeliharaan							01	05	01	2.03	32	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang menjalani pemeliharaan							01	05	01	2.03	34	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras pendukung kinerja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubeler yang menjalani pemeliharaan							01	05	01	2.03	35	
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan dan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang Melaksanakan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan							01	05	01	2.03	04	
												Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase telaksananya peningkatan disiplin dan kapasitas SDA										
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang dibeli							01	05	01	2.04	01	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi pendukung kinerja	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pembelian pakaian dinas							01	05	01	2.04	02	
								Pelatihan Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah personel damkar yang mengikuti pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah tenaga pemadam kebakaran yang mengikuti pendidikan & Pelatihan Formal							01	05	01	2.04	09	
								KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
														PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum			01	05	02			
												Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah potensi gangguan / gangguan yang ditangani					01	05	02	2.01		
150	1						Pengamanan Objek Vital	Jumlah bulan terlaksananya pengamanan obvit dan acara pemerintah / masyarakat	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Bulan Pengamanan / pengawasan / penjagaan objek vital , tempat, dan agenda Penting Pemerintah dan masyarakat (Rumah Dinas Pejabat, Sekitaran Lokasi Kerja Pejabat, Gedung dan Aset Penting, Lokasi Kunjungan Pejabat /Tamu VIP, Upacara dan Acara dan lainnya)								01	05	02	2.01	01	
150	2						Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat	Jumlah hari penugasan piket pengamanan kantor dan rumah dinas															
180	2						Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah bulan pelaksanaan patroli	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah bulan pelaksanaan patroli								01	05	02	2.01	02	
150	3						Pembinaan Linmas	Jumlah pembinaan ke lapangan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan ke lapangan								01	05	02	2.01	04	
052	3						Pengembangan Kapasitas (Apel Siaga).	Jumlah bulan pelaksanaan latihan	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah personel/satuan yang dibina								01	05	02	2.01	05	
053	9						Operasional PTI	Jumlah bulan pelaksanaan Penindakan Internal	Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	Jumlah Pembinaan								01	05	02	2.01	06	
												Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Perda yang ditegakan					01	05	02	2.02		
180	3						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah bulan pelaksanaan observasi lapangan	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah bulan pelaksanaan observasi lapangan								01	05	02	2.02	01	
180	3						Penegakan Perda dan Penyidikan Perkara	Jumlah bulan penegakan Perda dan Penyidikan Perkara	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah bulan penegakan Perda dan Penyidikan Perkara								01	05	02	2.02	02	
170	2								Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati	Jumlah bulan penegakan Perda dan Penyidikan Perkara								01	05	02	2.02	03	
												Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota	Persentase kasus pelanggaran perda/perkada yang diselesaikan PPNS					01	05	02	2.03		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
170	1							Operasional Sekretariat Bersama PPNS Daerah	Jumlah bulan Operasional Umum Sekber PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah bulan Operasional Umum Sekber PPNS							01	05	02	2.03	01	
								PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase penanggulangan bahaya Kebakaran									01	05	04			
												Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kebakaran dan non kebakaran yang tertanggulangi	PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Persentase penanggulangan bahaya Kebakaran			01	05	04	2.01		
160	3							Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran							01	05	04	2.01	01	
160	3							Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran							01	05	04	2.01	02	
160	3							Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran							01	05	04	2.01	03	
160	3							Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran							01	05	04	2.01	04	
												Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah sarpras proteksi kebakaran yang diinspeksi					01	05	04	2.02		
160	7							Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran							01	05	04	2.02	01	
160	7							Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran							01	05	04	2.02	02	
												Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi yang dilakukan					01	05	04	2.03		
160	3							Operasional Barisan Pemadam Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran							01	05	04	2.03	01	
												Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase tingkat kepemilikan APAR terhadap masyarakat yang didukasi					01	05	04	2.04		
160	7							Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah lokasi penyuluhan pencegahan kebakaran							01	05	04	2.04	01	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						WAJIB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; Persentase aparat yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu; Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	1	2.02	01
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS Yang Melaksanakan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	1	2.03	04
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran													
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Penyediaan Bulan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	01
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bulan bahan penyiapan pelaksanaan verifikasi	Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.02	03
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.02	07
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	10
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	11
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	12
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	13
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan Minum Rapat dan Tamu	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	17
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	18

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.04	03	
										Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian KORPRI	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.04	04	
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.04	05	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Kebersihan Yang Disediakan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	08	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	15	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	03	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	09	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	25	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	35	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	38	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	39	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	40	
										Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	1	2.04	01	
								Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Yang Dilaksanakan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	06	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	30	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	39	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.03	40	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparaturnya yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tugasnya														
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Dikuti	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	1	2.04	10		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Diikuti	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	1	2.04	11	
								Pelatihan Rutin anggota TRC dan Penanggulangan bencana	Jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan-pelatihan rescue	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya pelatihan TRC Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen mitigasi bencana (rencana penanggulangan kedaruratan bencana);Jumlah nagari tangguh bencana;Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB);Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana;Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana;Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan dan Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	08	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
								Penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja, LKPJ dan LPPD	Jumlah dokumen Laporan Yang Dihasilkan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensta dan Renja yg disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.01	01	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.01	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran Yang Disusun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran Yang Disusun	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	05	01	2.02	07	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Disusun	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	05	01	2.02	09
							Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Jumlah dokumen mitigasi bencana (rencana penanggulangan kedaruratan bencana)															
							Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana	Jumlah perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Layanan KIE & Dokumen Rawan Bencana yang dilaksanakan / disediakan	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen mitigasi bencana (rencana penanggulangan kedaruratan bencana);Jumlah nagari tangguh bencana;Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB);Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana;Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana;Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1	05	03	2.01	01	
									Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah data/informasi tentang rencana penanggulangan n bencana dalam bentuk dokumen resmi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1	05	03	2.02	01	
									Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya regulasi penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Regulasi, Penguatan kelembagaan dan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1	05	03	2.04	01	
							Peningkatan Informasi Kebencanaan	Jumlah informasi kebencanaan	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananaya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1	05	03	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penyusunan Data Kebencanaan	Jumlah Data kebencanaan	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah rakor yang dilaksanakan dan data bencana yang disusun	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	05	
								Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah nagari tangguh bencana ; Jumlah Kelompok Sekolah Siaga Bencana (KSSB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB)														
								Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Layanan KIE & Dokumen Rawan Bencana yang dilaksanakan /disedia kan	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.01	02	
										Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Kelembagaan Bencana Yang Dibentuk /Dibina (Destana, Forum Resiko Bencana, Tim Siaga Bencana)	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Regulasi, Penguatan kelembagaan dan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.04	02	
										Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /kota	Jumlah Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /kota	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Regulasi, Penguatan kelembagaan dan Kerjasama Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.04	03	
								Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah gladi, simulasi, apel siaga dan jambore yang dilaksanakan /diikuti	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	06	
										Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah aparaturnya terlatih yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	02	
								Peningkatan Operasional Pusdalops Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Picket Personil Pudasops PB pencatatan dan pelaporan kejadian bencana serta penyimpanan logistik peralatan	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sapras penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana														
								Operasional Penanganan Darurat Bencana	Persentase penanganan darurat bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	01	
										Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	02	
										Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	03	
								Penyaluran Bantuan Logistik bagi korban bencana	Persentase penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.03	04	
								Program Peningkatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Alam	Persentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana														
								Operasional/ Penilaian Kondisi dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Operasional/ Penilaian Kondisi Penanganan Bencana Yang Dilakukan	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana, movev pasca bencana dan pelatihan JITU PASNA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	07	
								Penunjang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana, movev pasca bencana dan pelatihan JITU PASNA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	05	03	2.02	07	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Peningkatan Sapras Kebencanaan	Terlaksananya peralatan dalam menghadapi bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah tersedianya peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	SDA	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1	05	03	2.02	04
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
								Belanja tidak langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.02	01
										Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah ASN yang melaksanakan jasa jaminan kesehatan	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	04
								Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya dan Terealisasinya capaian kinerja	Penyusunan Renstra dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.01	01
								Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Presentase terpenuhinya pelayanan Administrasi perkantoran														
								Penunjang operasional adminitansi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semester	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.02	7
								Penunjang operasional adminitansi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.02	9
								Penunjang operasional adminitansi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Aministrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	10
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	12
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	01
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	08
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum		8	01	01	2.03	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penunjang operasional pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	11	
								Penunjang operasional adminitansi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	17	
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.04	02	
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	18	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan opsional perkantoran	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelaksanaan opsional perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	02	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan opsional perkantoran	Penyediaan jasa Adminstrasi Keuangan	Jumlah bulan Pelaksanaan jasa operasional perkantoran	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	07	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan peralatan kantor	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	30	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan peralatan kantor	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	32	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan peralatan kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta pengadaan peralatan kantor	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	34	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan Mebeluer	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	25	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Adminstrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.03	22	
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur yang telah mengikuti Diklat seusia kebutuhan jabatan/fungsi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan Peningkatan SDM	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	01	2.04	9	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Generasi Muda dan Tkoh Agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa														
								Peningkatan Rasa Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah Angkatan dan orang yang ikut Sosialisasi Peningkatan Cinta Tanah Air dan Bela negara	Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sjarah Kebangsaan	Jumlah Angkatan dan orang yang ikut Diklat Peningkatan Cinta Tanah Air dan Bela negara.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantapan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Jumlah Generasi Muda dan Tokoh Agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	02	2.01	03	
									Terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan upacara hari-hari besar dan kesadaran nasional	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan	Terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan upacara hari-hari besar dan kesadaran nasional	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantapan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Jumlah Generasi Muda dan Tokoh Agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	02	2.01	05	
								Penigkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kali dan peserta Sosialisasi/FGD Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragam dan penghayat	Jumlah kali dan peserta FGD Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase penurunan kasus kerukunan umat beragama dan penyalahgunaan narkoba	Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah generasi muda dan Tokoh Agama yang meningkat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	05	2.01	04	
								Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah yang ikut sosialisasi/FGD pembauran bangsa bagi generasi Muda	Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sjarah Kebangsaan	Jumlah orang yang ikut FGD pembauran bangsa bagi generasi muda	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantapan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah generasi muda dan Tokoh Agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan persatuan bangsa	Kesatuan bangsa dan politik	unsur pemerintahan umum	8	01	02	2.01	03	
								Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kasus konflik sosial;Jumlah SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang deteksi dini, manajemen konflik, dan tanggap darurat, dan penanganan bencana														
								Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah kali terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di	Jumlah kali terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik soial	Jumlah kasus konflik sosial;Jumlah SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang deteksi dini, manajemen konflik, dan tanggap darurat, dan penanganan bencana	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	06	2.01	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Pengendalian konflik Sosial dan Terorisme	Jumlah kali kegiatan terlaksananya operasional dan koordinasi Tim Terpadu Penanganan gangguan keamanan di Kab Sijunjung dan jumlah Forum komunikasi	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di	Jumlah kali kegiatan terlaksananya operasional dan koordinasi Tim Terpadu penanganan gangguan keamanan di kab. Sijunjung dan jumlah Forum komunikasi Pimpinan Daerah	perumusan kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	06	2.01	05		
									Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di	Jumlah kali teraksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	06	2.01	04		
							Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah generasi muda dan tokoh agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;Jumlah SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang deteksi dini, manajemen konflik, dan tanggap darurat, dan penanganan bencana;Jumlah siswa sekolah yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya penyalahgunaan															
							Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	Jumlah sekolah terlaksana penyuluhan narkoba terhadap siswa/siswi SLTP/SLTA dan jumlah sample urine secaa acak terhadap siswa/siswi SLTP dan SLTA, Jambore Anti Narkoba serta jumlah masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahan ekonomi, sosial dan budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragam dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah sekolah terlaksana penyuluhan narkoba terhadap siswa/siswi SLTP/SLTA dan jumlah sample urine secaa acak terhadap siswa/siswi SLTP dan SLTA, Jambore Anti Narkoba serta jumlah masyarakat dan penyuluhan kepada masyarakat	perumusan kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan kasus kerukunan umat beragama dan penyalahgunaan narkoba	Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya	Jumlah generasi muda dan tokoh agama yang meningkat wawasannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;Jumlah SDM Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang deteksi dini, manajemen konflik, dan tanggap darurat, dan penanganan bencana;Jumlah siswa sekolah yang meningkat pengetahuannya tentang bahaya penyalahgunaan	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	05	2.01	04		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah kali dan orang peserta penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik dan Ormas	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kali dan orang peserta penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik dan Ormas	Perumusan Kebjakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Darah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kali dan orang peserta penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan tentang Partai Politik dan Ormas	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	03	2.01	02	
								Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah kali terlaksananya koordinasi dan forum diskusi politik antara Pemda dan Partai Poltik	Pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kali terlaksananya koordinasi dan forum diskusi politik antara Pemda dan Partai Politik	Perumusan Kebjakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Darah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah partai politik dan ormas yang difasilitasi pendidikan politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Polaitik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	03	2.01	04	
								Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Parpol dan Ormas terdatanya keberadaan dan pemutakhiran data Parpol dan Ormas di kabupaten Sijunjung dan terlaksananya pembuatan buku data base Parpol dan Ormas	Pelaksanaan Mnitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendafran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1. Jumlah Parpol dan Ormas terdatanya keberadaan dan pemutakhiran data Parpol dan Ormas di kabupaten Sijunjung dan terlaksananya pembuatan buku data base dan Ormas. 2. Jumlah Parpol yang di verifikasi dan verifikasi kelengkapan pangajuan permohonan bantuan keuangan Parpol dan Verifikasi kelengkapan pertanggung jawaban bantuan keuangan terhadap Parpol	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang difasilitasi	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	04	2.01	04	
								Fasilitasi Organisasi Veteran dan Pejuang	1. Jumlah Veteran yang mendapatkan fasilitasi peningkatn pengetahuan politik. 2. terfasilitasinya kegiatan Veteran dan pejuang oleh Pemeritah Daerah	Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan	1. Jumlah Veteran yang mendapatkan fasilitasi peningkatn pengetahuan politik. 2. terfasilitasinya kegiatan Veteran dan pejuang oleh Pemerintah Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang difasilitasi	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	SDA	Kesatuan bangsa dan politik	Pemerintahan Umum	8	01	04	2.01	05	
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						WAJIB	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Belanja Tidak langsung		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik;Persentase aparaturnya yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi;Tingkat keselarasan Renstra terhadap RRPJMD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	.06	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah bulan tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Administrasi Umum	Pesentase pemenuhan terhadap Pelayanan Adninstrasi Umum	Penunjungan Urusan Pemerintah	SDA				1	.06	01	2.03	04
2	3					Penunjang		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
							Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	Pesentase pemenuhan terhadap Pelayanan Adninstrasi Umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA					1	.06	01	2.03	03
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	10
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	11
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	12
										Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	17
										Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	18
							Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Jasa Perkantoran	Administrasi Umum	SDA		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	02
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Jasa Perkantoran	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1	.06	01	2.03	15
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Anaratur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi baik															

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Paningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	08	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	14	
										Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.03	35	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tuntutan														
								Paningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki diklat	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	02	
										Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	03	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	05	
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	09	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SDA				1.06	01	2.04	11	
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan														
								Penyusunan Lakip LKPJ LPPD dan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang disusun	Penyusunan renstra dan renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA				1.06	01	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Prograan dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen ~~Perencanaan~~	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	SDA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.01	02		
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja ~~perangkat daerah~~	SDA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.01	03		
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja ~~perangkat daerah~~	SDA	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.01	05		
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi ~~Keuangan~~	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.02	06		
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi ~~Keuangan~~	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.02	07		
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap Pelayanan Administrasi ~~Keuangan~~	Program penunjang urusan pemerintah daerah	SDA			1.06	01	2.02	09		
										Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang Disabilitas, lanjut Usia Terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan ~~dasar~~												
									Fasilitasi Pemberian Bantuan bagi PMKS PSKS	1.Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya, 2. Terlaksananya Proses Pengangkatan Anak, 3. Terlaksananya Penggantian Transport petugas PKSA, 4. Terlaksananya Kegiatan Satu Hari Bersama Anak, 5. Terlaksananya kegiatan Pemberian Bantuan bagi Anak	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya,	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang diasabilitas, lanjut usia terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan dasar	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1.06	04	2.01	10	
										Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya,	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1.06	04	2.01	12		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pemberian Layanan Rujukan	1. Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya,	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	13
										Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spritual, dan Sosial	4. Terlaksananya Kegiatan Satu Hari Bersama Anak, 5. Terlaksananya kegiatan Pemberian Bantuan bagi Anak di Luar Panti	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar lainnya yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	07
										Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya,	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	01
										Penyediaan Sandang	Terlaksananya Pengiriman anak terlantar mengikuti pelatihan, penguburan mayat terlantar, pengiriman orang sakit jiwa terlantar serta penggantian transport orang terlantar dan PMKS lainnya,	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	02
										Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan yang dilakukan	Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah LKSA yang di Pantau	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	03
								Peningkatan Kemampuan Penyandang Disabilitas	1. Terlaksananya pemberian alat bantu bagi penyandang Disabilitas	Penyediaan Alat Bantu	1. Terlaksananya pemberian alat bantu bagi penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlantar lainnya yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang diasabilitas, lanjut usia terlantar dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan dasar	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	05
								2. Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyaluran dana ASPDB			2. Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi terhadap penyaluran dana ASPDB											
								3. Terlaksananya Verifikasi Penerimaan bantuan ASPDB			3. Terlaksananya Verifikasi Penerimaan bantuan ASPDB											

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									4. Terlaksananya pemberian bantuan Tambahan makanan bergizi dan perlengkapan peralatan kebersihan bagi penyandang disabilitas berat	Penyediaan Permakanan	4. Terlaksananya pemberian bantuan Tambahan makanan bergizi dan perlengkapan peralatan kebersihan bagi penyandang disabilitas berat	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	Jumlah PMKS terlanter lainnya yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang diasabilitas, lanjut usia terlanter dan PMKS yang diberi bantuan kebutuhan dasar	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	03	
										Pemberian Layanan Rujukan		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	13	
									5. Terlaksananya pemberian bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik Mental , Spritual, dan Sosial	5. Terlaksananya pemberian bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	07	
									6.Terlaksananya kegiatan Family support bagi Penyandang Disabilitas	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter , serta Gelandnagan Pengemis dan Masyarakat	6.Terlaksananya kegiatan Family support bagi Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	08	
									Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyaluran ASLUT	1.Terlaksananya pengawasan dan Penyaluran ASLUT	1.Terlaksananya pengawasan dan Penyaluran ASLUT	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	SDA	Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	13	
									2.Terlaksananya rapat Evaluasi Pendamping ASLUT		2.Terlaksananya rapat Evaluasi Pendamping ASLUT												
								Pemberian Bantuan bagi Lansia Terlanter dan Produktif	Terlaksananya Penyediaan tambahan makanan bergizi bagi lansia terlanter	Penyedion Pemakanan	Terlaksananya Penyedian tambahan makanan bergizi bagi lansia terlanter	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlanter ,Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Program Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.01	01	
								Pelatihan bagi Tindak Kekerasan	1. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi KTK beserta Toolkkit	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	1. Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi KTK beserta Toolkkit	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Jumlah PMKS Lainnya yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial dasar	Program Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	07	
								Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan bagi Korban Napza	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Napza	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di luar panti Sosial	SDA	Program Rehabilitasi Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	04	2.02	13	
								Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penguatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1. Terlaksananya pelatihan bagi anggota TAGANA	Koordinasi , sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	1. terlaksananya pelatihan bagi anggota tagana	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiap siagaan bencana	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Penanganan bencana	Jumlah anggota Tagana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana ; Persentase korban bencana yang diberi bantuan	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	02	
									2. Terlaksananya bhakti sosial														
									3. Tersedianya kebutuhan pelatihan bencana														
								Pemberian bantuan bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	1. terlaksananya Penyaluran bantuan Barang Penyediaan Pada Masyarakat yang Terkenan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penyediaan Makanan	1. terlaksananya Penyaluran bantuan Barang Penyediaan Pada Masyarakat yang Terkenan Bencana Alam dan Bencana Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	Jumlah Masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial	Penanganan bencana	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	01	
									2.Terlaksananya Kesiap siagaan Penanggulangan Kemiskinan														
										Penyediaan Sandang		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	SDA	Penanganan bencana	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	02	
										Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	SDA	Penanganan bencana	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	03	
										Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	SDA	Penanganan bencana	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	04	
										Pelayanan Dukungan Psikososial		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota	SDA	Penanganan bencana	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	05	
								Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Sosial	1.Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan PKH	Pengelolaan Data Fakir Miskin	1.Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyaluran bantuan PKH	Pengelolaan Data Fakir Miskin	Jumlah KPM PKH yang mendapat bantuan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	02	
									2.Terlaksananya Rapat pertemuan Pendamping dan operator PKH		2.Terlaksananya Rapat pertemuan Pendamping dan operator PKH												
									3.Terlaksananya monitoring dan Evaluasi JKSS		3.Terlaksananya monitoring dan Evaluasi JKSS												
								Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	1.Terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB)	Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1.Terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB)	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Penanganan Bencana	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	06	2.02	01	
									2.Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan KSB		2.Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan KSB												
									3.Terlaksananya Rapat TIM pembentukan KS B		3.Terlaksananya Rapat TIM pembentukan KS B												

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penguatan Tenaga Pelopor Perdamaian	1.Terlaksananya sosialisasi dan terbentuknya Tenaga Pelopor Perdamaian	Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Pembinaan dan Lomba TKSK berprestasi Rapat PSKS Rapat TKSK / PSKS berprestasi	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar;Persentase PMKS yang diberdayakan	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	02	
									2.Terlaksananya Pembekalan Tenaga Pelopor Perdamaian														
								Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender														
								Sosialisasi dan Fasilitasi Permasalahan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Sosialisasi dan fasilitasi Permasalahan danPerlindungan hukum serta meningkatnya wawasan peserta tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Terlaksananya Sosialisasi dan fasilitasi Permasalahan danPerlindungan hukum serta meningkatnya wawasan peserta tentang perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah puskesmas dan sekolah ramah anak	Program Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	06	2.01	02	
								Fasilitasi Pelaksanaan Penanganan Kasus Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Terlaksananya kegiatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab.sijunjung	Advokasi Kebijakan dan Pndampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Terlaksananya kegiatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab.sijunjung	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	07	2.01	01	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pencehan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab.sijunjung	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	Program Perlindungan Khusus Anak	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	07	2.01	02	
										Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga (KDRT) di Kab.sijunjung	Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Kab/Kota	Program Perlindungan Khusus Anak	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	07	2.02	01	
								Fasilitasi Kegiatan Organisasi Perempuan	Terlaksananya pelatihan perempuan kreatif	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya pelatihan perempuan kreatif	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Perempuan Yang di bina	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG);Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	02	2.02	02	
								Kota layak Anak	Terlaksananya Bimbingan teknis untuk Guru dan Tenaga Kesehatan Guna Menunjang Predikat Kota Layak Anak	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terlaksananya Bimbingan teknis untuk Guru dan Tenaga Kesehatan Guna Menunjang Predikat Kota Layak Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Guru dan tenaga Kesehatan yang dilakukan Bimtek	Program Pemenuhan Hak Anak PHA)	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan;Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	06	2.02	03	
								Fasilitasi Kegiatan Forum Anak	Terlaksananya penyaluran bakat dan kemampuan anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terlaksananya penyaluran bakat dan kemampuan anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	SDA	Program Pemenuhan Hak Anak	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	06	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Pemenuhan Hak anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran bakat dan kemampuan anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	SDA	Program Pemenuhan Hak Anak	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	06	2.02	03	
								Fasilitasi Model Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Terlaksananya Fasilitasi model Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Media Usaha	Terlaksananya Fasilitasi model Sekolah dan Puskesmas Ramah Anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dan dunia Usaha	Jumlah puskesmas dan sekolah ramah anak	Program Pemenuhan Hak Anak	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	06	2.01	01	
								Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender														
								Pembinaan Organisasi Perempuan	1. Rapat Peringatan Hari Ibu (PHI), 2. Peringatan Hari ibu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 3. Rapat Persiapan Hari DWP, 4. Pembinaan Organisasi Perempuan Industri Perumahan yang dikelola Perempuan dan Perempuan Kepala Keluarga, 5. Kesetaraan Gender dan perlindungan hak Perempuan, 6. Kualitas Hidup Perempuan yang Berfokusif pengarusutamaan	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Kabupaten /Kota	1. Rapat Peringatan Hari Ibu (PHI), 2. Peringatan Hari ibu tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, 3. Rapat Persiapan Hari DWP, 4. Pembinaan Organisasi Perempuan Industri Perumahan yang dikelola Perempuan dan Perempuan Kepala Keluarga, 5. Kesetaraan Gender dan perlindungan hak Perempuan, 6. Kualitas Hidup Perempuan yang Berfokusif pengarusutamaan Gender (PUG)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pembaerdayaan Perempuan kewenangan kabupaten/kota	Persentase terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG);Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	02	2.03	02	
								Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	1. Persiapan Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kpd Anggota Pokja dan Anggota Focal Point, 3. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kpd Pemerintah Kecamatan dan Nagari, 4. Sosialisasi Peningkatan SDM Organisasi Perempuan terhadap PUG, 5. Pembinaan Evaluasi dan Monitoring	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	1. Persiapan Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kpd Anggota Pokja dan Anggota Focal Point, 3. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kpd Pemerintah Kecamatan dan Nagari, 4. Sosialisasi Peningkatan SDM Organisasi Perempuan terhadap PUG, 5. Pembinaan Evaluasi dan Monitoring dalam rangka PUG	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	SDA		Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2	08	02	2.01	02	
								Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya '2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya '3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Memfasilitasi TKSK Monitoring dan Pembinaan Posdaya	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar;Persentase PMKS yang diberdayakan	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	04	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Pembinaan dan Lomba TKSK berprestasi Rapat PSKS Rapat TKSK / PSKS berprestasi	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	02	
										Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	konsultasi dan koordinasi LK3 ke LKSA Pembinaan Keluarga Rentan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	05	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Pembinan Karang Taruna dan PSM Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan PSM Terlaksananya Lomba Karang Taruna dan PSM	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	01	
										Peningktan Kemempuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi KUBE	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	03	
								Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	1.Terlaksananya bimbingan dan pembinaan bagi penerima KUBE	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahtewraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Memfasilitasi TKSK Monitoring dan Pembinaan Posdaya	Pengembangan Potensis Sumber Kesejhateraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	04	
									2.Terlaksananya sosialisasi bagi binjut penerima bantuan usaha ekonomi Produktif KUBE FM														
									3.Terlaksananya Lomba KUBE berprestasi														
									4.Terlaksananya monitoring dan evaluasi KUBE FM														
									5.Terlaksananya sosialisasi KUBE Penumbuhan														
									6.Terlaksananya Penumbuhan KUBE FM pedesaan														
								Fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Kesejahteraan Sosial	1.Terlaksananya verifikasi dan Validasi data terpadu fakir miskin	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	1.Terlaksananya verifikasi dan Validasi data terpadu fakir miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah KPM PKH yang mendapat bantuan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	01	
									2.Tersedianya data PMKS/PSKS														
									3.TerlaksananyaPeningkatan Kapasitas Sekretariat SLRT														
									4.Terlaksananya Sosialisasi SLRT														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	1.Terlaksananya verifikasi dan Validasi data terpadu fakir miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah KPM PKH yang mendapat bantuan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	02	
								Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	1.Terlaksananya Distribusi Beras Bansos Rastra	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	1.Terlaksananya Distribusi Beras Bansos Rastra	Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah KPM PKH yang mendapat bantuan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	05	2.02	02	
									2.Terlaksananya rapat tim koordinasi bansos rastra		2.Terlaksananya rapat tim koordinasi bansos rastra												
									3.Terlaksananya sosialisasi dan pemantapan evaluasi bansos rastra		3.Terlaksananya sosialisasi dan pemantapan evaluasi bansos rastra												
									4.Terlaksananya monitoring dan evaluasi bansos rastra		4.Terlaksananya monitoring dan evaluasi bansos rastra												
									5.Terlaksananya penanganan FM (terpenuhi kebutuhan dasar FM)		5.Terlaksananya penanganan FM (terpenuhi kebutuhan dasar FM)												
								Penanganan fakir Miskin		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga													
									1.Terlaksananya Pembinaan dan Lomba PSKS berprestasi '2.Terlaksananya rapat PSKS '3. 'Terlaksananya Pembinaan Karang taruna '4.Terlaksananya bimbingan teknis	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya '2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya '3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar;Persentase PMKS yang diberdayakan	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	04	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya '2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya '3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	02	
										Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya '2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya '3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	05	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya '2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya '3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1.Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Posdaya 2.Terlaksananya Pemebntukan Posdaya 3.Terlaksananya Rapat Pengurus LKKS	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Terfasilitasi dan Terbinannya Kelembagaan dan Organisasi Sosial lainnya	Program Pemberdayaan Sosial	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	02	2.03	03	
								Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan /Budaya Kepahlawanan dan hari-hari besar Kesejahteraan Sosial	1.Terlaksananya apel kehormatan dan renungan suci	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman makan Pahlawan nasional kab/Kota		Pemeliharaan Taman makan Pahlawan nasional kab/Kota	Jumlah bulan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Puspa Bangsa	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan'	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar;Persentase PMKS yang diberdayakan	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	07	2.01	01	
									2.Terlaksananya upacara bendera peringatan hari pahlawan	Pemeliharaan Taman makan Pahlawan nasional kab/Kota		Pemeliharaan Taman makan Pahlawan nasional kab/Kota		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan'	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	07	2.01	02	
										Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota		Pemeliharaan Taman makan Pahlawan nasional kab/Kota		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan'	SDA	Sosial	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1	06	07	2.01	03	
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI																							
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Tenaga Kerja	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang telah dilatih													
									Kegiatan pemagangan bagi peserta pelatihan dan pencari kerja	jumlah pencari kerja yang dimagangkan	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	jumlah pencari kerja yang dimagangkan	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang telah dilatih	Bidang Tenaga Kerja	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	03	2.01	01
									Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	jumlah pencari kerja yang dilatih	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi					2	07	03	2.01	01
									Kegiatan Rehabilitasi sarana dan prasarana BLK	Rehap sarana dan prasarana BLK	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehap sarana dan prasarana BLK	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	07	01	2.03	38
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Tenaga Kerja	Program peningkatan kesempatan kerja	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar													
									Kegiatan penyebarluasan informasi dan bursa tenaga kerja	1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	jumlah pencari kerja yang terdaftar	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah penyebaran informasi pasar kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase penempatan pencari kerja terdaftar	Bidang Tenaga Kerja	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	04	2.03	02
										2. jumlah JOB FAIR yang dilaksanakan	Job fair/bursa kerja	jumlah JOB FAIR yang dilaksanakan	Pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah penyebaran informasi pasar kerja					2	07	04	2.03	03
										3. jumlah laporan informasi pasar kerja (IPK)	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	jumlah laporan informasi pasar kerja (IPK)	pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah penyebaran informasi pasar kerja					2	07	04	2.03	02
										4. jumlah data pencari kerja	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	jumlah data pencari kerja	pengelolaan informasi pasar kerja	Jumlah penyebaran informasi pasar kerja					2	07	04	2.03	02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									5. jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Pelayanan antar kerja	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	02	
									6. jumlah peserta pelatihan Pra seleksi magang ke jenane	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	jumlah peserta pelatihan Pra seleksi magang ke Jepang	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	01	
									7. penilaian tingkat kepuasan masyarakat	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Penilaian tingkat kepuasan masyarakat	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	01	
									8. jumlah SMK yang mendapatkan penyuhan	Penyuluhan dan bimbingan jabatan pagi pencari kerja	jumlah SMK yang mendapatkan penyuhan	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	03	
								Kegiatan pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	1. jumlah wirausaha yang dilatih	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	jumlah wirausaha yang dilatih	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	01	
									2. Pelatihan setelah tamat sekolah	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Pelatihan setelah tamat sekolah	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	01	
								Kegiatan padat karya	jumlah penempatan pencari kerja yang terserap sementara melalui kegiatan padat karya	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	jumlah penempatan pencari kerja yang terserap sementara melalui kegiatan padat karya	pelayanan antar kerja di daerah kabupaten /kota	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi					2	07	04	2.01	02	
								Kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui teknologi tepat guna	1. jumlah pencari kerja yang dilatih dengan membentuk kelompok	proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	jumlah pencari kerja yang dilatih dengan membentuk kelompok	pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja				2	07	03	2.01	01	
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Tenaga Kerja	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial													
								Kegiatan pembentukan dan pembinaan LKS bipartite, DPC SPSI dan Dewan pengupahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial	1. terlaksananya rapat dengan perusahaan dan instansi terkait	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten / kota	terlaksananya rapat dengan perusahaan dan instansi terkait	pengecahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	cakupan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Bidang Tenaga Kerja	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	05	2.02	04	
									2. jumlah LKS Bipartite yang dibentuk	pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten / kota	jumlah LKS Bipartite yang dicatatkan	pengecahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial					2	07	05	2.02	04	
									3. jumlah bipartite yang dibina	pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten / kota	jumlah bipartite yang dibina	pengecahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial					2	07	05	2.02	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
									4. jumlah SP yang dibina	pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten / kota	jumlah SP yang dibina	pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	04	
									5. jumlah dewan pengupahan yang dibina	pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartite daerah kabupaten / kota	jumlah dewan pengupahan yang diina	pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial							2	07	05	2.02	04
									6. jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan	penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan satu daerah kabupaten / kota	fasilitasi upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan	pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial							2	07	05	2.02	02
								Kegiatan Survey kebutuhan hidup layak (IKHL) dan monitoring pelaksanaan UMP/UMK serta monitoring THR ke perusahaan	1. terlaksananya survey IKHL dan monitoring pelaksanaan UMP/UMK	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	terlaksananya survey IKHL dan monitoring pelaksanaan UMP/UMK	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03
									2. jumlah pasar yang disurvei	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	jumlah pasar yang disurvei	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03
									3. jumlah dokumen KHL sebagai dasar usulan perhitungan UMK/UMP	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	jumlah dokumen KHL sebagai dasar usulan perhitungan UMK/UMP	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03
									4. jumlah perusahaan yang dimonitor pembayaran UMP/UMK dan THR	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	jumlah perusahaan yang dimonitor pembayaran UMP/UMK dan THR	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Kegiatan Pembinaan dan monitoring kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan di perusahaan	1. terlaksananya pembinaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan di perusahaan	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	terlaksananya pembinaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan di perusahaan	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03
								2. jumlah perusahaan yang di monitor kepesertaan BPJS	penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	jumlah perusahaan yang di monitor kepesertaan BPJS	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	03
							Kegiatan pembentukan dan pembinaan peraturan perusahaan , perjanjian kerja bersama serikat buruh/serikat pekerja	1. terlaksananya pembinaan teknis penyusunan PP,PKB dan SB / SP	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	bimbingan teknis pembentukan PP,PKB dan SB / SP	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	01
								2. Jumlah perusahaan yang dibina	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang dibina	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	01
								3. jumlah PP yang disahkan	pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	jumlah PP yang disahkan	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	01
								4. jumlah PKB yang didaftarkan	pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	jumlah PKB yang didaftarkan	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	02
								5. jumlah SP/SB yang dicatatkan	pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	jumlah SP/SB yang dicatatkan	pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah	Jumlah peraturan yang disahkan dan perjanjian kerjasama yang didaftarkan							2	07	05	2.01	02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Kegiatan pembinaan dan monitoring perjanjian kerja / perjanjian kerja waktu tertentu	1. terlaksananya pembinaan dan monitoring perjanjian kerja / PKWT	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	terlaksananya pembinaan dan monitoring perjanjian kerja / PKWT	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
								2. Jumlah perusahaan yang dibina	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dibina	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
								3. Jumlah perusahaan yang dimonitoring	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
							Kegiatan peringatan hari buruh internasional	1. terlaksananya kegiatan peringatan hari buruh	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	terlaksananya kegiatan peringatan hari buruh	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
								2. jumlah sasaran dialog interaktif dengan perusahaan	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	jumlah sasaran dialog interaktif dengan perusahaan	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
							Kegiatan pembinaan dan penerapan sistem manajemen K3	1. Terlaksananya pembinaan teknis penerapan sistem manajemen k3	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan teknis penerapan sistem manajemen k3	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
								2. jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3	pencegahan perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat / berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten/kota	jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen K3	pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI , mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten / kota	Persentase penurunan perselisihan hubungan industrial						2	07	05	2.02	01	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Transmigrasi	Program pengembangan wilayah transmigrasi	jumlah KK yang ditempatkan dan jumlah KK yang dibina														
							Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	1. jumlah frekuensi pembinaan ke lokasi (bulan)	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	jumlah frekuensi pembinaan ke lokasi (bulan)	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dikembangkan	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	jumlah KK yang ditempatkan dan jumlah KK yang dibina	Bidang Transmigrasi	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	32	04	2.01	02		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									2. jumlah KK yang di bina	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	jumlah KK yang di bina	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian							3	32	04	2.01	01
									3. jumlah lembaga sosial / kelompok tani yang dibina	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman	jumlah lembaga sosial / kelompok tani yang dibina	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian							3	32	04	2.01	02
									4. jumlah KK yang dilatih	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	jumlah KK yang dilatih	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian							3	32	04	2.01	01
									5. Pelaksana operator UPT	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Pelaksana operator UPT	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian											
									6. Pelaksana pembuatan kebun contoh (demplot)	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Pelaksana pembuatan kebun contoh (demplot)	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian											
									7. Terlaksananya koordinasi dengan kementerian desa, pdt, dan transmigrasi	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Terlaksananya koordinasi dengan kementerian desa, pdt, dan transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian											
								Kegiatan peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelakudan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	1. jumlah draf naskah / MOU yang terbentuk	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	jumlah draf naskah / MOU yang terbentuk	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah satuan pemukiman yang di bangun	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	jumlah KK yang ditempatkan dan jumlah KK yang dibina	Bidang Transmigrasi	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	32	03	2.01	01	
									2. terlaksananya koordinasi dengan daerah asal, dan dengan Kemendes, PDT dan transmigrasi	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	terlaksananya koordinasi dengan daerah asal, dan dengan Kemendes, PDT dan transmigrasi	Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah satuan pemukiman yang di bangun						3	32	03	2.01	01
								Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		Bidang Transmigrasi	Program pembangunan kawasan transmigrasi	persentase sarana dan prasarana warga transmigran											
								Kegiatan persiapan rencana pembangunan transmigrasi	1. jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Jumlah satuan pemukiman yang di bangun	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase sarana dan prasarana warga transmigran	Bidang Transmigrasi	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	32	03	2.01	02	
									2. jumlah frekuensi ke lokasi transmigrasi (kali)	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	jumlah frekuensi ke lokasi transmigrasi (kali)	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota							3	32	03	2.01	02
									2. Terlaksananya pembinaan transmigran daerah asal	koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pembinaan transmigran daerah asal	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota							3	32	03	2.01	01
									4. panjang jembatan / gorong-gorong / plat duecker / Box Culvert yang terbangun (m)	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	panjang jembatan / gorong-gorong / plat duecker / Box Culvert yang terbangun (m)	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota							3	32	03	2.01	02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
									5. panjang jalan akses yang terbangun (Km)	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	panjang jalan akses yang terbangun (Km)	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota								3	32	03	2.01	02
									6. Inventarisir kepemilikan lahan usaha 2	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Inventarisir kepemilikan lahan usaha 2	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota												
									7. Pembangunan teras shering	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial , ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Pembangunan teras shering	penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota												
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran														
								Kegiatan Penunjang Operasional Adminstrasi Perkantoran	1. Jumlah surat-menyurat DINAS	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-menyurat DINAS	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	01	2.03	01		
									2. Jumlah sarana kebersihan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah sarana kebersihan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	08		
									3. Jumlah pelaksanaan BBM	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pelaksanaan BBM	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	30		
									4. Jumlah cetakan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	11		
									5. Jumlah pelaksanaan fotocopy	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pelaksanaan fotocopy	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	11		
									6. Jumlah bulan rapat yang dilaksanakan	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan rapat yang dilaksanakan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	18		
									7. Jumlah ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	10		
									8. Jumlah pakaian DINAS	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian DINAS	peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	07	01	2.04	02		
									9. Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	18		
									10. Belanja dekorasi HARI JADI, Pawai dan Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Belanja dekorasi HARI JADI, Pawai dan Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	16		
										Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makan dan minum	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	17		
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	13		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	14
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	09
										penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	12
								Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	1. Jumlah bulan pembayaran SIPKD	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran SIPKD	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	02
									2. Jumlah bulan berlangganan surat kabar	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan berlangganan surat kabar	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	15
									3. Jumlah pegawai honor daerah dan tenaga harian lepas yang diBayarkan honoranya	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum									
								kegiatan operasional penyelenggaraan UPTD BLK	1. Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	01	2.03	02
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	10
										penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	11
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	08
										penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	12
										Pemeliharaan rutin berkala gedung/ kantor	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	32
										Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Terpenuhiya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	30
								Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik											
								Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1. Jumlah kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 yang diservis	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 yang diservis	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	07	01	2.03	30
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 2, roda 3 dan roda 4 yang diservis	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	07	01	2.03	20

[illegible]

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Laporan keuangan	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan						2	07	01	2.02	05
										penyusunan laporan keuangan bulanan / semesteran	Laporan keuangan	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan						2	07	01	2.02	07
										Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan	Administrasi keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan						2	07	01	2.02	09
									3. Laporan LPPD/LKPJ	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Laporan LPPD/LKPJ	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi						2	07	01	2.01	03
									4. Rencana kerja OPD	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan pada OPD (Renstra)	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi						2	07	01	2.01	02
									5.Buku profil Dinas Nakertrans	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Buku profil Dinas Nakertrans	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi						2	07	01	2.01	04
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi						2	07	01	2.01	05
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dan Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD														
								Kegiatan Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen perencanaan	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD, dan Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Bidang Urusan Peemrintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	07	01	2.01	01
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji ASN dan tunjangan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	07	01	2,02	01
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum						2	07	01	2,03	04
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN																							
1	07	1	5			Wajib	Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	07	1	5	01		Wajib	Pangan	Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Coefisien of Variation (CV)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation (CV) harga pangan pokok ditingkat konsumen	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	04	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Coefisien of Variation (CV)	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Coefisien of Variation (CV) harga pangan pokok ditingkat konsumen	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	01	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Coefisien of Variation (CV)	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanDistribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Coefisien of Variation (CV) harga pangan pokok ditingkat konsumen	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	03	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	05	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	06	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Penyediaan Infrastruktur dan SeluruhPendukung Kemandirian Pangan SesuaiKewenangan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung LDPM/ PUPM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN MASYARAKAT	Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Pangan	Wajib	2	09	02	####	03	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	jumlah pelaksanaan pasar murah komoditi pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	jumlah pelaksanaan pasar murah komoditi pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan KebutuhanDaerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Porsentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	####	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	jumlah pelaksanaan pasar murah komoditi pangan	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	jumlah pelaksanaan pasar murah komoditi pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Coefisien of Variation kurang dari 25%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	###	06	
	1	07	1	5	06		Wajib	Pangan	Pengembangan Ketersediaan Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Porsentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.02	03	
								Pengembangan Ketersediaan Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	02	2.01	03	
								Pengembangan Ketersediaan Pangan	Jumlah kategori lomba ketahanan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah kategori lomba ketahanan pangan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.02	03	
	1	07	1	5	03		Wajib	Pangan	Peningkatan Diversifikasi Komsumsi Pangan						Persentase Skor Pola Pangan Harapan			2	09	03	2.04		
								Peningkatan Diversifikasi Komsumsi Pangan	Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02	
								Peningkatan Diversifikasi Komsumsi Pangan	Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan pelatihan pengolahan pangan lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02	
								Peningkatan Diversifikasi Komsumsi Pangan	Pelaksanaan pembinaan pangan lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan pembinaan pangan lokal	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02	
								Peningkatan Diversifikasi Komsumsi Pangan	Pelaksanaan event promosi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Pelaksanaan event promosi	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	03	
	1	07	1	5	04		Wajib	Pangan	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan pemanfaatan lahan pekarangan melalui KRPL	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02		
							Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	Penyusunan dan Penetapan Target KonsumsiPangan per Kapita per Tahun	Pelaksanaan event/promosi /kampanye makan buah dan sayur	Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	01		
							Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Pembinaan pemanfaatan pekarangan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pembinaan pemanfaatan pekarangan	Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi	Angka konsumsi pangan (per kapita per tahun)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	03	2.04	02		
1	07	1	5	08		Wajib	Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Prosentase masyarakat yang tertangani rawan pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kerentanan pangan (FSVA)	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan jumlah masyarakat rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	04	2.02	02	
							Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Data rawan pangan (Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data rawan pangan (Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi)	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan jumlah masyarakat rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	04	2.02	01		
							Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah data kerentanan pangan (FSVA)	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah kebijakan penanganan rawan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	04	2.01	01		
							Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah kebijakan penanganan rawan pangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penanganan rawan pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan jumlah masyarakat rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	04	2.02	01		
1	07	1	5	05		Wajib	Pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan /sosialis asi pangan segar yang aman di konsumsi	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan /sosialisasi pangan segar yang aman di konsumsi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase penurunan kasus penggunaan zat aditif pada pangan segar asal tumbuhan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	05	2.01	04	
							Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Pembinaan /sosialis asi pangan segar yang aman di konsumsi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan /sosialisasi pangan segar yang aman di konsumsi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase penurunan kasus penggunaan zat aditif pada pangan segar asal tumbuhan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	Pangan	Wajib	2	09	05	2.01	05		
2	13	1				Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi perikanan budidaya						Pangan	Wajib							
2	13	1	07	01		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan bibit ikan unggul	Pengadaan Peralatan penetasan UPR	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Peralatan penetasan UPR	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	02	
							Pengembangan bibit ikan unggul	Pembangunan kolam induk ikan di BBI Aie Amo	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan kolam induk ikan di BBI Aie Amo	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	02		
							Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah Pengadaan pakan untuk UPR	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan pakan untuk UPR	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03		
							Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pengadaan Calon induk ikan UPR	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan UPR	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan UPR	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	02	
								Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembinaan UPR	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	02	
								Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah pembinaan UPR	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	
								Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembinaan UPR	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	01	
								Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah pembinaan UPR	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah pembinaan UPR	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03	
2	13	1	07	02		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	01	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	05	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	06	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	02	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perikanan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	04	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Lele	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	01	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	04	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Patin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	01	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	04	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Nila	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	01	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pemberian Fasilitasi kepada Pokdakan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.02	03	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis /sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Paket Percontohan Budidaya Mina Padi	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis/sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	01	
2	13	1	07	03		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	04	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Penyediaan vitamin dan obat ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	05	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Frekuensi pengawasan peredaran obat dan pakan ikan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Frekuensi pengawasan peredaran obat dan pakan ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	05	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	04	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan penanganan hama dan penyakit ikan (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	05	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Pelaksanaan uji kualitas air (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan uji kualitas air (UPR, Pokdakan dan BBI)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.04	04	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Pembinaan Lubuk Larangan	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan Lubuk Larangan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	05	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Panjang sungai yang terjaga kelestariannya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	02	2.01	01	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok /peserta Bimbingan teknis/sekolah lapangan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.02	02	
								Pengendalian dan penanggulangan penyakit ikan	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penumbuhan POKMASWAS perairan umum	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di wilayah Sungai, danau, waduk, rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang terjaga kelestariannya	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	04	2.01	02	
2	13	01	07	04		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Operasional BBI Sumpur Kudus	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Operasional BBI Sumpur Kudus	Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	02	
								Operasional BBI Sumpur Kudus	Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03	
2	13	01	07	05		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Operasional BBI Latang	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Produksi benih ikan unggul (PAD)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	01	
								Operasional BBI Latang	Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Produksi Ikan Konsumsi (PAD)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	02	
								Operasional BBI Latang	Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	2.04	03	
2	13	01	02			Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Pemasaran dan Agribisnis Perikanan	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi														
2	13	01	02	01		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Pembinaan / Fasilitas si bimbingan teknis pemasaran	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan / Fasilitasi bimbingan teknis pemasaran	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.02	01	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Pembinaan / Fasilitas si bimbingan teknis pemasaran	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pembinaan / Fasilitasi bimbingan teknis pemasaran	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Jumlah rekomendasi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.01	01	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Pelaksanaan Event/promosi produk perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pelaksanaan Event/promosi produk perikanan	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	02	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitasi pemasaran produk olahan perikanan	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	02	
								Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Perikanan	Pertemuan penumbuhan kelompok	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pertemuan penumbuhan kelompok	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.02	01	
2	13	01	02	02		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Penguatan kelembagaan Pokhlasar	Pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan bimbingan teknis diversifikasi pengolahan ikan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.02	01	
								Penguatan kelembagaan Pokhlasar	Fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Fasilitasi kelompok yang menerapkan GMP dan SSOP	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Penguatan kelembagaan Pokhlasar	Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan konsumsi ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	01		
							Penguatan kelembagaan Pokhlasar	Pelaksanaan tilik pembelajaran	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian kudapan olahan ikan pada murid TK/PAUD	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan konsumsi ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan							
2	13	01	02	03		Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	01		
							Pengembangan Agribisnis Perikanan		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	jumlah pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di darat	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	jumlah produksi benih ikan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	03	###	05		
							Pengembangan Agribisnis Perikanan	Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan FORIKAN tingkat Nagari	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan konsumsi ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	02		
							Pengembangan Agribisnis Perikanan	Pelaksanaan Lomba GEMARIKAN	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Permodalan pelaku usaha perikanan	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan konsumsi ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi	Kelautan dan Perikanan	Pilihan	3	25	05	2.03	02		
9	99	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran					Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	09	01	2.03			
9	99	01	21				Penunjang Operasional Jasa Perkantoran				Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	09	1	2.03	01		
								Honorarium pegawai honorer / THL															
									Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa administrasi surat menyurat	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	01		
									Terlaksananya pengadaan surat kabar	Penyediaanbacaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	15		
								Belanja faksimili / internet	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja faksimili / internet	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	02		
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja materai dan benda pos	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	03		
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	01	2.03	04		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	01	2.03	07	
										Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jasa petugas kebersihan kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	01	2.03	08	
									Belanja plakat/cendramata														
			20					Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Prosentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			Administrasi Umum		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	09	1	2.03		
									Pengadaan ATK	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan ATK	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	10	
									Pengadaan Barang Cetakan dan Foto Copy	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Foto Copy	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	11	
									Pengadaan Alat Listrik	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Alat Listrik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	12	
									Materai dan Benda Pos lainnya	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai dan Benda Pos lainnya	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	13	
									Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	14	
									Makan minum tamu, lembur dan rapat	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan minum tamu, lembur dan rapat	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	17	
									Perjalanan dinas dalam daerah														
									Perjalanan dinas luar daerah	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	18	
									Pengadaan Pakaian dinas ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian dinas ASN	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	09	1	2.04	02	
9	99	02						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	• Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
9	99	02	45					Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 4	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	30	
									Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan roda 2	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	30	
									Jumlah Pemeliharaan Komputer / Laptop	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Komputer / Laptop	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	34	
									Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Demplot Bibit, benih tanaman buah, sayuran dan obat	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Demplot Bibit, benih tanaman buah, sayuran dan obat serta tanaman hias	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	32	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah Pengadaan Komputer /Laptop/A qurium	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Komputer /Laptop/Aq urium	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	24	
									Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	20	
									Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	09	1	2.03	19	
9	99	05						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS yang mengikuti Diklat sesuai Kompetensi			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	09	01	2.04		
9	99	05	04					Penigkatan Sumberdaya Aparatur	Pengiriman Asn untuk mengikuti Diklat /Magang/Workshop	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengiriman Asn untuk mengikuti Diklat /Magang/Workshop	Peningkatan Dispiln dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	09	1	2.04	09	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengiriman Asn untuk mengikuti Diklat /Magang/Workshop	Peningkatan Dispiln dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya anaratur					2	09	1	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengiriman Asn untuk mengikuti Diklat /Magang/Workshop	Peningkatan Dispiln dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya anaratur					2	09	1	2.04	11	
9	99	06						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
9	99	06	01					Monitoring Evaluasi dan pelaporan		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					2	09	1	2.01	01	
									Pelaksanaan Monitoring	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pelaksanaan Rapat Evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					2	09	1	2.01	02	
									Pelaksanaan Rapat Evaluasi	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					2	09	1	2.01	03	
									Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerahnya	Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					2	09	1	2.01	04	
									Pelaksanaan Pembuatan laporan dinas	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Monitoring	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					2	09	1	2.01	05	
								Gaji dan Tunjangan Pegawai				Administrasi Keuangan		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu			2	09	1	2.02		
									Penyediaan Gaji dan Tunjan an ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjan an ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjan an ASN	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	01	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan						2	09	1	2.02	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	03	
									Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	04	
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	05	
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	06	
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	07	
									Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	08	
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					2	09	1	2.02	09	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI																							
									Belanja Tidak Langsung	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.02	01	
										Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah bulan terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.03	04	
									Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi dan jasa perkantoran													
									Penunjang Operasional Adm. Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	13	01	2.03	07	
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	13	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	13	01	2.03	11	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			2	13	01	2.03	12	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Administrasi Berkantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	26	01	2.03	15
									Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Administrasi Berkantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.03	17
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Administrasi Berkantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.03	18
									Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Administrasi Berkantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.04	02
									Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Administrasi Berkantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.04	05
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Jasa Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.03	02
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Operasional Jasa Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran				2	13	01	2.03	08
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik													
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	13	01	2.03	03
									Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	13	01	2.03	06
									Penyediaan jasa perbaikan pelatan kerja	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	13	01	2.03	09
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	13	01	2.03	13
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	13	01	2.03	14

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	24	
										Pengadaan mebeleur	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	28	
										Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	32	
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	34	
										Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Bulan Terpenuhi Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase sapras aparatur dengan kondisi baik			2	13	01	2.03	35	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti diklat sesuai kebutuhan jabatan/fungsi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /Lulus Diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.04	09	
									Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi			2	13	01	2.04	10	
									Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Jumlah Pegawai yang memiliki kemampuan /sertifikat diklat teknis/fungsional	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi			2	13	01	2.04	11	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
								Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Penyusunan renstra dan renja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.01	01	
										Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.01	03	
										Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat	Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.01	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat		Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat		Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.02	07	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan SKPD yang dibuat		Persentase pemenuhan Dokumen perencanaan dan evaluasi	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	01	2.02	09	
								Program Pengelolaan dan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Nagari dan Keuangan Nagari	Persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu														
									Jumlah aparaturnya pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya														
								Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Nagari dan BPN	Jumlah aparaturnya Pemerintahan Desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan tupoksi	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD	1. Jumlah aparaturnya pemerintah nagari yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksi	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan pendanaan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	05	
									Jumlah anggota BPN yang telah mengikuti pelatihan		2. Jumlah anggota BPN yang telah mengikuti pelatihan				2. Jumlah aparaturnya pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari	Jumlah Wali Nagari dan Sekretaris Nagari yang mengikuti Penilaian	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD	Jumlah wali nagari dan sekretaris nagari yang mengikuti penilaian	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	05	
															2. Jumlah aparatu pmerintah nagari yang meningkat kompetensinya								
								Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan - Kegiatan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam kegiatan Pemerintahan Nagari	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang terfasilitasi dalam kegiatan Pemerintahan Nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	01	
															2. Jumlah aparatu pmerintah nagari yang meningkat kompetensinya								
								Fasilitasi Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja nagari	Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan asset desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan anggaran dan pendapatan belanja nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	04	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya								
								Pembekalan Aparatur Pembina Pemerintahan Nagari dan PTPD	Jumlah aparatur pembina nagari yang dibina	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD	Jumlah wali nagari dan sekretaris nagari yang mengikuti penilaian	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	05	
															2. Jumlah aparatu pmerintah nagari yang meningkat kompetensinya								
								Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian walinagari dan BPN	Jumlah walinagari dan BPN yang terpilih	Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah walinagari dan BPN yang terpilih	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	09	
																2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
										Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah BPN yang terpilih	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	10	
											Jumlah nagari yang dimekarkan				2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya								
								Fasilitasi batas administrasi nagari dan penataan nagari	Persentase nagari yang menetapkan batas administrasi nagari per segmen	Fasilitasi tata wilayah desa	Persentase nagari yang menetapkan batas administrasi nagari per segmen	Penyelenggaraan penataan desa	Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan	Penataan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaa n masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
							Pembinaan Administrasi Keuangan Nagari	Jumlah nagari yang akan dibina dalam administrasi keuangan	Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan asset desa	Jumlah nagari yang akan dibina dalam administrasi keuangan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	04		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
									Penyediaan dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa	Jumlah nagari yang akan dibina dalam administrasi keuangan	Penyelenggaraan penataan desa	Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan	Penataan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	01		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
							Fasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan aset Nagari	jumlah nagariyang terfasilitasi dalam penyusunan dan pendayagunaan aset nagari	Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan asset desa	jumlah nagariyang terfasilitasi dalam penyusunan dan pendayagunaan aset nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	04		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
							Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan Nagari dan BPN	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan nagari	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm pemerintahan desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	01		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
									Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah nagari yang dimekarkan	Penyelenggaraan penataan desa	Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan	Penataan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	01		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
									Fasilitasi penataan kewenangan desa	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan nagari	Penyelenggaraan penataan desa	Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan	Penataan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	03		
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensi								
									Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Laporan Administrasi Pemerintahan nagari	Penyelenggaraan penataan desa	Persentase nagari yang ditata sesuai peraturan perundangan	Penataan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	02	2.01	04		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya							
							Fasilitasi Kerja Sama Nagari	Jumlah Nagari yang melaksanakan kerja sama	Fasilitasi kerjasama antar desa	Jumlah Nagari yang melaksanakan kerja sama	Fasilitasi kerjasama antar desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	Peningkatan kerjasama desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	03	2.01	01	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
									Fasilitasi kerjasama desa dengan pihak ketiga	Jumlah Nagari yang melaksanakan kerja sama	Fasilitasi kerjasama antar desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	Peningkatan kerjasama desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	03	2.01	02	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
							Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
									Fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	06	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
							Fasilitasi sistem keuangan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan nagari	Jumlah sistem/aplikasi yang dikelola dan jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan asset desa	Jumlah sistem/aplikasi yang dikelola dan jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	04	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
							Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan - Kegiatan bidang keuangan dan pembangunan nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi pada bidang keuangan dan pembangunan	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi pada bidang keuangan dan pembangunan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03	
														2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Fasilitasi Pengelolaan keuangan dan asset desa	Jumlah sistem/aplikasi yang dikelola dan jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	04
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
								Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Nagari	a. Jumlah nagari/desa berkembang b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif													
								Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Jambore Kader PKK yang diikuti	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah Jambore Kader PKK yang diikuti	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	03
									Jumlah Penilaian yang di laksanakan		Jumlah Penilaian yang di laksanakan				b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jumlah koordinasi pemberdayaan yang dilakukan	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	Jumlah koordinasi pemberdayaan yang dilakukan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02
															b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Fasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL)	Jumlah fasilitasi dan monitoring pelaksanaan KKL	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	Jumlah koordinasi pemberdayaan yang dilakukan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02
															b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Pembinaan Posyandu	Jumlah posyandu yang dibina oleh pokjanal	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah posyandu yang dibina oleh pokjanal	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02
									Jumlah kader posyandu yang dinilai		Jumlah kader posyandu yang dinilai				b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang Aktif Jumlah LPM yang dilakukan pembinaan	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	Jumlah LPM yang Aktif Jumlah LPM yang dilakukan pembinaan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	03
															b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Fasilitasi dan Pendayagunaan Profil Nagari	Persentase entri data profil nagari	Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Persentase entri data profil nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	11

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
								Pelaksanaan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun	Jumlah nagari yang melakukan pemutakhiran data indeks membangun	Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Jumlah nagari yang melakukan pemutakhiran data indeks membangun	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan penundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	11	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
								Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang terlayani pemberian makan tambahan	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat hukum adat	Jumlah sekolah yang terlayani pemberian makan tambahan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02	
							Jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta menu PMTAS Tk Kab dan Prov			Jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta menu PMTAS Tk Kab dan Prov					b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif								
							Jumlah sekolah yang dinilai untuk pelaksanaan PMTAS			Jumlah sekolah yang dinilai untuk pelaksanaan PMTAS													
								Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Nagari yang berpartisipasi dalam Terselenggaranya BBGRM dan Penilaian BBGRM	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan penundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
								Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang aktif	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02	
															b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif								
								Pembinaan dan Monitoring BPSPAM /PAMSIM AS	Jumlah KPSPAMS yang aktif	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	Jumlah KPSPAMS yang aktif	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	02	
																b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Nagari	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan penundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	pemberdayaann masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
										Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	05
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
								Pembinaan dan Fasilitasi Posyantek dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Posyantek yang dibina dalam pengembangan teknologi tepat guna	Fasilitasi pemanfaatan Teknologi tepat guna	Jumlah Posyantek yang dibina dalam pengembangan Teknologi tepat guna	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	06
															b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif							
								Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	Jumlah Pendamping profesional P3MD yang terfasilitasi	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah Pendamping profesional P3MD yang terfasilitasi	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
								Pelaksanaan evaluasi perkembangan nagari dan pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang dilaksanakan evaluasi perkembangan nagari	Fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	Jumlah nagari yang dilaksanakan evaluasi perkembangan nagari	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	11
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
								Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	Jumlah kawasan pedesaan yang terbentuk	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	03
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkat kompetensinya							
								Fasilitasi lembaga ekonomi nagari	Jumlah lembaga ekonomi yang dibina	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa	Jumlah lembaga ekonomi yang dibina	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan adm desa	Persentase nagari yang menyelenggarakan adm pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan perundangan	Administrasi pemerintahan desa	1. persentase nagari dan desa yang membuat laporan administrasi dan keuangan nagari tepat waktu	perberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	04	2.01	08

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															2. Jumlah aparatur pemerintah nagari yang meningkatkan kompetensinya								
							Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Persentase lembaga adat yang aktif	Peningkatan kapasitas kelembagaan	Persentase lembaga adat yang aktif	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	03		
								Jumlah Lembaga adat yang dibina		Jumlah Lembaga adat yang dibina				b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif									
									Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan	Jumlah revitalisasi adat dan rumah gadang	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	03		
														b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif									
							Fasilitasi LKAAM dan Bundo Kanduang Kabupaten Sijunjung	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	Kelembagaan masyarakat desa dan masyarakat adat	Jumlah lembaga adat yang terfasilitasi	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Pemberdayaan lembaga kemasayarakatan , lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	a. Jumlah nagari/desa berkembang	pemberdayaan masyarakat dan desa	Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	13	05	2.01	04		
														b. Persentase kerapatan adat nagari yang aktif									
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																							
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.02	01	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran														
							Kegiatan Penunjang Operasional Adminstrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.01	01		
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.02	06		
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.02	07		
									Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.02	08		
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.02	09		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	01	
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	03		
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	04		
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	07		
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	08		
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	10		
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	11		
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	12		
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	13		
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	14		
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	17		
									Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	18		
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.04	02		
									Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.04	05		
								Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran yang dilayani	Jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	02	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	03	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	06	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	09	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	14	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	33	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikasi mengikuti/lulus Diklat Peningkatan Kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														
								Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikasi mengikuti/lulus Diklat Peningkatan Kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.04	11	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.01	02	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif														
								Kegiatan Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling (DAK)	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	15	
										Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	03	
										Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	08	
										Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah sarana mobilitas Tim KB Keliling yang diadakan	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang berdaya guna	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.02	01	
										Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang berdaya guna	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.02	02	
										Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang dilakukan pengendalian pendistribusian Alokon	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan/Kota Kelurahan/Kota	Persentase ketersediaan dan pendistribusian alokon dan jumlah pelayanan kb yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	01	
										Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah kecamatan yang tersedianya sarana dan prasarana di balai penyuluh	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota Kecamatan/Kota Kelurahan/Kota	Persentase ketersediaan dan pendistribusian alokon dan jumlah pelayanan kb yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	06	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKES)	Jumlah kecamatan yang tersedianya sarana dan prasarana di balai penyuluh	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penguatan dan Pembinaan yang dilakukan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	02	
										Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Administrasi umum	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	01	2.03	20	
								Kegiatan Pembentukan dan pembinaan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Program Pembinaan Penduduk	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	08	
										Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja yang memperoleh penguatan peran dalam pelaksanaan pelayanan dan kesertaan ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.04	01	
										Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk Kampung KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.04	02	
										Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan & mengelola Program KKBPK	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.04	03	
										Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase Kampung KB yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang Aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.04	04	
								Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pelayanan KB yang disediakan	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pelayanan KB yang disediakan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah bulan penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin dan pelayanan KB yang disediakan	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Persentase ketersediaan dan pendistribusian alokon dan jumlah pelayanan kb yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	03	
										Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Ormas dan Mitra Kerja yang memperoleh penguatan peran dalam pelaksanaan pelayanan dan kesertaan ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang aktif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.04	01	
								Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Jumlah pencabutan Implant dan kurangnya angka kelahiran	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah bulan pelaksanaan pencabuta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Persentase ketersediaan dan pendistribusian alokon dan jumlah pelayanan kb yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	07	
										Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah bulan pelaksanaan pencabuta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	08	
										Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah bulan pelaksanaan pencabuta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	09	
										Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah bulan pelaksanaan pencabuta	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	12	
								Kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi	Jumlah peserta KB Medis Operasi yang dilakukan tindakan medis operasi	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Medis Operasi yang dilakukan tindakan medis operasi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB Medis Operasi yang dilakukan tindakan medis operasi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	04	
										Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta KB Medis Operasi yang dilakukan tindakan medis operasi	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah	Jumlah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan jumlah pelayanan KB yang dilakukan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang menjadi Peserta KB Aktif	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.03	13	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembangunan Keluarga	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I														
								Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif keluarga	Jumlah usaha ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Paket Pengadaan Sarana Kelompok BKB	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	02	
										Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Usaha Ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	03	
										Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	jumlah PKLK yang dilakukan penguatan dan pembinaan Jumlah Usaha Ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Akti	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	04	
										Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Usaha Ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	06	
								Kegiatan Penguatan dan pembinaan PKLK	Jumlah PKLK yang dilakukan penguatan dan pembinaan	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	jumlah PKLK yang dilakukan penguatan dan pembinaan Jumlah Usaha Ekonomi produktif keluarga yang dibina dan dikembangkan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	04	
										Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah PKLK yang dilakukan penguatan dan pembinaan	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Jambore Institusi masyarakat Pedesaan	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan yang mengikuti Jambore	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan yang mengikuti Jambore	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang berdaya guna	Pembinaan Keluarga (KB)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.02	03	
										Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan yang mengikuti Jambore	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB yang berdaya guna	Pembinaan Keluarga (KB)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.02	04	
								Kegiatan Fasilitas forum pelayanan KRR bagi Kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah	Jumlah kelompok remaja dan sebaya diluar sekolah yang disediakan fasilitas pelayanan KRR	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Kelompok Keluarga/UPPKS)	Jumlah sekolah yang dilakukan advolasi dan KIE tentang program kesehatan reproduksi remaja	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	07	
										Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Poktan yang memperoleh jumlah promosi dan sosialisasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	08	
										Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah kebijakan terkait pencapaian IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	09	
										Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah kebijakan terkait pencapaian IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	10	
										Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Advokasi dan Promosi IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	11	
										Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Kecamatan terlaksananya koordinasi dan evaluasi IPK	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	13	
										Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kebijakan daerah tentang pemberdayaan dan peningkatan peran serta Ormas dan Mitra Kerja dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi Ormas dan Mitra Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kecamatan terlaksananya koordinasi dan evaluasi IPK	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.02	02	
										Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kebijakan daerah tentang pemberdayaan dan peningkatan peran serta Ormas dan Mitra Kerja dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.02	03	
										Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan & kesejahteraan keluarga yang dilakukan	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	Persentase pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi Ormas dan Mitra Kerja	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera & KS I	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.02	04	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)														
							Kegiatan Penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Jumlah penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan pengendalian penyuluhan dan advokasi	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan pengendalian penyuluhan dan advokasi	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	01		
									Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan pengendalian penyuluhan dan advokasi	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	02		
									Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Promosi Media KIE	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	04		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Program KKBPK Sesuai	Media KIE Tradisional	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	06	
										Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pertemuan dengan Nagari dan Kecamatan	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	03	2.01	07	
								Kegiatan Pendataan Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	03	
								Kegiatan Pendataan Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	04	
										Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	01	
										Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	02	
										Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	03	
										Pemetaan Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	04	
										Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	05	
										Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan di Bina	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang dipetakan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	08	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	09
										Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	10
										Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	11
										Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	12
										Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah keluarga yang didata	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	13
								Kegiatan Pembinaan, monitoring, evaluasi, Pencatatan dan pelaporan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB yang dilaksanakan	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB yang dilaksanakan	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Cakupan Daerah yang ditetapkan	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.02	14
								Kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Sekolah yang dilakukan advokasi dan KIE tentang program Kesehatan Reproduksi Remaja	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah sekolah yang dilakukan advokasi dan KIE tentang program kesehatan reproduksi remaja	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan (Poktan) yang Aktif	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	04	2.01	07
								Kegiatan Penguatan dan Perluasan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan dibina	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dibentuk dan dibina	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Rangka Pengendalian Kependudukan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	05
								Kegiatan Penguatan dan Perluasan Pendidikan Kependudukan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Formal yang menerapkan materi SSK Formal	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	07
										Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Formal yang menerapkan materi SSK Non Formal	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	08
										Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah SSK yang dibentuk dan di bina	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	09

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)	Jumlah Pelaksanaan Rakorda Program KKBPK Tk. Kabupaten	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Pelaksanaan Rakorda Program KKBPK Tk. Kabupaten	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	01	
								Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk)		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Rakorda	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan yang dilaksanakan	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten	Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wajib bukan pelayanan dasar	2	14	02	2.01	15	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																							
						Wajib	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan			Penunjang Urusan Pemerintahan	x	xx	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah bulan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan			Penunjang Urusan Pemerintahan	x	xx	01	2.03	04	
								Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2,01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2,01	03	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2,01	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2,02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2,02	07	
										Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	10
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	11
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	12
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	16
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	17
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional administrasi kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	18
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional jasa kantor yang dilayani	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional jasa kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	02
										penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional jasa kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	08
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan operasional jasa kantor yang dilayani	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	15
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik													
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	09
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	13
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	14
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	22

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran			x	xx	01	2.03	25
										Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik			x	xx	01	2.03	28
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik			x	xx	01	2.03	30
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik			x	xx	01	2.03	32
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik			x	xx	01	2.03	35
								Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi													
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah personil yang mengikuti diklat	Pengadaan pakaiana dinas beserta perlengkapan	Jumlah personil yang mengikuti diklat	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi			x	xx	01	2.04	02
										Pengadaan pakaiana khusus hari-hari tertentu	Jumlah personil yang mengikuti diklat	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi			x	xx	01	2.04	05
										Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah personil yang mengikuti diklat	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi			x	xx	01	2.04	09
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah personil yang mengikuti diklat	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi			x	xx	01	2.04	10
								Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk (DAK non fisik)		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Rakor, Bimtek serta koordinasi dan konsultasi yang diikuti	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat dan mengikuti diklat peningkatan kopetensi sesuai tupoksi			x	xx	01	2.04	11
								Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD													
								Penyusunan dan Evaluasi Renstra 2021-2026	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD			x	xx	01	2,01	01
										Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD			x	xx	01	2,01	04
								Program Penataan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el														
									3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran														
							peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah KK dan surat pindah datang yang diterbitkan	pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Jumlah KK dan surat pindah datang yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang dilayani	pendaftran penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	02	2.01	02	
														2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el									
														3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran									
									Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK dan surat pindah datang yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Pendaftaran Penduduk yang dilayani	pendaftran penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	02	2.01	03	
														2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el									
														3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran									
									Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah KK dan surat pindah datang yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pendaftaran penduduk yang dilayani	pendaftran penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	02	2.01	04	
														2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el									
														3. persentase penduduk yang memilki akta kelahiran									
									pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah KK dan surat pindah datang yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pendaftaran penduduk yang dilayani	pendaftran penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga				2	12	02	2.01	05	
														2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el									
														3. persentase penduduk yang memilki akta kelahiran									
							Penerbitan Identitas Penduduk	Jumlah KTP dan KIA yang diterbitkan	Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah KTP dan KIA yang diterbitkan	Pelayanan pendaftaran penduduk	jumlah pendaftaran penduduk yang dilayani	pendaftran penduduk	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	02	2.01	07	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
							Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan sipil yang dilayani	Pencatatan Sipil	1. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	03	2.01	01	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
									Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pencatatan sipil yang dilayani	Pencatatan Sipil	1. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	03	2.01	02	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
							Pemetaan Penduduk	Jumlah pemetaan KK berdasarkan titik koordinat	Pengumpulan, Analisis, dan diseminasi data pendaftaran penduduk	Jumlah pemetaan KK berdasarkan titik koordinat	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	jumlah data KK yang terpetakan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2.01	01	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
									Pengumpulan, Analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil	Jumlah pemetaan KK berdasarkan titik koordinat	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan	jumlah data kependudukan yang dikumpulkan dan dimanfaatkan serta jumlah database kependudukan yang disajikan	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2.01	02	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengumpulan, Analisa dan Desiminasi Perkembangan Penduduk	Jumlah pemetaan KK berdasarkan titik koordinat	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah data kependudukan yang dikumpulkan dan dimanfaatkan serta jumlah database kependudukan yang disajikan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2.01	03	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el								
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK Non Fisik)		Pengadaan blanko dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, Formuli dan Buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah pengadaan elemen pendukung penerbitan dokumen kependudukan	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga 2. Persentase pddk usia diatas 17 thn yang memiliki KTP-el. 3. Persentase pddk yang memiliki akta kelahiran	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,02	02	
								Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK non fisik)		Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting	Jumlah Pelayanan Dokumen Kependudukan yang dilakukan	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,03	04	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el								
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK non fisik)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga 2. Persentase pddk usia diatas 17 thn yang memiliki KTP-el. 3. Persentase pddk yang memiliki akta kelahiran	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,03	08	
								Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	Jumlah rapat dengan pengguna data yang dilaksanakan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerja sama dan pemanfaatan data dengan instansi terkait	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah data kependudukan yang dikumpulkan dan dimanfaatkan serta jumlah database kependudukan yang disajikan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,01	05	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memilki KTP-el								
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk (DAK non fisik)	Jumlah Rakor, Bintek serta Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	Koordinasi Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penerbitan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,03	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el								
															3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
							Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Up dating data	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Up dating data	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah data kependudukan yang dikumpulkan dan dimanfaatkan serta jumlah database kependudukan yang disajikan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	04	2.01	04	
								Jumlah verifikasi data		Jumlah verifikasi data					2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el								
								Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan		Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan					3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi		Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi													
								Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah		*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	jumlah data kependudukan yang dikumpulkan dan dimanfaatkan serta jumlah database kependudukan yang disajikan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	04	2.01	06	
										Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan					2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el								
										Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi					3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	04	2,03	01	
										Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan					2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el								
										Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi					3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								
								Fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan		*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar		2	12	04	2,03	06	
										Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan					2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el								
										Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi					3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,03	07
											Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan				2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
											Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi				3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
										Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1. Jumlah pemanfaatan data oleh pengguna 2. Persentase Keakuratan data (DKB/Data Pelayanan)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	04	2,03	11
											Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan				2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
											Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi				3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
										Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	*Jumlah Up dating data *Jumlah Verifikasi data	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah buku profil dan softcopy yang diterbitkan	Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	12	05	2,01	02
											Jumlah buku profil dan agregat yang diterbitkan				2. Persentase penduduk usia diatas 17 tahun yang memiliki KTP-el							
											Jumlah Inovasi Aplikasi yang terintegrasi				3. persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran							
DINAS PERHUBUNGAN																						
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu; Tingkat keselarasan Renstra	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.02	01
										Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.02	05

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.02	07	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.02	09	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase Ketepatan Pelayanan Jasa Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi umum	jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	15	##	2.03	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Persentase tersedianya jasa jaminan pemeliharaan PNS	Administrasi Umum	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu; Tingkat keselarasan Renstra	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.03	04	
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase Ketepatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	11	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	12	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	14	
										Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	16	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	17
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	##	2.03	18
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat / bimtek	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.04	##
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	01	2.03	02
										penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	07
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	08
								Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik													
								Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan yang wajib pajak	Administrasi umum	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	01	2.03	06
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	09
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	13
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	20
										pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	22
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	24
										Pengadaan Meubeler	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	25

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	28	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	35	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara		Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi					2	15	01	2.03	38	
								Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti diklat sesuai kebutuhan jabatan / fungsi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan jabatan / fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.04	09	
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat sesuai kebutuhan jabatan / fungsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek		Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ bimtek					2	15	##	2.04	11	
								Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Dinas Perhubungan	2	15	##	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan					2	15	##	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi					2	15	##	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi					2	15	##	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi					2	15	##	2.01	05	
								Program Peningkatan Pelayanan Angkutan jalan umum dan perkeretaapian pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	Persentase tersedianya angkutan jalan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Kegiatan Operasional Penyelenggaraan UPTD PKB	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional penyelenggaraan UPTD PKB	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional penyelenggaraan UPTD PKB	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan peralatan, perlengkapan dan database kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	2	2.05	03
										Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional penyelenggaraan UPTD PKB	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan peralatan, perlengkapan dan database kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor					2	15	2	2.05	04
										Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional penyelenggaraan UPTD PKB	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan peralatan, perlengkapan dan database kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor					2	15	2	2.05	09
										Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bulan terpenuhinya Operasional penyelenggaraan UPTD PKB	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan peralatan, perlengkapan dan database kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor					2	15	2	2.05	10
								Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan Kabupaten dan Jalan Desa													
								Kegiatan Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/ daerah dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan provinsi	terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/ daerah dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian angkutan dan pengamanan angkutan umum dan pengamanan lebaran dan tahun baru 75 %	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	02	2.06	01
										Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/ daerah dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru		Persentase pengendalian angkutan dan pengamanan angkutan umum dan pengamanan lebaran dan tahun baru 75 %					2	15	02	2.06	02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi	terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/ daerah dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru		Persentase pengendalian angkutan dan pengamanan angkutan umum dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru, 75 %					2	15	02	2.06	04
								Kegiatan Optimalisasi pengendalian lalu lintas angkutan jalan dan perkeretaapian	terciptanya pengendalian angkutan pengamanan pejabat negara/ daerah dan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah persetujuan dokumen andalalin	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	Persentase menurunnya titik kemacetan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	02	2.07	01
										Peningkatan kapasitas penilai Andallalin	Jumlah persetujuan dokumen andalalin		Persentase menurunnya titik kemacetan lalu lintas					2	15	02	2.07	02
										Koordinasi dan sinkronisasi penilaian andallalin	Jumlah persetujuan dokumen andalalin		Persentase menurunnya titik kemacetan lalu lintas					2	15	02	2.07	03
										Pengawasan pelaksanaan rekomendasi andallalin	Jumlah persetujuan dokumen andalalin		Persentase menurunnya titik kemacetan lalu lintas					2	15	02	2.07	04
										Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas alat keselamatan lalu lintas di jalan berupa marka jalan (zebra cros,pita kejut,zoss merah ,full line)terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan,aman,selamat,te rtib,lancar dan terpadu	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalulintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa			2	15	##	2.02	01
								Kegiatan Optimalisasi pengadaan dan pemakaian alat keselamatan lalu lintas	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas alat keselamatan lalu lintas di jalan berupa marka jalan (zebra cros,pita kejut, zoss merah ,full line) terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, aman,selamat,tertib ,lancar dan terpadu	Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan perlengkapan Jalan	Terlaksananya pemeliharaan jaringan LPJU tersebar dalam Kabupaten Sijunjung	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalulintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15		2.02	04

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpenuhinya kebutuhan fasilitas alat keselamatan lalu lintas di jalan berupa marka jalan (zebra cros,pita kejut,zoss merah,full line)terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan,aman,selamat,te rtib,lanca	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas					2	15	##	2.02	03
								Kegiatan Pemeliharaan rutin LPJU	Terlaksananya pemeliharaan, pengadaa dan pemasangan jaringan LPJU tersebar dalam kabupaten	Penyediaan Perengkapan Jalan di jalan Kabupaten /kota	Terlaksananya pengadaan dan pemasangan jaringan LPJU tetrsebar dalam Kabupaten Sijunjung	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas					2	15	02	2.02	02
								Kegiatan Optimalisasi Pelayanan Parkir dan kawasan Pasar	Mengurangi kemacetan dan menghindari kecelakaan lalu lintas di tepi jalan umum dan kawasan pasar	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota	Mengurangi kemacetan dan menghindari kecelakaan lalu lintas di tepi jalan umum dan kawasan pasar	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	persentase peningkatan retribusi parkir	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	02	2.04	02
								Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	jumlah angkutan umum yang di kendalikan dan diawasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	02	2.09	02
									penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten /kota	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan		jumlah angkutan umum yang di kendalikan dan diawasi						2	15	02	2.09	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Operasional Terminal Tipe C	Jumlah Bulan Terpenuhi terminal tipe c	Pengembangan sarana dan prasarana terminal	Jumlah Bulan Terpenuhi Terminal Tipe C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan Kabupaten dan Jalan Desa	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tersedianya angkutan umum pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan; Jumlah rekomendasi izin trayek yang dikeluarkan per tahun; persentase kendaraan bermotor umum yang laik jalan; Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan	Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2	15	02	2.03	03
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)	Jumlah Bulan Terpenuhi Terminal Tipe C		Persentase tersedianya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan Kabupaten dan Jalan Desa					2	15	02	2.03	04
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	-	-	2	16	01	2.02	01
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Bulan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	04
								PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	JUMLAH BULAN TERPENUHINYA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								1. Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	01
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	07
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	10

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	11
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	12
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	15

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	16
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	17
										Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	18

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	02
										Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	03
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	04

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	05
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan .	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	07
										Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	08

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan .	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.02	09	
							2. Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan Jasa perkantoran															
									Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	02		
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	08		
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor															

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	03
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	06
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	09

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	13
										Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	14
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	20

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	22
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	24
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	25

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	28
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	29
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	30

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	32
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	34
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	35

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Rehab Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.03	38
										Pengadaan Mesin/ Kartu Absen	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bintek untuk aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.04	01
										Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Jumlah bulan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bintek untuk aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	2	16	01	2.04	02
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat lulus/mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki sertifikat lulus/mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bintek untuk aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.04	09
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bintek untuk aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.04	10
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bintek untuk aparatur	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.04	11
								Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan .	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.01	05
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan .	Administrasi Keuangan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.02	06
								Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra dengan RPJMD													
								Penyusunan dan Evaluasi Renstra	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja OPD yang tersusun tahun 2022-2028	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedia dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran, Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.01	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedia dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah tersusunnya dokumen evaluasi perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedia dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedia dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran , Persentase sarana dan prasarana apatur dengan kondisi baik, Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulus/ mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi, Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu, Tingkat keselarasan Renstra	Bidang Urusan Pemerintah Daerah	Wajin yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	01	2.01	04	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik														
							1. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi publik	1. Jumlah berita pemerintah daerah Kab. Sijunjung yang dipublikasi melalui media sosial dan website selama 1 tahun	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita pemerintah daerah Kab. Sijunjung yang dipublikasi melalui media sosial dan website selama 1 tahun	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	04		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								2. Jumlah aduan masyarakat yang masuk melalui LAPOR SP4N dalam 1 tahun		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita pemerintah daerah Kab. Sijunjung yang dipublikasi melalui media sosial dan website selama 1 tahun	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	04
							2. Pengembangan sarana komunikasi dan desiminasi informasi pemerintah melalui Media tradisional, KIM dan Siaran Keliling	1. Jumlah sosialisasi dan pembinaan media tradisional, KIM dan desiminasi informasi pemerintah daerah melalui media center		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah admin website PPID yang dibina dan penyusunan jumlah daftar informasi publik di nagari-nagari, Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan maintenance, Jumlah bulan terpenuhinya operasional PPID, Jumlah DIP yang dikumpulkan seKab. Sijunjung dan dipublikasi di Web ppid@sijunjung.go.id, Jumlah informasi yang disampaikan melalui mobil M Pustaka, Jumlah KIM yang dibina, Jumlah OPD yang mengikuti pengujian konsekuensi informasi publik, Jumlah peserta Bintek penyusunan daftar informasi publik, Jumlah peserta sosialisasi KIM	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	06
								2. Jumlah kelompok media tradisional yang dibina		Kemitraan Dengan pemangku kepentingan	Jumlah kecamatan yang dilakukan desiminasi informasi pemerintah melalui media tradisional, Jumlah kelompok media tradisional yang dibina	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	08

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								3. Jumlah KIM yang dibina		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah admin website PPID yang dibina dan penyusunan jumlah daftar informasi publik di nagari-nagari, Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan maintenance, Jumlah bulan terpenuhinya operasional PPID, Jumlah DIP yang dikumpulkan seKab. Sijunjung dan dipublikasi di Web ppid@sijunjung.go.id, Jumlah informasi yang disampaikan melalui mobil M Pustaka, Jumlah KIM yang dibina, Jumlah OPD yang mengikuti pengujian konsekuensi informasi publik, Jumlah peserta Bintek penyusunan daftar informasi publik, Jumlah peserta sosialisasi KIM	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	06
								4. Jumlah kecamatan yang dilakukan desiminasi informasi pemerintah melalui media tradisional		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah admin website PPID yang dibina dan penyusunan jumlah daftar informasi publik di nagari-nagari, Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan maintenance, Jumlah bulan terpenuhinya operasional PPID, Jumlah DIP yang dikumpulkan seKab. Sijunjung dan dipublikasi di Web ppid@sijunjung.go.id, Jumlah informasi yang disampaikan melalui mobil M Pustaka, Jumlah KIM yang dibina, Jumlah OPD yang mengikuti pengujian konsekuensi informasi publik, Jumlah peserta Bintek penyusunan daftar informasi publik, Jumlah peserta sosialisasi KIM	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	06

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								3. Operasional penyelenggaraan Radio Lansek Manih	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih	Pengelolaan media Komunikasi Publik	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih, Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan, Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pada media online dan media cetak, Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron, Jumlah video, berita dll yang dibuat dan diinfokan untuk promosi pariwisata pada media publik dan media online, Jumlah videotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung, Jumlah video wall yang	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	05
								4. Pengelolaan PPID Kabupaten Sijunjung	Jumlah bulan pelaksanaan pengumpulan data informasi publik (DIP) Kab. Sijunjung dan dipublikasi di Web ppid@sijunjung.go.id	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah admin website PPID yang dibina dan penyusunan jumlah daftar informasi publik di nagari-nagari, Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan maintenance, Jumlah bulan terpenuhinya operasional PPID, Jumlah DIP yang dikumpulkan seKab. Sijunjung dan dipublikasi di Web ppid@sijunjung.go.id, Jumlah informasi yang disampaikan melalui mobil M Pustaka, Jumlah KIM yang dibina, Jumlah OPD yang mengikuti pengujian konsekuensi informasi publik, Jumlah peserta Bintek penyusunan daftar informasi publik, Jumlah peserta sosialisasi KIM	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	06

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Program Aplikasi Informatika	5. Pengembangan dan pengelolaan domain (desa.id) dan website nagari pemerintah daerah	Jumlah domain nagari yang terdaftar	Pendaftaran nama domain Pemerintah Provinsi	Jumlah domain nagari yang terdaftar	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain nagari yang dikelola	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika , jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.01	01	
									Jumlah domain nagari yang dibina dan diawasi	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Nagari yang dibina dan diawasi	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain nagari yang dibina dan diawasi	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika , jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.01	02	
								6. Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Melalui Media	Jumlah media kerjasama penyebaran informasi pada media online dan media cetak	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih, Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan, Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pada media online dan media cetak , Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron, Jumlah video, berita dll yang dibuat dan diinfokan untuk promosi parawisata pada media publik dan media online, Jumlah videotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung , Jumlah	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah media kerjasama penyebaran informasi pada media online dan media cetak	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	12	
								7. Pengembangan Promosi/Potensi Desa/Nagaru melalui media online	1. Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih, Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan, Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pada media online dan media cetak , Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron, Jumlah video, berita dll yang dibuat dan diinfokan untuk promosi parawisata pada media publik dan media online, Jumlah videotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung , Jumlah video well yang	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	05	
								2. Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih, Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan, Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pada media online dan media cetak , Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron, Jumlah video, berita dll yang dibuat dan diinfokan untuk promosi parawisata pada media publik dan media online, Jumlah videotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung , Jumlah video well yang	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten / Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								3. Jumlah paket Pengadaan vidiotron		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah bulan terlaksananya operasional penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui penyelenggaraan radio lansek manih, Jumlah jurnalis media online yang mengikuti pelatihan, Jumlah media yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pada media online dan media cetak, Jumlah paket kerjasama dengan penyedia vidiotron, Jumlah video, berita dll yang dibuat dan diinfokan untuk promosi parawisata pada media publik dan media online, Jumlah videotron yang disewa untuk hari jadi Kab. Sijunjung, Jumlah video wall yang	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah	Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	02	2.01	05
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan E-Government Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang menerapkan E-Government Pemerintah Daerah													
								1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan LAN/WAN	Jumlah paket pengembangan infrastruktur jaringan LAN/WAN dan ruangan Data Center serta Pembayaran Bandwith	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengembangan infrastruktu jaringan LAN/WAN dan ruangan data serta pembayaran bandwith	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	03

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyelenggaraan Sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah paket pengembangan infrastruktur jaringan LAN/WAN	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain yang dikelola	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.01	03
							2. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Informatika	1. Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan jasa layanan internet		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan jasa layanan internet	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	09
								2. Sosialisasi Internet sehat di Kab. Sijunjung		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah kecamatan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan jasa layanan internet	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	09

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							3. Pengembangan dan Pengelolaan aplikasi generik, spesifik yang terintegrasi	Jumlah tersedianya aplikasi-aplikasi yang berbasis e-elektronik yang terintegrasi di Kab. Sijunjung	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik	Jumlah aplikasi-aplikasi yang berbasis e-elektronik yang terintegrasi di Kab. Sijunjung, Jumlah terpenuhinya pembuatan ruang server, Jumlah terpenuhinya rehab ruang aplikasi, Jumlah tersedianya perangkat komputer (PC) untuk aplikasi, Jumlah tersediannya server dan rak server	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	07		
							4. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah	1. Jumlah OPD yang mengikuti bintek penggunaan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Dinas Kominfo	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Jumlah OPD yang mengikuti bintek penggunaan aplikasi-aplikasi yang tersedia di Dinas Kominfo, Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana ruang bintek	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	10		
							5. Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi	Persentase Penerapan Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah konsultasi dan koordinasi tentang SPBE, Jumlah perda dan perbup yang tersedia, Jumlah tersediannya laptop untuk tatakelola	Pengelolaan E-Government Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penerapan E-Government Pemerintah Daerah	Aplikasi Informatika	Jumlah media elektronik dan tradisional pemerintah daerah yang dapat diakses publik, Persentase OPD yang terkoneksi jaringan telekomunikasi dan informatika, jumlah aplikasi yang diadakan dan dikelola, Persentase OPD yang mengikuti sosialisasi aplikasi, Jumlah bulan kerjasama dengan media online, Persentase OPD yang menerapkan e-	Komunikasi dan Informatika	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	16	03	2.02	02		
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Persandian dan Pembangunan Persandian Daerah	Persentase Pengembangan Sistem dengan Persandian															

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penyiapan tata kelola komunikasi sandi antar perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik, Jumlah terlaksanannya workshop pengujian keamanan informasi (website atau aplikasi), Persentase infrastruktur persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah aplikasi yang sudah memenuhi standar keamanan cyber	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	Persandian	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	21	02	2.01	03	
								Jumlah roadmap persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah roadmap persandian, Jumlah sosialisasi implementasi pengamanan informasi daerah, Jumlah sosialisasi perbup persandian dan perbup tatakelola persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah aplikasi yang sudah memenuhi standar keamanan cyber	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	Persandian	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	21	02	2.01	01		
								Jumlah sosialisasi dan imlementasi pengamanan Informasi Daerah dan Perbup tentang Persandian serta Perbup Tata Kelola Sertifikat Elektronik	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah roadmap persandian, Jumlah sosialisasi implementasi pengamanan informasi daerah, Jumlah sosialisasi perbup persandian dan perbup tatakelola persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah aplikasi yang sudah memenuhi standar keamanan cyber	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	Persandian	Wajib yang tidak berkaitan dengan playanan dasar	2	21	02	2.01	01		
								Jumlah workshop pengujian keamanan informasi (website atau aplikasi)	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik, Jumlah terlaksanannya workshop pengujian keamanan informasi (website atau aplikasi), Persentase infrastruktur persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah aplikasi yang sudah memenuhi standar keamanan cyber	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan sistem dengan persandian	Persandian	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	21	02	2.01	03		
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Statistik	Pengembangan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Daerah yang tersedia tepat waktu													
								Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah dokumen ketersediaan data statistik dalam rangka mendukung perencanaan, pelaporan dan evaluasi hasil pembangunan	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan data, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen tersedia, Jumlah nagari yang dibina untuk pembentukan nagari statistik	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Daerah tersedia tepat waktu	Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	20	02	2.01	01	
									Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang tersedia, Jumlah workshop yang dilaksanakan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis data statistik yang tersedia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Daerah tersedia tepat waktu	Statistik	Wajib yang tidak berkaitan dengan playanan dasar	2	20	02	2.01	02		
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaku UKM yang meningkatkan pengetahuan kewirausahaannya														
								Persentase koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dengan tingkat kesehatan															
							Kegiatan Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan KUKM	1. Jumlah KUKM yang dilatih	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah KUKM yang dilatih	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang Meningkatkan menjadi usaha kecil	Program pengembangan UMKM	Jumlah pelaku UKM yang meningkatkan pengetahuan kewirausahaannya	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	08	2.01	01		
														Persentase koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dengan tingkat kesehatan									
								2. pendataan KUKM yang dilakukan	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	pendataan KUKM yang dilakukan	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku	Jumlah dokumen hasil pendataan usaha mikro	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah pelaku UKM yang meningkatkan pengetahuan kewirausahaannya	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	07	2.01	01		
														Persentase koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dengan tingkat kesehatan									
						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan														
								Rata-rata nilai SHU Koperasi															
							Kegiatan monitoring pembiayaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro	1. Jumlah move dan pengawasan yang dilakukan	Pengawasan kekuatan kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah move dan pengawasan yang dilakukan	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	03	2.01	01		
									Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah move dan pengawasan yang dilakukan	Pemeriksaan dan Pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten /Kota			Rata-rata nilai SHU Koperasi			2	17	03	2.01	02		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									2. Binte usaha pemula yang dilakukan	Facilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Binte usaha pemula yang dilakukan	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang Meningkat menjadi usaha kecil	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	08	2.01	01	
															Rata-rata nilai SHU Koperasi								
							Kegiatan pelayanan pengelolaan dana bergulir KUKM	1. Jumlah KUKM yang dilayani kredit penguatan modalnya	Facilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah KUKM yang dilayani kredit penguatan modalnya	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang Meningkat menjadi usaha kecil	Program pengembangan UMKM	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan				2	17	08	2.01	01	
								2. Jumlah KUKM yang dikelola penggunaan dana bergulir							Rata-rata nilai SHU Koperasi								
							Kegiatan pembinaan pelayanan pengawasan dan penilaian kesehatan terhadap KSP/USP	1. Jumlah koperasi simpan pinjam/ Usaha Simpan Pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi simpan pinjam/ Usaha Simpan Pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat	Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	04	2.01	01		
															Rata-rata nilai SHU Koperasi								
								2. Jumlah lomba koperasi yang dilakukan	penghargaan kesehatan dan KSP/USP koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lomba koperasi yang dilakukan	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi sehat						2	17	04	2.01	02	
								3. pelatihan pola koperasi syariah yang dilakukan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan pola koperasi syariah yang dilakukan	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan UMKM dan koperasi yang mengakses permodalan	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	05	2.01	01		
															Rata-rata nilai SHU Koperasi								
						Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif														
							Kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap koperasi dan persiapan RAT Koperasi	1. Jumlah koperasi yang dibina	Pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	06	2.01	01		
								2. Jumlah binte yang dilaksanakan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM unggul	Jumlah binte yang dilaksanakan	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilatih	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2	17	05	2.01	01		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									3. Jumlah dekopinda yang difasilitasi														
						Urusan Pemerintah an Pilihan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan metrologi legal														
								Kegiatan pengawasan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP)	Jumlah pengawasan alat UTTP yang dilakukan	pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah pengawasan alat UTTP yang dilakukan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera ulang, dan pengawasan	Jumlah UTTP yang memenuhi standar	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP wajib tera yang memenuhi persyaratan metrologi legal	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	06	2.01	02	
								Kegiatan operasional UPTD metrologi	Jumlah bulan operasional UPTD terpenuhi	pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah pengawasan alat UTTP yang dilakukan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera ulang, dan pengawasan	Jumlah UTTP yang memenuhi standar					3	30	06	2.01	02	
								Kegiatan fasilitasi tera dan tera ulang	jumlah UTTP yang ditera ulang	pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang	jumlah UTTP yang ditera ulang	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera ulang, dan pengawasan	Jumlah UTTP yang memenuhi standar					3	30	06	2.01	01	
								Kegiatan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	Jumlah BDKT yang diawasi	pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah pengawasan BDKY yang dilakukan	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera ulang, dan pengawasan	Jumlah UTTP yang memenuhi standar dan pengawasan yang dilakukan					3	30	06	2.01	02	
						Urusan Pemerintah an Pilihan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Program peningkatan usaha perdagangan	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan														
								Kegiatan Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah pasar yang dibangun dan direvitalisasi (DAK, APBD)	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun dan direvitalisasi (DAK, APBD)	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang memenuhi standra SNI minimal 50 % dari indikator SNI	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	03	2.01	01	
								Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar	jumlah pasar rakyat yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	jumlah pasar rakyat yang dibina dan diawasi	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang dibina					3	30	03	2.02	01	
								Kegiatan monitoring harga dan pasar murah bahan pokok dan barang strategis	1. jumlah monitoring harga yang dilakukan	pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	jumlah monitoring harga yang dilakukan	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten / kota	Jumlah pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	04	2.02	02	
									2. jumlah operasi pasar yang dilakukan	pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam satu kabupaten / kota	jumlah operasi pasar yang dilakukan	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat pasar kabupaten / kota	Jumlah pengendalian harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting.					3	30	04	2.02	03	
								Kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha dagang	1. jumlah pembinaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Fasilitasi Usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	jumlah pembinaan dan pengembangan usaha dagang yang dilakukan	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Jumlah usaha mikro yang Meningkatkan menjadi usaha kecil	Program pengembangan UMKM	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	2	17	08	2.01	01	
								2. Promosi dagang yang diikuti	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten / Kota		Jumlah promosi dagang yang diikuti	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah promosi dagang, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk yang dilakukan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	07	2.01	01	
								Kegiatan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan	Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi yang dilakukan	Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintah an Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	04	2.03	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan pengelolaan dan Penataan Pasar Inpres	Jumlah bulan pengelolaan dan penataan Pasar Inpres	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah bulan pengelolaan dan penataan Pasar Inpres	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang memenuhi standra SNI minimal 50 % dari indikator SNI	Program peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	30	03	2.01	02	
						Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program peningkatan kapasitas teknologi tepat guna IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna														
								Kegiatan pelatihan peningkatan mutu produksi industri logam	Jumlah IKM logam yang dilatih	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM logam yang dilatih	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pemberdayaan dan pembangunan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan Teknologi Tepat Guna	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05	
								Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi tepat guna	1. Jumlah mesin dan peralatan yang diadakan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah mesin dan peralatan yang diadakan	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota						3	31	02	2.01	05	
								Kegiatan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi tepat guna	2. Jumlah IKM yang dilatih kemampuan dalam pengembangan usaha		Jumlah IKM yang dilatih kemampuan dalam pengembangan usaha	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota						3	31	02	2.01	05	
								Kegiatan pelatihan peningkatan produksi industri makanan dan minuman	jumlah IKM minum yang dilatih	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	jumlah IKM minum yang dilatih	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota						3	31	02	2.01	05	
						Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dan sentra	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian														
								Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda															
								Kegiatan pembinaan industri agro	Jumlah IKM agro yang dibina.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM agro yang dibina.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pemberdayaan dan pembangunan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	05	
															Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda								
								Kegiatan pembinaan industri non agro	Jumlah IKM agro yang dibina, Lomba desain motif yang dilaksanakan, Pelatihan ceta bacorak, mahani, mangarok, dan celup.	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM agro yang dibina, Lomba desain motif yang dilaksanakan, Pelatihan ceta bacorak, mahani, mangarok, dan celup.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota						3	31	02	2.01	05	
								Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan dekranasda Sijunjung	Jumlah IKM yang dibina oleh Dekranasda, Jumlah Ivent yang diikuti	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang dibina oleh Dekranasda, Jumlah Ivent yang diikuti.	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota						3	31	02	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan fasilitasi kerjasama industri kecil menengah (IKM) dengan pihak ketiga	Jumlah IKM yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ke-tiga, Jumlah IKM yang bersertifikasi, Jumlah produk IKM yang bersertifikasi.	Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	Jumlah IKM yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak ke-tiga, Jumlah IKM yang bersertifikasi, Jumlah produk IKM yang bersertifikasi.	Penerbitan izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah	Jumlah industri yang memiliki sertifikasi	Program Pengendalian Izin usaha industri Kabupaten / Kota				3	31	03	2.01	03	
															Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda								
								Kegiatan pengembangan industri berbasis sentra	Jumlah lokasi sentra yang dibangun (DAK)	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah lokasi sentra yang dibangun (DAK)	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan serta dalam pemberdayaan dan pembangunan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	02	2.01	04	
															Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda								
								Kegiatan pendataan dan penyusunan profil IKM	jumlah dokumen yang tersusun	Diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten / Kota	jumlah dokumen yang tersusun	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen data informasi industri yang disusun	Program Pengelolaan Sistem Informasi industri Nasional	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	31	04	2.01	02	
															Jumlah sentra industri yang telah ditetapkan oleh Pemda								
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Kegiatan penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra opd 2022 - 2026	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra opd 2022 - 2026	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.01	01	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
								Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja LKPJ, LPBD dan Monev	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah yang disusun.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	17	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerahnya	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	17	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2	17	01	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan, Kinerja LKPJ, LEPPD dan Monev	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan.	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun						2	17	01	2.02	04	
									Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan	Administrasi Keuangan							2	17	01	2.02	05	
									Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan	Administrasi Keuangan							2	17	01	2.02	06	
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semesteran	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan	Administrasi Keuangan							2	17	01	2.02	07	
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan yang disusun dan monev yang dilakukan	Administrasi Keuangan							2	17	01	2.02	09	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
							Kegiatan penunjang operasional jasa perkantoran	Jumlah bulan penunjang operasional jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penunjang operasional jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.03	02		
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Jumlah bulan penunjang operasional jasa perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	04	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
							Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran.	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.03	01		
									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	03	
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	08	
									Penyediaan jasa perbaikan pelatan kerja	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	09	
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	10	
									penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	11	
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum							2	17	01	2.03	12	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	14	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	15	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	18	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah bulan Penunjang administrasi Perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA					2	17	01	2.04	02	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
								Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi umum	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.03	06	
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi umum						2	17	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	30	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	35	
										Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor terpenuhi	Administrasi Umum						2	17	01	2.03	38	
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /Lulus Diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi													
									Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /Lulus Diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.04	09
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						2	17	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						2	17	01	2.04	11	
								Belanja Tidak Langsung	Gaji ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Belanja Tidak Langsung			Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	17	01	2.02	01	
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																							
							Wajib bukan pelayanan dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Promosi Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor PMDN dan PMA, Jumlah Realisasi Investasi													
									Kegiatan Survei Potensi Investasi Penanaman Modal	Jumlah buku potensi peluang investasi dan WEB GIS Sektor Potensi investasi	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah buku potensi, peluang investasi dan WEB GIS Sektor Potensi investasi	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah buku potensi peluang investasi dan WEB GIS Sektor Potensi investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN dan PMA, Jumlah Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Wajib bukan pelayanan dasar	2	18	02	2.02	02
									Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang disusun dan jumlah peserta sosialisasi	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas /Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Regulasi yang disusun dan jumlah peserta sosialisasi	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi yang disusun dan disosialisasikan					2	18	02	2.01	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Promosi Investasi	Jumlah Event yang diikuti dan jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah Event yang diikuti dan jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Event yang diikuti	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN dan PMA, Jumlah Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Wajib bukan pelayanan dasar	2	18	03	2.01	02	
								Kegiatan pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan Laporan LKPM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Jumlah pemantauan Laporan LKPM	Pengendalian Pelaksanaan PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan penanaman modal yang dilakukan pengendalian	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN dan PMA, Jumlah Realisasi Investasi	Penanaman Modal	Wajib bukan pelayanan dasar	2	18	05	2.01	01	
								Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Jumlah Pembinaan Perusahaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota						2	18	05	2.01	02	
								Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan penanaman modal yang diawasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Jumlah Perusahaan penanaman modal yang diawasi	Pengendalian Pelaksanaan PM yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota						2	18	05	2.01	03	
						Wajib bukan pelayanan dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP														
								Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah izin yang diterbitkan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab / Kota	Jumlah jenis pelayanan yang diberikan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	Penanaman Modal	Wajib bukan pelayanan dasar	2	18	04	2.01	01	
									Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perizinan dan non perizinan	Pemantauan Pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal	Jumlah laporan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab / Kota						2	18	04	2.01	02	
								Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan	Jumlah dokumen hasil survey IKM	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen hasil survey IKM	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab / Kota						2	18	04	2.01	03	
								Kegiatan Penyusunan pedoman perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen yang disusun	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas /insentif daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kab / Kota						2	18	04	2.01	04	
								Kegiatan Publikasi dan penyebarluasan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah media	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah media	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten /kota	Jumlah penyajian Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP	Penanaman Modal	Wajib bukan pelayanan dasar	2	18	06	2.01	03	
						Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	• Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD • Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD • Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penyusunan Renstra OPD	Jumlah Renstra yang di susun dan di Evaluasi	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Renstra yang di susun dan di Evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD • Tingkat keselarasan RKPMD terhadap RPJMD • Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPMD	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar						
						Wajib bukan pelayanan dasar	Penanaman Modal	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Kegiatan Penunjang Operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	18	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2	18	01	2.01	03
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2	18	01	2.01	04
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							2	18	01	2.01	05
								Kegiatan Penunjang Operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan						2	18	01	2.02	04
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan							2	18	01	2.02	05
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan							2	18	01	2.02	06
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Semester	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan							2	18	01	2.02	07
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan							2	18	01	2.02	09
										Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum						2	18	01	2.03	01
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum							2	18	01	2.03	10
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum							2	18	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	12	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	13	
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	14	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	15	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	17	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran terpenuhi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					2	18	01	2.04	02	
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran													
								Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	18	01	2.03	02	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan operasional jasa perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	08	
							Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik													
								Kegiatan Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	18	01	2.03	06	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	13	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	09	
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	20	
										pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubeler	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	28	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	32	
										Pemeliharaan rutin/berkala meubeler	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	35	
										Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	Jumlah bulan sarana dan prasarana kantor terpelihara	Administrasi Umum						2	18	01	2.03	38	
							Wajib bukan pelayanan dasar	Penanaman Modal	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat													
									Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	18	01	2.04	09
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						2	18	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/bimtek	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						2	18	01	2.04	11	
								Belanja Tidak Langsung	Gaji ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Belanja Tidak Langsung			Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	18	01	2.02	04	
										Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					2	18	01	2.03	04	
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA																							
								DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA															
							Urusan Pemerintah an Pilihan	Urusan Pemerintah an Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah iven promosi pariwisata yang diikuti dan diselenggarakan													
										Jumlah media promosi pariwisata													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Tour de Singkarak	Jumlah pembalap, official, tamu undangan, petugas media dan keamanan yang difasilitasi	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah pembalap, official, tamu undangan, petugas media dan keamanan yang difasilitasi	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah iven promosi pariwisata yang diikuti dan diselenggarakan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	03	2.01	04	
								Kegiatan Promosi kesenian pariwisata sijnjung	Jumlah event pagelaran seni yang diikuti didalam dan diluar daerah (Sumbang Expo)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah event pagelaran seni yang diikuti didalam dan diluar daerah (Sumbang Expo)							3	26	03	2.01	02	
								Kegiatan Fasilitasi seni anak nagari	Jumlah group kesenian yang difasilitasi	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah group kesenian yang difasilitasi							3	26	03	2.01	02	
									Jumlah grup kesenian yang ditampilkan di RTH, acara-acara pemda, dll	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah grup kesenian yang ditampilkan di RTH, acara-acara pemda, dll							3	26	03	2.01	02	
								Kegiatan Festival lansek manih	Jumlah kelompok /grup kesenian yang akan ditampilkan	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah kelompok /grup kesenian yang akan ditampilkan							3	26	03	2.01	02	
									Sewa pentas /booth/Lighting/Sound System, dll	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Sewa pentas /booth/Lighting /Sound System, dll							3	26	03	2.01	02	
									Penampilan tim kesenian dari luar daerah	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Penampilan tim kesenian dari luar daerah							3	26	03	2.01	02	
									Festival kesenian (Lomba)	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Festival kesenian (Lomba)							3	26	03	2.01	02	
								Kegiatan Promosi geopark silokek	Tersedia promosi geopark	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Tersedia promosi geopark							3	26	03	2.01	01	
									Tersedianya media promosi	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Tersedianya media promosi							3	26	03	2.01	01	
									Pembuatan dan Pengembangan website GIC	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Pembuatan dan Pengembangan website GIC							3	26	03	2.01	01	
									Festival geopark	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Festival geopark							3	26	03	2.01	01	
								Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara	Jumlah promosi pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Jumlah promosi pariwisata							3	26	03	2.01	01	
								Kegiatan peningkatan sarana promosi pariwisata	Jumlah media promosi pariwisata	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan luar negeri	Jumlah media promosi pariwisata							3	26	03	2.01	01	
								Kegiatan partisipasi keikutsertaan evan/pameran	Jumlah even yang diikuti	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah even yang diikuti							3	26	03	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan kerjasama pengembangan pariwisata	Jumlah kerjasama dengan pihak lain	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama dengan pihak lain							3	26	03	2.01	04	
								Kegiatan even promosi daerah	Jumlah even	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah even							3	26	03	2.01	02	
						Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan														
								Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Perencanaan destinasi pariwisata / Kabupaten / Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi pariwisata yang bangun dan dipelihara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	02	2.03	02	
										Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota								3	26	02	2.03	04	
										Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten / Kota								3	26	02	2.03	05	
								Kegiatan Pengembangan Geopark Silokek	Jumlah pengembangan kawasan	Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten / Kota	Jumlah pengembangan kawasan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi pariwisata yang dibangun dan dipelihara pada kawasan strategis pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	02	2.02	02	
										Pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten / Kota								3	26	02	2.02	03	
										Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota								3	26	02	2.02	04	
										Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten / Kota								3	26	02	2.02	05	
								Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan	Jumlah pembangunan objek wisata	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan objek wisata							3	26	02	2.02	03	
								Kegiatan Pembangunan Fasilitas Wisata Minat Khusus Paralayang	Jumlah pembangunan	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah Destinasi pariwisata yang bangun dan dipelihara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	02	2,03	03	
								Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah pembangunan sarana di objek wisata	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah pembangunan sarana di objek wisata							3	26	02	2,03	03	
						Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah kemitraan pariwisata														
								Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Berwisata	Jumlah peserta pembinaan usaha / Pokdarwis	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan usaha / Pokdarwis	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	02	2.04	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah peserta pembinaan usaha /Pokdarwis	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah promosi pariwisata yang dilaksanakan	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	03	2.01	04	
								Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang dilatih	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pokdarwis yang dilatih	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah kemitraan pariwisata	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Urusan Pemerintahan Pilihan	3	26	05	2.01	01	
										Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang dilatih							3	26	05	2.01	02	
									Jumlah anggota Pokdarwis yang bersertifikat	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah anggota Pokdarwis yang bersertifikat							3	26	05	2.01	04	
						Urusan Pemerintahan Pilihan	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun														
								Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terpetakan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terpetakan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	05	2.01	05	
								Kegiatan Pemilihan Dan Pemberdayaan Duta Wisata Sijunjung	Terpilihnya Uda Uni Duta Wisata Kab. Sijunjung	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terpilihnya Uda Uni Duta Wisata Kab. Sijunjung							3	26	05	2.01	02	
									Festival Ceta Bacorak	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Festival Ceta Bacorak							3	26	05	2.01	05	
									Education Tourism For Student	Pelatihan dasar SDM kepariwisataan bagi masyarakat, guru, dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Education Tourism For Student							3	26	05	2.01	03	
								Kegiatan Festival Kuliner	Jumlah Festival	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Festival kuliner yang dilaksanakan							3	26	05	2.01	05	
								Kegiatan Persiapan Pembentukan Zona Kratif di Kabupaten Sijunjung	Pembuatan DED	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Pembuatan DED	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah	Jumlah prasarana yang dirancang	Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	04	2.01	01	
									Jumlah tempat rancangan	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah tempat rancangan							3	26	04	2.01	01	
								Kegiatan Lomba fotografi	Jumlah pembinaan atau pelatihan	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pembinaan atau pelatihan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang dibina dan difasilitasi per tahun	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3	26	05	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Pembinaan atau pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	Jumlah pembinaan atau pelatihan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pembinaan atau pelatihan							3	26	05	2.01	06	
								Kegiatan partisipasi dan peningkatan jejaring keriasama	Jumlah festival produk pelaku ekonomi kreatif	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah festival produk pelaku ekonomi kreatif							3	26	05	2.01	05	
								Kegiatan parade seni kratif Kabupaten	Jumlah parade	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah parade							3	26	05	2.01	05	
								Kegiatan gelar karya pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di tingkat Kabupaten	Jumlah penyelenggaraan	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Jumlah penyelenggaraan							3	26	05	2.01	05	
								Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif														
								Kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Dan Keamanan Lingkungan	Jumlah pemuda pelopor yang terseleksi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor dan JPI	Penyadaran , Pemberdayaan , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda dan kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	02	2.01	01	
									Jumlah peserta JPI yang diutus ke Provinsi / Nasional	Peningkatan Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah peserta JPI yang diutus ke Provinsi / Nasional							2	19	02	2.01	08	
								Jumlah Bimtek Kepemudaan		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah Bimtek Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan					2	19	02	2.02	02	
								Kegiatan Seleksi, Pelatihan Serta KaryaWisata Paskibraka	Jumlah peserta pelatihan dan karyawisata paskibraka	Peningkatan Kepemimpinan , Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pelatihan atau karyawisata Paskibraka	Penyadaran , Pemberdayaan , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda dan kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	02	2.01	08	
										Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi								2	19	02	2.01	07	
								Kegiatan kursus pembinaan dasar dan lanjutan	Jumlah orang yang dibina	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah orang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	04	2.01	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta bimtek, perlombaan even dan peserta perkemahan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah peserta bimtek, perlombaan even dan peserta perkemahan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	02	2.02	02	
								Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	04	2.01	05	
								Kegiatan pendataan potensi kepemudaan	Jumlah potensi pemuda yang didata	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Jumlah potensi pemuda yang didata	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi pemuda yang diberdayakan dan dikembangkan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	02	2.02	02	
								Kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepemudaan							2	19	02	2.02	02	
								Kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah pemuda yang dilatih	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang dilatih	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	Jumlah fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda dan kepemudaan					2	19	02	2.01	08	
								Kegiatan Jambore kepanduan	Jumlah peserta jambore	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta jambore	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	04	2.01	05	
								Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Porprov Sumbar														
								Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	Jumlah senam kesegaran jasmani	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Senam Kesegaran Jasmani	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi yang dilaksanakan	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peringkat Kabupaten Sijunjung pada Porprov Sumbar	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	03	2.05	01	
								Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabor Yang Dipertandingkan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Cabor Yang Dipertandingkan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kejuaraan olah raga yang diselenggarakan					2	19	03	2.02	01	
									Jumlah lomba SKJ antar Nagari	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah lomba SKJ antar Nagari	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah olah raga rekreasi yang dilaksanakan					2	19	03	2.05	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Pemasalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat	Jumlah kegiatan olahraga pada Hari Jadi Kabupaten dan Peringatan hari besar Nasional	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Senam Kesegaran Jasmani		Jumlah olah raga rekreasi yang dilaksanakan					2	19	03	2.05	01	
								Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	Jumlah cabor	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembentukan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatih olah raga serta sekolah olah raga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Jumlah cabor	Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan					2	19	03	2.01	01	
										Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olah raga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar								2	19	03	2.01	02	
								Kegiatan pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah cabang olahraga yang unggul	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang unggul	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Organisasi Olahraga					2	19	03	2.04	02	
								Kegiatan pembinaan cabang olahraga potensi di tingkat daerah	Jumlah cabang yang dibina	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					2	19	03	2.04	02	
										Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						2	19	03	2.03	01	
										Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						2	19	03	2.03	02	
										Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						2	19	03	2.03	03	
										Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						2	19	03	2.03	04	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah cabang yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						2	19	03	2.03	05	
								Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah orang yang berdedikasi dan berprestasi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang berdedikasi dan berprestasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah insan olahraga yang berprestasi					2	19	03	2.03	04	
								Program Peningkatan Saprass Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak/ terstandarisasi														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah bulan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga (kolam renang)	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olah raga kab/kota	Jumlah bulan pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga (kolam renang)	Pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Jumlah cabor yang dibina dan dikembangkan	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang layak/ terstandarisasi	Urusan Pemerintahan Bidang Kemudahan dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	2	19	03	2.01	03	
								Kegiatan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga							2	19	03	2.01	03	
								Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Kegiatan Monitoring Evaluasi, Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi, perencanaan dan pelaporan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi, perencanaan dan pelaporan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan.							3	26	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan.							3	26	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan.							3	26	01	2.01	04	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun dan movev yang dilakukan.							3	26	01	2.01	05	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan Operasional Jasa Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Operasional Jasa Perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2.03	02	
								Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2.03	01	
										Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	03	
										Penyediaan jasa perbaikan pelatan kerja	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	10	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	11	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	14	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	15	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	18	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur					3	26	01	2.04	02	
										Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						3	26	01	2.04	05	
										Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan					3	26	01	2.02	04	
										Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.02	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.02	07	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.02	09	
								Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2.03	06	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyelenggaraan administrasi perkantoran terpenuhi							3	26	01	2.03	08	
										Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor							3	26	01	2.03	35	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														
								Kegiatan peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /Lulus Diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2.04	09	
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat							3	26	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat							3	26	01	2.04	11	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
							Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	3	26	01	2,02	01		
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum					3	26	01	2,03	04		
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																							
1	15					WAJIB	PERPUSTAKAAN																
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; tingkat keselarasan renstra terhadap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
									Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Renstra dengan RPJMD; Tingkat keselarasan Renja dengan RPJMD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; tingkat keselarasan renstra terhadap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Lakip OPD yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik; persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti / lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi; tingkat keselarasan renstra terhadap	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
9	99	01					Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran															
9	99	01	20				Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	01		
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	7		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	11	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	13	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	Jumlah bulan pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03		
9	99	01	21					Penunjang operasional Jasa perkantoran	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Administrasi umum	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	02	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Administrasi umum	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	08	
										Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Pns	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Administrasi umum	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	04	
										Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Administrasi Keuangan	jumlah bulan pelaksanaan jasa perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.01	01	
9	99	02						Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik														
9	99	02	45					Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	06	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	09	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	14	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	25	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	35	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	38	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	39	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Administrasi umum	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dengan kondisi baik	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.03	40	
9	99	05						Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi yang sesuai dengan tupoksi														
9	99	05	91					Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pelatihan,kursusdiklat dalam rangka peningkatan SDM Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pelatihan,kursusdiklat dalam rangka peningkatan SDM Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah orang yang mengikuti bimtek pelatihan,kursusdiklat dalam rangka peningkatan SDM Aparatur	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi yang sesuai dengan tupoksi	Perpustakaan	Wajib	X	X	01	2.04	09	
1	15					WAJIB	PERPUSTAKAAN																
1	15	15						Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam setahun														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	15	15	03					Pemeliharaan bahan pustaka	Jumlah Buku / Bahan Pustaka Yang Dipelihara	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Buku / Bahan Pustaka Yang Dipelihara	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten /Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib						
1	15	15	04					Publikasi Budaya Baca	- Jumlah titik layanan perpustakaan keliling - Jumlah paket perpustakaan Hybrid di RTH muaro	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota	- Jumlah titik layanan perpustakaan keliling - Jumlah paket perpustakaan Hybrid di RTH muaro	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	- Jumlah titik layanan perpustakaan keliling - Jumlah paket perpustakaan Hybrid di RTH muaro	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib						
1	15	15	06					Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan	Peningkatan kapasitas Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Peserta Bimtek Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib		2	23	02	2.01	06
1	15	15	07					Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina ,Jumlah Perpustakaan terstandar	1.Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan dasar dan seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan 2.Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten /Kota	1.Jumlah Perpustakaan yang dibina 2.Jumlah perpustakaan yang terstandar	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib						
1	15	15	08					Diklat Penulisan Sastra	Jumlah Guru SLTP dan SD Peserta Diklat	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah Guru SLTP dan SD Peserta Diklat	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Guru SLTP dan SD Peserta Diklat	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib						

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	15	15	05					Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Paket Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Jumlah Kelompok Pencinta Buku di Nagari	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Paket Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Jumlah Kelompok Pencinta Buku di Nagari	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Lomba Pengembangan Minat dan Budaya Baca - Jumlah Kelompok Pencinta Buku di Nagari	Program Pembinaan Perpustakaan	• Jumlah buku perpustakaan yang dipinjamkan dalam setahun, • Jumlah perpustakaan, • Jumlah perpustakaan terstandarkan, • Jumlah anggota perpustakaan, • Jumlah pengunjung perpustakaan / pemustaka dalam	Perpustakaan	Wajib	2	23	02	2.02	01	
						WAJIB	KEARSIPAN																
1	15	16						Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	-Jumlah ASN yang Meningkatkan Pengetahuan kearsipan pertahun -Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dialih mediakan pertahun -Jumlah Arsip Konvensional/Naskah kuno yang														
1	15	16	04					Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Secara Digital	Jumlah Dokumen Arsip/Buku Induk Siswa yang Dialih mediakan	1.penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 2.penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Dokumen Arsip/Buku Induk Siswa yang Dialih mediakan	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Arsip/Buku Induk Siswa yang Dialih mediakan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-Jumlah ASN yang Meningkatkan Pengetahuan kearsipan pertahun -Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dialih mediakan pertahun -Jumlah Arsip Konvensional/Naskah kuno yang	Perpustakaan	Wajib						
1	15	16	03					Pengawasan Kearsipan	Jumlah OPD, Kecamatan dan Bagian Setda Yang Di Audit Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Kecamatan dan Bagian Setda Yang Di Audit Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, Kecamatan dan Bagian Setda Yang Di Audit Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	-Jumlah Arsip daerah yang Dialih mediakan -Jumlah arsip Konvensional yang Dipelihara	Kearsipan	Wajib						
1	15	16	01					Penataan dan Pemeliharaan Arsip naskah Kuno	Jumlah Arsip Naskah Kuno Yang Dipelihara	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih Mediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Arsip Naskah Kuno Yang Dipelihara	Pelestarian Naskah Kuno Milik daerah Kabupaten/kota	Jumlah Arsip Naskah Kuno Yang Dipelihara	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-Jumlah ASN yang Meningkatkan Pengetahuan kearsipan pertahun -Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dialih mediakan pertahun -Jumlah Arsip Konvensional/Naskah kuno yang	Perpustakaan	Wajib	2	23	03	2.01	02	
1	16	15						Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah														
1	16	15	01					Pembinaan Arsip	Jumlah Nagari/Desa Yang Dibina	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Nagari/Desa Yang Dibina	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Nagari/Desa Yang Dibina	Program Pengelolaan Arsip	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Kearsipan	Wajib						

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	16	15	02					Akuisisi Arsip	Jumlah Box/Kotak Arsip Yang Berada Di Depo LKD	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Box/Kotak Arsip Yang Berada Di Depo LKD	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Box/Kotak Arsip Yang terdipil Di Depo LKD	Program Pengelolaan Arsip	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Kearsipan	Wajib						
1	16	15	04					Evaluasi dan Monitoring Kearsipan	Jumlah OPD Yang Arsipnya Dimonitoring dan Dievaluasi	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah OPD Yang Arsipnya Dimonitoring dan Dievaluasi	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Arsipnya Dimonitoring dan Dievaluasi	Program Pengelolaan Arsip	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Kearsipan	Wajib						
1	16	15	07					Lomba Peduli Arsip	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/kota	Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Lomba Pengelolaan Arsip	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	• Persentase SKPD yang menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku • Jumlah box arsip yang berada dalam depo / lembaga kearsipan daerah	Kearsipan	Wajib						
1	16	17						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	• Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan														
1	16	17	02					Sosialisasi Perda Kearsipan	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Kearsipan	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Besifat Tertutup	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Kearsipan	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/ Penyuluhan Tentang Kearsipan	program Perijinan Penggunaan Arsip	• Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan	Kearsipan	Wajib						
1	16	17	06					Bimbingan Teknis Kearsipan	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan daerah kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	• Jumlah dokumen sumber arsip yang diterbitkan	Kearsipan	Wajib						
DINAS PERTANIAN																							
						Pilihan	Pertanian			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan pertanian; 2) Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran; 3) Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik; 4) Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat sesuai kebutuhan jabatan/fungsi;	PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	01	
						Pilihan	Pertanian	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran							PERTANIAN	PERTANIAN						
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	01	
										Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	10	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	11	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	13	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	16	
										Penyediaan bahan makanan dan minuman	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	17	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	18	
								Penunjang operasional Jasa perkantoran	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	03	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	04	
										Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	07	
										Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	08	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	15	
								Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik							PERTANIAN	PERTANIAN						
								Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	06	
										Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	09	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	13	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	28	
										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	22	
										Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	24	
										Pengadaan meubeleur	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	34	
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	32	
										Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	35	
										Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	38	
										Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	40	
										Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak												
										Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional petugas medis veteriner dan paramedis veteriner	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional petugas medis veteriner dan paramedis veteriner	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum		PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2.03	20
										Operasional RPH Kumanis	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor bagi petugas pengawas kesmavet, keur master	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor bagi petugas pengawas kesmavet, keur master	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum				3	27	01	2.03	20
										Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran					PERTANIAN	PERTANIAN						

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penunjang operasional Jasa perkantoran	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	02	
										Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	03	
										Penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	04	
										Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	05	
										Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	06	
										Penyusunan laporan keuangan bulanan/semester	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	07	
										Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	08	
										Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,02	09	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat sesuai kebutuhan							PERTANIAN	PERTANIAN						
								Peningkatan sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	09	
										Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	11	
								Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran									3	27				
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Pengadaan pakaiana dinas beserta perlengkapan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	01	
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	10	
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak									3	27				

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang tersedia	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan yang tersedia	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	03	
									Jumlah peningkatan kompetensi SDM Kewan	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peningkatan kompetensi SDM Kewan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,04	09	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah petugas IB yang mengikuti bimbingan rakor	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah petugas IB yang mengikuti bimbingan rakor	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur										
								Program Penyusunan Rencana Strategis	Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD							PERTANIAN	PERTANIAN						
								Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah dokumen pendukung Restra	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung Restra	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	01	
								Program Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan pertanian							PERTANIAN	PERTANIAN	3	27				
								Pengelolaan statistik pertanian	1) Jumlah laporan statistik pertanian yang dilaporkan	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan statistik pertanian yang dilaporkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	03	
									2. Jumlah sampel hasil ubinan yang diambil	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan statistik pertanian yang dilaporkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	05	
									3. Jumlah data statistik pertanian yang dibenahi	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah data statistik pertanian yang dibenahi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	05	
								Peningkatan nilai tambah daya saing pemasaran hasil pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian														
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Jumlah pelaksanaan pencatatan /survey harga pasar komoditi perkebunan	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan pencatatan /survey harga pasar komoditi perkebunan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	05	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey dan informasi harga pasar komoditi peternakan	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan survey dan informasi harga pasar komoditi peternakan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi					3	27	01	2,01	05	
								Program Pemantapan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan pertanian														
								Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	1. Jumlah laporan rutin dinas yang dilaporkan	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan rutin dinas yang dilaporkan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									2. Jumlah proposal kegiatan APBN/DAK yang dibuat	Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah proposal kegiatan APBN/DAK yang dibuat	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	02	
									3. Jumlah pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	05	
									4. Jumlah laporan kinerja dinas yang akuntabel	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah laporan kinerja dinas yang akuntabel	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	01	2,01	03	
								Peningkatan nilai tambah daya saing pemasaran hasil pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1) Produktivitas padi 5,7 ton/ha; 2) Produksi karet 63.566 ton; 3) Produksi manggis 1.589 ton; 4) Produksi Daging Sapi/Kerbau; 5) Produksi Telur Ayam Ras								
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Jumlah kegiatan TP/APBN yang fasilitasi/terdampin gi	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah kegiatan TP/APBN yang fasilitasi/terdampin gi	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah kelompok tani penerima manfaat yang telah menggunakan sarana pendukung pertanian sesuai teknis anjuran			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana panen pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan yang disediakan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah sarana dan prasarana panen pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan yang disediakan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian														
								Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah kelompok yang menyusun RDKK pupuk bersubsidi	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok yang menyusun RDKK pupuk bersubsidi	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
									Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengadaan alat dan mesin pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
									Jumlah pendampingan penggunaan kartu tani	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan kartu tani	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
								Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian	Jumlah alsintan yang layak operasi	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah alsintan yang layak operasi	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
									Jumlah pengelolaan alsintan yang dapat dilakukan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pengelolaan alsintan yang dapat dilakukan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
								Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Terpadu Partisipatif/IPDMI P	Jumlah sarana penyimpanan benih yang tersedia	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah sarana penyimpanan benih yang tersedia	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2,01	02	
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi 5,7 ton/ha; produksi karet 63.566 ton, produksi manggis 1.589 ton														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Jumlah pelaksanaan pendampingan kegiatan TP APBN	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pendampingan kegiatan TP APBN	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan gerakan tanam serentak	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan gerakan tanam serentak	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Luas pengembangan benih padi inbrida	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas pengembangan benih padi inbrida	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
								Pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan	Jumlah pembinaan dan monitoring peredaran benih tanaman pangan	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pembinaan dan monitoring peredaran benih tanaman pangan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
									Jumlah kegiatan perbenihan tanaman pangan yang terdukung	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah kegiatan perbenihan tanaman pangan yang terdukung	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
								Pengembangan Benih Unggul Tanaman Berkebuduhan	Jumlah mesin pompa air yang tersedia	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah mesin pompa air yang tersedia	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah sumur bor yang dibuat	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah sumur bor yang dibuat	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
								Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Berkebuduhan	Luas areal peremajaan karet	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas areal peremajaan karet	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Luas pelaksanaan OPL karet	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas pelaksanaan OPL karet	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Luas pembangunan kebun kakao	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas pembangunan kebun kakao	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Luas pembangunan kebun kopi robusta	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas pembangunan kebun kopi robusta	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan studi teknis budidaya komoditi perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan studi teknis budidaya komoditi perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi bidang perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
									Jumlah dukungan operasional peremajaan sawit	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah dukungan operasional peremajaan sawit	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	Jumlah dukungan pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah dukungan pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan monitoring peredaran benih hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pelaksanaan monitoring peredaran benih hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan demplot perbenihan hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan demplot perbenihan hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
									Jumlah studi teknis perbenihan kelapa sawit/tanaman perkebunan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah studi teknis perbenihan kelapa sawit/tanaman perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
								Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Jumlah kegiatan APBN TP Hortikultura yang terdampangi	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah kegiatan APBN TP Hortikultura yang terdampangi	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan sosialisasi program/kegiatan tanaman hortikultura	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi program/kegiatan tanaman hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Luas pengembangan cabe merah	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Luas pengembangan cabe merah	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan sosialisasi registrasi manggis	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi registrasi manggis	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan demplot cabe merah	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah pelaksanaan demplot cabe merah	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	02	
									Jumlah pertemuan penyusunan sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pertemuan penyusunan sasaran tanam dan panen tanaman hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.01	01	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil komoditi peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil komoditi peternakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yang dikelola			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
									Jumlah pelaksanaan study teknis mengenai pengolahan hasil komoditi peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan study teknis mengenai pengolahan hasil komoditi peternakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah pembangunan kandang untuk kontes ternak tk kabupaten	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembangunan kandang untuk kontes ternak tk kabupaten	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
									Jumlah pelaksanaan koordinasi pembangunan pertanian	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan koordinasi pembangunan pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah pendampingan program APBN dan APBD	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pendampingan program APBN dan APBD	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
									Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan kawasan komoditi peternakan	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pengembangan kawasan komoditi peternakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi 5,7 ton/ha; produksi karet 63.566 ton, produksi manggis 1.589 ton							PERTANIAN	PERTANIAN						
								Pengembangan Benih Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas penangkaran benih padi	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luas penangkaran benih padi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
									Jumlah sarana produksi benih padi yang tersedia	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah sarana produksi benih padi yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah hasil pemurnian varietas unggul lokal	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah hasil pemurnian varietas unggul lokal	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
									Jumlah perbaikan varietas yang tersedia	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah perbaikan varietas yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
										Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah perbaikan varietas yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
									Jumlah jenis bibit hortikultura yang tersedia	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah jenis bibit hortikultura yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
										Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah jenis bibit hortikultura yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
									Jumlah uji padi/galur terhadap hama dan penyakit	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	Jumlah perbaikan varietas yang tersedia	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah pembelian GKP benih/benih lulus padi	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembelian GKP benih/benih lulus padi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
										Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah pembelian GKP benih/benih lulus padi	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan	Jumlah pelaksanaan forum perbenihan tanaman pangan	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan forum perbenihan tanaman pangan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan	Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
									Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan	Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi perbenihan tanaman pangan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Pengembangan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Jumlah kecambah kelapa sawit yang tersedia	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kecambah kelapa sawit yang tersedia	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Jumlah bibit karet stump mata tidur yang tersedia	Jumlah bibit karet stump mata tidur yang tersedia	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit karet stump mata tidur yang tersedia	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Jumlah bibit pinang yang tersedia	Jumlah bibit pinang yang tersedia	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit pinang yang tersedia	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Jumlah bibit kopi yang tersedia	Jumlah bibit kopi yang tersedia	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit kopi yang tersedia	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Jumlah bibit sawit lanjutan yang terpelihara	Jumlah bibit sawit lanjutan yang terpelihara	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit sawit lanjutan yang terpelihara	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Jumlah karet pada kebun entres karet yang terpelihara	Jumlah karet pada kebun entres karet yang terpelihara	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah karet pada kebun entres karet yang terpelihara	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Jumlah kakao pada kebun entres kakao yang terpelihara	Jumlah kakao pada kebun entres kakao yang terpelihara	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kakao pada kebun entres kakao yang terpelihara	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumlah pemeliharaan lanjutan kebun contoh /koleksi	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pemeliharaan lanjutan kebun contoh /koleksi	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	Jumlah pelaksanaan eksplorasi dan determinasi pohon induk varietas unggul lokal	Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pelaksanaan eksplorasi dan determinasi pohon induk varietas unggul lokal	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
									Jumlah penyediaan benih tanaman hortikultura	Pemanfaatan SDG hewan /tanaman	Jumlah penyediaan benih tanaman hortikultura	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan	Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan	Pemanfaatan SDG hewan /tanaman	Jumlah penyediaan bibit tanaman perkebunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
									Jumlah pertemuan penangkar benih tanaman perkebunan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pertemuan penangkar benih tanaman perkebunan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Jumlah produk durian lokal yang dilombakan	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan /Tanaman	Jumlah produk durian lokal yang dilombakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	01	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi /Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah pengadaan frozen semen	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pengadaan frozen semen	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan N2 Cair	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pengadaan N2 Cair	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan peralatan IB	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pengadaan peralatan IB	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan peralatan kandang	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pengadaan peralatan kandang	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten /Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.02	02	
								Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah pelaksanaan inventarisir kelompok pengembangan usaha peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan /Tanaman	Jumlah pelaksanaan inventarisir kelompok pengembangan usaha peternakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.02	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah kontes ternak tk provinsi sumbar yang diikuti	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kontes ternak tk provinsi sumbar yang diikuti	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.02	02	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah pengadaan pakan ternak	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengadaan pakan ternak	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan obat-obatan ternak	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan ternak	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pelaksanaan koordinasi pembibitan peternakan di luar daerah	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan koordinasi pembibitan peternakan di luar daerah	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan ternak besar	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengadaan ternak besar	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan ternak kecil	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengadaan ternak kecil	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah pengadaan ternak unggas	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pengadaan ternak unggas	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	03	
								Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah pelaksanaan inventarisir kelompok pengembangan usaha peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan inventarisir kelompok pengembangan usaha peternakan	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	
									Jumlah kontes ternak tk provinsi sumbar yang diikuti	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah kontes ternak tk provinsi sumbar yang diikuti	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.02	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah revolving ternak	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah rovolving ternak	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah jenis ternak yang berkualitas			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.03	01	
								Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah pengadaan bibit HPT	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah pengadaan bibit HPT	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah produksi HPT yang dihasilkan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.06	02	
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak														
								Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pengawasan dan peredaran mutu obat hewan	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran obat hewan	Jumlah pengawasan dan peredaran mutu obat hewan	Pengawasan obat Hewan diTingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obt hewan yang dilakukan di tingkat pengecer			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	02	2.04	02	
								Peningkatan nilai tambah daya saing pemasaran hasil pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian								
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Jumlah pertemuan pasar lelang karet yang dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah pertemuan pasar lelang karet yang dilaksanakan	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pelaksanaan dukungan pengembangan prasarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	03	
									Jumlah pelaksanaan study teknis pasar lelang	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah pelaksanaan study teknis pasar lelang	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pelaksanaan dukungan pengembangan prasarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	03	
									Jumlah fasilitasi pembangunan pasar lelang	Pembangunan , rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah fasilitasi pembangunan pasar lelang	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian														
								Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Pertanian	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Pembangunan , rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	03	
									Jumlah LP2B yang terwujud	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Jumlah LP2B yang terwujud	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pelaksanaan dukungan pengembangan prasarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	01	
									Jumlah kegiatan IPDMIP yang terdampingi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah kegiatan IPDMIP yang terdampingi	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pelaksanaan dukungan pengembangan prasarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	03	
									Jumlah cetak sawah yang dimanfaatkan	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Jumlah cetak sawah yang dimanfaatkan	Pengembangan prasarana pertanian	Jumlah pelaksanaan dukungan pengembangan prasarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Pertanian	Jumlah embung (DAK) yang dibangun	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan embung pertanian	Jumlah embung (DAK) yang dibangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	02	
									Jumlah damparit (DAK) yang dibangun	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan dam parit	Jumlah damparit (DAK) yang dibangun	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	04	
									Jumlah SID kegiatan TP PSP dan Bapem yang dibuat	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah SID kegiatan TP PSP dan Bapem yang dibuat	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah kegiatan Bapem dan TP yang didampingi	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah kegiatan Bapem dan TP yang didampingi	Pengembangan prasarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.01	03	
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan tingkat kematian ternak														
								Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pembangunan unit pelayanan keswan	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan ruang inap/rawat pasien	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
								Operasional UPTD Keswan Kiliran Jao	Jumlah pembangunan gudang dan tempat jaga paramedis veteriner	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan gudang dan tempat jaga paramedis veteriner	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah pembangunan ruang inap/rawat pasien	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah pembangunan ruang inap/rawat pasien	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
								Program Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing	Persentase pemotongan hewan yang ASUH (aman, sehat utuh, dan halal) di RPU/RPA/RPH														
								Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	Jumlah rehab batu bronjong di RPH Kumanis	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah rehab batu bronjong di RPH Kumanis	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah pembangunan drainase di RPH Kumanis	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah pembangunan drainase di RPH Kumanis	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
								Operasional RPH Kumanis	Jumlah pembangunan pagar di RPH Kumanis	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah pembangunan pagar di RPH Kumanis	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah inap RPH Kumanis	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan rumah potong hewan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana rumah inap RPH Kumanis	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
								Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah ternak yang terjual di pasar ternak														
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan	Jumlah rehab kandang ternak di pasar ternak Palangki	Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah rehab kandang ternak di pasar ternak Palangki	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah pembangunan los kandang ternak pasar ternak Kumanis		Jumlah pembangunan los kandang ternak pasar ternak Kumanis					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	
									Jumlah rigid beton pasar ternak Palangki		Jumlah rigid beton pasar ternak Palangki					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani								PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07		
							Peningkatan Kemampuan Lembaga Benvuluban	Rehab BPP Kamang Baru	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Rehab BPP Kamang Baru	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah paket pelaksanaan pembangunan sarana pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	03	2.02	09
							Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VENTERINER	1) Menurunnya tingkat kematian ternak; 2) Persentase pemotongan hewan yang ASUH (aman, sehat utuh, dan halal) di RPU/RPA/RPH								
							Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Persentase penurunan kematian ternak	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase penurunan kematian ternak	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan vaksinasi pada hewan , pengendalian dan penanggulangan PHMS/Z				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
							Operasional UPTD Keswan Muaro	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
								Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
							Operasional UPTD Keswan Palangki	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
								Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
							Operasional UPTD Keswan Kiliran Jao	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi jembarana pada sapi bali	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01
								Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Surveilans, Identifikasi dan Pemetaan Penyakit Hewan	Jumlah informasi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi penyakit hewan menular strategis dan zoonosis	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	02	
								Jumlah monitoring vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah monitoring vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Jumlah monitoring vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01	
								Jumlah monitoring vaksinasi jembrana pada sapi bali	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah monitoring vaksinasi jembrana pada sapi bali	Jumlah monitoring vaksinasi jembrana pada sapi bali	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01	
								Jumlah monitoring vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah monitoring vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Jumlah monitoring vaksinasi SE pada sapi dan kerbau	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01	
								Surveilans, Identifikasi dan Pemetaan Penyakit Hewan	Jumlah pengiriman sampel penyakit asal hewan yang diuji di labor	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengiriman sampel penyakit asal hewan yang diuji di labor	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.01	01	
								Pemeliharaan dan Pencegahan Penyakit Hewan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keswan bagi petugas medis veteriner dan paramedis veteriner	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keswan bagi petugas medis veteriner dan paramedis veteriner	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan sertifikat venteriner, pengawasan hewan/produk hewan penerapan persyaratan teknis pelaku usaha pangan asal hewan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.02	03	
								Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan biosekuriti di Pasar Ternak Kumanis dan RPH Kumanis	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan biosekuriti di Pasar Ternak Kumanis dan RPH Kumanis	Jumlah pemeriksaan kesehatan hewan dan biosekuriti di Pasar Ternak Kumanis dan RPH Kumanis	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.02	03	
								Operasional UPTD Keswan Palangki	Jumlah pemeriksaan kesehatan dan biosekuriti hewan di lingkup UPTD Puskesmas dan UPTD Pasar	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan kesehatan dan biosekuriti hewan di lingkup UPTD Puskesmas dan UPTD Pasar	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.02	03	
								Operasional UPTD Keswan Muaro	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa pemeriksaan labor di Lab Type C, pelayanan jasa keswan dan Kesmavet			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah operasional UPTD Puskesmas Muaro	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah operasional UPTD Puskesmas Muaro	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Operasional UPTD Keswan Palangki	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota						3	27	04	2.03	02	
									Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah operasional UPTD Puskesmas palangki	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah operasional UPTD Puskesmas palangki	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Operasional UPTD Keswan Kiliran Jao	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah vaksinasi rabies pada hewan penular rabies	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah jenis pelayanan kesehatan hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah operasional UPTD Puskesmas Kiliran Jao	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah operasional UPTD Puskesmas Kiliran Jao	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Surveilans, Identifikasi dan Pemetaan Penyakit Hewan	Jumlah pelaporan unit pelayanan keswan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelaporan unit pelayanan keswan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
									Jumlah hasil surveilans penyakit hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah hasil surveilans penyakit hewan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak														
								Operasional UPTD Keswan Muaro	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Operasional UPTD Keswan Palangki	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Operasional UPTD Keswan Kiliran Jao	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pemeriksaan sampel di laboratorium tipe C	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.03	02	
								Program Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing	Persentase pemotongan hewan yang ASUH (aman, sehat utuh, dan halal) di RPU/RPA/RPH														
								Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	Jumlah pengujian sampel produk hewan	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengujian sampel produk hewan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan yang memiliki sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner) ;			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.04	02	
									Jumlah unit usaha yang diberi sosialisasi dan penertiban pemotongan hewan di luar RPH	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang diberi sosialisasi dan penertiban pemotongan hewan di luar RPH	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.04	01	
									Jumlah unit usaha yang memiliki sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV)	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang memiliki sertifikasi nomor kontrol veteriner (NKV)	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2.04	01	
								Program Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh dan Berdaya Saing	Persentase pemotongan hewan yang ASUH (aman, sehat utuh, dan halal) di RPU/RPA/RPH														
								Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Asuh	Jumah operasional RPH Kumanis	Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumah operasional RPH Kumanis	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah pemotongan yang Asuh dan Kesrawan			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2,05	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah pengawasan ante mortem/post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan	Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah pengawasan ante mortem/post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan qurban	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2,05	01	
									Jumlah pengawasan ante mortem/post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan	Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Jumlah pengawasan ante mortem/post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan diluar RPH	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2,05	01	
									Persentase pengawasan ante mortem dan post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan	Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Persentase pengawasan ante mortem dan post mortem higiene, sanitasi dan penerapan kesrawan pemotongan hewan di RPH Kumanis	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	04	2,05	01	
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1) Produktivitas padi 5,7 ton/ha; 2) Produksi karet 63.566 ton; 3) Produksi manggis 1.589 ton; 4) Produksi Daging Sapi/Kerbau; 5) Produksi Telur Ayam Ras	PERTANIAN	PERTANIAN						
								Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana perlindungan tanaman	Jumlah pelaksanaan gerakan pengendalian hama terpadu yang dilaksanakan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelaksanaan gerakan pengendalian hama terpadu yang dilaksanakan	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	Jumlah bencana pertanian kabupaten/kota yang tertanggulangi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
									Jumlah calon biang agens hayati yang potensial untuk pengendalian hama terpadu (PHT)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah calon biang agens hayati yang potensial untuk pengendalian hama terpadu (PHT)	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan demonstrasi perbanyakan agens hayati	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelaksanaan demonstrasi perbanyakan agens hayati	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
								Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Pertanian	Jumlah lahan yang dijamin dalam AUPP	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah lahan yang dijamin dalam AUPP	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	02	
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi 5,7 ton/ha; produksi karet 63.566 ton, produksi manggis 1.589 ton														
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	Jumlah pelaksanaan monitoring perlindungan tanaman hortikultura	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelaksanaan monitoring perlindungan tanaman hortikultura	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan	Jumlah studi teknis perlindungan tanaman perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Panga, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah studi teknis perlindungan tanaman perkebunan	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
								Jumlah pelaksanaan pertemuan kelompok brigade karet	Jumlah pelaksanaan pertemuan kelompok brigade karet	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Panga, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah bulan operasional administrasi perkantoran yang dilayani	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
								Jumlah pelaksanaan pertemuan kelompok brigade kakao	Jumlah pelaksanaan pertemuan kelompok brigade kakao	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Panga, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelaksanaan pertemuan kelompok brigade kakao	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
								Jumlah pelaksanaan pengamatan OPT tanaman perkebunan	Jumlah pelaksanaan pengamatan OPT tanaman perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Panga, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pelaksanaan pengamatan OPT tanaman perkebunan	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	05	2.01	01	
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1) Produktivitas padi 5,7 ton/ha; 2) Produksi karet 63.566 ton; 3) Produksi manggis 1.589 ton								
								Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah kios yang terawasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kios yang terawasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah izin usaha pertanian yang terawasi			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03	
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi 5,7 ton/ha; produksi karet 63.566 ton, produksi manggis 1.589 ton														
								Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Jumah pelaksanaan sosialisasi ISPO kelapa sawit	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	Jumah pelaksanaan sosialisasi ISPO kelapa sawit	Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya usahanya dalam daerah kabupaten/kota				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	06	2.01	03	
								Peningkatan nilai tambah daya saing pemasaran hasil pertanian	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1) Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian; 2) Nilai Tukar Petani; 3) Jumlah kelompok usaha pertanian dengan agribisnis	PERTANIAN	PERTANIAN					
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan	Jumlah pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan	Peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelatihan pengolahan hasil tanaman pangan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya			PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah sharing informasi teknologi pengolah jerami padi sawah	Jumlah sharing informasi teknologi pengolah jerami padi sawah	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah sharing informasi teknologi pengolah jerami padi sawah	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman pangan yang dipasarkan	Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman pangan yang dipasarkan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman pangan yang dipasarkan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
										Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah penurunan kehilangan hasil (losses) padi pertanian	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura	Jumlah pelatihan pasca panen komoditi hortikultura	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	1. Jumlah pelatihan pasca panen komoditi hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman hortikultura	Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman hortikultura	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	2. Jumlah pelaksanaan promosi produk olahan tanaman hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah sharing informasi pasca panen komoditi tanaman hortikultura	Jumlah sharing informasi pasca panen komoditi tanaman hortikultura	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5. Jumlah sharing informasi pasca panen komoditi tanaman hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
								Jumlah kelompok pengolahan pasca panen hasil tanaman hortikultura yang dibina	Jumlah kelompok pengolahan pasca panen hasil tanaman hortikultura yang dibina	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	6. Jumlah kelompok pengolahan pasca panen hasil tanaman hortikultura yang dibina	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengembangan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman perkebunan	Jumlah pelaksanaan pelatihan pasca panen tanaman perkebunan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan pasca panen tanaman perkebunan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil tanaman perkebunan	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil tanaman perkebunan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil tanaman perkebunan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah pertemuan kemitraan usaha komoditi perkebunan yang dilaksanakan	Jumlah pertemuan kemitraan usaha komoditi perkebunan yang dilaksanakan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pertemuan kemitraan usaha komoditi perkebunan yang dilaksanakan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian/perkebunan	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian														
								Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Pertanian	Jumlah kelompok P3A yang aktif kembali	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelompok P3A yang aktif kembali	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah teknologi pengairan yang diserap masyarakat	Jumlah teknologi pengairan yang diserap masyarakat	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah teknologi pengairan yang diserap masyarakat	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah pelaksanaan pelatihan alsintan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan alsintan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah pembinaan manajemen UPJA	Jumlah pembinaan manajemen UPJA	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pembinaan manajemen UPJA	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Jumlah operator alsintan yang terbina/terlatih	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah operator alsintan yang terbina/terlatih	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Terpadu Partisipatif / IPDMIP	Jumlah kelompok yang meningkatkan kelembagaan dan pengetahuannya melalui pembinaan staf lapangan program IPDMIP	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelompok yang meningkatkan kelembagaan dan pengetahuannya melalui pembinaan staf lapangan program IPDMIP	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Jumlah kelompok pelaksana Sekolah Lapang Tani	Jumlah kelompok pelaksana Sekolah Lapang Tani	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelompok pelaksana Sekolah Lapang Tani	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah penyuluh berkinerja baik melalui forum berbagi pengalaman antar petani	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah penyuluh berkinerja baik melalui forum berbagi pengalaman antar petani	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Tersedianya buku catatan usaha tani	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedianya buku catatan usaha tani	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	03	
									Jumlah kategori penghargaan penyuluh yang tercapai	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah kategori penghargaan penyuluh yang tercapai	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah kategori penghargaan petani yang tercapai	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kategori penghargaan petani yang tercapai	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan demonstrasi alsintan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan demonstrasi alsintan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Program Peningkatan Produksi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi 5,7 ton/ha; produksi karet 63.566 ton, produksi manggis 1.589 ton														
								Pengelolaan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan	2. Jumlah kelompok penangkar benih yang terbina	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	2. Jumlah kelompok penangkar benih yang terbina	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									6. Jumlah pelaksanaan SLPHT Padi	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	6. Jumlah pelaksanaan SLPHT Padi	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									7. Jumlah pelaksanaan field day di lokasi SL PHT Padi	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	7. Jumlah pelaksanaan field day di lokasi SL PHT Padi	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									9. Jumlah pelaksanaan bimtek penangkar benih tanaman pangan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	9. Jumlah pelaksanaan bimtek penangkar benih tanaman pangan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									5. Jumlah pelaksanaan fieldday perbenihan tanaman pangan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	5. Jumlah pelaksanaan fieldday perbenihan tanaman pangan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
										Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	5. Jumlah pelaksanaan fieldday perbenihan tanaman pangan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman hortikultura	6. Jumlah pelaksanaan SL PHT manggis	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	6. Jumlah pelaksanaan SL PHT manggis	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									7. Jumlah pelaksanaan bimtek OPT hortikultura	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	7. Jumlah pelaksanaan bimtek OPT hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									9. Jumlah pelaksanaan bimtek perbenihan hortikultura	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	9. Jumlah pelaksanaan bimtek perbenihan hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengelolaan Perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan	2. Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih perkebunan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	2. Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan penangkar benih perkebunan	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									3. Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis okulasi tanaman karet	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	3. Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis okulasi tanaman karet	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									4. Jumlah pelaksanaan pelatihan pembibitan kelapa sawit	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	4. Jumlah pelaksanaan pelatihan pembibitan kelapa sawit	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									6. Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis sambung pucuk kakao	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	6. Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis sambung pucuk kakao	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									7. Jumlah pelaksanaan SLPHT tanaman karet	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	7. Jumlah pelaksanaan SLPHT tanaman karet	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									8. Jumlah pelaksanaan SLPHT tanaman kakao	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	8. Jumlah pelaksanaan SLPHT tanaman kakao	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									13. Jumlah pelaksanaan pelatihan trichoderma conii	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	13. Jumlah pelaksanaan pelatihan trichoderma conii	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									17. Jumlah pelaksanaan temu lapang	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	17. Jumlah pelaksanaan temu lapang	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	2. Jumlah pelaksanaan SL GAP Manggis	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	2. Jumlah pelaksanaan SL GAP Manggis	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									4. Jumlah pelaksanaan bimtek cabe merah	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	4. Jumlah pelaksanaan bimtek cabe merah	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									6. Jumlah pelaksanaan bimtek penerapan GAP/SOP manggis	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	6. Jumlah pelaksanaan bimtek penerapan GAP/SOP manggis	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									8. Jumlah pelaksanaan field day tanaman hortikultura	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	8. Jumlah pelaksanaan field day tanaman hortikultura	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Peningkatan produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	5. Jumlah pelaksanaan bimtek tanaman perkebunan (karet, kakao, kelapa sawit)	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	5. Jumlah pelaksanaan bimtek tanaman perkebunan (karet, kakao, kelapa sawit)	Pelaksanaan penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan	1. Produksi Daging Sapi/Kerbau; 2. Produksi Telur Ayam Ras														
								Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil komoditi peternakan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan pengolahan hasil komoditi peternakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan pembinaan kelembagaan peternak, permodalan dan investasi usaha, sumber daya manusia dan manajemen usaha serta rekomendasi izin dan perizinan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan kelembagaan peternak, permodalan dan investasi usaha, sumber daya manusia dan manajemen usaha serta rekomendasi izin dan perizinan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pertemuan kemitraan usaha peternakan	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pertemuan kemitraan usaha peternakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dibina	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah kelompok tani yang dibina	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah peternak yang mengikuti bimtek	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah peternak yang mengikuti bimtek	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan kontes ternak tk kabupaten	Pengembangan kapasitas dan kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah pelaksanaan kontes ternak tk kabupaten	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani														
								Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan	Jumlah kelompok tani yang meningkat ke kelas lanjut	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang meningkat ke kelas lanjut	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan pembinaan / pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan pembinaan / pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan penilaian petani berprestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan penilaian petani dan penyuluh berprestasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Database kelompok yang update	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Database kelompok yang update	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pengadaan sarana Kostra Tani (DAK)	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah pengadaan sarana Kostra Tani (DAK)	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	03	
									Jumlah pelaksanaan rembug tani tk kabupaten	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan rembug tani tk kabupaten	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
								Optimalisasi Pelaksanaan Penyuluhan	Jumlah penyuluh pertanian berprestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh pertanian berprestasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah kelompok tani dengan kelas lanjut	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani dengan kelas lanjut	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan temu usaha tk kabupaten	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan temu usaha tk kabupaten	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan temu aplikasi teknologi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan temu aplikasi teknologi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan temu karya petani	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan temu karya petani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah demplot penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah demplot penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan rembug tani kabupaten	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan rembug tani kabupaten	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Jumlah pelaksanaan Sekolah lapang	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan Sekolah lapang	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
									Operasional BPP kecamatan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Operasional BPP kecamatan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
								Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah kelompok usaha pertanian dengan agribisnis terintegrasi			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07			
								Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh berprestasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh berprestasi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah teknologi yang diadopsi penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah teknologi yang diadopsi penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan temu karya penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan temu karya penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan temu teknis tk kabupaten	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	jumlah pelaksanaan temu teknis tk kabupaten	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan seminar penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan seminar penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan workshop tim penilai kredit point	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan workshop tim penilai kredit point	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan penilaian kredit point penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan penilaian kredit point penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan evaluasi kinerja penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
									Jumlah pelaksanaan supervisi penyuluh	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan supervisi penyuluh	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	01	
								Pemantapan Sistem dan Informasi Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pameran produk dan komoditi unggulan pertanian dalam rangka HUT RI, HUT, Kabupaten, HPS dan Event lainnya	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya pameran produk dan komoditi unggulan pertanian dalam rangka HUT RI, HUT, Kabupaten, HPS dan Event lainnya	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				PERTANIAN	PERTANIAN	3	27	07	2.01	02	
INSPEKTORAT DAERAH																							
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 41 Orang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ASN	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 41 Orang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	04	
								Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran														
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	11	
										Pengadaan pakaiana dinas beserta perlengkapan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA sebanyak 44 orang	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.04	02	
										Penyedian Makanan dan Minuman	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	17	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawatan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	18	
							Penunjang operasional Jasa perkantoran		jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawatan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	02	
									Penyedian Jasa Kebersihan		jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	08	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	7	01	01	2.04	15	
							Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik															
							Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	28		
									Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	30		
									Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	32		
									Pemeliharaan rutin berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	34		
									Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebayak 3 Unit kendaraan dinas	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	20		
									Pengadaan Mebeleur	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanya 25 Unit	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	25		
									Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	22		
									Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara	Administrasi umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan sebanyak 12 Bulan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik	Inspektorat Daerah	Unsur Perawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.03	24		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan														
							Kegiatan monitoring kegiatan penyelenggaraan pemerintahan	terlaksana dan tersedianya laporan monitoring dana desa dan bos dan pelayanan publik	Pemantauan kinerja dan keuangan	terlaksana dan tersedianya laporan monitoring dana desa dan bos dan pelayanan publik	Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase penurunan temuan dalam pengawasan internal	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	03	
							Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Internal secara berkala dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyelenggaraan pengawasan internal	Persentase penurunan temuan dalam pengawasan internal	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.01	01	
							Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Terlaksananya penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda	Asistensi dan pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	01	
							Melaksanakan Pemeriksaan Khusus	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Audit Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Pemeriksaan Khusus	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Persentase penurunan temuan dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.02	01	
							Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Penilaian PMPRB	Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Penilaian PMPRB	Asistensi dan pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	02	
							Pembangunan sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS)	Tersedianya sitem informasi pengawasan	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya sitem informasi pengawasan	Pengelolaan e-government di lingkungan pemerintaha daerah	jumlah Pengelolaan e-government di lingkungan pemerintaha daerah	Aplikasi informatika	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Komunikasi dan Informatika	Wajib non pelayanan dasar	2	16	03	2.02	07	
							Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar (saber pungli)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pungli	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pungli	Asistensi dan Pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	01	
							Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tersedianya Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Pemda	Asistensi dan Pendampingan	Tersedianya Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Pemda	Asistensi dan Pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	02	
							Rencana Aksi Daerah Program Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Laporan RAD PPK, meningkatnya sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah terhadap peraturan Perundang	Asistensi dan Pendampingan	Tersedianya Laporan RAD PPK, meningkatnya sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala Daerah terhadap peraturan Perundang	Asistensi dan Pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan pendampingan dan sistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	02	
							Review Pengadaan Barang dan Jasa, Dana Desa dan Serapan	Terlaksananya review Pengadaan Barang dan Jasa, dana desa dan serapan anggaran	Review Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya review Pengadaan Barang dan Jasa, dana desa dan serapan anggaran	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Persentase penurunan temuan dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.02	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Terlaksananya Pemantauan TLHP	Pemantauan kinerja dan keuangan	Terlaksananya Pemantauan TLHP	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Persentase penurunan temuan dalam pengawasan dengan tujuan tertentu	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	02	2.02	03	
								Asistensi dan fasilitasi Unit Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Unit Pengendalian Gratifikasi	Tindak lanjut pengaduan masyarakat	Terlaksananya Unit Pengendalian Gratifikasi	Asistensi dan pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	01	
								Peningkatan Kababilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Terlaksananya Kegiatan Kababilitas APIP	Asistensi dan Pendampingan	Terlaksananya Kegiatan Kababilitas APIP	Asistensi dan pendampingan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mematuhi peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	01	03	2.02	02	
								Program peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulusan diklat kompetensi teknis pengawasan														
								Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terjadinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa, telaksananya pelatihan kantor sendiri dan pendidikan formal	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terjadinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa, telaksananya pelatihan kantor sendiri dan pendidikan formal	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA sebanyak 15 orang	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulusan diklat kompetensi teknis pengawasan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.04	11	
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terjadinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa, telaksananya pelatihan kantor sendiri dan pendidikan formal	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA sebanyak 15 orang	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulusan diklat kompetensi teknis pengawasan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.04	10	
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terjadinya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa, telaksananya pelatihan kantor sendiri dan pendidikan formal	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA sebanyak 40 orang	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat lulusan diklat kompetensi teknis pengawasan	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.04	09	
								Program peningkatan sistem laporan pencapaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
								Penyusunan laporan keuangan lapran kinerja LKPJ LPPD	Terselenggranya Penyusunan Laporan Keuangan, Lakip, LKPJ, LPPD dan Program Kegiatan Pembangunan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 3 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan	Terselenggaranya Penyusunan RKA perangkat daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.01	02	
										Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan LKPJ dan LPPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 2 Laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.01	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan , Lakip	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sebanyak 1 lan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.01	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan ROPK dan laporan Bulanan Kegiatan	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sebanyak 12 ROPK	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Terselenggaranya Penyusunan Laporan ROPK dan Laporan Semester	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun 12 Laporan Bulanan 1 Laporan Semester	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sebanyak 1 laporan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerinatahan	6	01	01	2.02	09	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																							
						Wajib	Penunjang Kepegawaia n, Pendidikan dan Pelatihan	Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintahan		Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan		Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.02	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	11	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	13	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	18	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.04	05	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	01	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	15	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	06	
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	09	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	14	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	32	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	35	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	39	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	jumlah pelayanan administrasi yang diselesaikan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.03	40	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)														
									2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan														
									3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan														
									4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun														
								Pendidikan dan Pelatihan Struktural Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Pendidikan dan Pelatihan	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	04	02	2.02	07	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Pendidikan dan Pelatihan	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	04	02	2.02	07	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								
								Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pelatihan manajemen kepemimpinan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Pendidikan dan Pelatihan	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	04	02	2.02	07	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai BKPSDM yang mengikuti diklat	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai BKPSDM yang mengikuti diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	1	2.04	11	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai BKPSDM yang mengikuti diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	1	2.04	09		
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun									
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai BKPSDM yang mengikuti diklat	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	1	2.04	10		
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun									
										Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan pemberian izin belajar	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diberikan bantuan tugas belajar dan pemberian izin belajar	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai tugas dan fungsi	Kepegawaian Daerah	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.03	07
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tunjoksi									
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun									

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsi	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsi	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai tugas dan fungsi	Kepegawaian Daerah	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.03	01	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								
								Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai tugas dan fungsi	Kepegawaian Daerah	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.03	01	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								
								Pendidikan dan Pelatihan Bendaharawan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat bendaharawan	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah PNS yang mengikuti diklat bendaharawan	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai tugas dan fungsi	Kepegawaian Daerah	1. Persentase pejabat struktural yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi manajerial sesuai jenjang jabatan (eselon)	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.03	01	
															2. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat lulus diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															3. Persentase aparatur Pemda yang memiliki sertifikat mengikuti diklat peningkatan kompetensi teknis sesuai dengan tugas dan fungsi								
															4. Jumlah aparatur Pemda yang mengikuti tugas belajar / izin belajar per tahun								

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti														
									2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun														
							Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalancana karya nyata	Penegakan Disiplin, Pemberian Penghargaan, dan Perlindungan	Jumlah PNS yang menerima penghargaan satyalancana karya nyata	Pembinaan ASN	persentase menurunnya pelanggaran terhadap aturan kepegawaian	Kepegawaian Daerah	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.05	03		
														2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun									
							Penanganan Disiplin ASN	Jumlah kasus yang diselesaikan	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus yang diselesaikan	Pembinaan ASN	persentase menurunnya pelanggaran terhadap kode etik pegawai	Kepegawaian Daerah	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.05	01		
														2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun									
									Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Jumlah kasus yang diselesaikan	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang sesuai tugas dan fungsi	Kepegawaian Daerah	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.03	10		
														2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun									
							Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD															
							Penyusunan Renstra tahun 2021-2025	Jumlah dokumen Renstra yg diselesaikan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rensta yg diselesaikan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Penunjang Urusan Pemerintahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.01	01		
							Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu															
								2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu															
								3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian															
								4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi															
								5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian															
							Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah pelantikan pejabat dan pengambilan sumpah PNS	Pengembangan Karir ASN	jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan karir	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.04	01		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu							
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian							
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi							
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian							
								Penempatan PNS	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Jumlah PNS yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	08
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu							
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian							
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi							
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian							
								Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah PNS yang naik pangkat	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang naik pangkat	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	10
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu							
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian							
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi							
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian							
								Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta Ujian Dinas Tk. I, II dan Penyesuaian Ijazah	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Peserta Ujian Dinas Tk. I, II dan Penyesuaian Ijazah	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	10
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu							
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian							
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi							

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian								
							Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah PNS yang di up date data kepegawaiannya	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah PNS yang di up date data kepegawaiannya	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase data ASN yang akurat	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.01	03		
														2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu									
														3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian									
														4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi									
														5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian									
									Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah PNS yang di up date data kepegawaiannya	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Persentase data ASN yang akurat	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	10		
														2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu									
														3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian									
														4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi									
														5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian									
							Penyusunan Formasi PNS	Jumlah kebutuhan formasi formasi PNS	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah kebutuhan formasi formasi PNS	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	01		
														2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu									
														3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian									
														4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi									
														5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian									
							Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah ASN yang diterima sesuai formasi	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang diterima sesuai formasi	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	01		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu								
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian								
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi								
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian								
								Pengelolaan Administrasi Pensiun dan Status Kepegawaian	Jumlah SK pensiun, Karis/ Karsu dan Karpeg yang selesai pengurusannya	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah SK pensiun yang selesai pengurusannya	Administrasi Kepegawaian	jumlah layanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan	Kepegawaian Daerah	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	02	2.02	04	
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu								
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian								
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi								
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian								
								Pembinaan Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang kepegawaian	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang kepegawaian	Pembinaan ASN	persentase menurunnya pelanggaran terhadap aturan kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	1. Persentase penyelesaian administrasi kenaikan pangkat tepat waktu	Kepegawaian	Penunjang Urusan Pemerintahan	5	03	01	2.04	10	
															2. Persentase penyelesaian administrasi pensiun tepat waktu								
															3. Persentase tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian								
															4. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi								
															5. Persentase PNS yang mengikuti sosialisasi dan memahami peraturan tentang kepegawaian								
BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																							
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.02	01	
										Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah bulan terpenuhinya jaminan pemeliharaan kesehatan	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	04	
								Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan penunjang operasional administrasi perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.02	06	
										Penyusunan laporan keuangan bulanan /semesteran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.02	07	
										Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.02	09	
										Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	11	
										Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	12	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	1.03	15	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	1.03	16	
										Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	18	
								Kegiatan penunjang operasional jasa perkantoran	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	08	
										Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	09	
								Program peningkatan dan pemeliharaan sapsras aparatur	Persentase sapsras aparatur dengan kondisi baik														
								Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan sapsras kantor	Persentase sapsras yang dipelihara dan diadakan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapsras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	13	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	14	
										Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	22	
										Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	1.03	24	
										Pengadaan mebeleur	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	30	
										Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	32	
										Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	34	
										Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah bulan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sapras aparatur dengan kondisi baik	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.03	35	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														
								Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	01	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	02	
										Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	05	
										Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	10	
										Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, persentase pegawai yang melanggar disiplin	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur memiliki sertifikat lulus diklat, peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.04	11	
								Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu														
								Kegiatan penyusunan renstra perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.01	01	
										Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	Jumlah dokumen yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.01	02	
								Kegiatan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun	Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.01	03	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.01	04	
										Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	01	2.01	05	
								Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan RKPD Perubahan	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten Kota	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat keseasaran APBD terhadap RPJPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	01	
										Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang disusun, jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pembangunan Daerah yang disusun	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat keseasaran APBD terhadap RPJPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.02	01	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang disusun, jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pembangunan Daerah yang disusun	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat keseasaran APBD terhadap RPJPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.02	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen RKPD yang disusun, jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pendanaan Pembangunan Daerah yang disusun	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.02	03	
							Penyusunan RPJMD 2021-2025	Jumlah dokumen yang disusun	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten Kota	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	01		
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	02		
									Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang kabupaten /Kota	Jumlah dokumen berita acara musrenbang RKPD, jumlah dokumen berita acara musrenbang	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	03		
									Koordinasi Pelaksaaan Forum Perangkat daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Ranwal RPJMD; Jumlah dokumen Berita Acara Forum RPJMD lintas Perangkat Daerah; Jumlah dokumen Berita Acara Forum RPJMD lintas Perangkat Daerah; Jumlah dokumen Berita Acara Konsultasi Publik	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	04		
									Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat daerah dan Rencana Pembangunan lainnya	Jumlah dokumen Berita Acara Verifikasi Renja Perangkat Daerah 2022; Jumlah dokumen Berita Acara Verifikasi Renja Perubahan Perangkat Daerah 2021; Jumlah dokumen Berita Acara Verifikasi Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	05		
									Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen berita acara FGD RPJMD 2021-2026	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	06		
							Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah e-database tahunan	Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen e-database tahunan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; tingkat kesearasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	07		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengamanan data informasi pembangunan daerah	Jumlah dokumen e-database tahunan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD; tingkat keseasaran APBD terhadap RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	08	
										Pengumpulan data dan analisis data dan pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen e-database tahunan	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan renstra terhadap RPJMD; tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD; tingkat keseasaran APBD terhadap RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.01	09	
								Sistim informasi monitoring evaluasi RKPd Kabupaten Sijunjung	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah monitoring hasil pelaksanaan RKPd, jumlah monitoring pengendalian dan evaluasi data TP, DAK dan APBD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.03	01	
								Penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan dana APBD Provinsi	Dokumen usulan perencanaan, pengendalian dan evaluasi Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus dan dana APBD Provinsi	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd, jumlah dokumen usulan perencanaan pengendalian dan evaluasi dana TP, DAK dan APBD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.03	02	
										Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd; Jumlah dokumen usulan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dana TP, DAK dan APBD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.03	03	
										Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd; Jumlah dokumen usulan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dana TP, DAK dan APBD Provinsi	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	02	2.03	04	
								Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPd) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen SDG; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.01	01	
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPd) Bidang Pemerintahan	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPd	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.01	03	
								Evaluasi SDG's	Jumlah dokumen SDG's yang disusun	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pemerintahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.01	03	
								Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi AMPL dan persentase usulan lokasi Pamsimas yang diverifikasi oleh panitia kemitraan; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.02	01	
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.02	02	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.02	03	
									PAP Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM)	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi AMPL dan persentase usulan lokasi pamsimas yang diverifikasi oleh panitia kemitraan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi AMPL dan persentase usulan lokasi Pamsimas yang diverifikasi oleh panitia kemitraan; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.02	01
									Koordinasi Sub Bidang Perencanaan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan penganggaran Gender Analysis Pathway (GAP); Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.03	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.03	02	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.03	03	
								Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan penganggaran Gender Analysis Pathway (GAP)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan (RPJMPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan penganggaran Gender Analysis Pathway (GAP); Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra PD Lingkup Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Jumlah fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	01	03	2.03	01	
								Kegiatan sub bidang perencanaan perdagangan, perindustrian, serta koperasi usaha kecil dan menengah	Tingkat keselarasan renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup perdagangan, perindustrian, serta koperasi usaha kecil dan menengah	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor TKPK; Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD 2022-2026); Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	01	
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup perdagangan, perindustrian, serta koperasi usaha kecil dan menengah	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup perdagangan, perindustrian, serta koperasi usaha kecil dan menengah	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber Daya Mineral; Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	03	
								Kegiatan sub bidang perencanaan transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal serta energi sumber daya mineral	Tingkat keselarasan renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal serta energi sumber daya mineral	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor TKPK; Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD 2022-2026); Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	01	
								Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal serta energi sumber daya mineral	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	02		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal serta energi sumber daya mineral	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber Daya Mineral; Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	03	
								Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah pelaksanaan rakor TKPK	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang perekonomian	Jumlah Pelaksanaan Rakor TKPK; Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD 2022-2026); Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	01	
								Jumlah laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD); Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	02		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019															
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
										Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2022 - 2026		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Modal serta Energi Sumber Daya Mineral; Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.01	03	
												Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang ekonomi kreatif	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian, serta koperasi usaha kecil dan menengah	fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.02	01	
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi kreatif	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.02	02	
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang ekonomi kreatif	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Perdagangan, Perindustrian serta Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang ekonomi kreatif	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.02	03	
												Kegiatan sub bidang perencanaan pembangunan daerah pertanian dan lingkungan hidup	Tingkat keselarasan renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup pertanian dan lingkungan hidup	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.03	01	
												Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup pertanian dan lingkungan hidup	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup pertanian dan lingkungan hidup	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.03	02
												Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup pertanian dan lingkungan hidup	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya alam	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup pertanian dan lingkungan hidup	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya alam	Program perencanaan perekonomian dan sumber daya alam	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	04	2.03	03
												Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Program IPDMIP		Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.01	02
										Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Pertanian dan Lingkungan Hidup; Jumlah Laporan Koordinasi RPJMD	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang sumber daya air dan lingkungan hidup	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.01	03
								Kegiatan koordinasi sub bidang perencanaan pekerjaan umum dan penataan ruang	Tingkat keselarasan renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang kebinamargaan dan perhubungan	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	01
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan dan perhubungan	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan; Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	02
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup pekerjaan umum dan penataan ruang	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan dan perhubungan	Jumlah Dokumen Usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan; Jumlah Dokumen Usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	03
								Kegiatan koordinasi sub bidang perencanaan komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan perhubungan	Tingkat keselarasan renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan perhubungan	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang kebinamargaan dan perhubungan	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan perhubungan	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan dan perhubungan	Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan move penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	02	
									Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup komunikasi dan informasi, persandian, statistik dan perhubungan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kebinamargaan dan perhubungan	Jumlah Dokumen Usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Komunikasi dan Informasi, Persandian, Statistik dan Perhubungan; Jumlah Dokumen Usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan move penyusunan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang kebinamargaan dan perhubungan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.02	03	
								Kegiatan koordinasi sub bidang perencanaan perumahan dan kawasan permukiman	Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra perangkat daerah lingkup perumahan dan kawasan permukiman	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Dokumen rencana penanganan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; Dokumen review rencana pembangunan investasi jangka menengah; Laporan hasil koordinasi penataan ruang daerah; Tingkat keselarasan Renja terhadap Renstra Perangkat Daerah lingkup Perumahan dan Kawasan	Fasilitasi dan move penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.03	01	
								Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja perangkat daerah lingkup perumahan dan kawasan permukiman	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Laporan hasil pengelolaan simpul jaringan data spasial; Tingkat keselarasan PPAS terhadap Renja Perangkat Daerah lingkup Pekerjaan Umum dan Penataan	Fasilitasi dan move penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.03	02		
								Jumlah dokumen usulan perencanaan DAK, APBD Provinsi dan TP lingkup perumahan dan kawasan permukiman	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Usulan perencanaan DAK, APBD Propinsi dan TP lingkup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi dan move penyusunan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD; Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD: Tingkat keselarasan APBD terhadap RKPD	Perencanaan	Penunjang urusan pemerintahan	5	01	05	2.03	03		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipe domani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah														
								Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah bulan koordinasi penelitian dan pengembangan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah bulan koordinasi penelitian dan pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kajian litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipedom ani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	05	02	2.01	12	
										Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah bulan koordinasi penelitian	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kajian litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipedom ani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	05	02	2.01	1	
								Penyusunan Dokumen Kelitbangan	Jumlah dokumen kajian kelitbangan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	jumlah dokumen kajian	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil kajian litbang bidang Sosial dan Kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipedom ani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	05	02	2.02	6	
										Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	jumlah dokumen kajian	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian litbang bidang Ekonomi dan Pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipedom ani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	05	02	2.03	2	
								Penguatan Inovasi daerah	Jumlah inovasi pembangunan daerah	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen kajian	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan /dipedom ani dalam penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan daerah	Perencanaan	Unsur penunjang Urusan Pemerintahan	5	05	02	2.04	3	
BADANG KEUANGAN DAN ASET DAERAH																							
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.02	01	
										Penyediaanaa Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	04	
								Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Administrasi Umum		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.02	05	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Administrasi Umum		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.02	06	
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Administrasi Umum		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.02	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Administrasi Umum		Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	01	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	10	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	14	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	17	
										Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	18	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	24	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas /Operasional	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	35	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	38	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	40	
									Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04		
									Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	01	
									Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	04	
									Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	05	
									Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	09	
									Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	10	
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan operasional administrasi yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	2	01	2.04	11	
																	Unsur penunjang urusan pemerintahan						
							Penunjang operasional Jasa perkantoran	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.01	01	
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.01	05	
									penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	02	
									Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	04	
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	06	
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	07	
									Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	08	
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan		5	02	01	2.03	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bulan operasional Jasa perkantoran yang dilayani	Administrasi umum		Penunjang urusan pemerintahan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	01	2.03	15
															1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		Unsur penunjang urusan pemerintahan					
															1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		Unsur penunjang urusan pemerintahan					
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		Unsur penunjang urusan pemerintahan					
								Program Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah						1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan					
									2. Nilai Pendapatan asli daerah						1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan					
										Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	01
										Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	02
										Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	03
										Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	04
			15	01				Penyusunan tentang APBD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	05
										Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	06
										Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	07
										Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	08
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	09
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	10
										Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen anggaran yang disusun	Koordinasi dan penyusunan Rncana Anggaran Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.01	11

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	2	2	2.02		
										Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	2	2	2.02	01	
										Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	2	2	2.02	02	
										Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	2	2	2.02	03	
										Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	04	
										Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SP2D		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	05	
										Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	06	
										Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	07	
										Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	08	
										Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SP2D)		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	09	
										Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.02	10	
										Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03		
										Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	02
										Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	05
										Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	06
										Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	07
										Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	08
										Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	09
										Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	10
										Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	11
										Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Pengelolaan keuangan daerah	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	02	2.03	12
										PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03		
										Pengelolaan Barang Milik Daerah				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	
										Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	01
										Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	03
										Penatausahaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	05
										Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	07

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	08	
										Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan , Pemanfaatan , Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	09	
										Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	10	
										Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	03	2.01	13	
										PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04			
										Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02		
										Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	01	
										Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	02	
										Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	03	
										Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	04	
										Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	05	
										Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	08	
										Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	09	
										Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Keuangan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	5	02	04	2.02	11	
SEKRETARIAT DAERAH																							
								BELANJA TIDAK LANGSUNG		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen urusan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan pemerintahan	4	01	01	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	04	
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	07	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	11	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	14	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	16	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.04	02	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	02	
								Penunjang operasional administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dam Kepegawaian	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	01	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	01	
								Penunjang Operasional Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Pengelolaan Perencanaan	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Perencanaan Dan Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Program Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	01	
										Pengelolaan Keuangan	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Perencanaan Dan Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Program Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penatausahaan Pelaporan	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Perencanaan Dan Keuangan	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Program Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	03
								Penunjang Operasional staf Ahli Bupati	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Administrasi Umum	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	1
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik													
								Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit pengadaan mobil jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	19
										Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas / operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	20
								Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan	Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	23
								Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	24
										Pengadaan Mebeluer	Jumlah paket terselenggaranya pengadaan peralatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	24
								Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	26
										Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan	Jumlah bulan terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	36
								Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah unit terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Jumlah unit terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	27
										Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Jumlah unit terselenggaranya pemeliharaan rumah dinas	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	37
								Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah paket terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah paket terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	28
										Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah paket terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	38
								Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan jabatan	Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	29
										Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	39
								Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	30

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	40	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah persentase terselenggaranya peningkatan dan pemeliharaan sarana kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah terpeliharanya peralatan gedung kantor	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	35	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	Jumlah persentase terselenggaranya peningkatan dan pemeliharaan sapras rumah jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah terpeliharanya peralatan rumah jabatan/dinas	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.03	33	
								Penunjang operasional penyelenggaraan rumah tangga KTDH/WAKTDH	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan harian rumah tangga KTDH/WKTDH	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan harian rumah tangga KTDH/WKTDH	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Administrasi Umum	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	03	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Jumlah persentase meningkatnya kinerja aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah persentase meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan Disiplin dsan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.04	09	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.04	10	
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang urusan Pemeintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.04	11	
								Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah persentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Administrasi Umum	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.01	01	
								Perayaan Hari-hari Besar Nasional / Daerah	Jumlah hari besar nasional/daerah	Penataan Administrasi pemerintahan	Jumlah hari besar nasional/daerah	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti /lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah persentase meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah persentase meningkatnya kinerja aparatur	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.04	09	
								Pembinaan Evaluasi dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan	Jumlah camat yang mengikuti kompetensi	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah camat yang mengikuti kompetensi	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat mengikuti/lulus diklat peningkatan kompetensi teknis yang sesuai dengan tupoksi	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	02	
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Pemda dan Nilai LPPD														
								Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Terlaksananya penyusunan LKJIP Setda tahun 2020	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan LKJIP Setda tahun 2020 dan IKU Setda Tahun 2021-2026	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP Pemda dan Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.02	06	
								Kegiatan Koordinasi Penyusunan LPPD	Ketepatan waktu penyampaian laporan	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan	Adminstrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai AKIP Pemda dan Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	03	
								Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati														
								Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat	Jumlah pertemuan audiensi dengan tokoh masyarakat	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah Bulan terselenggaranya kegiatan operasional	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	17	
								Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Jumlah paket kunjungan pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen	Pengelolaan Rumah Tangga	Jumlah paket kunjungan pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	17	
								Fasilitasi Pelayanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan kepala daerah yang difasilitasi sesuai dengan keprotokolan	Program Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	01	
								Fasilitasi Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dan APKASI	Jumlah rapat koordinasi pemerintah daerah	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah rapat koordinasi pemerintah daerah	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.04	03	
								Pelantikan dan Pisah Sambut KDH/ WKDH	Jumlah pelantikan dan pisah sambut	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah pelantikan dan pisah sambut	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan kedinasan bupati dan wakil bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	03	
								Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Terbentuknya penanganan kasus pengaduan masyarakat serta terlayannya masyarakat/aparat ur yang membutuhkan konsultasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terbentuknya penanganan kasus pengaduan masyarakat serta terlayannya masyarakat/aparat ur yang membutuhkan konsultasi	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	02	
								Bantuan hukum untuk rakyat miskin	Terwujudnya peningkatan supremasi untuk masyarakat miskin serta terlaksananya pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin baik secara litigasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terwujudnya peningkatan supremasi untuk masyarakat miskin serta terlaksananya pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin baik secara litigasi	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	02	
								Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya														
								Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlaksananya tertib hukum kepada aparat dan masysrakat /masyarakat peduli HAM dan Desa Sadar Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan serta terlaksananya tertib hukum kepada aparat dan masysrakat /masyarakat peduli HAM dan Desa Sadar Hukum	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	02	
								Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Tercapainya penataan peraturan perundang-undangan serta adanya produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Terciptanya produk hukum nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya kajian dan evaluasi produk hukum daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	01	
								Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Terciptanya produk hukum nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya kajian dan evaluasi produk hukum daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	01	
								Publikasi peraturan perundang-undangan	Agar aparat dan masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tersedianya website JDIIH, dokumentasi dan informasi	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Agar aparat dan masyarakat mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tersedianya website JDIIH, dokumentasi dan informasi hukum	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-	Terciptanya produk hukum nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya kajian dan evaluasi produk hukum daerah	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Terciptanya produk hukum nagari sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terlaksananya kajian dan evaluasi produk hukum daerah	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.03	01	
								Bimbingan Teknis Legal Drafting	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kemampuan aparatur negara dalam pembuatan	Fasilitasi Penyusunan produk Hukum Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kemampuan aparatur negara dalam pembuatan produk hukum	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan amanat peraturan yang diatasnya	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.04	11	
								Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah bulan publikasi dan promosi melalui media massa, majalah, baliho, panflet dan spanduk														
								Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pendokumentasian terhadap kegiatan pimpinan daerah	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan dan tugas pimpinan	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan kepala daerah yang difasilitasi sesuai dengan keprotokolan	Program Administrasi Umum	Jumlah bulan publikasi dan promosi melalui media massa, majalah, baliho, panflet dan spanduk	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	02	
								Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Daerah	Meningkatnya ketersediaan dan penyampaian informasi yang dibutuhkan pimpinan daerah	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah informasi yang disediakan untuk mendukung kegiatan pimpinan	Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan kepala daerah yang difasilitasi sesuai dengan keprotokolan	Program Administrasi Umum	Jumlah bulan publikasi dan promosi melalui media massa, majalah, baliho, panflet dan spanduk	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.03	03	
											Jumlah penyampaian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan arahan pimpinan												
								Program Pelayanan Kehidupan Beragama	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan														
								MTQ Tingkat Provinsi	Khafilah yang dilatih dan dikirim	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Khafilah yang dilatih dan dikirim	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
								Safari Ramadhan	Jumlah mesjid atau musholla yang mendapat kunjungan tim dafari ramadhan	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Jumlah mesjid atau musholla yang mendapat kunjungan tim dafari ramadhan	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
								Pelatihan Pengelola Masjid dan Penilaian Masjid Teladan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan mesjid agung istiqlal dan pelatihan pengelola mesjid	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan mesjid agung istiqlal dan pelatihan pengelola mesjid	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
								Kegiatan Wirid Bulanan Hari-hari Besar Islam dan kegiatan keagamaan lainnya	Jumlah pelaksanaan wirid dan hari besar islam	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Jumlah pelaksanaan wirid dan hari besar islam	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitasi, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Kegiatan Fasilitas Keberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Sijunjung	Terfasilitasinya keberangkatan dan kepulangan jemaah haji	Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Terfasilitasinya keberangkatan dan kepulangan jemaah haji	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	03	
								Pembinaan Rumah Tahfidz	Terbina dan terfasilitasinya rumah tahfidz	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Terbina dan terfasilitasinya rumah tahfidz	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
								Pembinaan dan Pemberdayaan Guru TPQ/TPSQ dan Lembaga Didikan Subuh	Terbinanya imam, khatib, garim dan guru TPQ/TPSQ	Fasilitasi pengelolaan bina mental dan spiritual	Terbinanya imam, khatib, garim dan guru TPQ/TPSQ	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	01	
								Fasilitasi dan Pembinaan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan BKMT	Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan BKMT	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	03	
								Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan koordinasi kesejahteraan masyarakat														
								Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah	Terlaksananya pelatihan guru UKS dan pembinaan UKS	Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan guru UKS dan pembinaan UKS	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pembinaan dan koordinasi kesejahteraan masyarakat	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	02	
								Kegiatan Monitoring Bantuan Sosial Pendidikan Keagamaan BAZ dan Sosial Kemasyarakatan Lainnya	Terlaksananya fasilitasi dan monitoring bantuan sosial, keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya	Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Terlaksananya fasilitasi dan monitoring bantuan sosial, keagamaan dan sosial kemasyarakatan lainnya	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pembinaan dan koordinasi kesejahteraan masyarakat	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	02	
								Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Zakat	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan zakat	Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan zakat	Evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah fasilitas, koordinasi, evaluasi dan monitoring kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan pelayanan kehidupan beragama yang dilaksanakan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.02	03	
								Program Peningkatan Manajemen Publik	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik														
								Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah fasilitasi pelayanan PATEN	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah fasilitasi pelayanan PATEN	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	02	
								Kegiatan Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi	Terlaksananya bimtek penyusunan rencana aksi 2021-2026	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Jumlah Bimtek penyusunan rencana aksi 2021-2026	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan penataan organisasi sesuai ketentuan	Program Administrasi Umum	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	03	
								Terlaksananya penyusunan perbup road map pemda tahun 2021-2026			Tersusunya Perbup road map pemda tahun 2021-2026												

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Terlaksananya monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pemda tahun 2021		Jumlah monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pemda tahun 2021												
									Terlaksananya penyusunan LKJIP Pemda tahun 2020 dan perjanjian kinerja tahun 2021-2026		Jumlah dokumen yang disusun												
									Terlaksananya penyusunan IKU Pemda tahun 2021-2026		Jumlah dokumen yang disusun												
								Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Unit Kerja Pelayanan Publik	Terlaksananya pembinaan terhadap unit kerja pelayanan publik yang ikut kompetensi inovasi pelayanan publik	Failitasi pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya pembinaan terhadap unit kerja pelayanan publik yang ikut kompetensi inovasi pelayanan publik	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan penataan organisasi sesuai ketentuan	Program Administrasi Umum	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	02	
									Terlaksananya pembinaan dan monitoring pada unit layanan publik		Terlaksananya pembinaan dan monitoring pada unit layanan publik												
									Terlaksananya sosialisasi, fasilitasi penyusunan standar pekayanan publik		Terlaksananya sosialisasi, fasilitasi penyusunan standar pekayanan publik												
								Fasilitasi Pengembangan Penyusunan SOP	Terlaksananya bimtek penyusunan SOP OPD	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Terlaksananya bimtek penyusunan SOP OPD	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan penataan organisasi sesuai ketentuan	Program Administrasi Umum	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	02	
									Terfasilitasinya penyusunan SOP OPD		Terfasilitasinya penyusunan SOP OPD												
								Penguatan ketatalaksanaan Daerah	Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan	Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan penataan organisasi sesuai ketentuan	Program Administrasi Umum	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	02	
								Program Pengembangan Potensi Ekonomi	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun														
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA pertambangan (migas, batubara, mangan, sirtu, emas dll)	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA pertambangan (migas, batubara, mangan, sirtu, emas dll)	Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Jumlah laporan hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.04	03	
									Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA non pertambangan (air, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan energi terbarukan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan)		Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA non pertambangan (air, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan energi terbarukan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan)												

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA pertambangan (migas, batubara, mangan, ~~listrik, energi atom, dll~~)	Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Jumlah laporan hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.04	01
											Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA non pertambangan (air, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan energi terbarukan, lingkungan hidup dan ~~listrik, energi atom, dll~~)											
										Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA pertambangan (migas, batubara, mangan, ~~listrik, energi atom, dll~~)	Pemantauan kebijakan terkait sumber daya alam	Jumlah laporan hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.04	02
											Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDA non pertambangan (air, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan energi terbarukan, lingkungan hidup dan ~~listrik, energi atom, dll~~)											
								Pembinaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pembinaan BUMD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya pembinaan BUMD	Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	01
								Terlaksananya pembinaan BLUD			Terlaksananya pembinaan BLUD											
								Monitoring perkembangan BPR	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Monitoring perkembangan BPR	Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	03
								Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pengendalian inflasi daerah	Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi yang disusun	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	02
								Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase lelang pengadaan barang dan jasa yang memenuhi standar pelayanan													
								Kegiatan Penunjang Operasional Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu	Pengelolaan barang dan jasa	Terlaksananya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara terpadu	Pengadaan barang dan jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase lelang pengadaan barang dan jasa yang memenuhi standar pelayanan	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.03	01
									Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan aplikasi pendukung		Terlaksananya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan aplikasi pendukung											

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Program Penataan kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang memiliki kinerja baik														
								Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru	Terlaksananya perubahan perda SOTK kesbang pol	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Terlaksananya perubahan perda SOTK kesbang pol	Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang telah melaksanakan penataan organisasi sesuai ketentuan	Program Administrasi Umum	Persentase OPD yang memiliki kinerja baik	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	04	2.02	01	
									Terlaksananya bimtek anjab dan ABK		Terlaksananya bimtek anjab dan ABK												
									Terlaksananya evaluasi anjab dan ABK		Terlaksananya evaluasi anjab dan ABK												
									Terlaksananya perubahan perbup OPD tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja pada OPD/UPTD		Terlaksananya perubahan perbup OPD tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi serta tata kerja pada OPD/UPTD												
									Terlaksananya revisi evaluasi jabatan		Terlaksananya revisi evaluasi jabatan												
								Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD														
								Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya renstra Setda 2021-2026	Penyusunan renstra dan renja perangkat daerah	Tersusunnya renstra Setda 2021-2026	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daereah	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	01	2.01	01	
								Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian pembangunan daerah dan ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati														
								Koordinasi dan pengawasan kebijakan produk bersubsidi	Terlaksananya monitoring penyaluran produk bersubsidi (pupuk, BBM, LPG dll)	Pengendalian dan distribusi perekonomian	Terlaksananya monitoring penyaluran produk bersubsidi (pupuk, BBM, LPG dll)	Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan pengendalian pembangunan daerah dan ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	02	
								Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Monitoring penyaluran kredit usaha rakyat	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Monitoring penyaluran kredit usaha rakyat	Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah laporan pengendalian pembangunan daerah dan ketepatan waktu penyampaian LKPJ Bupati	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	03	
									Monitoring perkembangan KPRI Kabupaten Sijunjung		Monitoring perkembangan KPRI Kabupaten Sijunjung												
									Monitoring penyaluran dana CSR perusahaan		Monitoring penyaluran dana CSR perusahaan												
								Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah perjanjian kerjasama														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD)	Ketepatan waktu penyampaian laporan	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.01	03	
								Kegiatan Pembinaan dan Penyusunan Dokumen Administrasi Program dan Kegiatan Pembangunan	Tersusunnya dokumen administrasi program dan kegiatan pembangunan	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Tersusunnya dokumen administrasi program dan kegiatan pembangunan	Administrasi pembangunan	persentase perangkat daerah yang melaksanakan program pembangunan sesuai ROPK	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.02	01	
								Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan	Administrasi pembangunan	persentase perangkat daerah yang melaksanakan program pembangunan sesuai ROPK	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.02	03	
									Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan												
								Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku	Administrasi pembangunan	persentase perangkat daerah yang melaksanakan program pembangunan sesuai ROPK	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.02	02	
								Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah naskah kerjasama antar daerah / provinsi / kementerian / kelembagaan	Fasilitasi kerja sama dalam negeri	Jumlah naskah kerjasama antar daerah / provinsi / kementerian / kelembagaan	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.04	01	
										Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah naskah kerjasama antar daerah / provinsi / kementerian / kelembagaan	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.04	02	
										Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah naskah kerjasama antar daerah / provinsi / kementerian / kelembagaan	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.04	03	
								Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.03	02	
								Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi dan bimtek pengadaan barang dan jasa	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi dan bimtek pengadaan barang dan jasa	Pengadaan barang dan jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	Program perekonomian dan pembangunan	Jumlah perjanjian kerjasama	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	03	2.03	03	
									Terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi pengadaan barang dan jasa dan penanganan masalah kontrak dengan penyedia		Terlaksananya fasilitasi pemberian advokasi pengadaan barang dan jasa dan penanganan masalah kontrak dengan penyedia												
								Program Penataan Daerah Otonomi Baru															

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas dan Inventarisasi nama Rupa Bumi di Wilayah Kab. Sijunjung	Jumlah bangunan rupa bumi	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah bangunan rupa bumi	Administrasi tata pemerintahan	Jumlah dokumen tata pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung urusan Pemerintahan	4	01	02	2.01	02	
SEKRETARIAT DPRD																							
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.02	01	
										Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan ASN	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.02	04	
								Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran														
								Penunjang operasional administrasi perkantoran	Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	10	
										Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	11	
										Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	17	
										Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya Operasional Administrasi Perkantoran	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	02	
								Penunjang operasional Jasa perkantoran	Terlaksananya Operasional jasa Perkantoran	penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Operasional jasa Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	02	
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan Administrasi Keuangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi Keuangan	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	07	
										penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Operasional jasa Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	08	
										penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya Operasional jasa Perkantoran	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	09	
								penyediaan jasa jaminan pelayanan kesehatan	terlaksananya medical check up anggota DPRD	pelaksanaan medical check up DPRD	terlaksananya medical check up anggota DPRD	layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diberikan untuk DPRD	layanan dan administrasi keuangan	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.02	03	
								Penunjang operasional administrasi keuangan	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.01	01	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.01	02
										Penyusunan dokumen evaluasi perangkat daerah	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.01	03
										koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.01	04
										Evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.01	05
										Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Administrasi keuangan	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.02	06
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.02	07
										Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya operasional administrasi keuangan	Administrasi Keuangan	jumlah dokumen, koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.02	09
										Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD Kabupaten Sijunjung	Terpublikasinya kegiatan DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terpublikasinya kegiatan DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.04	03
										Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terpublikasinya kegiatan DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.07	02
										Pelayanan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Untuk Pimpinan DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya Pelayanan Untuk Pimpinan DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.08	01
										Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Terlaksananya Pelayanan Untuk Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.08	02
										Pelaksanaan Undangan DPRD	Terlaksananya Pelayanan Untuk Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jumlah tugas pimpinan DPRD yang difasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terpenuhinya Administrasi perkantoran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.08	03
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.											
										Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD yang dipelihara	Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD yang dipelihara	Administrasi Umum	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	20

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	30	
										Rehabilitasi sedang /berat kendaraan dinas/operasional.	Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD yang dipelihara	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	40	
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD.	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	12	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	06	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	14	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Administrasi Umum	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	16	
										Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	21	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	23	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	24	
										Pengadaan Mobiler	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	26	
										Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	27	
										Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Mobil Jabatan	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	29	
										Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Administrasi Umum	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	30	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	31		
										Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	32		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	33		
										Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	34		
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobiler	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	35		
										Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	36		
										Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Dinas	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	37		
										Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Ketua DPRD	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi umum perkantoran	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	38		
										Pembuatan Landscape DPRD	Terlaksananya pembuatan taman DPRD													
										Penunjang Operasional Penyelenggaraan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Terlaksananya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Terlaksananya Operasional Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Layanan Administrasi DPRD	jumlah administrasi DPRD yang dilayani	Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase Sarana dan Prasarana aparatur dengan kondisi baik.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.01	04
										Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat													
										Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pelatihan Terhadap ASN dan Operator	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pelatihan Terhadap ASN dan Operator	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	09
										Pengadaan Mesin/kartu Absensi	Terlaksananya pengadaan Mesin/kartu Absensi	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase terlaksananya pengadaan mesin /kartu absensi	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan mesin /Kartu Absensi	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	01		
										Pengadaan Paakaian Khusus	Terlaksananya Pengadaan Paakaian Khusus	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pengadaan Pakaian Khusus	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan Pakaian Khusus	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	05		
										Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	10		
										Bimbingan Teknis Implementasi /Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi /Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Bimbingan Teknis implemmentasi /Peraturan Perundang-undangan	Penunjang urusan pemerintahan daerah	jumlah mengikuti bimbingan teknis implementasi / peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.04	11		
										Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti													

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019												
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun													
								Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas untuk anggota DPRD	layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diberikan untuk DPRD	Layanan dan Administrasi Keuangan	1. Persentase kasus pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.02	02
															2. Jumlah PNS yang menerima penghargaan per tahun							
								program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah													
								Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda yang diterbitkan.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Perda yang diterbitkan.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibentuk	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.01	01
										Pembahasan Rancangan Perda	Perda yang diterbitkan.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibentuk	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.01	02
										Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Perda yang diterbitkan.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibentuk	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.01	03
										Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Perda yang diterbitkan.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibentuk	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.01	04
										Penyusunan Tata tertib DPRD.	Perda yang diterbitkan.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibentuk	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.01	05
								Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Terlaksananya hearing dan koordinasi	Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya hearing dan koordinasi	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.05	02
								Kegiatan Reses	Reses yang dilaksanakan	Pelaksanaan Reses	Reses yang dilaksanakan	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.05	03
										Pembahasan KUA dan PPAS	KUA dan PPAS yang disepakati	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah KUA dan PPAS yang di Fasilitasi	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	0	2.02	0
										Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan	KUPA dan PPAS yang disepakati	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah KUPA dan PPAS yang fasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya pembahasan KUPA dan PPAS	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	0	2.02	0
										Pembahasan APBD	APBD yang di syahkan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah APBD yang di fasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya Pembahasan APBD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	0	2.02	0
										Pembahasan APBD Perubahan	APBD Perubahan yang di syahkan	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah APBD Perubahan yang fasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	0	2.02	0
										Pembahasan Pertranggungjawaban APBD	Pertanggungjawaban APBD yang di bahas	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pertanggungjawaban APBD yang di fasilitasi	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	0	0	2.02	0

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Terlaksanannya Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Bidang Infrastruktur	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksanannya Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Bidang Kesejahteraan rakyat Yang dilaksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Bidang Perekonomian	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Bidang Perekonomian yang dilaksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Bidang Perekonomian	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah pengawasan Bidang Sumber daya Alam yang di laksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Terlaksananya Pengawasan TLHP laporan keuangan oleh BPK	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah TLHP laporan Keuangan oleh BPK	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan TLHP Laporan Keuangan oleh BPK	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Anggaran	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Anggaran yang dilaksanakan	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Anggaran	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.03	0
										Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Peningkatann Kapasitas DPRD	Jumlah penuediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.04	0
										Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengingkatanb Kapasitas DPRD	Jumlah terlaksananyaPenyele nggaraan Hubungan Masyarakat	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.04	0
										Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Penyusunan Program Kerja DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Penyusunan Program Kerja DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4.0	2	0	3	2.04	0
										Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah'	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah aspirasi masyarakat yang diserap dan dihimpun	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03		2.05	01
										Penyusunan Kode Etik DPRD	Terlaksananya penyusunan Kode Etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah penyusunan Kode Etik DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyusunan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03		2.06	01
										Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengingkatanb Kapasitas DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Pengawasan Kode Etik DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03		2.06	02
										Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Vertifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama daerah	Pembahasan Kerjasama Daeah	Jumlah fasilitasi, Vetifikasi dan Koordinasi persetujuan Kerja Sama Daerah	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja sama Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03		2.07	01
										Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Pembahasan Kerjasama Daeah	Jumlah penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03		2.07	02
										Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi Ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	Program Layanan dan Administrasi Keuangan .	Persentase Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Kewagaian DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02		2.01	01
										Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	Trlaksananya Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD	Layanan Administrasi DPRD	jumlah administrasi DPRD yang dilayani	Program Layanan dan Administrasi Keuangan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02		2.01	02

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Fasilitas Fraksi DPRD	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Layanan Administrasi DPRD	jumlah administrasi DPRD yang dilayani	Program Layanan dan Administrasi Keuangan.	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.01	03	
										Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Kantor DPRD	Program Layanan dan Administrasi Keuangan.	Persentase terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor DPRD	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.01	05	
										Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	Layanan Administrasi DPRD	jumlah administrasi DPRD yang dilayani	Program Layanan dan Administrasi Keuangan.	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	02	2.01	06	
								Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya BinteK dan Kunjungan Kerja Tim DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya BinteK dan Kunjungan Kerja Tim DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.04	02	
										Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya BinteK dan Kunjungan Kerja Tim DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	03	2.04	05	
								Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah'	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRDKe luar daerah yang dilaksanakan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRDKe luar daerah yang dilaksanakan	Administrasi Umum	jumlah bulan terpenuhinya administrasi keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	4	02	01	2.03	18	
KECAMATAN KAMANG BARU																							
								Kecamatan															
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	05	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	32		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35		
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi													
										Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	09		
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	10		
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11		
										Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan													
										Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja perangkat daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01
										Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01		
										Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal terkait	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07
										Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	08		
										Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	01		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02	
										Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
										Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	04	
										Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05	
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	06	
										fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
										Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
										Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	14	
										fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	01	
										Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	02	
										fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perencanaan dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	10
										fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13
								Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	02
										Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12
										Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17
										Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	02	
										Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	01	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	03	
										Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	01	
										Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01	
										Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	05	
										Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11	
KECAMATAN TANJUNG GADANG																							
								Kecamatan															
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik													
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14		
										Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20		
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	22		
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35		
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi													
										Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparat	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11
										Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan													
										Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja pemerintah daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01
										Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01		
										Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07
										Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	08		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02	
										Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
										Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05	
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	06	
										fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
										Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
										fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	
										fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04	
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan mastarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03	
								Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12	
								Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16	
								Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17	
								Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01	
								Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03	
								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	
								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	03	
								Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01	
								Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11	
KECAMATAN SIJUNJUNG																							
								Kecamatan Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35	
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11	
								Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja pemerintah daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01	
									Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07	
									Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	08	
									Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02	
									Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
									Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05	
									fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
									Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
									fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	
									fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04	
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan mstarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12	
										Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16	
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17	
										Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01	
										Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintah ynag dilimpahkan kepada camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintah ynag dilimpahkan kepada camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	03	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01
										Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	05
										Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11
KECAMATAN LUBUK TAROK																						
								Kecamatan														
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran													
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	05	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	32		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35		
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi													
										Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	09
												Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	10
												Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11
							</																	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
										Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	04	
										Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05	
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	06	
										fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
										Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
										Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	14	
										fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	01	
										Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	02	
										fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	
										Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	10	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	
							Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04		
									Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02		
							Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	02		
									Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03		
									Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12		
									Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16		
									Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17		
									Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18		
							Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01		
									Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	02		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	05	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35	
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11	
								Program Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan														
								Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja perangkat daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07	
										Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	01	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	02	
										Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	
										Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	01	
										Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01	
KECAMATAN KUPITAN																							
								Kecamatan															
								Belanja Tidak Langsung				Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
												Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran		Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
											Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02		
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08		
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12		
										Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13		
										Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28		
										Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30		
										Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34		
										Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35		
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11		
								Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan														

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
									Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja pemerintah daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01	
											Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07		
											Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
											Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perencanaan dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perencanaan dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perencanaan dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09		
											Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04		
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03		
											Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03		
											Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
KECAMATAN KOTO VII																							
								Kecamatan															
								Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	05	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	32	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34	
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35	
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi														
								Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006						PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019																
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	10
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11
								Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan													
								Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	persentase usulan kegiatan hasil musrenbang yang menjadi prioritas kecamatan bersinergi dengan rencana kerja perangkat daerah	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01
										Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01
								Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07
										Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	08
										Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	01
										Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02
										Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03
										Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	04
										Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	06

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
										Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
										Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	14	
										fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	01	
										Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	02	
										fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	
										Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	10	
										fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04	
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	02	
										Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12	
										Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16	
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17	
										Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01	
										Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	02	
										Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	01	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yng dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	03	
										Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	01	
										Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01	
										Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	05	
										Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11	
KECAMATAN SUMPUR KUDUS																							
								Kecamatan Belanja Tidak Langsung		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	01	
										Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS		Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	04	
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran														
								Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	01	
										Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.01	02	
										Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	06	
										Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	07	
										Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.02	09	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	10	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	11	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	17	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	18	
										Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	02	
										Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Persentase terpenuhinya operasional administrasi perkantoran	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	05	
								Penunjang Operasional Jasa Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	02	
									Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan jasa perkantoran	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	08	
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik														
								Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	12	
										Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	13	
										Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	14	
										Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	20	
										Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	22	
										Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	24	
										Pengadaan Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	25	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019														
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	27		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	28		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	30		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	32		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	34		
										Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Persentase sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik	Administrasi Umum	Jumlah pelayanan administrasi yang dilaksanakan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dengan kondisi baik	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.03	35		
										Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi													
										Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	09		
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparat	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	10		
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparat	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas SDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aparat yang mengikuti diklat kompetensi	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	01	2.04	11		
										Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan													
										Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi / Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.01	01		
										Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	01		
										Koordinasi dan fasilitasi seksi pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	07
										Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	08		

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	01	
										Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	02	
										Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	03	
										Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	04	
										Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	05	
										Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	06	
										fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	07	
										Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	08	
										Fasilitasi Kerja Sama Antar desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	14	
										fasilitasi penataan pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa, serta penetapan dan pengesan batas desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi pemerintahan dan kependudukan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	15	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Perekonomian dan pembangunan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	01	
										Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.03	02	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE						URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
										fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	09	
										Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Perekonomian dan pembangunan	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	10	
										fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan musrenbang	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	13	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	04	
										Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	02	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemeritah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	02	
										Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Program pemberdayaan mastarakat desa dan kelurahan	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	03	2.01	03	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	12	
										Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	16	
										Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	17	
										Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	18	

PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006										PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019													
KODE					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
								Koordinasi dan fasilitasi seksi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	01	
								Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	02	
								Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.02	03	
								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	01	
								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	02	
								Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	02	2.04	03	
								Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.01	01	
								Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	04	2.02	01	
								Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah rapat koordinasi dengan forkopimcam	Penyelenggaraan urusan pemerintah umum	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	05	2.01	05	
								Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah Koordinasi dan fasilitasi yang ditindaklanjuti seksi Ketentraman dan Ketertiban	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah bulan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kecamatan	Unsur Kewilayahan	7	01	06	2.01	11	

Muaro Sijunjung, 6 Juli 2020





**PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN SIJUNJUNG
TAHUN 2021**

BAPPPEDA SIJUNJUNG

